PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029

BUPATI SIKKA

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

WAKIL BUPATI SIKKA

SIMON SUBANDI SUPRIADI

RPJMD

KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sikka untuk lima tahun mendatang.

Dokumen ini disusun dengan berbagai pendekatan baik pendekatan teknokratik maupun politik, dengan mengedepankan analisis yang berbasis ilmiah, penggunaan data yang akurat, serta proses yang partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan. Dokumen ini memadukan visi dan misi Pembangunan Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta harapan masyarakat Kabupaten Sikka, sehingga diharapkan dapat menjadi panduan strategis yang responsif terhadap berbagai tantangan dan peluang pembangunan ke depan.

Kami menyadari bahwa pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sikka tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan baik perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat yang telah memberikan masukan, data, serta informasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan dokumen ini.

Semoga Dokumen RPJMD ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendorong terwujudnya Kabupaten Sikka yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kami juga berharap dokumen ini dapat terus disempurnakan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan, serta menginspirasi seluruh elemen daerah untuk terus berinovasi dan berkarya dalam membangun daerah tercinta ini.

Maumere, Agustus 2025

BUPATI SIKKA,

JUVENTUS ERIMA YORIS KAGO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-6
1.4 Maksud dan Tujuan I-8
1.4.1 Maksud I-8
1.4.2 Tujuan I-8
1.5 Sistematika Penulisan I-8

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-79
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-100
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-128
2.2 Gambaran Keuangan Daerah II-220
2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 ..... II-220
2.2.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-234
2.2.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 ..... II-238
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah II-245
2.3.1 Permasalahan Daerah II-245
2.3.2 Isu Strategis II-269

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS III-1
3.1 Visi III-1
3.2 Misi III-2
3.3 Tujuan dan Sasaran III-12
3.4 Lokus Pembangunan Wilayah III-21
3.5 Strategi dan Arah Kebijakan III-22
3.5.1 Strategi III-22
3.5.2 Arah Kebijakan Pembangunan III-52
3.6 Program Prioritas Daerah III-64

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1

4.1. Program Perangkat Daerah IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV-78
4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran IV-78
4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV-82

BAB V PENUTUP V-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan II-1
Tabel 2.2 Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Sikka II-4
Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Sikka II-4
Tabel 2.4 Rata-Rata Tekanan Udara dan Kecepatan Angin di Kabupaten Sikka II-5
Tabel 2.5 Curah Hujan Bulan Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka II-6
Tabel 2.6 Curah Hujan Bulan Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka II-7
Tabel 2.7 Curah Hujan Bulan Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka II-7
Tabel 2.8 Curah Hujan Bulan Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka II-8
Tabel 2.9 Curah Hujan Bulan Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka II-8
Tabel 2.10 Curah Hujan Bulan KecamatanWaigete, Kabupaten Sikka II-9
Tabel 2.11 Curah Hujan Bulan Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka..... II-9
Tabel 2.12 Curah Hujan Bulan Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka..... II-9
Tabel 2.13 Nama Sungai di Kabupaten Sikka II-11
Tabel 2.14 Luas dan Panjang Sungai Berdasarkan Lebar dan Jenis Sungai di Kabupaten Sikka II-12
Tabel 2.15 Inventarisasi Embung di Kabupaten Sikka II-12
Tabel 2.16 Potensi Sumber Mata Air yang Terdapat di Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka II-14
Tabel 2.17 Potensi Sumber Mata Air Yang Terdapat di Kecamatan Mapitara, Bola, Doreng, dan Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka II-15
Tabel 2.18 Potensi Sumber Mata Air Yang Terdapat di Kecamatan Magepanda, Waiblama, dan Kecamatan Nita Kabupaten Sikka II-15
Tabel 2.19 Potensi Sumber Mata Air Yang Terdapat di Kecamatan Paga, Tanamawo, Alok Timur, Weigete dan Kecamatan Lela Kabupaten Sikka II-16
Tabel 2.20 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sikka..... II-17
Tabel 2.21 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sikka..... II-20
Tabel 2.22 Jenis Tanah di Kabupaten Sikka II-23
Tabel 2.23 Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kemampuan dan Kesesuaian Lahan..... II-26
Tabel 2.24 Luas Panen Tanaman Pangan per kapita Kabupaten Sikka II-29
Tabel 2.25 Luas Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Sikka II-29
Tabel 2.26 DDDTLH Air Grid Kabupaten Sikka II-30
Tabel 2.27 Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045..... II-31
Tabel 2.28 DDDTLH Fungsi Lindung Grid Kabupaten Sikka..... II-32
Tabel 2.29 Daya Tampung Permukiman Kabupaten Sikka Tahun 2045 ..... II-33

Tabel 2.30 Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kabupaten Sikka II-34
Tabel 2.31 Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kabupaten Sikka..... II-35
Tabel 2.32 Jasa Lingkungan Penyedia Serat di Kabupaten Sikka..... II-36
Tabel 2.33 Jasa Lingkungan Penyedia Energi di Kabupaten Sikka..... II-37
Tabel 2.34 Jasa Lingkungan Penyediaan Sumber Daya Genetik di Kabupaten Sikka..... II-38
Tabel 2.35 Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir di Kabupaten Sikka..... II-39
Tabel 2.36 Jasa Lingkungan Pencegah dan Perlindungan Bencana di Kabupaten Sikka..... II-40
Tabel 2.37 Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami di Kabupaten Sikka..... II-41
Tabel 2.38 Jasa Lingkungan Pengendalian Hama dan Penyakit di Kabupaten Sikka..... II-42
Tabel 2.39 Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kabupaten Sikka..... II-43
Tabel 2.40 Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Sikka..... II-44
Tabel 2.41 Jasa Lingkungan Fungsi Rekreasi dan Ekowisata di Kabupaten Sikka..... II-45
Tabel 2.42 Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika Alam di Kabupaten Sikka..... II-46
Tabel 2.43 Jasa Lingkungan Pemurnian Air Bencana di Kabupaten Sikka..... II-47
Tabel 2.44 Jasa Lingkungan Pengolahan dan Pengurai Limbah di Kabupaten Sikka..... II-48
Tabel 2.45 Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan di Kabupaten Sikka..... II-49
Tabel 2.46 Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara di Kabupaten Sikka..... II-49
Tabel 2.47 Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer di Kabupaten Sikka..... II-50
Tabel 2.48 Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas atau Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sikka..... II-51
Tabel 2.49 Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-52
Tabel 2.50 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-53
Tabel 2.51 Data Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Sikka dan Provinsi NTT Tahun 2020-2024..... II-53
Tabel 2.52 Data Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, Nasional Tahun 2020-2024..... II-54
Tabel 2.53 Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-55
Tabel 2.54 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-56
Tabel 2.55 Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan di Kabupaten

Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-58
Tabel 2.56 Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-59
Tabel 2.57 Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak Kegiatan, Rencana, dan/atau Program (KRP) di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-59
Tabel 2.58 Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-61
Tabel 2.59 Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-65
Tabel 2.60 Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Sikka Tahun 2024 ..... II-66
Tabel 2.61 Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024 ..... II-67
Tabel 2.62 Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Menurut Rasio Jenis Kelamin Tahun 2024 ..... II-68
Tabel 2.63 Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-69
Tabel 2.64 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sikka Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 ..... II-70
Tabel 2.65 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Sikka Tahun 2024 ..... II-72
Tabel 2.66 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2024 ..... II-72
Tabel 2.67 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-79
Tabel 2.68 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-81
Tabel 2.69 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) II-87
Tabel 2.70 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-89
Tabel 2.71 Data Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel 2.72 Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2.73 Struktur Umur dan Umur Median Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-100
Tabel 2.74 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-101
Tabel 2.75 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-102
Tabel 2.76 Tabel Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-103
Tabel 2.77 Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel 2.78 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-107
Tabel 2.79 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-109
Tabel 2.80 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-110
Tabel 2.81 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Tahun 2022 dan Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID) Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-110
Tabel 2.82 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024 ..... II-111
Tabel 2.83 Kualitas Jembatan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024 ..... II-112
Tabel 2.84 Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024 ..... II-113
Tabel 2.85 Panjang Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024 ..... II-114
Tabel 2.86 Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024 ..... II-115
Tabel 2.87 Kualitas Layanan Transportasi Darat dan Laut di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024 ..... II-115
Tabel 2.88 Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024 ..... II-116
Tabel 2.89 Jumlah RTLH Pesisir dan Pedesaan dan Status Kepemilikan Tanah per Desa Per Kecamatan Sampai dengan Tahun 2025 di Kabupaten Sikka II-117
Tabel 2.90 Data Backlog Kabupaten Sikka Tahun Sampai dengan Tahun 2025 ..... II-121
Tabel 2.91 Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024 ..... II-125
Tabel 2.92 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sikka Tahun 2023-2024 ..... II-126
Tabel 2.93 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-126
Tabel 2.94 Tingkat Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-127
Tabel 2.95 Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran II-127
Tabel 2.96 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-128
Tabel 2.97 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024 ..... II-129
Tabel 2.98 Survei Penilaian Integritas Kabupaten Sikka Tahun 2024 ..... II-131
Tabel 2.99 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 ..... II-134

Tabel 2.100 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-136
Tabel 2.101 Indeks Distribusi Guru Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-137
Tabel 2.102 Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 ..... II-138
Tabel 2.103 Sarana Kesehatan dan Paramedis Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-143
Tabel 2.104 Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-144
Tabel 2.105 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024 ..... II-145
Tabel 2.106 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024 ..... II-146
Tabel 2.107 Indikator Kinerja Satpol PP Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-148
Tabel 2.108 Indikator Kinerja Damkar dan BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-148
Tabel 2.109 Indikator Kinerja Kesbangpol Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-149
Tabel 2.110 Pemberdayaan Sosial untuk SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-149
Tabel 2.111 Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-150
Tabel 2.112 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-151
Tabel 2.113 Tingkat Perlindungan Korban Bencana Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-152
Tabel 2.114 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-153
Tabel 2.115 Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-155
Tabel 2.116 Kinerja Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-159
Tabel 2.117 Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan Per Kapita Per Tahun Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-160
Tabel 2.118 Skor PPH Ketersediaan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-161
Tabel 2.119 Kinerja Pertanahan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024 ..... II-161
Tabel 2.120 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024 ..... II-162
Tabel 2.121 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024 ..... II-163
Tabel 2.122 Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-164
Tabel 2.123 Data Fasilitasi Kerja Sama Desa II-165
Tabel 2.124 Indeks Desa Membangun Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-166
Tabel 2.125 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-167
Tabel 2.126 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-169
Tabel 2.127 Kelompok Koperasi di Kabupaten Sikka II-170
Tabel 2.128 Koperasi di Kabupaten Sikka Berdasarkan Status II-172
Tabel 2.129 Jenis UMKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Sikka Tahun 2023 ..... II-173
Tabel 2.130 Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka II-174
Tabel 2.131 Pertumbuhan Wirausaha di Kabupaten Sikka II-174
Tabel 2.132 Daya Saing UMKM di Kabupaten Sikka II-174
Tabel 2.133 Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan di Kabupaten Sikka II-175
Tabel 2.134 Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 ..... II-176
Tabel 2.135 Nilai Investasi Berdasar Sektor Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-177
Tabel 2.136 Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-179
Tabel 2.137 Kinerja Fokus Seni dan Budaya Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-181
Tabel 2.138 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-183
Tabel 2.139 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024 ..... II-184
Tabel 2.140 Nilai Produksi dan Komoditas Utama Perikanan Tangkap di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2021 (Rupiah) II-186
Tabel 2.141 Armada Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2024 ..... II-187
Tabel 2.142 Jenis Alat Tangkap Perikanan di Kabupaten Sikka II-188
Tabel 2.143 Kinerja Pariwisata Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-189
Tabel 2.144 Data Event/Festival Daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2023 ..... II-189
Tabel 2.145 Jumlah Hotel di Kabupaten Sikka, Kota Kupang, dan Provinsi NTT Tahun 2020-2024 ..... II-190
Tabel 2.146 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-190
Tabel 2.147 Kinerja Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-191
Tabel 2.148 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-191

Tabel 2.149 Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-192
Tabel 2.150 Produksi Tanaman Sayuran Buah Semusim Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-192
Tabel 2.151 Produksi Buah dan Sayuran Tahunan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-193
Tabel 2.152 Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 ..... II-193
Tabel 2.153 Produksi Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-194
Tabel 2.154 Data Populasi Ternak Besar Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-195
Tabel 2.155 Data Populasi Ternak Kecil Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-195
Tabel 2.156 Data Populasi Ternak Unggas Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-196
Tabel 2.157 Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2.158 Data Populasi Hewan Penular Rabies Anjing dan Realisasi Vaksinasi Hewan Penular Rabies Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2.159 Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-198
Tabel 2.160 Jumlah Pasar di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-199
Tabel 2.161 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-200
Tabel 2.162 Kinerja Industri Pengolahan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2023 ..... II-201
Tabel 2.163 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-202
Tabel 2.164 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-202
Tabel 2.165 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-203
Tabel 2.166 Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-203
Tabel 2.167 Kinerja Pengawasan Keuangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-205
Tabel 2.168 Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-208
Tabel 2.169 Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-210
Tabel 2.170 Capaian Indikator Perurusan II-210
Tabel 2.171 Realisasi APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran2020-2024 ..... II-222
Tabel 2.172 Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2024 ..... II-224

Tabel 2.173 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2024 ..... II-228
Tabel 2.174 Realisasi Pembiayan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2024 ..... II-232
Tabel 2.175 Neraca Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-235
Tabel 2.176 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026-2030 ..... II-239
Tabel 2.177 Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026-2030 ..... II-244
Tabel 2.178 Analisis Permasalahan Makro Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka II-246
Tabel 2.179 Analisis Permasalahan Kualitas Pendidikan Kabupaten Sikka II-246
Tabel 2.180 Analisis Permasalahan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sikka II-248
Tabel 2.181 Analisis Permasalahan Kualitas Hidup Layak Masyarakat Kabupaten Sikka II-249
Tabel 2.182 Analisis Permasalahan Kesenjangan Pembangunan Manusia Antargender Kabupaten Sikka II-251
Tabel 2.183 Analisis Permasalahan Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sikka II-252
Tabel 2.184 Analisis Permasalahan Sektor Primer Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sikka II-253
Tabel 2.185 Analisis Permasalahan Sektor Sekunder Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sikka II-255
Tabel 2.186 Analisis Permasalahan Sektor Tersier Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sikka II-257
Tabel 2.187 Analisis Permasalahan Makro Infrastruktur Wilayah Kabupaten Sikka II-259
Tabel 2.188 Analisis Permasalahan Kualitas Aksesibilitas Infrastruktur Kabupaten Sikka II-260
Tabel 2.189 Analisis Permasalahan Masih Rendahnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Sikka II-261
Tabel 2.190 Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sikka II-263
Tabel 2.191 Analisis Permasalahan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sikka II-264
Tabel 2.192 Analisis Permasalahan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Sikka II-265
Tabel 2.193 Analisis Efektivitas Pemerintahan Kabupaten Sikka II-266
Tabel 2.194 Analisis Permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sikka II-267
Tabel 2.195 Analisis Permasalahan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Sikka II-268
Tabel 2.196 Isu Strategis Daerah Kabupaten Sikka II-271

Tabel 3.1 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 ..... III-4
Tabel 3.2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-7
Tabel 3.3 Target Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Sikka untuk Periode I RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III-8
Tabel 3.4 Indikator Utara Pembangunan (IUP) RPJMD Kabupaten Sikka III-10
Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 ..... III-19
Tabel 3.6 Keterkaitan Kunci dalam Visi dengan Sasaran Daerah III-21
Tabel 3.7 Lokasi Prioritas Berdasarkan Kawasan Strategis III-21
Tabel 3.8 Strategi Pembangunan Misi 1 ..... III-22
Tabel 3.9 Strategi Pembangunan Misi 2 ..... III-36
Tabel 3.10 Strategi Pembangunan Misi 3 ..... III-44
Tabel 3.11 Strategi Pembangunan Misi 4 ..... III-48
Tabel 3.12 Strategi Pembangunan Misi 5 ..... III-51
Tabel 3.13 Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 ..... III-53
Tabel 3.14 Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1 ..... III-54
Tabel 3.15 Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2 ..... III-57
Tabel 3.16 Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3 ..... III-58
Tabel 3.17 Arah Kebijakan Pembangunan Misi 4 ..... III-61
Tabel 3.18 Arah Kebijakan Pembangunan Misi 5 ..... III-63
Tabel 3.19 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 ..... III-70
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah IV-2
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2026-2030 ..... IV-80
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 ..... IV-83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Lainnya I-7
Gambar 2.1 Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Sikka II-1
Gambar 2.2 Peta Morfologi (Kelerengan) II-6
Gambar 2.3 Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-56
Gambar 2.4 Persentase Limbah B3 yang Terkelola di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-57
Gambar 2.5 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024 ..... II-61
Gambar 2.6 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-62
Gambar 2.7 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-63
Gambar 2.8 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-64
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-68
Gambar 2.10 Piramida Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2024 ..... II-71
Gambar 2.11 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 ..... II-73
Gambar 2.12 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 ..... II-74
Gambar 2.13 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... II-75
Gambar 2.14 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2029 ..... II-75
Gambar 2.15 Proyeksi Komposisi Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 ..... II-77
Gambar 2.16 Proyeksi Angka Rasio Ketergantungan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 ..... II-77
Gambar 2.17 Proyeksi Penduduk Usia Tua Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 ..... II-78
Gambar 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-81
Gambar 2.19 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2020- 2024 ..... II-83
Gambar 2.20 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-84
Gambar 2.21 Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-84
Gambar 2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka

Tahun 2020-2024 ..... II-85
Gambar 2.23 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-86
Gambar 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024 ..... II-88
Gambar 2.25 Indeks Gini Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-88
Gambar 2.26 Usia Harapan Hidup Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-90
Gambar 2.27 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-91
Gambar 2.28 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-94
Gambar 2.29 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-94
Gambar 2.30 IPG Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-99
Gambar 2.31 Indeks Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2020 -2024 ..... II-102
Gambar 2.32 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-104
Gambar 2.33 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-105
Gambar 2.34 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024 ..... II-113
Gambar 2.35 Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024 ..... II-130
Gambar 2.36 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024 ..... II-131
Gambar 2.37 Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-133
Gambar 2.38 Persentase Akreditasi Satuan Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-138
Gambar 2.39 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-139
Gambar 2.40 Angka Putus Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-139
Gambar 2.41 Jumlah Kelahiran Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-140
Gambar 2.42 Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-141
Gambar 2.43 Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-141
Gambar 2.44 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-142
Gambar 2.45 IDG Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-155

Gambar 2.46 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-156
Gambar 2.47 Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas dengan Pendidikan SMA Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-156
Gambar 2.48 Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-157
Gambar 2.49 Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-158
Gambar 2.50 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-158
Gambar 2.51 Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2022-2024 ..... II-164
Gambar 2.52 Nilai Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 (Rp miliar) II-176
Gambar 2.53 Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Sikka Tahun 2022-2024 ..... II-179
Gambar 2.54 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-180
Gambar 2.55 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-185
Gambar 2.56 Konsumsi Ikan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-185
Gambar 2.57 Skor Pengukuran Kinerja dan Perencanaan AKIP Tahun 2019-2023 ..... II-204
Gambar 2.58 Skor Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Tahun 2019-2023 ..... II-204
Gambar 2.59 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024 ..... II-207
Gambar 2.60 Dimensi Kompetensi dalam Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023 ..... II-207
Gambar 2.61 Nilai Maturitas SPIP dan Nilai APIP Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-209
Gambar 2.62 Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-209
Gambar 3.1 Perubahan Misi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 Secara Teknokratis III-3
Gambar 3.2 Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan Visi RPJMN 2025-2029 ..... III-6
Gambar 3.3 Program Kerja Kepala Daerah III-65

BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025- 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas Pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat,

yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

14. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kualitastif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung dan tidak langsung mendapat manfaat arau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Sikka.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyajikan informasi awal mengenai data dan informasi pembangunan daerah antara lain, kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis daerah.
(2) Tujuan RPJMD, terdiri dari :
    a. sebagai pedoman pembanguna Daerah selama 5 (lima) tahun;

b. menerjemahkan Visi, Misi, dan Program prioritas Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan yang terarah, sistematis, dan terukur untuk lima tahun ke depan;
c. sebagai informasi yang penting bagi masyarakat, guna mendukung ketercapaian Pembangunan Daerah selama lima tahun ke depan; dan
d. sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra dan Renja.

BAB II

SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3

(1) Sistematika Penyusunan RPJMD, terdiri dari:
a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
c. Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. Bab V Penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang derah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan desuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sempai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SIKKA,

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG. 3/2025

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025–2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta program pembangunan yang disusun secara komprehensif dan terukur.

Penyusunan RPJMD ini didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasca-Pemilu Tahun 2024.

RPJMD Kabupaten Sikka 2025–2029 disusun sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) serta sebagai alat koordinasi, integrasi, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 dengan Visi dan Misi Kepala Daerah **“Terwujudnya Masyarakat Sikka Yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru”**. Dalam upaya mencapai perpektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi keutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan maka disusunlah RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Untuk memberikan pedoman penyusunan rencana strategis perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, kebutuhan, target kinerja dan pendanaan selama tahun 2025-2029.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 149.

Bappeda Kabupaten Si

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sikka merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan sejarahnya, Kabupaten Sikka merupakan Onderafdeling yang kemudian berubah menjadi Swapraja Sikka yang diperintah oleh raja secara turun temurun. Pada tahun 1902 saat kepemimpinan Raja J. Nong Meak da Silva, sistem Swapraja Sikka berubah menjadi sistem desentralisasi. Hal ini berlanjut dengan munculnya regulasi baru yaitu Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Perubahan kemudian terjadi di tanggal 1 Maret 1958, yang mana Swapraja Sikka menjadi daerah tingkat I dengan ibukota Maumere dan Don Paulus Centis Ximenes Da Silva sebagai Kepala Daerah pertama. Penyelenggaraan pemerintahan masa itu didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1967, Daerah tingkat I Swapraja Sikka berganti nama menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka dan dipimpin oleh Laurensius Say.

Pembangunan daerah terus berlanjut bersama dengan kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang silih berganti setelah kepemimpinan Laurensius Say. Di tahun 1978-1988 pembangunan Kabupaten Sikka dilakukan bersama kepemimpinan Drs. Daniel Woda Palle, yang kemudian dilanjut oleh Drs. A. M. Conterius Tahun 1988-1993. Lima tahun kemudian, pembangunan Kabupaten Sikka dipimpin oleh Aleksander Idong hingga tahun 1998 dan dilanjut oleh Drs. Paulus Moa di tahun 1998-2003. Pembangunan daerah semakin intens dilakukan bersama kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang baru ditahun berikutnya bersama Drs. Alexander Longginus dan Drs. Yoseph Ansar Rera. Pada tahun 2003-2008 Pemerintahan Kabupaten Sikka di bawah kepemimpinan Drs. Sosimus Mitang dan dr. Wera Damianus. Pada tahun 2008-2013 beralih kepemimpinan ke Bupati Drs. Yoseph Ansar Rera dan Wakil Bupati Drs. Paolus Nong Susar, pembangunan di Kabupaten Sikka semakin berkembang seiring pergantian kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Tahun 2018-2023 di Kabupaten Sikka dipimpin oleh Bupati Fransiskus Roberto Diogo, S. Sos., M. Si dan Wakil Bupati Romanus Woga. Pada tahun 2023-2025 pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Sikka dipimpin oleh Adrianus Firminus Parera, S.E., M. Si sebagai penjabat Bupati Sikka penunjukan ini Sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Otonom Daerah.

Berbagai perencanaan pembangunan dan implementasi terus diupayakan oleh setiap kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang berganti setiap lima tahunnya. Di tahun 2025 pembangunan daerah Kabupaten Sikka semakin diupayakan berkembang menjadi lebih baik bersama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, yaitu Juventus Prima Yoris Kago dan Simon Subandi Supriadi.

Berbagai harapan dan impian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka periode 2025–2029 tertuju pada upaya percepatan pembangunan daerah. Selain itu pula Kabupaten Sikka memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang menjadi potensi strategis untuk dikembangkan guna mendukung kemajuan daerah. Harapan kepemimpinan serta potensi daerah tersebut menjadi faktor kunci dalam mendorong terwujudnya Kabupaten Sikka yang produktif, kreatif, unggul, dan mandiri. Pembangunan yang terencana dengan baik

diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang matang, sistematis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Sikka lima tahun ke depan.

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik dan politis setelah terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. RPJMD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis daerah, serta memaparkan visi, misi, tujuan, sasaran, hingga program yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Keterkaitan antardokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 telah mengikuti beberapa tahapan sesuai pentahapan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis tahun 2025-2029 meliputi:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Konsultasi rancangan awal;
4. Penyusunan rancangan;
5. Musrenbang;
6. Perumusan rancangan akhir;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
8. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ke DPRD;
9. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
10. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; dan
11. Penetapan Peraturan Daerah.

RPJMD Kabupaten Sikka dirumuskan dan dibahas oleh tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah serta Kepala Daerah Terpilih, untuk memperoleh perencanaan yang baik dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen ini juga diselaraskan dengan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sehingga dapat menjadi acuan pencapaian target

pembangunan lima tahun. Dokumen ini akan menjadi panduan dalam mencapai pembangunan daerah Kabupaten Sikka selama lima tahun ke depan.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan berbagai pendekatan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain:

1. Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Partisipatif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan rencana.
3. Politis, yang merumuskan dan menetapkan visi dan misi jangka panjang daerah bersama dengan DPRD, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD oleh setiap kepala daerah terpilih.
4. Atas-bawah (Top-Down) dan bawah-atas (Bottom-Up), dimana hasil perencanaan diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang lebih komprehensif dan inklusif, yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sedangkan, pendekatan perencanaan pembangunan daerah secara substansi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat :

1. Holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
2. Integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Kemudian, penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 memperhatikan:

1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJMN Tahun 2025-2029, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029.
3. RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan sebagai pedoman terutama pada arah kebijakan dan sasaran pokok di tahap 1 (satu) RPJPD Tahun 2025-2045.
4. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dan evaluasi RPD 2024-2026 untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.
5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/ atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 terdiri dari dasar materi muatan dan dasar pembentukan peraturan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459 Tahun 2018);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 003 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur: (3-42/2025), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Timur Nomor 0136;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025–2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 147);
31. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Satu Data Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 47).

Selain itu juga terdapat legislasi semu yang digunakan sebagai dasar materi muatan tentang RPJMD Kabupaten Sikka 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dasar pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sikka tentang RPJMD Kabupaten Sikka 2025-2029 meliputi:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ..... Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 143).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Penyusunan RPJMD merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD tidak dapat dilakukan secara terpisah, tetapi harus memperhatikan dan diselaraskan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah kabupaten/kota. Sinkronisasi perencanaan antar dokumen perencanaan disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Implementasi pendekatan perencanaan secara tematik, holistik, integratif dan spasial dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka ini juga memperhatikan keselarasan dan mempedomani RPJMN tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Sikka tahun 2025-2045, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RTRW Kabupaten Sikka. Keterhubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Lainnya

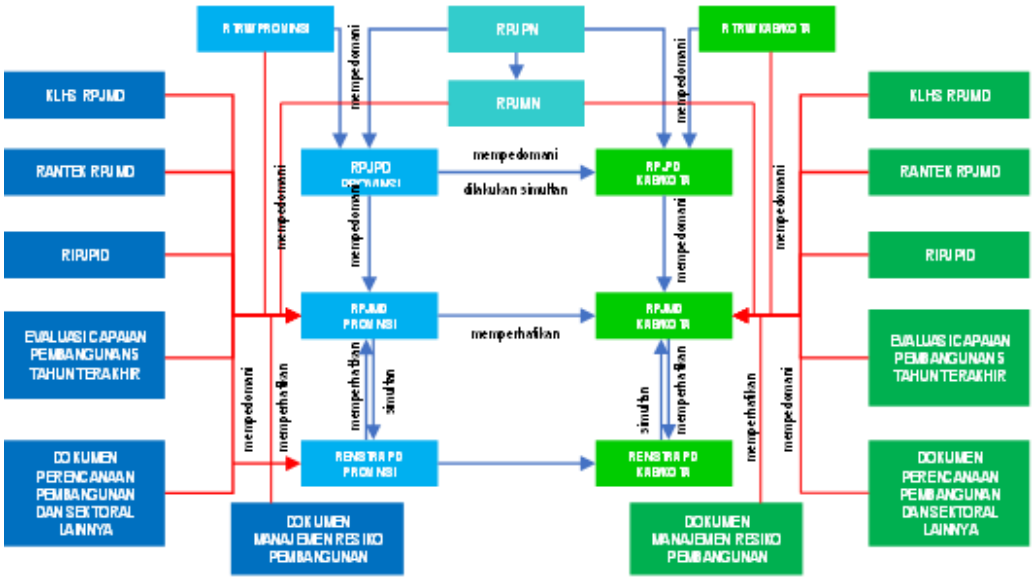

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMN 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, arah kebijakan serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan kewilayahan sesuai kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Sikka. Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 11 ayat (2).

Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 juga terhubung dengan Ranwal RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2025-2029 dan RTRW Provinsi NTT. Sinkronisasi ini dilakukan untuk penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dan provinsi. Selain itu RTRW diselaraskan untuk mempedomani pada tujuan,

kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta rencana indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan.

Selain itu hubungan antar dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten Sikka. Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan penyusunan RPJMD mempedomani RPJPD dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Sasaran pokok Ranwal RPJMD mempedomani RPJPD Kabupaten Sikka meliputi 17 sasaran terdiri dari:

1. Terwujudnya peningkatan Kesehatan untuk semua;
2. Terwujudnya peningkatan pendidikan berkualitas;
3. Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif;
4. Terwujudnya pengembangan inovasi dan produktivitas ekonomi;
5. Terwujudnya penerapan ekonomi hijau;
6. Terwujudnya transformasi digital;
7. Terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan regional;
8. Terwujudnya perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
9. Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
10. Terwujudnya keamanan daerah dan kualitas demokrasi;
11. Terwujudnya stabilitas ekonomi makro yang baik;
12. Terwujudnya ketangguhan keuangan dan ketimpangan daerah;
13. Terwujudnya toleransi dan berkebudayaan maju;
14. Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif;
15. Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas;
16. Terwujudnya ketahanan air dan kemandirian pangan; dan
17. Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyajikan informasi awal mengenai data dan informasi pembangunan daerah antara lain, kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah serta permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Dokumen RPJMD disusun sepenuhnya dengan tetap menggunakan pendekatan teknokratik yang diselaraskan dengan pendekatan politik dari janji kepala daerah yang baru, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, agar dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sikka.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pembangunan daerah Kabupaten Sikka selama 5 (lima) tahun;
2. Menerjemahkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan yang terarah, sistematis, dan terukur untuk lima tahun ke depan;
3. Sebagai informasi yang penting bagi masyarakat, guna mendukung ketercapaian pembangunan daerah selama lima tahun ke depan; dan
4. Sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen perencanaan pembangunan daerah, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini menguraikan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, permasalahan daerah yang diidentifikasi dari kondisi daerah lima tahun sebelumnya, dan isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan tentang gambaran Visi Misi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah yang telah terpilih. Sementara itu, program prioritas merupakan wujud konkret dari misi daerah. Program-program ini dipilih berdasarkan urgensi, relevansi terhadap permasalahan utama daerah, serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program prioritas juga mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan, agar pembangunan tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga membawa perubahan fundamental dalam struktur sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja untuk Tahun 2025-2029 di Kabupaten Sikka. Program perangkat daerah disusun sebagai tindak lanjut dari visi, misi, dan program prioritas daerah, dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan masing-masing perangkat daerah. Program yang dirancang bertujuan untuk menjawab permasalahan utama daerah, mendorong pencapaian sasaran pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan dokumen dan menegaskan pentingnya penyusunan dokumen RPJMD sebagai panduan strategis pembangunan Kabupaten Sikka tahun 2025-2029.

Bapperida Kabu

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Sikka terletak pada 8⁰22'– 8⁰50' Lintang Selatan dan 121⁰55'40" – 122⁰41'30" Bujur Timur di Pulau Flores. Kabupaten Sikka memiliki luas wilayah 1.731,91 Km^2 atau 173.191 Ha dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ende; dan
Sebelah Selatan: berbatasan dengan Laut Sawu.

Gambar 2.1
Peta Geografis Kabupaten Sikka

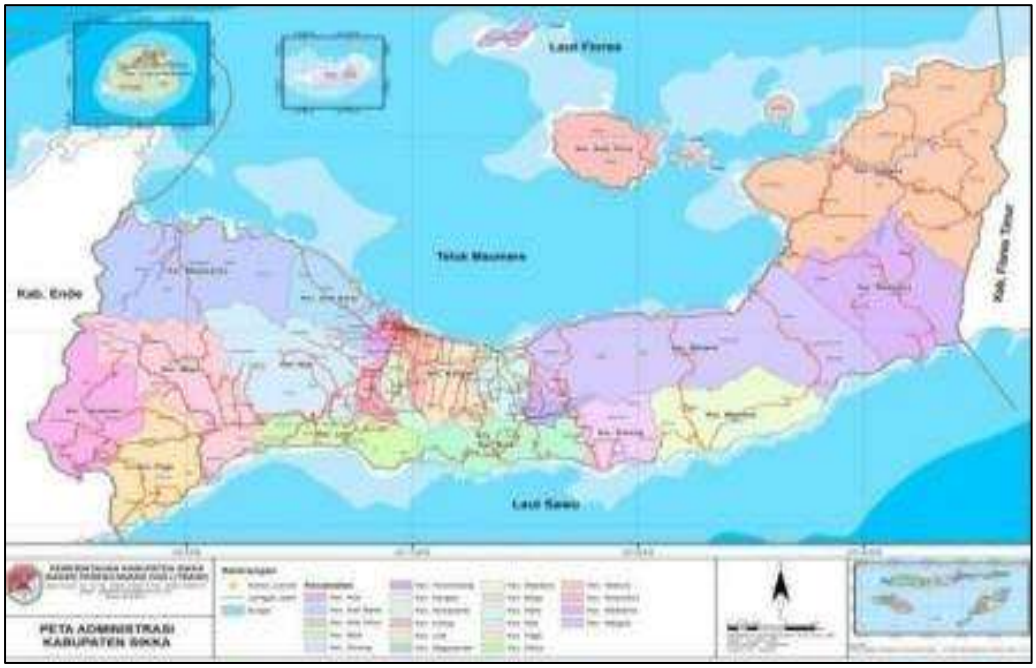

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi atas 21 Kecamatan, 13 Kelurahan, 181 Desa. Kecamatan dengan desa terbanyak terdapat di Kecamatan Talibura sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Mapitara dan Alok Barat masing-masing sebanyak 4 desa/kelurahan. Nama ibu kota kecamatan dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (km)	Persentase Luas (%)
1	Paga	Paga	82,85	4,78
2	Tanawawo	Wolofeo	79,78	4,61
3	Mego	Lekebai	111,26	6,42
4	Lela	Lela	31,33	1,81
5	Bola	Bola	56,83	3,28
6	Doreng	Edat	30,41	1,76

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (km)	Persentase Luas (%)
7	Mapitara	Hebing	81,02	4,61
8	Talibura	Talibura	260,11	15,02
9	Waiblama	Tanarawa	144,36	8,34
10	Waigete	Waigete	217,65	12,57
11	Kewapante	Kewapante	24,14	1,39
12	Hewokloang	Baowunut	17,58	1,02
13	Kangae	Waipare	38,43	2,22
14	Nelle	Nelle Urung	14,65	0,85
15	Koting	Koting B	23,56	1,36
16	Palue	Uwa	41	2,37
17	Nita	Nita	141,07	8,15
18	Magepanda	Magepanda	166,15	9,59
19	Alok	Kota Uneng	14,64	0,85
20	Alok Barat	Wailiti	62,75	3,62
21	Alok Timur	Waioti	92,34	5,33
Jumlah			1.731,91	100

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data luas wilayah per kecamatan di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Talibura dengan luas wilayah 260,11 Km^2 atau 15,02 persen, sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Alok 14,64 Km^2 atau 0,85 persen.

Kabupaten Sikka secara nasional ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Hal ini ditetapkan dan dijabarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka Tahun 2025–2044, yang mengidentifikasi kawasan strategis kabupaten berdasarkan dua pendekatan utama, yakni dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi serta dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis dari perspektif ekonomi bertujuan untuk mendorong akselerasi pembangunan berbasis potensi unggulan wilayah serta memperkuat struktur ruang ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Adapun kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi meliputi:

a) Kawasan Strategis agropolitan bertujuan sebagai pusat kegiatan sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi Daerah berada di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Paga, Kecamatan Palue, Kecamatan Talibura, dan Kecamatan Waigete.
b) Kawasan Strategis Perkotaan Maumere bertujuan sebagai pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah berada di Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, dan Kecamatan Nita.
c) Kawasan Strategis Perkotaan Baru bertujuan sebagai pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah di Kecamatan Kewapante.
d) Kawasan Strategis Sentral Kerajinan Tenun bertujuan sebagai pusat pengembangan produk unggulan berada di Kecamatan Bola dan Kecamatan Nita.

Selanjutnya, kawasan strategis berdasarkan fungsi lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan daya dukung lingkungan yang menjadi penyangga sistem kehidupan masyarakat dan ekosistem adalah:
Kawasan Strategis Penyangga Hutan Lindung Gunung Egon bertujuan sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati berada di Kecamatan Mapitara dan Kecamatan Waigete.

a. Topografi

Topografi Kabupaten Sikka dapat diklasifikasikan menjadi lima kelas, hal ini dapat dilihat dari peta ketinggian lahan berikut:

Gambar 2.1
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Sikka

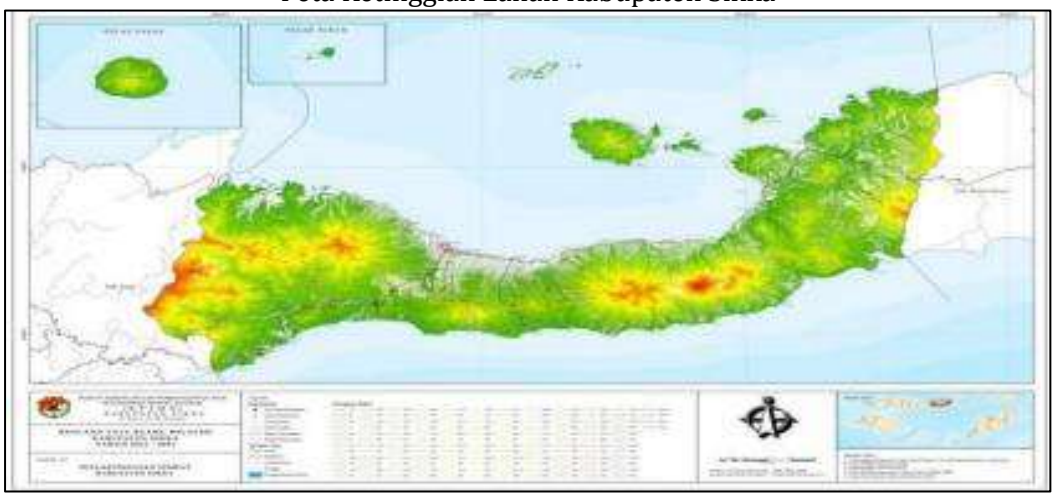

Sumber: RTRW Kabupaten Sikka, 2025-2044

Berdasarkan peta ketinggian lahan tersebut, lima kelas ketinggian lahan Kabupaten Sikka diuraikan sebagai berikut:

1. Topografi dengan ketinggian 0-25 mdpl, yaitu dengan luas 29.863 Ha atau 17,24 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, meliputi sebagian besar daerah pesisir pantai utara dan daerah pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya;
2. Topografi dengan ketinggian 25-100 mdpl, yaitu dengan luas 20.843 Ha atau 12,03 persen persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lanjutan daerah pesisir yang sebagian besar juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Sikka dan sebagian kecilnya di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya;
3. Topografi dengan ketinggian 100-500 mdpl, yaitu seluas 48.171 Ha atau 27,81 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
4. Topografi dengan ketinggian 500-1000 mdpl, yaitu seluas 70.216 Ha atau 40,54 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
5. Topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau 2,37 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka.

Topografi Kabupaten Sikka yang bervariasi, mulai dari dataran rendah pesisir hingga kawasan perbukitan dan pegunungan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan wilayah. Wilayah pesisir yang berada pada ketinggian 0–100 meter di atas permukaan laut menawarkan potensi besar untuk pengembangan sektor perikanan tangkap, budidaya laut, serta pariwisata bahari dan budaya.

Sementara itu, wilayah perbukitan dengan ketinggian 100–500 mdpl sangat cocok untuk pengembangan pertanian lahan kering, hortikultura, dan agroforestri, terutama untuk komoditas unggulan seperti kemiri, kakao, kopi, dan vanili. Kawasan pegunungan yang mendominasi hampir separuh wilayah Sikka juga memiliki nilai strategis sebagai wilayah konservasi sumber daya alam.

b. Klimatologi

Klimatologi merupakan gambaran dan penjelasan sifat iklim di suatu wilayah yang terdiri dari komponen suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Kondisi suhu udara dan kelembaban udara di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel 2.2
Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Sikka

Bulan	Suhu Udara (˚C)		Kelembaban Udara (%)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Januari	23,70	36,00	39,00	100,00
Februari	24,30	34,00	66,00	98,00
Maret	24,20	34,20	59,00	100,00
April	23,20	34,80	52,00	100,00
Mei	21,90	35,20	49,00	88,00
Juni	20,40	33,80	46,00	93,00
Juli	17,80	33,40	38,00	94,00
Agustus	20,20	34,80	39,00	89,00
September	22,50	36,00	35,00	89,00
Oktober	23,40	37,70	43,00	90,00
November	22,20	36,30	47,00	94,00
Desember	23,70	33,40	63,00	100,00

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Sikka dikelilingi oleh Laut Flores dan Laut Sawu dengan iklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah di kabupaten Sikka memiliki suhu yang cenderung panas. Dari data Kabupaten Sikka Dalam Angka Tahun 2025 tercatat suhu maksimum pada tahun 2024 adalah pada bulan Oktober 37,70°C dan suhu minimum pada bulan juli 17,80°C. Kelembaban udara minimum terjadi pada bulan September dengan kelembaban udara sebesar 35 persen. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Januari, Maret, April dan Desember dengan besaran 100 persen. Sedangkan secara umum rata-rata curah hujan dan hari hujan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Sikka

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	52,30	20	97,29
Februari	54,40	16	89,66
Maret	203,60	21	83,87
April	381,80	20	87,47
Mei	2,00	3	100,00
Juni	13,80	7	99,60
Juli	8,90	7	100,00
Agustus	2,10	4	100,00
September	0,70	4	96,83
Oktober	33,40	7	100,00
November	41,40	17	100,00
Desember	431,40	26	87,35

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum, curah hujan terendah terjadi pada Bulan September sebesar 0,70 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 431,40 mm, persentase penyinaran matahari pada tahun 2024 terendah pada bulan Maret sebesar 83,87 persen dan tertinggi pada bulan Mei, Juli, Agustus,

Oktober dan November sebesar 100 persen. Sedangkan untuk informasi tekanan udara, dan kecepatan angin di Kabupaten Sikka secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tekanan Udara dan Kecepatan Angin di Kabupaten Sikka

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)		Tekanan Udara (mb)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Januari	2,70	10,00	1.007,60	1.014,60
Februari	2,90	16,00	1.010,60	1.014,20
Maret	2,40	13,00	1.008,70	1.014,60
April	2,80	11,00	1.009,50	1.012,90
Mei	3,60	14,00	1.010,20	1.014,00
Juni	3,40	15,00	1.012,80	1.016,60
Juli	4,50	13,00	1.012,30	1.016,50
Agustus	3,70	18,00	1.012,90	1.016,50
September	3,80	13,00	1.012,30	1.015,40
Oktober	3,80	15,00	1.011,00	1.014,90
November	2,90	13,00	1.008,50	1.013,40
Desember	2,50	13,00	1.007,30	1.012,50

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas Kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Agustus yaitu 18,00 (m/det). Sedangkan kecepatan angin minimum terjadi pada bulan Maret sebesar 2,40 (m/det). Selanjutnya untuk tekanan udara minimum terjadi pada bulan Desember yaitu 1.007,30 (mb), sedangkan untuk tekanan udara maksimum terjadi pada bulan Juni sebesar 1.016,60 (mb).

c. Morfologi

Kondisi kemiringan tanah (kelerengan) di wilayah Kabupaten Sikka cukup bervariasi, berkisar dari 0-70 persen dan didominasi oleh kemiringan tanah yang lebih besar dari 40 persen dengan luas 81.167 Ha atau 46,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka.

Berdasarkan data geologi tata lingkungan, wilayah Kabupaten Sikka dikelompokkan menjadi lima satuan morfologi, yaitu:

1. Satuan morfologi dataran rendah, menempati daerah yang cukup luas di sepanjang pantai utara, pantai selatan dan pada alur-alur sungai dengan kemiringan antara 0- 5 persen;
2. Satuan morfologi perbukitan halus terdapat di sekitar selatan Kota Maumere dan Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Kangae dengan kemiringan antara 5-15 persen;
3. Satuan morfologi perbukitan sedang berelief sedang terdapat di sepanjang pantai selatan, Pulau Besar, Pulau Babi, Pulau Pemana Besar, sebelah utara perbatasan Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur dan di Kecamatan Magepanda dengan kemiringan antara 15-30 persen;
4. Satuan morfologi perbukitan kasar tersebar hampir 70 persen dari luas wilayah Kabupaten Sikka dengan kemiringan antara 30-70 persen;
5. Satuan morfologi pegunungan terdapat di Gunung Egon, Gunung Kimangbuleng, Gunung Jele dan Gunung Dobo dengan kemiringan antara 50-70 persen.

Kondisi Morfologi (kelerengan) di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2.2
Peta Morfologi (Kelerengan)

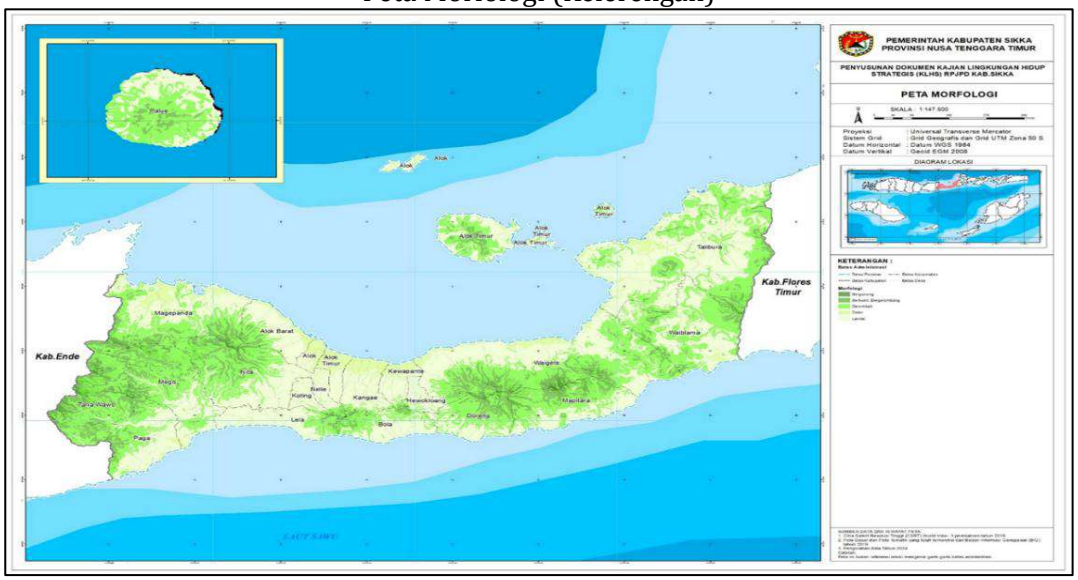

Sumber: KLHS Kabupaten Sikka, 2025-2029

d. Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologi Kabupaten Sikka, dapat dijelaskan bahwa potensi sumber air di wilayah Kabupaten Sikka dapat diidentifikasi dari 3 (tiga) sumber, yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan.

1) Air Hujan

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Sikka dan Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan besarnya potensi air hujan. Iklim di Kabupaten Sikka adalah iklim kering yang dipengaruhi oleh angin Muson, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh pada sekitar bulan November hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Sikka mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 1000-1500 mm/tahun. Akibat rendahnya curah hujan dengan hari hujan dan intensitas yang bervariasi tinggi menyebabkan bentang alam Kabupaten Sikka menjadi relatif kering yang sangat mempengaruhi keadaan air tanah.

Berdasarkan kondisi iklim yang telah dijelaskan sebelumnya, distribusi curah hujan di Kabupaten Sikka cenderung tidak merata antar wilayah, yang berdampak langsung pada ketersediaan air, khususnya pada musim kemarau. Untuk memahami variasi spasial curah hujan secara lebih rinci, berikut ini disajikan data curah hujan bulanan berdasarkan masing-masing kecamatan di Kabupaten Sikka. Data ini penting untuk menggambarkan potensi dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya air hujan di setiap wilayah.

Tabel 2.5
Curah Hujan Bulan Kecamatan Nita dari Pos Hujan Ledalero, Kabupaten Sikka

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	105,0	225,0	275,0	85,0	86,0	34,0	0,0	5,0	1,0	24,0	36,0	277,0
2021	323,5	645,0	237,0	263,0	2,0	0,0	0,0	28,0	90,5	25,0	370,5	554,9
2022	372,5	615,0	217,5	102,0	36,0	104,0	13,5	18,0	97,0	122,0	269,0	136,0
2023	109,5	520,0	86,5	67,5	4,5	36,0	125,5	3,0	0,0	0,0	41,0	127,0
2024	116,0	213,0	635,5	506,5	7,0	80,0	34,5	0,0	0,0	167,0	152,5	486,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data curah hujan bulanan dari Pos Hujan Ledalero di Kecamatan Nita untuk tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa pola curah hujan menunjukkan karakteristik iklim monsun tropis dengan musim hujan yang dominan terjadi pada bulan

November hingga Maret dan musim kemarau pada bulan Juni hingga September. Data menunjukkan curah hujan tertinggi cenderung terjadi pada bulan Januari dan Februari, sebagaimana terlihat pada tahun 2021 (645 mm di Februari), tahun 2022 (615 mm di Februari), dan tahun 2023 (520 mm di Februari). Sebaliknya, bulan-bulan dengan curah hujan terendah umumnya terjadi pada Juli dan Agustus, di mana beberapa tahun mencatat curah hujan mendekati nol, seperti Juli 2021 (0,0 mm), Agustus 2023 (3,0 mm), dan Agustus 2024 (0,0 mm). Setiap pos bulan menunjukkan dinamika musiman yang konsisten, mencerminkan periode basah dan kering yang cukup kontras, dengan fluktuasi antartahun yang menunjukkan adanya variasi iklim tahunan. Keseluruhan data mengindikasikan bahwa Kecamatan Nita, khususnya pada Pos Ledalero, mengalami siklus hidrologi yang tajam antara musim hujan dan kemarau, yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan sektor pertanian, konservasi air, dan mitigasi risiko kekeringan maupun banjir.

Tabel 2.6
Curah Hujan Bulan Kecamatan Paga dari Pos Hujan Paga, Kabupaten Sikka

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	86,5	233,0	107,0	170,0	68,5	0,0	4,5	8,0	8,0	46,5	21,5	289,5
2021	330,6	365,0	176,5	208,5	22,0	35,0	26,0	58,0	53,5	22,0	90,0	192,5
2022	283,0	294,5	182,0	34,0	22,0	333,0	142,5	22,0	49,0	145,0	81,5	74,5
2023	85,5	295,5	107,5	146,0	30,6	12,5	106,0	38,5	0,0	0,0	65,5	143,3
2024	43,5	91,0	344,5	234,5	157,0	68,0	26,0	16,0	22,0	78,0	41,0	383,5

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data curah hujan bulanan dari Pos Hujan Paga di Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa pola hujan mengikuti karakteristik iklim monsun dengan curah hujan tinggi pada bulan Januari hingga April, serta bulan November hingga Desember, sementara curah hujan cenderung rendah pada bulan Juni hingga September. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Maret 2024 sebesar 344,5 mm, disusul oleh bulan Desember 2024 sebesar 383,5 mm, yang menunjukkan anomali peningkatan intensitas hujan pada akhir tahun. Di sisi lain, bulan-bulan kering seperti Juni 2020 (0,0 mm), September 2023 (0,0 mm), dan nilai rendah lainnya pada Juli dan Agustus memperlihatkan ketimpangan distribusi hujan yang tajam. Setiap tahun, Pos Paga menunjukkan fluktuasi intensitas curah hujan yang mencerminkan adanya variabilitas iklim, baik dari sisi intensitas maupun distribusi waktunya. Hal ini menandakan pentingnya strategi adaptif dalam pengelolaan sumber daya air, pertanian, dan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Kecamatan Paga.

Tabel 2.7
Curah Hujan Bulan Kecamatan Lela dari Pos Hujan Lela, Kabupaten Sikka

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	150,0	145,0	151,0	115,0	84,0	24,0	2,0	41,0	14,0	133,0	112,0	420,0
2021	411,0	451,0	496,0	304,0	75,0	12,0	44,0	24,0	90,0	133,0	372,0	204,0
2022	522,0	586,0	96,0	76,0	49,0	115,0	29,0	22,0	124,0	146,0	187,0	99,0
2023	252,0	450,0	73,0	455,0	44,0	2,0	185,0	22,0	0,0	0,0	181,0	151,0
2024	103,0	160,0	322,0	310,0	151,0	58,0	33,0	0,0	10,0	126,0	37,0	277,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data curah hujan bulanan dari Pos Hujan Lela di Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa distribusi curah hujan menunjukkan pola musiman yang konsisten dengan puncak hujan umumnya terjadi pada bulan Januari hingga April serta bulan November hingga Desember. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari 2022 sebesar 586,0 mm, yang mencerminkan intensitas hujan yang sangat tinggi di awal tahun tersebut. Sebaliknya, bulan-bulan seperti Juli dan Agustus,

terutama pada tahun 2024 (Agustus 0,0 mm), menunjukkan curah hujan sangat rendah yang identik dengan periode musim kemarau. Variabilitas tahunan juga terlihat dari perbedaan signifikan curah hujan antar tahun, seperti pada bulan Maret yang mencapai 496,0 mm di tahun 2021, namun hanya 73,0 mm di tahun 2023. Setiap pos bulan mengindikasikan dinamika iklim tropis basah-kering yang tajam, sehingga data dari Pos Lela menjadi representasi penting untuk memahami kondisi iklim lokal di Kecamatan Lela.

Tabel 2.8
Curah Hujan Bulan Kecamatan Alok Timur dari Pos Hujan Stamet Maumere, Kabupaten Sikka

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	80,7	101,0	79,8	103,0	154,4	24,1	0,0	0,0	1,5	71,0	54,5	218,0
2021	179,5	567,7	151,5	94,3	0,0	22,8	0,0	9,3	26,6	28,0	286,9	210,5
2022	248,3	435,3	151,6	27,9	6,0	98,8	13,2	0,0	20,9	41,3	263,8	117,1
2023	119,8	372,6	51,0	110,2	0,0	65,6	19,2	0,0	0,0	1,0	38,0	79,7
2024	52,3	54,2	196,0	384,1	2,0	9,0	8,9	2,1	0,7	33,7	39,0	433,9

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data curah hujan bulanan dari Pos Hujan Stamet Maumere yang merepresentasikan wilayah Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selama periode 2020 hingga 2024, pola hujan menunjukkan tipikal iklim monsun tropis dengan konsentrasi curah hujan tinggi pada bulan Januari hingga April serta November hingga Desember, dan curah hujan rendah atau hampir tidak ada pada bulan Juni hingga September. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari 2021 sebesar 567,7 mm, sementara curah hujan terendah atau nihil terlihat pada beberapa bulan musim kemarau, seperti Juli dan Agustus 2020 serta Juli dan Agustus 2023. Lonjakan curah hujan ekstrem juga tampak pada bulan Desember 2024 sebesar 433,9 mm, yang mengindikasikan pergeseran intensitas hujan ke akhir tahun. Variabilitas antar tahun cukup signifikan, misalnya pada bulan Maret yang berkisar dari 51,0 mm (2023) hingga 196,0 mm (2024). Secara keseluruhan, data dari Pos Stamet Maumere menunjukkan bahwa Kecamatan Alok Timur mengalami dinamika hujan yang cukup tajam antara musim hujan dan musim kemarau.

Tabel 2.9
Curah Hujan Bulan Kecamatan Magepanda dari Pos Hujan Magepanda, Kabupaten Sikka

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	590,3	171,0	233,0	39,0	146,0	0,0	0,0	2,0	10,0	34,0	20,3	441,0
2021	482,0	418,0	135,0	183,0	0,0	33,8	0,0	0,0	21,0	0,0	304,0	249,0
2022	230,9	686,0	148,0	108,0	3,0	25,0	18,0	0,0	12,0	189,0	86,0	166,0
2023	114,0	658,0	109,0	54,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	94,0
2024	273,0	156,0	204,0	247,0	5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	2,0	10,0	698,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Data curah hujan bulanan di Kecamatan Magepanda yang tercatat melalui Pos Hujan Magepanda selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuasi yang khas dengan dominasi curah hujan tinggi pada bulan-bulan basah, terutama Januari hingga Maret dan November hingga Desember. Pencatatan tertinggi terjadi pada bulan Desember 2024 sebesar 698,0 mm dan Februari 2022 sebesar 686,0 mm, sementara curah hujan sangat rendah atau bahkan nihil umum ditemukan pada bulan Juni hingga September seperti pada Juli dan Agustus 2021 maupun 2023 yang mencatatkan angka 0,0 mm. Variasi yang mencolok juga terlihat pada bulan Januari dengan perbedaan signifikan antara tahun 2020 (590,3 mm) dan tahun 2023 (114,0 mm). Pos Hujan Magepanda menjadi sumber penting dalam merekam dinamika iklim lokal yang secara umum mencerminkan kondisi iklim musiman dengan perbedaan ekstrem antara periode basah dan kering. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Magepanda menghadapi ketimpangan distribusi curah hujan tahunan yang cukup tajam

sehingga pengelolaan sumber daya air dan strategi adaptasi iklim menjadi aspek vital dalam mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 2.10
Curah Hujan Bulan Kecamatan Waigete dari Pos Hujan Waigete, Kabupaten Sikka

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	458,0	231,0	107,0	26,0	220,0	0,0	0,0	0,0	N/A	37,0	113,0	633,0
2021	385,0	972,0	519,0	426,0	0,0	0,0	0,0	7,0	15,0	16,0	270,0	386,0
2022	377,0	1017,0	121,0	14,0	11,0	48,0	109,0	2,0	3,0	44,0	222,0	389,0
2023	130,0	563,0	106,0	241,0	0,0	19,0	32,0	0,0	0,0	0,0	22,0	127,0
2024	294,0	129,0	434,0	368,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	28,0	100,0	878,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Pos Hujan Waigete yang merekam curah hujan bulanan di Kecamatan Waigete selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika iklim yang sangat kontras antara musim hujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari 2022 sebesar 1.017,0 mm dan Desember 2024 mencapai 878,0 mm, menandakan puncak musim hujan yang cukup ekstrem di awal dan akhir tahun. Sebaliknya, sejumlah bulan seperti Mei hingga September di beberapa tahun seperti 2021 dan 2024 tercatat tanpa hujan sama sekali atau hanya menunjukkan nilai yang sangat minim, yang menunjukkan periode kekeringan yang cukup signifikan. Angka curah hujan pada bulan Maret juga menunjukkan variasi cukup besar, dari hanya 106,0 mm di tahun 2023 hingga 519,0 mm di tahun 2021. Keberadaan nilai N/A pada bulan September 2020 mengindikasikan kekosongan data yang perlu diperhatikan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 2.11
Curah Hujan Bulan Kecamatan Bola dari Pos Hujan Bola, Kabupaten Sikka

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	152,4	252,7	148,6	135,7	125,5	27,0	N/A	34,0	0,5	83,7	133,4	458,1
2021	345,2	505,1	316,0	140,0	105,0	20,5	35,0	0,0	147,2	74,0	240,6	208,4
2022	348,0	562,8	146,2	142,0	59,3	148,6	11,0	18,2	64,1	142,1	110,4	277,1
2023	223,2	263,6	193,0	233,9	15,7	37,8	61,1	0,0	0,0	0,0	429,9	273,3
2024	93,9	58,3	249,0	294,2	13,2	11,6	12,5	0,0	38,0	61,0	29,3	392,7

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Rekaman curah hujan dari Pos Hujan Bola yang berlokasi di Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, memperlihatkan variasi hujan bulanan yang cukup nyata selama rentang waktu 2020 hingga 2024. Beberapa bulan mencatat intensitas tinggi, seperti Februari 2022 dengan 562,8 mm dan Desember 2020 yang mencapai 458,1 mm. Sebaliknya, periode kemarau sangat terasa pada bulan Agustus yang beberapa kali mencatat curah hujan nol, seperti pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Data juga menunjukkan adanya catatan tidak tersedia (N/A) pada bulan Juli 2020, yang menandakan adanya kekosongan data dan perlu dicermati dalam evaluasi longitudinal. Fluktuasi signifikan terlihat pada bulan Oktober, di mana tahun 2023 sama sekali tidak mencatat curah hujan, sedangkan tahun 2022 mencapai 142,1 mm. Pola hujan di Kecamatan Bola menunjukkan ketergantungan tinggi pada musim basah sebagai sumber utama pasokan air, sementara musim kering cenderung panjang dan minim hujan. Hal ini mencerminkan perlunya sistem pengelolaan air yang adaptif dan terencana, baik untuk mendukung aktivitas pertanian maupun mengantisipasi risiko kekeringan di masa mendatang.

Tabel 2.12
Curah Hujan Bulan Kecamatan Mego dari Pos Hujan Nangablo, Kabupaten Sikka

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	241,0	366,0	407,0	21,0	30,0	11,0	0,0	0,0	8,0	16,0	6,0	353,0
2021	687,0	448,0	192,5	250,5	1,0	0,0	2,0	2,0	4,0	42,0	49,0	39,0

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2022	259,0	428,0	23,0	10,0	7,0	63,0	11,0	4,0	91,0	27,0	45,0	75,0
2023	117,0	349,0	116,0	131,0	23,0	55,0	61,0	6,0	0,0	0,0	29,0	77,0
2024	51,0	50,0	308,0	261,0	40,0	59,0	37,0	0,0	19,0	43,0	22,0	357,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Data curah hujan dari Pos Hujan Nangablo yang berlokasi di Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, memperlihatkan fluktuasi musiman yang cukup mencolok selama periode 2020 hingga 2024. Beberapa puncak curah hujan terjadi pada bulan Januari 2021 sebesar 687,0 mm serta Maret 2020 dan Desember 2024 masing-masing mencapai 407,0 mm dan 357,0 mm. Sebaliknya, bulan-bulan seperti Juni hingga September secara konsisten menunjukkan intensitas rendah bahkan nihil, misalnya Juli 2020 dan Agustus 2024 yang mencatatkan 0,0 mm. Sebaran hujan di bulan April hingga Juni umumnya tidak signifikan, menunjukkan transisi menuju musim kering. Meskipun terdapat variasi antartahun, terlihat bahwa musim hujan cenderung terkonsentrasi pada kuartal pertama dan akhir tahun.

2) Air Tanah

Air tanah tersimpan pada lapisan akuifer, yaitu lapisan tanah yang bersifat permeabel dan memiliki kemampuan untuk menahan, menyimpan, serta mengalirkan air dalam jumlah yang memadai. Potensi air tanah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi geologi, intensitas curah hujan, tata guna lahan, serta keberadaan cekungan atau tampungan air. Potensi air baku yang berasal dari air tanah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam. Sumber air tanah dangkal banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di wilayah pesisir, dengan menggunakan sumur gali sebagai sarana pengambilan air. Penilaian terhadap potensi air tanah di suatu wilayah didasarkan pada kajian geologi, hidrologi, morfologi, dan hidrogeologi, yang dilakukan melalui observasi lapangan, pengukuran, serta analisis kimia dan fisika terhadap kualitas air. Di Kabupaten Sikka, ketersediaan sumber mata air alami relatif terbatas, sehingga pemanfaatan air tanah menjadi sangat dominan. Sumber air di wilayah ini berasal dari tiga komponen utama, yaitu air hujan, air tanah, dan air permukaan, dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1.000 hingga 1.500 mm per tahun. Mata air biasanya muncul secara alami di permukaan tanah sebagai akibat dari terpotongnya aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat. Debit air dari mata air ini bervariasi, mulai dari 1 hingga 40 liter per detik. Secara geografis, sumber air tanah di Kabupaten Sikka umumnya tersebar di sepanjang pesisir pantai utara, selatan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selain sumber air tanah, juga terdapat sumber air permukaan, yang sebagian besar berada pada aliran sungai berskala kecil hingga sedang.

Pemompaan uji sumur bor yang dilakukan oleh Proyek Pengembangan Air Tanah (P2AT) Flores tahun 1995 menunjukkan bahwa:

a) Pelaksanaan uji sumur bor di desa Wairklau, desa Wairklau yang terletak di bagian barat utara dari kota Maumere, merupakan dataran dengan hamparan lahan yang luas yang merupakan tanah sawah tadah hujan/tegalan.Setelah tahap pembuatan sumur bor dapat selesai kemudian dilanjutkan dengan tahap pemompaan uji yaitu proses pemompaan air dari dalam sumur bor dengan cara tertentu yang dibarengi dengan pengamatan dan pencatatan kedudukan muka air didalam sumur bor tersebut selama proses pemompaan uji berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas dari sumur bor tersebut. Dari pemompaan uji tersebut diketahui bahwa kapasitas sumur cukup besar lebih dari 10 liter/detik.
b) Pembuatan sumur bor kedua yang berlokasi di desa Nara. Pelaksanaan pemboran berlangsung dengan tingkat kesulitan yang tinggi karena menemui formasi batuan yang keras namun akhirnya pembuatan sumur bor kedua inipun dapat diselesaikan.Pada saat proses pemboran berlangsung didapat indikasi bahwa permukaan air didalam sumur bor

cukup dalam, diperkirakan akan mencapai kedalaman lebih dari 40 meter sedangkan akuifer teratas terdapat pada kedalaman sekitar 46 meter. Dengan kondisi seperti itu dan kondisi potensi air tanah di Maumere yang termasuk pada kategori kecil sampai sedang. Dari proses pemompaan uji tersebut dapat diketahui bahwa kapasitas yang didapat pada sumur tersebut ternyata cukup lumayan yaitu 4 liter/detik.

3) Air Permukaan

Potensi air permukaan dapat diketahui dari sumber air yang berasal dari sungai, danau, rawa dan air genangan. Di Kabupaten Sikka, potensi air permukaan sebagian besar berasal dari sungai-sungai yang berada di daerah tersebut dalam skala sedang dan kecil. Kecenderungan iklim yang relatif kering dan musim hujan yang berlangsung hanya 3-4 bulan dalam setahun menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada musim kemarau. Pola aliran sungai di wilayah ini pada umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim kemarau. Kabupaten Sikka termasuk daerah yang potensial memiliki sumber daya air. Diketahui dari banyaknya sungai yang mengalir pada musim penghujan, baik sungai yang besar maupun yang kecil. Kondisi ini sesuai untuk pengembangan persawahan dengan jalan pembuatan bendung-bendung dan saluran irigasi untuk mencukupi kebutuhan air pada areal persawahan khususnya. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah sungai yang mengalir di wilayah ini hampir terdapat di semua kecamatan, tetapi kecenderungan hanya mengalir pada musim hujan. Guna memenuhi kebutuhan air untuk konsumsi keluarga di wilayah ini menggunakan air dari PDAM dan II-8 | Lampiran Perda No. 8/2020 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 pembuatan sumur, mengambil dari sumber mata air dan Penampungan Air Hujan (PAH). Data Nama Sungai di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Nama Sungai di Kabupaten Sikka

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Sungai Mati	60
2	Sungai Warlelau	70
3	Sungai Ili Getang	70
4	Sungai Mebe	80
5	Sungai Kaliwajo	51
6	Sungai Napun Gete	9,37
7	Sungai Mego	43
8	Sungai Kowi	39
Jumlah		422,37

Sumber: Balai Wilayah Sungai NTT II

Kabupaten Sikka memiliki sistem hidrologi yang terdiri atas delapan sungai utama dengan total panjang mencapai 422,37 kilometer. Sungai-sungai tersebut meliputi Sungai Mati (60 km), Sungai Warlelau (70 km), Sungai Ili Getang (70 km), Sungai Mebe (80 km), Sungai Kaliwajo (51 km), Sungai Napun Gete (9,37 km), Sungai Mego (43 km), dan Sungai Kowi (39 km). Sungai Mebe tercatat sebagai sungai terpanjang, sedangkan Napun Gete merupakan yang terpendek. Keberadaan sungai-sungai ini memainkan peran penting dalam mendukung ketersediaan air baku, irigasi pertanian, pengendalian banjir, serta keseimbangan ekosistem lokal. Data terkait Luas dan Panjang Sungai Berdasarkan Lebar dan Jenis, dapat dilihat pada tabel berikut.Kabupaten Sikka memiliki sistem hidrologi yang terdiri atas delapan sungai utama dengan total panjang mencapai 422,37 kilometer. Sungai-sungai tersebut meliputi Sungai Mati (60 km), Sungai Warlelau (70 km), Sungai Ili Getang (70 km), Sungai Mebe (80 km), Sungai Kaliwajo (51 km), Sungai Napun Gete (9,37 km), Sungai Mego (43 km), dan Sungai Kowi (39 km). Sungai Mebe tercatat sebagai sungai terpanjang,

sedangkan Napun Gete merupakan yang terpendek. Keberadaan sungai-sungai ini memainkan peran penting dalam mendukung ketersediaan air baku, irigasi pertanian, pengendalian banjir, serta keseimbangan ekosistem lokal. Data terkait Luas dan Panjang Sungai Berdasarkan Lebar dan Jenis, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Luas dan Panjang Sungai Berdasarkan Lebar dan Jenis Sungai di Kabupaten Sikka

No	Sungai	Jenis	Panjang (m)
1	Lebar <2 meter	Sungai musiman	404956,01
2	Lebar 3 meter	Sungai musiman	4155,3
3	Lebar 4-6 meter	Sungai musiman	989,35
4	Lebar 4-8 meter	Sungai musiman	1296,02
5	Lebar 5-7 meter	Sungai musiman	3907,4
6	Lebar 5-8 meter	Sungai musiman	3881,55
7	Lebar 6-9 meter	Sungai musiman	470
8	Lebar 6-12 meter	Sungai musiman	2357,01
Jumlah			422012,64

Sumber: Digitasi Citra 2021

Berdasarkan hasil digitasi citra tahun 2021, total panjang sungai musiman di Kabupaten Sikka mencapai 422.012,64 meter. Sungai dengan lebar kurang dari 2 meter mendominasi dengan panjang 404.956,01 meter, mencerminkan mayoritas jaringan sungai berukuran kecil yang menyebar di wilayah kabupaten. Sementara itu, sungai dengan lebar bervariasi antara 3 hingga 12 meter mencakup panjang yang jauh lebih terbatas, masing-masing berkisar antara 470 meter hingga 4.155,3 meter. Kondisi ini menunjukkan karakteristik morfologi sungai di Kabupaten Sikka yang sebagian besar bersifat sempit dan musiman, yang berimplikasi pada keterbatasan daya tampung dan kontinuitas aliran. Informasi ini penting sebagai dasar perencanaan pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana banjir, serta perlindungan daerah aliran sungai dalam konteks pembangunan wilayah yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Selain sungai, potensi air permukaan di Kabupaten Sikka yang dapat digunakan sebagai sumber air baku pada sistem penyediaan air minum adalah embung dan waduk. Terdapat ±53 embung di Kabupaten Sikka. Potensi Embung di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Inventarisasi Embung di Kabupaten Sikka

No	Inventarisasi Embung	Luas (Ha)	Volume (m^2)
1	Natarita I	0,35	15,264
2	Natarita II	0,57	17,867
3	Natar Leba I	0,22	17,65
4	Natar Leba II	0,67	19,7
5	Walang I	1,2	30,1
6	Walang II	0,54	20,858
7	Wair Mitak	0,44	25,392
8	Wair Temu	0,83	19,57
9	Begomeong	1,02	18,7
10	Wairii	0,52	12,104
11	Polariung	1,02	50,029
12	Nagahure	0,4	35,971
13	Urung Pigang	0,36	28,694
14	Waturia	0,53	18,767
15	Lidi	0,42	33,684
16	Wairita	2,3	106,522
17	Patisomba	3,01	144,371

No	Inventarisasi Embung	Luas (Ha)	Volume (m²)
18	Tanaduen	2,5	29,925
19	Umagera	2,5	29,925
20	Wuring	2,5	24,313
21	Nangalimang	3	300
22	Madawat	3	300
23	Wailiti	3	300
24	Lepolima	3	300
25	Watuliwung	3	300
26	Hebi	3	300
27	Langir	3	300
28	Nele Lorang	3	300
29	Nele Urung	3	300
30	Egon	3	300
31	Hoder	3	300
32	Wairbleler	3	300
33	Nagatobong	3	300
34	Wairkoja	3	300
35	Madawat	3	300
36	Munerana	3	300
37	Habi	3	300
38	Langir	3	300
39	Seusina	3	300
40	Koring D	3	300
41	Du	3	300
42	Kolisia	3	300
43	Reroroja	3	300
44	Nele Wutung	3	300
45	Ladogahar	3	300
46	Aibura	3	300
47	Wailiti	3	300
48	Lepolima	3	300
49	Nangalimang	3	300
50	Wolomapa	3	300
51	Natarmage	3	300
52	Ilim medo	3	300
53	Tua Bao	3	300

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2022

Di Kabupaten Sikka terdapat 53 embung yang tersebar di berbagai wilayah dengan total luas yang bervariasi dan volume tampungan yang menunjukkan peran strategis dalam penyediaan air. Embung-embung dengan volume besar antara lain Patisomba (144.371 m^3), Wairita (106.522 m^3), dan Polariung (50.029 m^3), yang mencerminkan potensi signifikan dalam mendukung irigasi, penyediaan air baku, dan konservasi tanah. Beberapa embung seperti Madawat, Nangalimang, dan Wailiti dicatat lebih dari satu kali, menunjukkan pengelompokan lokasi atau potensi penamaan ulang dalam sistem data. Sebagian besar embung memiliki volume sebesar 300 m^3 dengan luas rata-rata 3 hektar, yang menunjukkan adanya pola pembangunan standar berbasis kebutuhan lokal. Luasan bervariasi mulai dari 0,22 hektar (Natar Leba I) hingga 3 hektar (mayoritas embung), menandakan keterlibatan kebijakan pengelolaan air skala mikro yang merata. Keberadaan embung-embung ini sangat penting dalam mendukung ketahanan air di wilayah yang memiliki iklim kering musiman, serta mendukung strategi adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan.

Mata air di daerah Kabupaten Sikka, umumnya muncul ke permukaan tanah secara alami, karena terpotongnya aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat. Debit mata air di Kabupaten bervariasi antara 1-40 liter/detik. Debit mata air ini umumnya kecil, yang disebabkan antara lain oleh sifat batuan yang kurang meluluskan air dan kemiringan lereng

dari daerah tanah cukup besar, yakni lebih dari 40 persen. Ini mengakibatkan aliran permukaan akan lebih besar dari peresapan.

Konservasi sumber air tanah perlu dilakukan di daerah Kabupaten Sikka, guna menjaga sumber air tetap lestari, dapat dilakukan reboisasi di daerah-daerah tandus. Pemanfaatan air tanah secara maksimal perlu dilakukan untuk mencukupi daerah-daerah yang rawan air, terutama pada daerah-daerah yang mengandung akuifer produktif atau dengan memanfaatkan sumber air yang ada. Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari daerah perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau merupakan kendala di wilayah ini. Secara umum di Kabupaten, terdapat beberapa daerah yang memungkinkan pemanfaatan sumber air tanahnya. Daerah-daerah yang paling memungkinkan adalah Kecamatan Talibura, Waigete, Nita dan sebagian kecil Kecamatan Bola dan Kecamatan Lela. Berdasarkan hasil survey dan pengukuran debit sumber mata air, potensi sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Potensi Sumber Mata Air yang Terdapat di Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka

No	Nama Mata Air	Debit (l/dt)	Pemanfaatan (m3/dt)			Elevasi	Lokasi	
			Irigasi	PDAM	Lainnya		Dusun	Desa
1	Mata Air Pole Awir	0.744502	Irigasi	-	Air Minum (MCK)	13 mdpl	Habidodot	Talibura
2	Wair Puang	2.776.814	-	-	Air Minum (MCK)	34 mdpl	Natar Leba	Darat Gunung
3	Wair Matan	6.421.691	-	-	Air Minum (MCK)	39 mdpl	Blawuk B	Nebe
4	Waitopo 1	3.448.276	-	-	Air Minum (MCK)	859 mdpl	Ojang	Ojang
5	Waitopo 2	349.345	-	-	Belum di fungsikan	859 mdpl	Ojang	Ojang
6	Wair Pau	349.345	-	-	Belum di fungsikan	419 mdpl	Blawuk	Nebe
7	Koja Labang	0.063335	Irigasi	-	Air Minum (MCK)	23 mdpl	Dungan	Timutawa
8	Wair Jegu	0.474834	-	-	Air Minum (MCK)	19 mdpl	Ekko	Lewomada
9	Kesowain	0.208507	-	-	Air Minum (MCK)	19 mdpl	Hia	Lewomada
10	Rewokei	0.159286	-	-	Air Minum (MCK)	30 mdpl	Bokang	Lewomeda

Sumber: Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Sikka, Tahun 2024-2044 dan hasil survei 2024

Berdasarkan data potensi sumber mata air di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, teridentifikasi sepuluh mata air yang memiliki variasi debit dan pemanfaatan yang strategis untuk mendukung kebutuhan air masyarakat. Mata air dengan debit terbesar adalah Wair Matan di Desa Blawuk B, Nebe, yang mencapai 6.421,691 liter/detik dan saat ini dimanfaatkan untuk keperluan air minum dan MCK. Disusul oleh Waitopo 1 dengan debit 3.448,276 liter/detik yang berlokasi di Desa Ojang pada elevasi 859 mdpl, juga dimanfaatkan untuk air minum dan MCK. Beberapa mata air lain, seperti Wair Puang (2.776,814 l/dt), Waitopo 2 (349,345 l/dt), dan Wair Pau (349,345 l/dt), menunjukkan potensi yang cukup besar, meskipun dua terakhir belum difungsikan. Pemanfaatan air sebagian besar masih terbatas pada kebutuhan dasar seperti irigasi dan air minum rumah tangga, tanpa keterlibatan PDAM secara formal, mengindikasikan perlunya optimalisasi jaringan distribusi dan penguatan infrastruktur SPAM. Kondisi elevasi mata air yang bervariasi—dari 13 mdpl hingga 859 mdpl—juga menjadi faktor penting dalam perencanaan teknis dan pengelolaan gravitasi aliran air. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kecamatan Talibura memiliki sumber daya air yang melimpah dan tersebar, namun masih memerlukan intervensi kebijakan, pendanaan, serta integrasi kelembagaan untuk mendukung pengelolaan air bersih yang berkelanjutan dan merata. Potensi Sumber Mata Air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Potensi Sumber Mata Air Yang Terdapat di Kecamatan Mapitara, Bola, Doreng, dan Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka

No	Nama Mata Air	Debit (l/dt)	Pemanfaatan (m3/dt)			Elevasi	Lokasi	
			Irigasi	PDAM	Lainnya		Dusun	Desa
Kecamatan Mapitara								
1	Wair Bale	3.942.829	-	-	Belum dimanfaatkan	1200 mdpl	Watubaler	Hebing
2	Wair Nau	4.542.873	-	-	Air Minum (MCK)	286 mdpl	Watubaler	Hebing
3	Wair Hebing	0.459453	-	-	Air Minum (MCK)	159 mdpl	Hebing	Hebing
4	Wair Balik	0.547945	-	-	Air Minum (MCK)	373 mdpl	Watubaler	Hebing
5	Wair Terang	0.550812	-	-	Air Minum (MCK)	528 mdpl	Raga Soru	Egon Gahar
6	Mata Air Rejo Gajot	1.149.425	-	-	Air Minum (MCK)	701 mdpl	Raga Soru	Egon Gahar
Kecamatan Bola								
1	Wair Terang	0.260712	-	-	(PAM untuk kecamatan Bola)	664 mdpl	IAN	Bola
					PNPM untuk desa wolokoli	-	-	-
Kecamatan Doreng								
1	Wair Bamerak	171.123	-	-	Belum di fungsikan	1100 mdpl	Waidahi	Wogalirit
Kecamatan Hewokloang								
1	Wair Gahu	310.559	-	-	Air Minum (MCK)	312 mdpl	Tadat	Bomekot
2	Wair Puat	0.296121	-	-	Air Minum (MCK)	0	Tadat	Bomekot
3	Wair Terang	0.384615	-	-	Air Minum (MCK)	174 mdpl	Tadat	Bomekot

Sumber: Dokuman RISPAM Kabupaten Sikka, Tahun 2024-2044

Kabupaten Sikka, khususnya di Kecamatan Mapitara, Bola, Doreng, dan Hewokloang, memiliki potensi sumber mata air yang cukup besar dengan variasi debit dan elevasi. Di Mapitara, Wair Nau mencatat debit tertinggi sebesar 4.542,873 l/dt dan telah dimanfaatkan untuk air minum, sedangkan Wair Bale dengan debit 3.942,829 l/dt belum dimanfaatkan. Kecamatan Bola memiliki Wair Terang (0,260712 l/dt) yang dimanfaatkan untuk PAM. Di Doreng, Wair Bamerak (171,123 l/dt) belum difungsikan. Sementara di Hewokloang, sumber seperti Wair Gahu, Puat, dan Terang telah dimanfaatkan untuk air minum dengan debit di bawah 0,4 l/dt. Secara umum, potensi ini menunjukkan perlunya optimalisasi melalui sistem SPAM yang berkelanjutan.

Tabel 2.18
Potensi Sumber Mata Air yang Terdapat di Kecamatan Magepanda, Waiblama, dan Kecamatan Nita Kabupaten Sikka

No	Nama Mata Air	Debit (l/dt)	Pemanfaatan (m3/dt)			Elevasi	Lokasi	
			Irigasi	PDAM	Lainnya		Dusun	Desa
Kecamatan Magepanda								
1	Ailabo	0.26976	-	-	Air Minum (MCK)	30 mdpl	Koli	Kolosia
2	Kalitana	3.298.969	-	-	Air Minum (MCK)	27 mdpl	Koli	Kolosia
3	Murubewa	1.319.588	Irigasi	-		1.319.587.629	Koli	Reroroja
4	Muru Biji	6.451.613	-	-	Belum digunakan masyarakat	373 mdpl	Watuwa	Done
5	Gomoperi	370.199	-	-	Belum digunakan masyarakat	18 mdpl	Reroroja	Magepanda
6	Kojadeka	3.434.951	61,4	-	Air Minum (MCK)	7 mdpl	Edo	Kolosia B
Kecamatan Waiblama								
1	Wua Bahang	0.71582	-	-	Air Minum (MCK)	250 mdpl	Lela Bura	Iumedo
2	Wair Hewat	7.640.068	Irigasi	-	Air Minum (MCK)	290 mdpl	Lela Bura	Iumedo

No	Nama Mata Air	Debit (l/dt)	Pemanfaatan (m3/dt)			Elevasi	Lokasi	
			Irigasi	PDAM	Lainnya		Dusun	Desa
3	Ai Mera	4.383.562	-	-	Air Minum (MCK)	259 mdpl	Lela Bura	lumedo
4	Tohan	3.494.976	Irigasi		Air Minum (MCK)	252 mdpl	Lela Bura	lumedo
Kecamatan Nita								
1	Wair Kibung	0.718133	-	-	Air Minum (MCK)	353 mdpl	Koja Tada	Wuliwituk
2	Kara Wureng	0.877193	-	-	Air Minum (MCK)	846 mdpl	Jalo	Nirangkliung
3	Lian G Mapa	1.476.015	-	-	Air Minum (MCK)	850 mdpl	Detung Likong	Nirangkliung
4	Air Elang	1.481.481	Irigasi	-	Air Minum (MCK)	787 mdpl	Jalo	Nirangkliung

Sumber: Dokumen RISPAM Kabupaten Sikka, Tahun 2024-2044

Kabupaten Sikka, khususnya di Kecamatan Magepanda, Waiblama, dan Nita, memiliki potensi sumber mata air yang cukup besar dan tersebar dengan karakteristik debit dan pemanfaatan yang beragam. Di Magepanda, Muru Biji memiliki debit terbesar sebesar 6.451,613 l/dt namun belum dimanfaatkan, sementara Kojadeka (3.434,951 l/dt) dan Kalitana (3.298,969 l/dt) telah digunakan untuk air minum. Murubewa dimanfaatkan untuk irigasi, sedangkan Gomoperi dan Ailabo belum dimanfaatkan secara optimal. Di Waiblama, Wair Hewat merupakan sumber utama dengan debit 7.640,068 l/dt yang digunakan untuk irigasi dan air minum, disusul Ai Mera (4.383,562 l/dt) dan Tohan (3.494,976 l/dt). Sementara di Nita, Lian G Mapa dan Air Elang masing-masing memiliki debit di atas 1.400 l/dt dan telah dimanfaatkan untuk air minum dan irigasi. Secara umum, potensi sumber daya air ini menunjukkan peluang besar untuk dikembangkan dalam sistem penyediaan air minum dan irigasi, namun masih memerlukan penguatan infrastruktur dan integrasi kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan.

Tabel 2.19
Potensi Sumber Mata Air yang Terdapat di Kecamatan Paga, Tanamawo, Alok Timur, Weigete dan Kecamatan Lela Kabupaten Sikka

No	Nama Mata Air	Debit (l/dt)	Pemanfaatan (m3/dt)			Elevasi	Lokasi	
			Irigasi	PDAM	Lainnya		Dusun	Desa
Kecamatan Paga								
1	Lowowege	6.49203E - 05	-	-	Belum digunakan	179 mdpl	Kanga rusa	Wolowiro
2	Wolo Sala	0.620732464	-	-	Belum digunakan	227 mdpl	Kanga rusa	Wolowiro
3	Ojo Watu Deru	3.950.612.728	-	-	Kebutuhan sehari-hari	404 mdpl	Iju Kutu	Wolowiro
4	Timur Rama	1.525.423.729	-	-	Kebutuhan sehari-hari	279 mdpl	Pama	Mashebewa
5	Ratu Nggua	1.160.541.586	Irigasi	-	-	457 mdpl	Bhana	Wolorega
Kecamatan Tanawawo								
1	Muru Sobe	2.721.499.849	-	-	Belum digunakan	935 mdpl	-	-
2	Udu Kana	1.604.278.075	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Alok Timur								
1	Pangaji	3.418.803.419	-	-	MCK, dan PAMSIMAS	-	-	-
Kecamatan Waigete								
1	Wairlodo	3.260.869.565	-	-	Baru dimanfaatkan 1 sumberdari 3 sumber yang ada	442 mdpl	Ewa	Runut
Kecamatan Lela								
1	Batik Wair	2.027.809.965	-	-	Air Minum MCK	254 mdpl	Tada	Lela

Sumber: Dokumen RISPAM Kabupaten Sikka, Tahun 2024-2044

Kabupaten Sikka memiliki potensi sumber mata air yang besar di Kecamatan Paga, Tanawawo, Alok Timur, Waigete, dan Lela. Di Paga, Ojo Watu Deru memiliki debit tertinggi sebesar 3.950,613 l/dt, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, disusul Timur Rama (1.525,424 l/dt) dan Ratu Nggua (1.160,542 l/dt) yang dimanfaatkan untuk irigasi. Beberapa mata air seperti Lowowege dan Wolo Sala belum dimanfaatkan. Di Tanawawo, Muru Sobe (2.721,500 l/dt) dan Udu Kana (1.604,278 l/dt) juga belum digunakan. Kecamatan Alok Timur memiliki mata air Pangaji dengan debit 3.418,803 l/dt, dimanfaatkan untuk MCK dan PAMSIMAS. Di Waigete, Wairlodo berdebit 3.260,870 l/dt, namun baru satu dari tiga sumber yang digunakan. Di Lela, Batik Wair menyuplai air minum dan MCK dengan debit 2.027,810 l/dt. Data ini menunjukkan potensi besar yang masih perlu dioptimalkan melalui sistem pengelolaan air terpadu dan berkelanjutan.

4) Cekungan Air Tanah (CAT)

Kabupaten Sikka memiliki beberapa cekungan air tanah (CAT) yang penting sebagai sumber daya air strategis, yaitu CAT Maumere, CAT Larantuka, dan CAT Kutabura–Lamaayang. Ketiga cekungan ini merupakan wilayah lintas kabupaten yang mencakup Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. CAT Maumere terletak di wilayah Kecamatan Kangae, Kewapante, Alok Barat, dan Alok Timur. Batas timur cekungan ini ditandai oleh keberadaan Sungai Nebe, sedangkan di utara berbatasan langsung dengan garis pantai. Di Kecamatan Magepanda, batas timur dibatasi oleh formasi batuan gamping, sedangkan bagian barat dan selatan oleh Sungai Kali Wajo, dengan bagian utara tetap berbatasan dengan pantai. CAT Maumere memiliki luas sekitar 800 km^2 dengan potensi air tanah yang terdiri dari akuifer bebas sebesar 168 juta meter kubik per tahun dan akuifer tertekan sebesar 13 juta meter kubik per tahun. Sementara itu, CAT Larantuka mencakup wilayah seluas kurang lebih 1.030 km^2 dan memiliki potensi air tanah dari akuifer bebas sebesar 304 juta meter kubik per tahun, serta akuifer tertekan sebesar 26 juta meter kubik per tahun. Adapun CAT Kutabura–Lamaayang memiliki cakupan wilayah sekitar 330 km^2, dengan potensi air tanah yang berasal dari akuifer bebas sebesar 76 juta meter kubik per tahun dan akuifer tertekan sebesar 9 juta meter kubik per tahun. Keberadaan ketiga CAT ini sangat krusial dalam mendukung kebutuhan air baku dan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Sikka, khususnya dalam konteks keterbatasan mata air alami di beberapa wilayah. Oleh karena itu, pengelolaan yang terintegrasi dan lintas wilayah menjadi hal yang penting untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air tanah di masa mendatang.

e. Penggunaan Lahan

Jenis penggunaan lahan yang terdapat di wilayah Kabupaten terdiri dari beberapa jenis penggunaan tanah yaitu penggunaan tanah berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung berupa hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya, kawasan pelestarian alam, cagar alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Kawasan budidaya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan pertambangan dan pertahanan keamanan. Data penggunaan lahan kabupaten dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.20

Penggunaan Lahan di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (m2)	Luas (Ha)
1	Paga	Hutan Lahan Kering	151453	15
		Perkebunan/Kebun	9161293	916
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	2534508	253

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (m2)	Luas (Ha)
		Rumput/Tanah Kosong	603489	60
		Sawah	1202353	120
		Semak Belukar	20874404	2087
		Sungai	208792	21
		Tegalan/Ladang	30186892	3019
		Rumput/Tanah Kosong	228780	23
		Semak Belukar	6344794	634
		Tegalan/Ladang	377626	38
2	Mego	Hutan Lahan Kering	8578304	858
		Perkebunan/Kebun	3226777	323
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	941409	94
		Rumput/Tanah Kosong	1442337	144
		Sawah	2468233	247
		Semak Belukar	49291260	4929
		Sungai	552892	55
		Tegalan/Ladang	30892135	3089
		Rumput/Tanah Kosong	693633	69
		Semak Belukar	3776671	378
3	Tanawawo	Hutan Lahan Kering	10799296	1080
		Perkebunan/Kebun	4642094	464
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	1095194	110
		Rumput/Tanah Kosong	14994673	1499
		Sawah	104026	10
		Semak Belukar	19918525	1992
		Sungai	86280	9
		Tegalan/Ladang	37899794	3790
4	Lela	Hutan Lahan Kering	857353	86
		Pasir Pasut	61326	6
		Perkebunan/Kebun	20591457	2059
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	2413008	241
		Rumput/Tanah Kosong	624844	62
		Sawah	135261	14
		Semak Belukar	6742617	674
		Sungai	148578	15
		Tegalan/Ladang	14366582	1437
5	Bola	Hutan Lahan Kering	2920004	292
		Perkebunan/Kebun	10377261	1038
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	2517925	252
		Rumput/Tanah Kosong	688382	69
		Semak Belukar	6849559	685
		Tegalan/Ladang	21588175	2159
6	Doreng	Hutan Lahan Kering	13537371	1354
		Perkebunan/Kebun	11903794	1190
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	686217	69
		Rumput/Tanah Kosong	1354636	135
		Semak Belukar	7291137	729
		Tegalan/Ladang	19215775	1922
7	Mapitara	Danau/Situ	30526	3
		Hutan Lahan Kering	19646409	1965
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	851369	85
		Rumput/Tanah Kosong	11476008	1148
		Semak Belukar	27117904	2712
		Tegalan/Ladang	23710430	2371
8	Talibura	Hutan Lahan Basah	1973128	197
		Hutan Lahan Kering	24663658	2466
		Pasir Pasut	12752	1
		Perkebunan/Kebun	16053974	1605
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	3759319	376
		Rawa	231701	23
		Rumput/Tanah Kosong	5449255	545
		Sawah	1386555	139

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (m2)	Luas (Ha)
		Semak Belukar	188853749	18885
		Sungai	1276543	128
		Tegalan/Ladang	40670008	4067
9	Waigete	Danau/Situ	16385	2
		Hutan Lahan Basah	382971	38
		Hutan Lahan Kering	49763716	4976
		Perkebunan/Kebun	14339802	1434
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	3051460	305
		Rawa	24997	2
		Rumput/Tanah Kosong	7730101	773
		Sawah	516759	52
		Semak Belukar	84932276	8493
		Sungai	25195	3
		Tegalan/Ladang	72061567	7206
10	Waiblama	Hutan Lahan Kering	6223064	622
		Perkebunan/Kebun	3549767	355
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	350856	35
		Rumput/Tanah Kosong	684548	68
		Semak Belukar	84942075	8494
		Sungai	107100	11
		Tegalan/Ladang	24079585	2408
11	Kewapante	Hutan Lahan Kering	492094	49
		Perkebunan/Kebun	5792618	579
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	3016514	302
		Rumput/Tanah Kosong	11287	1
		Sawah	45350	5
		Semak Belukar	233647	23
		Tegalan/Ladang	12484091	1248
12	Hewokloang	Hutan Lahan Kering	51793	5
		Perkebunan/Kebun	9515860	952
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	2063137	206
		Tegalan/Ladang	6254492	625
13	Kangae	Hutan Lahan Kering	116012	12
		Pasir Pasut	15830	2
		Perkebunan/Kebun	5413830	541
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	6018468	602
		Rumput/Tanah Kosong	2329752	233
		Semak Belukar	3507998	351
		Tegalan/Ladang	22263902	2226
14	Palue	Hutan Lahan Kering	2637204	264
		Perkebunan/Kebun	6225455	623
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	1350131	135
		Rumput/Tanah Kosong	3690818	369
		Semak Belukar	22493919	2249
		Tegalan/Ladang	3289524	329
15	Koting	Perkebunan/Kebun	7817360	782
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	2108051	211
		Rumput/Tanah Kosong	120374	12
		Semak Belukar	887172	89
		Tegalan/Ladang	3220549	322
16	Nelle	Hutan Lahan Kering	154788	15
		Perkebunan/Kebun	3206764	321
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	5479038	548
		Rumput/Tanah Kosong	87828	9
		Semak Belukar	1925544	193
		Tegalan/Ladang	2444461	244
		Hutan Lahan Kering	1963374	196
		Perkebunan/Kebun	20487552	2049
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	4856192	486
		Rumput/Tanah Kosong	855998	86
		Sawah	162183	16

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (m2)	Luas (Ha)
		Semak Belukar	19195796	1920
		Sungai	38494	4
		Tegalan/Ladang	46375058	4638
18	Magepanda	Hutan Lahan Basah	586687	59
		Hutan Lahan Kering	42635866	4264
		Perkebunan/Kebun	1121944	112
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	2205016	221
		Rawa	104511	10
		Rumput/Tanah Kosong	33132025	3313
		Sawah	6841558	684
		Semak Belukar	55640140	5564
		Sungai	249560	25
		Tegalan/Ladang	7784802	778
19	Alok	Empang/Tambak	75849	8
		Hutan Lahan Basah	191540	19
		Hutan Lahan Kering	1944	0
		Perkebunan/Kebun	406598	41
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	4874824	487
		Rumput/Tanah Kosong	1001031	100
		Sungai	12287	1
		Tegalan/Ladang	11115913	1112
		Danau/Situ	271603	27
		Rawa	31974	3
		Semak Belukar	2882318	288
20	Alok Barat	Empang/Tambak	157790	16
		Hutan Lahan Basah	8102	1
		Hutan Lahan Kering	2133795	213
		Perkebunan/Kebun	75992	8
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	6370020	637
		Rawa	34591	3
		Rumput/Tanah Kosong	3905752	391
		Semak Belukar	10488041	1049
		Tegalan/Ladang	24949034	2495
21	Alok Timur	Bandara	63328	6
		Hutan Lahan Kering	3063214	306
		Perkebunan/Kebun	5795734	580
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	3890089	389
		Rumput/Tanah Kosong	5295457	530
		Semak Belukar	49290318	4929
		Sungai	12110	1
		Tegalan/Ladang	9729693	973
		Hutan Lahan Kering	57321	6
		Semak Belukar	466547	47
		Hutan Lahan Basah	2765035	277
		Pasir Pasut	37425	4
		Rawa	200561	20
		Jumlah /Total	**166.8601.480**	**166.860**

Sumber: Perhitungan GIS, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Sikka didominasi oleh semak belukar dengan luas 60331 ha. Lahan semak belukar yang sangat luas di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Sikka masih berupa lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktif, baik dalam sektor pertanian, perkebunan, maupun pemukiman. Keberadaan semak belukar yang begitu luas juga dapat mencerminkan kondisi geografis dan ekologis wilayah yang memiliki tingkat kelerengan tinggi, jenis tanah tertentu, atau aksesibilitas yang rendah, sehingga belum memungkinkan untuk dikembangkan secara intensif. Selanjutnya adalah tegalan/ladang seluas 46.458 ha, dan untuk perkebunan seluas 15.971 ha. Luasan ini menunjukkan adanya potensi pengembangan komoditas perkebunan dan tanaman pangan

musiman, guna mendorong aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Tabel 2.21
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sikka

No	Kawasan Hutan	Fungsi	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Egon Ilimedo	Lindung	Waiblama, Talibura, Waigete, Mapitara, Doreng	19.957,80
2	Wukoh Lewoloroh	Lindung	Talibura	6.052
3	Ili Darat	Lindung	Talibura	1.516
4	Iliwuli	Lindung	Talibura	574
5	Iidobo	Lindung	Bola, Hewokloang	219,16
6	Kimang Buleng	Lindung	Magepanda, Alok Barat, Tanawawo, Paga, Mego	8.922,10
7	Iligai	Poduksi	Lela, Koting, Nelle, Alok Timur, Kangae, Bola	915,57
8	Mbotulena Keliwenda	Produksi Terbatas	Paga Tanawawo	725
Total Luas				**38.888,63**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sikka, 2022

Penggunaan lahan di Kabupaten Sikka didominasi oleh kawasan hutan lindung dengan total luas mencapai 38.888,63 hektar. Kawasan Egon Ilimedo merupakan yang terluas, mencakup 19.957,80 hektar dan tersebar di lima kecamatan, yaitu Waiblama, Talibura, Waigete, Mapitara, dan Doreng. Disusul Kimang Buleng seluas 8.922,10 hektar yang tersebar di Magepanda, Alok Barat, Tanawawo, Paga, dan Mego. Talibura memiliki konsentrasi kawasan lindung lainnya seperti Wukoh Lewoloroh (6.052 ha), Ili Darat (1.516 ha), dan Iliwuli (574 ha). Selain itu, terdapat kawasan produksi seperti Illigai (915,57 ha) di wilayah Lela dan sekitarnya, serta produksi terbatas Mbotulena Keliwenda (725 ha) di Paga dan Tanawawo. Data ini menunjukkan peran strategis kawasan hutan dalam mendukung konservasi dan keseimbangan ekosistem di Sikka, serta pentingnya pengelolaan yang terintegrasi antara fungsi lindung dan produksi.

2. Potensi Sumber Daya Alam

a. Geologi dan Jenis Tanah

Geologi adalah adalah Ilmu (sains) yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Atas kondisi geologi dan faktor kegempaan di wilayah Kabupaten Sikka maka dapat dibedakan menjadi 4 zona kerentanan gerakan tanah, yaitu:

1) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Zona ini sangat jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun baru, kecuali daerah sempit di sekitar tebing sungai. Zona ini terletak pada daerah datar sampai landai dengan kemiringan lereng medan lebih kecil dari 15 persen (0,050). Lereng pada umumnya terbentuk oleh endapan aluvial pantai dan sungai berupa kerakal dan kerikil, pasir lumpur pelapukan batu gamping koral dan batuan gunung api. Zona ini terdapat di daerah tepi pantai bagian Utara dan daerah kaki perbukitan/ pegunungan antara lain tepi pantai Kecamatan Magepanda, Kewapante, Talibura, Nebe dan pantai selatan hanya sebagian yaitu di Paga.

2) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng dan jika terdapat gerakan tanah lama lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah lama dimensi kecil mungkin masih dapat terjadi terutama pada tebing dan lembah sungai kecil (alur) dan lereng dengan kondisi tanah permukaan yang tidak lepas. Kemiringan lereng pada zona ini mulai dari landai (5-15 persen) sampai sangat terjal (50-70 persen) tergantung pada kondisi keteknikan tanah/batuan pembentuk lereng. Lereng pada umumnya terbentuk oleh persilangan konglomerat, batu pasir kasar, breksi, tufa pasiran dan tufa batu apung dan batu gamping. Zona ini terdapat di daerah selatan yaitu di sekitar Lela, Hewat, Kloan, dan Dorang.

3) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Zona kerentanan menengah adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai atau tebing jalan dan lereng terjal tidak bervegetasi. Gerakan tanah lama masih dapat aktif kembali terutama disebabkan oleh goncangan gempa bumi yang kuat, curah hujan yang tinggi, erosi kuat dan sifat tanah penutup yang gembur atau mudah larut. Kondisi kemiringan lereng medan mulai terjal (30-50 persen) sampai curam hingga hampir tegak, yaitu <70 persen, tergantung kepada ketebalan tanah dan kondisi keteknikan tanah/batuan pembentuk lereng. Vegetasi penutup pada umumnya sangat kurang yaitu berupa semak belukar, peladangan dan setempat-setempat tanaman keras. Batuan dasar pembentuk lereng berupa breksi, aglomerat, tufa pasiran terseling tufa lapilli atau tufa batu apung. Zona ini terdapat di lerenglereng perbukitan bagian Barat, Selatan dan Timur pulau Flores.

4) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Tinggi

Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan sangat tinggi untuk terkena gerakan tanah. Zona ini sering terjadi gerakan tanah dan gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru masih dapat aktif bergerak, terutama akibat goncangan gempa bumi yang kuat, curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat sehingga bila hujan terus menerus kemungkinan di alur-alur sungai terjadi aliran bahan rombakan. Kemiringan lereng medan mulai dari terjal (30-50 persen) sampai curam hingga hampir tegak (<70 persen) tergantung pada kondisi keteknikan tanah/batuan pembentuk lereng. Vegetasi penutup umumnya sangat jarang bahkan di daerah lembah sungai tidak bervegetasi. Lereng pada umumnya terbentuk oleh tufa, tufa pasiran, breksi, aglomerat terseling tufa, batu apung hasil gunung api. Zona ini terdapat di daerah lereng lembah pegunungan Egon, sebelah Utara pegunungan Gumbita, sebelah Selatan Utara Bola dan di lereng pegunungan Gumbita.

Dampak lain dari terjadinya gempa di wilayah Kabupaten Sikka adalah terjadinya Likuifaksi (*Liquefaction*) di daerah Maumere. Likuifaksi adalah suatu gejala perubahan sifat dari suatu material yang bersifat padat (*solid*), non kohesif dan cair (*liquid*). Perubahan ini terjadi akibat pemanfaatan secara mendadak volume rongga antar butir yang disebabkan oleh adanya getaran, yang biasanya diakibatkan oleh gempa bumi. Akibat pemanfaatan ini akan meningkatkan tekanan air pori yang selanjutnya memunculkan gejala likuifaksi berupa munculnya semburan pasir. Bahaya likuifaksi ini dapat mengakibatkan dasar pondasi sipil mengalami amblesan dan merusakkan bangunan gedung di atasnya (Bowles J.E, 1988). Untuk mengantisipasi bahaya likuifaksi tersebut, di wilayah Kota Maumere telah diidentifikasi 3 zona yang memiliki potensi untuk mengalami likuifaksi, yaitu:

a) Zona Potensi Likuifaksi Tinggi
   Terjadi pada endapan marin yang berupa pasir halus dan mengandung fraksi halus < 10 persen dengan nilai uji penetrasi standar – SPT (N) kurang dari 7 dengan ketebalan perlapisan antara 2-10 meter. Zona ini terdapat di sekitar kota Maumere sampai dataran pantai bagian Barat.
b) Zona Potensi Likuifaksi Menengah
   Pada umumnya terjadi pada endapan aluvial dan sedikit pada endapan marin yang terdiri dari fraksi kasar (kerakal) sampai fraksi sedang (pasir halus) dan mengandung fraksi halus < 15 persen dengan nilai N < 10, ketebalan perlapisan 2 meter. Zona ini terdapat di bagian selatan kota Maumere (sekitar pasar baru) sampai pantai bagian timur.
c) Zona Potensi Likuifaksi Rendah
   Pada umumnya terjadi pada endapan vulkanis yang berupa lanau pasiran, mengandung fraksi halus (lanau dan lempung) > 15 persen dengan nilai N > 12 dengan ketebalan perlapisan 1 meter. Zona ini terdapat di Selatan kota Maumere sampai berbatasan dengan lereng perbukitan.

Wilayah Kabupaten Sikka memiliki berbagai jenis tanah yang terdiri dari Aluvial Ustik, Andosol Eutrik, Andosol Haplik, Arenosol, Gawir (*escarpments*), Gleisol Distrik, Gleisol Eutrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Humik, Kambisol Ustik, Litosol, Mediteran Ustik, Molisol Listik,

Molisol Ustik, Podsolik Ustik, Regosol Ustik, dan Singkapan Batuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Jenis Tanah di Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Paga	Kambisol Ustik	688,9813
		Molisol Litik	927,5422808
		Gawir (Escarpments)	98,65490367
		Andosol Eutrik	3171,110409
		Aluvial Ustik	270,0141917
		Mediteran Ustik	1953,499434
		Jumlah	7109,802519
2	Mego	Molisol Ustik	5903,297952
		Kambisol Ustik	298,1031493
		Podsolik Ustik	1392,936357
		Gawir (Escarpments)	353,1406671
		Andosol Eutrik	1052,453914
		Aluvial Ustik	222,0056624
		Molisol Ustik	620,6428648
		Mediteran Ustik	1152,571944
		Jumlah	10995,15251
3	Tanawawo	Molisol Ustik	2491,079525
		Andosol Haplik	44,80740038
		Podsolik Ustik	0,50232575
		Molisol Litik	41,70490372
		Gawir (Escarpments)	7,751595238
		Andosol Eutrik	6359,587399
		Jumlah	8945,433148
4	Lela	Gawir (Escarpments)	0,010674886
		Kambisol Humik	0,0000174424
		Kambisol Ustik	0,310207284
		Molisol Ustik	0,081122972
		Kambisol Eutrik	0,001274726
		Mediteran Ustik	0,044923215
		Gleisol Distrik	0,008706293
		Jumlah	0,456909376
5	Bola	Gawir (Escarpments)	31,84599626
		Kambisol Eutrik	711,7403726
		Mediteran Ustik	1,947070063
		Kambisol Ustik	1263,648519
		Molisol Ustik	2484,94857
		Jumlah	4494,130528
6	Doreng	Kambisol Eutrik	365,9245241
		Mediteran Ustik	933,98394
		Kambisol Ustik	4,592217529
		Molisol Ustik	2441,839637
		Molisol Ustik	154,0711711
		Molisol Ustik	1498,481541
		Jumlah	5398,893031
7	Mapitara	Kambisol Eutrik	423,3838554
		Mediteran Ustik	98,8280676
		Kambisol Ustik	2332,4921
		Molisol Ustik	5410,0563
		Molisol Ustik	2777,047733
		Kambisol Ustik	241,2295607
		Tubuh Air	3,0526
		Litosol	15,19218506
		Tubuh Air	2,312936207

No.	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)
		Jumlah	11303,59534
8	Talibura	Gawir (Escarpments)	46,65269134
		Kambisol Humik	0,000941068
		Molisol Ustik	18418,9166
		Kambisol Ustik	8133,8008
		Aluvial Ustik	342,3259369
		Mediteran Ustik	4141,912345
		Kambisol Eutrik	4,63E-05
		Arenosol	1644,839394
		Jumlah	32728,44875
9	Waigete	Gawir (Escarpments)	102,4325454
		Molisol Ustik	11649,37767
		Kambisol Eutrik	1542,445486
		Mediteran Ustik	4738,25832
		Kambisol Ustik	5238,276589
		Arenosol	0,435201094
		Litosol	2,427630302
		Jumlah	23273,65344
10	Waiblama	Podsolik Ustik	84,78557019
		Gawir (Escarpments)	19,23757233
		Molisol Ustik	3965,880305
		Mediteran Ustik	440,9499512
		Kambisol Ustik	1762,987495
		Aluvial Ustik	13,07710311
		Mediteran Ustik	5075,866916
		Arenosol	620,2216939
		Jumlah	620,2216939
11	Kewapante	Gawir (Escarpments)	0,007874349
		Kambisol Eutrik	0,010033629
		Mediteran Ustik	0,059642573
		Molisol Ustik	0,111257247
		Kambisol Ustik	0,031948216
		Jumlah	0,220756014
12	Hewokloang	Gawir (Escarpments)	0,001400289
		Kambisol Eutrik	0,011529613
		Mediteran Ustik	0,008702268
		Molisol Ustik	0,157220644
		Jumlah	0,178852814
13	Kangae	Gawir (Escarpments)	0,009334999
		Kambisol Eutrik	0,000701676
		Mediteran Ustik	0,085406086
		Molisol Ustik	0,231109016
		Kambisol Ustik	0,02515309
		Jumlah	0,351704867
14	Palue	Molisol Ustik	2672,6638
		Kambisol Distrik	139,659049
		Singkapan Batuan	269,913763
		Litosol	817,221744
		Jumlah	3899,458356
15	Koting	Gawir (Escarpments)	0,01002683
		Kambisol Ustik	0,02886472
		Mediteran Ustik	0,06136803
		Molisol Ustik	0,041275476
		Jumlah	0,141535056
16	Nelle	Molisol Ustik	1136,078294
		Mediteran Ustik	94,81751765
17	Nita	Gawir (Escarpments)	246,7303155
		Molisol Ustik	7485,661607
		Kambisol Ustik	467,9024155
		Mediteran Ustik	2960,100867
		Jumlah	12391,29102

No.	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)
18	Magepanda	Molisol Ustik	2558,492283
		Kambisol Humik	0,001809093
		Kambisol Ustik	1180,290811
		Gleisol Eutrik	20,06054126
		Mediteran Ustik	3994,920624
		Gleisol Distrik	88,16719777
		Jumlah	7841,933266
19	Alok	Molisol Ustik	973,5003
		Regosol Ustik	28,819856
		Gawir (Escarpments)	216,854732
		Mediteran Ustik	73,685118
		Kambisol Ustik	760,8816
		Jumlah	2053,741606
20	Alok Barat	Gawir (Escarpments)	123,8165334
		Molisol Ustik	2359,345
		Kambisol Humik	0,000775818
		Mediteran Ustik	1762,317152
		Aluvial Ustik	52,88591248
		Kambisol Ustik	513,9461051
		Jumlah	4812,311479
21	Alok Timur	Molisol Ustik	4090,317
		Kambisol Ustik	1868,529
		Gawir (Escarpments)	292,9729
		Andosol Eutrik	303,5816
		Regosol Ustik	309,4137
		Gleisol Distrik	309,4137063
		Mediteran Ustik	402,279812
		Jumlah	7576,507718
Total			143445,9242

Sumber: Hasil Perhitungan GIS, 2021

Kabupaten Sikka memiliki keragaman jenis tanah yang tersebar di 21 Kecamatan dengan total luas lahan mencapai 143.445,92 hektar. Jenis tanah yang mendominasi adalah Molisol Ustik, Kambisol Ustik, Mediteran Ustik, serta Andosol Eutrik, dengan persebaran paling luas di Kecamatan Talibura (32.728,45 ha), Waigete (23.273,65 ha), dan Mapitara (11.303,60 ha). Kecamatan Talibura didominasi Molisol Ustik (18.418,92 ha) dan Kambisol Ustik (8.133,80 ha), sementara Waigete mencakup kombinasi luas antara Molisol Ustik (11.649,38 ha), Mediteran Ustik (4.738,26 ha), dan Kambisol Ustik (5.238,28 ha). Kecamatan Paga dan Mego juga memiliki sebaran tanah cukup besar, masing-masing 7.109,80 ha dan 10.995,15 ha, dengan dominasi Molisol dan Kambisol. Jenis tanah lainnya seperti Gawir (*escarpments*), Aluvial, Arenosol, Regosol, hingga Litosol dan Gleisol juga ditemukan dalam skala kecil, menambah kompleksitas karakteristik tanah wilayah ini. Variasi tanah ini penting untuk perencanaan penggunaan lahan, konservasi, pertanian, dan tata ruang wilayah secara berkelanjutan.

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kemampuan dan Kesesuaian Lahan

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan analisis perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dengan kebutuhan lahan (DL). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan lahan dalam mendukung aktivitas kehidupan dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Ketersediaan lahan (SL) mengacu pada luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan penduduk, sedangkan kebutuhan lahan (DL) menggambarkan total kebutuhan ruang yang diperlukan untuk pemukiman, pertanian, infrastruktur, serta aktivitas sosial ekonomi lainnya. Dengan membandingkan kedua variabel tersebut, dapat diketahui apakah suatu wilayah memiliki daya dukung yang surplus, seimbang, atau defisit. Jika ketersediaan lahan lebih besar dari kebutuhan, maka wilayah tersebut berada dalam kondisi surplus daya dukung. Sebaliknya, apabila kebutuhan lahan melebihi ketersediaannya, maka wilayah tersebut berada dalam

tekanan, yang berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan dan ketidakseimbangan tata ruang. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

- Ø Bila SL > DL, daya dukung lahan dinyatakan surplus.
- Ø Bila SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui.

Status daya dukung lahan Kabupaten Sikka pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kemampuan Dan Kesesuaian Lahan

No	Kecamatan	Nilai Produksi			Total Σ (Pi x Hi)	Harga satuan beras (Rp/kg)Hb	Produktivitas beras (kg/ha) Ptvb	Ketersediaan Lahan (Ha) SL	Jumlah penduduk 2022 (orang) N	Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk	Total Kebutuhan lahan setara beras (ha) DL	Status daya dukung lahan	Ket
		Tani	Ternak	Kebun									
1	Paga	3.446.362.000	141.659.315.500	9.586.924.83,10	154.692.602.083	11100	2400	5.806,78	16308	0,17	2.771	S L>D L	Surplus
2	Mego	3.269.443.500	30.061.992.000	61.406.238.946,20	94.737.67.446	11100	2400	3.556,22	13168	0,17	2.239	S L>	Surplus
3	Tanawawo	3.657.0 95.500	16.994.251.500	11.255.698.042,82	31.907.045.043	11100	2400	1.197,71	8803	0,17	1.497	S L	Defisit
4	Lela	434.733.0	22.397.377.500	34.082.501.250,00	56.914.611.750	11100	2400	2.136,43	11835	0,17	2.012	S L> D L	Surplus
5	Bola	1.052.139.000	27.075.641.000	60.724.319.396,20	88.852.09.396	11100	2400	3.335,29	11087	0,17	1.885	S L> D L	Surplus
6	Doreng	527.082.000	22.305.310.500	9.476.692.769,20	32.309.085.269	11100	2400	1.212,80	12111	0,17	2.059	S L< D L	Defisit
7	Mapitara	9.711.117.500	23.202.037.000	46.937.954.280,10	79.851.108.780	11100	2400	2.997,41	6815	0,17	2.159	S L> D L	Surplus
8	Talibura	3.615.301.500	68.589.951.500	65.946.856.385,60	138.152.109.386	11100	2400	5.185,89	22830	0,17	3.881	S L> D L	Surplus
9	Waigete	2.235.591.000	44.997.966.500	71.593.316.423,70	118.826.873.924	11100	2400	4.460,47	25339	0,17	4.308	S L> D L	Surplus
10	Waiblama	1.824.103.500	19.937.637.000	78.743.681.209,00	100.505.421.709	11100	2400	3.772,73	8223	0,17	1.398	S L> D L	Surplus
11	Kewapante	1.673.135.500	23.623.778.000	31.912.710.986,80	57.209.624.487	11100	2400	2.147,51	14747	0,17	2.507	S L	Defisit
12	Hewokloang	1.162.067.500	9.037.362.500	52.462.559.896,30	62.661.989.896	11100	2400	2.352,18	9499	0,17	1.615	S L> D L	Surplus
13	Kangae	14.470.248.000	33.835.697.000	41.675.446.789,92	89.981.391.790	11100	2400	3.377,68	17864	0,17	3.037	S L> D L	Surplus
14	Palue	4.393.248.000	6.966.353.500	18.781.168.294,90	30.140.769.795	11100	2400	1.131,41	9442	0,17	1.605	S L< D L	Defisit
15	Koting	825.586.500	9.891.517.000	52.883.600.560,00	63.600.704.060	11100	2400	2.387,41	6538	0,17	1.111	S L> D L	Surplus

No	Kecamatan	Nilai Produksi			Total Σ (Pi x Hi)	Harga satuan beras (Rp/kg)Hb	Produktivitas beras (kg/ha) Ptvb	Ketersediaan Lahan (Ha) SL	Jumlah penduduk 2022 (orang) N	Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk	Total Kebutuhan lahan setara beras (ha) DL	Status daya dukung lahan	Ket
		Tani	Ternak	Kebun									
16	Nelle	1.717.049.500	8.224.182.000	63.540.892.223,10	73.482.123.723	11100	2400	2.758,34	6116	0,17	1.040	S L> D L	Surplus
17	Nita	4.149.915.500	24.956.992.500	33.021.290.517,00	62.128.198.517	11100	2400	2.332,14	22195	0,17	3.773	S L< D L	Defisit
18	Magepanda	4.237.767.000	33.450.556.500	83.041.311.527,30	120.729.635.027	11100	2400	4.531,89	13097	0,17	2.226	S L> D L	Surplus
19	Alok	2.819.550.000	10.876.656.500	22.323.169.746,30	36.019.376.246	11100	2400	1.352,08	31931	0,17	5.428	S L< D L	Defisit
20	Alok Barat	384.708.800	36.106.919.500	35.306.400.080,00	71.798.028.380	11100	2400	2.695,12	21744	0,17	3.696	S L< D L	Defisit
21	Alok Timur	2.714.9 08.500	17.749.071.000	7.980.282.256,80	28.444.261.757	11100	2400	1.067,73	32073	0,17	5.452	S L< D L	Defisit
Jumlah		68.321.153.300	631.940.566.000	892.683.016.164	1.592.944.735.464	233.100	2400	59.795	321.765	4	54.700		

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Analisis daya dukung lahan Kabupaten Sikka menunjukkan total ketersediaan lahan (SL) seluas 59.795 hektar dibandingkan total kebutuhan lahan setara beras (DL) sebesar 54.700 hektar untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi 321.765 penduduk. Ini mengindikasikan status daya dukung lahan secara agregat berada dalam kondisi surplus. Namun, ketimpangan distribusi antar kecamatan masih nyata. Dari 21 kecamatan, sebanyak 14 kecamatan menunjukkan status surplus (SL>DL), seperti Talibura, Magepanda, Waigete, dan Mapitara. Sebaliknya, 7 kecamatan mengalami defisit daya dukung lahan, termasuk Alok, Alok Barat, Alok Timur, Nita, dan Tanawawo, dengan jumlah penduduk tinggi dan luasan lahan produktif yang terbatas. Kecamatan seperti Talibura memiliki ketersediaan lahan sebesar 5.185,89 hektar dan hanya membutuhkan 3.881 hektar, menghasilkan surplus yang signifikan. Sebaliknya, Alok hanya memiliki 1.352,08 hektar lahan untuk mencukupi kebutuhan 5.428 hektar, menciptakan kesenjangan daya dukung.

Data ini memperlihatkan bahwa daya dukung lahan di Sikka tidak hanya dipengaruhi oleh nilai produksi pertanian, namun juga kepadatan penduduk dan produktivitas lahan. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan ke depan perlu mempertimbangkan redistribusi pemanfaatan lahan, peningkatan produktivitas pertanian, dan diversifikasi sumber daya pangan yang sesuai dengan karakteristik wilayah untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan tujuan perencanaan yang hendak dicapai, analisis ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lahan-lahan yang memiliki potensi serta mencegah terjadinya pembangunan pada kawasan lindung. Upaya ini dilakukan guna mengatur peruntukan lahan secara tepat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan tingkat bahaya erosi agar tidak melebihi batas ambang yang dapat ditoleransi. Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya mengacu pada ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/II/1980 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Lindung. Melalui proses perhitungan dan pengolahan peta dengan mempertimbangkan berbagai variabel, seperti kondisi iklim, jenis dan sifat tanah, serta kemiringan lereng, diperoleh klasifikasi kesesuaian lahan di wilayah Kabupaten Sikka. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas lahan yang paling sesuai untuk kawasan budidaya di Kabupaten Sikka mencapai sekitar 59.795,22 hektar. Temuan ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan serta pengendalian pemanfaatan lahan agar sejalan dengan prinsip konservasi lingkungan.

b. Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian merupakan indikator penting yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi tanaman pangan, khususnya padi maupun komoditas pangan lainnya, guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk secara mandiri. Konsep ini mencerminkan sejauh mana kapasitas lahan pertanian dapat mendukung tercapainya ketahanan dan kemandirian pangan di tingkat lokal. Di Kabupaten Sikka, daya dukung lahan pertanian ditunjukkan melalui hasil perhitungan tabel di bawah ini, berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Sikka memiliki lahan dengan tingkat kesesuaian tinggi untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu mendukung program swasembada pangan serta memberikan tingkat kehidupan yang layak bagi masyarakat setempat. Hal ini menjadi dasar strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan di wilayah tersebut.

Daya dukung lahan pertanian merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan/padi dan atau tanaman pangan yang lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah. Daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Sikka termasuk dalam lahan yang sesuai untuk swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya.

Tabel 2.24
Luas Panen Tanaman Pangan per kapita Kabupaten Sikka Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045

No.	Kecamatan	2022	2025	2030	2035	2040	2045	Luas Lahan untuk Swasembada Pangan
1	Paga	0,161	0,158	0,154	0,149	0,145	0,141	0,009
2	Mego	0,133	0,129	0,122	0,12	0,114	0,109	0,03
3	Tanawawo	0,165	0,164	0,162	0,161	0,159	0,157	0,038
4	Lela	0,156	0,146	0,131	0,118	0,106	0,095	0,061
5	Bola	0,118	0,108	0,092	0,079	0,067	0,058	0,031
6	Doreng	0,096	0,094	0,092	0,089	0,087	0,084	0,028
7	Mapitara	0,162	0,151	0,135	0,12	0,106	0,095	0,026
8	Talibura	0,096	0,091	0,083	0,075	0,069	0,062	0,037
9	Waigete	0,08	0,074	0,065	0,057	0,05	0,044	0,042
10	Waiblama	0,264	0,239	0,203	0,172	0,146	0,124	0,026
11	Kewapante	0,108	0,102	0,092	0,084	0,076	0,069	0,05
12	Hewokloang	0,062	0,06	0,057	0,055	0,053	0,05	0,05
13	Kangae	0,138	0,13	0,119	0,108	0,098	0,089	0,032
14	Palue	0,14	0,132	0,12	0,108	0,098	0,089	0,196
15	Koting	0,139	0,134	0,127	0,12	0,114	0,108	0,016
16	Nelle	0,045	0,043	0,04	0,037	0,034	0,032	0,014
17	Nita	0,062	0,061	0,058	0,055	0,053	0,05	0,023
18	Magepanda	0,19	0,185	0,178	0,171	0,164	0,158	0,031
19	Alok	0,037	0,036	0,033	0,031	0,029	0,027	0,034
20	Alok Barat	0,034	0,026	0,018	0,012	0,008	0,005	0,021
21	Alok Timur	0,031	0,031	0,03	0,029	0,028	0,027	0,036
	Total	0,097	0,096	0,093	0,09	0,087	0,084	0,831

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi pada luas panen tanaman pangan per kapita di Kabupaten Sikka diperkirakan mengalami penurunan secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2045 di hampir seluruh kecamatan. Misalnya, Kecamatan Paga menurun dari 0,161 hektar/kapita pada 2022 menjadi 0,141 hektar/kapita pada 2045; demikian juga Kecamatan Lela dari 0,156 menjadi 0,095 hektar/kapita. Kecamatan Waiblama mencatat angka tertinggi pada 2022 sebesar 0,264 namun menurun menjadi 0,124 pada 2045. Sebaliknya, kecamatan seperti Alok dan Alok Timur mencatat angka yang relatif rendah sepanjang periode. Adapun total rata-rata luas panen per kapita kabupaten juga menurun dari 0,097 hektar/kapita pada 2022 menjadi 0,084 hektar/kapita pada 2045. Sementara itu, alokasi luas lahan untuk swasembada pangan secara keseluruhan tercatat sebesar 0,831 hektar, dengan Kecamatan Palue memiliki cadangan lahan terbesar (0,196 ha), dan beberapa kecamatan lainnya seperti Nelle dan Koting memiliki cadangan sangat terbatas. Tren ini mencerminkan tekanan terhadap ketersediaan lahan pertanian akibat pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan, serta menegaskan pentingnya kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Sikka. Kondisi ini mempengaruhi proyeksi luas daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Sikka, lihat tabel berikut.

Tabel 2.25
Luas Daya Dukung Lahan Pertanian Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045

No.	Kecamatan	2022	2025	2030	2035	2040	2045
1	Paga	0,161	0,158	0,154	0,149	0,145	0,141
2	Mego	0,133	0,129	0,122	0,12	0,114	0,109
3	Tanawawo	0,165	0,164	0,162	0,161	0,159	0,157
4	Lela	0,156	0,146	0,131	0,118	0,106	0,095
5	Bola	0,118	0,108	0,092	0,079	0,067	0,058

No.	Kecamatan	2022	2025	2030	2035	2040	2045
6	Doreng	0,096	0,094	0,092	0,089	0,087	0,084
7	Mapitara	0,162	0,151	0,135	0,12	0,106	0,095
8	Talibura	0,096	0,091	0,083	0,075	0,069	0,062
9	Waigete	0,08	0,074	0,065	0,057	0,05	0,044
10	Waiblama	0,264	0,239	0,203	0,172	0,146	0,124
11	Kewapante	0,108	0,102	0,092	0,084	0,076	0,069
12	Hewokloang	0,062	0,06	0,057	0,055	0,053	0,05
13	Kangae	0,138	0,13	0,119	0,108	0,098	0,089
14	Palue	0,14	0,132	0,12	0,108	0,098	0,089
15	Koting	0,139	0,134	0,127	0,12	0,114	0,108
16	Nelle	0,045	0,043	0,04	0,037	0,034	0,032
17	Nita	0,062	0,061	0,058	0,055	0,053	0,05
18	Magepanda	0,19	0,185	0,178	0,171	0,164	0,158
19	Alok	0,037	0,036	0,033	0,031	0,029	0,027
20	Alok Barat	0,034	0,026	0,018	0,012	0,008	0,005
21	Alok Timur	0,031	0,031	0,03	0,029	0,028	0,027
	Total	0,097	0,096	0,093	0,09	0,087	0,084

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Data daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Sikka diperkirakan akan mengalami penurunan kapasitas secara konsisten dari tahun 2022 hingga 2045 di seluruh kecamatan. Rata-rata daya dukung kabupaten menurun dari 0,097 ha/kapita pada 2022 menjadi 0,084 ha/kapita pada 2045. Kecamatan dengan daya dukung tertinggi awalnya adalah Waiblama (0,264 ha/kapita), namun menurun menjadi 0,124 ha/kapita pada 2045. Kecamatan-kecamatan dengan kapasitas cukup stabil namun tetap menurun meliputi Tanawawo, Magepanda, dan Paga. Sementara itu, kecamatan dengan daya dukung sangat terbatas seperti Alok, Alok Barat, dan Alok Timur mencatat angka kurang dari 0,035 ha/kapita sejak awal periode. Penurunan ini mencerminkan tekanan terhadap sumber daya lahan akibat pertumbuhan penduduk dan konversi lahan, sehingga menuntut perlindungan terhadap lahan pertanian produktif serta penguatan kebijakan ketahanan pangan yang adaptif dan berkelanjutan.

c. Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air

Data daya dukung air berdasarkan sistem grid menunjukkan bahwa dari total keseluruhan kebutuhan air di Kabupaten Sikka sebesar 167.164,00 satuan volume, terdapat 113.036,13 satuan volume yang belum terlampaui (masih dalam batas daya dukung lingkungan), dan 54.127,87 satuan volume yang telah terlampaui (melebihi kapasitas daya dukung air wilayah). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 32,38 persen dari total daya dukung air di kabupaten ini telah terlampaui, sehingga memerlukan perhatian dalam pengelolaan sumber daya air. Kondisi eksisting dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
DDDTLH Air Grid Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	Belum Terlampaui	Terlampaui	Total
1	Alok	1519,03	596,13	2115,16
2	Alok Barat	4430,76	12,02	4442,78
3	Alok Timur	5799,31	2182,36	7981,67
4	Bola	3098,05	1234,28	4332,33
5	Doreng	4157,23	985,94	5143,17
6	Hewokloang	1328,63	723,69	2052,32
7	Kangae	1270,64	2702,49	3973,14
8	Kewapante	393,11	1903,24	2296,35
9	Koting	1340,89	116,33	1457,22
10	Lela	4628,99		4628,99
11	Magepanda	10342,35	3301,60	13643,95

No.	Kecamatan	Belum Terlampaui	Terlampaui	Total
12	Mapitara	7591,92	699,04	8290,96
13	Mego	8234,14	2624,10	10858,23
14	Nelle	543,94	671,82	1215,76
15	Nita	11179,10	253,61	11432,71
16	Paga	1700,31	5958,33	7658,65
17	Palue	3938,76	-	3938,76
18	Talibura	14938,03	12598,57	27536,61
19	Tana Wawo	3828,73	3882,55	7711,28
20	Waiblama	6615,18	6492,49	13107,67
21	Waigete	16157,03	7189,27	23346,30
	Total	113036,13	54127,87	167164,00

Sumber: Dokumen KLHS, 2024

Dari data DDDTLH Air Grid Kabupaten Sikka tahun 2025 diketahui bahwa kecamatan dengan nilai tertinggi daya dukung yang telah terlampaui antara lain Talibura (12.598,57), Waigete (7.189,27), dan Paga (5.958,33), menandakan adanya tekanan tinggi terhadap ketersediaan air di wilayah tersebut. Sementara itu, kecamatan seperti Lela dan Palue belum mencatatkan beban terlampaui, yang berarti kapasitas daya dukung air di wilayah tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan eksisting. Kecenderungan tekanan daya dukung juga terlihat di Kangae, Kewapante, dan Tana Wawo yang memiliki nilai terlampaui lebih dari 2.000 satuan volume.

Sementara, proyeksi daya dukung air suatu wilayah untuk tahun 2025-2029 dapat diketahui berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah itu. Dengan metode ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan. Berikut data proyeksi terkait daya dukung air di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.27
Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sikka
Tahun 2025 – 2045

No.	Kecamatan	2022	2025	2029	Keterangan	
1	Paga	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
2	Mego	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus	Belum terlampaui
3	Tana Wawo	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus	Belum terlampaui
4	Lela	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
5	Bola	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
6	Doreng	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
7	Mapitara	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus	Belum terlampaui
8	Talibura	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus	Belum terlampaui
9	Waigete	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus	Belum terlampaui
10	Waiblama	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus	Belum terlampaui
11	Kewapante	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
12	Hewokloang	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
13	Kangae	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
14	Palue	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
15	Koting	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
16	Nelle	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
17	Nita	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
18	Magepanda	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus	Belum terlampaui
19	Alok	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
20	Alok Timur	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit	Terlampaui
21	Alok Barat	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus	Belum terlampaui

Sumber: Dokumen KLHS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan daya dukung air Kabupaten Sikka pada tahun 2025 - 2029 menunjukkan bahwa akan ada 7 kecamatan dengan status daya dukung air yang dinyatakan surplus (belum terlampaui) dan ada 14 Kecamatan dengan status defisit (terlampaui).

d. Daya Dukung Fungsi Lindung

Hutan dengan penyebaran vegetasinya yang luas, dengan struktur dan komposisinya yang sangat beragam merupakan salah satu komponen sumber daya alam terpenting dalam ekosistem. Keberadaan hutan diharapkan mampu memberi manfaat lingkungan yang besar bagi kehidupan manusia, antara lain dalam pengendalian banjir, erosi, sedimentasi, pemeliharaan keanekaragaman hayati, pengendalian daur air dan pemeliharaan kualitas udara. DDDTLH Fungsi Lindung Grid Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28

DDDTLH Fungsi Lindung Grid Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	DDL	Keterangan
1	Alok	0,38	Cukup Baik
2	Alok Barat	0,42	Cukup Baik
3	Alok Timur	0,46	Cukup Baik
4	Bola	0,47	Cukup Baik
5	Doreng	0,59	Baik
6	Hewokloang	0,46	Cukup Baik
7	Kangae	0,40	Cukup Baik
8	Kewanpate	0,43	Cukup Baik
9	Koting	0,47	Cukup Baik
10	Lela	0,47	Cukup Baik
11	Magepanda	0,55	Baik
12	Mapitara	0,56	Baik
13	Mego	0,48	Cukup Baik
14	Nelle	0,36	Cukup Baik
15	Nita	0,53	Baik
16	Paga	0,43	Cukup Baik
17	Palue	0,47	Cukup Baik
18	Talibura	0,48	Cukup Baik
19	Tana Wawo	0,49	Cukup Baik
20	Waiblama	0,45	Cukup Baik
21	Waigete	0,55	Baik

Sumber: Dokumen KLHS, 2025

Nilai Indeks daya dukung fungsi lindung memiliki rentang nilai antara 0-1 (nilai maksimal 1 dan minimal 0) diinterpretasikan bahwa semakin semakin mendekati 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada di Kabupaten Sikka, sebaliknya apabila mendekati nilai 0, maka fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Berdasarkan tabel di atas, daya dukung fungsi lindung Kabupaten Sikka tahun 2025 dikategorikan baik yang berada pada rentang cukup baik (di 16 kecamatan) dan baik (di 5 kecamatan).

e. Daya Tampung Penduduk

Daya tampung sangat berkaitan dengan alokasi penggunaan lahan perumahan yaitu dengan mempertimbangkan kondisi eksisting persebaran permukiman dan kebutuhan permukiman sampai akhir tahun perencanaan. Daya tampung juga berfungsi untuk melihat jumlah kebutuhan ruang untuk perumahan pada tahun perencanaan 2040 dengan membandingkan kesesuaian lahan potensial yang ada. Asumsi yang digunakan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 34 bahwa melakukan analisis daya tampung penduduk perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Oleh karena itu lingkungan hunian harus dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah. Berdasarkan ketentuan hunian berimbang maka perkiraan jumlah dan tipe rumah dilakukan dengan komposisi 3:2:1 (kavling sederhana:menengah:mewah). Daya Tampung Penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Daya Tampung Permukiman Kabupaten Sikka Tahun 2045

No.	Kecamatan	Penggunaan Lahan Eksisting	PSU (30%)	Perumahan (70%)	Luas Lahan Bagi Perumahan Baru			Jumlah Unit Rumah			Daya Tampung Rumah (unit)	Daya Tampung Penduduk (jiwa)	Jumlah penduduk 2045	Ket
					Tipe Mewah (1)	Tipe Menengah (2)	Tipe Sederhana (3)	Tipe Mewah (1)	Tipe Menengah (2)	Tipe Sederhana (3)				
		A	B = (Ax30%)	C = (Ax70%)	D= (Cx1/3)	Ec (Cx2/3)	F=(Cx3/3)	H = (Dx10.000 m/ 288 m2)	I = (E x10.000 m/144 m2)	J = (Fx 10.000 m/ 72 m2)	K = H+I+J	L = Kx 4 jiwa		
1	Paga	253,45	76,04	177,42	29,57	59,14	88,71	1026,71	4106,84	12320,52	17454,08	69816	18986	Memenuhi
2	Mego	94,14	28,24	65,90	10,98	21,97	32,95	381,36	1525,43	4576,30	6483,09	25932	16087	Memenuhi
3	Tana Wawo	109,52	32,86	76,66	12,78	25,55	38,33	443,65	1774,62	5323,85	7542,12	30168	9458	Memenuhi
4	Lela	241,30	72,39	168,91	28,15	56,30	84,46	977,49	3909,96	11729,89	16617,35	66469	19010	Memenuhi
5	Bola	251,79	75,54	176,25	29,38	58,75	88,13	1019,99	4079,97	12239,91	17339,87	69359	22180	Memenuhi
6	Doreng	68,62	20,59	48,04	8,01	16,01	24,02	277,98	1111,93	3335,78	4725,68	18903	13917	Memenuhi
7	Mapitara	85,14	25,54	59,60	9,93	19,87	29,80	344,88	1379,53	4138,60	5863,01	23452	11564	Memenuhi
8	Talibura	375,93	112,78	263,15	43,86	87,72	131,58	1522,87	6091,49	18274,46	25888,82	103555	35126	Memenuhi
9	Waigete	305,15	91,54	213,60	35,60	71,20	106,80	1236,12	4944,49	14833,48	21014,10	84056	46519	Memenuhi
10	Waiblama	35,09	10,53	24,56	4,09	8,19	12,28	142,13	568,51	1705,54	2416,18	9665	17651	Memenuhi
11	Kewapante	301,65	90,50	211,16	35,19	70,39	105,58	1221,97	4887,87	14663,61	20773,44	83094	23474	Memenuhi
12	Hewokloang	206,32	61,90	144,43	24,07	48,14	72,21	835,80	3343,22	10029,65	14208,67	56835	11243	Memenuhi
13	Kangae	601,85	180,55	421,29	70,22	140,43	210,65	2438,04	9752,15	29256,44	41446,62	165786	28572	Memenuhi
14	Palue	135,01	40,50	94,51	15,75	31,50	47,25	546,93	2187,71	6563,14	9297,78	37191	14914	Memenuhi
15	Koting	210,81	63,24	147,56	24,59	49,19	73,78	853,96	3415,82	10247,47	14517,25	58069	8408	Memenuhi
16	Nelle	547,90	164,37	383,53	63,92	127,84	191,77	2219,52	8878,07	26634,21	37731,80	150927	8813	Memenuhi
17	Nita	485,62	145,69	339,93	56,66	113,31	169,97	1967,21	7868,83	23606,49	33442,53	133770	28652	Memenuhi
18	Magepanda	220,50	66,15	154,35	25,73	51,45	77,18	893,24	3572,94	10718,83	15185,00	60740	15615	Memenuhi
19	Alok	4,87	1,46	3,41	0,57	1,14	1,71	19,75	78,99	236,97	335,71	1343	44411	Memenuhi
20	Alok Timur	637,00	191,10	445,90	74,32	148,63	222,95	2580,45	10321,79	30965,37	43867,61	175470	146267	Memenuhi
21	Alok Barat	412,38	123,71	288,66	48,11	96,22	144,33	1670,51	6682,04	20046,13	28398,68	113595	37336	Memenuhi
Total		5.584,04	1675,21	3908,83	651,47	1302,94	1954,42	22620,55	90482,21	271446,62	384549,38	1538198	377948	Memenuhi

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan proyeksi daya tampung permukiman Kabupaten Sikka tahun 2045, seluruh kecamatan dinyatakan mampu memenuhi kebutuhan hunian penduduk. Total lahan yang tersedia untuk perumahan baru mencapai 3.908,83 hektar dari luas penggunaan lahan eksisting sebesar 5.584,04 hektar, setelah dikurangi 30 persen untuk prasarana dan sarana umum (PSU). Dengan alokasi proporsional untuk tipe rumah sederhana, menengah, dan mewah, daya tampung hunian mencapai 384.549 unit rumah yang mampu menampung sekitar 1.538.198 jiwa. Kecamatan dengan kapasitas daya tampung terbesar antara lain Alok Timur (43867 unit rumah), Kangae (41446 unit), dan Talibura (25888 unit), sementara kecamatan dengan kapasitas terkecil adalah Alok (335 unit). Jika dibandingkan dengan jumlah proyeksi penduduk tahun 2045, secara keseluruhan Kabupaten Sikka masih memiliki daya tampung hunian yang mencukupi, dengan surplus kapasitas di sebagian besar kecamatan, menandakan kesiapan wilayah dalam mendukung pertumbuhan penduduk secara spasial hingga tahun 2045.

f. Dukungan Fungsi Ekosistem atau Jasa Lingkungan Hidup

Kajian yang dilakukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsiannya. Kajian ini ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama di dalamnya adalah, yaitu:

1) Layanan/fungsi penyedia (*provisioning service*)

Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air, dan lain-lain.

a) Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Jasa Lingkungan untuk penyediaan bahan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Penyediaan bahan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, peternakan, hasil laut, dan termasuk pangan dari hasil hutan. Hasil analisis DDDTLH di Kabupaten Sikka berdasarkan Jasa Lingkungan, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.30
Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	741.285	-	403.234	636.958	316.295	2097.773
2	Alok Barat	-	-	730.202	2130.088	1952.022	4812.312
3	Alok Timur	66.066	16.424	4165.672	267.937	3498.198	8014.296
4	Bola	-	-	4493.520	-	0.611	4494.131
5	Doreng	-	-	4463.625	-	935.268	5398.893
6	Hewokloang	-	-	1154.026	-	634.502	1788.528
7	Kangae	-	-	1051.502	59.318	2855.759	3966.579
8	Kewapante	-	-	146.570	75.224	1985.766	2207.560
9	Koting	0.633	793.220	621.498	-	-	1415.351
10	Lela	-	-	4594.103	-	-	4594.103
11	Magepanda	-	-	5947.856	5491.849	2180.415	13620.120
12	Mapitara	-	-	3437.650	42.227	4803.388	8283.265
13	Mego	-	-	9842.893	343.472	-	10186.365
14	Nelle	-	259.740	1034.697	-	35.405	1329.842
15	Nita	143.918	915.770	9756.499	349.306	0.872	11166.365
16	Paga	-	-	6944.017	205.659	-	7149.676
17	Palue	-	-	3779.736	154.019	34.951	3968.705
18	Talibura	666.357	5197.784	14816.113	2309.473	5713.246	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	8934.932	19.056	-	8953.988

20	Waiblama	1461.791	3936.490	3585.778	-	3009.640	11993.699
21	Waigete	-	-	10610.560	1558.006	11115.958	23284.523
Total		3080.050	11119.428	100514.681	13642.592	39072.295	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Sikka mencakup total luasan 167.429,05 hektar yang tersebar dalam lima kategori. Sebagian besar wilayah berada dalam kategori sedang (100.514,68 ha), diikuti sangat tinggi (39.072,30 ha), tinggi (13.642,59 ha), rendah (11.119,43 ha), dan sangat rendah (3.080,05 ha). Kecamatan dengan luasan tertinggi untuk penyediaan pangan adalah Talibura (28.702,97 ha), Waigete (23.284,52 ha), dan Magepanda (13.620,12 ha), yang ketiganya mencakup luasan besar pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Beberapa kecamatan seperti Mego, Nita, dan Paga juga memiliki kontribusi signifikan pada kategori sedang. Sebaliknya, kecamatan seperti Alok dan Koting memiliki distribusi yang lebih terbatas, dengan porsi lebih kecil di kategori sangat tinggi. Data ini menunjukkan peran strategis ekosistem di Sikka dalam mendukung ketahanan pangan daerah, sehingga perlu dijaga melalui praktik tata kelola lahan yang berkelanjutan dan konservasi kawasan produktif.

b) Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih

Jasa Lingkungan untuk memberikan manfaat bagi penyediaan air bersih, berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang berasal dari air permukaan (sungai, rawa-rawa, telaga, danau, dan waduk atau bendungan), dan air tanah (termasuk mata air), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan batuan yang dapat menyimpan air (akuifer), serta faktor yang dapat memengaruhi sistem penyimpanan air tanah. Hasil analisis DDDTLH di Kabupaten Sikka berdasarkan Jasa Lingkungan untuk penyediaan sumber air bersih atau air baku, disajikan dalam di bawah ini:

Tabel 2.31
Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	455.383	315.326	1260.673	66.391	-	2097.773
2	Alok Barat	2130.088	1914.522	730.202	37.500	-	4812.312
3	Alok Timur	758.894	3479.659	3674.715	101.029	-	8014.296
4	Bola	-	0.611	4493.520	-	-	4494.131
5	Doreng	4.524	935.268	4459.100	-	-	5398.893
6	Hewokloang	-	634.502	1154.026	-	-	1788.528
7	Kangae	-	1934.449	1110.820	921.310	-	3966.579
8	Kewapante	-	1479.159	221.795	506.607	-	2207.560
9	Koting	-	0.633	621.498	793.220	-	1415.351
10	Lela	-	-	4594.103	-	-	4594.103
11	Magepanda	4761.095	629.286	5942.211	2286.745	0.783	13620.120
12	Mapitara	99.097	4803.388	2956.120	424.660	-	8283.265
13	Mego	524.370	-	9661.995	-	-	10186.365
14	Nelle	-	35.405	1034.697	259.740	-	1329.842
15	Nita	372.732	144.789	9752.101	896.741	-	11166.365
16	Paga	205.659	-	6944.017	-	-	7149.676
17	Palue	2357.830	34.951	1575.925	-	-	3968.705
18	Talibura	2687.187	5163.153	13471.190	6110.928	1270.515	28702.972
19	Tana Wawo	1394.236	-	7559.752	-	-	8953.988
20	Waiblama	122.733	4506.514	6737.025	627.427	-	11993.699
21	Waigete	1693.929	8418.962	10395.494	2739.161	36.977	23284.523
Total		17567.757	34430.577	98350.978	15771.459	1308.275	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Data jasa lingkungan penyedia air bersih di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa total luas kawasan dengan fungsi penyediaan air bersih mencapai 167.429,05 hektar, tersebar dalam lima kategori tingkat ketersediaan: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sebagian besar wilayah berada pada kategori sedang (98.350,98 ha), diikuti kategori rendah (34.430,58 ha), tinggi (15.771,46 ha), sangat rendah (17.567,76 ha), dan sangat tinggi (1.308,28 ha). Kecamatan dengan kontribusi terbesar adalah Talibura (28.702,97 ha), Waigete (23.284,52 ha), Waiblama (11.993,70 ha), dan Nita (11.166,37 ha). Sementara beberapa kecamatan seperti Bola dan Lela memiliki cakupan terbatas namun berada sepenuhnya dalam kategori sedang, mencerminkan efektivitas hidrologi setempat. Magepanda juga mencatat kawasan luas dengan distribusi merata dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Distribusi ini menegaskan pentingnya perlindungan daerah tangkapan air dan pengelolaan tata ruang berbasis ekosistem untuk menjamin keberlanjutan pasokan air bersih di masa depan.

c) Jasa Lingkungan Penyedia Serat

Serat (fiber) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam serat tumbuhan atau serat pangan, serat kayu, serat hewan, dan serat mineral, seperti logam dan karbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta biokimia. Adapun penjelasannya tabel sebagai berikut:

Tabel 2.32
Jasa Lingkungan Penyedia Serat di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Serat (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	455.383	1362.673	183.480	29.846	66.391	2097.773
2	Alok Barat	2130.088	2644.723	-	-	37.500	4812.312
3	Alok Timur	7.668	6581.919	260.269	1063.412	101.029	8014.296
4	Bola	-	4494.131	-	-	-	4494.131
5	Doreng	4.524	5394.369	-	-	-	5398.893
6	Hewokloang	-	1788.528	-	-	-	1788.528
7	Kangae	-	2858.096	59.318	127.855	921.310	3966.579
8	Kewapante	-	1625.729	75.224	-	506.607	2207.560
9	Koting	-	547.827	-	74.304	793.220	1415.351
10	Lela	-	4594.103	-	-	-	4594.103
11	Magepanda	4755.000	6529.865	0.449	1436.290	898.516	13620.120
12	Mapitara	42.227	7816.378	-	-	424.660	8283.265
13	Mego	343.472	9842.893	-	-	-	10186.365
14	Nelle	-	396.742	-	673.361	259.740	1329.842
15	Nita	372.732	9864.014	19.029	13.848	896.741	11166.365
16	Paga	205.659	6944.017	-	-	-	7149.676
17	Palue	154.019	3814.686	-	-	-	3968.705
18	Talibura	1532.353	16505.107	2467.204	2255.544	5942.764	28702.972
19	Tana Wawo	19.056	8934.932	-	-	-	8953.988
20	Waiblama	-	6034.743	4949.926	381.603	627.427	11993.699
21	Waigete	1478.863	17887.826	-	1355.240	2562.594	23284.523
Total		11501.045	126463.300	8014.900	7411.302	14038.499	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan penyedia serat di Kabupaten Sikka mencakup total area 167.429,05 hektar, dengan dominasi terbesar berada pada kategori rendah seluas 126.463,30 ha, disusul kategori sangat tinggi (14.038,50 ha), sedang (8.014,90 ha), tinggi (7.411,30 ha), dan sangat rendah (11.501,05 ha). Kecamatan dengan kontribusi tertinggi adalah Talibura (28.702,97 ha), diikuti oleh Waigete (23.284,52 ha), Magepanda (13.620,12 ha), dan Waiblama (11.993,70 ha), yang menunjukkan sebaran lintas kategori, termasuk signifikan di kategori tinggi dan sangat tinggi. Beberapa wilayah seperti Doreng, Mego, dan Mapitara juga memiliki luasan dominan pada kategori rendah. Distribusi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sikka memiliki potensi tinggi dalam penyediaan bahan serat alami baik dari tanaman maupun ekosistem hutan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung ekonomi lokal dan industri berbasis sumber daya hayati, dengan tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan jangka panjang.

d) Jasa Lingkungan Penyedia Energi

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan bakar, kayu, dan forsil baik yang berasal dari energi fosil seperti minyak bumi dan batubara, serta sumber energi alternatif dari alam seperti: tenaga air mikrohidro, tenaga matahari, tenaga angin, dan panas bumi. Selain itu ekosistem juga menyediakan energi yang berasal dari biomassa minyak tanaman, seperti: minyak sawit atau minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi. Sumber energi fosil dan tenaga alam dapat diduga berdasarkan struktur geologi dan bentukan lahannya, sedangkan untuk sumber energi biomassa dan tanaman kayu-kayuan dapat dilihat dari pola Ekoregion Bentang lahan ataupun penutup lahan. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.33

Jasa Lingkungan Penyedia Energi di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Energi (Ha)				Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Alok	926.670	-	96.237	1074.866	2097.773
2	Alok Barat	-	-	350.931	4461.381	4812.312
3	Alok Timur	326.334	-	1875.193	5812.769	8014.296
4	Bola	-	-	-	4494.131	4494.131
5	Doreng	4.524	-	-	5394.369	5398.893
6	Hewokloang	-	-	-	1788.528	1788.528
7	Kangae	59.318	-	1049.165	2858.096	3966.579
8	Kewapante	75.224	-	506.607	1625.729	2207.560
9	Koting	0.633	-	867.524	547.194	1415.351
10	Lela	-	-	-	4594.103	4594.103
11	Magepanda	-	47.277	1199.510	12373.333	13620.120
12	Mapitara	-	-	42.227	8241.038	8283.265
13	Mego	-	-	332.504	9853.861	10186.365
14	Nelle	-	-	933.101	396.742	1329.842
15	Nita	167.344	-	910.590	10088.431	11166.365
16	Paga	-	-	154.278	6995.398	7149.676
17	Palue	-	-	154.019	3814.686	3968.705
18	Talibura	164.323	2382.891	4803.492	21352.266	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	-	8953.988	8953.988
20	Waiblama	-	2831.638	2185.094	6976.967	11993.699
21	Waigete	-	-	4629.618	18654.905	23284.523
Total		1724.372	5261.807	20090.089	140352.778	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan penyedia serat di Kabupaten Sikka mencakup total luasan sebesar 167.429,05 hektar yang tersebar dalam lima kategori, yakni sangat rendah (11.501,05 ha),

rendah (126.463,30 ha), sedang (8.014,90 ha), tinggi (7.411,30 ha), dan sangat tinggi (14.038,50 ha). Distribusi terbesar berada pada kategori rendah, menunjukkan dominasi wilayah dengan potensi serat alami yang sedang namun belum sepenuhnya termanfaatkan secara intensif. Kecamatan Talibura memiliki kontribusi tertinggi (28.702,97 ha), diikuti Waigete (23.284,52 ha), Waiblama (11.993,70 ha), dan Nita (11.166,37 ha). Beberapa kecamatan seperti Magepanda dan Alok Timur juga menunjukkan variasi distribusi dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Data ini mengindikasikan bahwa wilayah Sikka memiliki potensi besar dalam penyediaan bahan serat alami yang dapat mendukung ekonomi lokal berbasis sumber daya hayati, namun perlu pengelolaan berkelanjutan dan pengembangan industri hilir untuk optimalisasi nilai tambah.

e) Jasa Lingkungan Penyediaan Sumber Daya Genetik

Jasa Lingkungan untuk memberikan manfaat bagi penyediaan sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati (kehati) baik flora maupun fauna. Keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumberdaya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistemnya. Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Dilakukan dengan cara:

- Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaannya
- Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang, dan
- Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi

Jasa Lingkungan Penyediaan Sumber Daya Genetik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Jasa Lingkungan Penyediaan Sumber Daya Genetik di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyediaan Sumber Daya Genetik (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	250.807	925.768	824.962	96.237	-	2097.773
2	Alok Barat	313.431	1914.522	2546.859	37.500	-	4812.312
3	Alok Timur	326.334	3413.593	3109.928	1164.441	-	8014.296
4	Bola	-	0.611	4493.520	-	-	4494.131
5	Doreng	4.524	935.268	4459.100	-	-	5398.893
6	Hewokloang	-	634.502	1154.026	-	-	1788.528
7	Kangae	59.318	1934.449	923.647	1049.165	-	3966.579
8	Kewapante	75.224	1479.159	146.570	506.607	-	2207.560
9	Koting	0.633	-	547.194	867.524	-	1415.351
10	Lela	-	-	4594.103	-	-	4594.103
11	Magepanda	292.996	845.553	10362.583	730.647	1388.341	13620.120
12	Mapitara	42.227	4803.388	3012.990	424.660	-	8283.265
13	Mego	332.504	-	9853.861	-	-	10186.365
14	Nelle	-	35.405	361.337	933.101	-	1329.842
15	Nita	167.344	0.872	10068.530	929.619	-	11166.365
16	Paga	154.278	-	6995.398	-	-	7149.676
17	Palue	154.019	34.951	3779.736	-	-	3968.705
18	Talibura	161.321	5898.564	14444.779	6988.957	1209.351	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	8953.988	-	-	8953.988
20	Waiblama	-	6497.720	4486.949	1009.030	-	11993.699
21	Waigete	753.950	8418.962	10193.777	3838.691	79.143	23284.523
Total		3088.911	37773.285	105313.836	18576.178	2676.835	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan penyediaan sumber daya genetik di Kabupaten Sikka mencakup total luasan sebesar 167.429,05 hektar, dengan distribusi dominan pada kategori sedang

(105.313,84 ha), diikuti kategori tinggi (18.576,18 ha), rendah (37.773,29 ha), sangat rendah (3.088,91 ha), dan sangat tinggi (2.676,84 ha). Kecamatan Talibura merupakan penyumbang tertinggi dengan total 28.702,97 ha, termasuk 14.444,78 ha pada kategori sedang dan 6.988,96 ha kategori tinggi. Waigete, Magepanda, dan Waiblama juga memiliki luasan signifikan, masing-masing lebih dari 11.000 ha. Sebagian besar kecamatan lainnya, seperti Bola, Doreng, Mego, dan Paga, berada dominan pada kategori sedang. Sementara luasan sangat tinggi relatif terbatas, ditemukan di Magepanda (1.388,34 ha) dan Waigete (79,14 ha). Data ini menunjukkan potensi besar Kabupaten Sikka dalam menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati dan genetik, yang penting untuk pertanian, konservasi, dan pengembangan bioteknologi lokal, serta perlu didukung oleh kebijakan perlindungan sumber daya genetik secara terencana dan berkelanjutan.

2) Layanan/fungsi pengaturan (*regulating services*)

Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengatur iklim, dan lain-lain.

a) Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir

Tata air dan banjir atau Siklus hidrologi (*hydrology cycle*) adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan, seperti: penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentang alam) suatu wilayah. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.35
Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	-	-	1474.481	251.809	371.483	2097.773
2	Alok Barat	-	-	1854.157	1914.522	1043.632	4812.312
3	Alok Timur	-	-	1482.020	4181.242	2351.034	8014.296
4	Bola	-	-	-	0.611	4493.520	4494.131
5	Doreng	-	-	-	939.793	4459.100	5398.893
6	Hewokloang	-	-	-	634.502	1154.026	1788.528
7	Kangae	-	-	1108.483	1934.449	923.647	3966.579
8	Kewapante	-	-	581.831	1479.159	146.570	2207.560
9	Koting	-	-	74.937	793.220	547.194	1415.351
10	Lela	-	-	-	-	4594.103	4594.103
11	Magepanda	1434.835	-	5361.641	636.164	6187.480	13620.120
12	Mapitara	-	-	424.660	4860.258	2998.347	8283.265
13	Mego	-	-	10.967	180.898	9994.500	10186.365
14	Nelle	-	-	673.361	295.145	361.337	1329.842
15	Nita	-	19.029	507.072	921.039	9719.224	11166.365
16	Paga	-	-	51.381	-	7098.295	7149.676
17	Palue	-	-	-	2238.762	1729.944	3968.705
18	Talibura	1458.116	4090.096	2569.768	8792.467	11792.525	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	19.056	1375.180	7559.752	8953.988
20	Waiblama	63.514	3869.684	560.620	4325.383	3174.498	11993.699
21	Waigete	-	255.710	4350.060	8671.005	10007.748	23284.523
Total		2956.465	8234.519	21104.495	44425.607	90707.959	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir di Kabupaten Sikka mencakup total luasan 167.429,05 hektar, dengan distribusi dominan pada kategori sangat tinggi sebesar 90.707,96 ha, diikuti tinggi 44.425,61 ha, sedang 21.104,50 ha, rendah 8.234,52 ha, dan sangat rendah 2.956,47 ha. Kecamatan Talibura menjadi penyumbang terbesar (28.702,97 ha), dengan hampir seluruh wilayahnya termasuk dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. Wilayah lain dengan kontribusi signifikan adalah Waigete (23.284,52 ha), Magepanda (13.620,12 ha), dan Alok Timur (8.014,30 ha), yang memiliki kombinasi luasan pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Beberapa kecamatan seperti Lela dan Bola justru hampir seluruhnya berada dalam kategori sangat tinggi. Data ini menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Sikka memiliki fungsi ekologis penting dalam pengaturan tata air dan pengendalian banjir, sehingga perlindungan lanskap alami dan kebijakan tata ruang yang berwawasan lingkungan sangat krusial untuk menjaga stabilitas hidrologis wilayah ini.

b) Jasa Lingkungan Pencegah dan Perlindungan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-undang Nomor 24 tahun 2007). Dalam hal ini, terjadinya bencana dapat dicegah melalui ekosistem. Bencana alam yang dapat dicegah melalui ekosistem yang baik meliputi kebakaran lahan, erosi, longsor, badai, serta tsunami. Karakteristik Fisik alam, seperti bentang alam dan ketinggian memiliki hubungan yang erat dengan potensi terjadinya bencana di suatu wilayah. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.36
Jasa Lingkungan Pencegah dan Perlindungan Bencana di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pencegah dan Perlindungan Bencana (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	675.864	529.621	520.805	371.483		2097.773
2	Alok Barat	-	1952.022	2130.088	0.492	729.709	4812.312
3	Alok Timur	-	4821.878	73.734	665.631	2453.053	8014.296
4	Bola	-	0.611	-	2482.216	2011.303	4494.131
5	Doreng	-	935.268	4.524	945.955	3513.145	5398.893
6	Hewokloang	-	634.502	-	30.389	1123.637	1788.528
7	Kangae	-	3042.932	-	-	923.647	3966.579
8	Kewapante	-	2060.990	-	-	146.570	2207.560
9	Koting	-	74.304	0.633	1006.966	333.448	1415.351
10	Lela	-	-	-	3699.068	895.035	4594.103
11	Magepanda	-	2013.779	5657.701	709.880	5238.759	13620.120
12	Mapitara	-	5228.048	42.227	80.989	2932.001	8283.265
13	Mego	-	-	343.472	2805.086	7037.807	10186.365
14	Nelle	-	708.766	-	259.740	361.337	1329.842
15	Nita	-	33.749	516.650	3177.948	7438.018	11166.365
16	Paga	-	-	205.659	3968.981	2975.036	7149.676
17	Palue	-	34.951	154.019	2448.560	1331.176	3968.705
18	Talibura	2170.202	6639.769	2008.027	10879.511	7005.463	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	19.056	1375.205	7559.728	8953.988
20	Waiblama	4949.926	3570.261	-	1295.901	2177.612	11993.699
21	Waigete	213.544	12044.109	1521.029	669.611	8836.230	23284.523
Total		8009.536	44325.559	13197.625	36873.610	65022.715	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan pencegah dan perlindungan bencana di Kabupaten Sikka mencakup total luasan 167.429,05 hektar, dengan distribusi dominan pada kategori sangat tinggi seluas 65.022,72 ha, disusul kategori tinggi (36.873,61 ha), rendah (44.325,56 ha), sedang

(13.197,63 ha), dan sangat rendah (8.009,54 ha). Kecamatan dengan kontribusi tertinggi adalah Talibura (28.702,97 ha), diikuti Waigete (23.284,52 ha), Magepanda (13.620,12 ha), dan Nita (11.166,37 ha), yang sebagian besar wilayahnya masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Beberapa kecamatan seperti Mego, Paga, dan Tana Wawo juga menunjukkan dominasi pada kategori sangat tinggi, mencerminkan fungsi ekologis penting sebagai zona penyangga bencana. Sebaliknya, kecamatan seperti Alok dan Alok Timur memiliki penyebaran lintas kategori, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Data ini menegaskan pentingnya kawasan ekosistem di Sikka dalam fungsi mitigasi risiko bencana, sehingga perlu dijaga melalui konservasi kawasan lindung, rehabilitasi lahan kritis, dan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis bentang alam.

c) Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami

Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami melalui adanya habitat spesies yang dapat membantu proses penyerbukan alami. Habitat tersebut seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.37
Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	926.670	-	703.382	371.483	96.237	2097.773
2	Alok Barat	-	313.431	3731.179	730.202	37.500	4812.312
3	Alok Timur	326.334	-	3421.261	3102.260	1164.441	8014.296
4	Bola		-	0.611	4493.520	-	4494.131
5	Doreng	4.524	-	-	5394.369	-	5398.893
6	Hewokloang		-	634.502	1154.026	-	1788.528
7	Kangae	59.318	-	1934.449	923.647	1049.165	3966.579
8	Kewapante	75.224	-	1479.159	146.570	506.607	2207.560
9	Koting	0.633	-	-	547.194	867.524	1415.351
10	Lela	-	-	-	4594.103	-	4594.103
11	Magepanda	-	342.177	5258.376	6631.226	1388.341	13620.120
12	Mapitara	-	42.227	193.424	7622.954	424.660	8283.265
13	Mego	-	332.504	10.967	9842.893	-	10186.365
14	Nelle	-	-	35.405	361.337	933.101	1329.842
15	Nita	167.344	-	350.178	9719.224	929.619	11166.365
16	Paga	-	154.278	51.381	6944.017	-	7149.676
17	Palue	-	154.019	34.951	3779.736		3968.705
18	Talibura	282.023	1847.069	3011.811	15978.152	7583.917	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	19.056	8934.932	-	8953.988
20	Waiblama	-	1433.306	4694.404	4856.959	1009.030	11993.699
21	Waigete	-	753.950	8754.835	10071.449	3704.290	23284.523
Total		1842.072	5372.961	34319.331	106200.252	19694.430	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan pengaturan penyerbukan alami di Kabupaten Sikka mencakup total luas 167.429,05 hektar, dengan distribusi dominan pada kategori tinggi sebesar 106.200,25 ha, diikuti sedang (34.319,33 ha), sangat tinggi (19.694,43 ha), rendah (5.372,96 ha), dan sangat rendah (1.842,07 ha). Kecamatan dengan luasan tertinggi adalah Talibura (28.702,97 ha), didominasi kategori tinggi dan sangat tinggi, diikuti oleh Waigete (23.284,52 ha), Magepanda (13.620,12 ha), dan Waiblama (11.993,70 ha). Sebagian besar wilayah Sikka memiliki fungsi ekologis penting dalam mendukung penyerbukan alami, terutama pada ekosistem pertanian dan hutan sekunder. Beberapa kecamatan seperti Doreng, Lela, dan Tana Wawo sepenuhnya berada dalam kategori tinggi, mencerminkan stabilitas ekosistem penyerbuk lokal. Pola ini menegaskan bahwa Kabupaten Sikka memiliki potensi besar dalam

menjaga keberlanjutan sistem produksi pertanian dan keanekaragaman hayati melalui perlindungan lanskap penyerbukan alami yang strategis.

d) Jasa Lingkungan Pengendalian Hama dan Penyakit

Hama adalah makhluk atau organisme yang mengganggu kesehatan manusia, keseimbangan ekologi serta ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem mampu mengendalikan hal tersebut karena dalam ekosistem terdapat habitat spesies trigger dan pengendali hama penyakit. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.38
Jasa Lingkungan Pengendalian Hama dan Penyakit di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengendalian Hama dan Penyakit (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	520.805	183.480	621.387	705.709	66.391	2097.773
2	Alok Barat	2130.088	-	2644.723	-	37.500	4812.312
3	Alok Timur	73.734	300.742	6475.380	1063.412	101.029	8014.296
4	Bola	-	-	4494.131	-	-	4494.131
5	Doreng	4.524	-	5394.369	-	-	5398.893
6	Hewokloang	-	-	1788.528	-	-	1788.528
7	Kangae	-	59.318	2858.096	127.855	921.310	3966.579
8	Kewapante	-	75.224	1625.729	-	506.607	2207.560
9	Koting	0.633	-	547.194	74.304	793.220	1415.351
10	Lela	-	-	4594.103	-	-	4594.103
11	Magepanda	4755.000	-	6577.143	1556.547	731.431	13620.120
12	Mapitara	42.227	56.870	7759.508	424.660	-	8283.265
13	Mego	343.472	180.898	9661.995	-	-	10186.365
14	Nelle	-	-	396.742	673.361	259.740	1329.842
15	Nita	516.650	-	9739.125	13.848	896.741	11166.365
16	Paga	205.659	-	6944.017	-	-	7149.676
17	Palue	154.019	2203.811	1610.876	-	-	3968.705
18	Talibura	1532.353	1076.985	17695.136	2558.027	5840.471	28702.972
19	Tana Wawo	19.056	1375.180	7559.752	-	-	8953.988
20	Waiblama	-	186.247	7999.102	3741.544	66.806	11993.699
21	Waigete	1478.863	215.066	17672.761	1183.861	2733.973	23284.523
Total		11777.084	5913.821	124659.794	12123.128	12955.218	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan pengendalian hama dan penyakit di Kabupaten Sikka mencakup total luas 167.429,05 hektar, dengan dominasi pada kategori sedang sebesar 124.659,79 ha, diikuti sangat tinggi (12.955,22 ha), tinggi (12.123,13 ha), sangat rendah (11.777,08 ha), dan rendah (5.913,82 ha). Kecamatan dengan luasan terbesar adalah Talibura (28.702,97 ha), di mana lebih dari separuhnya berada di kategori sedang hingga sangat tinggi, menegaskan pentingnya wilayah ini dalam pengendalian ekosistem alami. Disusul Waigete (23.284,52 ha) dan Magepanda (13.620,12 ha) dengan dominasi luas di kategori sedang dan tinggi. Kecamatan lain seperti Mego, Nita, dan Mapitara juga menunjukkan luas signifikan pada kategori sedang. Sebaliknya, beberapa kecamatan seperti Doreng dan Hewokloang memiliki distribusi tunggal di kategori sedang, tanpa kontribusi di kategori lainnya. Pola ini mencerminkan bahwa sebagian besar wilayah Sikka memiliki fungsi ekologis kuat dalam menekan populasi hama dan penyakit secara alami, sehingga pelestarian vegetasi alami dan tata kelola lahan yang bijak menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan pertanian.

e) Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan Jasa Lingkungan berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39

Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	317.198	705.709	703.382	-	371.483	2097.773
2	Alok Barat	37.500	-	4044.610	-	730.202	4812.312
3	Alok Timur	410.939	1063.412	3461.734	16.424	3061.787	8014.296
4	Bola	-	-	0.611	-	4493.520	4494.131
5	Doreng	4.524	-	-	935.268	4459.100	5398.893
6	Hewokloang	-	-	634.502	-	1154.026	1788.528
7	Kangae	980.628	127.855	1934.449	-	923.647	3966.579
8	Kewapante	581.831	-	1479.159	-	146.570	2207.560
9	Koting	0.633	74.304	-	793.220	547.194	1415.351
10	Lela	-	-	-	-	4594.103	4594.103
11	Magepanda	778.374	1556.097	5385.070	-	5900.579	13620.120
12	Mapitara	-	424.660	292.521	4609.964	2956.120	8283.265
13	Mego	-	-	524.370	-	9661.995	10186.365
14	Nelle	-	673.361	35.405	259.740	361.337	1329.842
15	Nita	167.344	32.877	350.178	896.741	9719.224	11166.365
16	Paga	-	-	205.659	-	6944.017	7149.676
17	Palue	-	-	2392.780	-	1575.925	3968.705
18	Talibura	2521.576	3951.376	4129.982	6297.561	11802.477	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	1394.236	-	7559.752	8953.988
20	Waiblama	1496.820	2997.052	2330.938	2266.520	2902.370	11993.699
21	Waigete	2696.996	1183.861	9729.542	420.326	9253.798	23284.523
Total		9994.365	12790.564	39029.127	16495.764	89119.225	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Sikka mencakup total luas 167.429,05 hektar, dengan sebaran dominan pada kategori sangat tinggi seluas 89.119,23 ha, disusul kategori sedang (39.029,13 ha), tinggi (16.495,76 ha), rendah (12.790,56 ha), dan sangat rendah (9.994,37 ha). Kecamatan dengan luasan terbesar adalah Talibura (28.702,97 ha), yang mencakup seluruh kategori dan didominasi oleh kelas sangat tinggi. Diikuti Waigete (23.284,52 ha), Magepanda (13.620,12 ha), dan Waiblama (11.993,70 ha), yang juga memiliki kontribusi besar pada kategori sangat tinggi dan sedang. Beberapa wilayah seperti Lela, Paga, dan Mego memiliki konsentrasi kuat dalam satu kategori tertentu, menunjukkan variasi tipologi ekosistem yang berperan penting dalam pengendalian iklim mikro dan global. Pola distribusi ini menunjukkan peran strategis kawasan hijau di Sikka dalam menyerap karbon dan mengatur suhu serta kelembaban, sehingga sangat penting untuk mempertahankan tutupan lahan lestari dan memperkuat kebijakan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal.

3) Layanan/fungsi budaya (*cultural services*)

Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.

a) Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa Lingkungan sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.40
Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	-	248.902	772.100	455.383	621.387	2097.773
2	Alok Barat	-		37.500	2130.088	2644.723	4812.312
3	Alok Timur	-	326.334	1148.017	64.565	6475.380	8014.296
4	Bola	-	-	-	-	4494.131	4494.131
5	Doreng	-	-	-	4.524	5394.369	5398.893
6	Hewokloang	-	-	-	-	1788.528	1788.528
7	Kangae	-	59.318	1049.165	-	2858.096	3966.579
8	Kewapante	-	75.224	506.607	-	1625.729	2207.560
9	Koting	-	0.633	74.304	793.220	547.194	1415.351
10	Lela	-	-	-	-	4594.103	4594.103
11	Magepanda	47.277	1556.547	731.431	4755.000	6529.865	13620.120
12	Mapitara	-	-	-	523.757	7759.508	8283.265
13	Mego	-	-	-	524.370	9661.995	10186.365
14	Nelle	-	-	673.361	259.740	396.742	1329.842
15	Nita	-	143.918	32.877	1269.474	9720.096	11166.365
16	Paga	-	-	-	205.659	6944.017	7149.676
17	Palue	-	-	-	2357.830	1610.876	3968.705
18	Talibura	721.928	1524.179	2904.836	8160.351	15391.678	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	-	1394.236	7559.752	8953.988
20	Waiblama	4949.926	381.603	-	750.160	5912.010	11993.699
21	Waigete	42.166	-	3875.668	1693.929	17672.761	23284.523
Total		5761.297	4316.660	11805.866	25342.286	120202.937	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Sikka mencakup total luasan 167.429,05 hektar, dengan distribusi tertinggi pada kategori sangat tinggi sebesar 120.202,94 ha (atau sekitar 71,8 persen dari total wilayah), disusul kategori tinggi (25.342,29 ha), sedang (11.805,87 ha), rendah (4.316,66 ha), dan sangat rendah (5.761,30 ha). Kecamatan dengan luasan tertinggi adalah Talibura (28.702,97 ha), Waigete (23.284,52 ha), dan Magepanda (13.620,12 ha), yang secara dominan berada di kategori sangat tinggi dan tinggi. Beberapa kecamatan seperti Lela, Bola, Tana Wawo, dan Mego seluruhnya atau hampir seluruhnya berada pada kategori sangat tinggi, mencerminkan pentingnya nilai budaya dan keberlanjutan ruang hidup tradisional di wilayah tersebut. Sebaliknya, kecamatan seperti Alok, Alok Timur, dan Waiblama menunjukkan sebaran lintas kategori, menandakan variasi intensitas budaya dan keberfungsian ruang. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Sikka memiliki potensi besar dalam

mempertahankan identitas budaya dan ruang hidup berbasis lokal, yang perlu dijaga melalui kebijakan pelestarian lanskap budaya dan pemanfaatan ruang yang berwawasan kearifan lokal.

b) Jasa Lingkungan Fungsi Rekreasi dan Ekowisata

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pada Kabupaten Sikka terdapat 4 klasifikasi untuk pengadaan budaya rekreasi dan ekowisata. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.41
Jasa Lingkungan Fungsi Rekreasi dan Ekowisata di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Fungsi Rekreasi dan Ekowisata (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	-	248.902	772.100	455.383	621.387	2097.773
2	Alok Barat	-	-	37.500	2130.088	2644.723	4812.312
3	Alok Timur	-	326.334	1148.017	64.565	6475.380	8014.296
4	Bola	-	-	-	-	4494.131	4494.131
5	Doreng	-	-	-	4.524	5394.369	5398.893
6	Hewokloang	-	-	-	-	1788.528	1788.528
7	Kangae	-	59.318	1049.165	-	2858.096	3966.579
8	Kewapante	-	75.224	506.607	-	1625.729	2207.560
9	Koting	-	0.633	74.304	793.220	547.194	1415.351
10	Lela	-	-	-	-	4594.103	4594.103
11	Magepanda	47.277	1556.547	731.431	4755.000	6529.865	13620.120
12	Mapitara	-	-	-	523.757	7759.508	8283.265
13	Mego	-	-	-	524.370	9661.995	10186.365
14	Nelle	-	-	673.361	259.740	396.742	1329.842
15	Nita	-	143.918	32.877	1269.474	9720.096	11166.365
16	Paga	-	-	-	205.659	6944.017	7149.676
17	Palue	-	-	-	2357.830	1610.876	3968.705
18	Talibura	721.928	1524.179	2904.836	8160.351	15391.678	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	-	1394.236	7559.752	8953.988
20	Waiblama	4949.926	381.603	-	750.160	5912.010	11993.699
21	Waigete	42.166	-	3875.668	1693.929	17672.761	23284.523
Total		5761.297	4316.660	11805.866	25342.286	120202.937	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan fungsi rekreasi dan ekowisata di Kabupaten Sikka mencakup total luas 167.429,05 hektar, dengan dominasi pada kategori sangat tinggi sebesar 120.202,94 ha, diikuti tinggi (25.342,29 ha), sedang (11.805,87 ha), rendah (4.316,66 ha), dan sangat rendah (5.761,30 ha). Kecamatan dengan kontribusi terbesar adalah Talibura (28.702,97 ha), Waigete (23.284,52 ha), dan Magepanda (13.620,12 ha), yang memiliki distribusi luas di kategori tinggi dan sangat tinggi. Kecamatan seperti Lela, Mego, dan Mapitara seluruhnya atau hampir seluruhnya berada di kategori sangat tinggi, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan wisata berbasis alam dan budaya. Wilayah seperti Alok Barat dan Nita memiliki penyebaran merata lintas kategori, menandakan keberagaman potensi wisata. Secara keseluruhan, data ini menegaskan peran strategis bentang alam dan ekosistem di Kabupaten Sikka dalam mendukung fungsi rekreasi dan ekowisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, yang perlu dikelola melalui kebijakan pariwisata ramah lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal.

c) Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika Alam

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pada Kabupaten Sikka terdapat 3 klasifikasi untuk pengadaan budaya estetika alam. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.42
Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika Alam di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika Alam (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	-	675.864	249.871	483.324	688.714	2097.773
2	Alok Barat	-	-	37.500	1816.658	2958.154	4812.312
3	Alok Timur	-	-	344.873	1087.505	6581.919	8014.296
4	Bola	-	-	-	-	4494.131	4494.131
5	Doreng	-	-	-	-	5398.893	5398.893
6	Hewokloang	-	-	-	-	1788.528	1788.528
7	Kangae	-	-	980.628	127.855	2858.096	3966.579
8	Kewapante	-	-	581.831	-	1625.729	2207.560
9	Koting	-	-	-	867.524	547.827	1415.351
10	Lela	-	-	-	-	4594.103	4594.103
11	Magepanda	47.277	1556.547	731.431	4462.004	6822.861	13620.120
12	Mapitara	-	-	-	424.660	7858.605	8283.265
13	Mego	-	-	-	10.967	10175.398	10186.365
14	Nelle	-	-	-	933.101	396.742	1329.842
15	Nita	-	-	-	1278.925	9887.440	11166.365
16	Paga	-	-	-	51.381	7098.295	7149.676
17	Palue	-	-	-	-	3968.705	3968.705
18	Talibura	620.135	2523.044	2537.171	6687.932	16334.690	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	-	19.056	8934.932	8953.988
20	Waiblama	4949.926	-	-	1009.030	6034.743	11993.699
21	Waigete	-	42.166	2733.973	1866.609	18641.776	23284.523
Total		5617.339	4797.620	8197.278	21126.529	127690.279	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan fungsi budaya estetika alam di Kabupaten Sikka mencakup total luas 167.429,05 hektar, dengan dominasi pada kategori sangat tinggi sebesar 127.690,28 ha, disusul tinggi (21.126,53 ha), sedang (8.197,28 ha), rendah (4.797,62 ha), dan sangat rendah (5.617,34 ha). Kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Talibura (28.702,97 ha), Waigete (23.284,52 ha), dan Magepanda (13.620,12 ha), dengan cakupan luas pada kategori sangat tinggi. Wilayah seperti Lela, Mego, Doreng, dan Bola bahkan seluruhnya atau hampir seluruhnya berada di kategori sangat tinggi, menunjukkan kekayaan bentang alam yang memiliki nilai estetika tinggi dan potensi besar untuk pengembangan ekowisata dan konservasi berbasis budaya. Data ini menegaskan pentingnya menjaga dan memanfaatkan nilai estetika lanskap alam Sikka sebagai bagian dari identitas budaya dan potensi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

4) Layanan/fungsi pendukung kehidupan (*supporting services*)

Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air, dan lain-lain.

a) Jasa Lingkungan Pemurnian Air

Kemampuan ekosistem dalam membersihkan pencemar disebabkan adanya proses-proses kimia, fisik, dan biologi yang berlangsung secara alami didalamnya. Pemurnian air

secara alami memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan aktivitas bakteri alam dalam mengurai bahan organik. Sehingga, kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai, dan menyerap pencemar meningkat. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.43
Jasa Lingkungan Pemurnian Air Bencana di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pencegah dan Perlindungan Bencana (Ha)					
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
1	Alok	1.905	886.862	807.677	401.329	-	2097.773
2	Alok Barat	313.431	3731.179	37.500	730.202	-	4812.312
3	Alok Timur	-	4392.282	191.144	3414.447	16.424	8014.296
4	Bola	-	0.611	-	4493.520	-	4494.131
5	Doreng	4.524	-	935.268	4459.100	-	5398.893
6	Hewokloang	-	634.502	-	1154.026	-	1788.528
7	Kangae	-	1993.767	921.310	1051.502	-	3966.579
8	Kewapante	-	1554.383	506.607	146.570	-	2207.560
9	Koting	-	-	0.633	621.498	793.220	1415.351
10	Lela	-	-	-	4594.103	-	4594.103
11	Magepanda	340.273	5099.289	1631.894	6547.881	0.783	13620.120
12	Mapitara	42.227	193.424	4666.834	2956.120	424.660	8283.265
13	Mego	332.504	10.967	180.898	9661.995	-	10186.365
14	Nelle	-	35.405	-	1034.697	259.740	1329.842
15	Nita	23.426	350.178	143.918	9752.101	896.741	11166.365
16	Paga	154.278	51.381	-	6944.017	-	7149.676
17	Palue	154.019	34.951	2203.811	1575.925	-	3968.705
18	Talibura	1488.391	3232.051	4903.960	13726.826	5351.744	28702.972
19	Tana Wawo	-	19.056	1375.180	7559.752	-	8953.988
20	Waiblama	-	2883.273	3800.749	4300.648	1009.030	11993.699
21	Waigete	753.950	8968.379	3087.557	10437.660	36.977	23284.523
Total		3608.929	34071.941	25394.940	95563.917	8789.319	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan pemurnian air di Kabupaten Sikka mencakup total luas 167.429,05 hektar, dengan distribusi dominan pada kategori tinggi sebesar 95.563,92 ha (57 persen), disusul rendah (34.071,94 ha), sedang (25.394,94 ha), sangat tinggi (8.789,32 ha), dan sangat rendah (3.608,93 ha). Kecamatan dengan kontribusi tertinggi adalah Talibura (28.702,97 ha), didominasi kategori tinggi dan sangat tinggi, diikuti oleh Waigete (23.284,52 ha) dan Magepanda (13.620,12 ha) dengan distribusi signifikan pada kategori tinggi dan sedang. Kecamatan Mego (10.186,37 ha) dan Waiblama (11.993,70 ha) juga memiliki luasan besar pada kategori tinggi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sikka berperan penting dalam fungsi pemurnian air secara ekologi, menandakan pentingnya pelestarian tutupan vegetasi, pengelolaan DAS yang berkelanjutan, dan tata guna lahan berbasis konservasi untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan sumber daya air bersih di masa depan.

b) Jasa Lingkungan Pengolahan dan Pengurai Limbah

Limbah sebagai buangan atau hasil dari suatu proses produksi baik produksi industri maupun domestik, akan kembali ke alam. Dalam hal ini, limbah akan masuk ke dalam ekosistem, padahal limbah tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga kehadirannya tidak diharapkan. Namun, zat organik dalam air limbah mampu dinetralisir oleh ekosistem karena ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralisir, mengurai serta menyerap limbah atau sampah yang diterima. Zat organik tersebut mampu diuraikan karena adanya mikroba aerob

yang menyebabkan limbah mampu terurai menjadi bakteri, protozoa, dan ganggang. Beberapa kondisi lingkungan menyebabkan ia mampu mengurai dan menyerap limbah dengan baik, seperti lingkungan yang berada pada topografi dengan elevasi tinggi berupa jajaran gunung api, perbukitan, dan pegunungan atau pada lembah-lembah antar gunung api. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.44
Jasa Lingkungan Pengolahan dan Pengurai Limbah di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengolahan dan Pengurai Limbah (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	67.327	183.480	1750.729	29.846	66.391	2097.773
2	Alok Barat	-	313.431	4461.381	-	37.500	4812.312
3	Alok Timur	66.066	971.021	5812.769	1063.412	101.029	8014.296
4	Bola	-	-	4494.131	-	-	4494.131
5	Doreng	4.524	-	5394.369	-	-	5398.893
6	Hewokloang	-	-	1788.528	-	-	1788.528
7	Kangae	-	59.318	2858.096	127.855	921.310	3966.579
8	Kewapante	-	75.224	1625.729	-	506.607	2207.560
9	Koting	0.633	-	547.194	74.304	793.220	1415.351
10	Lela	-	-	4594.103	-	-	4594.103
11	Magepanda	-	299.090	11033.053	168.989	2118.988	13620.120
12	Mapitara	-	42.227	7816.378	424.660	-	8283.265
13	Mego	-	332.504	9853.861	-	-	10186.365
14	Nelle	-	-	396.742	673.361	259.740	1329.842
15	Nita	167.344	-	10069.402	32.877	896.741	11166.365
16	Paga	-	154.278	6995.398	-	-	7149.676
17	Palue	-	154.019	3814.686	-	-	3968.705
18	Talibura	111.606	2024.436	18368.622	2349.568	5848.740	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	8953.988	-	-	8953.988
20	Waiblama	-	0.054	10984.615	942.224	66.806	11993.699
21	Waigete	-	753.950	18612.739	1355.240	2562.594	23284.523
Total		417.500	5363.034	140226.510	7242.335	14179.667	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Jasa lingkungan pengolahan dan pengurai limbah di Kabupaten Sikka mencakup total luasan 167.429,05 hektar, dengan dominasi pada kategori sedang sebesar 140.226,51 ha (83,7 persen dari total wilayah), disusul kategori sangat tinggi (14.179,67 ha), tinggi (7.242,34 ha), rendah (5.363,03 ha), dan sangat rendah (417,50 ha). Kecamatan dengan kontribusi tertinggi adalah Talibura (28.702,97 ha), Waigete (23.284,52 ha), dan Magepanda (13.620,12 ha), yang ketiganya didominasi oleh luasan pada kategori sedang dan sangat tinggi. Kecamatan lain seperti Mego, Mapitara, dan Waiblama juga memiliki cakupan besar di kategori sedang. Sebaliknya, kecamatan seperti Doreng, Nelle, dan Koting memiliki proporsi lebih kecil dan distribusi terbatas pada kategori tertentu. Sebaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Sikka memiliki fungsi ekologis signifikan dalam mengurai dan mengolah limbah secara alami, menandakan pentingnya pelestarian ekosistem tanah dan vegetasi dalam mendukung sistem sanitasi dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

c) Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi, serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan

penutup tanah menyebabkan proses pembentukan tanah semakin cepat. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.45
Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	455.383	741.285	804.867	29.846	66.391	2097.773
2	Alok Barat	1816.658	313.431	2644.723	-	37.500	4812.312
3	Alok Timur	7.668	817.291	6024.896	1079.836	84.605	8014.296
4	Bola	-	-	4494.131	-	-	4494.131
5	Doreng	4.524	-	5394.369	-	-	5398.893
6	Hewokloang	-	-	1788.528	-	-	1788.528
7	Kangae	-	-	2917.414	127.855	921.310	3966.579
8	Kewapante	-	-	1700.953	-	506.607	2207.560
9	Koting	-	0.633	547.194	867.524	-	1415.351
10	Lela	-	-	4594.103	-	-	4594.103
11	Magepanda	4462.004	346.368	7911.329	1.904	898.516	13620.120
12	Mapitara	-	99.097	7759.508	424.660	-	8283.265
13	Mego	10.967	513.402	9661.995	-	-	10186.365
14	Nelle	-	-	396.742	933.101	-	1329.842
15	Nita	372.732	162.947	9720.096	910.590	-	11166.365
16	Paga	51.381	154.278	6944.017	-	-	7149.676
17	Palue	-	2357.830	1610.876	-	-	3968.705
18	Talibura	1532.353	2920.824	16738.600	5481.209	2029.987	28702.972
19	Tana Wawo	19.056	1375.180	7559.752	-	-	8953.988
20	Waiblama	-	186.247	10798.422	1009.030	-	11993.699
21	Waigete	724.913	969.015	17672.761	1141.696	2776.138	23284.523
Total		9457.640	10957.829	127685.274	12007.249	7321.054	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Total luasan jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan di Kabupaten Sikka mencapai 167.429,046 hektar. Kecamatan dengan luasan tertinggi adalah Talibura sebesar 28.702,972 ha, disusul Waigete 23.284,523 ha, dan Magepanda 13.620,120 ha. Sebaran tingkat kesuburan tertinggi (kategori "Sangat Tinggi") paling dominan terdapat di Waigete (2.776,138 ha), Talibura (2.029,987 ha), dan Magepanda (898,516 ha). Sementara itu, kategori “Sedang” mendominasi luasan keseluruhan dengan total 127.685,274 ha. Beberapa kecamatan seperti Bola, Doreng, Hewokloang, dan Lela hanya tercatat pada kategori tertentu, menandakan variasi kapasitas ekosistem tanah antar wilayah.

d) Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara

Hara diperlukan untuk produksi bahan organik baik pada tingkat trofik produsen ataupun konsumen yang umumnya berada dalam lingkungan abiotik dengan konsentrasi yang lebih rendah dari pada yang dibutuhkan untuk aktivitas pertumbuhan. Meskipun begitu, organisme di dalam ekosistem yang tua seperti hutan berisi hara dalam konsentrasi dengan jumlah yang besar dan bernilai. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.46
Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	67.327	886.862	1047.347	29.846	66.391	2097.773
2	Alok Barat	-	4044.610	730.202	-	37.500	4812.312
3	Alok Timur	66.066	4432.755	2351.034	1063.412	101.029	8014.296
4	Bola	-	0.611	4493.520	-	-	4494.131

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
5	Doreng	4.524	-	5394.369	-	-	5398.893
6	Hewokloang	-	634.502	1154.026	-	-	1788.528
7	Kangae	-	1993.767	923.647	127.855	921.310	3966.579
8	Kewapante	-	1554.383	146.570	-	506.607	2207.560
9	Koting	0.633	-	547.194	74.304	793.220	1415.351
10	Lela	-	-	4594.103	-	-	4594.103
11	Magepanda	-	5390.381	5941.762	168.989	2118.988	13620.120
12	Mapitara	-	292.521	7566.084	-	424.660	8283.265
13	Mego	-	524.370	9661.995	-	-	10186.365
14	Nelle	-	35.405	361.337	673.361	259.740	1329.842
15	Nita	167.344	350.178	9719.224	32.877	896.741	11166.365
16	Paga	-	205.659	6944.017	-	-	7149.676
17	Palue	-	2392.780	1575.925	-	-	3968.705
18	Talibura	195.775	4721.515	15587.374	1494.742	6703.566	28702.972
19	Tana Wawo	-	1394.236	7559.752	-	-	8953.988
20	Waiblama	-	1636.214	9348.456	381.603	627.427	11993.699
21	Waigete	-	9723.850	9642.839	1397.406	2520.428	23284.523
Total		501.670	40214.599	105290.775	5444.394	15977.608	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Total luasan jasa lingkungan yang mendukung siklus hara di Kabupaten Sikka mencapai 167.429,046 hektar. Distribusi terbesar terdapat pada kategori sedang seluas 105.290,775 hektar (62,9%), diikuti kategori sangat tinggi sebesar 15.977,608 hektar (9,5%) dan tinggi sebesar 5.444,394 hektar (3,3%). Kategori rendah juga mencakup luasan signifikan sebesar 40.214,599 hektar (24%), sedangkan kategori sangat rendah hanya mencakup 501,670 hektar (0,3%). Kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Talibura (28.702,972 ha), disusul Waigete (23.284,523 ha), Magepanda (13.620,120 ha), dan Mego (10.186,365 ha). Sebaran kategori sangat tinggi paling luas ditemukan di Talibura (6.703,566 ha) dan Waigete (2.520,428 ha), menunjukkan potensi ekologis tinggi dalam mempertahankan keseimbangan siklus unsur hara tanah. Variabilitas antar kecamatan mencerminkan karakteristik biofisik dan pemanfaatan lahan yang berbeda, sehingga menjadi dasar penting dalam perencanaan wilayah berbasis jasa ekosistem.

e) Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer

Ekosistem dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen dan pengikat karbon. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembuatan makanan melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan. Adapun penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.47
Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	1.905	248.902	1379.246	401.329	66.391	2097.773
2	Alok Barat	-	313.431	3731.179	730.202	37.500	4812.312
3	Alok Timur	-	326.334	3461.734	4125.199	101.029	8014.296
4	Bola	-	-	0.611	4493.520	-	4494.131
5	Doreng	4.524	-	-	5394.369	-	5398.893
6	Hewokloang	-	-	634.502	1154.026	-	1788.528
7	Kangae	-	59.318	1934.449	1051.502	921.310	3966.579
8	Kewapante	-	75.224	1479.159	146.570	506.607	2207.560

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
9	Koting	-	0.633	-	621.498	793.220	1415.351
10	Lela	-	-	-	4594.103	-	4594.103
11	Magepanda	-	292.996	5139.017	6803.280	1384.827	13620.120
12	Mapitara	-	42.227	250.294	7990.744	-	8283.265
13	Mego	-	332.504	191.865	9661.995	-	10186.365
14	Nelle	-	-	35.405	1034.697	259.740	1329.842
15	Nita	23.426	143.918	350.178	9752.101	896.741	11166.365
16	Paga	-	154.278	51.381	6944.017	-	7149.676
17	Palue	-	154.019	2238.762	1575.925	-	3968.705
18	Talibura	111.606	1461.044	4511.266	16767.886	5851.170	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	1394.236	7559.752	-	8953.988
20	Waiblama	-	1496.874	5025.697	5404.322	66.806	11993.699
21	Waigete	-	753.950	8969.900	10998.079	2562.594	23284.523
Total		141.462	5855.652	40778.882	107205.115	13447.935	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Pada tahun 2022, total luasan jasa lingkungan yang mendukung produksi primer di Kabupaten Sikka mencapai 167.429,046 hektar. Kategori dominan berada pada tingkat tinggi dengan luas 107.205,115 hektar atau sekitar 64 persen dari total wilayah, diikuti oleh kategori sedang seluas 40.778,882 hektar (24,4 persen), sangat tinggi seluas 13.447,935 hektar (8 persen), rendah 5.855,652 hektar (3,5 persen), dan sangat rendah 141,462 hektar (0,1 persen). Kecamatan yang memiliki kontribusi luasan terbesar antara lain Waigete (23.284,523 ha), Talibura (28.702,972 ha), dan Magepanda (13.620,120 ha), dengan dominasi kategori tinggi hingga sangat tinggi. Sebaran spasial menunjukkan bahwa wilayah timur dan tengah Kabupaten Sikka memiliki kapasitas ekosistem yang lebih besar dalam mendukung produksi primer, terutama terkait fungsi-fungsi ekologis seperti fotosintesis, produktivitas biomassa, dan ketersediaan energi hayati. Data ini penting sebagai landasan dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan pembangunan wilayah yang berbasis pada nilai dan fungsi jasa ekosistem.

f) Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas atau Keanekaragaman Hayati

Terkait dengan Jasa Lingkungan keanekaragaman hayati/biodiversitas di Kabupaten Sikka, agar lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.48

Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas atau Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas atau Keanekaragaman Hayati (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Alok	250.807	675.864	453.478	346.141	371.483	2097.773
2	Alok Barat	-	-	2130.088	1952.022	730.202	4812.312
3	Alok Timur	326.334	-	7.668	4561.610	3118.684	8014.296
4	Bola	-	-	-	0.611	4493.520	4494.131
5	Doreng	4.524	-	-	-	5394.369	5398.893
6	Hewokloang	-	-	-	634.502	1154.026	1788.528
7	Kangae	59.318	-	-	2983.614	923.647	3966.579
8	Kewapante	75.224	-	-	1985.766	146.570	2207.560
9	Koting	0.633	-	-	74.304	1340.414	1415.351
10	Lela	-	-	-	-	4594.103	4594.103
11	Magepanda	-	783.343	6306.129	629.286	5901.362	13620.120
12	Mapitara	-	-	42.227	193.424	8047.614	8283.265
13	Mego	-	-	343.472	-	9842.893	10186.365
14	Nelle	-	-	-	708.766	621.076	1329.842
15	Nita	167.344	-	368.335	14.720	10615.966	11166.365
16	Paga	-	-	205.659	-	6944.017	7149.676

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas atau Keanekaragaman Hayati (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
17	Palue	-	-	154.019	34.951	3779.736	3968.705
18	Talibura	279.021	2246.605	2534.134	2601.435	21041.777	28702.972
19	Tana Wawo	-	-	19.056	-	8934.932	8953.988
20	Waiblama	-	1496.874	3453.052	1449.912	5593.861	11993.699
21	Waigete	-	-	1478.863	11868.613	9937.047	23284.523
Total		1163.207	5202.685	17496.181	30039.676	113527.298	167429.046

Sumber: Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra, 2022

Total luasan jasa lingkungan yang mendukung biodiversitas di Kabupaten Sikka tercatat sebesar 167.429,046 hektar. Sebagian besar wilayah termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan luas mencapai 113.527,298 hektar atau 67,8 persen, diikuti oleh kategori tinggi seluas 30.039,676 hektar (17,9%), sedang sebesar 17.496,181 hektar (10,4%), rendah 5.202,685 hektar (3,1%), dan sangat rendah 1.163,207 hektar (0,7%). Kecamatan dengan kontribusi tertinggi berada di Talibura (21.041,777 ha), Waigete (23.284,523 ha), Magepanda (13.620,120 ha), dan Mego (10.186,365 ha), dengan dominasi pada kategori sangat tinggi dan tinggi. Keanekaragaman hayati di wilayah ini ditopang oleh ekosistem alami seperti hutan sekunder, kawasan pesisir, dan lahan-lahan dengan nilai ekologis tinggi. Sebaran spasial menunjukkan bahwa kapasitas wilayah dalam menjaga fungsi keanekaragaman hayati sangat signifikan dan mendukung keberlanjutan ekologis. Informasi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan konservasi, kebijakan tata ruang, dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis ekosistem.

4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

a. Kondisi Energi

1) Konsumsi Listrik Per Kapita

Ketersediaan dan konsumsi energi listrik menjadi salah satu indikator utama dalam menilai ketahanan energi di suatu wilayah. Konsumsi listrik per kapita tidak hanya mencerminkan tingkat aksesibilitas dan pemanfaatan energi oleh masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan kemajuan sosial ekonomi serta efektivitas penyediaan infrastruktur energi oleh pemerintah daerah. Data terkait konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Sikka dapat dilihat di dalam tabel berikut.

Tabel 2.49

Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Listrik Per Kapita	**)	983	1581	341	**)

Keterangan: **) = data tidak tersedia

Sumber: PT. PLN (Persero), 2025

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, tren konsumsi listrik per kapita dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2024, tidak tersedia data resmi yang menandakan tidak dilaksanakannya pendataan terhadap konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Sikka. Sementara itu, pada tahun 2021 terjadi peningkatan konsumsi listrik per kapita sebesar 983 kWh, yang kemudian meningkat drastis menjadi 1.581 kWh per kapita pada tahun 2022. Namun, lonjakan ini tidak berlanjut, karena pada tahun 2023 konsumsi listrik per kapita mengalami penurunan tajam hingga hanya mencapai 341 kWh per kapita.

Ketimpangan dalam data tahunan ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam distribusi dan pemanfaatan energi listrik, serta kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gangguan pasokan, perubahan pola konsumsi masyarakat, atau

keterbatasan dalam infrastruktur energi. Oleh karena itu, perencanaan ketahanan energi ke depan perlu menekankan pada konsistensi penyediaan dan peningkatan akses energi yang merata serta andal bagi seluruh lapisan masyarakat, guna mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

b. Kondisi Air

1) Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum yang layak merupakan indikator penting dalam mewujudkan ketahanan air serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Cakupan layanan air minum yang memadai mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang adil dan merata.

Tabel 2.50
Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum di Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	*)	43,74	53,52	54,71	56,41

Keterangan: *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum layak di Kabupaten Sikka pada tahun 2020 tidak dilakukan perhitungan , sedangkan selama periode 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun.

Secara umum, terjadi peningkatan total sebesar 12,67 persen dalam kurun waktu empat tahun. Meskipun peningkatannya bersifat positif dan menunjukkan adanya perbaikan akses terhadap air minum layak, capaian ini masih berada dalam kategori rendah jika mengacu pada klasifikasi umum, di mana akses di bawah 60 persen dianggap belum memadai.

Dengan kondisi capaian saat ini, Kabupaten Sikka masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan akses air minum layak bagi seluruh rumah tangga. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Sikka perlu memprioritaskan perluasan jaringan distribusi air bersih, penguatan kapasitas kelembagaan penyedia layanan air minum serta perbaikan sistem pelaporan dan verifikasi data untuk menjamin ketersediaan akses air minum yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat.

c. Kemandirian Pangan

1) Indeks Ketahanan Pangan

Secara umum, Kabupaten Sikka menunjukkan tren peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang cukup konsisten dan stabil selama periode 2020–2024. Data Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Sikka dan Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Data Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Sikka dan Provinsi NTT
Tahun 2020 - 2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Sikka	72,81	73,54	75,72	73,89	77,22
2	Provinsi NTT	66,92	67,35	68,42	71,25	70.91
3	Nasional	61,4	59,2	60,2	-	71.2

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan nasional tahun 2020 hingga 2024, terlihat pada tahun 2020, IKP Kabupaten Sikka tercatat sebesar 72,81, kemudian meningkat menjadi 73,54 pada 2021, dan mengalami lonjakan lebih signifikan menjadi 75,72 pada 2022. Meskipun sempat sedikit menurun ke 73,89 pada 2023, IKP kembali naik cukup tajam ke angka 77,22 di tahun 2024. Artinya, selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sikka mengalami peningkatan IKP sebesar 4,41 poin, menunjukkan adanya penguatan sistem ketahanan pangan di tingkat kabupaten, baik dari sisi ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan pangan.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT, Kabupaten Sikka secara konsisten berada di atas capaian provinsi. IKP Provinsi NTT sendiri juga menunjukkan tren peningkatan, meski lebih lambat. Dari angka 66,92 pada tahun 2020, naik menjadi 67,35 di 2021, kemudian 68,42 di 2022, dan mengalami lonjakan cukup berarti di 2023 menjadi 71,25. Namun pada 2024, terjadi sedikit penurunan menjadi 70,91. Dengan demikian, selama lima tahun, peningkatan IKP NTT sebesar 3,99 poin, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan IKP Kabupaten Sikka.

Sementara itu, angka nasional menunjukkan fluktuasi yang lebih besar. Pada 2020, IKP nasional berada di 61,4, lalu turun menjadi 59,2 di 2021, dan naik kembali menjadi 60,2 pada 2022. Data untuk 2023 tidak tersedia dalam sumber ini, namun pada tahun 2024, IKP nasional melonjak menjadi 71,2, menunjukkan adanya peningkatan signifikan yang mungkin mencerminkan intervensi strategis di tingkat nasional. Namun demikian, IKP Kabupaten Sikka tetap berada di atas capaian nasional pada tahun 2024.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, Kabupaten Sikka menunjukkan kinerja ketahanan pangan yang relatif stabil dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan capaian IKP sebesar 77,22 pada tahun 2024, Kabupaten Sikka secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi NTT dan nasional, yang masing-masing mencatatkan angka 70,91 dan 71,2 di tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ketahanan pangan di Kabupaten Sikka semakin tangguh, baik dari aspek ketersediaan, aksesibilitas, maupun pemanfaatan pangan.

2) Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Kabupaten Sikka menunjukkan dinamika fluktuatif dalam prevalensi ketidakcukupan pangan. Pada tahun 2020, angkanya cukup tinggi di 16,84 persen, dan menurun secara bertahap hingga 13,97 persen pada 2022. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada 2023 menjadi 17,61 persen, sebelum kembali turun tajam menjadi 12,80 persen pada 2024. Data tersebut dapat dilihat pada tabel Data Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, Nasional Tahun 2020 - 2024.

Tabel 2.52
Data Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, Nasional Tahun 2020 - 2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Sikka	16,84	15,18	13,97	17,61	12,80
2	Provinsi NTT	13,12	11,84	13,74	14,98	12,49
3	Nasional	8,34	8,49	10,21	8,53	8,27

Sumber: BPS, 2025

Dari data pada tabel diatas jelas menunjukkan adanya fluktuasi. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sistem ketahanan pangan di Kabupaten Sikka masih rentan terhadap gangguan eksternal maupun internal. Kenaikan tajam pada 2023 bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor seperti gagal panen, cuaca ekstrem, gangguan distribusi pangan, atau tekanan

ekonomi pasca-pandemi. Sementara penurunan pada 2024 bisa menjadi indikasi adanya intervensi kebijakan atau program pemulihan pangan yang efektif.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Sikka secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sikka menghadapi tantangan yang lebih berat dalam hal ketersediaan dan akses pangan dibandingkan wilayah-wilayah lain di NTT.

Secara nasional, gap antara Kabupaten Sikka dan angka rata-rata Indonesia jauh lebih lebar. Angka nasional relatif stabil di kisaran 8-10 persen, sementara Kabupaten Sikka hampir selalu berada di atas 12 persen, bahkan pernah menyentuh hampir 18 persen. Ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sikka masih tertinggal jauh dibandingkan konteks nasional, baik dari segi produksi, distribusi, maupun konsumsi pangan.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang mencerminkan kondisi lingkungan suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama: kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Nilai IKLH menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dan dampak kebijakan pembangunan terhadap kelestarian sumber daya alam.

Tabel 2.53

Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,88	60,60	68,98	75,44	72,82
Indeks Kualitas Air	53,75	53,45	50,00	60,00	53,33
Indeks Kualitas Udara	90,30	91,67	92,37	93,30	93,72
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,59	41,17	65,66	68,91	67,60

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, capaian IKLH Kabupaten Sikka selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2020, IKLH berada pada angka 67,88. Namun, capaian ini mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 60,60. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan lingkungan yang cukup signifikan, terutama pada sektor air dan tutupan lahan. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 68,98, dan kembali meningkat pada tahun 2023 hingga mencapai titik tertinggi selama periode lima tahun, yaitu 75,44. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 72,82, meski masih berada pada kategori sedang menuju baik.

Secara lebih rinci, penurunan IKLH pada tahun 2021 dipengaruhi oleh rendahnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang hanya sebesar 41,17, meskipun Indeks Kualitas Udara tetap tinggi yaitu 91,67. Tren positif IKLH tahun 2023 didorong oleh perbaikan kualitas tutupan lahan hingga 68,91 dan kualitas air yang meningkat menjadi 60,00. Namun, pada 2024, penurunan kualitas air menjadi 53,33 menjadi faktor utama turunnya kembali IKLH, meskipun kualitas udara terus meningkat hingga 93,72 dan kualitas tutupan lahan sedikit menurun menjadi 67,60.

Data tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sikka masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengendalian pencemaran air dan konservasi lahan. Sementara kualitas udara cenderung stabil dan terus meningkat, upaya peningkatan kualitas air dan pelestarian tutupan lahan harus menjadi prioritas dalam kebijakan lingkungan hidup ke depan. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi

lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Keanekaragaman hayati adalah komponen utama yang menopang stabilitas dan keberlanjutan ekosistem, serta menjadi indikator penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Di tingkat daerah, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu parameter kunci dalam mengukur kondisi lingkungan yang mendukung pelestarian biodiversitas. Fungsi ekologis RTH tidak hanya sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai habitat bagi flora dan fauna lokal, kawasan resapan air, serta penyeimbang iklim mikro yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Gambar 2.3
Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

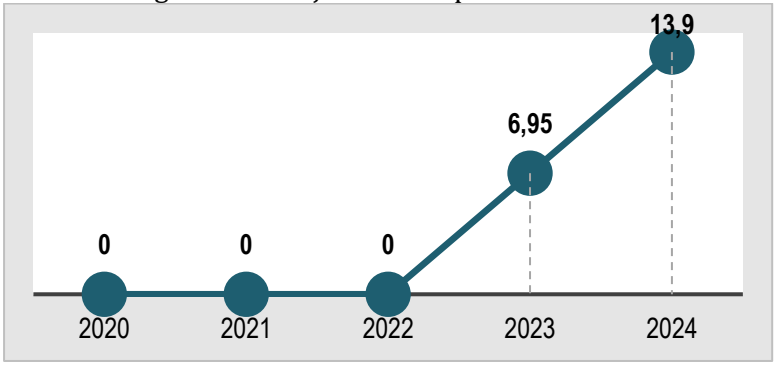

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Di Kabupaten Sikka, perkembangan persentase RTH menunjukkan tren peningkatan meskipun masih berada di bawah target ideal nasional sebesar 30 persen dari luas wilayah perkotaan. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2020 hingga 2022 belum terdapat data resmi mengenai luasan atau persentase RTH. Baru pada tahun 2023, RTH tercatat sebesar 6,95 persen, dan meningkat cukup signifikan menjadi 13,9 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini menandakan mulai diperhatikannya kebijakan pengelolaan ruang hijau sebagai bagian dari strategi pelestarian lingkungan hidup.

Peningkatan RTH ini berkontribusi langsung terhadap kualitas keanekaragaman hayati, khususnya di kawasan perkotaan dan sekitar permukiman. Ruang terbuka hijau mendukung keberadaan vegetasi alami dan buatan, memperluas ruang hidup bagi spesies endemik, serta berperan sebagai koridor ekologis yang menghubungkan kawasan lindung atau habitat yang terfragmentasi. Dengan demikian, pengembangan RTH bukan hanya isu estetika atau tata kota, melainkan juga merupakan intervensi strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi daerah.

Pengelolaan sampah yang efektif merupakan bagian krusial dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Sikka, tantangan geografis kepulauan serta pertumbuhan kawasan permukiman menuntut sistem pengelolaan sampah yang responsif, inklusif, dan berbasis masyarakat. Kualitas pengelolaan sampah berkontribusi langsung terhadap pengurangan pencemaran tanah dan air, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pelestarian tutupan lahan dari tekanan alih fungsi sebagai tempat pembuangan tidak resmi.

Tabel 2.54
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	*)	*)	*)	*)	15,50

Keterangan: *) = tidak dilakukan perhitungan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, indikator kinerja pengelolaan sampah baru mulai terukur secara resmi pada tahun 2024, dengan nilai indeks sebesar 15,50. Ini menjadi baseline awal untuk menilai efektivitas sistem pengelolaan sampah daerah dan menggambarkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan, masih diperlukan perbaikan besar dalam aspek kelembagaan, teknis, dan partisipasi publik. Sebelumnya, pada tahun 2020 hingga 2023, belum terdapat nilai indeks kinerja yang terdokumentasi.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, terutama di wilayah yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan aktivitas industri. Di Kabupaten Sikka, indikator Persentase Limbah B3 yang Terkelola menunjukkan dinamika capaian yang signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024.

Gambar 2.4
Persentase Limbah B3 yang Terkelola di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

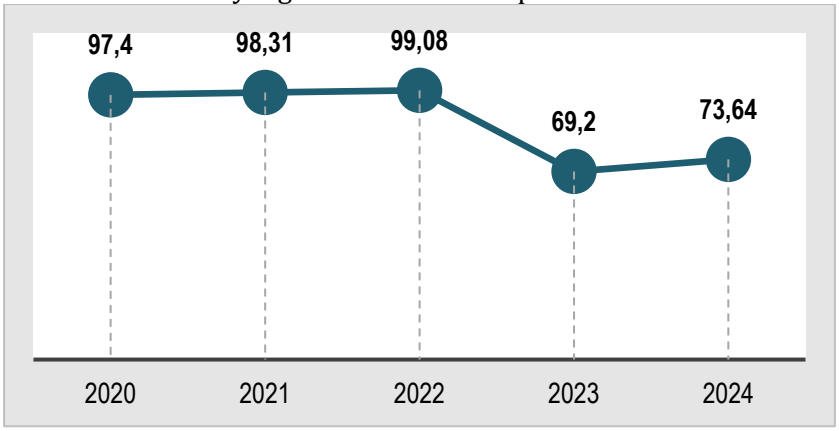

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Pada tahun 2020, persentase limbah B3 yang terkelola mencapai 97,4 persen, kemudian meningkat menjadi 98,31 persen pada tahun 2021 dan kembali naik menjadi 99,08 persen di tahun 2022. Capaian tinggi ini mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan limbah medis dan bahan berbahaya lainnya, terutama dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti RSUD TC Hillers dan unit-unit pelayanan kesehatan yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis dalam persentase pengelolaan limbah B3 menjadi 69,2 persen, yang kemudian hanya sedikit membaik di tahun 2024 menjadi 73,64 persen. Penurunan signifikan ini disebabkan oleh gangguan pada insinerator, yakni alat pembakar limbah yang menjadi komponen vital dalam proses pemusnahan limbah B3. Gangguan teknis ini mengakibatkan tidak optimalnya proses pembakaran, sehingga volume limbah yang berhasil dimusnahkan jauh menurun dibandingkan dengan volume yang dihasilkan. Hal ini berdampak langsung terhadap capaian kinerja lingkungan dan meningkatkan risiko pencemaran apabila tidak segera ditangani.

Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya keberlangsungan fungsi fasilitas pengolah limbah, serta perlunya sistem pemantauan, pemeliharaan, dan investasi teknologi yang memadai dalam manajemen limbah berbahaya. Selain itu, kondisi ini juga menyoroti perlunya strategi mitigasi risiko, termasuk pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemrosesan limbah dan diversifikasi teknologi pengelolaan limbah yang lebih andal.

Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan merupakan salah satu aspek dalam menjamin kualitas lingkungan hidup yang

berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan tingkat ketaatan pelaku usaha dan kegiatan pembangunan terhadap peraturan lingkungan hidup, termasuk pemenuhan izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), serta peraturan perundang-undangan lingkungan lainnya.

Tabel 2.55
Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat	6	41	31	18	69
Jumlah pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan	20	100	64	34	208
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (Persen)	30,00	41,00	48,44	52,94	33,17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Dalam rentang waktu 2020–2024, tren kepatuhan menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, dari 20 kegiatan atau usaha yang diawasi, hanya 6 yang dinyatakan taat, menghasilkan tingkat ketaatan sebesar 30,00 persen. Capaian ini meningkat pada tahun 2021, dengan jumlah kegiatan taat sebanyak 41 dari total 100 kegiatan yang diawasi, sehingga tingkat kepatuhan mencapai 41,00 persen. Peningkatan berlanjut pada 2022, di mana terdapat 31 kegiatan taat dari 64 yang diawasi, dengan tingkat ketaatan sebesar 48,44 persen. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 52,94 persen, yakni 18 kegiatan taat dari 34 yang diawasi.

Namun demikian, pada tahun 2024, tingkat kepatuhan mengalami penurunan tajam menjadi 33,17 persen, meskipun jumlah kegiatan usaha yang diawasi meningkat drastis menjadi 208, dengan 69 kegiatan dinyatakan taat. Penurunan ini perlu dicermati lebih lanjut, mengingat peningkatan intensitas pengawasan seharusnya berdampak positif terhadap kinerja kepatuhan. Penurunan tingkat kepatuhan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peningkatan pengawasan dan efektivitas pelaksanaan pembinaan serta sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi persetujuan lingkungan.

Kecenderungan fluktuatif ini mencerminkan adanya tantangan dalam penguatan sistem pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum lingkungan. Di sisi lain, capaian pengawasan yang terus meningkat dari 20 kegiatan pada 2020 menjadi 208 pada 2024 menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan dan cakupan pengawasan kegiatan usaha. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh tindak lanjut hasil pengawasan dan kapasitas teknis SDM pengawas lingkungan.

Untuk mendorong perbaikan ke depan, Pemerintah Kabupaten Sikka perlu meningkatkan sinergi lintas sektor dalam pembinaan lingkungan, memperkuat edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan lingkungan, serta mengembangkan sistem informasi lingkungan yang transparan dan berbasis risiko. Peningkatan kepatuhan ini sangat penting dalam memperbaiki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara menyeluruh, khususnya dalam mengurangi dampak negatif kegiatan usaha terhadap air, udara, tanah, dan ekosistem wilayah Sikka.

Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di Kabupaten Sikka, indikator ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga kualitas lingkungan, baik melalui kegiatan pengawasan, pelestarian sumber daya alam, maupun inisiatif-inisiatif lokal berbasis komunitas.

Tabel 2.56
Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok masyarakat yang terlibat dalam PPLH	14	10	11	11	10
Jumlah Partisipasi kelompok	14	10	11	11	10
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, kinerja partisipasi masyarakat dalam PPLH ditunjukkan melalui jumlah kelompok masyarakat yang terlibat serta total partisipasi kelompok, yang keduanya secara konsisten mencerminkan 100 persen tingkat partisipasi berdasarkan kelompok yang diidentifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2020, terdapat 14 kelompok masyarakat yang terlibat secara aktif dalam kegiatan PPLH. Namun, jumlah ini menurun pada tahun 2021 menjadi 10 kelompok dan relatif stabil pada tahun-tahun berikutnya: 11 kelompok di tahun 2022 dan 2023, lalu kembali menjadi 10 kelompok pada 2024.

Penurunan jumlah kelompok masyarakat yang terlibat tidak serta-merta menurunkan tingkat partisipasi, karena seluruh kelompok yang tercatat senantiasa menunjukkan komitmen penuh, tercermin dalam capaian 100 persen partisipasi masyarakat selama lima tahun berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah kelompok yang terlibat mengalami sedikit fluktuasi, kualitas keterlibatan dan efektivitas peran kelompok tersebut tetap terjaga. Partisipasi ini mencakup aktivitas seperti penghijauan, pemantauan lingkungan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta edukasi publik terkait konservasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kinerja ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka telah berhasil mempertahankan model partisipatif dalam pengelolaan lingkungan, yang sejalan dengan prinsip inklusivitas dan desentralisasi dalam kebijakan lingkungan hidup nasional. Namun demikian, tantangan ke depan terletak pada upaya meningkatkan kuantitas kelompok masyarakat yang terlibat serta memperluas jangkauan geografis dan substansi kegiatan PPLH, terutama di wilayah pesisir, pedalaman, dan daerah rawan bencana ekologis.

Selain itu, untuk meningkatkan kontribusi partisipasi masyarakat terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Pemerintah Kabupaten Sikka perlu memperkuat kelembagaan komunitas lingkungan, menyediakan insentif dan pelatihan bagi kader lingkungan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, LSM, akademisi, dan dunia usaha. Kinerja yang telah dicapai selama lima tahun terakhir menjadi modal sosial yang penting dalam membangun ketangguhan ekologis dan memperkuat tata kelola lingkungan berbasis masyarakat.

Efektivitas kajian lingkungan dalam memitigasi dampak kegiatan, rencana, dan/atau program (KRP) menjadi tolok ukur penting dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sikka. Kajian ini mencakup berbagai instrumen lingkungan hidup seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maupun dokumen lingkungan lainnya yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tabel 2.57
Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak Kegiatan, Rencana, dan/atau Program (KRP) di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total jumlah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	49	136	94	87	65
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Selama periode 2020–2024, efektivitas kajian lingkungan diukur melalui dua indikator utama: total jumlah rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, dan persentase rekomendasi yang benar-benar diakomodasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau revisi kebijakan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, seluruh rekomendasi yang dikeluarkan setiap tahunnya selalu ditindaklanjuti dengan tingkat kepatuhan 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi hasil kajian tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi secara nyata telah digunakan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian dampak lingkungan.

Pada tahun 2020, terdapat 49 rekomendasi hasil kajian yang ditindaklanjuti, kemudian meningkat signifikan menjadi 136 rekomendasi pada 2021, sebelum menurun kembali menjadi 94 pada 2022, 87 pada 2023, dan 65 pada 2024. Penurunan jumlah ini tidak menunjukkan penurunan efektivitas, melainkan dapat diartikan sebagai hasil dari konsolidasi kebijakan lingkungan yang semakin matang, penyempurnaan sistem evaluasi lingkungan, serta penurunan jumlah KRP yang berpotensi menimbulkan dampak besar.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sikka perlu terus memastikan bahwa rekomendasi hasil kajian lingkungan tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk tindakan korektif, tetapi juga menjadi acuan utama dalam perencanaan program pembangunan jangka menengah dan panjang. Selain itu, efektivitas ini akan semakin optimal bila didukung oleh keterlibatan masyarakat, transparansi informasi, dan penguatan sistem pemantauan serta evaluasi dampak lingkungan secara digital dan terintegrasi.

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen mendasar dalam mendukung efektivitas tata kelola lingkungan hidup di tingkat daerah. SDM yang kompeten dan terlatih sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di Kabupaten Sikka, kapasitas SDM bidang lingkungan hidup selama periode 2020–2024 masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan yang signifikan. Salah satu indikator utama yang menandai lemahnya kapasitas kelembagaan adalah tidak tersedianya data terkait jumlah maupun persentase penyuluh lingkungan hidup yang telah ditingkatkan kompetensinya sepanjang lima tahun terakhir. Selain itu, berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup, belum terdapat tenaga penyuluh lingkungan hidup yang secara khusus ditugaskan atau diberikan pelatihan kompetensi berbasis lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan fungsi edukatif dan fasilitatif di tingkat akar rumput yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat literasi lingkungan, advokasi masyarakat, serta implementasi program-program berbasis komunitas.

Minimnya penyuluh lingkungan hidup yang tersertifikasi maupun yang memiliki pelatihan teknis berdampak langsung pada keterbatasan daerah dalam membina masyarakat, mendampingi pelaku usaha, dan melakukan pengawasan lingkungan di lapangan secara berkelanjutan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang melemahkan efektivitas instrumen-instrumen seperti AMDAL, UKL-UPL, dan dokumen RKL-RPL dalam implementasinya. Lebih lanjut, lemahnya kapasitas SDM lingkungan hidup juga membatasi daya serap Kabupaten Sikka terhadap program-program nasional dan provinsi yang berbasis pelibatan masyarakat, seperti Program Kampung Iklim (ProKlim), konservasi berbasis masyarakat, atau skema insentif hijau lainnya. Padahal, keberadaan penyuluh lingkungan hidup yang kompeten merupakan kunci untuk mendorong transformasi perilaku dan penguatan pengawasan partisipatif di tingkat lokal.

Penyelesaian sengketa dan tindak pidana lingkungan hidup merupakan indikator penting dalam sistem penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Kinerja dalam aspek ini mencerminkan kapasitas institusional Pemerintah Kabupaten Sikka, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam menanggapi aduan masyarakat, menangani konflik sumber daya alam, serta menindak pelanggaran hukum yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Tabel 2.58
Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penanganan pengaduan lingkungan hidup	19	16	26	26	25
Jumlah penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	19	16	16	12	17
Persentase Penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	100%	100%	61,54%	46,15%	68,00%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Selama periode 2020–2024, tren penanganan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, seluruh pengaduan lingkungan yang diterima berhasil diselesaikan secara tuntas, masing-masing sebanyak 19 dan 16 kasus, dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor, respons cepat terhadap aduan masyarakat, dan keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur administratif maupun non-litigasi.

Namun, sejak tahun 2022 terjadi penurunan drastis dalam persentase penyelesaian sengketa. Dari 26 pengaduan yang diterima pada 2022, hanya 16 yang berhasil diselesaikan (61,54 persen). Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan hanya 12 dari 26 kasus yang dapat ditangani tuntas (46,15 persen). Kendati demikian, pada tahun 2024 terdapat perbaikan dengan meningkatnya jumlah penyelesaian menjadi 17 dari 25 kasus (68,00 persen). Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan kapasitas dalam penegakan hukum lingkungan, baik dari sisi teknis, yuridis, maupun sumber daya manusia. Penurunan tingkat penyelesaian dapat disebabkan oleh kompleksitas kasus, keterbatasan kewenangan administratif, lemahnya pembuktian, hingga rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa secara kooperatif. Di sisi lain, peningkatan kembali pada 2024 mengindikasikan adanya perbaikan mekanisme penyelesaian dan penguatan fungsi pengawasan lingkungan.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Sikka telah menunjukkan komitmen dalam merespons aduan lingkungan hidup, efektivitas penyelesaian sengketa masih perlu ditingkatkan secara sistemik. Perbaikan ini merupakan bagian integral dari peningkatan lingkungan hidup berkualitas, serta menjadi fondasi penting bagi tata kelola lingkungan yang responsif, inklusif, dan berbasis keadilan ekologis.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Sanitasi layak merupakan bagian esensial dari layanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin lingkungan yang bersih dan sehat. Akses terhadap sanitasi yang layak tidak hanya berdampak pada penurunan angka penyakit berbasis lingkungan, tetapi juga mencerminkan keberhasilan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang inklusif.

Gambar 2.5
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Sikka
Tahun 2021 – 2024

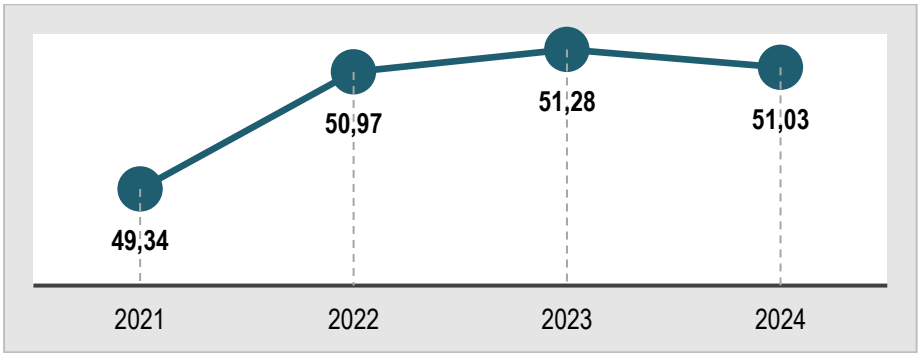

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Sikka pada periode 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan yang relatif lambat dan belum signifikan. Pada tahun 2021, akses sanitasi layak baru menjangkau 49,34 persen rumah tangga, kemudian meningkat menjadi 50,97 persen pada 2022. Kenaikan ini berlanjut tipis pada 2023 sebesar 51,28 persen, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 51,03 persen pada 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi perbaikan secara bertahap, upaya percepatan perlu terus diperkuat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur sanitasi yang layak, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor agar target akses sanitasi universal dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sikka.

Pemerintah Kabupaten Sikka perlu memperkuat strategi intervensi sanitasi yang terintegrasi dengan program perumahan, pengelolaan air limbah domestik, dan perlindungan lingkungan. Pendekatan berbasis wilayah dan komunitas perlu diintensifkan, dengan dukungan regulasi daerah, kolaborasi antar perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan pendanaan. Diperlukan pula penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar capaian sanitasi layak dapat terukur secara akurat dan berkelanjutan menuju target nasional RPJMN dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah yang efektif menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut adalah kemampuan daerah dalam mengolah timbulan sampah melalui fasilitas pengolahan yang tersedia. Tingkat timbulan sampah yang terolah tidak hanya mencerminkan efisiensi sistem pengelolaan, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya.

Gambar 2.6
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

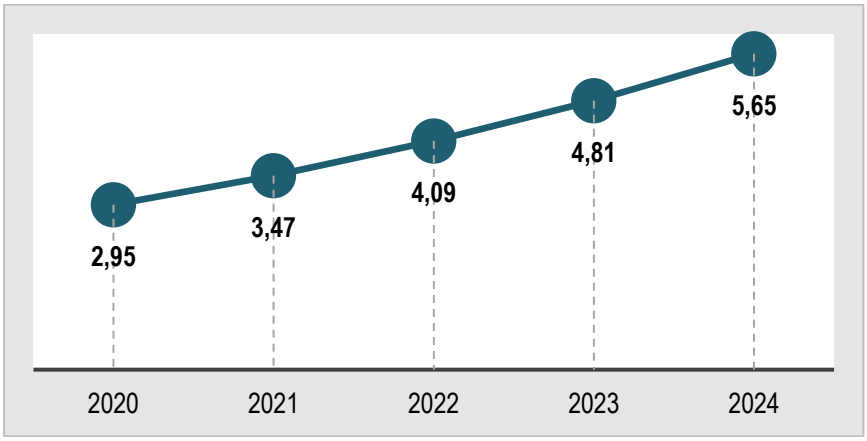

Keterangan: Satuan Kilogram
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah timbulan sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengolahan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah yang terolah tercatat sebesar 274.464 kg. Angka ini meningkat secara bertahap pada tahun 2021 menjadi 334.944 kg dan kembali naik menjadi 338.400 kg pada tahun 2022. Peningkatan tajam mulai terjadi pada tahun 2023, di mana volume sampah terolah melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya,

yakni mencapai 784.800 kg. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 1.119.744 kg. Kenaikan drastis ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat daerah, baik dari sisi pengadaan dan operasionalisasi fasilitas, peningkatan kapasitas SDM, maupun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Meskipun demikian, peningkatan volume sampah terolah juga menjadi indikator meningkatnya timbulan sampah secara keseluruhan yang perlu diantisipasi dengan strategi pengurangan dari hulu, seperti kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta penguatan regulasi daerah terkait pengelolaan sampah berbasis kewilayahan.

d. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan pengumpulan sampah yang menjangkau secara penuh seluruh rumah tangga merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat. Cakupan layanan ini tidak hanya mencerminkan kapasitas operasional pemerintah daerah dalam mengelola sampah domestik, tetapi juga menjadi indikator penting bagi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Gambar 2.7
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

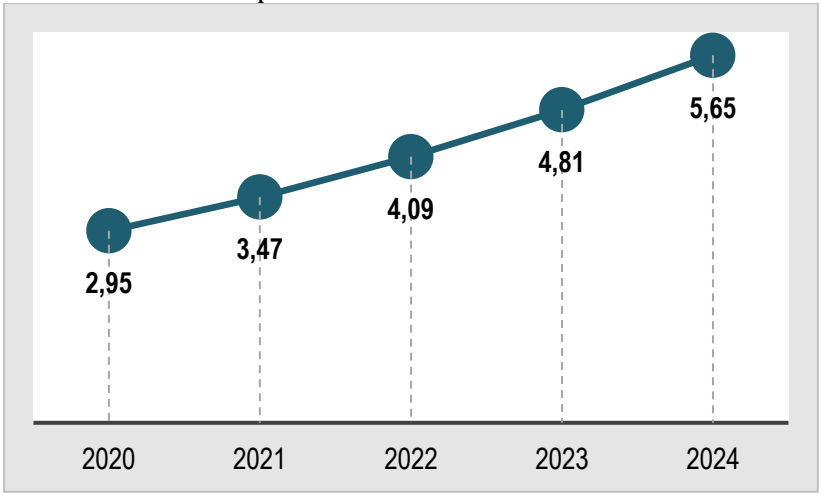

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan gambar di atas, proporsi rumah tangga yang telah terlayani penuh oleh sistem pengumpulan sampah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan layanan pengumpulan sampah baru menjangkau 2,95 persen rumah tangga. Angka ini naik menjadi 3,47 persen pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 4,09 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini berlanjut secara progresif di tahun 2023 dengan capaian 4,81 persen, hingga mencapai 5,65 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi tren pertumbuhan positif, capaian ini masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal cakupan layanan pengumpulan sampah yang menjangkau seluruh wilayah permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.

Rendahnya proporsi ini menunjukkan masih terbatasnya cakupan layanan pengumpulan sampah oleh pemerintah daerah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan armada, tenaga operasional, sistem manajemen pengangkutan, serta tantangan geografis dan persebaran permukiman yang menyulitkan distribusi layanan. Selain itu, aspek

kesadaran masyarakat dalam mengikuti skema layanan formal juga menjadi faktor penentu efektivitas pengumpulan sampah.

Pemerintah Kabupaten Sikka perlu memperluas cakupan layanan pengumpulan sampah secara bertahap dan merata melalui penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, optimalisasi armada dan infrastruktur, serta integrasi sistem layanan berbasis zonasi dan komunitas. Perlu juga dilakukan pembaruan kebijakan layanan persampahan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan insentif layanan, sehingga sistem pengumpulan sampah dapat berjalan lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap potensi bahaya bencana alam dan non-alam, dengan mempertimbangkan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimiliki. Nilai IRB menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap risiko serta mendorong upaya pengurangan risiko bencana secara terencana dan sistematis.

Gambar 2.8
Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

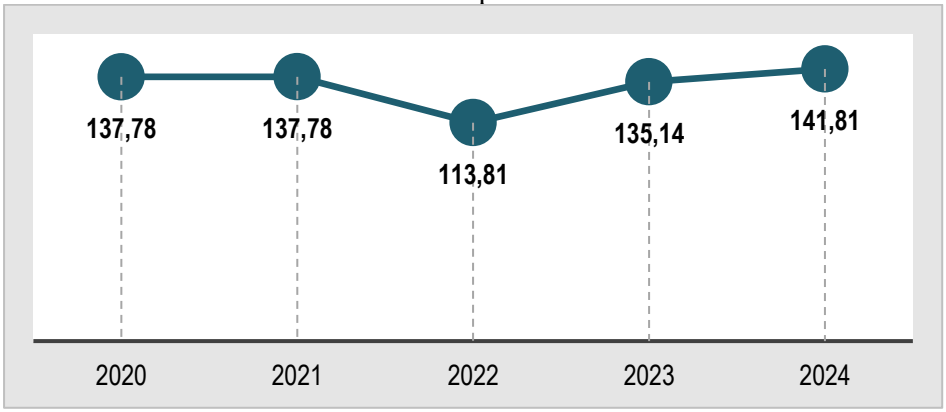

Sumber: Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data grafik di atas, nilai Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sikka selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, IRB berada pada angka 137,78. Nilai ini tergolong tinggi dan mengindikasikan tingginya potensi risiko bencana, baik yang berasal dari faktor geologis (seperti gempa bumi dan letusan gunung api) maupun hidrometeorologis (banjir, kekeringan, dan angin puting beliung), yang memang menjadi karakteristik geografis Kabupaten Sikka.

Tahun 2022 menunjukkan penurunan cukup signifikan menjadi 113,81. Penurunan ini dapat diartikan sebagai hasil dari peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana oleh pemerintah daerah, seperti melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta perbaikan infrastruktur tangguh bencana. Namun demikian, penurunan ini tidak berlangsung konsisten, karena pada tahun 2023 nilai IRB kembali naik menjadi 135,14 dan mengalami kenaikan lebih lanjut pada tahun 2024 menjadi 141,81 menunjukkan angka tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir.

Kenaikan IRB tersebut menandakan adanya peningkatan eksposur dan kerentanan terhadap bencana, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti degradasi lingkungan, urbanisasi yang tidak terkendali, perubahan iklim, serta ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kesiapan infrastruktur. Hal ini memperlihatkan pentingnya

langkah-langkah antisipatif yang lebih terukur dan berkelanjutan untuk memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sikka perlu terus memperkuat kebijakan dan implementasi program pengurangan risiko bencana, termasuk melalui integrasi peta risiko dalam rencana tata ruang, peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, serta pengarusutamaan resiliensi iklim dan bencana dalam seluruh sektor pembangunan. Pendekatan berbasis masyarakat, teknologi informasi, serta kolaborasi lintas aktor juga penting untuk menurunkan tingkat risiko secara sistematis dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

b. Indeks Ketahanan Daerah

Dalam rangka memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Sikka telah mengupayakan berbagai strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan resiliensi. Salah satu indikator kunci dalam mengukur tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan adaptif suatu wilayah terhadap ancaman bencana adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indeks ini merefleksikan efektivitas sistem kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, serta kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal dalam menanggulangi risiko bencana secara komprehensif.

Tabel 2.59
Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	*)	*)	*)	*)	0,44

Keterangan : *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data dari Bapperida Kabupaten Sikka tahun 2025, selama periode 2020 hingga 2023, Kabupaten Sikka tercatat belum memiliki capaian skor Indeks Ketahanan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun-tahun tersebut belum terdapat penilaian atau pencatatan sistematis terhadap indikator ketahanan daerah, atau bahwa instrumen penilaian yang diperlukan belum tersedia secara fungsional. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan kapasitas awal dalam sistem pemantauan dan evaluasi ketangguhan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim.

Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan dengan tercapainya nilai IKD sebesar 0,44 persen Peningkatan ini merupakan hasil dari integrasi upaya pembangunan daerah yang mulai memperhatikan aspek resiliensi, baik melalui penguatan kelembagaan kebencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun perbaikan sistem informasi dan infrastruktur pendukung. Nilai ini juga mencerminkan adanya penilaian resmi dari pemerintah pusat melalui mekanisme indeksasi yang lebih sistematis, yang memungkinkan pengukuran berbasis parameter yang diakui secara nasional.

Perubahan drastis ini menjadi indikator awal keberhasilan reformasi sistemik dalam membangun ketahanan daerah secara lebih terstruktur dan terukur. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga keberlanjutan dari capaian tersebut melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan sistem peringatan dini, perencanaan tata ruang berbasis risiko, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nilai IKD tahun 2024 ini akan menjadi tolok ukur dasar untuk menetapkan target peningkatan kapasitas resiliensi pada periode perencanaan pembangunan daerah berikutnya. Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Sikka Tahun 2024

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Alok	1084,84	2,82	-	1027,50	-	2115,16
2	Alok Barat	1877,17	206,50	-	2359,12	-	4442,78
3	Alok Timur	4573,84	87,00	-	3320,82	-	7981,67
4	Bola	282,85	53,99	-	3995,48	-	4332,33
5	Doreng	706,59	-	-	4436,59	-	5143,17
6	Hewokloang	195,74	318,09	-	1538,49	-	2052,32
7	Kangae	993,86	819,25	-	2160,02	-	3973,14
8	Kewapante	664,84	19,85	-	1611,66	-	2296,35
9	Koting	75,24	6,97	-	1375,01	-	1457,22
10	Lela	3425,59	-	-	1203,40	-	4628,99
11	Magepanda	10587,03	-	-	3056,92	-	13643,95
12	Mapitara	2767,96	-	-	5523,00	-	8290,96
13	Mego	2702,90	-	-	8155,33	-	10858,23
14	Nelle	3,64	1012,59	-	199,53	-	1215,76
15	Nita	6780,37	2354,68	-	2297,65	-	11432,71
16	Paga	2719,73	-	-	4938,91	-	7658,65
17	Palue	-	-	-	3938,76	-	3938,76
18	Talibura	24000,73	-	-	3535,88	-	27536,61
19	Tana Wawo	870,83	-	-	6840,46	-	7711,28
20	Waiblama	4771,86	-	-	8335,80	-	13107,67
21	Waigete	17294,85	32,01	-	6019,44	-	23346,30
Total		86380,47	4913,76	-	75869,77	-	167164,00

Sumber: KLHS, 2025

Kemampuan Kabupaten Sikka dalam meningkatkan ketahanan daerahnya dapat dilihat dari cara adaptasi dan mengelola dampak perubahan iklim (termasuk keragaman dan iklim ekstrem) yang sangat ditentukan terutama oleh kondisi sosial ekonomi yang merupakan indikator kapasitas adaptif. Dalam analisis ini, Kapasitas Adaptif desa direpresentasikan oleh 13 (tiga belas) indikator, yaitu Fasilitas Listrik, Infrastruktur Jalan, Kelembagaan, Industri Kecil dan Mikro, Fasilitas Pendidikan, Sarana Prasarana Ekonomi, Fasilitas Kesehatan, Lembaga Keuangan, Kegiatan Pelestarian Lingkungan, Fasilitas Kredit yang Diterima Warga, Kegiatan Sosial, Jaminan Kesehatan, dan Komunikasi. Kawasan yang memiliki lebih banyak jumlah kondisi Indikator Kapasitas Adaptif yang bagus, secara relatif memiliki kemampuan adaptif yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim.

c. Penurunan Emisi GRK

Hingga tahun 2024, Kabupaten Sikka belum memiliki data penurunan emisi maupun intensitas emisi gas rumah kaca. Hal ini selaras dengan tidak tersedianya data penurunan emisi pada level daerah di aplikasi AKSARA Bappenas RI. Satu-satunya data yang beririsan adalah Indeks Kualitas Udara (IKA) yang merupakan bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Ketidaktersediaan data GRK ini berdampak pada keterbatasan pemerintah daerah dalam melakukan pengambilan keputusan berbasis bukti, khususnya untuk memetakan wilayah yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada target penurunan emisi nasional.

7. Demografi

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki karakteristik demografi unik dengan dinamika pertumbuhan penduduk, sebaran geografis, serta struktur usia yang memengaruhi perencanaan pembangunan. Pemahaman menyeluruh tentang kondisi demografi ini menjadi dasar

perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 guna memastikan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2) yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah bisa diartikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal atas daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia yang telah menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk dalam suatu daerah dapat bertumbuh negatif maupun positif. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah dari penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna dalam memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa yang akan datang titik dengan diketahui jumlah dari penduduk maka akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik. Pertumbuhan dari penduduk memengaruhi secara langsung upaya peningkatan mutu maupun manfaat sumber daya manusia. pertumbuhan penduduk juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan sumber daya alam untuk memberikan daya dukung dan daya tampung.

Tabel 2.61
Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Paga	16.715	16.798	16.801	17.308	16.692
Mego	13.257	13.408	13.489	13.816	13.523
Tanawawo	8.906	9.101	9.219	9.572	9.169
Lela	11.763	11.835	11.803	11.949	11.821
Bola	10.978	10.933	10.829	10.893	11.010
Doreng	12.100	12.228	12.085	12.382	12.862
Mapitara	6.702	6.792	6.726	7.022	6.914
Talibura	22.887	23.392	23.401	24.436	23.477
Waigete	25.570	25.866	26.171	26.998	26.291
Waiblama	8.353	8.395	8.308	8.536	8.564
Kewapante	14.696	14.872	14.918	15.334	15.477
Hewokloang	9.409	9.548	9.541	9.691	9.409
Kangae	18.313	18.444	18.545	19.039	18.930
Palue	9.363	9.417	9.449	9.874	9.681
Koting	6.403	6.506	6.513	6.751	6.702
Nelle	6.264	6.230	6.202	6.331	6.375
Nita	22.375	22.409	22.246	22.796	23.661
Magepanda	12.987	13.225	13.477	14.152	13.358
Alok	32.102	32.483	32.524	32.673	33.261
Alok Barat	22.321	22.661	22.993	23.890	24.668
Alok Timur	32.365	32.711	32.959	33.568	33.621
Jumlah	323.828	327.254	328.199	337.011	335.360

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data yang tersedia dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sikka menunjukkan tren pertumbuhan dalam kurun waktu 2020-2024. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Sikka meningkat dari 323.828 jiwa pada tahun 2020 menjadi 335.360 jiwa pada tahun 2024. Meskipun ada sedikit fluktuasi, tren umum menunjukkan adanya penambahan penduduk. Berdasarkan data di atas, dari 21 kecamatan ada 8 kecamatan yang jumlah penduduknya mengalami pertumbuhan yaitu: Kecamatan Bola, Doreng, Waiblama, Kawapante, Nelle, Nita, Alok Barat, dan Alok Timur.

Dari pertambahan penduduk Kabupaten Sikka selama antar periode tersebut yang terus meningkat jumlahnya menunjukkan laju pertumbuhan. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya dinamika demografi yang perlu diantisipasi. Laju pertambahan penduduk tersebut, pada akhirnya juga berkorelasi dengan persoalan penyediaan pangan, energi, fasilitas permukiman yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, fasilitas pendidikan yang berkualitas, dan bahkan subsidi BBM. Selain itu, kemampuan bumi yang terbatas juga tidak mampu secara cepat menyuplai kebutuhan manusia yang bertambah dengan cepat. Faktor alam yang menjadi bahan pertimbangan utama adalah tanah, air, dan ruang. Akibatnya, selain terjadi penurunan daya dukung lingkungan, kesejahteraan penduduk pun mengalami penurunan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.9
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

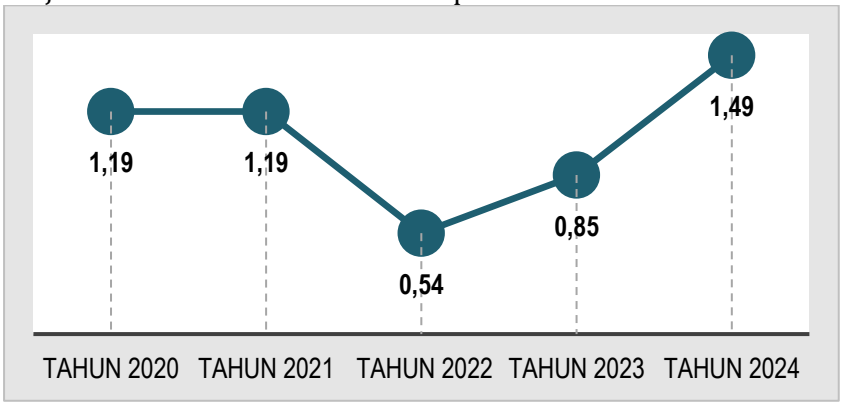

Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Meskipun dari segi jumlah penduduk Kabupaten Sikka secara keseluruhan mengalami kenaikan, dilihat dari angka laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami fluktuatif, dari tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,85 persen dari 0,54 pada tahun 2022. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 1,49 persen. Sejak dicanangkan program KB nasional, maka laju pertumbuhan penduduk secara perlahan tapi pasti dapat ditekan secara bertahap. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sikka dari periode 2022 ke 2024 mengalami peningkatan mungkin disebabkan karena teknologi di bidang kesehatan semakin berkembang dan pemahaman masyarakat akan kesehatan semakin baik, sehingga dapat menekan angka kematian bayi.

b. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*). *Sex ratio* Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62
Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka
Menurut Rasio Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin (%)
Paga	5,06	93,90
Mego	4,03	94,94
Tanawawo	2,73	101,30
Lela	3,52	91,99

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin (%)
Bola	3,28	88,17
Doreng	3,72	93,58
Mapitara	2,06	96,09
Talibura	7,00	93,72
Waigete	7,84	94,94
Waiblama	2,55	100,89
Kewapante	4,62	88,28
Hewokloang	2,81	91,24
Kangae	5,64	90,19
Palue	2,89	88,27
Koting	2,00	94,77
Nelle	1,90	90,30
Nita	7,06	101,71
Magepanda	3,98	93,51
Alok	9,92	96,94
Alok Barat	7,36	98,07
Alok Timur	10,03	95,41
Total		94,64

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata *sex ratio* Kabupaten Sikka adalah sebesar 94,64 yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan hanya terdapat sekitar 94-95 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jika diamati masing-masing kecamatan, maka terlihat bahwa *sex ratio* tertinggi terdapat di Kecamatan Nita yaitu 101,71. Sementara itu, *sex ratio* paling rendah terdapat di Kecamatan Bola yaitu sebesar 88,17.

Administrasi Kependudukan sebagai sistem pengelolaan dan pemeliharaan data penduduk. Tentunya ini mencakup berbagai kegiatan terkait dengan identifikasi, registrasi, dan pemeliharaan catatan tentang individu yang tinggal di suatu wilayah khususnya di Kabupaten Sikka, termasuk penduduk asli, pendatang, serta mereka yang lahir atau meninggal di wilayah tersebut. Administrasi kependudukan juga meliputi pemberian dan pemeliharaan dokumen-dokumen identifikasi resmi, seperti kartu identitas, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Capaian kinerja pelayanan kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.63

Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio penduduk ber-KTP	95,92	94,34	95,5	99,03	99,44
2.	Rasio anak 0-17 yang memiliki akte Kelahiran	85,4	86,04	85,08	85,27	87,34
3.	Rasio pasangan berakte nikah	43,39	49,15	51,62	53,60	55,69
4.	Kepemilikan KTP	207.037	214.290	226.210	242.040	245.940
5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	448:1000	461:1000	464:1000	464:1000	160.524
6	Rasio anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	*)	*)	34,96	36,63	40,76
6.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Keterangan : *) = tidak dilakukan perhitungan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tersebut khususnya pada rasio penduduk ber-KTP pada periode tahun 2020-2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, Kabupaten Sikka memiliki rasio penduduk yang memiliki KTP sebesar 95,92 persen. Selanjutnya pada

tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dalam rasio penduduk ber-KTP yaitu 94,34 persen. Meskipun ada penurunan, tingkat ini masih tinggi dan menunjukkan bahwa pelayanan kependudukan tetap efektif dalam mendaftarkan dan memproses KTP bagi sebagian besar penduduk. Pada tahun 2022, rasio penduduk ber-KTP kembali meningkat menjadi 95,5 persen. Tren positif ini terus terjadi pada tahun 2023 dan 2024 dengan rasio penduduk ber-KTP mengalami peningkatan menjadi 99,03 persen dan 99,44 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Sikka. Ini menandakan bahwa pelayanan kependudukan terus berjalan dengan baik dan masyarakat tetap aktif dalam melakukan registrasi dan memperbaharui KTP mereka. Capaian ini mencerminkan kesuksesan pihak berwenang dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan mengajak masyarakat untuk mendaftar dan memiliki KTP sebagai dokumen identifikasi resmi. Hal ini juga menunjukkan konsistensi dalam upaya untuk memastikan sebagian besar penduduk telah terdaftar dan memiliki KTP, yang penting untuk kepentingan administratif dan keamanan.

Jika dilihat pada kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2020, jumlah kepemilikan KTP di Kabupaten Sikka sebanyak 207.037 orang. Tahun 2021 meningkat dalam kepemilikan KTP mencapai angka 214.290 orang. Tren peningkatan terus berlanjut pada tahun 2022, dengan jumlah kepemilikan KTP mencapai 226.210 orang. Tahun 2023 mencatat pertumbuhan lanjutan dalam kepemilikan KTP mencapai angka 242.040 orang. Pada tahun 2024, jumlah kepemilikan KTP mencapai 245.940 orang, menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat memberikan gambaran mengenai sebaran dan konsentrasi penduduk di suatu wilayah, yang sangat relevan untuk alokasi sumber daya, pengembangan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik yang efisien dan merata. Berdasarkan data tahun 2024, total luas wilayah Kabupaten Sikka adalah 1.675,36 km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 335.360 jiwa, sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Sikka pada tahun 2024 mencapai 200 jiwa per km^2. Angka ini menunjukkan kepadatan rata-rata yang cukup moderat untuk skala kabupaten.

Tabel 2.64
Kepadatan Penduduk Kabupaten Sikka Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan Penduduk Per km^2
Paga	71,52	16.692	237
Mego	101,9	13.523	133
Tanawawo	89,55	9.169	102
Lela	45,96	11.821	257
Bola	44,97	11.010	245
Doreng	54,03	12.862	231
Mapitara	82,89	6.914	83
Talibura	287,30	23.477	82
Waigete	233,01	26.291	113
Waiblama	120,05	8.564	71
Kewapante	22,09	15.477	701
Hewokloang	17,9	9.409	526
Kangae	39,69	18.930	477
Palue	39,69	9.681	244
Koting	14,16	6.702	473
Nelle	13,31	6.375	479
Nita	111,72	23.661	212
Magepanda	136,21	13.358	98
Alok	21,04	33.261	1581

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan Penduduk Per km²
Alok Barat	48,17	24.668	512
Alok Timur	80,20	33.621	419
Jumlah	1.675,36	335.360	200

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Dari tabel di atas, kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Sikkan menunjukkan kepadatan penduduk yang signifikan, dimana kecamatan Alok menjadi kecamatan terpadat dengan 1.581 jiwa per km2 dan kecamatan Kewapante juga memiliki kepadatan yang sangat tinggi, yaitu 701 jiwa per km2. Beberapa kecamatan seperti Lela (257 jiwa/km²), Bola (245 jiwa/km²), Doreng (231 jiwa/km²), Palue (244 jiwa/km²), dan Paga (237 jiwa/km²) menunjukkan kepadatan di atas rata-rata kabupaten namun tidak setinggi area perkotaan. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan relatif rendah, yaitu Waiblama (71 jiwa/km²), Talibura (82 jiwa/km²), Mapitara (83 jiwa/km²), Magepanda (98 jiwa/km²), dan Tanawawo (102 jiwa/km²) memiliki kepadatan penduduk yang jauh di bawah rata-rata kabupaten. Wilayah ini umumnya memiliki karakteristik geografis yang lebih luas atau topografi yang menantang.

1) Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk adalah perbandingan atau susunan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan dan ekonomi. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.10
Piramida Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2024

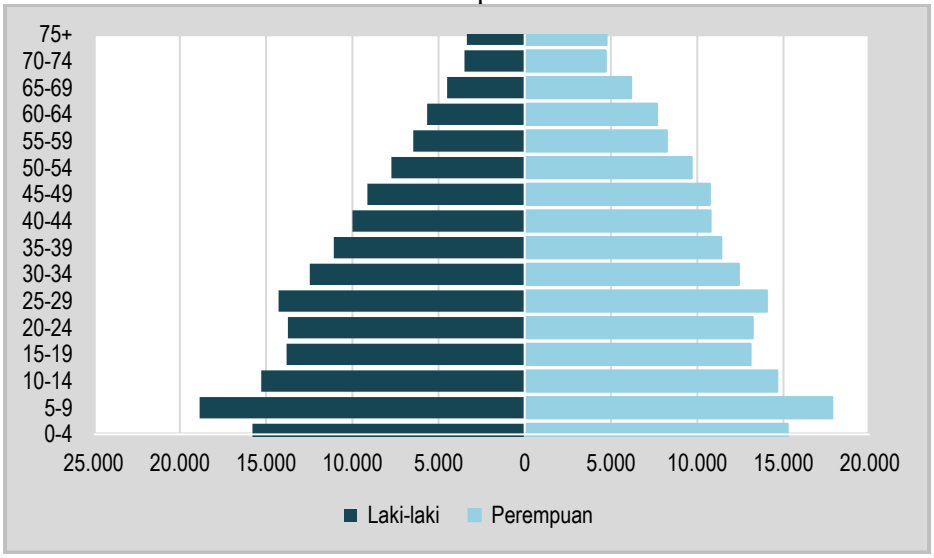

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan, jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 5-9 tahun diikuti 0-4 tahun dan 10-14 tahun. Jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 75+ tahun. Usia produktif di Kabupaten Sikka pada kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 215.676 jiwa atau sekitar 63 persen dan jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 124.651 jiwa atau sekitar 37 persen.

2) Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk Kabupaten Sikka yang tergolong angkatan kerja sebanyak 177.443 dari jumlah usia angkatan kerja Kabupaten Sikka dengan komposisi laki-laki sebanyak 94.625 atau 53,3 persen dan perempuan sebanyak 82.818 atau 46,7 persen. Pada usia angkatan kerja terdapat pula Pengangguran terbuka sebanyak 4.642 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja di Kabupaten Sikka sebanyak 61.214.

Tabel 2.65
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Sikka Tahun 2024

Kegiatan Utama	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	94.625	82.818	177.443
Bekerja/Working	92.686	80.115	172.801
Pengangguran Terbuka	1.939	2.703	4.642
Bukan Angkatan Kerja	18.923	42.291	61.214
Sekolah/Attending School	10.006	10.839	20.845
Mengurus Rumah Tangga	2.889	27.001	29.890
Lainnya/Others	6.028	4.451	10.479
Jumlah	113.548	125.109	238.657

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

3) Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama digunakan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kabupaten Sikka yaitu Katolik, Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2024

Kecamatan	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya	Jumlah
Paga	279	14	54.82	2	-	-	-	5.777
Mego	65	31	4.390	-	-	-	-	4.486
Lela	7	13	3.849	1	-	-	-	3.870
Nita	17	28	7.659	-	-	-	-	7.704
Alok	3.217	379	6.874	10	10	1	-	10.491
Palue	4	14	3.340	-	-	-	-	3.358
Nelle	10	14	2.103	2	-	-	-	2.129
Talibura	1.439	42	6.466	1	-	-	-	7.948
Waigete	143	43	8.274	-	-	-	-	8.470
Kewapante	420	79	4.495	1	1	-	-	4.996
Bola	6	7	3.758	-	-	-	-	3.771
Magepanda	464	31	4.109	1	-	-	-	4.605
Waiblama	6	5	2.663	-	-	-	-	2.674
Alok Barat	2.469	352	4.614	4	1	-	-	7.440
Alok Timur	2.337	655	7.902	30	12	-	-	10.936
Koting	8	8	2.246	-	-	-	-	2.262
Tanawawo	2	4	2.918	-	-	-	-	2.924
Hewokloang	10	8	3.126	-	-	-	1	3.145
Kangae	350	84	6.061	2	1	-	-	6.498
Doreng	8	12	3.828	-	-	-	-	3.848
Mapitara	4	5	2.179	-	-	-	-	2.188
Total	11.265	1.828	96.336	54	25	1	1	109.510
Persentase	10,29%	1,67%	87,97%	0,05%	0,02%	0,00%	0,00%	100%

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementrian Dalam Negeri Semester II Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Sikka berturut-turut dari yang terbanyak sebagai berikut, Katolik sebanyak 87,97 persen, Islam sebanyak 10,29 persen, Protestan sebanyak 1,67 persen, Hindu sebanyak 0,05 persen, Budha sebanyak 0,02 persen dan Konghucu 0,001 persen. Pada 21 kecamatan memiliki penduduk dengan agama yang dianut beragama. Walau adanya keberagaman agama di Kabupaten Sikka, akan tetapi kerukunan antarumat beragama senantiasa terjaga.

4) Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat Adat adalah sekelompok masyarakat yang memiliki aturan bersifat tradisi lisan yang diwariskan turun temurun dengan serangkaian aturan bersifat kekhususan, yang mendiami sebuah wilayah yang diakui sebagai warisan turun temurun dengan batas teritorial. Masyarakat adat memiliki:

- Pemangku adat;
- Memiliki wilayah teritorial;
- Memiliki pemimpin atau pemangku adat bersifat turunan;
- Memiliki kaidah lisan tidak tertulis yang diwariskan turun temurun; dan
- Miliki ritus dalam setiap kehidupan mereka.

d. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, salah satu yang menjadi fokus dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 adalah sumber daya manusia dan kependudukan. Aspek demografi menjadi hal penting untuk dilihat trennya guna menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani oleh pemerintah daerah. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua yang dijelaskan sebagai berikut.

1) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk sebagai fenomena yang mencakup pertumbuhan, penurunan, atau stagnasi jumlah penduduk dalam wilayah dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai cerminan dinamika sosial dan ekonomi di wilayah ini. Dari tahun ke tahun, penduduknya mengalami fluktuasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Umumnya pemerintah daerah melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan jumlah penduduk untuk merencanakan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal tersebut dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat yang jumlahnya semakin berkembang, akan seimbang dengan fasilitas yang disediakan.

Gambar 2.11
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

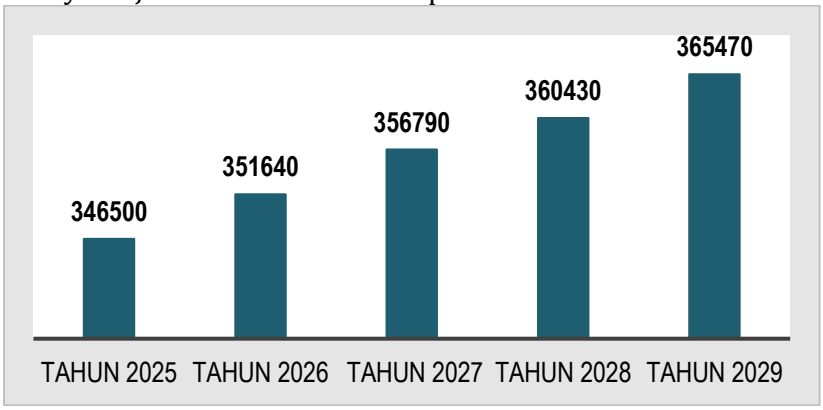

Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kabupaten Sikka pada tahun 2020 adalah 323.828 jiwa. Sementara pada tahun 2025, jumlah penduduk di Kabupaten Sikka diproyeksikan menyentuh angka 346.500 jiwa sehingga mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat yaitu 7,00 persen. Kemudian, pada tahun 2026, jumlah penduduk di Kabupaten Sikka diproyeksikan berjumlah 351.640 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,48 persen. Pada tahun 2027, diperkirakan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,46 persen dengan total jumlah penduduk Kabupaten Sikka sebanyak 356.790 jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Sikka terus meningkat sampai dengan 360.430 jiwa di tahun 2028 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,02 persen. Terakhir di tahun 2029, proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sikka adalah sebesar 365.470 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,40 persen.

Adapun dalam data proyeksi jumlah penduduk lebih lanjut dapat dianalisis lebih dalam dengan melakukan analisis proyeksi pilah gender. Metode ini sangat penting guna menentukan intervensi kebijakan berbasis gender sehingga kebijakan publik dapat tepat sasaran. Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa pada tahun 2025 diperkirakan laju pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 8,20 persen sedangkan laju pertumbuhan penduduk perempuan pada angka 5,88 persen. Kemudian pada tahun 2030, diperkirakan laju pertumbuhan penduduk laki-laki turun dengan angka 5,63 persen sedangkan laju pertumbuhan penduduk perempuan pada angka 5,33 persen. Melihat data proyeksi di atas, Pemerintah Kabupaten Sikka dapat mengambil kebijakan yang mengarah pada pengarusutamaan gender karena terjadi kenaikan jumlah penduduk perempuan yang mana akan berjumlah hampir sama dengan penduduk laki-laki pada tahun 2020.

Gambar 2.12
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Sikka
Tahun 2025-2029

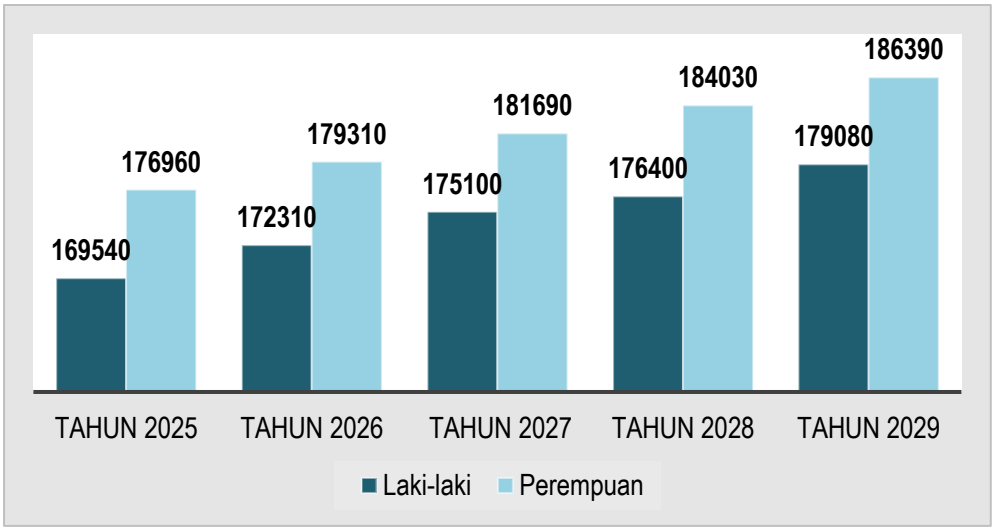

Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

2) Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk mengacu pada cara penduduk tersebar di suatu wilayah atau negara namun yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah penduduk tersebut terdistribusi merata atau tidak. Distribusi penduduk dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, kebijakan migrasi, dan faktor-faktor sosial-ekonomi. Distribusi penduduk lazim disajikan menggunakan piramida penduduk guna menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Proyeksi tahun 2025 menunjukkan bahwa distribusi penduduk Kabupaten Sikka diperkirakan didominasi oleh kelompok usia 5-9 tahun.

Gambar 2.13
Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2025

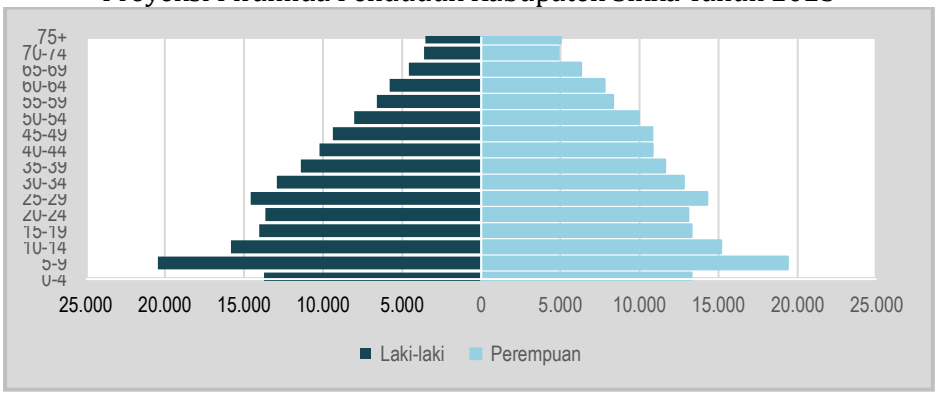

Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Kondisi ini menandakan masih tingginya angka kelahiran bayi pada tahun 2025. Situasi demografi seperti ini menunjukkan pola yang cukup umum di banyak negara berkembang, di mana mayoritas penduduknya adalah penduduk muda dengan tingkat kelahiran yang relatif tinggi. Ini sering kali merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor seperti akses yang lebih terbatas terhadap kontrasepsi, kebiasaan budaya terkait dengan ukuran keluarga yang besar, dan tingkat kematian yang menurun karena peningkatan akses terhadap perawatan kesehatan. Hal ini menunjukkan perlunya fokus kebijakan di tahun tersebut pada upaya-upaya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi yang dapat mengakomodasi populasi muda yang besar. Pendidikan yang berkualitas akan membantu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tuntutan masa depan, sementara layanan kesehatan yang baik akan mendukung kesejahteraan mereka dan mengurangi angka kematian bayi serta angka kematian ibu.

Peningkatan yang cukup mencolok pada kelompok usia 75 tahun ke atas (meskipun jumlahnya masih tetap tergolong sebagai yang paling sedikit dalam populasi) menunjukkan akan adanya perubahan dalam struktur usia penduduk di Kabupaten Sikka. Proyeksi ini layak dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan proaktif untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kontribusi dari semua kelompok usia, termasuk penduduk lanjut usia, diakomodasi secara efektif dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Proyeksi distribusi penduduk Kabupaten Sikka pada tahun 2029 menunjukkan peningkatan pada kelompok usia 10-14 tahun yang juga mendominasi piramida penduduk. Secara umum, distribusi penduduk masih relatif stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dan pada tahun ini, proporsi usia produktif antara laki-laki dan perempuan cenderung seimbang. Struktur penduduk juga menunjukkan bahwa terdapat penambahan jumlah penduduk usia 70 tahun ke atas.

Gambar 2.14
Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2029

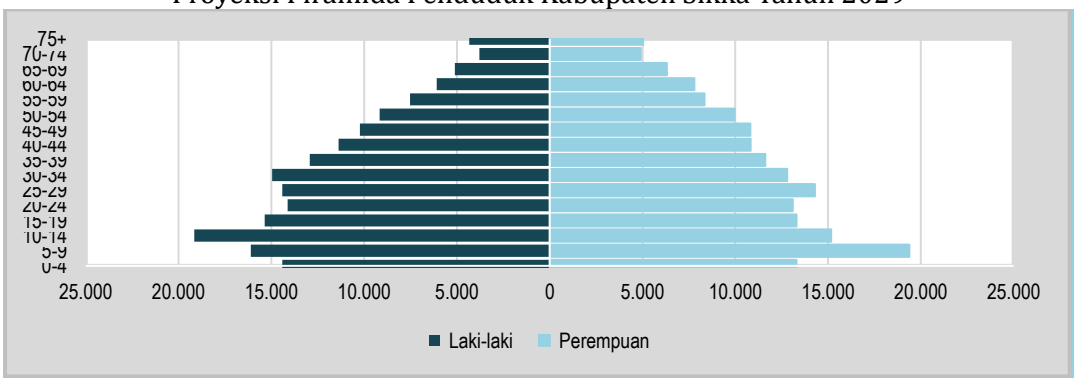

Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Proyeksi pada tahun 2029 tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk yang stabil dalam distribusi penduduk Kabupaten Sikka selama 5 tahun. Ini merupakan hal yang positif dan dapat menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan. Peningkatan pada kelompok usia 5-9 tahun, yang kemudian didominasi oleh kelompok usia 10-14 tahun, menunjukkan bahwa populasi muda tetap menjadi bagian penting dari struktur penduduk. Selain itu, adanya penambahan jumlah penduduk usia 70 tahun ke atas menunjukkan adanya peningkatan harapan hidup dan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduk lanjut usia di Kabupaten Sikka. Ini menandakan keberhasilan kebijakan kesehatan dan kesejahteraan yang berfokus pada pelayanan lanjut usia. Dengan memperhatikan stabilitas dalam distribusi penduduk dan peningkatan pada kelompok usia tertentu, Pemerintah Kabupaten Sikka dapat mengarahkan upaya mereka untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang memperhitungkan kebutuhan dan potensi dari seluruh spektrum populasi.

Proyeksi ini menandakan perlunya upaya untuk mengimbangi pertumbuhan populasi usia remaja dengan pengembangan keterampilan yang mendukung pendidikan di Kabupaten Sikka. Selain itu, diperlukan pendekatan yang tepat dalam pembangunan ekonomi lokal dan penciptaan peluang kerja, sehingga potensi dari kelompok usia produktif dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Sikka secara keseluruhan. Kondisi ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang efektif guna memperkuat sistem pendidikan Kabupaten Sikka untuk masa depan yang lebih baik dengan memastikan bahwa kebutuhan dan potensi dari berbagai kelompok usia penduduk diperhatikan dalam kebijakan dan program-program pembangunan.

3) Bonus Demografi

Pemanfaatan bonus demografi harus maksimal dengan merealisasikan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bonus demografi merujuk pada periode ketika jumlah penduduk usia produktif dalam rentang usia 15-64 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif seperti anak-anak dan lansia. Kabupaten Sikka berpotensi untuk memanfaatkan bonus demografi ini sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dengan manajemen bonus demografi yang baik agar menciptakan potensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal, termasuk dalam hal pendidikan, pelatihan, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan layanan sosial yang memadai.

Komposisi penduduk menurut umur juga menginformasikan tentang rasio ketergantungan, yaitu perbandingan komposisi usia non produktif dengan usia produktif. Indikator ini mengindikasikan daya dukung antar generasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi. Indikator ini juga dapat dirinci menurut kelompok umur, yaitu kelompok anak-anak dan usia lanjut. Dalam metode Cheung et al. (2003) suatu negara atau daerah dinyatakan telah mengalami bonus demografi ketika rasio ketergantungan (*dependency ratio*) berada di bawah 50. Berdasarkan proyeksi kependudukan Kabupaten Sikka, komposisi penduduk produktif dan nonproduktif pada periode 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.15
Proyeksi Komposisi Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

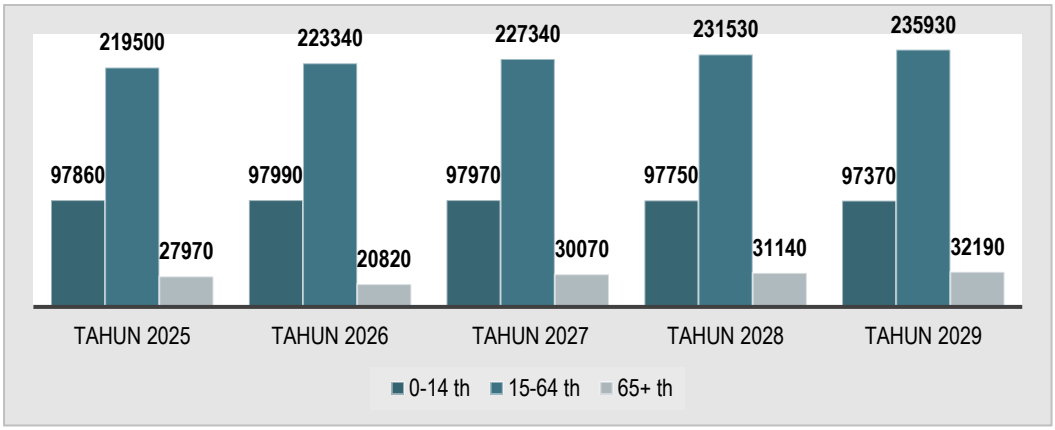

Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Dari proyeksi komposisi penduduk diperkirakan bahwa dalam periode tersebut Kabupaten Sikka akan masuk dalam bonus demografi. Dari sisi ekonomi, persentase usia produktif yang tinggi menandakan adanya potensi ekonomi yang besar. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi tenaga kerja yang besar ini dapat menjadi dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Sikka. Dengan mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, ada peluang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Dari proyeksi komposisi penduduk usia produktif dan nonproduktif didapatkan proyeksi angka rasio ketergantungan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.16
Proyeksi Angka Rasio Ketergantungan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

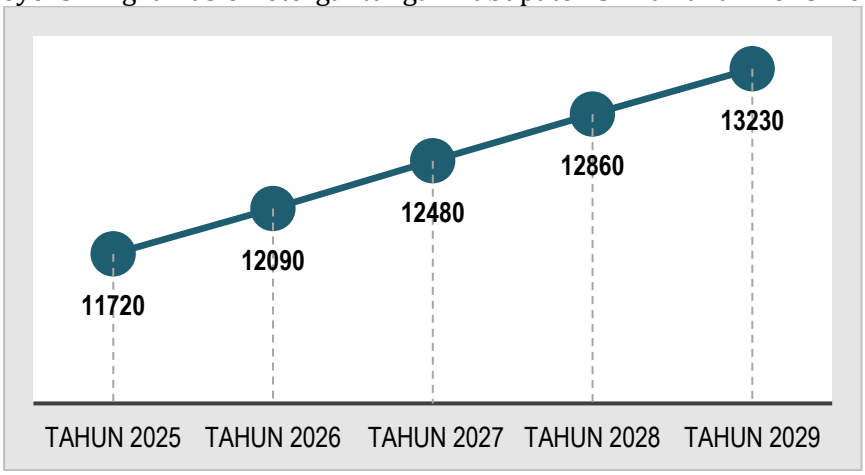

Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Berdasarkan Gambar 2.16, terlihat bahwa angka rasio ketergantungan di Kabupaten Sikka diperkirakan mengalami tren peningkatan pada periode 2025 hingga 2029. Rasio ini naik dari 11.720 pada tahun 2025 menjadi 13.230 pada tahun 2029, menunjukkan pertambahan beban penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia muda dan lansia yang bergantung pada kelompok usia kerja semakin besar setiap tahunnya. Peningkatan rasio ketergantungan ini dapat berdampak pada tekanan fiskal dan sosial, terutama dalam penyediaan layanan

pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang mampu mengoptimalkan bonus demografi, misalnya melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Pelatihan dan pendidikan lanjutan dapat membantu memaksimalkan potensi sumber daya manusia ini. Namun ini juga bisa menjadi ancaman jika tidak diimbangi dengan kebijakan untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan. Individu yang kurang terampil atau memiliki kualifikasi yang rendah, akan kalah dalam persaingan pasar kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pengangguran dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sikka.

4) Penduduk Usia Tua

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa Sikka akan menikmati bonus demografi hingga tahun 2029. Oleh karena itu, pembangunan untuk penduduk usia lanjut menjadi sangat penting ketika mayoritas penduduk berada dalam usia produktif. Penduduk usia tua mengacu pada bagian dari populasi dalam wilayah yang berusia di atas batas usia pensiun atau batas usia yang ditetapkan secara umum untuk klasifikasi sebagai lansia atau usia lanjut. Berdasarkan proyeksi, penduduk usia tua di Kabupaten Sikka akan terus meningkat hingga tahun 2029.

Gambar 2.17

Proyeksi Penduduk Usia Tua Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

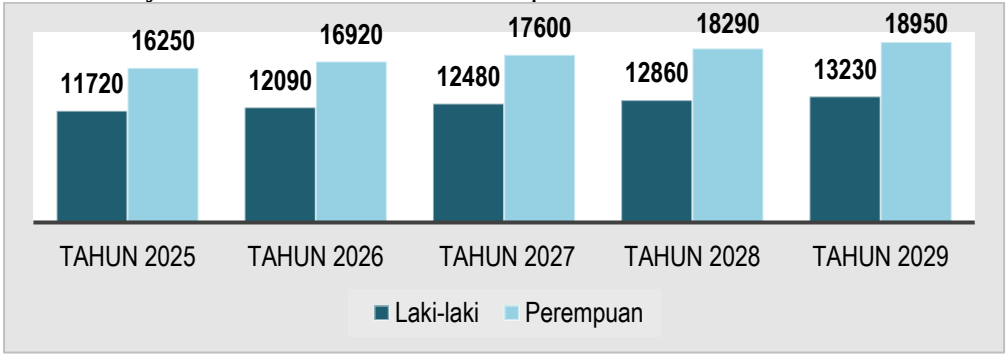

Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah penduduk usia tua di Kabupaten Sikka diproyeksikan menyentuh angka 26.315 jiwa sehingga mempunyai laju pertumbuhan penduduk usia tua cukup meningkat yaitu 6,29 persen. Kemudian, pada tahun 2029, jumlah penduduk usia tua di Kabupaten Sikka diproyeksikan berjumlah 32.180 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk usia tua sebesar 15,05 persen.

Dengan pemahaman yang baik tentang tren demografis ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kesejahteraan dan inklusi bagi penduduk usia tua di Kabupaten Sikka. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penduduk usia lanjut ke depan adalah: 1) Tantangan Kesehatan dan Pelayanan Sosial. Dengan populasi usia tua yang terus bertambah, akan ada peningkatan permintaan akan layanan kesehatan dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah dan organisasi terkait perlu memperhatikan infrastruktur kesehatan dan pelayanan sosial yang memadai untuk mendukung populasi usia tua yang semakin besar; 2) Kualitas Hidup Usia Tua, terutama dari sisi pemberdayaan penduduk usia tua dan daya dukung sosial sehingga mereka dapat hidup sehat dan bahagia; 3) Pengaturan Infrastruktur. Perlu ada perhatian khusus terhadap pengaturan infrastruktur yang ramah lansia, seperti fasilitas kesehatan, transportasi publik yang dapat diakses, dan aksesibilitas fasilitas umum lainnya.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sikka tahun 2020 hingga 2024, dapat dijadikan sebuah analisis yang penting sebagai dasar penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2025–2029. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.67
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.162,27	36,41	1.203,84	37,43	1.254,84	38,16	1.309,05	38,53	1.351,60	38,51
2.	Pertam-bangan dan Penggalian	44,80	1,14	45,77	1,12	46,79	1,09	47,77	1,04	49,41	0,99
3.	Industri Pengolahan	54,26	1,75	54,78	1,70	58,36	1,71	62,76	1,84	65,17	1,85
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,33	0,12	4,59	0,13	4,67	0,13	5,20	0,13	5,67	0,13
5.	Pengadaan Air, Pengelola-an Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,49	0,09	3,76	0,09	3,79	0,09	3,85	0,08	3,92	0,08
6.	Konstruksi	168,82	4,74	173,11	4,76	173,69	4,69	188,31	4,85	192,86	4,62
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	357,06	10,48	362,12	10,36	388,17	10,80	409,48	11,11	447,16	11,41
8.	Transpor-tasi dan Pergu-dangan	175,10	5,15	178,80	5,06	186,94	5,39	191,30	5,57	182,87	4,97
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,21	0,62	20,85	0,62	22,16	0,62	23,53	0,62	24,75	0,61
10.	Informasi dan Komunikasi	302,30	6,25	315,77	6,30	331,82	6,20	344,76	5,96	360,25	5,88
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	111,96	3,86	113,94	3,92	114,83	3,95	115,74	3,75	119,50	3,61
12.	Real Estat	66,86	1,94	68,83	1,91	71,26	2,00	73,69	2,06	76,50	2,17
13.	Jasa Perusaha-an	6, 24	0,20	5,61	0,18	5,77	0,18	6,12	0,17	6,46	0,17
14.	Administra-si Pemerintahan, Pertanahan dan jaminan Sosial Wajib	426,64	13,22	426,17	12,86	427,02	12,08	427,57	11,55	443,73	11,88
15.	Jasa Pendidikan	288,75	10,63	284,12	10,17	283,64	9,66	292,45	9,42	309,85	9,63
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	69,52	2,16	72,70	2,25	73,96	2,14	75,47	2,19	78,81	2,39
17.	Jasa Lainnya	43,06	1,24	41,19	1,15	41,76	1,12	43,80	1,11	45,36	1,10
	PDRB	3.305,67	100	3.375,93	100	3.489,47	100	3.620,86	100	3.763,88	100

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sikka tahun 2020 hingga 2024, dapat disusun sebuah analisis yang penting sebagai dasar penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2025–2029. Data tersebut memperlihatkan struktur perekonomian Sikka yang masih didominasi oleh sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor utama, diikuti oleh sektor-sektor jasa, perdagangan, konstruksi, dan informasi-komunikasi.

Selama lima tahun terakhir, kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB secara konsisten berada di atas 36 persen, bahkan mencapai 38,51 persen pada tahun 2024. Hal ini menegaskan bahwa perekonomian Kabupaten Sikka sangat bergantung pada sumber daya alam dan kegiatan ekonomi rakyat di pedesaan. Namun, pertumbuhan sektor ini cenderung moderat, menandakan adanya ruang untuk transformasi menuju pertanian yang lebih modern, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ini mengisyaratkan pentingnya transformasi pertanian dan perikanan yang tidak hanya produktif tetapi juga tangguh terhadap perubahan iklim.

Sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan tren yang positif, dari 10,48 persen pada tahun 2020 menjadi 11,41 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas pasar dan konsumsi masyarakat yang bisa menjadi indikasi mulai menguatnya ekonomi lokal dan jaringan distribusi. Demikian pula, sektor informasi dan komunikasi terus mengalami pertumbuhan, meskipun sedikit melambat pada 2024. Peran sektor ini krusial dalam mendorong transformasi digital untuk menunjang sektor-sektor lain seperti pariwisata, pendidikan, dan perdagangan.

Sektor administrasi pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan tetap memberikan kontribusi besar secara stabil, masing-masing sekitar 10–13 persen dari total PDRB. Hal ini mencerminkan pentingnya belanja pemerintah dalam menopang ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Namun demikian, kontribusinya cenderung stagnan, menandakan perlunya inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar agar lebih efisien dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sektor industri pengolahan hanya menyumbang sekitar 1,7 persen dari PDRB sepanjang periode tersebut. Ini mengindikasikan belum optimalnya pengembangan industri hilir dan nilai tambah dari komoditas lokal. Sebagai daerah dengan potensi kelautan, perikanan, dan pertanian, minimnya kontribusi sektor industri menunjukkan kebutuhan mendesak akan strategi hilirisasi dan industrialisasi yang berbasis potensi lokal. Demikian pula, sektor konstruksi yang walaupun menunjukkan kenaikan nominal, persentasenya cenderung stagnan dan tidak memberikan lonjakan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, struktur PDRB Kabupaten Sikka mencerminkan potensi besar namun masih menghadapi tantangan ketimpangan antar sektor. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD harus mengedepankan pendekatan yang terintegrasi, berbasis potensi lokal, dan adaptif terhadap perubahan global maupun iklim.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Data laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2020–2024 memberikan gambaran penting mengenai dinamika ekonomi Kabupaten Sikka dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan tingkat nasional. Analisis ini membantu menilai sejauh mana pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah setelah dampak pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka menunjukkan arah yang positif dalam lima tahun terakhir, namun masih tertinggal dibandingkan nasional dan sedikit di bawah provinsi.

Gambar 2.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

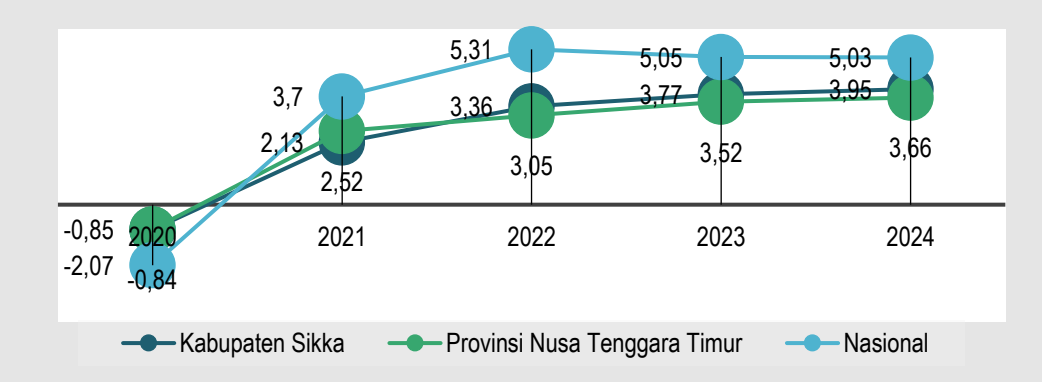

Sumber: BPS, 2025

Data di atas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka berfluktuasi dalam periode 2020-2025. Kabupaten Sikka mengalami kontraksi ekonomi sebesar -0,85 persen pada tahun 2020, sebagai dampak langsung dari pandemi yang menyebabkan gangguan besar pada aktivitas ekonomi lokal. Namun, pemulihan mulai tampak sejak 2021, dengan pertumbuhan positif sebesar 2,13 persen, dan terus meningkat hingga 3,95 persen pada tahun 2024. Kenaikan bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan fundamental dalam aktivitas ekonomi, meskipun laju pertumbuhannya tergolong sedang dan masih berada di bawah rata-rata nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka cenderung sejalan dengan tren Provinsi NTT. Keduanya mengalami kontraksi hampir sama besar pada 2020 (-0,85 persen dan -0,84 persen), dan mencatat pemulihan bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Namun, sejak 2021, laju pertumbuhan ekonomi NTT secara konsisten sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sikka, walaupun selisihnya tidak terlalu signifikan. Ini menunjukkan bahwa Sikka turut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi provinsi, namun mungkin belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi sektoralnya.

Secara nasional, Indonesia mengalami kontraksi lebih dalam pada 2020 (-2,07 persen) tetapi menunjukkan pemulihan yang jauh lebih kuat dibandingkan Sikka dan NTT, yakni mencapai 3,7 persen pada 2021 dan melesat ke angka 5,31 persen pada 2022. Sementara Sikka dan NTT hanya tumbuh sekitar 3-4 persen pada 2023-2024, nasional mampu mempertahankan pertumbuhan stabil di atas 5 persen. Ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi di daerah-daerah seperti Sikka masih lebih lambat dan berisiko tertinggal dari kemajuan nasional. Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha juga menunjukkan dinamika pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka pascapandemi COVID-19. Dari tahun 2020 hingga 2024, berbagai sektor mengalami fluktuasi pertumbuhan, mencerminkan ketahanan yang berbeda-beda antar lapangan usaha.

Tabel 2.68
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/ Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,8	3,58	4,24	4,32	3,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,29	2,16	2,24	2,1	3,42
3.	Industri Pengolahan	-3,62	0,95	6,54	7,53	3,84
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,73	6,12	1,73	11,28	9,16

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,18	7,71	0,83	1,73	1,65
6.	Konstruksi	-8,71	2,54	0,85	7,86	2,42
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,18	1,42	7,03	5,71	9,20
8.	Transportasi dan Pergudangan	-17,35	2,11	4,5	2,33	-4,40
9.	Penyediaan Akomodasi makan dan Minum	-15,24	3,63	5,35	6,19	5,21
10.	Informasi dan Komunikasi	7,21	4,46	4,93	4,06	4,49
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,44,	1,77	0,78	0,79	3,25
12.	Real Estate	-2,32	2,95	3,53	3,41	3,81
13.	Jasa Perusahaan	-31,07	-10,12	2,87	6,09	5,50
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,14	-0,11	0,2	0,13	3,78
15.	Jasa Pendidikan	0,72	-1,61	-0,17	2,96	5,95
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,9	4,57	1,74	2,04	4,43
17.	Jasa Lainnya	-11,52	-4,35	1,4	4,87	3,58
	Produk Domestik Regional Bruto	5112,02	5.317,52	5.702,89	6.194,67	6.755,60

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Data di atas menunjukkan, ekonomi Kabupaten Sikka mengalami pemulihan pasca pandemi, namun masih diwarnai ketimpangan antar sektor. Total PDRB Kabupaten Sikka terus meningkat dari Rp 5.112,02 miliar pada 2020 menjadi Rp 6.755,60 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan pemulihan ekonomi secara agregat, meskipun komposisinya masih timpang antara sektor produktif dan sektor konsumtif. Sektor primer tetap menjadi tulang punggung, sementara sektor industri dan perdagangan menunjukkan potensi besar untuk didorong. Sektor transportasi dan jasa keuangan masih perlu diperkuat. Untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, dibutuhkan strategi pembangunan lintas sektor, investasi infrastruktur, serta peningkatan kualitas SDM dan inovasi lokal.

Sektor Primer (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dan positif, dari 0,8 persen pada 2020 naik menjadi puncaknya di 2023 (4,32 persen), kemudian sedikit melambat di 2024 (3,2 persen). Stabilitas sektor ini menandakan ketergantungan masyarakat Sikka terhadap sumber daya alam masih kuat dan menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Industri pengolahan mengalami pertumbuhan signifikan, dari kontraksi -3,62 persen pada 2020 menjadi pertumbuhan tertinggi sebesar 7,53 persen pada 2023, sebelum menurun ke 3,84 persen di 2024. Ini mencerminkan adanya peluang hilirisasi atau pengolahan bahan mentah yang mulai membaik. Namun, ketidakstabilan ini juga menunjukkan perlunya penguatan kapasitas industri dan ekosistem investasi. Sektor konstruksi yang sempat terkontraksi parah pada 2020 (-8,71 persen) mulai pulih di tahun-tahun berikutnya dan mencapai 7,86 persen pada 2023. Namun, kembali melambat di 2024 (2,42 persen), menandakan proyek infrastruktur belum berlanjut secara konsisten.

Pengadaan listrik dan gas menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil, terutama pada 2023 (11,28 persen) dan 2024 (9,16 persen). Ini mencerminkan peningkatan kebutuhan energi seiring dengan aktivitas ekonomi yang tumbuh. Sektor pengadaan air dan pengelolaan limbah justru menunjukkan penurunan signifikan setelah lonjakan tahun 2021 (7,71 persen), menandakan perlunya perbaikan tata kelola lingkungan dan sanitasi. Sektor perdagangan, yang menjadi penopang kegiatan konsumsi, tumbuh pesat sejak 2022. Dari 1,42 persen pada 2021, naik menjadi 9,20 persen pada 2024. Ini menunjukkan pemulihan daya beli masyarakat dan kelancaran distribusi barang.

Namun, sektor transportasi dan pergudangan mengalami ketidakstabilan. Dari kontraksi sangat dalam -17,35 persen di 2020, sempat pulih namun kembali terkontraksi pada 2024 (-4,40 persen), menunjukkan masih adanya hambatan pada infrastruktur atau efisiensi logistik. Sektor akomodasi dan makanan-minuman juga menunjukkan tren pemulihan yang stabil setelah terkontraksi tajam pada 2020 (-15,24 persen), tumbuh menjadi 5,21 persen di 2024. Ini menandakan pariwisata dan konsumsi luar rumah mulai pulih. Sektor informasi dan komunikasi

tumbuh stabil, sekitar 4 - 5 persen per tahun, mencerminkan pentingnya digitalisasi dalam ekonomi lokal. Jasa keuangan tumbuh fluktuatif dan rendah, baru mencapai 3,25 persen di 2024, menunjukkan masih terbatasnya literasi dan inklusi keuangan.

Sektor jasa pendidikan dan kesehatan menunjukkan pemulihan bertahap setelah kontraksi selama masa pandemi. Pendidikan tumbuh 5,95 persen di 2024, dan kesehatan 4,43 persen, mengindikasikan penguatan pelayanan publik di bidang sosial dasar. Sektor jasa lainnya mulai pulih pasca kontraksi 2020 dan 2021, dengan pertumbuhan 3,58 persen pada 2024. Sementara sektor administrasi pemerintahan yang sempat stagnan juga menunjukkan peningkatan pada 2024 (3,78 persen), kemungkinan terkait dengan peningkatan belanja publik.

b. Tingkat Kemiskinan

Kesuksesan pembangunan dapat diukur dengan angka kemiskinan yang dihitung berdasarkan persentase orang miskin di suatu wilayah. Persentase orang miskin di Kabupaten Sikka lebih rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi, namun lebih tinggi dari nasional. Jika dibandingkan dengan penurunan kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sikka mengalami perkembangan yang kurang positif. Namun demikian, data kemiskinan pada tahun 2020 menunjukkan persentase penduduk miskin nasional meningkat dikarenakan covid-19. Ketika terjadinya pandemi COVID-19, secara umum kondisi perekonomian menurun. Namun, Kabupaten Sikka relatif mampu bertahan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi di provinsi, terutama karena daerah ini memiliki basis ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian di wilayah pedesaan. Hal Ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan basis pertanian cenderung lebih kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi dibandingkan dengan wilayah yang bergantung pada sektor perdagangan maupun industri.

Gambar 2.19
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2020- 2024

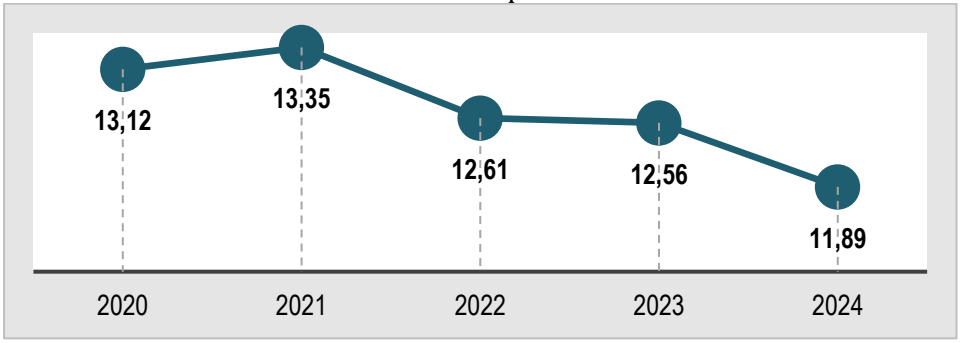

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025 (diolah)

Dari grafik di atas dapat dijelaskan, untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka menunjukkan adanya fluktuasi dan tren penurunan dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 13,12 persen, kemudian tahun 2021 angka kemiskinan sedikit meningkat menjadi 13,35 persen. Ini merupakan puncak persentase kemiskinan dalam periode yang diamati. Namun, setelah tahun 2021, Kabupaten Sikka berhasil menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin menurun signifikan menjadi 12,61 persen, dan berlanjut meskipun sedikit melambat di tahun 2023 menjadi 12,56 persen. Pencapaian paling baik terlihat pada tahun 2024, di mana persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka berhasil ditekan hingga mencapai 11,89 persen. Angka ini merupakan yang terendah dalam periode 2020-2024.

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sikka terlihat kesesuaian antara persentase kemiskinan yang menunjukkan mengalami puncak peningkatan pada tahun 2021 menjadi 43.090 jiwa, kemudian pada tahun 2022 secara agregat menurun menjadi 40.870 jiwa, dan terus menurun pada tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi 38.730 jiwa yang dapat dilihat pada grafik berikut,

Gambar 2.20
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

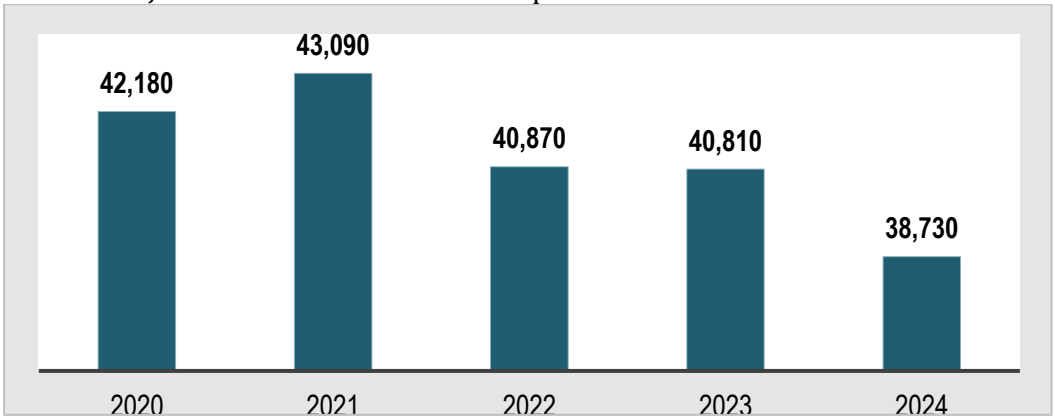

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025 (diolah)

Fluktuasi dari Angka kemiskinan di atas juga berkaitan dengan ketergantungan Kabupaten Sikka terhadap sektor primer. Sektor primer yang menyumbang PDRB terbesar dapat dengan mudah bergeser dan memengaruhi kondisi ekonomi pada sebuah wilayah dengan sangat cepat namun, Kabupaten Sikka memiliki sektor primer lain selain kehutanan, perikanan, yaitu pertanian. Sektor pertanian inilah yang menjadikan kabupaten Sikka sedikit lebih kuat dalam menghadapi shock ekonomi bahkan ketika terjadinya Pandemi COVID-19.

Garis kemiskinan Kabupaten Sikka pada tahun 2024 sebesar Rp 434.074, hal ini menunjukkan setiap individu di Kabupaten Sikka yang memiliki pengeluaran atau pendapatan rata-rata per kapita per bulan di bawah Rp 434.074 dianggap sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) adalah ambang batas pendapatan minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik pangan maupun non-pangan, dalam periode waktu tertentu (biasanya satu bulan). Seseorang atau rumah tangga dikategorikan miskin jika pendapatannya berada di bawah Garis Kemiskinan.

Gambar 2.21
Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

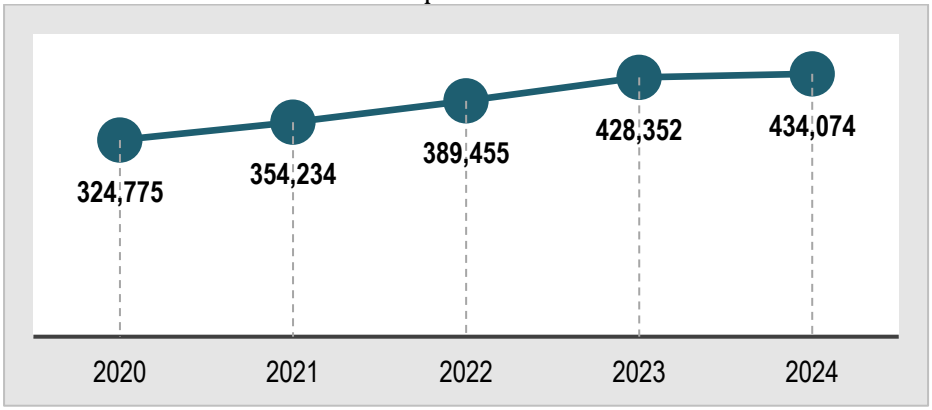

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2025 (diolah)

Dengan demikian, jika dibuat perbandingan antara daya beli masyarakat dari rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat Sikka yang terus meningkat dan mencapai Rp 923.314,70 pada tahun 2024 dengan garis kemiskinan Kabupaten Sikka sebesar Rp 434.074, maka

seharusnya Angka kemiskinan di Kabupaten Sikka sudah mampu diatasi dengan cukup baik. Namun, angka garis kemiskinan di Kabupaten Sikka yang tiap tahun terus-menerus meningkat membuat daya beli masyarakat miskin menjadi lebih rendah yang berakibatkan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidakharmonisan antara Jumlah pendapatan perkapita dengan garis kemiskinan secara langsung akan mengakibatkan bertambahnya jumlah orang miskin di Kabupaten Sikka dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sikka harus merancang strategi yang ideal dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya.

Kekurangan kedua berkaitan dengan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan, di mana kebanyakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak melibatkan partisipasi dari golongan miskin yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Keterbatasan partisipasi dari pihak yang terkena dampak kebijakan menyebabkan ketidakcocokan antara kebutuhan yang sebenarnya dan kebijakan yang diterapkan. Akibatnya, kebijakan tersebut seringkali gagal mencapai tujuan yang diharapkan, meskipun telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, penyesuaian antara kebutuhan dan pemberian akan menjadi solutif yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan keterlibatan dari objek kebijakan.

Ketiga adalah *vulnerability* atau kerentanan terhadap kemiskinan. Dalam konteks ini, kerentanan terhadap kemiskinan terkait dengan kelompok masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan tetapi sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan karena perubahan yang terjadi, dikenal sebagai kelompok near poor. Namun demikian data mengenai kelompok *near poor* ini tidak tersedia, untuk itu kerentanan didekati melalui dua mekanisme, yakni Angka kedalaman kemiskinan dan Angka keparahan kemiskinan. Semakin dalam Angka kemiskinan dan keparahan kemiskinan maka akan semakin banyak orang yang berada pada jalur kerentanan. Persoalan kemiskinan bukan hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, oleh karena itu perlu diperhatikan juga indeks kedalaman (*Poverty gap index*) dan indeks keparahan (*poverty severity index*). Dengan demikian, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan atas kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.

Gambar 2.22
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

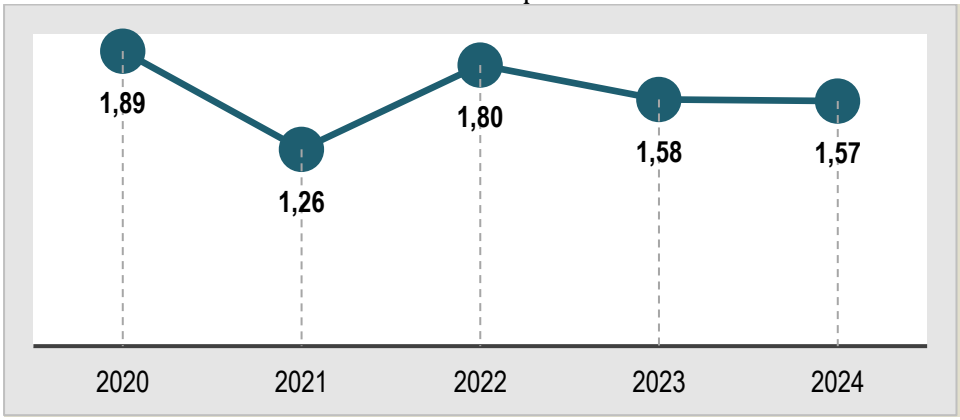

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2025 (diolah)

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*) memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan di suatu wilayah. Indeks kedalaman kemiskinan mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan

Kabupaten Sikka menunjukkan fluktuasi namun dengan tren penurunan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 1,89. Terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 1,26 yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, rata-rata pengeluaran penduduk miskin lebih dekat ke garis kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, nilai indeks sedikit meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 1,80 yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin kembali menjauh dari garis kemiskinan. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali menjadi 1,58 dan terus menurun tipis menjadi 1,57 pada tahun 2024.

Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan mengukur distribusi pengeluaran diantara penduduk miskin, yang mencerminkan seberapa parah ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri. Semakin tinggi kedalaman kemiskinan yang dimiliki, akan semakin lebar pula kesenjangan kemiskinan yang menyebabkan banyak orang yang masuk pada kategori rentan. Pada tahun 2020, indeks keparahan kemiskinan berada di angka 0,38 dan menurun drastis pada tahun 2021 menjadi 0,21. Ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut, distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin lebih merata, atau dengan kata lain, kesenjangan di antara mereka yang miskin menjadi lebih kecil. Namun pada tahun 2022, nilai indeks melonjak tajam menjadi 0,40 yang menunjukkan peningkatan ketimpangan di antara penduduk miskin atau adanya kelompok yang semakin jauh di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan kembali menjadi 0,29 dan pada tahun 2024, indeks sedikit meningkat menjadi 0,31. Indeks keparahan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sikka yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.23
Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

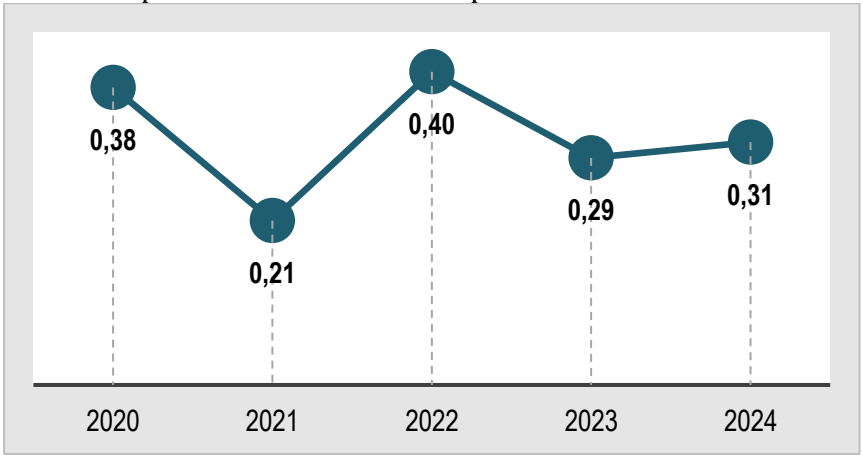

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2025 (diolah)

Fluktuasi yang tergambar pada gambar di atas juga membuktikan kebenaran dari pendekatan kedua pada dimensi kerentanan. Pendekatan ini adalah ketergantungan Kabupaten Sikka terhadap berbagai faktor eksternal seperti alam dan bahkan pasar internasional. Sektor primer yang menjadi ujung tombak perekonomian telah bergantung pada kondisi pasar internasional. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa perkebunan selalu terkait dengan ekonomi internasional namun dengan mekanisme yang berbeda pada masing-masing zaman tersebut. Perubahan harga secara global dapat memengaruhi kondisi ekonomi daerah di kabupaten Sikka. Instabilitas harga pasar dunia mengakibatkan kerentanan yang besar bagi masyarakat Kabupaten Sikka.

Keempat adalah physical weakness, lemah fisik yang mengganggu dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kontribusi sektor pendidikan saja tidak cukup untuk mengatasi

permasalahan kemiskinan. Kondisi fisik seseorang sangatlah berpengaruh terhadap produktivitasnya. Dimensi ini didekati dengan aspek kesehatan.

c. PDRB Per Kapita (Pendapatan Per Kapita)

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan tren peningkatan di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan secara nasional selama periode 2020 hingga 2024. Namun, jika dibandingkan secara relatif, PDRB per kapita Kabupaten Sikka masih tertinggal cukup signifikan dibandingkan dengan Provinsi NTT maupun rata-rata nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.69.

Tabel 2.69
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	15,9	16,3	17,3	18,5	19,9
Provinsi Nusa Tenggara Timur	20,1	20,6	21,7	23,1	24,3
Nasional	57,2	62,3	71	75	78,6

Sumber: Data BPS, 2025

Dari data diatas terlihat pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Sikka tercatat sebesar Rp15,9 juta, sedikit di bawah rata-rata provinsi sebesar Rp20,1 juta, dan jauh di bawah angka nasional sebesar Rp 57,2 juta. Ketimpangan ini berlanjut hingga tahun 2024, meskipun terjadi peningkatan nilai PDRB per kapita di semua level. Pada 2024, Sikka mencatat Rp19,9 juta, sedangkan Provinsi NTT Rp24,3 juta, dan nasional Rp 78,6 juta.

Pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Sikka relatif stabil, dengan peningkatan sekitar Rp1 juta per tahun. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aktivitas ekonomi dan distribusi pendapatan di wilayah tersebut, meskipun lajunya masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pendapatan rata-rata nasional. Gap antara Sikka dan rata-rata nasional yang mencapai hampir Rp 59 juta pada 2024 menunjukkan tantangan besar dalam mempersempit kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti struktur ekonomi yang masih dominan di sektor primer, rendahnya industrialisasi dan hilirisasi, serta terbatasnya akses terhadap pasar dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, perlu ada strategi pembangunan ekonomi yang lebih agresif dan inklusif di Sikka untuk mendorong nilai tambah sektor-sektor potensial dan memperkuat daya saing lokal.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam melihat kondisi pasar kerja dan efektivitas pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Capaian TPT Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.24
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024

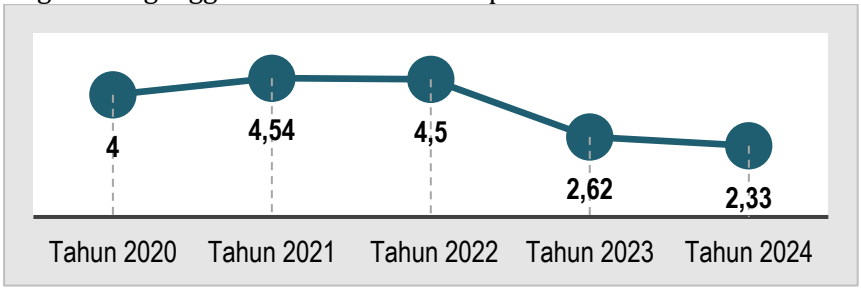

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sikka dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi tren penurunan TPT yang signifikan dalam dua tahun terakhir (2023-2024) yang merupakan capaian positif yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam RPJMD Kabupaten Sikka. Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sikka tercatat sebesar 4,00 persen, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 4,54 persen. Pada tahun 2022, TPT Kabupaten Sikka masih berada di angka yang relatif tinggi, yaitu 4,50 persen yang menunjukkan bahwa pemulihan pasar kerja belum sepenuhnya optimal pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2023, Kabupaten Sikka berhasil menunjukkan perbaikan signifikan dengan penurunan TPT menjadi 2,62 persen dan penurunan berlanjut pada tahun 2024, dimana TPT kembali menurun menjadi 2,33 persen. Angka TPT ini merupakan yang terendah dalam periode lima tahun, ini menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sikka.

e. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah. Rasio Gini erat berkaitan dengan corak dan karakter ekonomi yang mewarnai suatu daerah. Rasio Gini menghasilkan angka antara 0 dan 1, dimana nilai 0 mengindikasikan adanya kesetaraan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan ekstrem. Pada tahun 2020, koefisien Gini Kabupaten Sikka tercatat sebesar 0,384, yang hampir setara dengan rata-rata nasional sebesar 0,385. Namun, hingga tahun 2024, angka ketimpangan di Sikka terus menurun secara konsisten hingga mencapai 0,299, yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Sikka kini lebih rendah daripada rata-rata provinsi (0,316) maupun nasional (0,381). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.25
Indeks Gini Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024

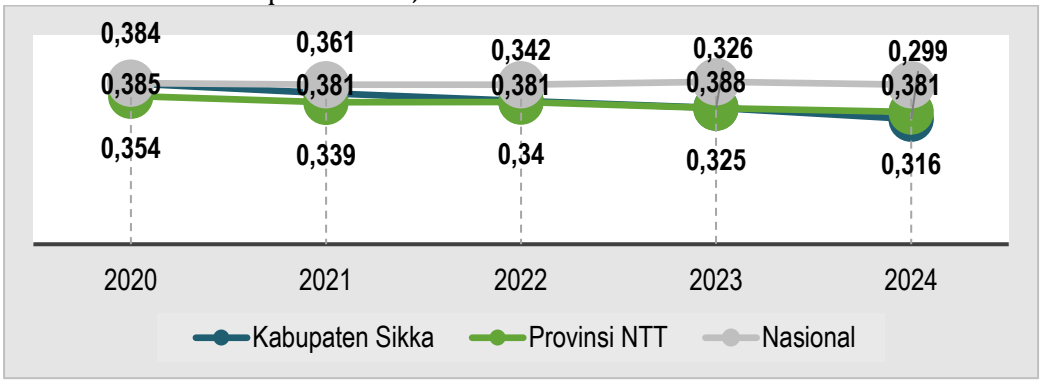

Sumber: BPS, 2025

Pemerataan pendapatan di Kabupaten Sikka Semakin membaik dan lebih baik dari angka nasional maupun provinsi. Penurunan koefisien Gini di Sikka mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mulai lebih merata di antara kelompok masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan akses terhadap sumber penghidupan, pemerataan bantuan sosial atau subsidi, atau peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dalam skala luas seperti pertanian, perdagangan kecil, dan jasa informal.

Sebaliknya, angka nasional relatif stabil di sekitar 0,38 selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa secara umum ketimpangan pendapatan belum menunjukkan perubahan berarti di tingkat nasional. Namun demikian, meskipun ketimpangan menurun, angka 0,299 di Kabupaten Sikka belum berarti bahwa distribusi pendapatan sudah ideal. Angka ini masih mengindikasikan adanya kesenjangan, meskipun tidak ekstrim. Untuk itu, penguatan ekonomi lokal yang inklusif tetap diperlukan, khususnya melalui pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja, serta perluasan lapangan kerja yang berkualitas.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam kerangka kualitas hidup manusia, untuk mencapai kualitas hidup manusia yang baik memerlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas-sektor, serta kapasitas untuk melaksanakannya. Kualitas hidup manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Tabel 2.70
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Kabupaten Sikka	67,77	68,08	68,66	69,41	69,96	68,78
Provinsi Nusa Tenggara Timur	65,19	65,28	65,9	66,68	69,14	66,44
Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02	73,31

Sumber: BPS, 2025

IPM Kabupaten Sikka pada tahun 2024 sebesar 69,96 dengan kenaikan sebesar 0,55 poin dari capaian tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Sikka terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 68,78 persen. Kenaikan yang berkelanjutan ini mengindikasikan bahwa upaya pembangunan di Kabupaten Sikka telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya secara bertahap. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sikka dalam rentang waktu lima tahun (2020-2024) lebih tinggi dari IPM Provinsi NTT, namun masih berada di bawah IPM nasional. Hal ini mengindikasikan adanya pekerjaan rumah untuk mengejar ketertinggalan dalam kualitas pembangunan manusia di tingkat nasional.

2. Kesehatan untuk Semua

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi angka kematian maka semakin tinggi UHH. UHH digunakan sebagai indikator derajat kesehatan penduduk dan kemampuan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan, terpenuhinya kecukupan gizi dan kalori penduduk, dan kesehatan lingkungan yang baik. UHH diketahui melalui jumlah umur semua orang yang meninggal di Kabupaten Sikka dijumlah kemudian dibagi jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut.

Faktor dominan yang memengaruhi Angka Harapan Hidup adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal-hal yang memengaruhi kelangsungan hidup lebih lama meliputi pola makan, penyakit bawaan dari lahir/penyakit degeneratif, lingkungan tempat tinggal, dan stres atau tekanan. Disisi lain, faktor-faktor kesehatan yang memengaruhi dan berhubungan dengan Angka Harapan Hidup, termasuk kebiasaan merokok, status gizi, menopause, dan osteoporosis.

Gambar 2.26

Usia Harapan Hidup Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

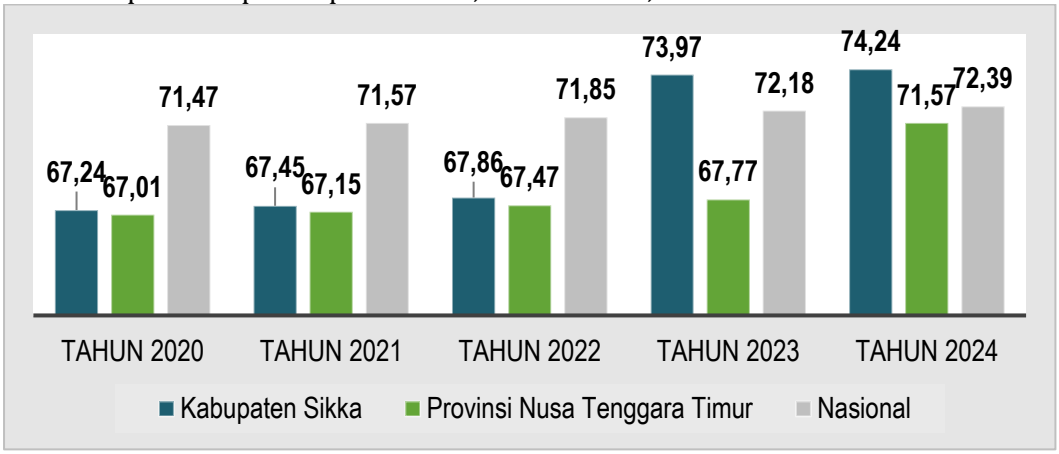

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Dari perbandingan tren data UHH di Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional pada grafik diatas, maka Angka Kematian Bayi yang berusia 0 tahun turut memengaruhi capaian UHH di Kabupaten Sikka secara signifikan. Gambaran Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Sikka pada tahun 2020 mencapai 67,24 tahun, dan pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sikka mencapai 67,45 tahun atau mengalami kenaikan sebesar 0,03 tahun dibandingkan tahun 2020. Tahun 2022 meningkat menjadi 67,86 tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 73,97 tahun. Usia Harapan Hidup Kabupaten Sikka tahun 2024 adalah 74,24 tahun.

b. Indeks Keluarga Sehat

Upaya peningkatan kualitas kesehatan keluarga merupakan pilar fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkelanjutan di Kabupaten Sikka. Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesehatan masyarakat. Dalam perencanaan sebelumnya, Indeks Keluarga Sehat (IKS) sering digunakan sebagai tolok ukur. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek gizi, kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Sesuai informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (2025), Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Sikka menunjukkan fluktuasi dalam periode 2020-2023. Pada tahun 2020, IKS Kabupaten Sikka tercatat sebesar 0,22 dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,12. Pada tahun 2022, IKS menunjukkan perbaikan dengan peningkatan menjadi 0,18 dan berlanjut di tahun 2023 yang meningkat mencapai 0,22.

Seiring dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pengukuran yang lebih spesifik dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, pendekatan pengukuran telah mengalami penyesuaian. Saat ini, Indeks Keluarga Sehat (IKS) tidak lagi digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kualitas kesehatan keluarga. Sebagai gantinya, Pemerintah Kabupaten Sikka akan menggunakan indikator proksi yang diselaraskan dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Pemerintah Daerah. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran yang lebih relevan dan terhubung langsung dengan target kinerja daerah serta intervensi kesehatan yang lebih spesifik. Dari 11 Indikator Kinerja RIBK yang diselaraskan dengan RPJMD (Kepala Daerah), terdapat 7 indikator utama yang akan menjadi fokus untuk merefleksikan dan mengukur peningkatan kualitas kesehatan keluarga secara komprehensif, yaitu Angka Kematian Ibu (AKI); Angka Kematian Balita; Prevalensi Stunting; Cakupan Kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional); Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Tuberkulosis); Persentase Hipertensi dalam Pengendalian; Cakupan Penduduk Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Ketujuh indikator ini secara kolektif memberikan gambaran yang holistik tentang berbagai aspek kualitas kesehatan keluarga, mulai dari kesehatan ibu dan anak, status gizi, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, hingga akses terhadap layanan kesehatan.

c. Prevalensi Stunting

Indikator yang perlu mendapat perhatian adalah stunting (kerdil), yaitu kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan umur bersangkutan. Prevalensi balita stunting merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur kualitas kesehatan dan gizi anak di bawah lima tahun, yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.27
Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

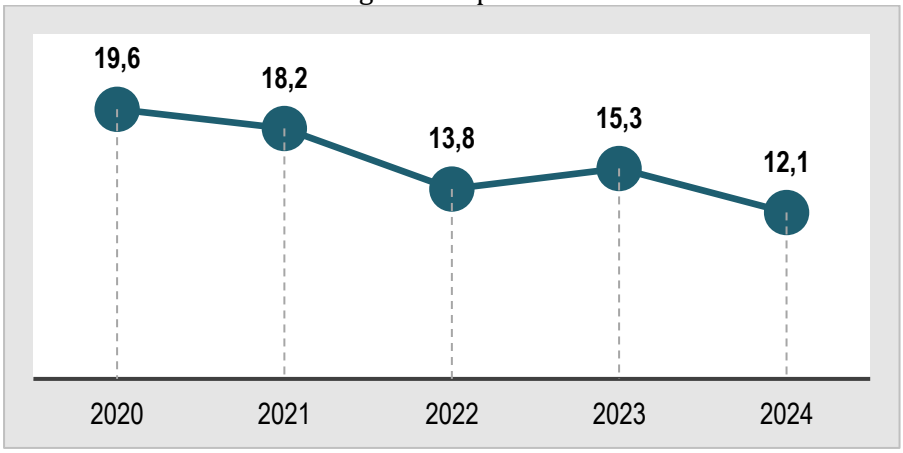

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka 2025

Berdasarkan data yang tersedia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, prevalensi balita stunting di Kabupaten Sikka menunjukkan tren yang fluktuatif namun dengan penurunan yang signifikan secara keseluruhan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sebesar 19,6 persen, kemudian angka ini sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 18,2 persen, dan mengalami penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2022 di mana prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 13,8 persen. Namun pada tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan kembali menjadi 15,3 persen, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 12,1 persen. Tren penurunan prevalensi balita stunting dari 19,6 persen di tahun 2020 menjadi 12,1 persen di tahun 2024 adalah capaian yang sangat positif bagi Kabupaten Sikka. Penurunan ini menunjukkan efektivitas program dan intervensi yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan gizi dan kesehatan ibu serta anak.

d. SPM Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan tolak ukur penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi hak dasar masyarakat akan pelayanan kesehatan. SPM merujuk pada standar minimum yang harus dipenuhi dalam penyediaan layanan kesehatan esensial. Standar ini sangat penting untuk memastikan tingkat kualitas dasar dan akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Capaian SPM yang tinggi mengindikasikan komitmen dan efektivitas pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang esensial. Evaluasi terhadap capaian SPM menjadi krusial untuk mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan kesehatan di masa depan.

Tabel 2.71
Data Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM	Capaian SPM (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	76	90	69	71
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	96	88	89	84	79
3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84	90	82	87	82
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita	96	64	91	85	78
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	90	85	86	90	98
6	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	93	20	38	29	48
7	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	93	113	93	122	105
8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	90	32	82	9	19

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM	Capaian SPM (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	76	78	85	38	34
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	92	90	89	88	52
11	Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	92	172	82	109	107
12	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human *immunodeficiency* virus	81	73	48	101	98

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan Data Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Sikka dari tahun 2020 hingga 2024, dapat diamati berbagai dinamika pada 12 jenis pelayanan dasar. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Sempat mencapai 100 persen pada tahun 2020, kemudian menurun drastis menjadi 76 persen (2021) dan 69 persen (2023), lalu sedikit membaik menjadi 71 persen pada tahun 2024. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mengalami penurunan secara bertahap dari 96 persen (2020) menjadi 79 persen (2024). Hal ini menjadi perhatian serius karena merupakan indikator vital kesehatan ibu dan bayi. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengalami fluktuatif dengan kecenderungan stabil di kisaran 82-90 persen. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita mengalami penurunan signifikan dari 96 persen (2020) menjadi 64 persen (2021), meskipun sempat membaik di 2022 yaitu 91 persen, namun kembali menurun menjadi 78 persen pada tahun 2024. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar menunjukkan tren positif dan paling konsisten peningkatannya, dari 90 persen (2020) menjadi 98 persen (2024).

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif merupakan angka yang paling rendah dan fluktuatif, dengan capaian terendah 20 persen (2021) dan tertinggi 48 persen (2024). Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut menunjukkan capaian yang cukup baik, bahkan seringkali di atas 100 persen, dimana 113 persen di tahun 2021, 122 persen di tahun 2023 dan 105 persen tahun 2024 yang menandakan target sudah tercapai atau adanya kelebihan target dalam pendataan. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi menunjukkan fluktuasi ekstrem dengan penurunan drastis dari 90 persen (2020) menjadi 9 persen (2023) dan 19 persen (2024). Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus juga mengalami penurunan drastis dari 76 persen (2020) menjadi 34 persen (2024), dengan penurunan tajam di tahun 2023 yaitu 38 persen. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat mengalami penurunan dari 92 persen (2020) menjadi 52 persen (2024). Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB) merupakan capaian sangat baik dan konsisten di atas 80 persen, bahkan sempat 172 persen (2021) dan 107 persen (2024), ini menunjukkan deteksi kasus yang proaktif. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV menunjukkan fluktuasi, sempat menurun ke 48 persen (2022) namun meningkat kembali menjadi 98 persen (2024).

e. Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keluarga sehat dan masyarakat yang berkualitas. PHBS mencakup berbagai indikator seperti penggunaan air bersih, cuci tangan pakai sabun, jamban sehat, pemberantasan jentik nyamuk, hingga tidak merokok di dalam rumah. Pengukuran PHBS memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran dan praktik kesehatan masyarakat, yang sangat penting untuk perumusan strategi kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka.

Berdasarkan informasi yang tersedia (Dinas Kesehatan, 2025), data survei PHBS di rumah tangga Kabupaten Sikka memiliki keterbatasan pada beberapa tahun awal. Pada tahun 2020 dan 2021, survei PHBS di rumah tangga tidak dilakukan. Kondisi ini menyebabkan tidak

adanya data baseline untuk kedua tahun tersebut. Survei PHBS mulai tersedia pada tahun 2022 dengan menunjukkan angka 58,96 persen rumah tangga yang menerapkan PHBS. Namun pada tahun 2023, persentase rumah tangga dengan PHBS mengalami penurunan menjadi 55,4 persen. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, dimana persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS hanya mencapai 38,9 persen. Penurunan drastis dari 58,96 persen di tahun 2022 menjadi 38,9 persen di tahun 2024 mengindikasikan adanya kemunduran dalam praktik hidup bersih dan sehat di tingkat rumah tangga Kabupaten Sikka.

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Aspek pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercermin dari komponen pendidikan yang di bangun pada suatu daerah. Komponen pertama pada sektor pendidikan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan yang dijalani. Indikator kedua pada aspek pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merupakan ukuran lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada aspek ini juga akan memperhitungkan Angka Literasi/Numerasi yang berkaitan dengan kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dan Indeks Literasi Digital.

a. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan yang dijalani. Capaian RLS Kabupaten Sikka tahun 2020 adalah 7,76 tahun. Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan namun tidak signifikan dengan masing-masing capaian sebesar 8,24 tahun dan 8,67 tahun. Tren peningkatan terus terjadi pada tahun 2023 dan 2024, RLS Kabupaten Sikka mencapai 9,18 tahun dan 9,22 tahun. Capaian RLS pada tahun 2024 ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif di Kabupaten Sikka rata-rata hanya berpendidikan setara SMP. Adanya peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak cukup signifikan, menggambarkan bahwa telah ada pembenahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.28
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

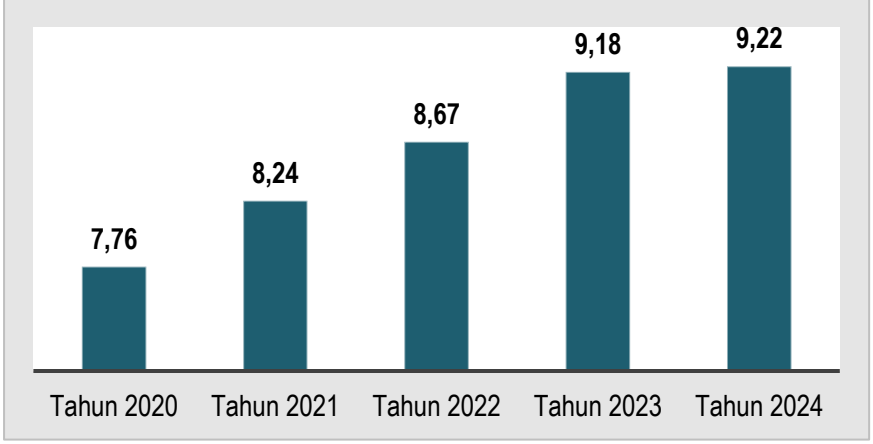

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2025

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan ukuran lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mendapatkan segala jenis pendidikan pada waktu tertentu. Di Kabupaten Sikka, HLS pada tahun 2020 adalah 13,98 tahun, terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 16,01 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak yang berusia 7 tahun pada tahun 2024 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 16,01 tahun (atau setingkat S1/D4). Data Harapan Lama Sekolah (HLS) selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan.

Gambar 2.29
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

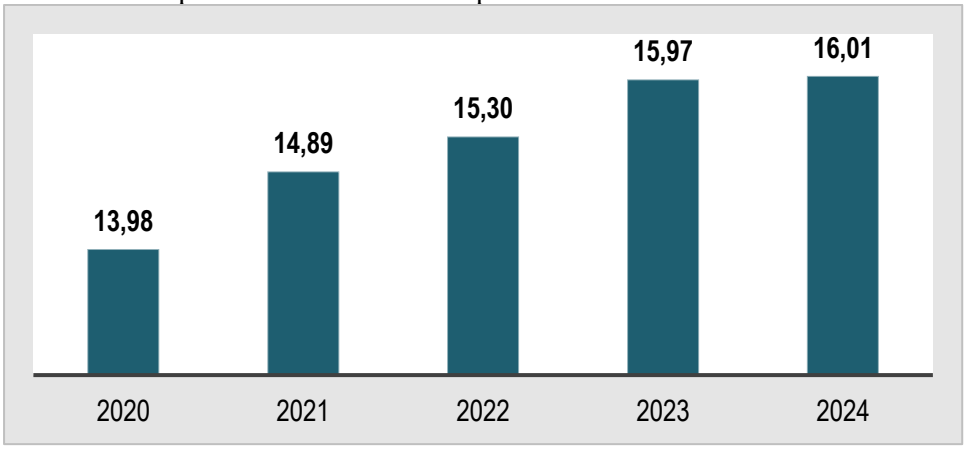

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2025

c. Angka Literasi/Numerasi

Kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan Kemampuan numerasi merupakan kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2025).

Numerasi dan literasi berkaitan dengan kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Berdasarkan informasi yang tersedia (Dinas PKO, 2025), pengukuran komprehensif terhadap angka literasi/numerasi di seluruh Kabupaten Sikka belum dilakukan secara menyeluruh. Data yang ada saat ini berasal dari beberapa jenjang pendidikan dan tahun tertentu, memberikan gambaran awal namun belum mencakup keseluruhan populasi atau tingkatan. Pada tahun 2023, capaian literasi SD Kabupaten Sikka adalah 45,96 dan kemudian terjadi peningkatan yang cukup baik pada tahun 2024 menjadi 51,64. Literasi SMP Kabupaten Sikka pada tahun 2023 adalah 52 dan menunjukkan peningkatan menjadi 55,56 tahun 2024. Untuk Numerasi SD Kabupaten Sikka pada tahun 2023 adalah 30,46 dan terlihat peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 41,43. Sedangkan, Numerasi SMP Kabupaten Sikka pada tahun 2023 adalah 30,89 dan terjadi lonjakan yang substansial menjadi 49,35 pada tahun 2024.

Meskipun data yang tersedia masih terbatas pada tahun 2023 dan 2024 serta belum mencakup seluruh populasi, tren yang terlihat sangat positif. Terjadi peningkatan yang konsisten dan cukup signifikan pada semua indikator literasi dan numerasi baik di jenjang SD maupun SMP. Peningkatan terutama pada numerasi menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas pembelajaran matematika dan logika di sekolah.

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. Hal inilah yang membedakannya dengan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang lebih memfokuskan pada sisi hilir yakni pengembangan budaya baca, kegemaran membaca, dan literasi masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilahirkan sebagai upaya formulasi kebijakan, serta pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia di mana ada kebutuhan akan ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan pada aspek-aspek yang berdasar pada Standar Nasional Perpustakaan. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) bertujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah menjadi suatu metode pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan di wilayahnya sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Sebelum tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sikka belum pernah melakukan pengukuran terhadap Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Pada tahun 2023, Kabupaten Sikka telah memulai upaya pengukuran IPLM melalui kerja sama dengan Universitas Nusa Nipa. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sikka berada pada kategori sangat rendah, dengan besaran skor 11,37. Namun pada tahun 2024, terdapat data yang menunjukkan peningkatan angka IPLM Kabupaten Sikka menjadi 48,66. Hal ini menandakan adanya upaya masif serta keberhasilan signifikan dalam mendorong literasi masyarakat di Kabupaten Sikka.

e. Indeks Literasi Digital

Pengukuran indeks literasi digital diperlukan agar bisa mengukur kemampuan literasi digital di Indonesia dari berbagai sudut pandang, guna meningkatkan kebijakan berbasis bukti dan pengaruhnya terhadap penyediaan program-program yang tepat untuk peningkatan literasi digital penduduk Indonesia. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2022 mengacu pada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024, dengan empat pilar pengukuran literasi digital yaitu *Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture*. Berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2021, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebesar 3.62. Angka ini memberikan gambaran umum tingkat literasi digital di tingkat provinsi. Namun, perlu digaris bawahi bahwa untuk Kabupaten Sikka sendiri, sampai saat ini belum dilakukan pengukuran Indeks Literasi Digital secara spesifik.

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pelayanan urusan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sikka menyasar kepada masyarakat yang masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS sendiri merupakan seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan oleh karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut bisa berupa kemiskinan, keterlantaran, kejahatan, ketunaan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Tabel 2.72
Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial	39,79	27,11	53,77	53,77	62,81
2.	Persentase PMKS yang tertangani	1,349	11,808	1,8	1,8	4,53
3.	Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	0	0	0	0
4	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2025

Dalam rangka mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Sasaran (PMKS), pemerintah daerah berupaya memberikan bantuan dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, namun dengan tren peningkatan yang positif di tahun-tahun terakhir. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2022 menjadi 53,77 persen dari angka sebelumnya yaitu 27,11 persen tahun 2021. Capaian tertinggi terlihat pada tahun 2024, di mana persentase ini mencapai 62,81 persen. Sedangkan persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2020 sebanyak 1,349 persen, kemudian meningkat signifikan tahun 2021 menjadi 11,808 persen. Angka ini menurun drastis menjadi 1,8 persen pada tahun 2022 dan bertahan di angka 1,8 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, persentase ini kembali meningkat menjadi 4,53 persen. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah PMKS di Kabupaten Sikka. Namun, pemerintah daerah belum melaksanakan indikator persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, serta persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial, karena belum ada pembangunan panti sosial yang dilakukan.

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan kerukunan umat beragama. Pada indeks ini ada tiga dimensi yang diukur yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Indikator toleransi mempresentasikan dimensi untuk saling menerima dan menghargai perbedaan dimensi ini menunjukkan sifat menenggang, yaitu saling menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan serta kepercayaan yang berbeda dengan pendirian sendiri. Kesetaraan merupakan keinginan untuk saling melindungi, memberikan hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Konsep ini juga dimaknai sebagai pandangan dan sikap hidup, yang menganggap semua orang adalah sama dalam hak dan kewajiban, termasuk dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan dalam dimensi kerja sama, menunjukkan keterlibatan aktif

bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, budaya, ekonomi dan keagamaan. Dimensi ini menggambarkan tindakan saling membahu dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerja sama. Angka indeks kerukunan umat beragama di Kab. Sika masih rendah dengan nilai sebesar 73,09 pada tahun 2022. Namun demikian, kondisi ini sudah semakin berkembang. Saat ini sudah terdapat forum kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Sikka, membantu dalam meningkatkan kehidupan harmonis atas umat beragama. Sayangnya,pada tahun 2023 dan 2024, belum terdapat perhitungan baru yang dilakukan oleh Kabupaten Sikka terkait dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama, ke depannya dapat dilakukan perhitungan ini untuk melihat bagaimana peningkatan kerukunan umat beragama terjadi, terutama dengan adanya upaya-upaya yang sudah dilakukan.

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan daerah. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2023 sebesar 50,70 sedangkan untuk Kabupaten Sikka tidak dilakukan perhitungan terhadap Indeks Pembangunan Kebudayaan.

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Secara garis besar, Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator penting yang mengukur sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi dalam suatu wilayah. Indeks ini disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.

Berdasarkan informasi yang tersedia (Dinas P2KBP3A, 2025), IPA untuk Provinsi NTT pada tahun 2022 tercatat sebesar 50,87. Angka ini memberikan gambaran umum tentang tingkat perlindungan anak di skala provinsi. Sedangkan Kabupaten Sikka sendiri belum melakukan perhitungan terhadap indeks ini. Meskipun demikian, terdapat data IPA Kabupaten Sikka untuk tahun 2024 yang menunjukkan angka 67,01. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka telah mencapai tingkat perlindungan anak yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi NTT di tahun 2022 (50,87). Angka tersebut akan menjadi baseline bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan aman dan mendukung tumbuh kembang optimal bagi anak-anak.

b. Indeks Ketahanan Keluarga

Berdasarkan informasi yang tersedia, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga tidak tersedia karena indeks tersebut berada pada tingkat provinsi. Kemudian, disusun Indeks kualitas keluarga yang menjadi proksi tahun-tahun sebelumnya. Indeks kualitas keluarga adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya. Nilai IKK Provinsi NTT pada tahun 2022 sebesar 71,73 dan menunjukkan kategori cukup responsif gender dan hak anak,

sedangkan Kabupaten Sikka belum melakukan pengukuran terhadap indeks ini. Tetapi indeks ini tidak dapat digunakan lagi (tidak berlanjut), sehingga menyulitkan analisis tren jangka panjang.

Untuk mengukur atau mengetahui ketahanan suatu keluarga di Kabupaten Sikka, disusun indikator proksi yaitu Indeks Ketahanan Keluarga. Ketahanan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Keluarga yang tangguh mampu menghadapi berbagai tantangan, memenuhi kebutuhan anggotanya, serta berperan aktif dalam pembangunan. Dari data yang berhasil dihimpun, Indeks Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sikka menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, Indeks Ketahanan Keluarga tercatat sebesar 48,53 dan sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 49,09. Terjadi peningkatan yang lebih signifikan pada tahun 2023 menjadi 55,49 dan Indeks Ketahanan Keluarga mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 yaitu 62,95. Peningkatan dari angka 48,53 menjadi 62,95 dalam kurun waktu tiga tahun mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penguatan keluarga mulai membuahkan hasil. Capaian di tahun 2024 sebesar 62,95 merupakan modal yang baik untuk pembangunan keluarga di masa mendatang.

c. Indeks Ketimpangan Gender

Salah satu prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan Kabupaten Sikka adalah memastikan tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di segala bidang. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan global yang mengakui peran krusial perempuan dalam memajukan masyarakat. Untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi tantangan dalam upaya ini, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menjadi indikator kunci yang perlu diperhatikan secara serius dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka.

Berdasarkan data yang tersedia dari Dinas P2KBP3A (2025), data IKG untuk tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia atau belum diukur dengan indikator yang memadai. Namun demikian, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Sikka mulai dilakukan perhitungan pada tahun 2024 dengan hasil capaian sebesar 0,27. Angka ini merepresentasikan tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Sikka pada tahun tersebut, di mana nilai IKG mendekati 0 menunjukkan kesetaraan yang lebih baik, sementara nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Ketimpangan ini dapat terjadi dalam berbagai dimensi, seperti partisipasi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan reproduksi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan publik.

d. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang komprehensif untuk melihat capaian pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Pemuda mencakup pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP menjadi indikator krusial dalam merumuskan kebijakan dan program yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda, yang merupakan aset penting bagi masa depan daerah.

Kabupaten Sikka belum melakukan pengukuran terhadap Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara spesifik. Nilai IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dirilis terakhir pada tahun 2020 adalah sebesar 52,17. Ini memberikan gambaran umum tingkat pembangunan pemuda di skala provinsi. Meskipun demikian, hasil konfirmasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (2025) terdapat data IPP Kabupaten Sikka untuk tahun 2024 yang menunjukkan angka 57,00. Angka ini menunjukkan capaian yang lebih

tinggi dibandingkan IPP Provinsi NTT di tahun 2020 (52,17), mengindikasikan potensi yang baik. Angka tersebut akan menjadi data baseline untuk merumuskan kebijakan kepemudaan yang tepat sasaran dan terukur.

e. Indikator Pembangunan Gender (IPG)

Indikator Pembangunan Gender atau IPG merupakan perbandingan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki (Kemen-PPPA, 2020). Dengan demikian, saat ini masih ditemukan adanya kesenjangan antara pembangunan laki-laki dan perempuan yang ada di Kabupaten Sikka. Hal ini terlihat dari indeks pembangunan gender Kabupaten Sikka tahun 2020-2024 yang fluktuatif (Gambar 2.30).

Gambar 2.30

IPG Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024

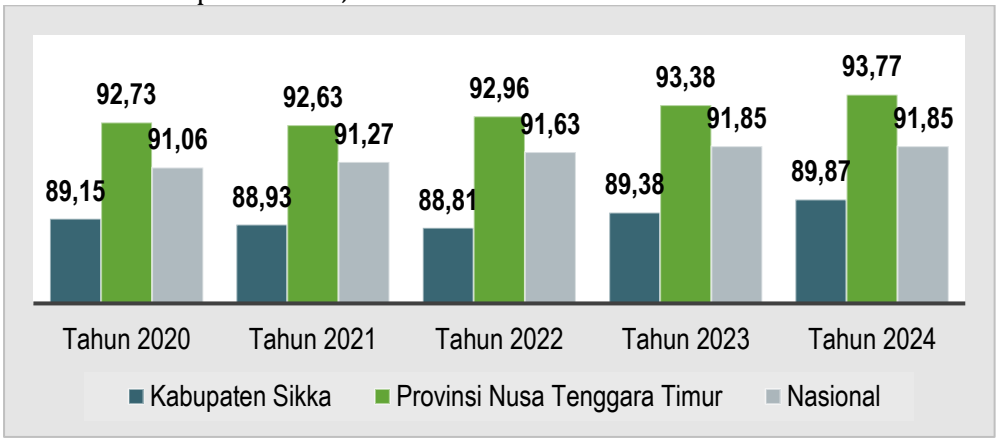

Sumber: BPS, 2025

Pada tahun tahun 2020 IPG Kabupaten Sikka mencapai 89,15 dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 88,93. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2022 menjadi 88,81 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 89,38. Pada tahun 2024, IPG Kabupaten Sikka kembali menunjukkan peningkatan menjadi 89,87. IPG Kabupaten Sikka yang cenderung stagnan di kisaran 88-89, dan berada di bawah rata-rata Provinsi NTT maupun Nasional, menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam mencapai kesetaraan gender di berbagai dimensi pembangunan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Angka Ketergantungan

Pengelompokan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk berstruktur umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk berusia muda apabila penduduk usia di bawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih dari jumlah seluruh penduduk. Sebaliknya, penduduk disebut penduduk berusia tua apabila jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas di atas 10 persen dari total penduduk. Suatu wilayah yang mempunyai karakteristik penduduk muda akan mempunyai beban besar dalam investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak di bawah 15 tahun ini. Dalam hal ini pemerintah harus membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar mulai dari perawatan ibu hamil dan kelahiran bayi, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, sarana tumbuh kembang anak termasuk penyediaan imunisasi, penyediaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar termasuk guru-guru dan

sarana sekolah yang lain. Sebaliknya, suatu wilayah dengan ciri penduduk tua akan mengalami beban yang cukup besar dalam pembayaran pensiun, perawatan kesehatan fisik dan kejiwaan lanjut usia (lansia), pengaturan tempat tinggal dan lain-lain. Penduduk Indonesia termasuk Kabupaten Sikka belum dianggap penduduk tua karena persentase penduduk usia di atas 65 tahun masih kecil, namun karena jumlah penduduk yang besar, maka jumlah orang tua juga cukup besar untuk memperoleh perhatian dari pemerintah.

Struktur Umur dan Umur Median Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73
Struktur Umur dan Umur Median Penduduk
Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Tahun	0-14	Struktur Umur (%) 15-64	65+
2020	30,19	63,23	6,57
2021	30,00	62,63	7,37
2022	29,70	61,63	8,67
2023	29,69	66,18	8,31
2024	29,65	66,74	8,71

Sumber: Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Dilihat dari komposisi umur, persentase penduduk berumur kurang dari 15 tahun (0-14 tahun) di Kabupaten Sikka cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, dari 30,19 persen pada tahun 2020 menjadi 29,65 persen pada tahun 2024. Sementara itu, penduduk usia 65 ke atas cenderung meningkat dari 6,57 persen di tahun 2020, terus meningkat hingga 8,71 persen di tahun 2024. Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sikka dapat dikategorikan mengarah pada penduduk muda. Penduduk yang tergolong usia produktif (15-64 tahun) mengalami fluktuatif cenderung meningkat. Dari 63,23 persen pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 62,63 persen dan menjadi 61,63 persen pada tahun 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 66,18 persen dan 66,74 persen. Jumlah proporsi penduduk usia produktif tersebut akan berdampak pada kesempatan kerja. Tentu kesemuanya ini berkaitan dengan program bagaimana menyiapkan calon pekerja agar mempunyai kualitas tinggi, dengan keterampilan yang memadai.

Perubahan komposisi penduduk menurut umur di atas memberi dampak pada angka beban ketergantungan yang menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif (65 tahun ke atas dan kurang dari 15 tahun) untuk suatu periode waktu tertentu. Menurut konsep, penduduk muda di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografis.

Angka beban ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	1,75	1,70	1,71	1,84	1,85
Provinsi NTT	1,28	1,18	1,21	1,31	1,4
Nasional	19,87	19,24	18,34	18,67	18,98

Sumber: Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Selama periode 2020-2021, angka beban ketergantungan di Kabupaten Sikka mengalami penurunan, namun di tahun 2022 mengalami peningkatan dan kembali turun di tahun 2023 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, angka beban ketergantungan di Kabupaten Sikka sebesar 58,30 dan menurun di tahun 2021 menjadi 51,19. Terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 59,12 dan menurun lagi di tahun 2023 dan 2024 menjadi 55,90 dan 49,83. Berdasarkan data tersebut maka tampak bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif di Kabupaten Sikka masih didominasi oleh penduduk muda.

b. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang Pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks Pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (*literacy rate*) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama Sekolah (*means-years of schooling*) menunjukkan jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah. Indeks pendidikan Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.31
Indeks Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2020 -2024

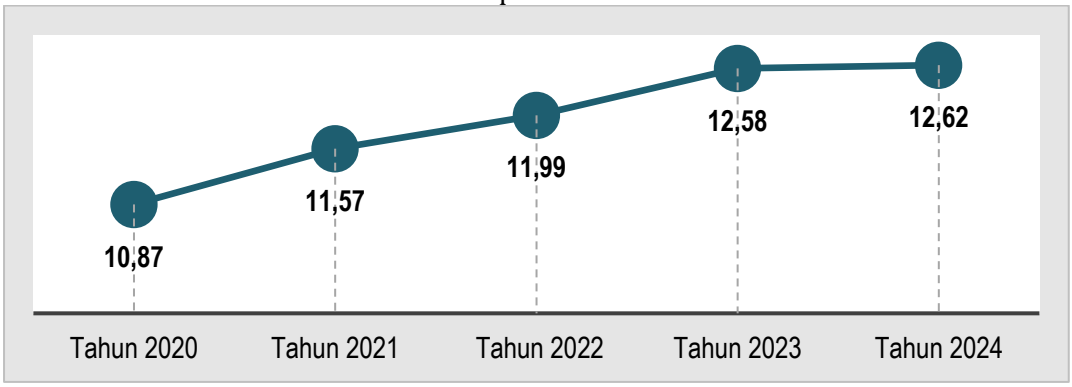

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2024

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Pendidikan di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan nilai ini didukung oleh meningkatnya kemampuan baca tulis orang dewasa dan rata-rata tahun bersekolah. Pada Tahun 2020, Indeks Pendidikan di Kabupaten Sikka adalah sebesar 10,87. Pencapaian indikator ini terus mengalami kenaikan sebesar 6,39 persen di tahun 2021 atau menjadi 11,57. Pada tahun 2022 meningkat kembali sebesar 3,63 persen atau menjadi 11,99. Tren positif terus terjadi di tahun 2023 dan 2024 dengan peningkatan menjadi 12,58 dan 12,62.

2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merujuk pada proporsi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berasal dari sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian suatu wilayah. Rasio sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Sikka dan Provinsi NTT masih sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2024, rasio PDRB sektor industri pengolahan di Sikka hanya sebesar 0,0185, sedikit lebih tinggi dibandingkan NTT (0,0140), tetapi masih sangat jauh dari kontribusi nasional yang mencapai 0,1898. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sikka, NTT, dan Nasional 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Rasio PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	0,0175	0,0170	0,0171	0,0183	0,0185
Provinsi NTT	0,0128	0,0118	0,0121	0,0131	0,0140
Nasional	0,1987	0,1924	0,1834	0,1867	0,1898

Sumber: BPS, 2025

Sepanjang periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Sikka mencatat pertumbuhan yang perlahan namun positif dalam sektor industri pengolahan. Rasio meningkat dari 0,0175 pada 2020 menjadi 0,0185 pada 2024, mencerminkan sedikit geliat industrialisasi atau aktivitas hilirisasi di sektor lokal. Kenaikan ini kemungkinan berasal dari peningkatan skala usaha kecil dan menengah, usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta kebijakan pemerintah daerah yang mulai mendorong nilai tambah dari komoditas lokal.

Namun demikian, peran industri pengolahan di Sikka dan NTT secara umum masih sangat terbatas, baik dari segi kontribusi ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Kesenjangan besar dengan rata-rata nasional mengindikasikan bahwa daerah ini belum memiliki struktur ekonomi berbasis manufaktur yang kuat. Di tingkat nasional, sektor industri pengolahan merupakan tulang punggung ekonomi dengan kontribusi hampir 20 persen terhadap PDB menandakan adanya kapasitas produksi, teknologi, investasi, dan pasar yang jauh lebih matang.

b. Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum dalam penyusunan RPJMD adalah proporsi kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar sektor ini memberikan sumbangan dalam pembentukan ekonomi daerah. Fungsi dari rasio ini dalam penyusunan RPJMD, terutama RPJMD pada tingkat daerah, adalah sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi yang penting, khususnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan jasa. Dengan mengetahui besaran kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum terhadap PDRB, dapat diketahui tingkat dinamika dan potensi ekonomi daerah di bidang pariwisata dan jasa yang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Rasio ini juga membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan, terutama dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Sikka, NTT, Nasional tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0061
Provinsi NTT	0,0056	0,0055	0,0062	0,0066	0,0071
Nasional	0,0255	0,0243	0,0241	0,0252	0,0264

Sumber: BPS, 2025

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum di Kabupaten Sikka menunjukkan kontribusi PDRB yang stagnan selama lima tahun terakhir, yaitu pada kisaran 0,0061–0,0062. Rasio ini relatif kecil dan menunjukkan bahwa sektor ini belum menjadi penopang utama dalam struktur ekonomi Kabupaten Sikka. Tidak adanya peningkatan berarti dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan belum optimalnya potensi pariwisata dan layanan konsumsi lokal, padahal sektor ini memiliki kaitan erat dengan aktivitas ekonomi berbasis pariwisata, mobilitas masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif. Jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terlihat adanya tren kenaikan kontribusi sektor ini dari 0,0056 pada tahun 2020 menjadi 0,0071 pada tahun 2024. Kenaikan ini bisa dikaitkan dengan dorongan pengembangan destinasi wisata unggulan seperti Labuan Bajo dan meningkatnya investasi pada sektor perhotelan dan kuliner di wilayah lain NTT. Hal ini menunjukkan bahwa secara regional, sektor akomodasi dan makanan-minuman semakin mendapatkan tempat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, tingkat nasional menunjukkan dominasi yang jauh lebih tinggi, dengan rasio PDRB sektor ini konsisten berada di atas 0,0240, bahkan meningkat menjadi 0,0264 pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan besarnya kontribusi sektor pariwisata,

perhotelan, restoran, dan layanan konsumsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum.

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa Kabupaten Sikka masih tertinggal dalam memanfaatkan potensi sektor akomodasi dan makan-minum dibandingkan provinsi maupun nasional. Ketertinggalan ini dapat disebabkan oleh minimnya infrastruktur pendukung, promosi pariwisata yang belum optimal, rendahnya investasi swasta di sektor ini, serta keterbatasan daya saing pelaku usaha lokal.

Untuk kedepannya pengembangan sektor ini di Kabupaten Sikka perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat potensinya yang besar dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lokal. Pendekatan berbasis budaya, ekowisata, dan penguatan UMKM kuliner lokal dapat menjadi strategi penting dalam mengangkat kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah.

c. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sikka selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Meskipun secara umum terdapat tren kenaikan dari tahun 2020 hingga 2023, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan.

Gambar 2.32
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

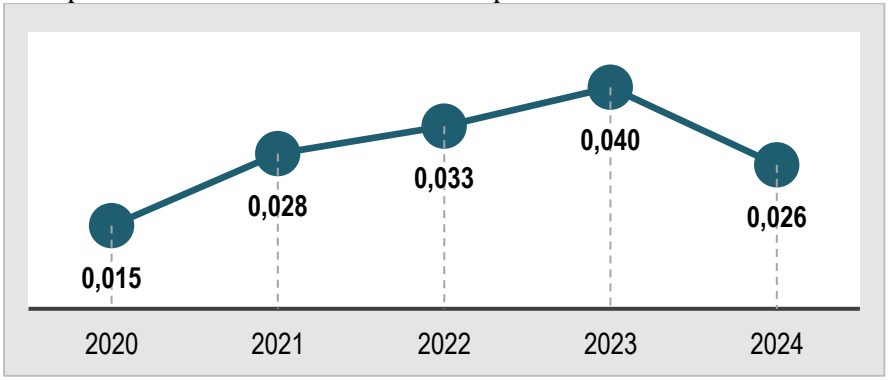

Sumber: BPS, 2025

Pada tahun 2020, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap total PDRB Kabupaten Sikka berada pada level 0,015 persen dari total PDRB. Angka ini mencerminkan posisi awal sektor ekonomi kreatif yang masih sangat kecil dalam struktur ekonomi daerah. Namun demikian, dalam dua tahun berikutnya, yakni tahun 2021 dan 2022, terdapat peningkatan yang cukup menggembirakan, masing-masing menjadi 0,028 persen dan 0,033 persen. Kenaikan ini menunjukkan adanya perkembangan sektor ekonomi kreatif yang relatif pesat, baik dari sisi pelaku usaha, jenis kegiatan, maupun nilai tambah yang dihasilkan.

Puncaknya terjadi pada tahun 2023, ketika proporsi PDRB ekonomi kreatif mencapai 0,040 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif mulai mendapat tempat dalam perekonomian lokal, kemungkinan didorong oleh peningkatan aktivitas digital, pertumbuhan wirausaha muda, dukungan terhadap industri berbasis budaya, serta promosi UMKM kreatif di berbagai sektor seperti kuliner, kriya, fashion, dan pertunjukan.

Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan cukup mencolok menjadi 0,026 persen. Penurunan ini dapat mencerminkan beberapa hal, antara lain turunnya daya saing pelaku ekonomi kreatif, kurangnya intervensi kebijakan yang berkelanjutan, atau persaingan yang semakin tinggi dari sektor lain. Selain itu, bisa jadi ini juga terkait dengan penyesuaian pasca-pandemi, perubahan tren pasar, atau belum optimalnya infrastruktur pendukung ekonomi kreatif seperti akses pasar digital, pelatihan, dan permodalan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan yang menjanjikan hingga tahun 2024, data ini menandakan bahwa sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Sikka masih rentan dan memerlukan penguatan dari berbagai sisi, termasuk dari aspek regulasi, dukungan kelembagaan, serta integrasi dengan sektor pariwisata dan kebudayaan. Perlu strategi yang lebih terarah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 agar potensi ekonomi kreatif tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi benar-benar menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

d. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024. Rasio Kewirausahaan adalah perbandingan antara populasi wirausaha dengan populasi angkatan kerja di suatu negara. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa besar proporsi orang yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dibandingkan dengan total angkatan kerja yang ada. Rasio ini menjadi indikator penting untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam berwirausaha dan menjadi salah satu tolak ukur kemajuan ekonomi suatu negara. Rasio kewirausahaan di Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan tren yang memperlihatkan tantangan serius dalam mempertahankan ekosistem usaha yang stabil. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Sikka, NTT, Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.33

Rasio Kewirausahaan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, Nasional Tahun 2020-2024

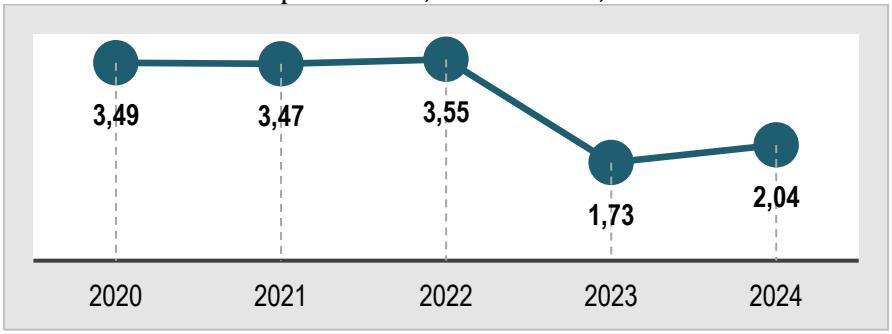

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2020, rasio kewirausahaan tercatat cukup baik di angka 3,49 persen, dan hanya sedikit menurun pada 2021 menjadi 3,47 persen. Peningkatan kembali terlihat pada tahun 2022, saat rasio naik ke 3,58 persen yang merupakan titik tertinggi selama periode lima tahun. Namun demikian, tahun 2023 menjadi titik balik yang mencolok dengan penurunan drastis ke angka 1,73 persen, menunjukkan hampir setengah dari capaian tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit pemulihan ke angka 2,04 persen namun capaian ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tiga tahun pertama.

Penurunan tajam ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi melemahnya minat atau kemampuan masyarakat untuk terjun ke sektor kewirausahaan. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi adalah kondisi ekonomi lokal yang kurang mendukung, lemahnya akses terhadap pembiayaan usaha, minimnya pelatihan kewirausahaan yang berkelanjutan, serta dampak pandemi COVID-19 yang memukul usaha kecil dan mikro. Selain itu, penurunan ini juga bisa mencerminkan terbatasnya dukungan kebijakan atau ekosistem usaha yang tidak kondusif, seperti kurangnya infrastruktur pasar, lemahnya jaringan pemasaran, atau regulasi yang belum berpihak pada pelaku usaha kecil.

Pemulihan di tahun 2024 menunjukkan potensi perbaikan, meskipun peningkatan ini belum cukup signifikan untuk mengembalikan semangat wirausaha ke level awal dekade. Hal ini mengisyaratkan perlunya intervensi yang lebih serius dari pemerintah daerah, lembaga

keuangan, dan pihak swasta untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih suportif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, Kabupaten Sikka memerlukan strategi pembangunan kewirausahaan yang lebih sistemik, melalui peningkatan literasi bisnis, insentif usaha mikro, dan pembentukan inkubator bisnis lokal untuk memastikan pertumbuhan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat di masa depan.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia kerja yang terjun ke pasar kerja (sebagai pekerja atau pencari kerja/pengangguran) terhadap total penduduk usia kerja. Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi angkatan kerja	73,42	73.29	68,4	74,35	73,99
Angka partisipasi angkatan kerja	0,73	0,73	0,71	0,71	0,73
Pencari kerja yang ditempatkan	5	6	320	93	67
Tingkat pengangguran terbuka	4	4,54	4,51	2,62	2,33

Sumber: Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sikka tercatat sebesar 73,42 persen. Angka ini kemudian sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 73,29 persen dan terjadi penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2022, di mana TPAK berada di angka 68,4 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya kelompok penduduk usia kerja yang menjadi tidak aktif dalam mencari pekerjaan atau bekerja, mungkin karena faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Pada tahun 2023, TPAK menunjukkan pemulihan yang kuat dengan melonjak menjadi 74,35 persen dan sedikit menurun namun tetap berada pada angka yang tinggi, yaitu 73,99 persen pada tahun 2024. Kenaikan signifikan di tahun 2023 dan angka yang stabil di tahun 2024 mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Sikka aktif berpartisipasi dalam angkatan kerja. Hal ini di dukung dengan penurunan yang signifikan pada angka pengangguran terbuka, dari 4,51 pada tahun 2022 kemudian menurun signifikan menjadi 2,62 pada tahun 2023 dan 2,33 pada tahun 2024.

f. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kedewasaan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Konsep ini diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019. Indeks ini kemudian melihat bagaimana seluruh proses dan upaya mendorong inovasi

sudah dilakukan oleh daerah, termasuk dampak dari inovasi tersebut. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	46 (Kurang Inovatif)	23,29 (Kurang Inovatif)	43,36 (Inovatif)	41,99 (Inovatif)	34,73 (Kurang inovatif)

Sumber: Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tersebut maka pada indikator Indeks Inovasi Daerah Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Sikka mengalami perkembangan dalam Indeks Inovasi Daerah. Pada tahun 2020, Kabupaten Sikka memulai perjalanan inovasinya dengan mencapai skor 46, yang dikategorikan sebagai "Kurang Inovatif". Meskipun masih memiliki ruang untuk peningkatan, langkah awal ini menunjukkan upaya untuk menggalakkan inovasi di daerah Sikka. Tahun 2021 mengalami penurunan signifikan dalam Indeks Inovasi Daerah, mencapai skor 23,29 dengan kategori "Kurang Inovatif". Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti dampak dari pandemi COVID-19 atau perubahan dalam strategi inovasi. Terakhir pada pada tahun 2023, Kabupaten Sikka mengalami lonjakan signifikan dalam Indeks Inovasi Daerah, mencapai skor 43,36 yang menandakan kategori "Inovatif". Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong inovasi telah memberikan hasil positif dan daerah tersebut berhasil meningkatkan tingkat inovasinya. Meski demikian, dalam dua tahun terakhir 2023 dan 2024 dapat dilihat bahwa nilai indeks ini semakin menurun, bahkan di 2024 tingkatannya masuk menjadi “Kurang inovatif”. Sehingga masih diperlukan upaya untuk mendorong inovasi di Kabupaten Sikka.

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau Indonesia adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perekonomian suatu wilayah berkembang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Indeks ini mencerminkan upaya transisi menuju model ekonomi yang rendah karbon, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Melalui pengukuran aspek-aspek seperti emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, laju deforestasi, dan inovasi teknologi hijau, IEHI bertujuan untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai telah selaras dengan perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Bagian ini seharusnya membahas terkait dengan indeks ekonomi hijau di Kabupaten Sikka, namun, hingga saat ini perhitungan indeks ekonomi hijau masih dilakukan di tingkat provinsi dan belum dihitung pada tingkat kabupaten/kota.

b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks Ekonomi Biru Indonesia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi kelautan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada konservasi ekosistem laut. Indeks ini menggabungkan dimensi produktivitas ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan perlindungan terhadap sumber daya pesisir dan laut. Melalui IEBI, pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya dinilai dari kontribusi ekonominya, tetapi juga dari aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Bagian ini seharusnya membahas terkait dengan indeks ekonomi biru di Kabupaten Sikka, namun, hingga saat ini perhitungan indeks ekonomi biru masih dilakukan di tingkat provinsi dan belum dihitung pada tingkat kabupaten/kota.

c. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Kabupaten Sikka terus mendorong transformasi energi menuju bauran energi primer yang lebih berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan rendah karbon dan penerapan ekonomi hijau dan biru. Dalam konteks ini, pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu strategi utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta memperkuat ketahanan energi daerah secara jangka panjang.

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Sikka saat ini mencerminkan kombinasi antara pembangkit berbasis energi fosil dan EBT. Jenis pembangkit yang beroperasi meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTD masih menjadi tulang punggung utama sistem kelistrikan di berbagai kecamatan, dengan persebaran yang luas, yakni di Kecamatan Alok, Bola, Lela, Magepanda, Mego, Nita, Paga, dan Talibura. Selain itu, PLTD khusus seperti EPJ & WAW dan PLTD Wolomarang juga terdapat di Kecamatan Alok Barat, serta PLTD Pemana di Kecamatan Alok.

Sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi, Kabupaten Sikka telah mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) melalui proyek PLTMG Maumere #01, #02, #03, dan #04 yang seluruhnya berlokasi di Kecamatan Waigete. Keberadaan PLTG ini menunjukkan langkah transisi dari energi fosil berbasis minyak ke gas yang lebih bersih, meskipun masih tergolong dalam kategori energi tidak terbarukan.

Komponen EBT dalam bauran energi primer Kabupaten Sikka ditunjukkan melalui operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa wilayah strategis. PLTS Dambila, PLTS Kojadoi, dan PLTS Parumaan beroperasi di Kecamatan Alok Timur; PLTS IPP Maumere di Kecamatan Waigete; PLTS Palue di Kecamatan Palue; serta PLTS Sukun di Kecamatan Alok. Meskipun dari sisi kapasitas daya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan pembangkit berbasis diesel dan gas, keberadaan PLTS tersebut menunjukkan inisiatif awal yang penting dalam perluasan portofolio energi terbarukan di tingkat daerah.

Secara umum, porsi EBT dalam bauran energi primer Kabupaten Sikka masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Dominasi pembangkit berbasis energi fosil menunjukkan bahwa transisi energi di tingkat daerah masih berada pada tahap awal. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan afirmatif yang mendorong investasi dan peningkatan kapasitas pembangkit EBT, khususnya tenaga surya yang potensial dikembangkan lebih lanjut di wilayah kepulauan dan terpencil.

Integrasi EBT dalam sistem energi daerah tidak hanya akan mendukung tujuan pembangunan rendah emisi, tetapi juga memperkuat aksesibilitas energi yang andal dan terjangkau bagi masyarakat. Peningkatan porsi EBT akan mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan serta mendorong pencapaian target nasional dalam transisi energi sesuai dengan amanat RUEN dan RUED sektor energi daerah.

4. Transformasi Digital

a. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks pembangunan Teknologi dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan TIK terjadi di INdonesia dengan mengacu pada metodologi *International Telecommunication Union* (ITU). Menggunakan skala 0-10, semakin tinggi nilai indeks ini menunjukkan perkembangan TIK yang semakin baik pula di suatu daerah. Indeks ini kemudian disusun menggunakan sub indeks yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK serta keahlian TIK. Perhitungan indeks ini memang sudah dilakukan sejak tahun 2016, namun penghitungannya masih dilakukan di tingkat nasional dan provinsi. Sehingga untuk saat ini belum terdapat data terkait dengan indeks tersebut di Kabupaten Sikka.

5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator penting yang mencerminkan investasi dalam aset tetap fisik, seperti pembangunan infrastruktur, gedung, mesin, dan peralatan. Kenaikan nilai PMTB menunjukkan peningkatan aktivitas investasi dan perluasan kapasitas produksi di suatu wilayah. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	2.218,99	2.382,47	2.547,24	2.772,69	2.865,54
Provinsi NTT	47.586,00	51.731,35	54.077,74	58.950,39	60.690,40
Nasional	4.897.049,7	5.227.853,9	5.697.279,2	6.090.676,7	6.452.530,7

Sumber: BPS, 2025

Di Kabupaten Sikka, PMTB menunjukkan tren pertumbuhan positif dan konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai PMTB tercatat sebesar Rp 2.218,99 miliar, dan meningkat menjadi Rp 2.865,54 miliar pada 2024. Ini mencerminkan adanya investasi pembangunan yang cukup stabil di tingkat kabupaten, meskipun skala pertumbuhannya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Provinsi NTT maupun nasional.

Secara provinsi, NTT juga mencatatkan pertumbuhan PMTB yang searah, dari Rp 47.586 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 60.690,40 miliar pada tahun 2024. Sementara secara nasional, PMTB tumbuh dari Rp 4.897 triliun pada 2020 menjadi Rp 6.452 triliun pada 2024, mencerminkan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dan dorongan terhadap pembangunan infrastruktur serta investasi swasta.

Namun, jika dibandingkan secara proporsional, kontribusi PMTB Kabupaten Sikka terhadap PMTB Provinsi NTT maupun nasional masih sangat kecil. Nilai PMTB Sikka hanya sekitar 4,7 persen dari total PMTB Provinsi NTT pada tahun 2024, dan kurang dari 0,05 persen dari total PMTB nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka masih berada pada tahap awal dalam proses pembangunan investasi berskala besar. Fakta ini mengindikasikan beberapa hal penting:

- Investasi di Sikka masih sangat terbatas pada skala lokal, dengan dominasi pada sektor-sektor primer dan pembangunan infrastruktur dasar.
- Daya tarik investasi di Kabupaten Sikka relatif masih rendah, kemungkinan karena keterbatasan infrastruktur penunjang, akses pasar yang sempit, dan tingkat produktivitas ekonomi lokal yang masih belum optimal.
- Peningkatan PMTB di Sikka lebih disebabkan oleh belanja pemerintah daerah dan pusat, ketimbang investasi swasta langsung, sehingga keberlanjutan dan dampak ekonominya masih perlu diperkuat.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Sikka secara konsisten mencatatkan nilai net ekspor barang dan jasa yang negatif, yang berarti jumlah barang dan jasa yang diimpor lebih besar daripada yang diekspor. Pada tahun 2020, nilai net ekspor Sikka tercatat sebesar -Rp2.460,83 miliar, dan angkanya terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebesar -Rp2.763,38 miliar. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit perbaikan dengan defisit yang menurun menjadi -Rp2.716,35 miliar, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa Sikka masih menjadi wilayah yang sangat bergantung pada pasokan

dari luar daerah, baik untuk kebutuhan konsumsi, bahan baku, maupun barang modal. Net Ekspor barang dan jasa Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80
Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	-2.460,83	-2.520,43	-2.652,07	-2.763,38	-2.716,35
Provinsi NTT	-47.841,51	-48.922,94	-48.307,26	-50.080,64	-51.507,33
Nasional	2.676.513,5	3.635.835,4	4.799.743,0	4.544.889,6	4.911.155,7

Sumber: BPS, 2025

Tren serupa juga tampak pada tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selama lima tahun terakhir, NTT terus mencatat nilai net ekspor yang negatif. Pada tahun 2020, defisit net ekspor tercatat sebesar -Rp47.841,51 miliar, dan terus memburuk hingga mencapai -Rp51.507,33 miliar pada tahun 2024. Ketergantungan provinsi ini terhadap barang dan jasa dari luar wilayah menunjukkan bahwa produktivitas dan daya saing sektor perdagangan antardaerah dan luar negeri masih sangat terbatas, dan belum mampu menghasilkan kelebihan produksi untuk dijual ke pasar yang lebih luas.

Sementara itu, di tingkat nasional, Indonesia justru mengalami surplus perdagangan barang dan jasa yang signifikan. Pada tahun 2020, nilai net ekspor nasional sebesar Rp2.676 triliun, dan terus meningkat hingga mencapai Rp4.911 triliun pada tahun 2024. Kinerja positif ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan hilirisasi industri, peningkatan ekspor komoditas unggulan, serta pertumbuhan sektor jasa ekspor, seperti logistik, pariwisata, dan digital ekonomi.

Kesenjangan antara kinerja net ekspor daerah dan nasional ini menegaskan bahwa Kabupaten Sikka dan Provinsi NTT belum sepenuhnya terintegrasi dalam rantai nilai ekspor nasional. Penguatan struktur ekonomi lokal, peningkatan kapasitas produksi sektor unggulan, serta pembangunan infrastruktur logistik dan industri bernilai tambah menjadi kunci penting untuk mengurangi ketergantungan impor dan mendorong kemampuan daerah dalam menghasilkan surplus perdagangan. Dengan mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi lokal dan memperkuat integrasi pasar, Sikka dapat meningkatkan kemampuan ekspornya dan turut berkontribusi terhadap kinerja perdagangan nasional secara lebih seimbang dan berkelanjutan.

6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar

Penilaian kualitas dan kondisi infrastruktur di Kabupaten Sikka mencerminkan dinamika pembangunan infrastruktur yang berlangsung dalam tiga tahun terakhir. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), yang merepresentasikan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh infrastruktur, tercatat mencapai nilai 71,30 pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang relatif baik terhadap layanan infrastruktur, mengindikasikan adanya respons yang cukup positif terhadap aspek aksesibilitas, kenyamanan, dan keandalan pelayanan infrastruktur publik. Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Tahun 2022 dan
Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID) Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun	Realisasi
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	2022	71,30
Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	2023	56,40
Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	2024	56,79

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2025

Sementara itu, Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID), yang mengukur aspek fisik dan ketersediaan infrastruktur dasar secara obyektif, menunjukkan angka yang lebih rendah. Pada tahun 2023, nilai IKID tercatat 56,40, yang mengalami peningkatan menjadi 56,79 pada tahun 2024. Nilai ini mencerminkan adanya tantangan struktural dalam hal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan, sistem drainase, air bersih, serta fasilitas sanitasi yang belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas maupun kuantitas pelayanan.

Perbedaan yang cukup mencolok antara nilai IKLI dan IKID mengindikasikan adanya kesenjangan antara persepsi layanan yang diterima masyarakat dan kondisi nyata dari infrastruktur itu sendiri. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam merancang strategi pembangunan ke depan, agar tidak hanya memperbaiki persepsi layanan, tetapi juga memastikan peningkatan kualitas fisik infrastruktur dasar secara berkelanjutan. Ke depan, pendekatan yang terintegrasi antara evaluasi teknis dan partisipatif menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berdaya guna dan berkelanjutan.

1) Kondisi Infrastruktur Jalan

Kondisi infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks konektivitas wilayah dan aksesibilitas antar pusat pelayanan dan produksi. Pembangunan dan pemeliharaan jalan yang merata serta berkualitas merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar, khususnya di daerah kepulauan seperti Kabupaten Sikka yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024

Kondisi Jalan	2021	2022	2023	2024
Baik	293,013	375,34	376,15	389,31
Sedang	186,127	161,30	161,30	88,18
Rusak Ringan	132,884	108,55	108,55	67,82
Rusak Berat	232,221	199,06	198,25	336,11
Total Jalan Kabupaten	844,250	844,250	844,250	881,42
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	56,75	63,56	63,66	54,17

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data panjang jalan Kabupaten Sikka tahun 2021 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat peningkatan total panjang jalan dari 844,25 km menjadi 881,42 km pada tahun 2024, namun persentase jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik justru mengalami penurunan signifikan dari 56,75 persen pada 2021 menjadi 54,17 persen pada 2024. Pada tahun 2021, panjang jalan dalam kondisi baik tercatat 293,013 km dan meningkat konsisten hingga 389,31 km pada 2024. Namun demikian, peningkatan jalan rusak berat dari 232,221 km pada 2021 menjadi 336,11 km pada 2024 menjadi indikasi penurunan kualitas infrastruktur secara keseluruhan.

Penurunan signifikan juga terjadi pada panjang jalan kondisi sedang dan rusak ringan, yang menunjukkan adanya pergeseran ke kondisi yang lebih ekstrim, yaitu baik atau rusak berat. Fakta ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kabupaten yang perlu mendapatkan perhatian prioritas dalam perencanaan pembangunan infrastruktur daerah.

2) Kondisi Infrastruktur Jembatan

Kondisi infrastruktur jembatan merupakan komponen penting dalam pengukuran Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar, karena jembatan berperan sebagai elemen penghubung vital dalam sistem transportasi dan distribusi wilayah, terutama di daerah kepulauan seperti Kabupaten Sikka. Keandalan jembatan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Kualitas Jembatan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Kualitas Jembatan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024

Kondisi Jembatan	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	61	66	67	68	56
Jumlah Jembatan	61	66	67	68	56
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data yang dihimpun dari tahun 2020 hingga 2024, seluruh jembatan yang tercatat di Kabupaten Sikka berada dalam kondisi baik, dengan persentase mencapai 100 persen setiap tahunnya. Jumlah jembatan yang tercatat dalam kondisi baik mengalami peningkatan secara bertahap dari 61 unit pada tahun 2020, menjadi 66 unit pada 2021, 67 unit di 2022, dan mencapai 68 unit pada 2023. Namun pada tahun 2024, jumlah jembatan yang tercatat menurun menjadi 56 unit, seiring dengan adanya pemutakhiran data dan dikeluarkannya beberapa jembatan berbahan kayu dari basis data utama.

Meskipun terdapat penurunan jumlah total jembatan pada 2024, hal tersebut tidak mencerminkan degradasi kondisi infrastruktur, melainkan merupakan bagian dari proses validasi dan penyempurnaan basis data teknis yang mengacu pada standar klasifikasi infrastruktur yang lebih terukur dan sesuai pedoman nasional. Oleh karena itu, secara substansi, capaian 100 persen jembatan dalam kondisi baik tetap mencerminkan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menjaga kualitas dan keandalan sarana penghubung antarwilayah.

Capaian ini menunjukkan efektivitas program pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan yang dilakukan secara berkala, serta komitmen daerah dalam menjaga keberlangsungan fungsi layanan infrastruktur strategis. Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi adalah keberlanjutan anggaran pemeliharaan, adaptasi terhadap potensi dampak perubahan iklim seperti banjir dan tanah longsor, serta penguatan basis data infrastruktur agar semakin akurat dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik.

3) Irigasi

Sektor irigasi memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Kabupaten Sikka. Infrastruktur irigasi yang berfungsi optimal menjadi faktor penentu produktivitas lahan, efisiensi penggunaan air, serta ketahanan petani terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, kualitas jaringan irigasi menjadi indikator yang berpengaruh langsung terhadap Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar, khususnya di wilayah perdesaan yang bergantung pada sektor pertanian. Kualitas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.34
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka
Tahun 2020–2024

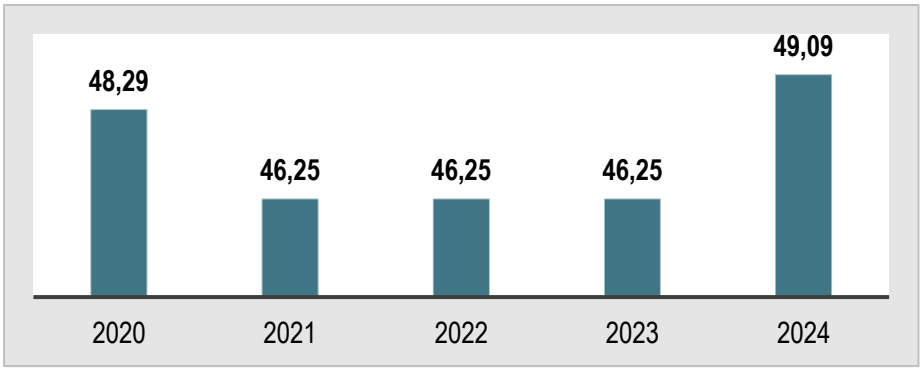

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, persentase jaringan irigasi kabupaten yang berada dalam kondisi baik menunjukkan fluktuasi ringan namun relatif stagnan. Pada tahun 2020, kondisi irigasi yang baik tercatat sebesar 48,29 persen, namun menurun menjadi 46,25 persen pada tahun 2021, dan tidak mengalami perubahan selama dua tahun berikutnya (2022 dan 2023). Baru pada tahun 2024 tercatat peningkatan menjadi 49,09 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan atau rehabilitasi jaringan irigasi masih terus dilakukan dan meningkatkan proporsi infrastruktur irigasi yang layak dalam skala signifikan. Rendahnya persentase irigasi dalam kondisi baik dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain usia infrastruktur yang sudah tua, kerusakan akibat faktor alam seperti sedimentasi atau banjir, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pembangunan baru. Oleh karena itu, indikator ini perlu mendapat perhatian khusus dalam kerangka perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan. Pentingnya peningkatan kualitas dan cakupan irigasi yang baik tidak hanya akan mendongkrak kepuasan layanan infrastruktur secara umum, tetapi juga akan berdampak langsung pada stabilitas produksi pertanian dan kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Sikka.

4) Akses Air Minum

Penyediaan akses air minum yang layak merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mencerminkan kinerja layanan infrastruktur dasar di suatu daerah. Di Kabupaten Sikka, kualitas dan cakupan sistem penyediaan air minum menjadi indikator utama dalam pengukuran Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar karena berperan langsung terhadap kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum
di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Jiwa Terlayani Akses Air Minum Layak	140.935	172.390	176.270	182.925
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	28.187	34.478	35.254	36.585
Jumlah Total Penduduk (Jiwa)	322.181	322.181	322.181	324.252
Jumlah Total Rumah Tangga	64.436	64.436	64.436	64.850
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	43,74	53,51	54,71	56,41

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan bertahap dalam jumlah jiwa dan rumah tangga yang memperoleh akses terhadap air minum layak. Pada tahun 2021, jumlah jiwa yang terlayani mencapai 140.935 jiwa, dan meningkat menjadi 172.390 jiwa pada 2022, 176.270 jiwa pada 2023, serta mencapai 182.925 jiwa pada tahun 2024. Secara paralel, jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak juga meningkat dari 28.187 rumah tangga di tahun 2021 menjadi 36.585 rumah tangga pada 2024. Jika dilihat dari proporsi terhadap total rumah tangga, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak mengalami tren positif: 43,74 persen pada 2021, naik menjadi 53,51 persen pada 2022, 54,71 persen pada 2023, dan mencapai 56,41 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan air minum yang layak dan aman.

Kendati mengalami peningkatan yang stabil, angka ini masih menunjukkan bahwa hampir setengah dari rumah tangga di Kabupaten Sikka belum memiliki akses terhadap air minum layak sesuai standar pelayanan minimum. Tantangan yang dihadapi antara lain terbatasnya cakupan jaringan perpipaan, kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan distribusi, serta keterbatasan kapasitas operasional penyedia layanan air minum.

5) Sistem Drainase

Sistem drainase merupakan infrastruktur vital dalam mendukung kualitas permukiman, pengendalian banjir, serta menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Efektivitas jaringan drainase sangat menentukan kenyamanan, keamanan, dan kelangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan baru. Oleh karena itu, kualitas drainase menjadi indikator penting dalam pengukuran Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar di Kabupaten Sikka. Panjang drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85
Panjang Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024

Kondisi Drainase	2021	2022	2023	2024
Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	14. 803	15.590	15.590	15.690
Total Panjang Drainase	24.005,05	24.005,05	24.005,05	24.005,05
Persentase Drainase Kondisi Baik	61,67	64,94	64,94	65,36

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2025

Data dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren positif dalam peningkatan panjang drainase yang berada dalam kondisi baik. Pada tahun 2021, panjang drainase dalam kondisi baik tercatat sebesar 14.803 meter, atau setara dengan 61,67 persen dari total panjang jaringan drainase sepanjang 24.005,05 meter . Upaya peningkatan kualitas jaringan ini terus dilakukan secara bertahap, yang menghasilkan peningkatan panjang drainase baik menjadi 15.590 meter pada tahun 2022 dan 2023, dengan persentase 64,94 persen.

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan meskipun berskala kecil, yakni panjang drainase baik menjadi 15.690 meter, yang mendorong kenaikan persentase menjadi 65,36 persen dari total jaringan. Kenaikan yang konsisten ini menunjukkan adanya program rehabilitasi dan peningkatan kualitas drainase yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Meski demikian, sekitar 35 persen jaringan drainase masih berada dalam kondisi kurang layak, yang berpotensi menghambat aliran air, memicu genangan, serta menurunkan kualitas lingkungan permukiman. Tantangan ini umumnya bersumber dari sedimentasi, penyumbatan oleh sampah, serta kerusakan fisik pada struktur saluran akibat usia teknis maupun bencana.

6) Tenaga Kerja Konstruksi

Ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat merupakan aspek fundamental dalam menjamin mutu, keselamatan, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di daerah. Tenaga kerja konstruksi dengan kualifikasi terampil tidak hanya menjadi syarat dalam pelaksanaan proyek yang efisien dan sesuai standar teknis, tetapi juga mencerminkan tingkat profesionalisme dan kesiapan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan. Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86
Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024

Kondisi Tenaga Kerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (%)	0	0	0	8,22
Jumlah Tenaga Kerja (orang)	450	450	450	450

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2025

Di Kabupaten Sikka, berdasarkan data tahun 2021 hingga 2024, jumlah tenaga kerja konstruksi yang tercatat secara konsisten adalah 450 orang. Namun, hingga tahun 2023, persentase tenaga kerja dengan kualifikasi terampil bersertifikat adalah 0 persen, menandakan bahwa selama periode tersebut belum terdapat kegiatan pelatihan atau sertifikasi formal yang dilaksanakan.

Baru pada tahun 2024 dilakukan kegiatan pelatihan atau sertifikasi formal kepada 37 orang tenaga kerja konstruksi. Hal ini menunjukkan adanya intervensi program pelatihan dan sertifikasi yang mulai dijalankan, meskipun realisasinya masih rendah. Kondisi ini mencerminkan dua tantangan utama. Pertama, belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia konstruksi di tahun-tahun sebelumnya. Kedua, rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja dalam mengikuti pelatihan dan sertifikasi, yang dapat disebabkan oleh kurangnya informasi, insentif, atau akses terhadap lembaga pelatihan bersertifikasi.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi secara sistematis akan memperkuat kualitas hasil pekerjaan infrastruktur, mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Sikka. Selain itu, tenaga kerja terampil yang tersertifikasi juga akan lebih siap menghadapi tantangan industri konstruksi yang semakin kompetitif dan adaptif terhadap teknologi.

7) Transportasi

Transportasi merupakan tulang punggung pembangunan wilayah, khususnya dalam mendukung konektivitas antar kecamatan, antar kabupaten/kota, hingga antarpulau. Bagi Kabupaten Sikka yang memiliki karakter geografis kepulauan, penguatan kualitas layanan transportasi darat dan laut menjadi bagian krusial dalam memastikan distribusi logistik, mobilitas penduduk, serta integrasi ekonomi lokal dan regional. Oleh karena itu, pengukuran kualitas layanan transportasi menjadi bagian penting dalam Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar. Kualitas Layanan Transportasi Darat dan Laut di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87
Kualitas Layanan Transportasi Darat dan Laut di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas Kab/Kota	72,20	72,37	71,03	71,32	69,99
Konektivitas Darat	0,95	0,95	0,93	0,94	0,92
Persentase Kelengkapan Jalan yang terlah terpasang terhadap kondisi ideal	*)	*)	*)	13,12	20,59
Konektivitas Penyeberangan	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Keterangan : *) = tidak dilakukan perhitungan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2025

Pada tahun 2020, rasio konektivitas tercatat sebesar 72,20, mengalami peningkatan tipis menjadi 72,37 pada tahun 2021. Namun, tren ini tidak berlanjut karena terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 71,03, diikuti sedikit peningkatan pada tahun 2023 sebesar 71,32, dan kembali menurun menjadi 69,99 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi moda transportasi serta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pendukung agar konektivitas antar wilayah tetap terjaga dan mampu menunjang pemerataan pelayanan serta mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sikka.

Untuk aspek konektivitas darat, nilai rasio sedikit mengalami fluktuasi, yakni berada pada angka 0,95 pada tahun 2020–2021, menurun menjadi 0,93 di tahun 2022, naik sedikit menjadi 0,94 di 2023, dan turun kembali ke 0,92 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam kualitas atau kontinuitas jaringan jalan dan moda transportasi darat di wilayah Kabupaten Sikka. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman dan layanan publik.

Peningkatan konektivitas juga dapat dilihat dari indikator persentase kelengkapan jalan terhadap kondisi ideal, yang mulai menunjukkan kemajuan pada tahun 2023 dengan capaian 13,12 persen, dan meningkat lagi pada 2024 menjadi 20,59 persen. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan atau rehabilitasi jaringan jalan, meskipun masih jauh dari target kondisi ideal. Capaian ini harus ditindaklanjuti dengan alokasi pembiayaan yang lebih besar untuk infrastruktur konektivitas, serta perencanaan teknis berbasis kebutuhan wilayah terpencil dan pertumbuhan kawasan baru.

Sementara itu, untuk aspek konektivitas penyeberangan laut, rasio tetap berada di angka 0,19 sepanjang lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan masih terbatasnya kapasitas, jangkauan, atau frekuensi layanan penyeberangan yang tersedia. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan konektivitas laut yang inklusif dan mendukung pemerataan pembangunan.

b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Pemenuhan hak atas hunian layak merupakan bagian integral dari pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan tidak hanya memberikan tempat tinggal yang aman dan sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk dari sisi kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, akses terhadap hunian layak menjadi salah satu indikator utama dalam pembangunan infrastruktur sosial di Kabupaten Sikka.

Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88
Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Sikka
Tahun 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase KK yang Menempati Rumah Layak Huni	*)	53,41	60,69	60,69	76,06
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	*)	49,34	50,97	51,28	51,03
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	0,39	1,40	1,76	1,76	1,76
Luas pengurangan kumuh setelah diintervensi	8,29 ha	6,28 ha	6,28 ha	6,28 ha	6,28 ha
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	73,26	73,96	74,74	74,24	76,06

Keterangan : *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tahun 2020–2024, capaian persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Sikka menunjukkan tren yang stabil dan meningkat. Pada tahun 2020, capaian awal berada pada angka 73,26 persen, kemudian naik menjadi 73,96 persen di tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 74,74 persen di tahun 2022. Meskipun sempat mengalami penurunan kecil di tahun 2023 menjadi 74,24 persen, capaian ini kembali melonjak signifikan pada tahun 2024 menjadi 76,06 persen. Peningkatan ini menandakan adanya intervensi program perumahan dan permukiman yang konsisten, baik melalui bantuan stimulan rumah swadaya, program penataan kawasan kumuh, maupun pembangunan rumah layak huni berbasis komunitas.

Sementara itu, indikator persentase kepala keluarga (KK) yang menempati rumah layak huni mulai tersedia datanya sejak tahun 2021 dengan capaian 53,41 persen, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 76,06 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas fisik hunian, yang mencakup struktur bangunan, luas ruang, sirkulasi udara, dan akses terhadap sarana dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Dalam periode 2020 hingga 2024, akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Sikka menunjukkan perkembangan yang belum optimal. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat secara bertahap dari 49,34 persen pada tahun 2021 menjadi 50,97 persen di tahun 2022, lalu mencapai 51,28 persen pada 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 51,03 persen di tahun 2024. Sementara itu, persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan justru menunjukkan tren peningkatan, dari 0,39 persen pada tahun 2020 menjadi 1,40 persen di 2021, dan terus naik hingga mencapai 1,76 persen pada tahun 2022 yang bertahan hingga 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sanitasi, sehingga perlu strategi terpadu yang mencakup penguatan kebijakan perumahan, peningkatan infrastruktur dasar, serta pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk menjamin hak atas hunian yang layak bagi seluruh masyarakat.

Sebagai lanjutan dari indikator di atas, data di bawah ini merekam sebaran jumlah RTLH di setiap desa pada seluruh kecamatan di Kabupaten Sikka, dengan pembedaan lokasi berdasarkan karakteristik wilayah pesisir atau pedesaan. Selain itu, data ini juga mencerminkan status kepemilikan tanah yang berpengaruh terhadap akses program perumahan dan rehabilitasi RTLH. Pendataan dilakukan hingga tingkat desa sebagai unit terkecil untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi yang tepat, terutama dalam konteks perencanaan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas permukiman berbasis kewilayahan.

Tabel 2.89

Jumlah RTLH Pesisir Dan Pedesaan Dan Status Kepemilikan Tanah Per Desa Per Kecamatan Sampai Dengan Tahun 2025 di Kabupaten Sikka

Kecamatan	Jumlah RTLH	Pesisir	Pedesaan	Desa	Jumlah RTLH
ALOK	875	550	325	Gunungsari	70
				Kabor	2
				Kota Uneng	242
				Madawat	224
				Nangalimang	99
				Pemana	179
				Samparong	59
				JUMLAH	**875**
ALOK BARAT	636	636	0	Hewuli	116
				Wailiti	70
				Wolomarang	266
				Wuring	184
				JUMLAH	**636**

Kecamatan	Jumlah RTLH	Pesisir	Pedesaan	Desa	Jumlah RTLH
ALOK TIMUR	1615	1139	476	Beru	105
				Koja Doi	254
				Kojagete	225
				Kota Baru	39
				Lepo Lima	138
				Nangameting	70
				Perumaan	263
				Waioti	198
				Wairotang	55
				Watugong	268
				JUMLAH	**1615**
BOLA	868	340	528	Bola	79
				Hokor	58
				Ipir	282
				Umauta	131
				Wolokoli	150
				Wolonwalu	168
				JUMLAH	**868**
DORENG	670	99	571	Kloangpopot	197
				Nenbura	99
				Waihawa	40
				Watumerak	89
				Wogalirit	58
				Wolomotong	113
				Wolonterang	74
				JUMLAH	**670**
HEWOKLOANG	774	0	774	Baomekot	117
				Heopuat	75
				Hewokloang	71
				Kajowair	154
				Munerana	114
				Rubit	153
				Wolomapa	90
				JUMLAH	**774**
KANGAE	1340	460	880	Balatatatin	164
				Habi	72
				Kokowahor	165
				Langir	237
				Makendetung	175
				Tanaduen	133
				Teka Iku	139
				Watuliwung	118
				Watumilok	137
				JUMLAH	**1340**
KEWAPANTE	976	567	409	Geliting	114
				Iantena	114
				Kopong	57
				Namangkewa	82
				Seusina	144
				Umagera	94
				Waiara	216
				Wairkoja	155
				JUMLAH	**976**
KOTING	752	0	752	Koting A	155
				Koting B	100
				Koting C	134
				Koting D	198
				Paubekor	69
				Ribang	96

Kecamatan	Jumlah RTLH	Pesisir	Pedesaan	Desa	Jumlah RTLH
				JUMLAH	**752**
LELA	960	711	249	Baopaat	80
				Du	59
				Hepang	171
				Iligai	131
				Kolidetung	114
				Korowuwu	38
				Lela	168
				Sikka	134
				Watutedang	65
				JUMLAH	**960**
MAGEPANDA	902	621	281	Done	117
				Kolisia	138
				Kolisia B	161
				Magepanda	164
				Reroroja	322
				JUMLAH	**902**
MAPITARA	488	0	488	Egon gahar	95
				Hale	200
				Hebing	96
				Natakoli	97
				JUMLAH	**488**
MEGO	852	100	752	Bhera	132
				Dobo	97
				Nuapuu	106
				Gera	122
				Korobhera	100
				Kowi	47
				Liakutu	101
				Napugera	56
				Parabubu	42
				Wolodhesa	49
				JUMLAH	**852**
NELLE	293	0	293	Manubura	79
				Nelle Lorang	44
				Nelle Barat	53
				Nelle Urung	73
				Nelle Wutung	44
				JUMLAH	**293**
NITA	1598	0	1598	Bloro	131
				Ladogahar	89
				Lusitada	139
				Mahebora	88
				Nirangkliung	266
				Nita	150
				Nitakloang	156
				Riit	84
				Takaplager	30
				Tebuk	112
				Tilang	215
				Wuliwutik	138
				JUMLAH	**1598**
PAGA	911	353	558	Lenandareta	128
				Masabewa	85
				Mauloo	29
				Mbengu	146
				paga	207
				Wolorega	136
				Wolowiro	150

Kecamatan	Jumlah RTLH	Pesisir	Pedesaan	Desa	Jumlah RTLH
				Wolowona	30
				JUMLAH	**911**
PALUE	792	503	289	Kesokoja	197
				Ladolaka	62
				Lidi	157
				Maluriwu	104
				Nitunglea	39
				Reruwairere	79
				Rokirole	92
				Tuanggeo	62
				JUMLAH	**792**
TALIBURA	1368	853	515	Baang Koor	135
				Darat Gunung	39
				Darat Pantai	156
				Hikong	167
				Kringa	131
				Lewomada	44
				Nangahale	251
				Nebe	45
				Ojang	85
				Talibura	169
				Timutawa	48
				Wailamung	98
				JUMLAH	**1368**
TANAWAWO	650	0	650	Bu Selatan	94
				Bu Utara	71
				Bu Watuweti	83
				Detubinga	52
				Loke	92
				Poma	91
				Renggarasi	109
				Tuwa	58
				JUMLAH	**650**
WAIBLAMA	768	222	546	Ilinmedo	71
				Natarmage	94
				Pruda	222
				Tanarawa	149
				Tua Bao	96
				Werang	136
				JUMLAH	**768**
WAIGETE	1593	1110	483	Aibura	87
				Egon	264
				Hoder	158
				Nangatobong	245
				Pogon	96
				Runut	300
				Wairbleler	129
				Wairterang	38
				Watudiran	276
				JUMLAH	**1593**
JUMLAH	**19681**	**8264**	**11417**		**19681**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data yang dihimpun hingga tahun 2025, jumlah total RTLH di Kabupaten Sikka mencapai 19.681 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.264 unit atau sekitar 42 persen berada di kawasan pesisir, sementara 11.417 unit (58 persen) berada di wilayah pedesaan. Kecamatan dengan jumlah RTLH tertinggi adalah Nita (1.598 unit), diikuti oleh Alok Timur (1.615 unit), Waigete (1.593 unit), dan Talibura (1.368 unit). Sementara itu, kecamatan

dengan jumlah RTLH terendah tercatat di Nelle (293 unit) dan Mapitara (488 unit). Beberapa kecamatan seperti Hewokloang, Koting, Nita, Tanawawo, dan Mapitara seluruh RTLH-nya berada di wilayah pedesaan, menandakan bahwa persoalan hunian layak di sana lebih dominan terjadi di pedalaman. Sebaliknya, kecamatan seperti Alok, Waigete, dan Lela memiliki proporsi RTLH pesisir yang cukup besar, menunjukkan kerentanan kawasan pesisir terhadap akses permukiman layak.

Data di atas memberikan gambaran bahwa tantangan pembangunan permukiman di Kabupaten Sikka bersifat terdistribusi dan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis serta status kepemilikan tanah. Kawasan pesisir tampak lebih rentan terhadap keterbatasan hunian layak, terutama di wilayah yang padat permukiman seperti Alok dan Waigete, yang merupakan sentra pertumbuhan pesisir. Sementara itu, kawasan pedesaan yang memiliki RTLH tinggi umumnya tersebar di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, seperti Nita dan Talibura. Informasi ini penting dalam penyusunan program prioritas, baik untuk perbaikan rumah, legalisasi tanah, maupun pengembangan infrastruktur dasar permukiman secara lebih terfokus dan kontekstual.

Selanjutnya, dalam rangka memetakan kebutuhan perumahan masyarakat di Kabupaten Sikka, data backlog hingga tahun 2025 disusun berdasarkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jumlah backlog yang tersebar di seluruh desa per kecamatan. Backlog sendiri didefinisikan sebagai selisih antara jumlah rumah tangga dan jumlah rumah yang tersedia dan layak huni. Pendataan ini menjadi dasar penting dalam perencanaan intervensi pembangunan dan rehabilitasi perumahan yang lebih adil, merata, dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah, terutama di wilayah-wilayah dengan angka backlog tinggi. Secara keseluruhan, jumlah backlog yang tercatat di Kabupaten Sikka mencapai 19.681 unit, tersebar di seluruh 21 kecamatan, dengan rincian jumlah desa dan RTLH yang berbeda-beda.

Tabel 2.90
Data Backlog Kabupaten Sikka Tahun Sampai Dengan Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah RTLH	Desa	Jumlah Backlog
Alok	875	Gunungsari	9
		Kabor	0
		Kota Uneng	44
		Madawat	18
		Nangalimang	10
		Pemana	17
		Samparong	2
		JUMLAH	100
Alok Barat	636	Hewuli	23
		Wailiti	11
		Wolomarang	41
		Wuring	49
		JUMLAH	124
Alok Timur	1615	Beru	10
		Koja Doi	18
		Kojagete	14
		Kota Baru	5
		Lepo Lima	7
		Nangameting	7
		Perumaan	23
		Waioti	15
		Wairotang	14
		Watugong	42
		JUMLAH	155
Bola	868	Bola	10
		Hokor	7
		Ipir	39
		Umauta	23

Kecamatan	Jumlah RTLH	Desa	Jumlah Backlog
		Wolokoli	18
		Wolonwalu	24
		JUMLAH	121
Doreng	670	Kloangpopot	33
		Nenbura	11
		Waihawa	2
		Watumerak	12
		Wogalirit	21
		Wolomotong	8
		Wolonterang	13
		JUMLAH	100
Hewokloang	774	Baomekot	13
		Heopuat	15
		Hewokloang	7
		Kajowair	13
		Munerana	14
		Rubit	18
		Wolomapa	7
		JUMLAH	87
Kangae	1340	Balatatatin	27
		Habi	11
		Kokowahor	18
		Langir	34
		Makendetung	37
		Tanaduen	30
		Teka Iku	18
		Watuliwung	16
		Watumilok	18
		JUMLAH	209
Kewapante	976	Geliting	20
		Iantena	30
		Kopong	14
		Namangkewa	9
		Seusina	33
		Umagera	14
		Waiara	37
		Wairkoja	22
		JUMLAH	179
Koting	752	Koting A	33
		Koting B	13
		Koting C	33
		Koting D	44
		Paubekor	7
		Ribang	13
		JUMLAH	143
Lela	960	Baopaat	23
		Du	6
		Hepang	31
		Iligai	29
		Kolidetung	15
		Korowuwu	0
		Lela	31
		Sikka	12
		Watutedang	15
		JUMLAH	162
Magepanda	902	Done	8
		Kolisia	3
		Kolisia B	23
		Magepanda	16
		Reroroja	23

Kecamatan	Jumlah RTLH	Desa	Jumlah Backlog
		JUMLAH	73
Mapitara	488	Egon gahar	20
		Hale	47
		Hebing	10
		Natakoli	19
		JUMLAH	96
Mego	852	Bhera	12
		Dobo	9
		Dobo Nuapuu	21
		Gera	13
		Korobhera	10
		Kowi	4
		Liakutu	8
		Napugera	6
		Parabubu	7
		Wolodhesa	2
		JUMLAH	92
Nelle	293	Manubura	15
		Nelle Lorang	14
		Nelle Barat	5
		Nelle Urung	18
		Nelle Wutung	13
		JUMLAH	65
Nita	1598	Bloro	18
		Ladogahar	7
		Lusitada	30
		Mahebora	12
		Nirangkliung	29
		Nita	17
		Nitakloang	21
		Riit	7
		Takaplager	3
		Tebuk	12
		Tilang	48
		Wuliwutik	13
		JUMLAH	217
Paga	911	Lenandareta	18
		Masabewa	8
		Mauloo	5
		Mbengu	15
		Paga	15
		Wolorega	31
		Wolowiro	4
		Wolowona	4
		JUMLAH	100
Palue	792	Kesokoja	7
		Ladolaka	8
		Lidi	12
		Maluriwu	4
		Nitunglea	4
		Reruwairere	7
		Rokirole	10
		Tuanggeo	5
		JUMLAH	57
Talibura	1368	Baang Koor	5
		Darat Gunung	2
		Darat Pantai	5
		Hikong	8
		Kringa	15
		Lewomada	5

Kecamatan	Jumlah RTLH	Desa	Jumlah Backlog
		Nangahale	17
		Nebe	5
		Ojang	10
		Talibura	18
		Timutawa	0
		Wailamung	17
		JUMLAH	107
Tanawawo	650	Bu Selatan	10
		Bu Utara	2
		Bu Watuweti	4
		Detubinga	1
		Loke	14
		Poma	19
		Renggarasi	16
		Tuwa	8
		JUMLAH	74
Waiblama	768	Ilinmedo	20
		Natarmage	11
		Pruda	19
		Tanarawa	29
		Tua Bao	11
		Werang	43
		JUMLAH	133
Waigete	1593	Aibura	7
		Egon	42
		Hoder	13
		Nangatobong	39
		Pogon	10
		Runut	52
		Wairbleler	9
		Wairterang	1
		Watudiran	43
		JUMLAH	216
Jumlah	**19681**		**2610**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, 2025

Jika ditinjau lebih lanjut, terdapat disparitas jumlah backlog antar kecamatan. Kecamatan dengan *backlog* tertinggi adalah Alok Timur (1.615 unit), disusul oleh Kecamatan Nita (1.598 unit), Waigete (1.593 unit), dan Kangae (1.340 unit). Tingginya backlog di kecamatan-kecamatan ini berkorelasi dengan kepadatan penduduk dan jumlah desa yang relatif lebih banyak. Sebaliknya, kecamatan dengan *backlog* terendah adalah Nelle (293 unit) dan Mapitara (488 unit), yang secara geografis cenderung berada di wilayah pedalaman dengan tekanan urbanisasi yang lebih rendah. Beberapa desa seperti Korowuwu di Kecamatan Lela dan Timutawa di Kecamatan Talibura bahkan mencatatkan *backlog* nol, menandakan potensi keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.

Distribusi backlog ini mencerminkan pentingnya pendekatan kebijakan berbasis data spasial dan kebutuhan lokal. Kecamatan-kecamatan dengan backlog tinggi harus menjadi prioritas dalam program pembangunan rumah layak huni, baik melalui intervensi APBD maupun kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, keberadaan desa-desa dengan *backlog* rendah atau nol dapat dijadikan model replikasi kebijakan perumahan yang berhasil. Dengan pemahaman yang menyeluruh atas kondisi *backlog* ini, Pemerintah Kabupaten Sikka diharapkan dapat memperkuat strategi penyediaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan target pengurangan backlog nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman merupakan elemen penting dalam mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. PSU

mencakup akses terhadap listrik, air bersih dan jalan lingkungan yang mendukung fungsi hunian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Sikka, penguatan penyediaan PSU menjadi bagian strategis dalam pencapaian target perumahan dan permukiman yang layak bagi seluruh warga. Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik	1,44%	94,77%	94,77%	*)
Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum bersih	0,03%	*)	*)	*)
Persentase jalan lingkungan yang dibangun	0,55%	*)	*)	*)

Keterangan : *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tahun 2021–2024, penyediaan PSU permukiman di Kabupaten Sikka menunjukkan perkembangan yang tidak merata antar aspek. Pada indikator persentase rumah tangga yang dilayani listrik, terjadi peningkatan signifikan dari 1,44 persen pada tahun 2021 menjadi 94,77 persen pada tahun 2022, dan angka tersebut tetap bertahan pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan listrik ke permukiman warga secara masif dalam kurun waktu singkat. Namun, data pada tahun 2024 belum tersedia, sehingga perlu dipastikan keberlanjutan program elektrifikasi tersebut melalui mekanisme pemantauan dan pelaporan yang konsisten.

Di sisi lain, untuk indikator rumah tangga yang terlayani air minum bersih, data hanya tersedia pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,03 persen. Ketiadaan data pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa belum terdapat pelaporan yang memadai atau bahwa program penyediaan air bersih belum berjalan secara signifikan pada periode tersebut. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya cakupan pelayanan air minum di wilayah permukiman, yang menjadi tantangan serius dalam penyediaan hunian yang sehat dan memenuhi standar kebutuhan dasar.

Sementara itu, untuk indikator persentase jalan lingkungan yang dibangun, data hanya tercatat pada tahun 2021 sebesar 0,55 persen. Ketidaktercapaian data lanjutan pada tahun-tahun berikutnya juga menunjukkan perlunya peningkatan sistem dokumentasi, pemetaan progres, dan pelaporan pembangunan fisik PSU secara menyeluruh.

Secara umum, ketidakseimbangan dalam penyediaan berbagai elemen PSU menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring lintas sektor. Di satu sisi, capaian elektrifikasi menunjukkan progres luar biasa, namun di sisi lain air bersih dan jalan lingkungan justru masih belum menunjukkan perbaikan yang memadai.

c. Persentase Desa Mandiri

Dalam kurun waktu satu tahun, Kabupaten Sikka mencatat peningkatan signifikan dalam persentase desa mandiri, dari 1,66 persen pada tahun 2023 menjadi 5,52 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan yang berarti dalam pembangunan desa, khususnya dalam aspek layanan dasar, infrastruktur, ekonomi lokal, serta kapasitas tata kelola pemerintahan desa. Dengan total 181 desa, angka 1,66 persen pada tahun 2023 setara dengan sekitar 3 desa yang berstatus mandiri. Pada tahun 2024, persentase 5,52 persen berarti terdapat sekitar 10 desa yang telah mencapai status mandiri. Artinya, dalam setahun terjadi penambahan sekitar 7 desa mandiri, suatu pencapaian yang menunjukkan dampak positif dari program pembangunan desa yang tengah berjalan.

Meskipun demikian, sebanyak 171 desa lainnya (94,48%) masih belum mencapai status desa mandiri, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar desa masih berada pada kategori berkembang atau tertinggal. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi lebih lanjut, baik dalam bentuk pendampingan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM aparatur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, hingga percepatan digitalisasi pelayanan publik di desa.

Kemajuan ini merupakan indikator awal yang positif bagi Kabupaten Sikka dalam mendorong transformasi desa menjadi lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan mempertahankan konsistensi program dan memperluas jangkauan intervensi secara adil dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin jumlah desa mandiri di Sikka akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sikka 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sikka Tahun 2023-2024

Persentase Desa mandiri	2023	2024
Kabupaten Sikka	1,66%	5,52%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka, 2025

7. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting dalam mengukur kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam melihat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total output ekonomi wilayah. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Sikka menunjukkan angka yang relatif stagnan dan berada pada tingkat yang cukup rendah. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Sikka, NTT dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.93
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	0,0037	0,0037	0,0038	0,0035	0,0035
Provinsi NTT	0,0087	0,0084	0,0092	0,0085	0,0100
Nasional	0,0116	0,0117	0,0122	0,0114	0,0113

Sumber: BPS, 2025

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021, Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Sikka tercatat sebesar 0,0037, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,0038 pada tahun 2022. Namun, peningkatan ini tidak berlanjut karena pada tahun 2023 dan 2024, rasio tersebut menurun kembali menjadi 0,0035. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi pendapatan pajak daerah di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi lokal.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan tingkat nasional, rasio pajak daerah Kabupaten Sikka masih tertinggal cukup signifikan. Rata-rata rasio pajak daerah Provinsi NTT selama periode yang sama berkisar antara 0,0084 hingga 0,0100. Sementara itu, secara nasional, rasio ini berada pada kisaran 0,0113 hingga 0,0122. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor perpajakan daerah terhadap PDRB Kabupaten Sikka masih jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

Rendahnya rasio ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya basis pajak daerah, belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta masih lemahnya kapasitas kelembagaan pengelolaan pajak. Selain itu, kondisi ekonomi lokal yang didominasi oleh sektor-sektor informal dan pertanian subsisten juga memengaruhi rendahnya potensi penerimaan pajak daerah.

b. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Sikka dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, mencerminkan dinamika harga barang dan jasa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, baik lokal maupun nasional. Tingkat Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94
Tingkat Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Tahun	Inflasi (%)
2020	2,24
2021	0,39
2022	4,94
2023	3,29
2024	2,70

Sumber: Sikka Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2020, tingkat inflasi tercatat sebesar 2,24 persen, mencerminkan stabilitas harga yang relatif terkendali di tengah kondisi awal pandemi COVID-19. Tahun 2021 menjadi titik terendah dalam periode ini, dengan inflasi hanya sebesar 0,39 persen. Rendahnya inflasi ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari melemahnya daya beli masyarakat serta terbatasnya aktivitas ekonomi, sejalan dengan dampak pandemi yang masih kuat dirasakan pada tahun tersebut.

Namun, memasuki tahun 2022, inflasi melonjak drastis hingga mencapai 4,94 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini sangat mungkin dipicu oleh normalisasi aktivitas ekonomi pasca pandemi, kenaikan harga bahan pokok dan energi, serta gangguan rantai pasok global yang turut memengaruhi harga-harga di tingkat lokal. Pada tahun 2023, tingkat inflasi mulai menurun ke angka 3,29 persen, yang menunjukkan mulai pulihnya kestabilan harga meski masih berada di atas target inflasi nasional. Kemudian pada tahun 2024, inflasi turun lebih lanjut menjadi 2,70 persen, menandakan adanya pemulihan ekonomi yang lebih terkontrol serta peran intervensi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga komoditas strategis. Secara keseluruhan, pola inflasi ini memperlihatkan bahwa ekonomi Kabupaten Sikka telah melalui masa ketidakstabilan harga dan mulai menuju arah yang lebih stabil. Namun, tetap diperlukan kebijakan yang responsif dan antisipatif dalam mengelola faktor-faktor pemicu inflasi, terutama pada sektor pangan, energi, dan transportasi, untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Untuk mengetahui lebih lanjut inflasi di kabupaten Sikka dapat dilihat dari tabel Indeks Harga Konsumen Menurut kelompok pengeluaran, dalam tabel ini terdapat penjelasan sektor-sektor yang ikut andil terhadap tingkat inflasi di Kabupaten Sikka:

Tabel 2.95
Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran

No	Kelompok Pengeluaran	IHK 2023	IHK 2024	Tingkat Inflasi y-on-y 2024	Andil Inflasi y-on-y 2024
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	103,72	109,66	5,73	2,38
2	Pakaian dan Alas Kaki	100,90	101,63	0,72	0,03
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,32	101,86	0,53	0,10
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,62	103,67	1,02	0,03
5	Kesehatan	101,73	102,3	0,56	0,01

No	Kelompok Pengeluaran	IHK 2023	IHK 2024	Tingkat Inflasi y-on-y 2024	Andil Inflasi y-on-y 2024
6	Transportasi	109,13	116,26	6,53	0,59
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,88	99,42	-0,46	-0,02
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,75	96,99	-4,68	-0,05
9	Pendidikan	100,00	101,19	1,19	0,04
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	101,26	105,44	4,13	0,28
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,20	104,62	1,38	0,07

Sumber: Perkembangan Indeks Harga Konsumen, BPS Kabupaten Sikka 2025

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,73 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,72 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,56 persen; kelompok transportasi sebesar 6,53 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,19 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,13 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,38 persen.

Menurut Data BPS Kabupaten Sikka (2024), komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Februari 2024, antara lain: beras, tomat, angkutan udara, bawang putih, nasi dengan lauk, Sigaret Kretek Mesin (SKM), cabai merah, gula pasir, sate, ikan merah, wortel, labu siam/jipang, sawi hijau, susu bubuk, daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, ketela pohon, cabai rawit, beras jagung, ikan tembang, kontrak rumah, kol putih dan bayam. Dengan demikian, inflasi yang terjadi di Sikka pada tahun 2024, dengan dominasi pada sektor transportasi dan pangan, menunjukkan adanya tekanan signifikan pada pengeluaran rumah tangga dan potensi tantangan dalam menjaga stabilitas harga barang-barang esensial di daerah yang ekonominya sangat bergantung pada sektor primer dan konsumsi domestik.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja di mana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis pada kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sikka merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat terutama dalam memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penilaian masyarakat dalam survei IKM dijadikan dasar pertimbangan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka dalam proses perencanaan pembangunan di waktu yang akan datang. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.96
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
IKM Pelayanan Perizinan	91,75%	90,25%	91,75%	91,75%	89,25%
IKM Pelayanan Kependudukan	*)	*)	72,77%	72,77%	80,01%

Keterangan: *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa pada tahun 2020, IKM Pelayanan Perizinan Kabupaten Sikka mencapai 91,75 persen. Meskipun pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IKM Pelayanan Perizinan masih tetap tinggi, yaitu 90,25 persen. Meskipun demikian, ini menunjukkan pentingnya terus memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan agar tetap memenuhi harapan masyarakat. Terakhir di tahun 2022 dan 2023 IKM Pelayanan Perizinan kembali meningkat menjadi 91,75 persen, meskipun demikian IKM menunjukan penurunan pada tahun 2024 menjadi 89,25 persen. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan perlu ditingkatkan. Selanjutnya pada pelayanan kependudukan juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup tinggi, meskipun datanya baru diketahui sejak tahun 2022. Pada tahun 2024 IKM pelayanan kependudukan sudah mampu mendapatkan nilai 80,01 persen. Meskipun masih di bawah nilai pelayanan dan perizinan, secara keseluruhan, data menunjukkan tren positif dalam peningkatan tingkat kepuasan masyarakat.

Penilaian kinerja pelayanan publik perlu dikaitkan dengan nilai Indeks Pelayanan Publik. Indeks pelayanan publik digunakan untuk menilai bagaimana kualitas pelayanan instansi pemerintah, berbeda dengan IKM yang merupakan nilai yang diberikan masyarakat, penilaian IPP dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Penilaian ini mengukur 6 aspek diantaranya yaitu Kebijakan pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat), profesionalisme SDM, sarana prasarana (ketersediaan sarpras, kelayakan sarpras dan sarpras berkebutuhan khusus), sistem informasi pelayanan publik (SIPP) (ketersediaan SIPP elektronik dan non-elektronik, kepemilikan situs, pemutakhiran data), konsultasi dan pengaduan (media dan dokumentasi konsultasi dan pengaduan), serta inovasi pelayanan. Penilaian ini dilakukan oleh Terkait dengan indeks ini, Kabupaten Sikka baru mulai menghitung di tahun 2024 dengan nilai C-. Menunjukkan masih dibutuhkannya upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan Publik.

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Kondisi tata kelola pemerintahan daerah harus mengutamakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel. Pengelolaan ini kemudian harus didukung dengan transparansi informasi yang dilaksanakan dengan mematuhi kerangka hukum.

a. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum menunjukan bagaimana kemajuan perkembangan reformasi hukum dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan peraturan dan kebijakan hukum yang berkualitas serta responsif, sehingga dapat ditegakkan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Sehingga tercipta sebuah fondasi pemerintahan yang efisien, efektif akuntabel bagi pembangunan daerah. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024

No	Indeks	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	*)	*)	45,82	96,46

Keterangan: *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sikka baru mulai dihitung pada tahun 2023. Meskipun dimulai dengan angka yang cukup rendah dengan pencapaian di 45,82 namun pada tahun 2024 angka ini kemudian meningkat. Pencapaian indeks reformasi hukum di tahun 2024 menjadi 96,46 atau sekitar dua kali lipat dari tahun sebelumnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan adanya perbaikan dalam pembuatan kebijakan yang lebih berbasis penelitian di tahun 2024. Nilai ini mencerminkan bagaimana Kabupaten Sikka meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi, memperkuat penegakan hukum serta secara berkala melakukan evaluasi pada Perda yang ada.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk menghadapi masalah tata kelola pemerintahan yang kompleks, transformasi digital menjadi kebutuhan yang tak dapat dielakkan oleh Pemerintah. Sehingga diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap SPBE yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Hal ini kemudian juga tertuang dalam tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Evaluasi SPBE yang telah dicapai oleh Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.35
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024

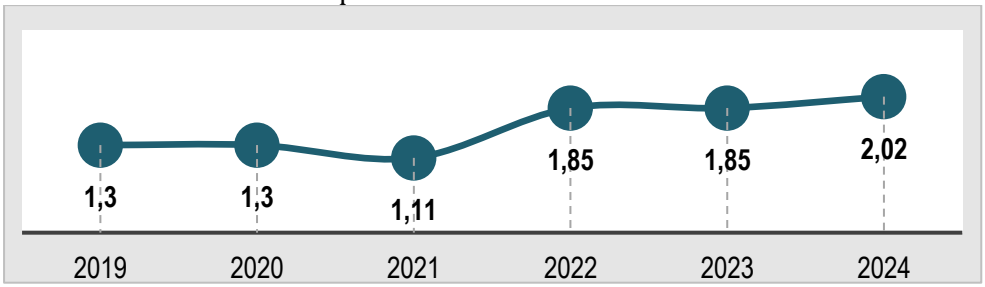

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2025

Berdasarkan data di atas, selama tiga tahun pertama dari periode 2019-2024, Kabupaten Sikka memiliki nilai SPBE yang relatif stabil walaupun ada pengurangan, yaitu sebesar 1,30 dengan penilaian "Kurang". Tentu hal ini harus menjadi perhatian untuk meningkatkan dan memperbaiki implementasi SPBE di tingkat pemerintahan daerah. Selanjutnya pada tahun 2021, Kabupaten Sikka mengalami penurunan nilai SPBE menjadi 1,11 dengan penilaian "Kurang". Hal ini menunjukkan adanya tantangan atau kendala dalam implementasi SPBE pada tahun tersebut. Penurunan ini dapat memicu evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Pada tahun 2022 dan 2023, Kabupaten Sikka mencatat peningkatan yang sangat signifikan dalam nilai SPBE, mencapai 1,85, dan mendapat penilaian "Cukup". Capaian ini kemudian berlanjut hingga 2024 dan meningkat dengan nilai 2,02. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan yang luar biasa dalam implementasi SPBE di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan hasil dari upaya intensif dan strategi yang lebih efektif dalam mengadopsi teknologi informasi dan elektronik dalam proses pemerintahan.

c. Indeks Integritas Nasional

Bagian ini seharusnya membahas terkait dengan Indeks Integritas Nasional, yang kemudian di proxy dengan data Survei Penilaian Integritas. Survei ini merupakan alat ukur kerentanan korupsi yang ada di daerah. Beberapa dimensi dalam survei ini adalah dimensi Komponen Eksternal, Komponen Internal dan Komponen Ekspert. Selanjutnya Kabupaten Sikka berhasil mendapatkan penilaian SPI yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.98
Survei Penilaian Integritas Kabupaten Sikka Tahun 2024

Dimensi Komponen Internal	Nilai
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	74.19
Pengelolaan Anggaran	69.94
Pengelolaan PBJ	66.96
Pengelolaan SDM	58.28
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	75.6
Sosialisasi Antikorupsi	66.32
Transparansi	83.56
Dimensi Komponen Eksternal	
Integritas Pegawai	93.11
Transparansi dan Keadilan Layanan	82.98
Upaya Pencegahan Korupsi	71.19
Dimensi Komponen Ekspert	
Kelompok Pemantau Mewakili Publik	59.90
Kelompok Pengamatan Melekat	67.80
Total Nilai	63.15

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sikka, 2025

Kabupaten Sikka mendapatkan nilai 63,15 dari skala 100. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka masih berada pada posisi rentan. Tidak hanya itu angka ini juga masih jauh berada di bawah nilai nasional (71,35) dan nilai Provinsi Nusa Tenggara Timur (68,35). Meskipun demikian apabila dilihat dari indikator per dimensi Kabupaten Sikka sudah dapat dibilang mempunyai integritas pegawai, dan transparansi yang cukup tinggi. Ke depannya Kabupaten Sikka dapat berfokus pada pengelolaan SDM, pengelolaan PBJ, serta sosialisasi anti korupsi yang merupakan tiga nilai terendah, untuk memperkuat integritas yang ada di Kabupaten Sikka.

d. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi telah menjadi pokok utama dalam tata kelola pemerintahan daerah dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompleks. Pemerintah daerah perlu melakukan perubahan dalam operasional dan struktur birokrasi untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam pelayanan publik, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mempromosikan keterbukaan dan partisipasi publik. Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah penyederhanaan proses administrasi dan pemangkasan birokrasi yang tidak efisien. Proses-proses yang rumit dan berbelit-belit perlu disederhanakan dan digantikan dengan proses yang lebih cepat dan terintegrasi. Berikut adalah grafik penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sikka.

Gambar 2.36

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024

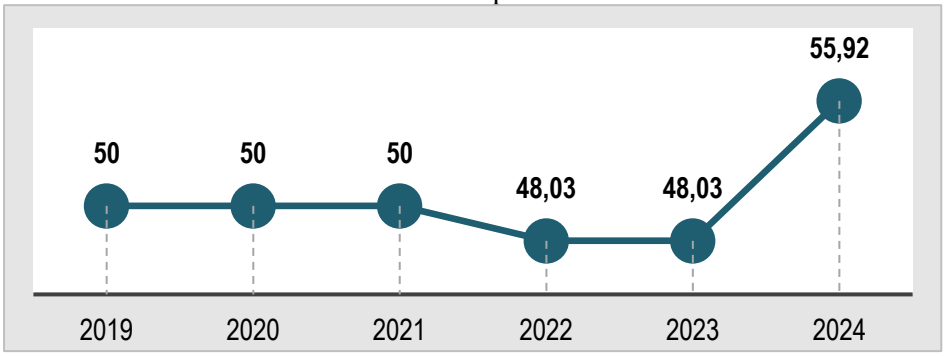

Sumber: Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tersebut Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada tahun 2024 hanya mencapai pada kategori CC dengan nilai 58,92. Pencapaian ini cukup baik dengan melihat bawah pada 5 tahun belakangan, angka IRB Kabupaten Sikka tidak pernah mencapai lebih dari angka 50. Menunjukkan bahwa adanya peningkatan tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien di Kabupaten Sikka. Hal ini menunjukkan adanya potensi bagi Kabupaten Sikka untuk dapat mencapai tata kelola yang lebih baik dengan mendorong upaya yang diberikan dalam pengembangan Tata kelola pemerintahan. Namun demikian nilai ini juga belum tergolong sebuah nilai yang 'baik', sehingga Kabupaten Sikka mempunyai pekerjaan besar dalam mendongkrak nilai Reformasi Birokrasi.

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, serta turut mendukung demokrasi, maka diperlukan fondasi hukum dan demokrasi yang dapat diandalkan. Fondasi berupa pembangunan hukum harus dapat mengarah pada supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan fondasi demokrasi harus dapat menunjukkan perwujudan demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

a. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu poin penting dalam hal memastikan bahwa Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sudah diupayakan di tingkat daerah. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, upaya ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga hukum, tapi menjaga ketertiban umum, termasuk diantaranya melindungi hak masyarakat serta mendukung pembangunan. Persentase Penegakan , Perda di Kabupaten Sikka dari tahun 2020 - 2024 selalu mencapai angka 100 persen hal ini menunjukkan tingginya keamanan yang ditertibkan oleh Satpol PP, sehingga dapat dicapai kondisi masyarakat yang aman dan tertib.

b. Persentase Capaian Aksi HAM

Sebagai upaya mendorong Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) diperlukan upaya mendorong pelaksanaan capaian aksi HAM yang dilakukan di masing-masing daerah. Aksi ini kemudian secara strategis merujuk pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta pemajuan HAM yang ditujukan kepada empat kelompok sasaran, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat. Pada pelaksanaanya, Kabupaten Sikka baru mulai menghitung terkait dengan upaya ini pada tahun 2024, namun dapat dibilang capaian itu sudah cukup bagus dengan persentase sejumlah 72,55 persen. Tentunya hal ini juga masih menunjukkan adanya ruang perbaikan yang dapat dilakukan dalam memenuhi HAM masyarakat.

c. Indeks Demokrasi Indonesia

Bagian ini seharusnya membahas terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia yang dimiliki Kabupaten Sikka. IDI melihat bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia dilakukan. IDI tidak hanya melihat perkembangan demokrasi di Indonesia dilakukan, tapi juga sebagai data penting untuk perencanaan pembangunan politik, serta evaluasi demokrasi di tingkatan masyarakat. Indeks ini kemudian dihitung berdasarkan tiga aspek utama yaitu Aspek Kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Namun demikian hingga saat ini perhitungan indeks demokrasi masih hanya dilakukan di tingkat Provinsi dan belum dihitung pada tingkatan Kabupaten.

d. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman adalah sebuah alat ukur untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat atas rasa aman dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Sasaran dari indeks ini selain mengetahui ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap rasa aman, juga untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi rasa aman tersebut, selain itu indeks ini juga merupakan bagian dari penyusunan rencana dan strategi perbaikan kinerja. Indeks ini terdiri dari beberapa dimensi seperti keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinnekaan serta dimensi keamanan dari kekerasan. Bagian ini seharusnya membahas terkait dengan Indeks Rasa Aman yang dimiliki Kabupaten Sikka. Namun hingga saat ini perhitungan terakhir terkait indeks rasa aman dilakukan di 2019 dengan nilai sebesar 0,65. Angka tersebut terbilang cukup rendah, namun tidak menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Sikka saat ini. Sehingga pemerintah perlu melakukan perhitungan terkait dengan Indeks Rasa Aman ke depannya.

e. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Indeks Trantibulinmas)

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan bagian dari pelayanan dasar Pemerintah Daerah. Indeks ini menunjukan bagaimana ketentraman dan ketertiban umum tercapai, penyelenggaraan manajemen satlinmas, manajemen kelembagaan, serta urusan bencana. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.37
Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

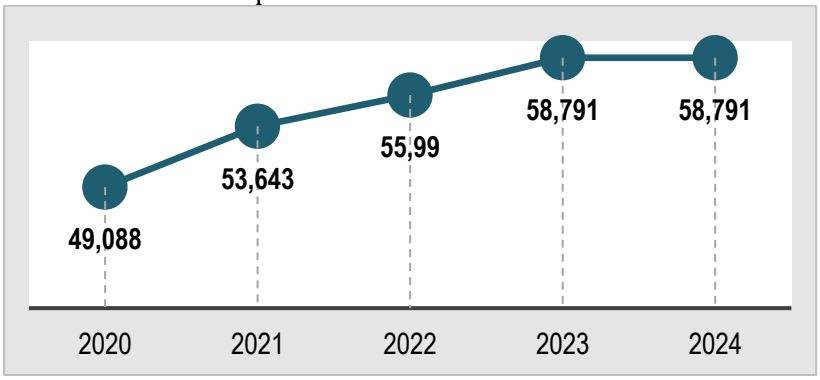

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa indeks penyelenggaraan Trantibulinmas di Kabupaten Sikka kian meningkat setiap tahunnya dengan pencapaian akhir di 58,791 yang masuk dalam kategori "Cukup Baik". Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka telah melaksanakan tugasnya dalam menjaga Trantibulinmas di daerah. Baik dari sisi implementasi maupun kelembagaan, serta sumberdaya yang dimiliki sudah mengarah pada kebutuhan yang diperlukan daerah dalam mendorong Trantibulinmas menjadi lebih baik. Tentu angka ini masih menunjukkan adanya ruang perbaikan yang bisa dilakukan untuk mencapai nilai baik. Sebagaimana disebutkan bahwa indeks ini tidak hanya menunjukkan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi, tapi juga kapasitas sumberdaya termasuk di antaranya kapasitas SDM, serta sistem seperti sarana dan prasarana, perencanaan dan anggaran juga akuntabilitas. Sehingga dibutuhkan tata kelola yang baik untuk dapat mendorong nilai indeks.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Upaya mewujudkan ketangguhan diplomasi serta pertahanan berdaya gentar kawasan diperlukan perjuangan yang berkaitan dengan kepentingan nasional di berbagai bidang, termasuk di antaranya mengembangkan dan memelihara hubungan antar negara yang konstruktif. Selain itu, pentingnya peningkatan kemampuan kepemimpinan serta memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan.

a. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Bagian ini seharusnya membahas terkait indeks daya saing daerah. Pengukuran Indeks ini sudah dilakukan di setiap kabupaten dan kota oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Namun hingga tahun ini untuk Kabupaten Sikka masih tidak dapat dilakukan pengukuran karena tidak ada skor pada pilar 11 yaitu pilar dinamisme bisnis dengan indikatornya pertumbuhan Nomor Induk Berusaha, jumlah bank dan kinerja pelayanan publik. Apabila kita cermati, maka nilai Pilar IDSD yang ada di Kabupaten Sikka sebagaimana berikut:

Tabel 2.99
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024

Wilayah	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Kabupaten Sikka	4,4	2,81	4,11	4	3,61	3,8	2,91	3,02	2,88	3,65	-	2,71	-

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025

Selain pada pilar 11, sudah terdapat angka pada pilar-pilar lainnya. Secara keseluruhan, Kabupaten Sikka memiliki lingkungan pendukung yang bagus dengan nilai yang mendekati 4 pada pilar 1 hingga pilar 4. Namun masih diperlukan peningkatan pada pilar 2 yaitu terkait infrastruktur. Sedangkan untku pilar SDM yang ada pada pilar 5 dan 6 juga sudah cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan. Selanjutnya pada komponen pasar dalam pilar 7 hingga 10, masih menunjukkan nilai yang belum baik, perlu dilakukan peningkatan terutama dengan berfokus pada pasar produk dan sistem keuangan. Selanjutnya pada komponen ekosistem inovasi, pada pilar 12, kapabilitas inovasi juga masih dinilai rendah. Upaya selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Sikka, selain berfokus pada beberapa pilar yang rendah dalam 4 komponen yang sudah dijabarkan, perlu dilakukan pengukuran dinamisme bisnis sehingga dapat dihitung indeks daya saing daerah Kabupaten Sikka secara keseluruhan.

b. Indeks Kapabilitas Inovasi

Bagian ini seharusnya membahas terkait Indeks Kapabilitas Inovasi, namun hingga saat ini belum terdapat data dan perhitungan terkait dengan indeks tersebut di Kabupaten Sikka. Data ini kemudian di-proxy menggunakan pilar 12 IDSD yaitu Kapabilitas Inovasi. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya pada sub-bab Indeks Daya Saing Daerah, kapabilitas inovasi Kabupaten Sikka masih tergolong rendah dengan nilai 2,71. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, sebab kapabilitas inovasi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Sehingga rendahnya pilar ini menunjukkan iklim kualitas riset dan inovasi yang kurang begitu baik, sehingga tidak dapat memunculkan ide-ide inovatif yang dapat mendorong pembangunan daerah

4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

1) Urusan Pendidikan

Pemenuhan atas hak mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan sebuah keadilan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Warga negara Indonesia akan mendapatkan kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan. Maka dari itu pembangunan manusia melalui dimensi pendidikan menjadi fokus bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan agenda kebijakan pendidikan yang sangat berkualitas dan berkelanjutan. Undang-undang nomor 23 Pasal 12 tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pendidikan (anak usia dini dan non-formal) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK serta pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Kondisi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kewenangan secara otonom dalam memahami masalah, kebutuhan dan lebih bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan agar kemajuan daerahnya masing-masing dan pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

Gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk pada umumnya dapat dilihat pada beberapa indikator, antara lain angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan jumlah siswa di masing-masing kelompok usia sekolah dibagi jumlah penduduk pada kelompok umur bersangkutan, misalnya APS usia 7-12 tahun adalah jumlah siswa berusia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dan seterusnya untuk kelompok usia 13-15 tahun, dan 16-18

tahun. Dalam hal ini bisa saja siswa berusia 12 tahun sudah duduk di bangku SMP atau siswa berusia 16 tahun tetapi masih duduk di bangku SMP.

Dari angka partisipasi sekolah (APS) dapat dilihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. Meningkatnya partisipasi sekolah menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Dalam konteks penuntasan Program Wajib Belajar (Wajar) 9 (sembilan) Tahun, angka partisipasi sangat krusial, karena berhubungan dengan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai angka partisipasi 100 persen di jenjang SLTP. Seperti APS, Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
APK					
SD/MI/Paket A	104,23	112,07	110,21	109,83	101,17
SMP/MTs/Paket B	97,9	113,16	109,41	102,75	91,03
SMA/SMK/MA/Paket C	103,05	111,57	112,55	101,95	89,20
APM					
SD/MI/Paket A	93,62	96,66	96,74	96,93	88,01
SMP/MTs/Paket B	78,73	83,03	85,29	88,98	69,56
SMA/SMK/MA/Paket C	52,48	52,98	53,6	55,81	60,79
APS					
SD/MI/Paket A	97,18	99,34	99,38	99,43	96,12
SMP/MTs/Paket B	79,92	97,7	97,76	98,13	90,76
SMA/SMK/MA/Paket C	31,19	32,11	32,57	32,85	75,75

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2025

Data menunjukkan adanya variasi nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun ke tahun, baik pada tingkat SD, SMP, maupun SMA. Di tingkat SD, APK pada tahun 2020 mencapai 104,23 dan menurun menjadi 101,17 pada tahun 2024. Sementara itu, di tingkat SMP, APK mengalami fluktuasi dengan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, sedangkan di tingkat SMA, APK mengalami penurunan selama periode yang sama.

Selain APK, Angka Partisipasi Murni (APM) juga mengalami fluktuasi dalam periode 2020-2024 untuk tingkat pendidikan SD dan SMP, sementara APM SMA mengalami peningkatan setiap tahunnya. APM di tingkat SD pada tahun 2020 mencapai 93,62 dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 96,93. Angka ini kemudian menurun cukup signifikan di tahun 2024 menjadi 88,01. Di tingkat SMP, APM mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 78,73 pada tahun 2020, terus meningkat menjadi 88,98 pada tahun 2023 dan menurun menjadi 69,56 pada tahun 2024. Di tingkat SMA, APM mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 APM Kabupaten Sikka berada di angka 52,48 persen, terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 60,79.

APS Kabupaten Sikka pada tingkat SD mengalami fluktuasi dalam periode 2020-2024, meskipun menunjukkan tren positif secara keseluruhan. Pada tahun 2020, APS di tingkat SD mencapai angka 97,18 yang meningkat menjadi 99,43 pada tahun 2023. Angka ini kemudian sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 96,12 namun masih dalam tren positif. Di tingkat SMP, APS mengalami peningkatan cukup signifikan dari 79,92 pada tahun 2020 menjadi 97,7 pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan minor dari 98,13 pada tahun 2023

menjadi 90,76 pada tahun 2024. Di tingkat SMA, APS mengalami kenaikan setiap tahunnya dan kenaikan signifikan terjadi dari 32,85 pada tahun 2023 menjadi 75,75 pada tahun 2024.

Indeks Distribusi Guru

Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seharusnya sejalan dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, rasio antara rombongan belajar dan ketersediaan ruang kelas diatur. Dalam aturan ini, rasio antara kelas dan rombongan belajar yang ideal yaitu 1:28 (per kelas diisi maksimum 28 siswa). Namun, indikator ini sudah tidak dihitung lagi di Kabupaten Sikka karena ada perubahan indikator sasaran utama. Padahal, Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan baik pada jenjang SD/sederajat maupun SMP/sederajat pada lingkup pemerintah kota atau kabupaten.

Sarana dan prasarana ini mencakup perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, prasarana belajar yang penting untuk dimiliki dan diperhatikan oleh setiap satuan pendidikan adalah keberadaan ruang kelas untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (BNSP, 2020). Ketentuan terkait pengaturan ruang kelas ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Angka Indeks Distribusi Guru (AIDG) adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa baik distribusi guru di suatu daerah atau sekolah (Bidang Pendidikan Telaah RPJMD Bupati Sikka, 2025). Indeks distribusi guru merefleksikan seberapa merata penempatan guru di berbagai wilayah atau jenjang pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran di setiap sekolah. Distribusi guru yang tidak merata, khususnya di daerah terpencil atau kurang maju, dapat menjadi hambatan signifikan bagi pemerataan akses pendidikan berkualitas. Indeks distribusi guru untuk jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2020 hingga 2023 cenderung stagnan di angka rendah, yaitu 0,061 pada tahun 2020 dan 0,06 pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Angka yang sangat rendah ini mengindikasikan ketidakmerataan distribusi guru yang signifikan di jenjang pendidikan dasar. Namun pada tahun 2024, terjadi lonjakan drastis Indeks distribusi guru SD/MI menjadi 0,88. Serupa dengan jenjang SD/MI, Indeks distribusi guru SMP/MTs juga menunjukkan angka yang sangat rendah dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu 0,0438. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan yang cukup berarti menjadi 0,33 dan berlanjut pada tahun 2024 dengan Indeks distribusi guru SMP/MTs mencapai 0,71. Peningkatan drastis Indeks distribusi guru di kedua jenjang, terutama pada tahun 2024, merupakan capaian yang sangat positif dan patut diapresiasi. Ini mengindikasikan adanya upaya signifikan atau perubahan kebijakan yang berhasil dalam penempatan guru. Indeks Distribusi Guru Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101

Indeks Distribusi Guru Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Jenjang	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	0,061	0,06	0,06	0,06	0,88
SMP/MTs	0,0438	0,0438	0,0438	0,33	0,71

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2025

Persentase Akreditasi Satuan Pendidikan

Akreditasi satuan pendidikan adalah proses penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (PP No.4 Tahun 2022). Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai standar yang tinggi. Peningkatan persentase satuan pendidikan terakreditasi di semua jenjang mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Persentase akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sikka menunjukkan adanya komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, yang puncaknya terlihat pada tahun 2023. Namun, penurunan ringan di tahun 2024 perlu menjadi perhatian untuk memastikan keberlanjutan tren positif. Secara keseluruhan, Kabupaten Sikka menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam akreditasi satuan pendidikan di semua jenjang, terutama pada tahun 2023. Capaian akreditasi SD dan SMP telah mencapai angka yang sangat tinggi, mendekati 100 persen, yang menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam peningkatan mutu. Meskipun terdapat sedikit penurunan di tahun 2024 untuk semua jenjang pendidikan, angka tersebut masih berada pada level yang sangat tinggi dibandingkan awal periode. Namun, meskipun persentasenya tinggi pada jenjang SD dan SMP, persentase akreditasi jenjang pendidikan PAUD masih sangat rendah. Dengan meningkatkan kualitas PAUD, akan memastikan setiap anak di Kabupaten Sikka mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas sebagai fondasi masa depan mereka. Indeks Distribusi Guru Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.38

Persentase Akreditasi Satuan Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

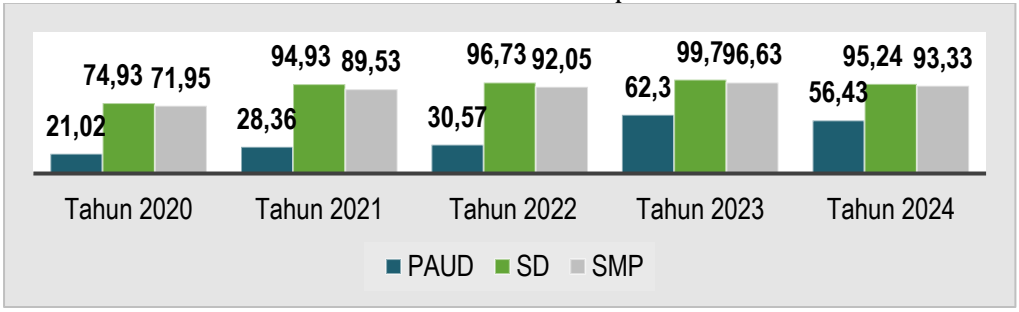

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2025 (diolah)

Bahasa dan Sastra Daerah

Pendidikan bukan hanya tentang penguasaan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga pembentukan karakter dan pelestarian budaya. Dalam konteks daerah, bahasa dan sastra lokal memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai luhur, memperkaya intelektualitas, serta memperkuat identitas anak-anak usia sekolah. Pengenalan muatan lokal bahasa dan sastra daerah di sekolah merupakan upaya strategis untuk mencapai tujuan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah untuk Peningkatan Intelektualitas dan Karakter Anak Usia Sekolah di Kabupaten Sikka. Dari total 336 Sekolah Dasar di Kabupaten Sikka, hanya 30 sekolah yang menerapkan muatan lokal bahasa dan sastra daerah atau sebesar 8,93 persen penerapan di jenjang SD. Sedangkan pada jenjang SMP, dari total 90 Sekolah Menengah Pertama, hanya 7 sekolah yang menerapkan muatan lokal bahasa dan sastra daerah atau sebesar 7,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan muatan lokal bahasa dan sastra daerah di Kabupaten Sikka masih sangat rendah, baik di jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Kurang dari 10 persen dari total satuan pendidikan yang mengintegrasikan aspek penting ini dalam kurikulum mereka. Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.102
Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024

Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan muatan lokal bahasa dan sastra daerah	Tahun 2024		
	Jumlah sekolah	Jumlah yang menerapkan	%
SD	336	30	8,93
SM	90	7	7,78

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2025

Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. AMH yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam pemerataan akses pendidikan dasar dan menjadi prasyarat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada tahun 2020, Angka Melek Huruf di Kabupaten Sikka tercatat sebesar 93,34 persen. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 93,4 persen dan terus berlanjut pada tahun 2022 mencapai 94,03 persen. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana AMH Kabupaten Sikka melonjak hingga 97,85 persen dan pada tahun 2024, Angka Melek Huruf mencapai puncaknya yaitu 98,88 persen. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sikka telah melek huruf. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut;

Gambar 2.39
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

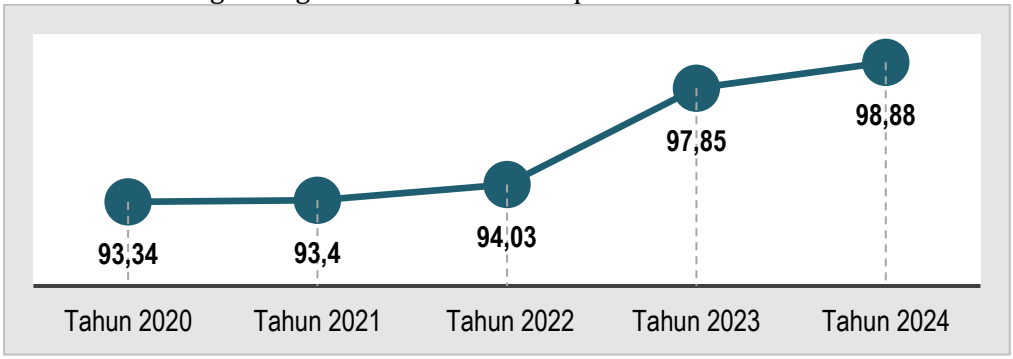

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2025

Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan indikator krusial dalam mengukur keberhasilan sistem pendidikan dan menjadi cerminan aksesibilitas serta relevansi pendidikan bagi anak-anak. Angka Putus Sekolah yang tinggi menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan setiap anak menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Angka Putus Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.40
Angka Putus Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

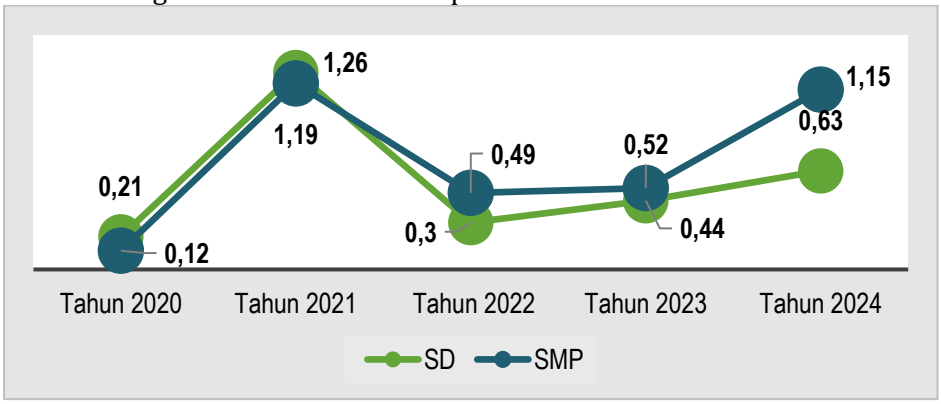

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2025 (diolah)

Berdasarkan data Jumlah Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan (yang dapat diinterpretasikan sebagai Angka Putus Sekolah) di Kabupaten Sikka menunjukkan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Sikka mengalami pola yang fluktuatif, dengan lonjakan signifikan di tahun 2021 untuk kedua jenjang pendidikan, diikuti penurunan di tahun 2022, namun kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD pada tahun 2020 adalah 0,21. Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 1,26 dan kemudian menurun drastis pada tahun 2022 menjadi 0,3. Sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,44 dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 0,63. Sedangkan Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMP tahun 2020 adalah 0,12. Serupa dengan SD, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2021 menjadi 1,19 dan kemudian menurun tahun 2022 menjadi 0,49. Sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,52 dan pada tahun 2024, Angka Putus Sekolah SMP kembali menunjukkan peningkatan yang cukup besar menjadi 1,15.

2) Urusan Kesehatan

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara. Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan sehingga pelaksanaannya mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Setiap daerah membuat program dan strategi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, baik berupa pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, maupun pengembangan sistem pelayanan kesehatan. Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan seperti Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Jumlah Kelahiran dan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Jumlah Kelahiran, juga dikenal sebagai angka kelahiran total, adalah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. Jumlah kelahiran digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan meningkatkan rata-rata usia kawin, dan meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan denyut nadi. Jumlah kelahiran di Kabupaten Sikka tahun 2020 sebesar 5.250. Jumlah kelahiran terus menurun mencapai angka 4.075 pada tahun 2024. Jumlah Kelahiran di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.41
Jumlah Kelahiran Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

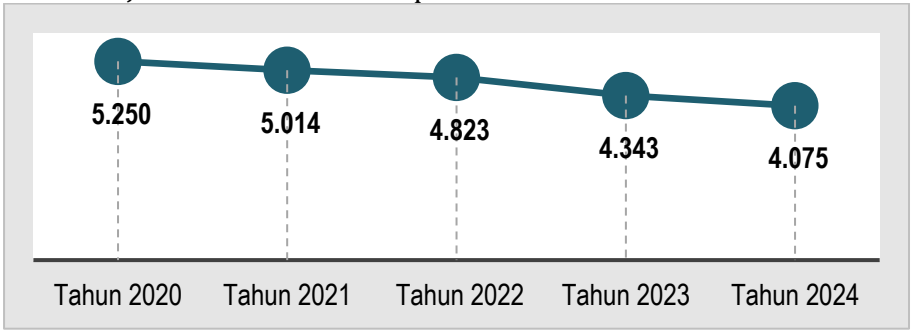

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025

Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang bersamaan. Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.42
Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

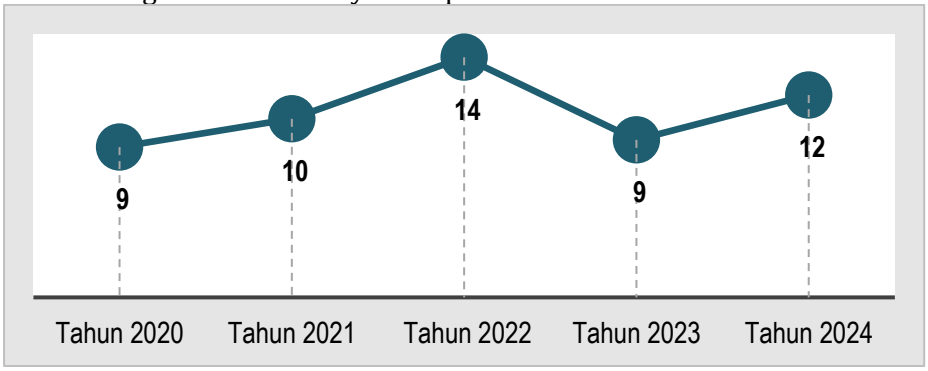

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025

Angka kematian bayi di Kabupaten Sikka cenderung fluktuatif sejak tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 9/1000 kasus kematian bayi dari kelahiran hidup sebanyak 5.250. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat kasus kematian bayi sebesar 10/1000 dari total 5.014 kelahiran hidup bayi. Pada Tahun 2022, AKB sebesar 14/1000 dari 4.823 kelahiran hidup. Tahun 2023 AKB sebesar 9/1000 dari 4.343 kelahiran Hidup. Dan pada tahun 2024 terdapat 12/1000 kasus kematian bayi dari 4.075 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi di Kabupaten Sikka adalah asfiksia, BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), kelainan bawaan, sepsis, pneumonia dan penyebab lain.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka. Angka kematian ibu menggambarkan jumlah ibu atau wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) Tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.43
Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

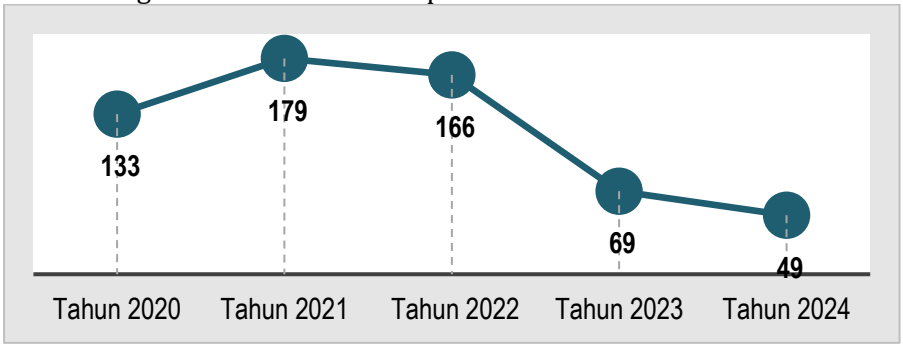

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025

Angka kematian ibu di Kabupaten Sikka pada tahun 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif dengan tren penurunan di tahun-tahun terakhir. Angka kematian ibu di Kabupaten Sikka pada tahun 2020 sebesar 133/100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 179/100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi sekitar 166/100.000 kelahiran hidup. Tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 69/100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu terus menurun hingga tahun 2024 dengan 49/100.000 kelahiran hidup.

Balita Gizi Buruk

Pengukuran status gizi didasarkan atas *Standar World Health Organization* (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Ant ropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB).

Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat dipengaruhi oleh gizi yang didapatkan. Gizi yang seimbang dapat menunjang proses tumbuh kembang anak dan akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas gizi yang diterima dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang saling terkait, seperti kesehatan buruk, kualitas SDM yang rendah, hingga daya saing. Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U).

Permasalahan gizi dapat terjadi pada semua kelompok umur, namun perlu lebih diperhatikan pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun, merupakan masa tumbuh kembang yang optimal (*golden period*), terutama untuk pertumbuhan janin, gangguan pada masa ini yang tidak terpenuhi tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.44
Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

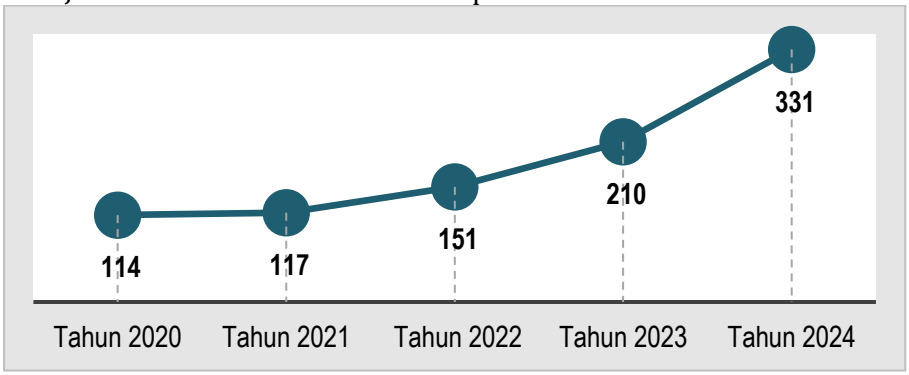

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka 2025

Dari hasil pengukuran status gizi pada balita 0-59 bulan, didapatkan prevalensi permasalahan gizi di Kabupaten Sikka pada tahun 2020 sebanyak 114 balita yang mengalami gizi buruk, pada tahun 2021 kasus balita gizi buruk mengalami sedikit kenaikan sebesar 117. Kenaikan yang cukup besar terus terjadi di tahun 2022 dengan 151 kasus, tahun 2023 dengan 210 kasus, dan puncaknya pada tahun 2024 dengan 331 kasus. Masalah kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Sikka terus menjadi prioritas utama bagi pemerintah Kabupaten. Penyebabnya adalah pola asuh yang salah dalam keluarga, akses air minum yang layak masih rendah, kurangnya akses sanitasi atau jamban sehat di setiap rumah yang ada di Kabupaten Sikka, kemampuan ekonomi keluarga yang rendah serta kemampuan dalam mengelola pangan lokal untuk makanan bergizi yang masih sangat rendah.

Sarana Kesehatan dan Paramedis

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh beberapa jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sikka. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan bidan desa, sedangkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari klinik, Rumah Sakit, apotek, laboratorium dan fasilitas kesehatan lainnya.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan Dasar atau sosial untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi termasuk Keluarga Berencana, imunisasi bagi para balita gizi dan penanggulangan diare. Konsep Posyandu Siklus Hidup (Integrasi Layanan Primer - ILP) baru mulai diterapkan di Kabupaten Sikka pada tahun 2024. Periode sebelumnya, yaitu 2020-2023, dilaksanakan Posyandu Aktif di Kabupaten Sikka. Sarana Kesehatan dan Paramedis Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Sarana Kesehatan dan Paramedis Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase posyandu siklus hidup yang aktif	-	-	-	-	99,7
2	Persentase Posyandu Aktif	61,3	68,9	73,2	92,4	-
3	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (per 100.000 penduduk)					
	Dokter spesialis	6	7	7	7	8
	Dokter umum	16	19	20	19	13
	Dokter gigi	2	2	2	2	3
	Perawat	249	247	273	296	230

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Bidan	204	189	252	247	217
4	Cakupan Desa UCI	90	95	84,7	95	80,9
5	Persentase Desa STBM	34	36	40,6	49	51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020, Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Sikka adalah 61,3 persen. Angka ini terus menunjukkan peningkatan yang stabil menjadi 68,9 persen pada tahun 2021, 73,2 persen pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya di 92,4 persen pada tahun 2023. Pada tahun pertama pelaksanaan Posyandu siklus hidup, capaian yang aktif langsung mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 99,7 persen. Ini mengindikasikan transisi dan adaptasi yang cepat terhadap model posyandu yang lebih komprehensif, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi dari lahir hingga lanjut usia.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah ukuran yang digunakan untuk menilai ketersediaan tenaga medis dalam suatu wilayah atau negara. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak tenaga medis yang tersedia untuk memberikan layanan kesehatan kepada penduduk. Rasio tenaga medis per satuan penduduk dapat bervariasi antar negara dan wilayah, tergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan kesehatan, distribusi geografis penduduk, tingkat kesehatan, dan faktor-faktor lainnya. Rasio ini dapat dihitung untuk berbagai jenis tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Desa UCI (*Universal Child Immunization*) adalah desa/kelurahan dimana 90 persen jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Cakupan Desa UCI di Kabupaten Sikka menunjukkan fluktuasi, dari 90 persen (2020) menjadi 95 persen (2021), turun ke 84,7 persen (2022), kembali ke 95 persen (2023), dan sedikit menurun menjadi 80,9 persen pada tahun 2024. Capaian ini penting untuk menjaga kekebalan komunitas anak.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan pembangunan sanitasi yang menekankan pada perubahan perilaku higienis masyarakat melalui beberapa langkah, yaitu *stop* buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Persentase desa yang telah mencapai STBM adalah indikator penting dalam mengukur keberhasilan upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Pada tahun 2020, persentase desa STBM tercatat sebesar 34 persen, terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 36 persen, tahun 2022 mencapai 40,6 persen, tahun 2023 mencapai 49 persen, dan pada tahun 2024, persentase desa STBM kembali meningkat menjadi 51 persen. Dengan capaian akhir yang melampaui 50 persen, ini mengindikasikan adanya komitmen dan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta praktik sanitasi yang lebih baik. Namun, masih ada separuh desa yang belum mencapai status STBM.

Kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan makanan minuman

Kualitas kesehatan keluarga yang rendah di suatu daerah seringkali merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu yang berkontribusi pada masalah ini adalah ketersediaan, kualitas, dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, serta pengawasan makanan dan minuman. Ini adalah elemen krusial yang secara langsung memengaruhi kemampuan keluarga untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan mendapatkan penanganan yang tepat. Ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang kurang optimal dapat menghambat program-program pencegahan penyakit (misalnya imunisasi atau program gizi yang

membutuhkan vitamin/ suplemen) serta penanganan kasus penyakit yang membutuhkan peralatan khusus. Akibatnya, penyakit menjadi tidak terdeteksi dini atau tidak tertangani dengan baik, memperburuk kondisi kesehatan keluarga. Kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan makanan minuman Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase cakupan sediaan farmasi	100	100	100	92,5	93,33
Persentase cakupan pemenuhan alat kesehatan sesuai standar	34,77	41,36	45,56	46,26	42,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025

Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman di Kabupaten Sikka, dilihat dari persentase cakupan sediaan farmasi, dan persentase cakupan pemenuhan alat kesehatan sesuai standar. Pada tahun 2020, 2021, dan 2022, persentase cakupan sediaan farmasi di Kabupaten Sikka mencapai 100 persen. Ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, ketersediaan sediaan farmasi secara umum sangat baik. Namun pada tahun 2023, angka ini menurun menjadi 92,5 persen dan sedikit peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 93,33 persen. Persentase cakupan pemenuhan alat kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 adalah 34,77 persen. Angka ini menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, yaitu 41,36 persen pada tahun 2021, 45,56 persen pada tahun 2022, dan 46,26 persen pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 42,2 persen. Ini memberikan gambaran bahwa persentase cakupan pemenuhan alat kesehatan yang sesuai standar masih relatif rendah, bahkan setelah mengalami peningkatan, kemudian menunjukkan penurunan di tahun terakhir.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sikka menunjukkan sejumlah capaian kinerja strategis dalam kurun waktu 2021–2024, sebagaimana tergambar dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dilaporkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Sikka. IKK ini mencerminkan kualitas layanan dasar infrastruktur dan keterhubungan ruang wilayah sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 2.105
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Kunci	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar	*)	*)	56,40	56,79
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	46,25	46,25	46,25	47,47
Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	43,74	53,51	54,71	56,41
Akses Sanitasi Layak	49,34	50,97	51,28	51,03
Panjang drainase dalam kondisi baik	61,67	64,94	64,94	65,36
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	56,75	63,56	63,66	54,17
Kualitas Jembatan dalam Kondisi Baik	100	100	100	100

Keterangan: *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, 2025

Salah satu indikator utama adalah Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar, yang mulai tercatat pada tahun 2023 dengan capaian 56,40 dan mengalami peningkatan menjadi 56,79 pada tahun 2024. Meskipun peningkatannya relatif moderat, tren ini menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas infrastruktur dasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Kualitas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik berada pada posisi stagnan di angka 46,25 persen selama tiga tahun berturut-turut dari 2021 hingga 2023, kemudian mengalami

sedikit peningkatan menjadi 47,47 persen di tahun 2024. Pergerakan yang lambat ini menunjukkan bahwa sektor irigasi memerlukan perhatian khusus, baik dalam hal revitalisasi jaringan irigasi maupun peningkatan manajemen sistem pengairan untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum menunjukkan tren positif yang cukup signifikan. Pada 2021, cakupan akses berada pada level 43,74 persen, dan terus meningkat setiap tahun, hingga mencapai 56,41 persen pada 2024. Capaian ini mengindikasikan adanya intervensi kebijakan dan program infrastruktur air bersih yang berjalan cukup efektif.

Selanjutnya, akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Pada 2021 akses sanitasi layak sebesar 49,34 persen dan terus mengalami peningkatan setiap tahun, hingga pada 2024 mencapai 51,03 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya dan intervensi kebijakan dan program yang konsisten dalam pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat.

Panjang drainase dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan positif, dari 61,67 km pada 2021 menjadi 64,94 km pada 2022 dan 2023, kemudian naik lagi ke 65,36 km pada 2024. Tren ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam pembangunan dan perawatan infrastruktur drainase, yang esensial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pengendalian banjir.

Capaian persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik menunjukkan penurunan selama periode tersebut. Dari 56,75 km pada 2021, terdapat lonjakan signifikan ke 63,56 km pada 2022 dan stabil di angka 63,66 km pada 2023. Namun, pada tahun 2024, angka ini menurun kembali ke 57,75 km. Penurunan ini perlu dicermati sebagai sinyal awal akan kebutuhan pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas jalan secara lebih sistematis.

Untuk indikator Kualitas Jembatan dalam Kondisi Baik, Kabupaten Sikka menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 100 persen secara konsisten sepanjang 2021 hingga 2024. Hal ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjamin konektivitas antar wilayah, khususnya di wilayah dengan topografi dan sebaran permukiman yang menantang.

Secara keseluruhan, kinerja urusan PUPR Kabupaten Sikka memperlihatkan arah yang relatif positif dengan beberapa indikator yang stabil dan bahkan menunjukkan peningkatan, khususnya pada sektor air minum dan drainase. Namun, beberapa indikator seperti panjang jalan dalam kondisi baik dan kualitas irigasi memerlukan evaluasi dan perencanaan strategis untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian dalam perencanaan periode berikutnya.

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sikka memiliki peran strategis dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap hunian layak, akses sanitasi, dan lingkungan permukiman yang sehat. Dalam periode 2021–2024, kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka tergambar melalui beberapa indikator utama yang menunjukkan capaian pembangunan bidang perumahan dan permukiman secara terukur dan berkelanjutan.

Tabel 2.106
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Kunci	2021	2022	2023	2024
Persentase KK yang Menempati Rumah Layak Huni	53,41	60,69	60,69	76,06
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	49,34	50,97	51,28	51,03
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	0,39	1,40	1,76	1,76

Indikator Kinerja Kunci	2021	2022	2023	2024
Luas pengurangan kumuh setelah diintervensi	6,28 ha	6,28 ha	6,28 ha	6,28 ha
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	73,96	74,74	74,24	76,06
Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik	1,44%	94,77%	94,77%	*)
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	43,74	53,51	54,71	56,41
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	28.187	34.478	35.254	36.585
Persentase jalan lingkungan yang dibangun	0,55%	*)	*)	*)

Keterangan: *) = tidak dilakukan perhitungan

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, 2025

Indikator Persentase Kepala Keluarga (KK) yang Menempati Rumah Layak Huni mencerminkan keberhasilan program peningkatan kualitas rumah tinggal masyarakat. Capaian indikator ini mengalami peningkatan signifikan dari 53,41 persen pada tahun 2021 menjadi 60,69 persen pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan paling menonjol terjadi pada tahun 2024, dengan lonjakan menjadi 76,06 persen. Tren ini menunjukkan keberhasilan intervensi pemerintah daerah melalui program bantuan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni secara progresif dan tepat sasaran.

Berdasarkan data persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Sikka pada periode 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan yang relatif lambat dan belum signifikan. Pada tahun 2021, akses sanitasi layak baru menjangkau 49,34 persen rumah tangga, kemudian meningkat menjadi 50,97 persen pada 2022. Kenaikan ini berlanjut tipis pada 2023 sebesar 51,28 persen, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 51,03 persen pada 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi perbaikan secara bertahap, upaya percepatan perlu terus diperkuat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur sanitasi yang layak, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor agar target akses sanitasi universal dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sikka.

Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak juga mengalami peningkatan dari 73,96 persen pada tahun 2021 menjadi 74,74 persen di 2022, meski sedikit menurun ke 74,24 persen di 2023. Namun, pada 2024 terjadi peningkatan kembali yang menyamai capaian rumah layak huni, yakni 76,06 persen. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa program penataan kawasan permukiman telah berjalan dengan harmonis dan selaras dengan tujuan pembangunan perumahan yang inklusif.

Sementara itu, Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Listrik menunjukkan lompatan sangat drastis dari 1,44 persen pada tahun 2021 menjadi 94,77 persen di tahun 2022 dan mempertahankan capaian tersebut hingga 2023. Hal ini mengindikasikan adanya transformasi signifikan dalam perluasan layanan elektrifikasi, yang sangat esensial untuk meningkatkan kualitas hidup dan akses terhadap pelayanan dasar. Namun, ketiadaan data untuk tahun 2024 perlu menjadi perhatian dalam perbaikan sistem pelaporan dan pengawasan ke depan.

Di sisi lain, jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak juga meningkat dari 28.187 rumah tangga di tahun 2021 menjadi 36.585 rumah tangga pada 2024. Jika dilihat dari proporsi terhadap total rumah tangga, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak mengalami tren positif: 43,74 persen pada 2021, naik menjadi 53,51 persen pada 2022, 54,71 persen pada 2023, dan mencapai 56,41 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan air minum yang layak dan aman.

Indikator Persentase Jalan Lingkungan yang Dibangun juga menunjukkan angka sangat rendah, yaitu 0,55 persen pada tahun 2021 dan tidak terdapat data pada tahun-tahun berikutnya. Rendahnya capaian ini menandakan adanya keterbatasan dalam pembangunan

prasarana lingkungan pendukung permukiman, yang berdampak pada kualitas aksesibilitas serta integrasi kawasan hunian dengan jaringan pelayanan umum.

Sementara itu, indikator Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan belum memiliki data dari tahun 2021 hingga 2024. Ketiadaan data ini menyulitkan evaluasi terhadap upaya penanganan kawasan kumuh dan berpotensi menghambat penetapan kebijakan berbasis bukti dalam penataan wilayah kota.

Secara keseluruhan, capaian IKK Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada indikator-indikator utama seperti rumah layak huni dan layanan listrik, namun masih menghadapi tantangan besar pada penyediaan air minum, pembangunan jalan lingkungan, serta pengelolaan data kawasan kumuh. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan penguatan sistem informasi perumahan dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong tata kelola permukiman yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Sikka.

5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tingkat kejahatan rendah dan suasana yang aman membuat warga dan pengunjung merasa nyaman beraktivitas. Ketentraman mengacu pada keadaan di wilayah atau masyarakat berada dalam keadaan damai, tenang dan bebas dari gangguan atau ancaman yang dapat menimbulkan ketidakamanan atau kecemasan. Ketertiban umum mengacu pada keadaan di mana masyarakat mematuhi aturan, norma, dan hukum yang berlaku. Hal ini seperti perilaku warga yang tidak melanggar norma-norma sosial atau hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang teratur, terkendali dan aman bagi seluruh anggota masyarakat. Perlindungan masyarakat merujuk pada upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi keamanan, hak dan kesejahteraan warga dari potensi ancaman atau bahaya baik dari faktor internal maupun eksternal.

Keseluruhan Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi yang signifikan dalam tingkat kriminalitas selama periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat tindakan keamanan dan pencegahan kejahatan di Kabupaten Sikka ini. Pihak berwenang perlu melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab fluktuasi ini dan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sikka. Selanjutnya akan dibahas terkait indikator Kinerja yang berhubungan dengan Trantibulinmas, berikut datanya:

Tabel 2.107
Indikator Kinerja Satpol PP Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Persen)	100	100	100	100	100
Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100
Angka Kriminalitas (Jumlah Tindak Pidana)	80	190	286	286	67
Persentase perda dan perkada yang ditegakan	55,55	44,44	33,33	33,33	55,55
Persentase penyelenggarann trantibumlinmas	370.76	315,55	60	170	223,33
Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (2025)

Kabupaten Sikka memiliki tingkat penyelesaian penyelenggaraan K3 yang bagus dalam lima tahun terakhir, begitu juga dengan penegakan Perda dan cakupan perlindungan masyarakat. Hal ini menunjukan upaya yang telah dikeluarkan dalam penegakan hukum memperlihatkan hasil serta komitmen dan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam mengelola dan mempertahankan standar tinggi terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta kepatuhan terhadap aturan hukum setempat. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sikka. Hal ini juga bisa dilihat

dari angka kriminalitas tindak pidana yang kemudian menurun secara drastis menjadi 67 di tahun 2024, setelah tahun-tahun sebelumnya berada di angka ratusan. Hal ini diikuti dengan persentase penegakan perda dan perkada yang juga turut meningkat di tahun 2024. Dalam hal pelaksanaan kewajiban dalam penyelenggaraan trantibulinmas, sebagaimana telah disebutkan kinerja yang telah dilakukan mendorong nilai penyelenggaraan menjadi di angka 223,33 persen. Sehingga Kabupaten Sikka dalam hal keamanan di masyarakat sudah sangat terjamin, meski dapat dilakukan peningkatan dalam penegakkan tidak hanya perda tapi juga perkada. Meskipun terjadi penurunan, Kabupaten Sikka tetap perlu berhati-hati, sebab di tahun 2025 secara nasional Polri menyebutkan bahwa Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mengalami lonjakan yang signifikan. Sehingga masih diperlukan upaya untuk menjaga dan memperkuat keamanan di Kabupaten Sikka. Kinerja Damkar dan BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.108
Indikator Kinerja Damkar dan BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	20%	30%	40%	50%	60%
Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
Respon cepat	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penanganan pasca bencana	*)	*)	*)	30%	30%
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan: *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: BPBD Kabupaten Sikka (2025)

Dalam hal terkait bencana dapat dilihat bahwa penanganan bencana Kabupaten Sikka sudah sangat baik, terbukti dari tingginya cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran, Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Respon cepat dan Persentase penanganan tanggap darurat bencana. Hal ini kemudian diperkuat dengan sudah adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam menghadapi bencana dan kebakaran. Namun demikian, Kabupaten Sikka masih punya tanggungan untuk meningkatkan penanganan pasca bencana. Terutama dengan melihat bahwa memang Kabupaten Sikka memiliki resiko bencana alam yang tinggi, tidak hanya itu mitigasi risiko terkait bencana pun masih perlu ditekankan, serta masih butuhnya sarana dan prasarana untuk menghadapi bencana dan kebakaran.

Tabel 2.109
Indikator Kinerja Kesbangpol Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Berakhlak	*)	*)	*)	61,7	65,5
Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	80%
Cakupan partai politik yang dibina	100%	100%	100%	100%	92,86%

Keterangan: *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Kesbangpol Kabupaten Sikka, 2025

Pada hal masalah kemasyarakatan, masalah konflik sosial sudah terselesaikan dengan sangat baik, hanya saja ada sedikit penurunan di tahun 2024 dimana tidak semua konflik sosial dapat diselesaikan. Hal ini patut menjadi pertimbangan lembaga karena kemudian Kabupaten Sikka memiliki potensi konflik sosial yang kecil antar suku, budaya ataupun antar agama. Namun demikian, Kabupaten Sikka juga mendapatkan dukungan baik dari tokoh agama maupun masyarakat, berupa komitmen untuk menjaga ketertiban di wilayah. Pada pelaksanaanya, sudah terdapat berbagai forum di Kabupaten Sikka yang telah dimanfaatkan baik dalam hal urusan kemasyarakatan, di antaranya seperti forum kerukunan umat beragama, kewaspadaan dini, dan pembauran kebangsaan di masyarakat. Kehadiran forum ini diharapkan tidak hanya memperkuat trantibulinmas masyarakat, namun juga menjadi

wadah dimana masyarakat dapat berkontribusi kepada daerah dalam sektor keamanan dan ketertiban. Sehingga, trantibulinmas yang dicapai juga menjadi salah satu bagian dari usaha mandiri masyarakat.

6) Urusan Sosial

Pemberdayaan sosial Untuk SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan sosial merupakan upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan lembaga dalam menangani masalah sosial serta membangun kemandirian. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan sosial mengatasi persoalan sosial dan membangun kapasitas masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Sikka, upaya pemberdayaan ini melibatkan berbagai elemen penting, seperti Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang menjadi ujung tombak pelayanan sosial di lapangan. Pemberdayaan sosial Untuk SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.110
Pemberdayaan Sosial untuk SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	TAGANA	57	61	57	54	54
2	PKH	76	72	74	76	69
3	TKSK	21	21	21	21	21

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2025

Jumlah atau capaian TAGANA menunjukkan fluktuasi dalam periode lima tahun ini (2020-2024). Jumlah TAGANA berfluktuasi dari 57 di tahun 2020, mencapai 61 di tahun 2021, lalu menurun dan stagnan di 54 pada tahun 2023-2024. Sama halnya dengan TAGANA, capaian Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan pola naik-turun. Capaian PKH dari 76 (2020) menjadi 69 (2024), dengan puncak di tahun 2023 (76). Fluktuasi ini dapat mengindikasikan dinamika dalam kepesertaan, validasi data, atau efektivitas penyaluran program di lapangan. Sedangkan, Ketersediaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menunjukkan konsistensi yang stabil. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah TKSK di Kabupaten Sikka stabil di angka 21. Konsistensi ini menunjukkan adanya keberlanjutan dukungan terhadap tenaga inti yang berada di garis depan pelayanan sosial di tingkat kecamatan.

Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan jaminan sosial merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Intervensi pemerintah daerah dalam bentuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan memastikan bahwa bantuan dan dukungan menjangkau mereka yang paling membutuhkan termasuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang terkena dampak bencana). Penyediaan bantuan sosial, seperti makanan dan kebutuhan dasar, merupakan komponen utama dari upaya ini. Penanganan bantuan sosial berdasarkan data yang berhasil dihimpun, menunjukkan dinamika yang beragam. Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.111
Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Jenis PMKS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Fakir Miskin	280.026	225.221	220.125	211.996	201.055
2	Anak Terlantar	3	87	656	52	282
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	40	92	44	33	57
4	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	*)	*)	40	*)	*)
5	Lanjut Usia Terlantar	70	70	136	39	37
6	Penyandang Disabilitas	95	47	141	81	110
7	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	35	103	20	NA	NA
8	Korban Trafficking	23	25	27	27	14
9	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	*)	*)	*)	*)	20

Keterangan: *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2025

Jumlah fakir miskin yang terlayani menunjukkan tren penurunan dari 280.026 jiwa pada tahun 2020 menjadi 201.555 jiwa pada tahun 2024. Ini bisa mengindikasikan penurunan angka kemiskinan atau perubahan dalam data sasaran. Untuk anak terlantar, angkanya sangat fluktuatif, dari 3 (2020) menjadi 87 (2021), melonjak ke 656 (2022), menurun drastis ke 52 (2023), dan kembali naik ke 282 (2024). Fluktuasi juga terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum, dari 40 (2020) menjadi 92 (2021), turun ke 44 (2022), kemudian 33 (2023), dan naik lagi menjadi 57 (2024). Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) tercatat terdapat 40 anak pada tahun 2022, namun tidak ada data untuk tahun lain dikarenakan tidak dilakukan pengolahan data disabilitas secara terpilah. Lanjut usia terlantar mengalami penurunan dari 70 (2020 dan 2021) menjadi 39 (2023) dan 37 (2024), setelah sempat naik menjadi 136 (2022). Penyandang disabilitas mengalami fluktuasi dari 95 (2020) menjadi 47 (2021), meningkat tajam ke 141 (2022), lalu menurun ke 81 (2023) dan kembali naik ke 110 (2024). Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menunjukkan penurunan drastis dari 35 (2020) menjadi 20 (2022 dan 2023) dan tidak ada data untuk 2024, setelah sempat naik ke 103 (2021). Sedangkan, korban trafficking mengalami angka yang relatif stabil di 23-27 kasus dari 2020-2023, namun menurun menjadi 14 kasus pada tahun 2024. Perempuan rawan sosial ekonomi terdapat 20 orang pada tahun 2024, sedangkan pada tahun sebelumnya tidak ada data.

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah upaya terpadu untuk memulihkan fungsi sosial individu, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial akibat berbagai permasalahan, seperti disabilitas, keterlantaran, atau dampak sosial lainnya. Di Kabupaten Sikka, data menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai cakupan yang memadai. Dari data capaian rehabilitasi sosial di Kabupaten Sikka masih sangat rendah untuk ketiga kelompok rentan yang disasar (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar) di luar panti. Rendahnya capaian rehabilitasi sosial ini berkontribusi pada rendahnya kualitas kesejahteraan sosial di Kabupaten Sikka. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.112
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Rehabilitasi Sosial	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	3,45	0,94	5,16	3,40	4,10
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	0,33	3,14	0,08	2,41	0,38
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	0,21	0,04	0,12	0	0,08

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2025

Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti tercatat sebesar 3,45 persen pada tahun 2020, menurun pada tahun 2021 menjadi 0,94 persen. Terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 5,16 persen, kemudian kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 3,40 persen, dan pada tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 4,10 persen. Secara garis besar, angka ini sangat rendah yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi melalui program rehabilitasi sosial. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, pada tahun 2020 tercatat 0,33 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 3,14 persen, kemudian menurun drastis pada tahun 2022 menjadi 0,08 persen. Kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 2,41 persen, namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 0,38 persen. Fluktuasi yang ekstrem dan angka yang sangat rendah ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak terlantar di luar panti belum mendapatkan intervensi yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sedangkan, persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti pada tahun 2020 sebesar 0,21 persen dan menurun pada tahun 2021 menjadi 0,04 persen. Pada tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan menjadi 0,12 persen dan pada tahun 2023 tercatat 0 persen, kemudian kembali sedikit meningkat menjadi 0,08 persen pada tahun 2024. Angka yang mendekati nol secara konsisten ini menunjukkan bahwa kelompok lanjut usia terlantar di luar panti adalah kelompok yang paling minim mendapatkan sentuhan program pemenuhan kebutuhan dasar melalui rehabilitasi sosial.

Tingkat Perlindungan Korban Bencana

Kabupaten Sikka, sebagaimana daerah lain di Indonesia, tidak luput dari ancaman bencana, baik alam maupun sosial. Perlindungan terhadap korban bencana merupakan prioritas utama dalam upaya menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Kesiapsiagaan dan respons yang cepat serta efektif adalah kunci untuk meminimalisir dampak negatif bencana. Data mengenai tingkat perlindungan korban bencana di Kabupaten Sikka dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran tentang dinamika penanganan bencana di daerah tersebut. Tingkat Perlindungan Korban Bencana Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.113
Tingkat Perlindungan Korban Bencana Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Perlindungan Bencana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Korban Bencana Alam	920	**)	6.747	459	4.826
2	Korban Bencana Sosial	898	**)	128	89	163
3	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	**)	**)	0,61	0,30	0,36

Keterangan: **) = data tidak tersedia
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2025

Pada tahun 2020, jumlah korban bencana alam tercatat sebanyak 920 jiwa, sedangkan data untuk tahun 2021 tidak tersedia, kemudian terjadi peningkatan drastis pada tahun 2022 menjadi 6.747 jiwa. Angka tersebut menurun signifikan pada tahun 2023 menjadi 459 jiwa dan pada tahun 2024 jumlah korban bencana alam kembali meningkat menjadi 4.826 jiwa. Fluktuasi yang tajam ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sikka seringkali dihadapkan pada kejadian bencana alam yang berdampak pada jumlah penduduk yang besar. Untuk korban bencana sosial, pada tahun 2020 terdapat 898 korban, sedangkan data untuk tahun 2021 tidak tersedia, kemudian jumlah korban bencana sosial menurun

drastis menjadi 128 jiwa pada tahun 2022. Angka ini terus menurun menjadi 89 jiwa pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 163 jiwa. Penurunan secara umum pada korban bencana sosial mengindikasikan upaya yang mungkin lebih efektif dalam resolusi konflik atau pencegahan masalah sosial.

Berdasarkan data korban bencana alam dan dan sosial, cukup tinggi jumlah korban yang terdampak bencana alam maupun bencana sosial di Kabupaten Sikka. Hal ini memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan masyarakat akan bencana. Sejak tahun 2020 hingga 2024, persentase korban bencana (alam, sosial, dan/atau non alam) yang terpenuhi kebutuhan dasar di Kabupaten Sikka berhasil mencapai 100 persen dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana. Capaian yang konsisten ini menunjukkan komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam memberikan respons cepat dan bantuan yang memadai kepada masyarakat yang terdampak bencana. Sedangkan persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya, data baru tersedia mulai tahun 2022. Pada tahun 2022, persentasenya adalah 0,61 persen, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 0,30 persen, dan sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,36 persen. Angka yang masih sangat rendah ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana masih memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih serius.

7) Urusan Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dapat dipandang sebagai refleksi perekonomian dari wilayah tersebut. Sehingga perubahan perekonomian yang terjadi pada suatu wilayah akan berdampak pada masalah ketenagakerjaan yang diantaranya berkaitan dengan masalah pasar kerja di wilayah itu. Kondisi pasar kerja tersebut merupakan elemen penting dalam penentuan permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Permintaan terhadap barang dan jasa ini selanjutnya akan menentukan permintaan terhadap pekerja yang berarti juga memengaruhi sisi penawaran pekerja. Selain itu, perubahan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin menentukan siapa yang berpotensi masuk dalam pasar kerja, disamping mutu pendidikan juga memengaruhi pasar kerja. Secara teoritis, ketenagakerjaan (khususnya sisi penawaran tenaga kerja) dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk jumlah penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan riil dan distribusinya, angka upah riil, struktur ekonomi, partisipasi dalam sistem pendidikan, kebiasaan atau tradisi peran kerja dan partisipasi kerja. Tanpa pertambahan penduduk sekalipun, sebagian besar angkatan kerja di masa mendatang kini sudah lahir.

Penempatan Tenaga Kerja

Sektor ketenagakerjaan merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinamika pasar kerja, penempatan, penyerapan tenaga kerja, hingga isu perselisihan hubungan industrial menjadi cerminan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri menunjukkan angka di bawah 1 persen dari tahun 2022 hingga 2024. Sedangkan, persentase tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri juga masih sangat kecil, meskipun ada sedikit peningkatan dari 0,03 persen (2020) menjadi 0,30 persen (2024). Ini menunjukkan belum optimalnya penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Hubungan Industrial dan Perlindungan Pekerja

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun menunjukkan tren penurunan yang baik, dari 45 sengketa di tahun 2020 dan 2021, meningkat sedikit di 2022 menjadi 55 sengketa, namun turun drastis menjadi 15 sengketa di tahun 2024. Penurunan ini bisa mengindikasikan membaiknya komunikasi atau mekanisme penyelesaian sengketa. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, konsisten berada

di angka 100 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Persentase perusahaan yang memiliki RTK (Regulasi Ketenagakerjaan) mengalami fluktuasi rendah antara 1,04 persen hingga 2,66 persen. Hal ini menunjukkan masih banyak perusahaan yang belum memiliki regulasi ketenagakerjaan internal yang resmi. Perihal keselamatan dan perlindungan, jumlah individu yang menerima keselamatan dan perlindungan melonjak sangat tinggi pada tahun 2023 sebesar 28.523 orang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sekitar 2.000-an, dan menurun pada tahun 2024 menjadi 7.139 orang. Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial menunjukkan angka yang berfluktuasi rendah antara 2,43 persen hingga 3,78 persen. Ini mengindikasikan bahwa penerapan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di tingkat pemberi kerja masih sangat minim. Sedangkan persentase tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 32,25 persen (2020) menjadi 41,73 persen (2024). Meskipun ada peningkatan, capaian tersebut masih dibawah 50 persen yang mengindikasikan masih ada lebih dari separuh tenaga kerja yang hak-hak dasarnya belum terlindungi.

Tabel 2.114

Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	45	45	55	44	15
2	Keselamatan dan perlindungan	2.086	2.286	2.486	28.523	7.139
3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase perusahaan yang memiliki RTK	1,79	2,66	1,75	2,09	1,04
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	-	-	0,78	0,74	0,73
6	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri	0,03	0,02	0,12	0,23	0,30
7	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar negeri	2,49	3,35	2,43	3,78	3,72
8	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi HakHak Dasarnya	32,25	34,17	34,99	36,76	41,73
9	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	47,54	52,71	51,97	52,03	52,20

Sumber: Dinas Nakertrans, 2025

Pemberdayaan dan kapasitas transmigran

Program transmigrasi memiliki tujuan mulia untuk pemerataan penduduk, pengembangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk para transmigran itu sendiri. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari penempatan transmigran, tetapi juga dari sejauh mana mereka dibina dan diberdayakan untuk menjadi bagian yang mandiri dan produktif dalam komunitas baru. Tanpa pembinaan dan pemberdayaan yang efektif, transmigran mungkin akan kesulitan untuk mengoptimalkan potensi lahan atau sumber daya yang tersedia, sehingga kemampuan ekonomi mereka terbatas. Hal ini dapat menghambat mereka untuk mencapai kemandirian dan justru dapat menimbulkan ketergantungan.

Data persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan di Kabupaten Sikka memberikan gambaran mengenai efektivitas program pasca-penempatan. Berdasarkan dari data yang berhasil dihimpun dari Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka (2025), tercatat persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan sebesar 4,91 persen pada tahun 2022, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 2,47 persen. Sedangkan data untuk tahun 2020, 2021, dan 2023 tidak tersedia dalam informasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan kondisi yang masih sangat rendah, bahkan cenderung menurun dalam rentang waktu yang tersedia (2022-2024). Capaian yang kurang dari 5 persen ini mengindikasikan bahwa sebagian besar transmigran belum mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengembangkan kapasitas diri dan kemandirian ekonomi di lokasi baru mereka.

Di Kabupaten Sikka, meskipun program transmigrasi telah berjalan, data terbaru mengindikasikan bahwa pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi masih rendah, yang secara langsung berdampak pada tingkat

kesejahteraan mereka. Data dari Dinas Nakertrans (2025) menunjukkan potret yang mengkhawatirkan mengenai kondisi ekonomi keluarga transmigran di dua Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) utama, yaitu UPT Ojang dan UPT Lewomada. Di dapatkan data Jumlah Keluarga Transmigran (KK) yang Menetap, terdapat total 85 KK transmigran yang secara resmi telah ditetapkan untuk menetap di dua UPT tersebut. Jumlah ini merepresentasikan populasi transmigran yang seharusnya telah mulai membangun kehidupan baru dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Jumlah Keluarga Miskin Transmigran, dari 85 KK transmigran yang menetap, sebanyak 54 KK diidentifikasi sebagai keluarga miskin. Sehingga Persentase Keluarga Miskin Transmigran yaitu 63,52 persen. Ini berarti hampir dua pertiga dari seluruh keluarga transmigran yang menetap di UPT Ojang dan UPT Lewomada masih berada dalam kondisi kemiskinan. Persentase kemiskinan yang sangat tinggi di kalangan transmigran ini adalah indikator kuat bahwa program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas yang ada belum efektif atau belum menjangkau mayoritas transmigran.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Upaya pembangunan manusia terdapat istilah mengenai pembangunan berbasis gender yang mencakup pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Keberhasilan sebuah pembangunan memiliki ketergantungan pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan terhadap akses yang setara beserta kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat yang diperoleh dapat secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin terlihat di semua bidang pembangunan, baik pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial maupun politik. Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. Namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, Keterlibatan perempuan di parlemen, dan Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi (Kemen-PPPA, 2020). Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Sikka meskipun bervariatif cenderung naik dan turun, namun masih rendah. IDG Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.45
IDG Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

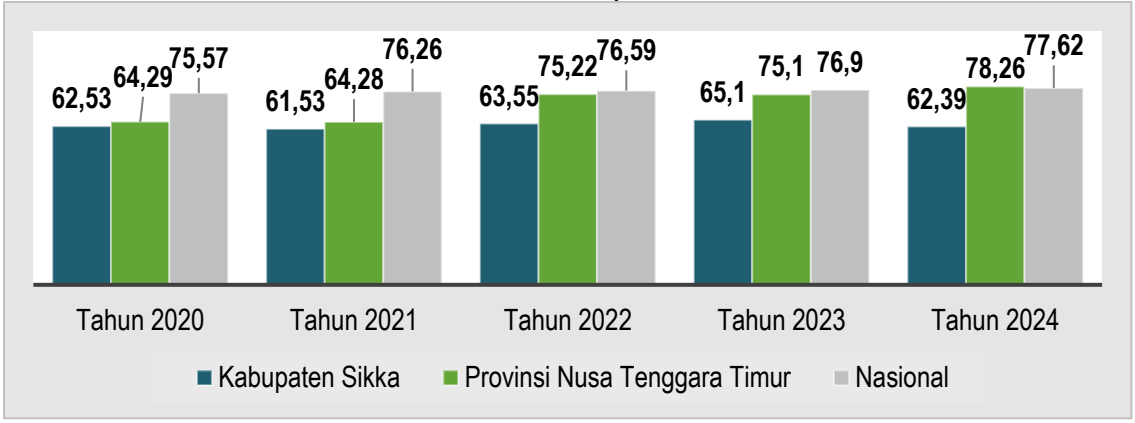

Sumber: BPS, 2025

Dari tahun 2020-2024 angka IDG Kabupaten Sikka mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Sikka adalah sebesar 62,53 dan mengalami penurunan menjadi 61,53 pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 63,55 pada tahun 2022. Tren peningkatan terus berlanjut menjadi 65,1 pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 62,39. Angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IDG nasional dan Provinsi NTT yang masing-masing memperoleh nilai sebesar 76,59 dan 75,10.

Kemiskinan, Pernikahan Dini, kriminalitas hingga kekerasan pada anak dan kekerasan berbasis gender merupakan beberapa hambatan bagi para perempuan dan anak agar dapat memiliki kebebasan dalam berpartisipasi dan mendapatkan haknya dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi perempuan dan anak seringkali menjadi barometer kemajuan sosial suatu daerah. Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115

Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio KDRT	0,12	0,11	0,1	**)	0,01
2.	Prevalensi Kasus Kekerasan Anak	6,1	5,6	5,1	**)	6,93

Keterangan: **) = data tidak tersedia

Sumber: Dinas P2KBP3A, 2025

Kondisi di Kabupaten Sikka menunjukkan masih terdapat kasusnya kekerasan pada anak sebanyak 6,1 persen kasus pada tahun 2020, terjadi penurunan di tahun 2021 dan di tahun 2022 menjadi 5,1 persen. Kemudian mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2024 sebesar 6,93 persen kasus kekerasan anak di Kabupaten Sikka. Kasus KDRT pun masih terjadi di Kabupaten Sikka, tercatat rasio KDRT pada tahun 2020 sebesar 0,12 dan kemudian menurun di tahun 2021 dan 2022 menjadi 0,1. Data rasio KDRT tahun 2023 tidak tersedia, namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 0,01. Penurunan rasio KDRT, khususnya di tahun 2024, merupakan kondisi positif yang menunjukkan upaya-upaya penanganan dan pencegahan KDRT mungkin mulai membuahkan hasil, atau ada peningkatan kesadaran dan pelaporan kasus.

Pembangunan aspek gender juga tercermin dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kemandirian. Tingkat IPM yang rendah di Kabupaten Sikka sejalan dengan kurangnya kesempatan yang setara bagi perempuan di wilayah tersebut untuk mengakses pendidikan. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.46

Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

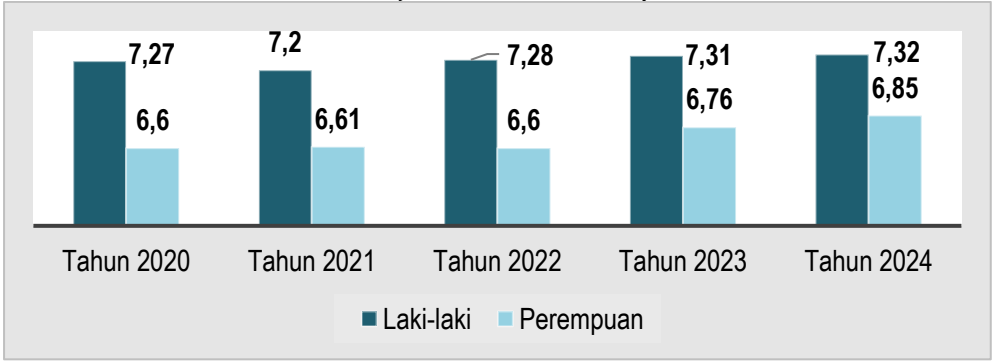

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka. 2025

Data menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh penduduk perempuan di Kabupaten Sikka lebih rendah daripada penduduk laki-laki, seperti tercermin dari Rata-rata Lama Sekolah perempuan yang selalu lebih rendah daripada laki-laki dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, Rata-rata Lama Sekolah untuk laki-laki mencapai 7,32 tahun, sementara untuk perempuan hanya 6,85 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki di Kabupaten Sikka cenderung menempuh pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi, setara dengan kelas dua sekolah menengah pertama, sedangkan perempuan hanya mencapai tingkat pendidikan setara dengan kelas satu sekolah menengah pertama.

Kurangnya rata-rata tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk perempuan dibandingkan dengan laki-laki di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa masih ada sebagian perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan mereka, sehingga pendidikan perempuan di wilayah tersebut dapat dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini selaras dengan data tingkat partisipasi sekolah untuk penduduk di atas 25 tahun. Perempuan di Kabupaten Sikka mengalami tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas dengan Pendidikan SMA Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.47

Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas dengan Pendidikan SMA Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

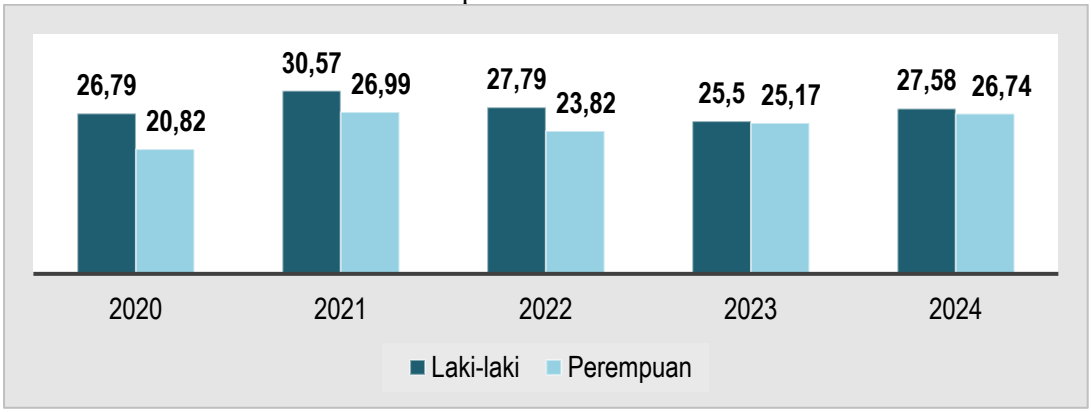

Sumber: NTT Dalam Angka. 2025

Data menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Sikka yang telah menyelesaikan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) atau lebih tinggi, baik pada laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan namun masih didominasi oleh laki-laki sejak tahun 2020 hingga 2024. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan kesetaraan kesempatan pendidikan bagi perempuan di Kabupaten Sikka, meskipun trennya positif.

Meskipun demikian, perempuan di Kabupaten Sikka memiliki harapan untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terlihat dalam data lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa harapan lama sekolah perempuan di Kabupaten Sikka lebih tinggi daripada laki-laki. Pada tahun 2024, harapan lama sekolah perempuan mencapai 13,55 tahun, setara dengan akhir Sekolah Menengah Atas (usia 13-14 tahun), sementara harapan lama sekolah laki-laki adalah 13,97 tahun (usia mendekati 14 tahun) (lihat Gambar 2.48).

Gambar 2.48
Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

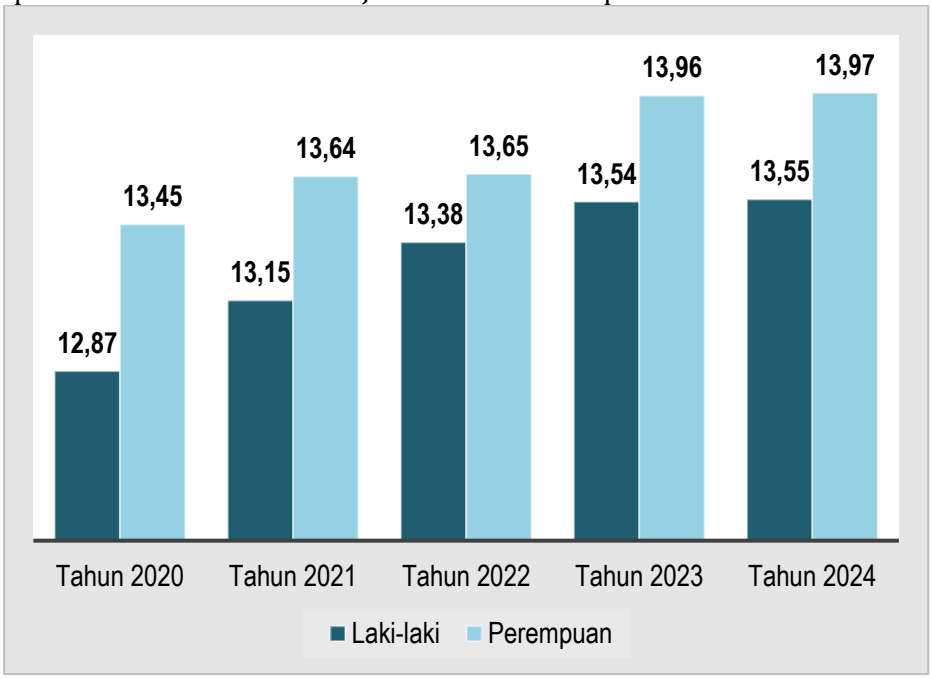

Sumber: NTT dalam Angka. 2025

Dari perspektif kemandirian ekonomi, perempuan di Kabupaten Sikka juga menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih rendah daripada laki-laki sejak tahun 2020 hingga 2024. Namun, terdapat peningkatan pada tahun 2022 hingga 2024 dalam hal pengeluaran, baik perempuan maupun laki-laki. Pada tahun 2022, pengeluaran rata-rata laki-laki mencapai Rp. 12.631, sedangkan perempuan mencapai Rp. 6.464, kemudian meningkat menjadi Rp. 6.670 pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi Rp. 6.951 pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa kemandirian ekonomi perempuan di Kabupaten Sikka mulai mendekati tingkat yang sebanding dengan laki-laki (lihat Gambar 2.49).

Gambar 2.49
Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

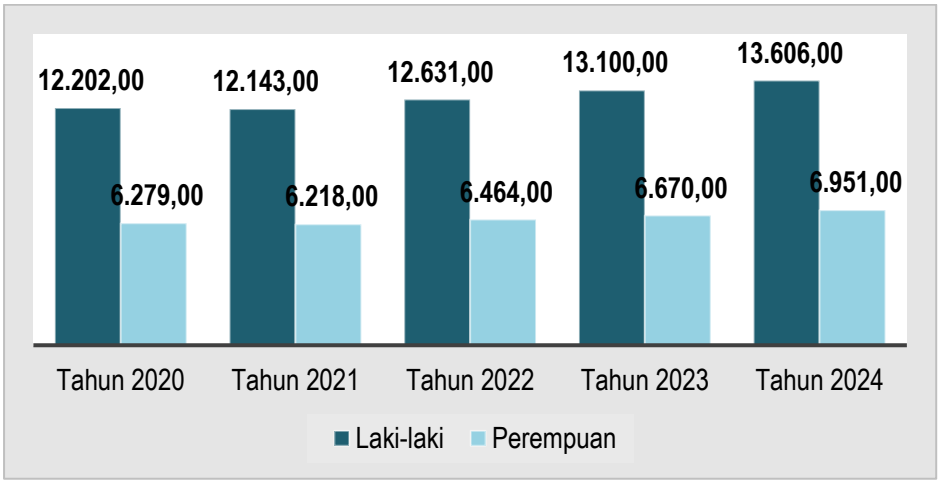

Sumber: NTT dalam Angka, 2025

Pendidikan bagi perempuan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian pribadi, tetapi juga memiliki manfaat yang signifikan bagi keluarga dan masyarakat secara luas. Peran aktif perempuan dalam proses pembangunan tercermin melalui partisipasinya dalam dunia kerja, yang merupakan indikator yang jelas dan dapat dianalisis secara langsung. Meskipun demikian, perempuan cenderung lebih banyak terlibat dalam pekerjaan yang tidak tergolong dalam kategori yang berubah atau yang dilakukan di luar rumah, sehingga kadang kala kontribusi mereka dalam dunia kerja tidak terlihat secara mencolok.

Gambar 2.50
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

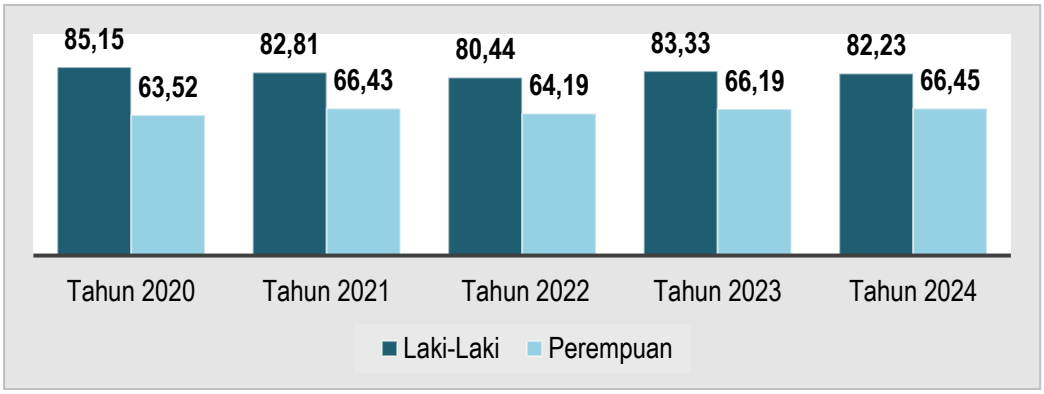

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2025

Perempuan di Kabupaten Sikka yang belum mencapai tingkat kemandirian juga dipengaruhi oleh rendahnya upaya pemberdayaan terhadap mereka. Tingkat pemberdayaan yang rendah disebabkan oleh minimnya partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sikka, baik dalam hal pemahaman tentang politik maupun aktif terlibat dalam kegiatan politik. Kurangnya pemberdayaan juga berdampak pada kesulitan bagi perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan menjadi pekerja profesional yang mandiri secara finansial.

Kesetaraan gender dan perlindungan anak

Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan mensyaratkan adanya kesetaraan gender dan perlindungan yang kuat bagi anak-anak. Pemberdayaan perempuan dan jaminan hak-hak anak adalah investasi penting untuk masa depan suatu daerah. Di Kabupaten Sikka, data dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di Kabupaten Sikka. Namun, masih terdapat beberapa data yang belum tersedia yaitu Persentase pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar, dan Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2024 yang belum dirilis.

Tabel 2.116
Kinerja Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	4	22,41	4	3	1
2.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	100	100

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	**)	**)	**)	**)	**)
4.	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100	100	100	100	100
5.	Skor Kabupaten Layak Anak	**)	490	174,95	96,55	**)
6.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	100	100

Keterangan: **) = data tidak tersedia
Sumber: Dinas P2KBP3A, 2025

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) mengalami fluktuasi yang ekstrem dan penurunan yang konsisten sejak tahun 2021 hingga 2024. Persentase ARG pada tahun 2020 adalah 4 persen, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 22,41 persen. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 kembali menjadi 4 persen, terus menurun pada tahun 2023 menjadi 3 persen, dan pada tahun 2024, persentase ini semakin merosot tajam menjadi 1 persen. Hal ini mengindikasikan komitmen anggaran untuk program-program yang secara eksplisit mendukung kesetaraan gender masih sangat rendah dan tidak stabil.

Persentase perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif, menunjukkan konsistensi yang sangat baik dari tahun 2020 hingga 2024, persentase ini selalu mencapai 100 persen. Ini menunjukkan bahwa setiap perempuan korban kekerasan dan TPPO yang teridentifikasi di Kabupaten Sikka berhasil mendapatkan layanan komprehensif yang mereka butuhkan. Sedangkan data Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar tidak tersedia.

Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan juga menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten. Dari tahun 2020 hingga 2024, tingkat pemanfaatan data selalu mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam berbasis data untuk merumuskan kebijakan terkait gender dan anak.

Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) menunjukkan tren penurunan, dimana pada tahun 2021 skornya adalah 490, menurun drastis pada tahun 2022 menjadi 174,95 dan terus menurun pada tahun 2023 menjadi 96,55. Penurunan skor KLA yang signifikan ini mengindikasikan bahwa upaya Kabupaten Sikka dalam memenuhi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang layak bagi anak-anak masih sangat perlu ditingkatkan.

Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif juga menunjukkan capaian yang konsisten mencapai 100 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Ini merupakan pencapaian yang positif yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Kabupaten Sikka mampu memberikan layanan komprehensif kepada setiap anak yang memerlukan perlindungan khusus.

9) Urusan Pangan

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan pokok akan pangan. Untuk mengetahui ketersediaan pangan, informasi mengenai pengadaan pangan menjadi penting. Ketersedian pangan mencakupi produksi, Pasokan, Cadangan pangan dan bantuan Pangan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan suatu wilayah atau negara. Pengukuran tingkat ketahanan pangan dilakukan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan tingkat ketersediaan dan kualitas gizi dan variasi pola konsumsi penduduk.

Kebutuhan pangan yang cukup tinggi tersebut, ternyata sebagian besar dipenuhi oleh pasokan dari luar daerah. Sumber utama pemasok pangan untuk Sikka tercatat adalah Jawa dan Sulawesi. Dari data yang disajikan terlihat bahwa yang mampu dipenuhi oleh daerah hanya sekitar 10 persen sampai 15 persen. Angka ini mengirimkan pesan yang sangat kuat betapa besar risiko yang dihadapi oleh Kabupaten Sikka, jika sesuatu terjadi di daerah pemasok ataupun rantai distribusi terhambat. Risiko tersebut tidak hanya karena pasokan dari luar daerah, bahkan risiko rawan pangan juga muncul dari dalam daerah. Diberitakan oleh media massa bahwa pada tahun 2023 terdapat 4 desa di Sikka mengalami rawan pangan akibat kekeringan.

Tabel 2.117
Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan Per Kapita Per Tahun
Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Tahun	Kebutuhan Pangan (Kg)	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Produksi (Kg)	Ketersediaan Pangan dari Luar Daerah (Kg)	Ketersediaan Pangan (Ton)
2020	108,6	31	217	248
2021	111,5	21	271	292
2022	106,3	20	225	245
2023	108,3	21,75	139,62	161,37
2024	107,2	21,87	185,69	207,56

Sumber: Statistik Ketahanan Pangan 2020-2024 (Badan Ketahanan Pangan)

Berdasar tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketercukupan pangan dapat dipenuhi dengan baik, jauh melebihi kebutuhannya. Dilihat dari aspek kebutuhan pangan per kapita, penduduk Kabupaten Sikka relatif lebih tinggi dari angka nasional. Berdasar data BPS tahun 2022, rata rata kebutuhan konsumsi pangan per berkisar pada angka 90 kg per tahun, namun penduduk Sikka membutuhkan lebih dari 100 kg. Namun demikian dilihat dari perkembangannya angka kebutuhan itu terus menunjukkan penurunan, angka ini mengindikasikan terus meningkatnya diversifikasi pangan.

Ketersediaan pangan yang bergantung pada pasokan dari luar daerah itu dikonfirmasi oleh nilai skor PPH ketersediaan Kabupaten Sikka yang juga relatif rendah. Ketika nasional telah mencapai angka di atas 90, karena terus mengalami peningkatan, Kabupaten Sikka tetap berada pada angka 65,2. Angka skor PPH ketersediaan ini dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, angka ini menyatakan bahwa ketergantungan Sikka terhadap bahan pangan dari luar semakin tinggi.

Tabel 2.118
Skor PPH Ketersediaan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional
Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Sikka	Provinsi NTT	Nasional
2020	77,42	80,54	86,30
2021	65,2	69,54	96,7
2022	65,2	65,23	92,9
2023	89,5	75,28	94,1
2024	83,9	72,38	93.5

Sumber: Statistik Ketahanan Pangan 2020-2024 (Badan Ketahanan Pangan)

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai panduan untuk masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. PPH didasarkan pada prinsip bahwa pola makan yang seimbang dan beragam adalah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah terjadinya berbagai penyakit. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan

untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. PPH mengacu pada kebutuhan gizi yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi kesehatan internasional lainnya. PPH menekankan pentingnya mengkonsumsi berbagai macam makanan dari berbagai kelompok pangan, termasuk sumber karbohidrat kompleks (seperti beras,gandum, dan umbi-umbian), protein nabati dan hewani, lemak sehat, sayuran, buah-buahan, dan susu serta produk olahannya. Prinsip utama yang menjadi dasar PPH ini adalah keseimbangan proporsi pangan, variasi atau ragamnya, frekuensi dan porsi makan serta kualitas makanan. Semua itu merupakan kesatuan yang dapat mendukung tercapainya PPH. Dalam perspektif konsumsi, skor PPH Kabupaten Sikka juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT maupun Nasional. Dilihat dari tren yang terjadi, skor PPH Kabupaten Sikka terus mengalami penurunan, sejalan dengan penurunan yang terjadi di Provinsi NTT. Kecenderungan penurunan trend skor PPH ini menunjukkan bahwa diversifikasi pangan di Sikka semakin memburuk. Diversifikasi yang makin buruk harus menjadi perhatian karena dampak dari kondisi pangan yang semakin buruk akan berdampak luas pada kesehatan secara keseluruhan.

10) Urusan Pertanahan

Pertanahan dalam suatu wilayah mengacu pada area atau kawasan tertentu di wilayah yang memiliki dokumentasi resmi berupa sertifikat sebagai bukti legal atas kepemilikan atau hak atas tanah yang mencakup informasi terkait luas dan batas-batas tertentu dari tanah tersebut. Sertifikat ini menunjukkan bahwa pihak yang tercatat dalam dokumen tersebut memiliki hak sah untuk memiliki, mengelola, atau menggunakan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sertifikat ini berperan penting dalam menjamin kepastian hukum terkait kepemilikan dan penggunaan tanah di wilayah tersebut. Permasalahan terkait sertifikat kemudian berpotensi menyebabkan sengketa, tidak hanya itu adanya pendataan yang baik terkait tanah akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan, terutama apabila pembangunan tersebut menggunakan lahan yang ditempati masyarakat. Kinerja Pertanahan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119
Kinerja Pertanahan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Sengketa Tanah Garapan	1	1	2	3	3
Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	1	2	3	3
Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Pembangunan	0	5	1	8	7

Sumber: Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka Tahun 2024- 2026

Pada rentang tahun 2019 hingga 2024, Kabupaten Sikka berhasil menyelesaikan seluruh kasus sengketa tanah garapan yang ada. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen dan efisiensi pihak berwenang dalam menangani masalah kepemilikan tanah yang terkait dengan status hukum negara. Dengan tingkat penyelesaian 100 persen berarti semua sengketa atau permasalahan terkait tanah negara telah diatasi dan diselesaikan dengan baik selama periode tersebut. Hal ini mencerminkan upaya keras untuk memastikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah di wilayah Sikka, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Meski demikian, Kabupaten Sikka masih belum mempunyai data terkait dengan sertifikat tanah yang penting dalam mengatur urusan pertanahan. Adanya data ini akan memungkinkan peningkatan kinerja dan

perencanaan urusan pertanahan, terutama apabila dikaitkan dengan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan pada beberapa tahun kedepan.

11) Urusan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan hidup di Kabupaten Sikka tahun 2020–2024 mencerminkan capaian pembangunan lingkungan yang terus berkembang, meskipun menghadapi tantangan pada aspek tertentu. Perbaikan tampak pada peningkatan kualitas udara dan kemampuan pengelolaan sampah, namun kualitas air dan tutupan lahan menunjukkan fluktuasi. Hal ini mencerminkan perlunya konsistensi kebijakan, investasi teknologi, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tabel 2.120
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,88	60,60	68,98	75,44	72,82
Indeks Kualitas Air	53,75	53,45	50,00	60,00	53,33
Indeks Kualitas Udara	90,30	91,67	92,37	93,30	93,72
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,59	41,17	65,66	68,91	67,60
Timbulan Sampah Terolah di fasilitas pengolahan sampah	274.464 Kg	334.944 Kg	338.400 Kg	784.800 Kg	1.119.744 Kg
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	2.95%	3.47%	4.09%	4.81%	5.65%
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	*)	*)	*)	*)	15,50

Keterangan : *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, terdapat berbagai perkembangan signifikan dalam kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sikka menunjukkan tren positif meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Setelah turun dari 67,88 (2020) menjadi 60,60 (2021), IKLH meningkat tajam ke angka 75,44 pada 2023, sebelum sedikit menurun ke 72,82 pada 2024. Secara umum, tren ini mencerminkan perbaikan kualitas lingkungan yang cukup signifikan.

Komponen utama dari IKLH menunjukkan dinamika yang beragam. Indeks Kualitas Udara menunjukkan peningkatan konsisten dari 90,30 (2020) menjadi 93,72 (2024), yang mengindikasikan perbaikan dalam pengendalian polusi udara. Sebaliknya, Indeks Kualitas Air cenderung fluktuatif dan relatif stagnan, dengan angka yang tidak jauh berbeda dari awal periode (53,75 pada 2020 dan 53,33 pada 2024), meskipun sempat naik menjadi 60,00 pada 2023. Ini menunjukkan bahwa kualitas air masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sikka mengalami penurunan signifikan pada 2021 (41,17), namun pulih kembali dan meningkat hingga mencapai 68,91 pada 2023, sebelum sedikit menurun ke 67,60 pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan dalam pemulihan tutupan lahan, meski masih diperlukan upaya untuk menjaga kestabilannya.

Dalam hal pengelolaan sampah, terdapat kemajuan signifikan. Timbulan sampah yang berhasil diolah di Kabupaten Sikka meningkat tajam dari 274.464 kg (2020) menjadi 1.119.744 kg (2024), menunjukkan peningkatan hampir empat kali lipat. Selaras dengan itu, proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah juga meningkat secara bertahap dari 2,95 persen (2020) menjadi 5,65 persen (2024). Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya juga dicatat Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dengan nilai 15,50, yang dapat menjadi dasar evaluasi dan penguatan kebijakan pengelolaan sampah ke depan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama pada aspek udara dan pengolahan sampah. Namun demikian, kualitas air dan cakupan layanan pengumpulan sampah masih menjadi area yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi Kependudukan sebagai sistem pengelolaan dan pemeliharaan data penduduk. Tentunya ini mencakup berbagai kegiatan terkait dengan identifikasi, registrasi, dan pemeliharaan catatan tentang individu yang tinggal di suatu wilayah khususnya di Kabupaten Sikka, termasuk penduduk asli, pendatang, serta mereka yang lahir atau meninggal di wilayah tersebut. Administrasi kependudukan juga meliputi pemberian dan pemeliharaan dokumen-dokumen identifikasi resmi, seperti kartu identitas, akte kelahiran, dan lain sebagainya.

Tabel 2.121
Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan E-KTP	95,92	94,34	95,51	99,03	100
Persentase Kepemilikan KIA	20,37	34,54	34,96	36,63	40,76
Persentasi Aktivasi IKD	*)	*)	*)	0,01	0,03
Persentase Akta Kematian	100	100	100	100	100
Persentase Akta Kelahiran	44,48	45,35	46,33	47,17	47,69
Persentase Akta Perkawinan	43,39	49,15	51,63	53,6	55,69
Persentase Akta Perceraian	19,33	22,13	29,1	31,75	34,02
Jumlah informasi kependudukan yang dimanfaatkan	*)	*)	6 OPD	6 OPD	9 OPD
Cakupan pengelolaan profil kependudukan	1	1	1	1	1

Keterangan : *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, 2025

Dalam kepemilikan dokumen kependudukan seperti E-KTP dan akta kematian, Disdukcapil Kabupaten Sikka sudah mempunyai angka yang bagus dengan pencapaian angka mendekati 100 persen untuk kepemilikan E-KTP dan 100 persen untuk angka kematian. Hal ini menunjukkan bawah pengukuran masyarakat utamanya yang sudah ada di atas batas umur sudah sangat baik. Namun, angka ini perlu dicermati kembali dengan melihat kepemilikan KIA, akta kelahiran, akta perceraian dan akta perkawinan yang angkanya masih di kisaran 50 persen atau di bawah angka tersebut. Masih diperlukannya usaha dari Disdukcapil untuk dapat meningkatkan pencatatan tersebut. Terutama dalam hal akta kelahiran dan perceraian yang jumlahnya jauh di bawah 50 persen. Akta kelahiran merupakan identitas seseorang yang didasarkan pada hukum, pada dasarnya hal ini tidak hanya berkaitan pada administrasi, tapi juga untuk keperluan pembangunan daerah. Akta kelahiran merupakan sebuah kebutuhan untuk mendapatkan akses layanan dasar, serta pencetakan dokumen administrasi lainnya. Dalam peningkatan akta ini dapat diciptakan strategi perencanaan yang tepat sasaran dengan angka yang akurat. Tidak hanya itu, semakin banyak punya jumlah informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh beragam OPD setiap tahunnya.

Gambar 2.51
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kependudukan Kabupaten Sikka
Tahun 2022-2024

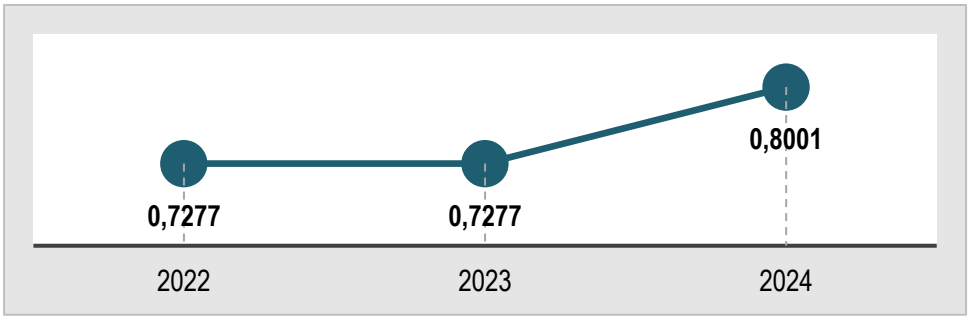

Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, 2025

Terkait pelayanan kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Sikka sudah mempunyai pelayanan yang sangat baik, terutama dengan peningkatan pesat di tahun 2024 yang awalnya ada di kisaran 70 persen, menjadi 80 persen. Sehingga dengan meningkatnya IKM ini menunjukkan kualitas pelayanan yang sudah cukup bagus, serta pelayanan administrasi dijalankan tidak hanya sesuai dengan proses bisnisnya, tapi juga dengan efektif dan efisien sehingga menimbulkan rasa kepuasan dari sisi masyarakat. Namun demikian, hal ini masih memiliki kesempatan untuk lebih ditingkatkan.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Pemberdayaan Masyarakat

Data capaian pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sikka dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan beberapa indikator yang mencerminkan perkembangan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan diri. Pertama, rata-rata jumlah kelompok binaan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) cukup stabil dalam 5 tahun terakhir, namun dalam 5 tahun belum terlihat LPM yang berprestasi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap dorongan dan dukungan bagi LPM untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan agar dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Kedua, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga cukup stabil dan menunjukkan adanya konsistensi dan kekuatan keterlibatan dari PKK dalam pemberdayaan keluarga dan menggerakkan kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, terdapat partisipasi aktif dari kelompok PKK serta peningkatan partisipasi dalam dua tahun terakhir dari Posyandu yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.122
Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Pemberdayaan Masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 181
2.	Jumlah kelompok binaan PKK	3741	3741	3741	3741	3741
3.	Jumlah LSM	4	4	4	4	4
4.	LPM Berprestasi	0	0	0	0	0
5.	PKK aktif	169	169	169	169	169
6.	Posyandu aktif	628	650	650	650	591

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data fasilitasi kerja sama desa di Kabupaten Sikka, terlihat adanya beragam tingkat partisipasi desa dalam menjalin kerja sama antar desa maupun dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan sosial dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Analisis dari data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan fokus dan partisipasi desa terhadap berbagai isu tematik. Hingga saat ini, dari seluruh desa di Kabupaten Sikka, tercatat sebanyak 181 desa telah melaksanakan kerja sama dalam upaya penekanan angka AIDS, TBC, dan Malaria (ATM). Angka ini sangat dominan dan mencerminkan bahwa isu kesehatan menular masih menjadi prioritas dan perhatian utama di tingkat desa. Hal ini menunjukkan kesadaran kolektif serta dukungan kebijakan daerah dalam menanggulangi penyakit menular yang mengancam masyarakat secara luas. Besarnya jumlah ini juga dapat mencerminkan keberhasilan fasilitasi pemerintah daerah dalam membangun jaringan kerja sama desa untuk penanganan masalah kesehatan.

Sebaliknya, kerja sama desa dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) hanya melibatkan 5 desa, menandakan masih rendahnya kesadaran atau kapasitas desa dalam menjadikan pendidikan sebagai agenda kerja sama lintas desa. Padahal, ATS merupakan salah satu indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan rendahnya angka kerja sama ini menunjukkan perlunya intervensi strategis dari pemerintah daerah, khususnya dalam membangun kemitraan antara desa, sekolah, dan lembaga non-formal pendidikan.

Program Desa Ramah Perempuan dan Anak melibatkan 45 desa, jumlah yang relatif moderat. Hal ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran dan kepedulian terhadap isu gender dan perlindungan anak, namun belum merata di seluruh wilayah. Masih dibutuhkan dukungan regulatif dan penguatan kelembagaan untuk memperluas jangkauan program ini secara menyeluruh. Sementara itu, kerja sama dalam kegiatan Desa Cerdas baru mencakup 15 desa, yang menunjukkan bahwa transformasi digital, literasi teknologi, dan inovasi layanan publik berbasis digital masih berada pada tahap awal di sebagian besar desa. Hal ini mengindikasikan tantangan dalam hal infrastruktur, SDM, maupun pemahaman terhadap manfaat teknologi informasi bagi tata kelola pemerintahan desa yang lebih efisien.

Terakhir, kerja sama desa dalam kegiatan Desa Inklusi baru dilakukan oleh 4 desa, mencerminkan masih rendahnya integrasi prinsip inklusi sosial dalam perencanaan dan pembangunan desa. Ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan advokasi agar lebih banyak desa dapat melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal dalam proses pembangunan.

Tabel 2.123
Data Fasilitasi Kerja Sama Desa

No	Data Fasilitasi Kerjasama Desa	Jumlah Desa
1.	Jumlah Desa Yang melaksanakan Kerjasama dalam Melaksanakan Kegiatan Desa Cerdas	15
2.	Jumlah Desa Yang melaksanakan Kerjasama dalam Melaksanakan Kegiatan Desa Inklusi	4
3.	Jumlah Desa Yang melaksanakan Kerjasama dalam Melaksanakan Kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Anak	45
4.	Jumlah Desa Yang melaksanakan Kerjasama dalam Melaksanakan Kegiatan Penekanan Angka AID, TBC dan Malaria (ATM)	181
5.	Jumlah Desa Yang melaksanakan Kerjasama dalam Melaksanakan Kegiatan Penurunan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan

pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa. IDM mengidentifikasi status desa dalam cakupan survei dengan lima status yakni Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Perkembangan IDM Kabupaten Sikka selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.124
Indeks Desa Membangun Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Status IDM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Desa Sangat Tertinggal	21	13	2	10	5
2.	Desa Tertinggal	73	63	45	47	46
3.	Desa Berkembang	45	57	79	95	82
4.	Desa Maju	8	14	21	26	38
5.	Desa Mandiri	0	0	0	3	10
	Jumlah	147	147	147	181	181

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Analisis terhadap perkembangan IDM Kabupaten Sikka selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya tren positif dalam pembangunan desa, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan lima tahun ke depan.Secara umum, jumlah desa dengan status sangat tertinggal mengalami penurunan signifikan dari 21 desa pada tahun 2020 menjadi hanya 5 desa pada tahun 2024. Demikian pula, desa tertinggal juga menurun dari 73 desa pada tahun 2020 menjadi 46 desa pada tahun 2024. Penurunan jumlah desa dengan status paling rendah ini mencerminkan adanya peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Sementara itu, jumlah desa berkembang menunjukkan tren peningkatan cukup tajam dari 45 desa pada tahun 2020 menjadi puncaknya 95 desa pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 82 desa pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa berada pada fase transisi menuju kemajuan, tetapi masih membutuhkan penguatan dari sisi ekonomi produktif dan tata kelola pemerintahan desa.

Jumlah desa maju dan desa mandiri juga terus meningkat, menunjukkan arah yang progresif dalam pembangunan desa. Desa maju bertambah dari hanya 8 desa pada tahun 2020 menjadi 38 desa pada tahun 2024. Bahkan, pada tahun 2024, Kabupaten Sikka mencatatkan 10 desa mandiri, padahal pada tiga tahun sebelumnya belum ada desa yang mencapai kategori ini. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan yang dilaksanakan mulai menunjukkan hasil di sejumlah desa, terutama dalam aspek kelembagaan, layanan dasar, dan partisipasi masyarakat.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa terjadi perubahan total jumlah desa yang tercatat dari 147 desa pada tahun 2020–2022 menjadi 181 desa pada tahun 2023 dan 2024. Ini menunjukkan adanya pemekaran wilayah administratif desa yang harus disikapi dengan perencanaan pembangunan desa yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan lokal. Kemudian jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan di Kabupaten Sikka tidak ada perubahan jumlah yaitu tercatat pada tahun 2020-2024 terdapat 50 Lembaga Adat.

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengelola pertumbuhan populasi dalam wilayah khususnya di Kabupaten Sikka. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber daya yang tersedia, sehingga dapat memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Keluarga yang berkualitas ditandai dengan

perencanaan yang matang dalam hal jumlah anak, kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan hak-hak dasar setiap anggota keluarga.

Tabel 2.125
Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	2,60	2,50	2,40	2,30	2,20
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,62	1,9	2,20	2,20	2,18
3.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	2,81	2,49	2,6	2,6	2,5
4.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR)	65,57	65,84	65,91	65,98	40
5.	Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	20,50	22,40	22,80	23,50	24,70

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2025

Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR) menunjukkan tren penurunan yang konsisten di Kabupaten Sikka. Pada tahun 2020 tercatat 2,60 dan terus menurun menjadi 2,50 di tahun 2021, mencapai 2,40 di tahun 2022, menurun menjadi 2,30 di tahun 2023, dan mencapai 2,20 di tahun 2024. Penurunan ASFR ini mencerminkan keberhasilan upaya edukasi kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan dini, yang merupakan fondasi penting bagi keluarga berkualitas.

Total Fertility Rate di Kabupaten Sikka menunjukkan fluktuasi, namun secara umum berada di kisaran yang relatif stabil. Pada tahun 2020 tercatat TFR adalah 2,62 dan sempat menurun menjadi 1,9 di tahun 2021, kemudian meningkat kembali menjadi 2,20 di tahun 2022 dan 2023, dan sedikit menurun menjadi 2,18 di tahun 2024. TFR yang mendekati angka sekitar 2,1 anak per perempuan, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk cenderung terkendali, memungkinkan keluarga untuk lebih fokus pada kualitas pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Sikka juga menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Dimulai dari 2,81 anak per keluarga di tahun 2020, turun menjadi 2,49 di tahun 2021, kemudian sedikit meningkat menjadi 2,6 di tahun 2022 dan 2023, dan kembali turun ke 2,5 di tahun 2024. Penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga mendukung konsep keluarga kecil bahagia dan berkualitas, karena orang tua dapat memberikan perhatian dan sumber daya yang lebih optimal bagi setiap anak.

Capaian *Modern Contraceptive* (mCPR) menunjukkan keberhasilan yang baik di tahun-tahun awal, namun mengalami penurunan drastis di tahun terakhir. Pada tahun 2020, mCPR adalah 65,57 persen dan meningkat hingga 65,98 persen di tahun 2023. Namun pada tahun 2024, angka ini menurun signifikan menjadi 40 persen. Penurunan signifikan ini merupakan alarm untuk pemerintah Kabupaten Sikka, karena penggunaan kontrasepsi modern adalah pilar utama dalam perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Dimulai dari 20,50 persen di tahun 2020, terus kemudian meningkat menjadi 22,40 persen di tahun 2021, sedikit meningkat menjadi 22,80 persen di tahun 2022, terus meningkat menjadi 23,50 persen di tahun 2023, dan mencapai 24,70 persen di tahun 2024. Peningkatan unmet need ini mengindikasikan bahwa semakin banyak pasangan usia subur di Kabupaten Sikka yang sebenarnya ingin menunda atau membatasi kehamilan, tetapi tidak memiliki akses atau tidak menggunakan metode KB yang efektif.

Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)

Keluarga merupakan unit terkecil sekaligus fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas sebuah keluarga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga

dari ketahanan dan keberfungsiannya dalam menjalankan peran-peran sosial, kesehatan, pendidikan, dan spiritual. Untuk mengukur dimensi kompleks ini, digunakan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks ini menjadi tolok ukur penting dalam upaya pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sikka, untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dinas P2KBP3A (2025), capaian iBangga di Kabupaten Sikka pada tahun 2021 tercatat sebesar 48,53 kemudian meningkat menjadi 49,09 pada tahun 2022, dan meningkat kembali yang cukup besar pada tahun 2023, di mana nilai iBangga mencapai 55,49. Meskipun data untuk tahun 2020 dan 2024 tidak tersedia, tren peningkatan dari 2021 ke 2023, terutama di tahun 2023, merupakan capaian yang positif bahwa upaya pembangunan keluarga di Kabupaten Sikka mulai menunjukkan hasil. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam dimensi-dimensi yang membentuk kualitas keluarga, seperti dimensi ketahanan keluarga, dimensi keberfungsian keluarga, dan dimensi dukungan keluarga.

Peningkatan nilai iBangga, yang merupakan gabungan dari berbagai dimensi, secara spesifik mengindikasikan bahwa sub-indikator di dalamnya juga mengalami perbaikan. Salah satu indikator proksi yang sangat relevan dengan iBangga dan secara langsung mencerminkan kualitas keluarga adalah Indeks Ketahanan Keluarga. Indeks Ketahanan Keluarga mengukur kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari berbagai tantangan, serta memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anggotanya. Periode selanjutnya, pembangunan keluarga di Kabupaten Sikka akan menggunakan indikator Indeks Ketahanan Keluarga untuk membangun fondasi masyarakat yang lebih kuat dan sejahtera dari unit terkecilnya, yaitu keluarga berkualitas.

Keluarga Sejahtera(KS)

Keluarga adalah fondasi masyarakat. Keluarga yang sejahtera dan berkualitas merupakan cerminan dari pembangunan yang berhasil, dimana setiap anggotanya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu strategi kunci untuk mencapai hal ini adalah melalui pemberdayaan keluarga itu sendiri dan peran serta aktif masyarakat dalam berbagai kelompok kegiatan ketahanan keluarga. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat fungsi keluarga dari dalam dan menciptakan lingkungan yang mendukung.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas P2KBP3A, yaitu Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sikka pada tahun 2020 masih di angka 0,00 persen. Ini menunjukkan bahwa pada awal periode, inisiatif atau partisipasi dalam kegiatan semacam ini belum berjalan. Terjadi peningkatan yang sangat kecil pada tahun 2021 menjadi 0,05 persen, terlihat adanya peningkatan yang lebih signifikan menjadi 4,09 persen pada tahun 2022, kemudian berlanjut pada tahun 2023 menjadi 7,02 persen dan pada tahun 2024 capaian kembali meningkat menjadi 10,59 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam partisipasi keluarga di Kabupaten Sikka dalam kelompok kegiatan ketahanan keluarga, terutama dalam tiga tahun terakhir (2022-2024). Meskipun angka 10,59 persen di tahun 2024 masih tergolong relatif kecil dibandingkan total keluarga, kenaikan yang signifikan dari angka nol di tahun 2020 mengindikasikan adanya upaya sistematis dan kesadaran yang mulai tumbuh di masyarakat.

Selain membangun Keluarga Sejahtera (KS), pemerintah Indonesia juga menginisiasi program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang kini berkembang menjadi Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri. Program ini merupakan miniatur pembangunan keluarga yang terintegrasi di tingkat desa/kelurahan, melibatkan berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari hulu hingga hilir. Di Kabupaten Sikka, komitmen terhadap program ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada periode 2020 hingga 2023, jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri di Kabupaten Sikka tercatat sebanyak 28 kampung. Pada tahun 2024,

terjadi peningkatan yang pesat dengan Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri meningkat drastis menjadi 194 kampung. Kenaikan signifikan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menjadikan program keluarga berkualitas sebagai prioritas pembangunan. Keberhasilan pembentukan Kampung KB Mandiri yang demikian banyak juga tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat. Ini mengindikasikan adanya kesadaran dan kemauan dari komunitas lokal untuk terlibat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka.

15) Urusan Perhubungan

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Sikka mencerminkan dinamika dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang perlu mendapat perhatian strategis. Rasio konektivitas kabupaten/kota yang pada awalnya berada di angka 72,20 pada tahun 2020 mengalami peningkatan tipis pada 2021 menjadi 72,37, namun cenderung menurun dalam tiga tahun berikutnya, hingga mencapai 69,99 pada tahun 2024. Tren penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas layanan transportasi dan aksesibilitas wilayah.

Tabel 2.126
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Konektivitas Kab/Kota	72,20	72,37	71,03	71,32	69,99
2.	Konektivitas Darat	0,95	0,95	0,93	0,94	0,92
3.	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	0	0	0	13,12	20,59
4.	Konektivitas Penyeberangan	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2025

Indikator konektivitas darat juga menunjukkan penurunan stabil dari 0,95 pada 2020 dan 2021, menjadi 0,93 di 2022, dan kembali menurun hingga 0,92 di 2024. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif pada aspek kelengkapan jalan terhadap kondisi ideal, yang mulai menunjukkan capaian pada 2023 sebesar 13,12 persen, dan meningkat menjadi 20,59 persen di 2024, setelah stagnan di angka 0 persen pada tiga tahun sebelumnya. Sementara itu, konektivitas penyeberangan tidak mengalami perubahan signifikan, tetap berada di angka 0,19 sepanjang lima tahun terakhir, mencerminkan belum adanya perluasan layanan penyeberangan secara berarti. Secara umum, meskipun terdapat kemajuan pada kelengkapan infrastruktur jalan, penurunan konektivitas menyeluruh dan stagnasi pada layanan penyeberangan menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih progresif, peningkatan investasi, serta penguatan tata kelola sektor transportasi untuk mendukung integrasi wilayah dan memperkuat daya saing daerah.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika adalah bidang yang mencakup pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi digital dalam suatu wilayah khususnya di Kabupaten Sikka. Hal Ini mencakup berbagai kegiatan terkait dengan pengembangan, implementasi, dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta strategi komunikasi publik dan digital. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilihat di bagian sebelumnya pada penjelasan terkait Regulasi dan Tata Kelola yang integritas dan adaptif. Berdasarkan data nilai SPBE Kabupaten Sikka dapat dibilang terus berkembang dengan pertumbuhan nilai yang sangat bagus, mencerminkan bagaimana upaya yang didorong dalam hal implementasi strategi adopsi teknologi informasi dan elektronik semakin baik. Ke depannya sangat penting untuk terus mendorong inovasi dan investasi dalam infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan bahwa semua penduduk Kabupaten Sikka memiliki akses yang adil dan berkualitas ke teknologi komunikasi. Terutama melihat bahwa saat ini

mendekati setengah dari total rumah tangga di Kabupaten Sikka memiliki akses internet dan hal positif ini menunjukkan inisiatif yang berhasil diterapkan untuk memperluas akses internet di Kabupaten Sikka. Tidak hanya itu, dalam rangka mengembangkan tata kelola dengan akuntabilitas yang tinggi, efisien serta efektif maka dibutuhkan sistem digital yang baik pula. Sehingga pada implementasi tata kelola, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai peran penting dalam memastikan sistem yang ada berjalan dengan baik, dan dapat bertransformasi dalam upaya mendorong penerapan *smart city* di Kabupaten Sikka.

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang untuk mencapai kepentingan bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keanggotaan sukarela, pengendalian demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota secara adil, otonomi dan independensi, pendidikan, pelatihan, dan informasi, serta kerja sama antar koperasi.

Salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja koperasi adalah Indeks Pembangunan Koperasi (IPK). IPK merupakan indikator yang mengukur tingkat perkembangan dan kinerja koperasi dalam mendukung pembangunan di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, omset koperasi, kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah, dan lain sebagainya. Jumlah koperasi di Kabupaten Sikka dibagi menjadi beberapa kelompok. Berikut adalah data Kelompok Koperasi di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.127
Kelompok Koperasi di Kabupaten Sikka

No	Jenis Koperasi	Jumlah
1	Koperasi Simpan Pinjam	70
2	Koperasi Non Simpan Pinjam	71
3	Koperasi Serba Usaha	46
4	Koperasi Jasa	5
5	Koperasi Pemasaran	2
6	Koperasi Produsen	6
7	Koperasi Konsumen	3

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2024-2026

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sikka saat ini mencapai 130 pada tahun 2022. Dalam hal koperasi, Kabupaten Sikka dikenal sebagai kabupaten yang sangat berprestasi. dalam berbagai pemberitaan media massa, prestasi koperasi Kabupaten Sikka sudah sangat dikenal luas. Penjabat Bupati Sikka mengatakan bahwa koperasi di Kabupaten Sikka merupakan lembaga penyumbang kredit beredar terbesar di NTT (Lado, 2024). Tahun 2023 diinformasikan bahwa dari 5 koperasi terbaik di Indonesia, dua terdapat di Kabupaten Sikka yakni Koperasi Obor Mas dan Koperasi Pintu Air (Yunani, 2023). Anggota Koperasi Obor Mas saat ini mencapai 147.000 orang, dengan jumlah aset sebanyak Rp 1,3 triliun dan omset tahunan sekitar Rp 750 miliar (Moa, 2023). Sementara Koperasi Pintu Air memiliki jumlah anggota aktif sebanyak 298.467 dengan omset mencapai Rp 1,7 triliun pada tahun 2022 (Manyela, 2023). Koperasi koperasi terbaik ini bergerak dibidang simpan pinjam.

Prestasi hebat dua koperasi tersebut nampak kurang diikuti oleh koperasi lainnya. Kepala Disperindag, Koperasi dan UKM Sikka mengatakan, Sikka ditetapkan sebagai kabupaten koperasi pada 2009. Penyematan status tersebut karena di Sikka terdapat 180 koperasi, dan 80 persen di antaranya adalah koperasi simpan pinjam. Dari 180 koperasi itu lebih kurang ada 40 koperasi yang berkondisi "hidup enggan mati tak mau" (Jehadu & Hartik, 2024). Koperasi yang bermasalah tersebut sebagian besar disebabkan oleh macetnya kredit

yang disalurkan. Macetnya kredit bersumber dari banyaknya anggota yang menjadi anggota lebih dari satu koperasi. Penyebab lain dari macetnya kredit adalah pemanfaatan pinjaman untuk konsumsi, utamanya untuk memenuhi kebutuhan pesta. Masalah yang ada di koperasi juga timbul dari tidak baiknya manajemen yang dilakukan, pengelola yang tidak amanah, juga pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel.

Berdasar jenis usahanya, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sikka mengatakan bahwa 80 persen koperasi yang ada merupakan koperasi simpan pinjam (Jehadu & Hartik, 2024). Namun demikian data yang tersaji menunjukkan bahwa jenis usaha koperasi sangatlah beragam. Dalam koperasi non-simpan pinjam tercatat koperasi pertanian, koperasi jasa, koperasi pemasaran, dan lainnya. Namun demikian dukungan data lain terkait koperasi non-kredit hingga saat ini belum ditemukan.

Berdasarkan data dari Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026, kondisi kelembagaan koperasi di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa keberadaan koperasi masih cukup beragam, namun belum sepenuhnya mencerminkan potensi sektor produktif yang kuat dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Secara umum, koperasi di Kabupaten Sikka didominasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (70 koperasi) dan Koperasi Non Simpan Pinjam (71 koperasi). Dominasi dua jenis koperasi ini menunjukkan bahwa aktivitas koperasi di Sikka masih sangat berorientasi pada aspek keuangan dan layanan umum yang bersifat konsumtif. Hal ini tentu memberikan kontribusi pada inklusi keuangan masyarakat, tetapi belum secara optimal menggerakkan sektor-sektor produktif seperti produksi, pemasaran, dan distribusi hasil pertanian, perikanan, atau UMKM lokal.

Di sisi lain, Koperasi Serba Usaha (46 unit) juga memiliki peran penting karena fleksibilitas usahanya yang dapat menyasar berbagai sektor. Namun, jumlah ini masih tergolong sedang, dan penguatan kelembagaan serta manajemen usaha koperasi jenis ini perlu ditingkatkan agar dapat berkembang menjadi tulang punggung ekonomi desa atau komunitas lokal.

Sementara itu, jumlah koperasi yang secara langsung mendukung sektor produksi dan distribusi seperti Koperasi Produsen (6 koperasi), Koperasi Pemasaran (2 koperasi), dan Koperasi Konsumen (3 koperasi) tergolong sangat rendah. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi lokal, seperti produk pertanian, perikanan, peternakan, maupun hasil olahan UMKM, belum secara maksimal dikelola melalui kelembagaan koperasi. Padahal, koperasi jenis ini memiliki peran strategis dalam mendorong nilai tambah, memperpendek rantai distribusi, dan memperkuat posisi tawar produsen lokal di pasar.

Begitu pula Koperasi Jasa yang hanya berjumlah 5 unit, mengindikasikan masih terbatasnya inovasi kelembagaan koperasi di bidang jasa seperti transportasi, teknologi informasi, atau jasa layanan publik lainnya. Padahal sektor jasa memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah berbasis kebutuhan lokal dan potensi wilayah.

Data perkembangan koperasi di Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan dinamika yang penting untuk dianalisis sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029. Terdapat tiga indikator utama yang digunakan, yaitu jumlah koperasi aktif, koperasi berbadan hukum, dan koperasi sehat. Data dari tiga indikator yang digunakan dalam poin ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.128
Koperasi di Kabupaten Sikka Berdasarkan Status

No	Koperasi Berdasarkan Status	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi Aktif	124	126	130	130	130
2	Koperasi Berbadan Hukum	181	183	187	187	187
3	Koperasi Sehat	10	5	9	7	11

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2024-2026

Pertama, jumlah koperasi aktif menunjukkan tren pertumbuhan yang moderat, dari 124 koperasi pada tahun 2020 menjadi 130 koperasi pada tahun 2022, dan jumlah ini stabil hingga tahun 2024. Konsistensi jumlah koperasi aktif ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi mampu mempertahankan eksistensinya, meskipun belum ada peningkatan signifikan dalam jumlah koperasi baru yang aktif dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya dorongan untuk mendorong revitalisasi koperasi lama yang tidak aktif atau penciptaan koperasi baru berbasis potensi lokal.

Kedua, koperasi berbadan hukum juga mengalami sedikit peningkatan dari 181 koperasi pada tahun 2020 menjadi 187 koperasi pada tahun 2022, dan stagnan hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi telah memenuhi aspek legal formalitas, namun belum tentu operasional atau aktif secara ekonomi. Jumlah koperasi berbadan hukum yang lebih tinggi daripada koperasi aktif juga mengindikasikan adanya koperasi yang secara hukum masih tercatat, namun tidak menjalankan kegiatan secara nyata.

Ketiga, dan yang paling mencerminkan kualitas kelembagaan koperasi, adalah jumlah koperasi sehat. Data ini menunjukkan fluktuasi signifikan dari tahun ke tahun, dengan angka yang relatif rendah: hanya 10 koperasi sehat pada tahun 2020, turun drastis menjadi 5 koperasi pada 2021, kemudian naik dan turun kembali hingga mencapai 11 koperasi pada tahun 2024. Rendahnya jumlah koperasi sehat mengindikasikan bahwa sebagian besar koperasi di Kabupaten Sikka masih menghadapi masalah dalam aspek manajemen keuangan, kepengurusan, partisipasi anggota, dan keberlanjutan usaha.

Jika dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif (130 koperasi), maka pada tahun 2024 hanya sekitar 8,5 persen koperasi aktif yang tergolong sehat. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi tidak menurun, kualitas dan kinerja koperasi secara umum masih lemah. Hal ini menjadi perhatian serius, karena koperasi yang tidak sehat tidak dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang efektif bagi masyarakat.

Berdasar analisis yang dilakukan kelembagaan koperasi yang telah dikenal sangat baik, masih menyimpan cukup banyak permasalahan. Dari sisi koperasinya pengelolaan yang kurang baik dan jenis usaha yang hanya pada sektor simpan pinjam kurang mampu menjadi fasilitator perkembangan usaha. Pada sisi anggota, pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab anggota koperasi, manajemen keuangan juga belum baik. Dua sisi koperasi ini menjadi penyebab belum berdayanya koperasi menjadi lembaga ekonomi lokal yang tangguh.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Beberapa indikator yang umumnya digunakan untuk menilai kinerja UMKM meliputi pertumbuhan jumlah UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB daerah, tingkat ketersediaan akses finansial bagi UMKM, peningkatan daya saing UMKM, tingkat inovasi dan teknologi yang digunakan oleh UMKM, serta tingkat pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.

Sejalan dengan data koperasi yang sangat minim, demikian pula data mengenai UMKM. Hingga naskah ini disusun tercatat data jumlah UMKM di Kabupaten Sikka mencapai 5.547 unit. Unit usaha tersebut bergerak dalam 6 bidang usaha industri pengolahan, perdagangan, jasa, pertanian dan perikanan serta peternakan. Dari jumlah tersebut UMKM yang telah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) baru sebanyak 2.022. Belum adanya NIB berkaitan dengan ketidakpahaman pelaku usaha akibat dari kurangnya upaya yang dilakukan oleh

organisasi perangkat daerah pengampunya. Ketiadaan NIB ini menjadi penghalang bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, karena pada umumnya dasar pembinaan adalah adanya formalitas usaha.

Kabupaten Sikka memiliki beberapa jenis UMKM yang dikelompokkan berdasarkan jenis usaha. Berikut adalah Jenis UMKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Sikka Tahun 2024.

Tabel 2.129
Jenis UMKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Sikka Tahun 2024

No	Jenis UMKM	Jumlah
1	Industri Pengolahan	822
2	Perdagangan	5352
3	Jasa	1115
4	Peternakan	807
5	Perikanan	128
6	Pertanian	236
7	Perkebunan	0
Total		8500

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, 2025

Berdasarkan data Jenis UMKM di Kabupaten Sikka Tahun 2024, jumlah keseluruhan UMKM tercatat sebanyak 8.500 unit usaha dengan variasi jenis usaha yang cukup beragam. Struktur UMKM di Kabupaten Sikka didominasi oleh sektor perdagangan, yang mencapai 5.352 unit usaha atau sekitar 63 persen dari total UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Sikka masih bertumpu pada sektor perdagangan sebagai mata rantai utama dalam sirkulasi barang dan jasa. Besarnya porsi perdagangan ini juga mengindikasikan tingginya peran UMKM sebagai penyedia kebutuhan harian masyarakat sekaligus penggerak roda ekonomi lokal.

Sektor jasa menempati posisi kedua dengan 1.115 unit usaha atau sekitar 13 persen, mencerminkan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan non-perdagangan seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, maupun jasa profesional lainnya. Sementara itu, industri pengolahan dengan 822 unit usaha (9,7 persen) menempati urutan ketiga. Angka ini penting karena sektor industri pengolahan berpotensi memberikan nilai tambah pada komoditas lokal, sehingga dapat mendorong terciptanya hilirisasi produk unggulan daerah.

Di sisi lain, sektor berbasis sumber daya alam seperti peternakan (807 unit usaha, 9,5 persen), pertanian (236 unit usaha, 2,8 persen), dan perikanan (128 unit usaha, 1,5 persen) masih relatif kecil dibandingkan perdagangan. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa potensi sektor primer di Kabupaten Sikka belum tergarap secara optimal, padahal daerah ini memiliki sumber daya pertanian, peternakan, dan perikanan yang cukup besar. Menariknya, pada kategori perkebunan tidak terdapat UMKM yang tercatat, yang bisa mengindikasikan keterbatasan pengembangan kelembagaan usaha perkebunan dalam skala UMKM atau adanya kendala dalam pengelolaan dan pencatatan usaha.

Secara umum, struktur UMKM Kabupaten Sikka memperlihatkan kecenderungan dominasi sektor perdagangan yang bersifat konsumtif, sementara sektor produktif seperti industri pengolahan, pertanian, peternakan, dan perikanan belum berkembang secara signifikan. Hal ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi penguatan UMKM berbasis produksi dan pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta peternakan agar kontribusinya terhadap perekonomian lokal semakin meningkat. Dengan demikian, diversifikasi usaha UMKM tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat tetapi juga dapat menciptakan rantai nilai yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Sikka.

Data jumlah UMKM menunjukkan dinamika naik turun yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Berikut adalah tabel Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka, Tahun 2020-2024.

Tabel 2.130
Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	UMKM	6.288	5.994	5.547	8.005	8.500

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, 2024

Data pada tabel diatas menunjukan pada tahun 2020, terdapat 6.288 UMKM yang tercatat, namun pada tahun 2021 dan 2022 jumlah ini justru mengalami penurunan menjadi 5.994 dan 5.547 UMKM. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan daya tahan usaha kecil dan menengah, terutama di sektor informal.

Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan tajam menjadi 8.005 UMKM, dan meningkat lagi menjadi 8.500 UMKM pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya perekonomian lokal, ditopang oleh semangat kewirausahaan yang tumbuh kembali dan kemungkinan adanya dukungan dari program pemerintah daerah dalam pemulihan UMKM pasca pandemi. Tren ini merupakan sinyal positif bahwa UMKM di Kabupaten Sikka mulai menemukan kembali ruang tumbuhnya dalam ekosistem ekonomi lokal.

Selain data jumlah UMKM pada bagian ini juga menjelaskan pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Sikka. Persentase pertumbuhan wirausaha mencerminkan seberapa cepat jumlah pelaku usaha baru bertambah di Kabupaten Sikka. Berikut ini adalah tabel Pertumbuhan Wirausaha di Kabupaten Sikka, Tahun 2020-2024.

Tabel 2.131
Pertumbuhan Wirausaha di Kabupaten Sikka

No	Jumlah UMKM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	18	-4	12,56	30,7	5,8

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, 2024

Pada tahun 2020, pertumbuhan wirausaha tercatat cukup tinggi, yaitu 18 persen. Namun pada tahun 2021, terjadi kontraksi sebesar -4 persen, sejalan dengan penurunan jumlah UMKM pada periode yang sama. Ini memperkuat indikasi bahwa pandemi memberikan pukulan berat terhadap kelangsungan usaha kecil.

Tahun 2022 menunjukkan pemulihan awal dengan pertumbuhan 12,56, dan persen melonjak drastis pada 2023 mencapai 30,7 persen, selaras dengan peningkatan signifikan jumlah UMKM. Tahun 2024 masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,8 persen, meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa stimulus ekonomi dan semangat wirausaha masih bertahan, namun perlu dijaga agar tidak menurun kembali di tahun-tahun mendatang.

Aspek daya saing UMKM, yang mengindikasikan kualitas dan kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang, menunjukkan pola yang kurang stabil.

Tabel 2.132
Daya Saing UMKM di Kabupaten Sikka

No	Jumlah UMKM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UMKM yang Berdaya Saing	80	80	385	80	190

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, 2024

Tahun 2020 dan 2021 stagnan di angka 80 UMKM yang dianggap memiliki daya saing. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan 385 UMKM masuk kategori

berdaya saing, yang merupakan hasil dari berbagai pelatihan, pendampingan, atau akses pasar yang diperluas. Namun tahun 2023 kembali turun drastis ke angka 80, lalu naik sedikit ke 190 pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM meningkat, daya saingnya belum stabil, dan masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas usaha. Hal ini menjadi perhatian penting agar pertumbuhan kuantitas UMKM tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkualitas dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kemitraan UMKM dengan pihak lain, seperti perusahaan besar, koperasi, atau pasar modern, merupakan salah satu indikator kunci penguatan kapasitas usaha. Untuk melihat proporsi UMKM menjalin kemitraan di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.133
Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan di Kabupaten Sikka

No	Jumlah UMKM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan	75	100	125	139	237

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, 2024

Data menunjukkan tren positif dan konsisten meningkat. Pada tahun 2020, proporsi UMKM menjalin kemitraan berada di angka 75, dan naik terus setiap tahun hingga mencapai 237 pada 2024.

Peningkatan signifikan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak UMKM di Kabupaten Sikka yang menjalin kerja sama dengan mitra eksternal, yang sangat penting untuk penguatan rantai pasok, pemasaran, dan akses permodalan. Hal ini dapat dianggap sebagai salah satu keberhasilan pembangunan ekosistem UMKM yang inklusif dan kolaboratif.

Data sektoral UMKM pada tahun 2024 menunjukkan dominasi sektor perdagangan, dengan jumlah 3.573 UMKM atau sekitar 64,4 persen dari total. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Sikka bergerak di sektor perdagangan barang dan kebutuhan pokok.

Sektor jasa juga cukup signifikan dengan 594 UMKM, diikuti oleh peternakan (665) yang mengindikasikan potensi sektor primer yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Sektor pertanian (145) dan perikanan (62) memiliki kontribusi lebih kecil, sementara perkebunan bahkan tercatat tidak memiliki UMKM sama sekali. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam di sektor pertanian dan perkebunan, serta perlunya intervensi agar sektor-sektor ini lebih terintegrasi dalam ekosistem UMKM.

18) Urusan Penanaman Modal

Penanaman Modal merupakan pengeluaran sektor swasta untuk menciptakan nilai tambah melalui berbagai kegiatan, baik produksi maupun jasa. Indikator paling makro dari investasi sebuah wilayah dapat dilihat dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mencerminkan seluruh nilai investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Tahun 2023 nilai PMTB Kabupaten Sikka mencapai angka hampir Rp 3 triliun atau sekitar 45 persen dari total nilai PDRB Kabupaten Sikka dengan rata rata tingkat pertumbuhan sekitar 6 persen. Tingginya kontribusi PMTB berkaitan dengan nilai net ekspor yang negatif sekitar 45 persen juga. Realitas ini harus menjadi perhatian, karena pendorong pertumbuhan selain investasi adalah net ekspor yang negatif dengan angka yang tinggi, yang berarti angka impor yang terjadi lebih tinggi dari nilai ekspornya. Pada dasarnya angka impor yang tinggi tidak menjadi permasalahan ketika yang diimpor adalah produk bahan baku yang akan diolah menjadi barang industri, namun dalam kasus Kabupaten Sikka produk yang diimpor merupakan produk akhir untuk konsumsi.

Gambar 2.52
Nilai Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 (Rp miliar)

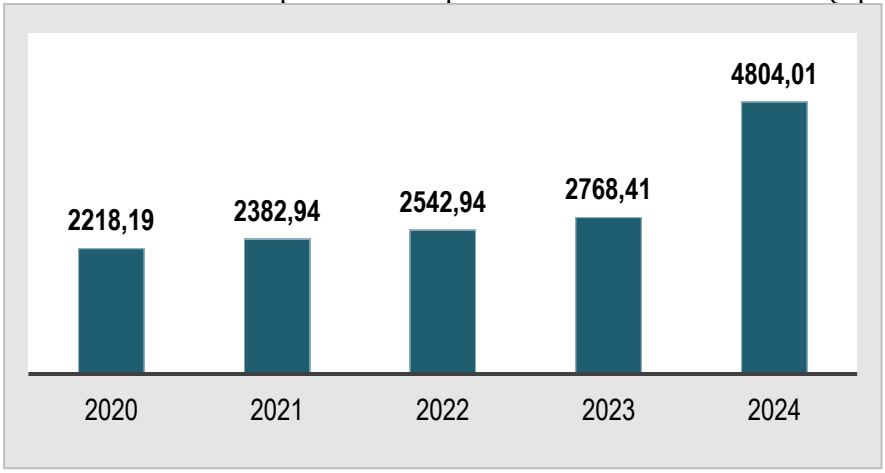

Sumber: BPS Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2020-2024

PMTB yang meliputi hampir 45 persen PDRB dilakukan oleh investasi asing, nasional maupun investasi masyarakat. Dalam dokumen Badan Penanaman Modal tercatat jumlah investor nasional menunjukkan peningkatan sementara jumlah investor asing mengalami penurunan. Namun demikian tahun 2023 didapat informasi bahwa investasi asing di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan kembali. Peningkatan investasi secara keseluruhan di tahun 2023 berkaitan dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi masyarakat selepas masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Bappelitbang Kabupaten Sikka, diketahui bahwa investasi di Kabupaten Sikka belum berjalan secara cukup efisien. Perhitungan ICOR Kabupaten Sikka menunjukkan hasil yang negatif. Artinya, Kabupaten Sikka belum memiliki nilai tambah dari investasi yang ditanamkan. Beberapa permasalahan investasi di Kabupaten Sikka yang teridentifikasi, meliputi: 1) masih terbatasnya sumber daya manusia pendukung investasi; 2) masih terbatasnya tata kelola investasi daerah; 3) masih terbatasnya infrastruktur baik fisik (jalan, irigasi, energi, air bersih, jembatan, dsb.) maupun non-fisik (informasi dan teknologi); 4) iklim investasi yang belum kondusif; dan 5) masih terbatasnya diversifikasi investasi unggulan daerah.

Tabel 2.134
Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	1.478	1.478	2.887	2.887	2.887
2.	Jumlah Investor Berskala Internasional (PMA)	11	10	10	10	10
3.	Total Nilai Investasi	912.254.087.000	NA	231.962.384.000	4.876000.000	48.040.892.683

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka, 2024

Dilihat dari area yang paling diminati, terlihat lima urutan tertinggi adalah transportasi, gudang dan komunikasi, pertambangan, perumahan dan kawasan perkantoran, industri makanan dan pertanian. Investasi yang tinggi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi erat berhubungan dengan tingginya peran perdagangan antar daerah yang sangat tinggi. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa net ekspor Kabupaten Sikka negatif

hampir 45 persen dari PDRB, inilah mengapa sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang menjadi paling diminati.

Sektor pertambangan menjadi sektor kedua yang juga paling diminati. Masih berdasar hasil kajian Bapelitbang, pertambangan memang merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan. Adalah pasir besi dan emas yang menjadi sasaran investasi selain pertambangan Galian C. Namun demikian pertambangan yang izin usahanya telah berpindah ke provinsi ini lebih banyak menciptakan kerusakan lingkungan bagi Kabupaten Sikka dibandingkan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Bencana akibat tambang sudah sangat sering terjadi, banjir dan longsor adalah salah satu bencana yang kerap terjadi akibat dari aktivitas pertambangan ini.

Investasi bidang perumahan dan kawasan industri juga perkantoran, berhubungan erat dengan masih berkembangnya kawasan Kabupaten Sikka. Perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai aktivitasnya membutuhkan sarana dan prasarana. Permintaan atas kebutuhan penduduk inilah yang menjadi pendorong berkembangnya investasi bidang ini. Namun memang disayangkan bahwa *multiplier effect* untuk sektor ini cukup terbatas. Karakter pembangunan, apalagi jika input untuk pembangunan itu didatangkan dari luar daerah maka uang yang telah digunakan untuk pembangunan akan mengalir ke luar daerah. Itulah mengapa multiplier yang tercipta menjadi rendah.

Sektor pertanian, berdasar kajian dari Bapelitbang memang juga merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Lahan yang masih sangat luas merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Investasi bidang pertanian memang bukan investasi yang sangat besar, namun investasi itu banyak dilakukan oleh kelompok kelompok masyarakat. Salah satu contoh yang dapat disajikan adalah aktivitas BUMDes Watuliwung yang bekerja sama dengan para perempuan di pedesaan untuk mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura. Pada sektor perkebunan potensi besar itu telah ditangkap oleh PT Cargill dengan fokus pada pengolahan biji kakao.

Pada sektor perikanan, investasi yang relatif kecil cukup kontradiktif mengingat banyaknya informasi mengenai peran besar perikanan di Sikka. Saat ini investasi di sektor perikanan di Kabupaten Sikka tercatat PMA 1 unit, PMDN 6 unit dan pengusaha perorangan 43 unit usaha.

Tabel 2.135
Nilai Investasi Berdasar Sektor Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Sektor	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanaman pangan,perkebunan dan peternakan /food crops, plantation and livestock	32096469.9	29374643.4	38.878.502.6	-	-
2	Kehutanan/Forestry	1163573.9	6862701.7	8.603.095.3	-	-
3	Perikanan/Fishery	564859.8	1012170.6	1.214.048.8	-	-
4	Pertambangan/Mining	13755070.4	25517127.3	62.521.629.4	-	-
5	Industri makanan/Food Industry	27872683.1	26517505.8	54.936.992.9	6.266.800.000,00	39.139.700.000,00
6	Industri textile/Textile Industry	2103213.6	1972432.1	5.614.713.3	-	-
7	Industri Kayu/Wood Industry	1263401.1	1143672.6	3.587.894.5	-	-
8	Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry	3745918.4	7833499	9.508.171	-	-
9	Ind. Kimia dan farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry	22526107.2	23363669	2.890.5292.9	-	-
10	Ind. Karet dan plastik/Rubber and Plastic Industry	4428666.5	7803026.5	7.369.750.2	-	-
11	Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry	5861895.1	6522138.4	6.367.888.9	-	-
12	Ind. Logam Dasar,Barang Logam,Bukan Mesin dan Peralatannya	8857599.3	15655780	13.950.460.6	-	-

No	Sektor	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
13	Ind. Mesin ,elektronik,instru.Kedokteran,Presisi dan Optik dan jam	1155964.6	535046.5	3693213.6	-	-
14	Ind. Kendaran Bermotor dan alat Transportasi lain	2556491.9	1459308.2	2425202.5	-	-
15	Listrik,Gas dan Air	35518798.8	38727709.6	32107483	346.800.000,00	950.700.000,00
16	Konstruksi	68289297.4	39569360.8	33846519.6	8.083.300.000,00	789.800.000,00
17	Perdagangan dan Reparasi	16748391.3	22432369.7	31051264.2	9.068.300.000,00	19.713.100.000,00
18	Hotel dan Restoran	10203124.3	17819336.4	21579087.4	-	280.000.000,00
19	Transportasi,Gudang dan Komunikasi	93282772.9	61241519.3	75.138.386.7	5.000.000,00	270.000.000,00
20	Perumahan,Kawasan Ind dan Perkantoran	44852761.4	85497814.8	66.167.810.5	-	75.000.000,00
21	Jasa lainnya	14242672.3	24310388.9	38096745.7	469.100.000,00	211.400.000,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikk

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan generasi muda juga menjadi salah satu bagian dari pembangunan masyarakat dan kemajuan suatu daerah sehingga untuk mencapai hal itu generasi muda memiliki peran untuk meningkatkan pendidikan, keahlian dan keterampilan diri mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, pentingnya dimensi kepemudaan ini didasarkan pada premis bahwa pemuda adalah "sumberdaya yang harus dikembangkan, bukan masalah yang harus dipecahkan". Dengan demikian untuk mengembangkan kepemudaan dibutuhkan suatu proses yang disengaja melalui pemberian dukungan, hubungan, pengalaman, sumberdaya, dan peluang kepada pemuda yang diperlukan untuk menjadi orang dewasa yang sukses dan kompeten. Upaya peningkatan kualitas pemuda di Indonesia telah menjadi salah satu agenda strategis untuk mendapatkan manfaat bonus demografi.

Sektor kepemudaan dan olahraga memegang peranan vital dalam pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan pencapaian prestasi suatu daerah. Keberadaan organisasi pemuda dan olahraga yang aktif, serta dukungan terhadap wirausaha muda dan atlet berprestasi, menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam membangun generasi muda yang tangguh dan sehat. Di Kabupaten Sikka, data dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika upaya pemerintah daerah dalam pengembangan sektor ini. Persentase organisasi pemuda yang aktif dari tahun 2020 hingga 2023, di Kabupaten Sikka konsisten di angka 15, namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 88 persen. Kenaikan drastis ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat besar dalam inisiatif pembentukan atau aktivasi organisasi pemuda di Kabupaten Sikka yang menandakan aktivitas kepemudaan yang kuat. Persentase wirausaha muda terhadap total wirausaha pada tahun 2020 dan 2021 tercatat 0 persen. Ini mengindikasikan belum adanya identifikasi atau dukungan spesifik terhadap wirausaha muda pada periode tersebut. Kemudian capaian mulai muncul pada tahun 2022 dengan 1,84 persen, tetapi sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 1,83 persen dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 1,72 persen. Dengan capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi wirausaha muda terhadap total wirausaha di Kabupaten Sikka masih minimal dan memerlukan dorongan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, sektor kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sikka menunjukkan tren yang positif, terutama pada tahun 2024, dengan peningkatan signifikan

pada jumlah organisasi pemuda dan olahraga yang aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa minat dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan positif semakin meningkat, serta adanya dorongan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi hal tersebut. Disamping itu, jumlah prestasi olahraga menunjukkan pemulihan setelah sempat nol di tahun 2021 menjadi stabil di 6 prestasi pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini sejalan dengan jumlah atlet peraih medali yang juga pulih signifikan. Dari 39 atlet di tahun 2020, menjadi 0 di tahun 2021, lalu meningkat menjadi 7 di tahun 2022, menjadi 28 di tahun 2023 dan mencapai 37 atlet berprestasi pada tahun 2024. Pemulihan ini menunjukkan bahwa pembinaan atlet mulai membuahkan hasil.

Tabel 2.136
Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	15	15	15	15	88
2.	Persentase Wirausaha Muda terhadap total wirausaha	0	0	1,84	1,83	1,72
3.	Jumlah organisasi olahraga	8	8	8	8	14
4.	Jumlah prestasi olahraga	9	0	2	6	6
5	Jumlah atlet berprestasi	39	0	7	28	37

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2025

Peran pemuda dalam pembangunan suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas mereka untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang, termasuk olahraga. Pemuda yang aktif, berprestasi, dan memiliki jiwa kepemimpinan adalah aset berharga yang dapat mendorong kemajuan daerah. Di Kabupaten Sikka, upaya untuk menggerakkan peran pemuda dalam pembangunan dan mencapai prestasi olahraga terus dilakukan, meskipun dengan beberapa tantangan dalam pengukuran partisipasi. Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2024 adalah 0,378. Angka ini merupakan gambaran umum kondisi olahraga di tingkat provinsi, di mana Kabupaten Sikka menjadi bagiannya. Meskipun data spesifik untuk Kabupaten Sikka tidak tersedia, indeks provinsi ini memberikan konteks bahwa pembangunan olahraga di NTT secara keseluruhan masih berada pada tingkat yang perlu ditingkatkan, dan Kabupaten Sikka kemungkinan menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan informasi yang diperoleh (Dinas PKO, 2025), data untuk Indeks Partisipasi Olahraga dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan belum tersedia. Ketiadaan data ini menjadi kendala dalam mengukur sejauh mana masyarakat, termasuk pemuda, terlibat secara aktif dalam kegiatan olahraga dan gerakan kepramukaan sebagai wadah pembentukan karakter dan keterampilan.

20) Urusan Statistik

Statistik berupa pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Tujuan dari statistik adalah untuk menyediakan metode dan alat yang dapat digunakan untuk mengorganisir dan menyajikan informasi numerik secara sistematis. Untuk melihat bagaimana pertumbuhan penggunaan statistik di Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.53
Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Sikka Tahun 2022-2024

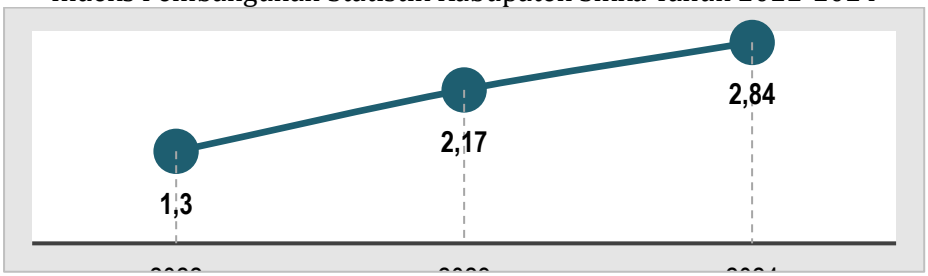

Sumber: Bidang Litbang pada Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data indeks pembangunan Statistik, Kabupaten Sikka menunjukkan pengembangan yang sangat pesat. Dengan hasil penilaian awal di tahun 2022 hanya mencapai "Cukup", kini di tahun 2024 sudah dapat mencapai nilai 2,84 atau "Baik". Hal ini menunjukkan bagaimana Kabupaten Sikka telah mendorong statistik sektoral secara keseluruhan dengan baik, sehingga meningkatkan tingkat kematangan pembangunan statistik yang ada di Kabupaten Sikka. Angka ini menunjukkan tidak hanya terkait dengan kebijakan statistik serta kerja sama lembaga yang dilakukan, namun juga terkait dengan sumberdaya seperti SDM, infrastruktur, serta kualitas data yang dihasilkan. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan dalam penggunaan statistik ini, terutama apabila Kabupaten Sikka akan menerapkan *smart city* sebagai salah satu kunci dalam strategi pelaksanaan pemerintahan. Sehingga masih diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan nilai tersebut. Tidak hanya itu, Dokumen Statistik Kabupaten Sikka juga hanya menerbitkan 1 publikasi setiap tahunnya, yang kemudian meningkat menjadi 2 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan transparansi statistika yang belum maksimal.

21) Urusan Persandian

Persandian adalah sistem pengelolaan dan pertukaran informasi rahasia atau terbatas antara pemerintah atau organisasi dengan tujuan untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, dan integritas data atau informasi yang bersifat sensitif atau strategis. Kinerja persandian mengacu pada efisiensi dan efektivitas dari sistem persandian yang diimplementasikan dalam suatu organisasi atau entitas, termasuk pemerintahan daerah seperti Kabupaten Sikka.

Gambar 2.54
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

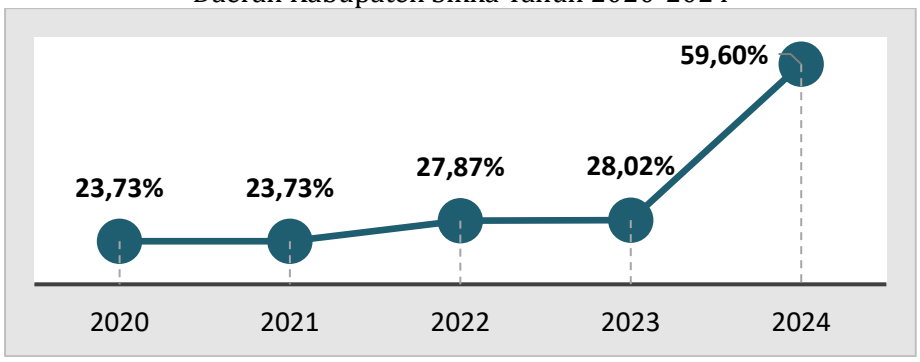

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan gambar di atas pada Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kestabilan dalam penggunaan sandi dalam komunikasi, dengan persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi secara konsisten meningkat hingga 28,02 persen di 2023. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam praktik Persandian di wilayah yang kemudian diikuti dengan adanya peningkatan kesadaran dan penerapan kebijakan Persandian di Kabupaten Sikka. Nilai ini kemudian meningkat pesat pada tahun 2024 dengan angka mencapai 59,60 persen menunjukkan hasil dari upaya Kabupaten Sikka yang tinggi dalam menerapkan keamanan pada sistem digital pemerintahan yang merata pada setiap perangkat daerah. Ini menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan dalam menguatkan praktik Persandian di tingkat perangkat daerah. Meski demikian, Kabupaten Sikka masih mengalami risiko keamanan siber yang cukup tinggi serta penyalahgunaan informasi di sosial media. Mengingat bahwa seluruh perangkat daerah seharusnya sudah memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan kinerja dan pelayanannya, maka seharusnya pemakaian sandi ini dapat diterapkan 100 persen di seluruh perangkat daerah. Hal ini kemudian dilakukan dalam rangka menghindari risiko ancaman siber yang marak terjadi saat ini.

22) Urusan Kebudayaan

Berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Sub Urusan Budaya menjadi urusan konkuren pemerintah pusat, daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Sikka melaksanakan amanat UU ini. Untuk indikator Fokus seni dan budaya Kabupaten Sikka pada tahun 2018-2022, dimana pada tahun 2019 sebanyak 3 festival yang dilaksanakan, sedangkan untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang melarang diadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan di tahun 2021 sebanyak 1 festival, sedangkan untuk tahun 2022 kembali tidak dilaksanakannya festival kebudayaan.

Keberagaman budaya Indonesia adalah modal dasar yang kuat dalam pembangunan. Pemerintah telah menyadari bahwa khazanah kebudayaan di Indonesia merupakan aset yang sangat berharga. Pembangunan kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia di Indonesia. Budaya mempunyai peranan dalam pembangunan manusia Indonesia. Indonesia dapat membangun bangsa sesuai dengan karakteristik budaya masing-masing. Kabupaten Sikka memiliki budaya dan seni tradisional begitu beragam, salah satunya adalah tarian dan musik Sikka. Seni tari dan musik dalam tataran budaya tak bisa dipisahkan. Tari musik dan doa, dipadukan dan dijalankan dalam berbagai ritus tahunan daerah. Berbagai tarian di Sikka dengan gerak improvisasi beragam, uniknya tak membutuhkan garapan seorang seniman khusus, kecuali tarian tersebut telah dipadu dengan berbagai unsur-unsur gerak modern.

Tabel 2.137

Kinerja Fokus Seni dan Budaya Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	0	1	0	1	1
2.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	65,38	69,23	44,44	44,44	72,41
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	2	0	2	3
4.	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	18	19	20	20	21

Sumber: Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024-2026

Pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Sikka menunjukkan capaian yang beragam pada berbagai indikator. Dari sisi pelestarian kesenian tradisional, dapat disampaikan bahwa seluruh kesenian yang telah diinventarisir dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) telah dilestarikan dengan capaian 100 persen. Artinya, dari 100 item kesenian yang tercatat, semuanya masih tetap dijaga dan dilestarikan dalam bentuk

aktivitas seni budaya, dokumentasi, maupun penguatan nilai-nilai tradisi di tengah masyarakat.

Namun, dari sisi pengembangan, hanya 45 persen dari kesenian tersebut yang telah berhasil dikembangkan lebih lanjut. Ini berarti bahwa sebanyak 45 dari 100 item kesenian sudah mengalami inovasi, pengemasan ulang, atau penguatan nilai ekonomi dan sosialnya, sementara sisanya masih bersifat konservatif atau belum mendapat perhatian dalam pengembangan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas strategi revitalisasi agar lebih banyak kesenian yang tidak hanya lestari, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pada aspek partisipasi masyarakat terhadap sejarah lokal, terlihat bahwa sekitar 50 persen desa di Kabupaten Sikka, atau sekitar 86 dari 172 desa, telah mendapatkan perhatian dalam bentuk kajian atau tinjauan sejarah lokal. Capaian ini menunjukkan kesadaran yang mulai tumbuh di tingkat desa untuk menggali dan mendokumentasikan nilai-nilai sejarah lokal sebagai bagian dari identitas dan memori kolektif masyarakat, meskipun masih menyisakan separuh desa lainnya yang belum tersentuh inisiatif serupa.

Di sisi lain, pelestarian terhadap warisan budaya, baik berupa Warisan Budaya Takbenda (WBTB) maupun Cagar Budaya, masih menunjukkan angka yang rendah. Dari total 733 warisan budaya yang terinventarisir dalam PPKD, hanya 11,46 persen yang berhasil dilestarikan secara nyata. Artinya, baru sekitar 84 item warisan budaya yang mendapat perlakuan pelestarian aktif, sementara sisanya masih berada dalam tahap pendataan atau belum mendapatkan perlindungan dan pengelolaan yang memadai.

Bahkan dari sisi penetapan resmi, belum ada satupun Cagar Budaya (CB) yang ditetapkan secara legal dari total 29 item CB yang sudah terdata dalam PPKD. Sementara itu, untuk warisan budaya takbenda, dari 704 karya budaya yang terdata, hanya 0,14 persen atau sekitar 1 karya yang sudah ditetapkan. Jika merujuk pada data karya budaya yang telah teregistrasi di tingkat nasional sebanyak 21 item, maka yang sudah ditetapkan baru 5 persen atau sekitar satu karya budaya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara inventarisasi dan legalisasi, yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan dan perlindungan warisan budaya di masa depan.

Selain itu, minat masyarakat terhadap objek kebudayaan seperti museum juga masih tergolong rendah. Persentase kunjungan wisatawan ke museum pada tahun 2024 hanya mencapai 1,76 persen dari total 41.861 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sikka. Ini menunjukkan bahwa museum sebagai sarana edukasi sejarah dan budaya masih belum menjadi destinasi yang menarik secara luas, baik bagi wisatawan lokal, domestik, maupun mancanegara.

Terakhir, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan secara umum digambarkan dalam kategori "sedang" atau "cukup". Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan, namun partisipasi tersebut belum optimal. Masih diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui pendidikan budaya, pelibatan komunitas adat, serta penguatan peran generasi muda dalam menghidupkan kembali nilai-nilai dan praktik budaya lokal.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa Kabupaten Sikka telah memiliki fondasi kuat dalam pendataan dan pelestarian awal kebudayaan, namun masih menghadapi tantangan besar dalam aspek pengembangan, legalisasi formal, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi catatan penting untuk dimasukkan dalam agenda prioritas kebijakan kebudayaan pada periode perencanaan pembangunan jangka menengah 2025–2029.

23) Urusan Perpustakaan

Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang didapat, sedangkan ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun tulisan. Indonesia menjadi negara pada urutan kedua terbawah pada ruang lingkup literasi yang ada di dunia, kondisi ini menggambarkan kondisi minat baca masyarakat di Indonesia sangat rendah yakni sebesar 0,001 persen. Angka tersebut bermakna dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang

yang rajin membaca. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan laporan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia secara keseluruhan berada di angka 59,52 dengan durasi membaca 4-5 jam per minggu dan 4-5 buku per triwulan. Semakin banyak penduduk suatu wilayah yang semangat mencari ilmu pengetahuan, maka akan semakin tinggi peradabannya. Budaya suatu bangsa biasanya berjalan seiring dengan budaya literasi, faktor kebudayaan dan peradaban dipengaruhi oleh membaca yang dihasilkan dari temuan temuan kaum cendekia yang diabadikan dalam tulisan yang menjadikan warisan literasi informasi yang sangat berguna bagi proses kehidupan sosial yang dinamis.

Perpustakaan merupakan tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dalam perpustakaan modern dewasa ini selain tersedia buku-buku tercetak, juga tersedia buku-buku dalam perpustakaan digital. Perpustakaan bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat baca dan tulis, mengenalkan teknologi informasi, sebagai akses informasi secara mandiri, dan memupuk bakat dan minat baca. Terkait urusan perpustakaan Di Kabupaten Sikka, data perkembangan perpustakaan umum Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir (2020-2024) dilihat dari jumlah pengunjung, Rasio Perpustakaan persatuan penduduk, jumlah koleksi buku perpustakaan, dan Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.138
Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	25.786	15.384	3.820	3.480	6.510
2.	Rasio Perpustakaan persatuan penduduk	0,16	0,18	0,18	0,05	0,045
3.	Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah	5909	12336	10245	18246	18.247
4.	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2025

Tingkat kunjungan pada perpustakaan yang ada di Kabupaten Sikka selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat jumlah pengunjung sebanyak 15.384 orang, terus mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 yakni sebesar 3820 orang dan 3.480 orang. Kemudian, meningkat kembali pada tahun 2023 sebanyak 3.824. Berdasarkan data kunjungan pemustaka atau semua jenis layanan perpustakaan, ketika dilakukan perbandingan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sikka sebagai pengguna potensi perpustakaan, diketahui hanya sekitar 4,9 persen penduduk Kabupaten Sikka yang mengunjungi perpustakaan. Hal tersebut menunjukkan kondisi dimana rendahnya minat baca masyarakat di Kabupaten Sikka. Rendahnya tingkat kunjungan dari masyarakat pada perpustakaan juga disertai dengan belum tersedianya tenaga pustakawan.

Kegemaran membaca merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang cerdas, inovatif, dan berpengetahuan luas. Minat baca yang tinggi berkorelasi positif dengan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Oleh karena itu, mengukur tingkat kegemaran membaca menjadi krusial dalam upaya peningkatan literasi dan pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh (Dinas Perpustakaan, 2025), pada tahun 2023 survei mengenai tingkat kegemaran membaca belum dilaksanakan. Ini mengindikasikan bahwa data pengukuran belum tersedia untuk periode tersebut. Namun pada tahun 2024, Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Sikka tercatat sebesar 64,25. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Sikka memiliki tingkat kegemaran membaca yang cukup baik, namun masih ada ruang untuk peningkatan yang signifikan. Angka ini memberikan gambaran awal mengenai tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Sikka. Meskipun tidak ada data perbandingan dari tahun sebelumnya di

Kabupaten Sikka itu sendiri, angka ini dapat menjadi baseline penting untuk evaluasi di masa mendatang.

24) Urusan Kearsipan

Kearsipan sebagai proses pengelolaan dan penyimpanan dokumen, rekaman, atau informasi penting secara teratur dan teratur untuk memastikan aksesibilitas, keamanan, dan integritasnya. Tujuan dari kearsipan adalah untuk memudahkan pencarian dan memastikan bahwa dokumen atau informasi tersebut dapat diakses dengan mudah saat diperlukan. Berikut disajikan tabel Kinerja Pengelolaan Arsip di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024:

Tabel 2.139

Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	23,73	23,73	27,87	28,02	32,2	41,18

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, sekitar 20,34 persen perangkat daerah di Kabupaten Sikka melaporkan bahwa mereka mengelola arsip secara baku. Ini menunjukkan bahwa sebagian sudah mengadopsi praktik pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar atau prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan kestabilan dalam persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, yaitu sebesar 23,73 persen. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam praktik pengelolaan arsip di wilayah tersebut selama dua tahun berturut-turut. Kemudian di tahun 2021 mencatat peningkatan yang signifikan dalam persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, mencapai 27,87 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan penerapan praktik pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar atau prosedur. Pada tahun 2022, Kabupaten Sikka terus memperbaiki kinerja pengelolaan arsip, dengan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mencapai 28,02 persen. Pada tahun 2023 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sebesar 32,20 persen dan terakhir meningkat hingga 41,18 persen. Selama periode tahun 2019 hingga 2024, Kabupaten Sikka berhasil mencatat peningkatan yang positif dalam persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Peningkatan ini mencerminkan komitmen dan upaya dalam memperkuat sistem pengelolaan arsip. Namun perlu dicermati kembali bahwa angka persentase ini di bawah 50 persen, yang berarti lebih dari setengah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sikka belum mengelola arsip secara baku. Padahal, pengelolaan arsip yang baik dapat meningkatkan akurasi, aksesibilitas, dan keamanan informasi yang terdokumentasi. Terlebih belum terdapat mekanisme untuk melindungi dan menyelamatkan arsip yang sudah ada, sehingga menjadi penting untuk dapat mendorong upaya dalam pengelolaan serta perlindungan arsip di Kabupaten Sikka.

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi dan sosial Kabupaten Sikka. Sebagai salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya laut, potensi perikanan Sikka menawarkan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Sikka memiliki kawasan dengan potensi ketersediaan ikan di perairan laut, di bagian utara Laut Flores di pesisir pantai bagian utara, yakni kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Waigete, Talibura, Magepanda, Palue dan di pesisir pantai bagian selatan Laut Sawu, yakni kecamatan Waiblama, Waigete, Mapitara, Doreng, Bola, Lela, Mego dan Paga. Untuk mengukur dan memantau kemajuan sektor perikanan, sejumlah indikator kinerja yang digunakan adalah produksi perikanan tahunan dalam ton dan jumlah kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Sikka.

Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah semua hasil produksi penangkapan, budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi perikanan di Kabupaten Sikka tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.55
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

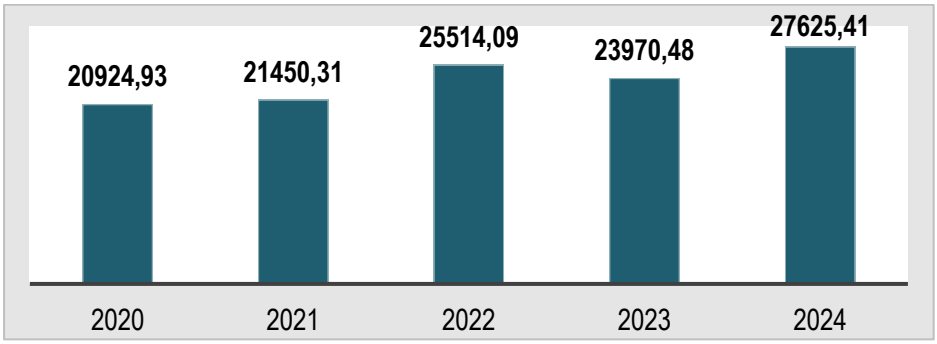

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa produksi perikanan Kabupaten Sikka tahun 2020 sebesar 20.924,93 ton. tahun 2021 sebesar 21.450,31 ton, tahun 2022 menjadi 25.514,09 ton, tahun 2023 sebesar 23.970,48 dan pada tahun 2024 sebesar 27.625,41 ton.

Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun. Konsumsi ikan di Kabupaten Sikka selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.56
Konsumsi Ikan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

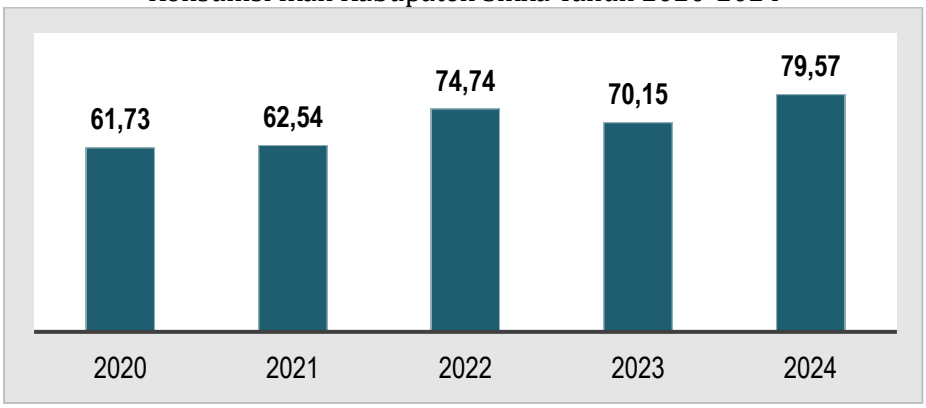

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa konsumsi ikan di Kabupaten Sikka tahun 2020 sebesar 61,73 kg/kapita/tahun. tahun 2021 sebesar 62,54 kg/kapita/tahun, tahun 2022 menjadi 74,74 kg/kapita/tahun dan tahun 2023 sebesar 70,15 kg/kapita/tahun sedangkan tahun 2024 sebesar 79,57 kg/kapita/tahun.

Pendapatan Per Kapita Nelayan

Pendapatan nelayan adalah adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan. Penerimaan nelayan adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pendapatan nelayan pada tahun 2019 sebesar Rp 14.790.000, pada tahun 2020 sebesar Rp 14.749.000, tahun 2021 sebesar Rp 14.775.744 pada tahun 2022 sebesar Rp 19.083.980, pada tahun 2023 sebesar Rp 14.157.940.

Selain itu, jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi NTT pada tahun 2019, produksi perikanan tangkap Sikka memiliki kontribusi 15,24 persen terhadap total produksi perikanan tangkap di Provinsi NTT. Angka ini terus naik dari tahun ke tahun dan menjadikan Kabupaten Sikka sebagai salah satu daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar di Provinsi NTT.

Sejak tahun 2019, nelayan Kabupaten Sikka telah berhasil mengekspor komoditas perikanan tangkap hingga ke pasar mancanegara seperti Jepang, Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura serta ke daerah-daerah lain di Indonesia. Komoditas utama perikanan tangkap untuk Kabupaten Sikka adalah cakalang, tongkol, dan tuna. Nilai produksi perikanan tangkap Kabupaten Sikka termasuk salah satu yang tertinggi di Provinsi NTT. Sebagai contoh, pada tahun 2020, komoditas cakalang dengan nilai Rp 506.220.587 memiliki kontribusi nilai tertinggi yaitu 12,06 persen dari total nilai produksi Provinsi NTT. Produksi ikan yang tinggi tersebut sebagian besar dihasilkan oleh kelompok-kelompok nelayan.

Tabel 2.140

Nilai Produksi dan Komoditas Utama Perikanan Tangkap di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakalang	506.220.587	26.933.385	24.897.240	23.924.540	26.846.676
2	Tongkol	506.220.587	47.126.360	26.223.174	25.260.849	29.832.640
3	Tuna	36.933.385	15.360.060	104.617.505	91.281.232	101.854.828

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Database Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan

Armada Perikanan

Kabupaten Sikka menunjukkan tren peningkatan jumlah armada perikanan secara konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah total armada meningkat dari 1.191 unit pada tahun 2020 menjadi 1.330 unit pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan sebesar 11,7 persen dalam lima tahun terakhir.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada perahu papan kecil/sampan fiberglass berukuran <5 meter, yang melonjak drastis dari 50 unit selama empat tahun berturut-turut (2020–2023) menjadi 332 unit pada tahun 2024. Lonjakan ini menunjukkan adanya penguatan armada perikanan skala kecil yang kemungkinan besar terkait dengan dukungan kebijakan, bantuan sarana produksi perikanan, atau peralihan teknologi oleh nelayan kecil. Sementara itu, perahu papan sedang/sampan fiberglass >5 meter juga mengalami peningkatan stabil, dari 228 unit pada 2020 menjadi 276 unit pada 2024. Ini mengindikasikan adanya pertumbuhan yang moderat dalam armada menengah. Jenis motor tempel <5 GT mengalami peningkatan tajam pada 2020 hingga 2022 (dari 30 ke 88 unit), dan stabil di angka 88 unit hingga 2024. Sementara itu, motor tempel dengan ukuran lebih besar (5–20 GT) belum tercatat atau belum dimiliki oleh nelayan di Sikka selama lima tahun terakhir.

Jenis armada berbasis kapal motor menunjukkan tren peningkatan yang lebih stabil. Kapal motor <5 GT bertambah dari 432 unit (2020) menjadi 454 unit (2024), sedangkan kapal motor 5–10 GT juga naik dari 101 menjadi 104 unit. Namun, kapal motor berukuran lebih besar (>0 GT) relatif stagnan, seperti kapal motor 10–20 GT tetap di angka 8 unit sejak 2022, dan kapal motor 20–30 GT konsisten sebanyak 67 unit. Kapal motor 30–50 GT tetap hanya 1 unit sepanjang periode ini, mencerminkan bahwa penggunaan kapal besar masih sangat terbatas di wilayah ini.

Secara umum, pertumbuhan armada perikanan di Kabupaten Sikka didominasi oleh unit kecil dan menengah, terutama armada non-kapal (perahu dan motor tempel). Ini menunjukkan bahwa sektor perikanan di Sikka masih bertumpu pada nelayan tradisional dan skala kecil, namun menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan yang positif dalam jumlah dan jenis armada.

Data tentang armada perikanan yang beroperasi di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141
Armada Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Jenis Armada Perikanan	Jumlah Unit				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perahu papan kecil sampan fibre glass < 5 M	50	50	50	50	332
2.	Perahu Papan Sedang/sampan fiberglass >5 M	228	228	245	255	276
3.	Motor Tempel < 5 GT	30	55	88	88	88
4.	Motor Tempel 5-10 GT	-	-	-	-	-
5.	Motor Tempel 10-20 GT	-	-	-	-	-
6.	Kapal Motor < 5 GT	432	444	444	452	454
7.	Kapal Motor 5-10 GT	101	101	102	102	104
8.	Kapal Motor 10-20 GT	7	8	8	8	8
9.	Kapal Motor 20-30 GT	67	67	67	67	67
10.	Kapal Motor 30-50 GT	1	1	1	1	1
	Jumlah	1.191	1.229	1.296	1.323	1.330

Sumber: Olahan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Alat Tangkap Perikanan

Selama lima tahun terakhir, jumlah dan komposisi alat tangkap perikanan di Kabupaten Sikka mengalami dinamika yang mencerminkan perubahan strategi dan praktik penangkapan ikan oleh nelayan. Secara keseluruhan, jumlah alat tangkap meningkat dari 12.820 unit pada tahun 2020 menjadi puncaknya pada 2023 dengan 13.297 unit, sebelum mengalami penurunan menjadi 12.764 unit pada 2024.

Salah satu alat tangkap yang paling dominan dan menunjukkan tren peningkatan stabil adalah pancing (*hand line*). Alat ini meningkat dari 9.011 unit pada 2020 menjadi 9.771 unit pada 2024. Kenaikan ini menegaskan bahwa pancing merupakan alat tangkap utama bagi sebagian besar nelayan di Sikka, terutama nelayan tradisional skala kecil.

Alat tangkap lain yang juga menunjukkan pertumbuhan adalah jaring insang tetap, yang melonjak signifikan dari 463 unit (2020) menjadi 983 unit pada 2024. Pukat cincin (*purse seine*) juga mengalami peningkatan tajam, hampir dua kali lipat dari 131 unit (2020) menjadi 246 unit (2024), menunjukkan adanya pergeseran sebagian nelayan ke alat tangkap yang lebih produktif untuk skala menengah. Sementara itu, bagan, sebagai alat bantu penangkapan yang umum digunakan di perairan tenang, juga bertambah dari 153 unit menjadi 230 unit pada 2024.

Namun, beberapa alat tangkap mengalami penurunan tajam. Penurunan paling drastis terjadi pada pukat pantai, dari 644 unit selama empat tahun berturut-turut menjadi hanya 107 unit pada 2024. Penurunan ini kemungkinan besar terkait dengan regulasi atau pembatasan penggunaan pukat karena dampaknya terhadap ekosistem pesisir. Bubu dan panah juga menunjukkan penurunan signifikan, masing-masing dari 179 ke 21 unit, dan dari 913 ke 65 unit dalam periode yang sama. Ini bisa mencerminkan perubahan preferensi nelayan terhadap alat tangkap yang lebih efisien atau perubahan dalam ketersediaan sumber daya ikan.

Jenis alat tangkap lainnya seperti longline, rawai dasar, huhate (*pole and line*), dan jala tebar relatif stabil dalam jumlah, menandakan keberlanjutan penggunaannya oleh kelompok nelayan tertentu tanpa perubahan signifikan.

Secara keseluruhan, dinamika alat tangkap perikanan di Kabupaten Sikka menunjukkan adanya pergeseran teknologi, adaptasi terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan, serta kemungkinan perubahan pada pola tangkapan dan perilaku nelayan. Perkembangan ini perlu terus dimonitor untuk memastikan keberlanjutan perikanan dan perlindungan sumber daya laut di wilayah tersebut. Jenis alat tangkap yang digunakan Nelayan di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.142
Jenis Alat Tangkap Perikanan di Kabupaten Sikka

No	Jenis alat tangkap	Jumlah unit				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pukat Pantai	644	644	644	644	107
2.	Pukat Cincing/Purse seine	131	132	149	171	246
3.	Jaring Insang Tetap	463	471	466	466	983
4.	Jaring Insang Hanyut	990	990	990	991	991
5.	Bagan	153	153	169	174	230
6.	Longline	3	3	3	3	3
7.	Rawai Dasar	92	92	92	92	92
8.	Huhate / Pole and Line	75	75	75	75	75
9.	Pancing / Hand Line	9.011	9.036	9.118	9.423	9.771
10.	Bubu	179	179	179	179	21
11.	Panah	913	913	913	913	65
12.	Jala Tebar	166	166	166	166	180
	Jumlah	12.820	12.854	12.964	13.297	12.764

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024 (diolah)

26) Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor ekonomi dan aktivitas sosial yang melibatkan perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan rekreasi, liburan, berwisata, dan mengenal budaya serta alam suatu daerah. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka agar dapat lestari dan berkelanjutan.

Kabupaten Sikka memiliki berbagai potensi destinasi wisata yang beragam mulai dari wisata alam hingga wisata keagamaan. Dari data dapat dilihat bahwa terdapat lebih dari 40 destinasi wisata di Kabupaten Sikka. Pantai Koka, Gereja Tua Sikka, Museum Bikon Blewut, Bukit Nilo, Tanjung Kajuwulu, Air Terjun Murusobe, Nusa Kutu, Sanggar Bliran Sina, Kawasan Wisata Alam Egon Blindit, Kojadoi, Taman Wisata Alam Teluk Maumere, Pulau Pemana, Pulau Amano Sikka, Patung Bunda Maria Bunda Segala Bangsa di Bukit Nilo, Replika Kota Betlehem Nelle, Gereja Tua, Patung Kristus Raja, Watu Kruz, Wisung Fatima Lela adalah destinasi destinasi wisata yang direkomendasikan oleh penggiat pariwisata. Potensi Sikka yang juga sudah menarik mata dunia adalah kain tenun. Di Sikka telah terdapat desa yang menjadi Desa Devisa Klaster Tenun NTT rintisan ASEAN Foundation. Ada 22 desa di Sikka yang didampingi sebagai Desa Devisa. Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret, juga menjadi tempat bersejarah yang menjadi tempat kunjungan umat Nasrani.

Potensi wisata yang demikian besar hingga hari ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, hal ini dapat dilihat melalui data yang disajikan pada tabel 2.143. Dari data jumlah kunjungan wisata, tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Sikka selalu mengalami penurunan sejak tahun 2018. Namun angka ini perlu dikonfirmasi, karena data dari BPS Provinsi NTT

menunjukkan bahwa data jumlah tamu yang menginap di hotel untuk Sikka mencapai angka 41.473 (Provinsi NTT Dalam Angka 2023). Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Sikka ini dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di NTT, berada pada urutan ketiga. Di Provinsi NTT, tercatat jumlah tamu yang menginap di hotel tahun 2022 paling tinggi adalah Kota Kupang dengan jumlah 313.357 orang, selanjutnya Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah 259.574 orang.

Lama kunjungan wisata sebagai indikator pariwisata juga menunjukkan fluktuasi meskipun terjadi peningkatan sejak tahun 2020 namun belum mampu mendekati lama kunjungan pada tahun 2018-2019. Penurunan kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Sikka ini tidak lepas dari adanya pandemi COVID-19 yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama menginap menentukan besaran belanja yang dilakukan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka menyatakan bahwa belanja wisatawan, pada 2021 mencapai Rp 27 miliar, sementara pada 2020 mencapai Rp 80 miliar. Sebelum pandemi COVID-19, pada 2017, 2018, dan 2019, belanja wisatawan mencapai Rp 90 miliar.

Tabel 2.143
Kinerja Pariwisata Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kunjungan wisata (orang)	20.986	25.933	36.041	36.041	41.861
2.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1,27	1,49	1,82	1,82	1,88
3.	Jumlah destinasi wisata	87	87	87	87	126
4	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata	9	9	10	10	10

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2024

Kinerja sektor pariwisata menurut Kemenparekraf bergantung pada upaya dan kinerja 4 pilar pariwisata. Pilar pertama adalah pilar destinasi. Pilar destinasi termasuk di dalamnya adalah atraksi, di Kabupaten Sikka teridentifikasi destinasi yang sangat banyak dan beragam. Dalam hal atraksi, pemerintah Kabupaten Sikka telah berupaya menyelenggarakan atraksi atraksi wisata untuk menarik wisatawan. Bahkan tanpa atraksi wisata, destinasi wisata religi sudah merupakan daya tarik tersendiri. Namun demikian atraksi saja tidak cukup untuk menarik minat wisatawan jika aksesibilitas dan juga fasilitas destinasi tidak tersedia secara memadai. Cukup banyak destinasi wisata yang sangat baik namun ketersediaan sarana dan prasarana sangat terbatas. Demikian juga dengan akses menuju tempat wisata yang sebagian besar masih harus menggunakan kendaraan pribadi, karena belum tersedianya fasilitas transportasi publik ke destinasi wisata.

Tabel 2.144
Data Event/Festival Daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2023

No	Nama Festival Skala Even	Tempat Penyelenggaraan	Waktu Penyelenggaraan	Rata-rata Jumlah Wisatawan Saat Penyelenggaraan Event (Orang)	Rata-rata Belanja/Pengeluaran Wisatawan Saat Penyelenggaraan Event (Rp)
1	Festival Toja Me/Lokal	Kecamatan Lela	25 Agustus 2023	500-1000	10-20 juta
2	Festival Jelajah Maumere/ Nasional	Kota Maumere : 21 Kecamatan 4 Kabupaten	14-16 September 2023	2000-2500	20-25 juta
3	Festival Mapitara/ Lokal	Kecamatan Mapitara	28 Oktober 2023	500-1000	10 - 15 juta
4	Festival hewokloang/ Lokal	Kecamatan Hewokloang	10 November 2023	500-1000	10 - 12 juta

No	Nama Festival Skala Even	Tempat Penyelenggaraan	Waktu Penyelenggaraan	Rata-rata Jumlah Wisatawan Saat Penyelenggaraan Event (Orang)	Rata-rata Belanja/Pengeluaran Wisatawan Saat Penyelenggaraan Event (Rp)
5	Festival Pati Karapau/ Lokal	Desa Rokirole dan Desa Tuanggeo Kecamatan Palue	20 November	1000-2000	10 - 12 juta
6	Festival Natar Sikka/ Lokal	Desa Sikka Kecamatan Lela	26 Desember 2023	500-1000	10 - 12 juta

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2024

Aspek kedua adalah pilar promosi. Pilar promosi adalah upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan potensi wisata kepada calon wisatawan. Berkaitan dengan pilar promosi, sesungguhnya Kabupaten Sikka diuntungkan dengan potensi yang dimiliki. Tanpa upaya promosi yang berat, destinasi wisata religi telah terpromosikan dengan sendirinya. Pada aspek wisata budaya, masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat telah melakukan berbagai gerakan untuk mempromosikan budaya Sikka yang luar biasa, mulai dari kerajinan, musik, maupun budaya lainnya. Berbagai upaya promosi ini tidak dapat membuahkan hasil jika tidak didukung oleh pilar pilar yang lain.

Pilar selanjutnya adalah pilar industri pariwisata. Industri pariwisata meliputi semua jasa pendukung pariwisata, mulai dari hotel, restoran, agen perjalanan wisata hingga jasa perbankan. Saat ini jumlah hotel di Kabupaten Sikka sudah cukup banyak, walaupun dari data terlihat fluktuatif. Dibandingkan dengan Kota Kupang yang memiliki jumlah kunjungan wisata yang sangat tinggi tentu jumlah hotel di Kabupaten Sikka jauh lebih sedikit.

Tabel 2.145
Jumlah Hotel di Kabupaten Sikka, Kota Kupang, dan Provinsi NTT
Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	40	40	42	44	42
Kota Kupang	71	76	57	57	57
Provinsi NTT	505	487	489	489	489

Sumber: BPS, 2025

Memenuhi kebutuhan wisatawan dibutuhkan rumah makan dan restoran. Dari data yang tersedia tidak terdapat perubahan jumlah rumah makan di Kabupaten Sikka sejak tahun 2018. Dalam hal biro perjalanan wisata tercatat 3 biro perjalanan wisata yang dapat dideteksi dari situs web tentang pariwisata. Kondisi hotel, restoran dan biro perjalanan ini menunjukkan bahwa industri pariwisata di Sikka memang belum cukup berkembang.

Tabel 2.146
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Paga	1	2	2	2	2
2.	Kewapante	0	35	35	20	18
3.	Kangae	5	11	11	18	20
4.	Nita	1	1	1	1	2
5.	Alok	50	73	73	78	73
6.	Alok Barat	0	9	9	8	36
7.	Alok Timur	5	63	63	69	62
Jumlah		62	194	194	196	213

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2024

Pilar terakhir dari pariwisata adalah kelembagaan pariwisata yang mencerminkan kesiapan masyarakat untuk menjadi masyarakat pariwisata. Kinerja pilar ini dapat dilihat dari jumlah kelompok masyarakat pengelola wisata atau bisa dikenal dengan pokdarwis. Hingga tahun 2021 jumlah pokdarwis tercatat 9, yang di tahun 2022 meningkat menjadi 10 pokdarwis. Jumlah ini jika dibandingkan dengan destinasi wisata yang mencapai 43 sangat jauh dari cukup. Artinya secara umum kesiapan masyarakat untuk menjadi masyarakat pariwisata juga belum cukup. Namun demikian tingkat kesiapan masyarakat itu sangat beragam, ada pokdarwis yang sudah sangat maju dan menjadi masyarakat pariwisata yang sesungguhnya, namun ada masyarakat yang bahkan belum tau mengenai pariwisata.

27) Urusan Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Sikka. Melalui pengembangan pertanian yang berkelanjutan, tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, pembangunan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sektor pertanian daerah meliputi produksi pertanian, luas lahan, produktivitas pertanian, pendapatan petani, serta berbagai indikator lainnya. Indikator tersebut memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan sektor pertanian, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai indikator tersebut dirangkum oleh capaian kinerja pertanian seperti disajikan dalam Tabel berikut ini. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kinerja makro sektor pertanian cukup fluktuatif.

Tabel 2.147
Kinerja Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	36,41	37,43	38,16	38,53	38,51
2	Pertumbuhan Sektor Pertanian	0,8	3,58	4,24	4,32	3,25

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2020-2024

Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Sejalan dengan kontribusi sektor terhadap PDRB, produksi masing masing subsektor juga menunjukkan fluktuasi. Berikut diuraikan kinerja masing masing subsektor.

Produksi Tanaman Pangan

Sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Sikka memegang peranan yang cukup penting. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Sikka, produksi tanaman pangan juga merupakan sumber pendapatan petani. Komoditi tanaman pangan utama yang dibudidayakan di Kabupaten Sikka adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau dan kacang tanah. Produksi tanaman pangan Kabupaten Sikka tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.148
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi	17.235,22	11.398,9	11.345,98	12.456,79	12.710,01
2.	Jagung	19.488,64	30.344,36	29.416	17.202	15.800,2*

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	Kacang Tanah	1.148,56	1.191,15	1.218	946	640,6*
5.	Kacang Hijau	1.372,9	1.614	1.496	781	597,7*
6.	Ubi Kayu	76.626,82	10.7902,04	67.922	72.545	48.778*
7.	Ubi Jalar	3.160,82	3.758	3.525	4.401	2.399,4*

* Angka sementara 2024
Sumber: BPS, 2024

Kabupaten Sikka memiliki jumlah produksi ubi kayu tertinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi NTT. Pada tahun 2022, produksi ubi kayu Kabupaten Sikka adalah 67.922 ton, angka ini adalah 12 persen dari total produksi ubi kayu di seluruh NTT. Namun demikian, jumlah produksi ubi kayu di Kabupaten Sikka cenderung fluktuatif. Pada komoditas padi, jika dibandingkan dengan NTT secara keseluruhan, produksi padi Kabupaten Sikka relatif rendah. Pada tahun 2022, produksi padi Kabupaten Sikka hanya 1,5 persen dari total produksi padi NTT. Jika dilihat dari trennya, produksi padi Kabupaten Sikka juga fluktuatif. Produksi jagung di Kabupaten Sikka juga relatif fluktuatif dari tahun ke tahun (lihat Tabel 2.149). Produksi jagung di Sikka pada tahun 2022 sebanyak 29.415 ton, angka ini merupakan 4,21 persen dari total produksi jagung yang ada di seluruh Provinsi NTT.

Tabel 2.149
Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi	3.899	2.786	3.212	3.170	3.428
2.	Jagung	13.016,2	13.314	13.733	8.469	7.779,5
3.	Kacang Tanah	1.506,5	1.851	1.572	1.191	806,8
4.	Kacang Hijau	1.384,6	2.029	1.694	1.263	967,2
5.	Ubi Kayu	5.929,1	6.152	3.960	4.156	2.794,5
6.	Ubi Jalar	624,4	690	665	781	425,5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Kecenderungan fluktuasi produksi tanaman pangan ini berkaitan dengan beberapa aspek. Pertama, luas areal tanaman pangan yang mengalami tren penurunan setiap tahun. Kedua, hal tersebut berkaitan dengan produktivitas lahan yang fluktuatif. Sebagai contoh, dari data BPS Provinsi NTT, produktivitas padi di Kabupaten Sikka secara berturut-turut sejak tahun 2020, 2021, 2022 adalah 4,13 ton/ha, 3,50 ton/ha, dan 3,90 ton/ha. Ketiga, faktor seperti perubahan iklim dan serangan hama tikus juga berdampak signifikan terhadap penurunan hasil produksi tanaman pangan dan ketahanan pangan di Kabupaten Sikka. Keempat, diketahui bahwa lahan pertanian di Kabupaten Sikka seluas 173 ribu hektar dan baru dimanfaatkan 150 ribu hektar sementara 23 ribu hektar menjadi lahan tidur.

Fluktuasi produksi tanaman pangan dengan berbagai penyebab itu mengirimkan pesan bahwa pengelolaan pertanian tanaman pangan masih bersifat tradisional/seadanya. Karakter tradisional di satu sisi berkaitan dengan pengetahuan petani yang masih rendah. Pada sisi lain harga produk pertanian tanaman pangan tidak memiliki cukup insentif bagi petani untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari harga produk pertanian tanaman pangan yang dari tahun ke tahun tidak mengalami perbaikan yang berarti, bahkan cenderung tetap.

Produksi Tanaman Hortikultura

Sub sektor selanjutnya adalah hortikultura. Hortikultura terdiri dari 4 (empat) jenis tanaman yakni tanaman sayur-sayuran, buah-buahan (semusim dan tahunan), biofarmaka (obat-obatan dan rempah) serta tanaman hias. Kabupaten Sikka memiliki berbagai jenis

komoditi sayuran dan buah-buahan yang bervariasi. Pada tahun 2020, labu siam menjadi salah satu komoditas sayuran dengan produksi tertinggi mencapai 5.121,39 ton dan terendah adalah bawang merah mencapai 211,24 ton. Hal ini disebabkan karena selain sebagai bahan pangan, labu siam juga sebagai pakan ternak. Tahun 2021, wortel menjadi komoditas tertinggi produksinya mencapai 627,44 ton. Tahun 2022, tomat menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Sikka. Tercatat total produksi komoditi ini mencapai 457,57 ton. Produksi tomat di Kabupaten Sikka sendiri telah menyumbangkan 8,29 persen kontribusi dari seluruh produksi Tomat di Provinsi NTT. Selain dua komoditi di atas, masih terdapat komoditi lain seperti kangkung, terung, bayam, dan sebagainya. Akan tetapi, jika dilihat dari Tabel 2.150, produksi tanaman sayuran buah semusim di Kabupaten Sikka ini cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti harga jual komoditi yang stagnan dan perubahan iklim cuaca di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.150
Produksi Tanaman Sayuran Buah Semusim Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Merah	211,24	37,82	80,45	49,00	116,91
2	Petsai/Sawi	744,1	1.034,7	326,77	313,63	257,78
3	Wortel	550,25	627,44	373,55	220,05	102,65
4	Tomat	865,74	267,10	457,57	377,36	378,90
5	Terung	981,43	142,30	177,64	59,82	143,50
6	Mentimun	116,04	30,31	40,71	40,27	25,34
7	Labu siam	5.121,39	350,65	183,13	200,05	359,44
8	Kangkung	868,98	226,42	458,09	347,90	392,63
9	Bayam	450,21	128,82	207,69	220,31	162,44
10	Cabe	1.053,07	113.84	200,45	157,85	248,42

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Selanjutnya adalah produksi buah-buahan tahunan. Sub sektor ini terdiri dari beragam komoditas meliputi alpukat, durian, mangga, nangka, nanas, pepaya, pisang, rambutan, dan salak. Komoditas pisang merupakan komoditas unggulan pertama dengan total produksi selama 5 (lima) tahun mencapai 132.767,49 ton. Kemudian disusul dengan komoditas nenas mencapai 36.345,80 ton dan mangga mencapai 18.492,30 ton. Sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, tanaman pisang di hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Sikka terkena penyakit layu bakteri atau penyakit darah pisang/moko yang disebabkan oleh bakteri *Raistonia solanecearum* atau dikenal dengan nama *Blood Disease Bacterium* (BDB) sehingga menyebabkan terjadi penurunan produksi pisang secara signifikan di wilayah Kabupaten Sikka.

Tabel 2.151
Produksi Buah dan Sayuran Tahunan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Alpukat	3.627,08	2.455,62	2.638,3	1.119,6	974,79
2	Durian	178,6	855,21	1.491,04	486,45	131,15
3	Mangga	8.064	4.211,5	1.941,6	1.336,4	2.938,8
4	Nangka	6.621,3	1.802,4	920,2	748,4	811,86
5	Nenas	29.079,7	2.644,6	3.606,4	675,5	339,6
6	Pepaya	9.447,9	7.394.03	3.518,1	1.738,23	1.314,9
7	Pisang	82.313,17	28.495,2	15.067,3	5.632,92	1.258,9
8	Rambutan	419,59	394,02	256,5	246,6	126,8
9	Salak	1.517,6	541,9	748,1	224,01	78,2

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Golongan hortikultura lain yaitu jenis tanaman biofarmaka yang terdiri dari tanaman rempah dan obat-obatan. Tanaman biofarmaka menjadi subsektor ketiga pada golongan hortikultura. Kabupaten Sikka sendiri memiliki beragam jenis komoditi tanaman biofarmaka seperti jahe, laos, kencur, kunyit, dan temulawak yang menjadi komoditas unggulan dengan tingkat produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi lainnya. Komoditas jahe menjadi komoditi unggulan pertama tertinggi pada tahun 2020 mencapai 145,63 ton. Angka ini setara dengan 20,26 persen dari total produksi komoditi jahe di Provinsi NTT dan menjadi daerah penghasil komoditi jahe terbesar kedua setelah Kabupaten Manggarai Barat. Akan tetapi, produksi jahe di Kabupaten Sikka masih cenderung fluktuatif setiap tahunnya.

Tabel 2.152
Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Komoditi	Produksi (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jahe	145,63	65,27	116,95	91,27	309,831
2	Laos	63,45	67,62	68,43	24,61	350,118
3	Kencur	28,91	15,63	23,26	15,53	59,554
4	Kunyit	105,24	67,81	88,01	44,33	237,598
5	Temulawak	19,12	12,66	0,95	3,85	350,118

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Berikutnya kunyit menjadi komoditi unggulan selanjutnya di Kabupaten Sikka dengan total produksi tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai 105,24 ton. Kondisi produksi yang fluktuatif di satu sisi berkaitan dengan pengelolaan produksi yang sebagian besar masih bersifat tradisional. Pada sisi lain harga produk cenderung fluktuatif karena masih dipasarkan dalam bentuk mentah. Selanjutnya golongan tanaman hortikultura lain yaitu tanaman hias. Untuk tanaman hias di Kabupaten Sikka tidak berkembang dengan baik disebabkan karena luas usahanya berkisar di bawah angka 0,1 ha.

Produksi Tanaman Perkebunan

Sub sektor ketiga adalah tanaman perkebunan. Sub sektor ini terdiri banyak tanaman, namun yang tercatat sebagai produk utama adalah tanaman kelapa, jambu mete, kopi, kakao, kemiri, tembakau, cengkeh, pala, vanili, dan lada. Komoditi Kelapa menjadi komoditas unggulan dengan tingkat produksi tertinggi di Kabupaten Sikka dan mengalami tren peningkatan sejak tahun 2021 (Tabel 2.153). Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu 10.590,40 ton atau 37,83 persen dari total keseluruhan produksi perkebunan di Kabupaten Sikka tahun 2024. Produk kelapa ini selanjutnya diolah menjadi kopra oleh petani. Setiap tahun setidaknya petani kelapa Sikka menghasilkan rata-rata 2,5 ton kopra. Cara pengolahan kelapa menjadi kopra hingga saat ini masih banyak dilakukan secara tradisional. Cara pengolahan yang sederhana ini menjadi salah satu penyebab dari relatif rendahnya harga kopra yang dihasilkan. Itulah mengapa potensi pertanian yang demikian tinggi belum mampu menjadi sumber kesejahteraan petani.

Tabel 2.153
Produksi Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kelapa	10.568,56	10.557,54	10.574,5	10.585,27	10.590,4*
2.	Jambu Mete	8.978,30	8.910,10	8.913,85	8.922,1	8.923,8*
3.	Kopi	137,6	129,6	129.63		131,2*
	- Arabika	-	-	-	-	-
	- Robusta	137,6	129,6	129,6	130,2	131,2*
4.	Kakao	8.058,7	8.056,4	8.015,57	8.023,4	7.026,9*
5.	Kemiri	221,3	193,8	194,3	200,40	211,1*

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.	Tembakau	60,70	37,49	37,81	40,10	40,20*
7	Cengkeh	471,99	473,85	461,94	472,2	475,20*
8	Pala	89,1	89,70	94,6	102	103,9*
9	Vanili	111,3	112,2	113,79	123,6	128,1*
10	Lada	37,75	37,75	37,75	43,05	44,05*

Ket: *Data sementara olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Komoditi terbanyak kedua adalah jambu mete. Meski mengalami fluktuasi produksi setiap tahunnya, mete menjadi komoditas unggulan selanjutnya dengan total produksi pada tahun 2024 mencapai 8.923,80 ton atau 31,88 persen dari total produksi perkebunan Kabupaten Sikka tahun 2024. Sikka merupakan produsen mete kedua tertinggi di NTT. Produksi jambu mete di Provinsi NTT banyak disuplai dari Kabupaten Flores Timur sebesar 14 ribu ton atau 26,92 persen, Kabupaten Sikka 17,73 persen (9 ribu ton), Kabupaten Sumba Barat Daya 11,62 persen (6 ribu ton), Kabupaten Ende 7,83 persen (4 ribu ton), Kabupaten Sumba Timur 6,76 persen (3 ribu ton), dan Kabupaten Alor 5,11 persen (2,6 ribu ton), sisanya sebesar 24,04 persen merupakan kontribusi dari kabupaten lainnya (Pusdatin Kementerian Pertanian, 2022). Dengan potensi yang ada sesungguhnya jambu mete dapat menjadi sumber kesejahteraan petani, namun demikian minimnya hilirisasi, membuat sebagian besar jambu mete masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas.

Kakao adalah komoditas unggulan ketiga dengan total produksi kakao pada tahun 2024 mencapai 7.026,90 ton atau 25,10 persen dari total produksi perkebunan di Kabupaten Sikka tahun 2024. Akan tetapi, sama dengan dua komoditas unggulan sebelumnya, produksi Kakao juga masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kakao di Sikka sudah menarik minat banyak investor. Sejak tahun 2013, PT Cargill Indonesia telah bekerja sama dengan petani kakao untuk menghasilkan produk kakao yang baik. Kerja sama ini telah menghasilkan kesejahteraan bagi petani. Namun demikian belum semua petani kakao mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama tersebut. Upaya pemerintah daerah yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan kerja sama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) di Jember, Jawa Timur. Kerja sama meliputi pendampingan dan mendatangkan bibit kakao bersertifikat. Namun masih dibutuhkan upaya yang lebih baik lagi agar kakao mampu menjadi komoditas andalan sumber kesejahteraan petani.

Produksi Peternakan

Secara umum kondisi peternakan di Kabupaten Sikka diklasifikasikan berdasarkan jenis yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Ternak besar terdiri atas ternak sapi, kerbau, dan kuda. Ternak kecil terdiri atas kambing dan babi. Ternak unggas terdiri atas ayam buras, ayam potong, ayam petelur, itik, dan aneka unggas. Dari tabel di bawah ini terlihat adanya kecenderungan kenaikan jumlah populasi ternak besar dari tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 2.154
Data Populasi Ternak Besar Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Ternak Besar	Jumlah Populasi (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi potong	15.895	16.277	19.531	20.477	24.222
2	Kerbau	1.884	1.843	1.898	1.815	2.050
3	Kuda	2.731	2.792	2.935	3.507	3.544

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel di atas, komoditas sapi potong mengalami peningkatan jumlah populasi sejak tahun 2020 sampai 2024. Hal ini disebabkan karena ketersediaan pakan dan luasan

padang penggembalaan yang cukup mendukung kebutuhan ternak. Selain itu adanya peningkatan permintaan daging sebagai salah satu sumber protein hewani menjadi penyebab budidaya ternak sapi berkembang baik. Hal lainnya juga adalah adanya permintaan ternak sapi dari luar wilayah Kabupaten Sikka cukup tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk memelihara ternak sapi lebih intensif. Kondisi ini menyebabkan kenaikan jumlah populasi. Untuk ternak kerbau, perkembangan jumlah populasi mengalami fluktuasi. Kerbau di Kabupaten Sikka lebih banyak diarahkan kepada tenaga kerja daripada melakukan budidaya secara intensif. Tenaga kerja disini adalah untuk membajak areal persawahan. Untuk perkembangan populasi kuda di Kabupaten Sikka mengalami perkembangan peningkatan jumlah populasi dari tahun 2020 s/d 2024. Hal ini disebabkan karena ternak kuda memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain sebagai ternak potong dan komoditas antar pulau, ternak kuda juga sebagai ternak untuk keperluan adat-istiadat masyarakat Kabupaten Sikka baik peristiwa perkawinan, kematian, dan urusan adat lainnya.

Tabel 2.155
Data Populasi Ternak Kecil Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Ternak Kecil	Jumlah Populasi (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kambing	116.439	118.209	124.117	129.042	151.443
2	Babi	14.481	9.680	9.487	9.933	11.773

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Data tabel di atas menunjukkan ternak kambing mengalami peningkatan populasi sejak tahun 2020 sampai 2024. Hal ini karena adanya dukungan lahan padang penggembalaan dan ketersediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang memadai yang mendukung proses tumbuh dan berkembangnya populasi ternak kambing. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan jumlah populasi adalah naiknya permintaan ternak kambing dari luar wilayah Kabupaten Sikka serta konsumsi daging kambing dalam wilayah Kabupaten Sikka yang meningkat sehingga menyebabkan petani ternak bersemangat memelihara intensif ternak kambing.

Untuk ternak babi, terjadi fluktuasi terhadap jumlah populasi. Penurunan yang signifikan terjadi dari tahun 2020 ke 2021 karena masuknya wabah penyakit flu babi *African Swine Fever* (ASF) yang menyerang ternak babi dalam jumlah besar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sikka. Penyakit ini menimbulkan dampak ekonomi yang besar terhadap pendapatan masyarakat. Pendapatan mengalami penurunan dan tidak sedikit yang mengalami kerugian. Dampak negatif adalah masyarakat menjadi takut mengkonsumsi daging babi karena mengandung penyakit. Akibatnya harga jual ternak babi menurun drastis.

Tabel 2.156
Data Populasi Ternak Unggas Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Ternak Unggas	Jumlah Populasi (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayam buras	291.772	295.011	309.763	298.284	348.334
2	Ayam ras petelur	6.610	4.836	22.616	27.365	27.434
3	Ayam pedaging	104.987	71.066	301.000	10.154	11.427
4	Itik	879	900	839	881	2.043

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel 2.156 di atas, komoditas ayam buras (bukan ras) atau lebih dikenal dengan istilah ayam kampung mengalami fluktuasi peningkatan populasi dari tahun 2020 s/d 2024 karena karena ditunjang oleh naiknya permintaan akan konsumsi daging ayam buras sebagai daging sehat dan memiliki cita rasa nikmat. Karakteristik ayam buras sebagai ternak unggas yang tahan terhadap wabah penyakit, turut memberi andil terhadap naiknya jumlah populasi.

Selain itu, kebanyakan masyarakat memelihara ayam buras hanya dilepas begitu saja dan membiarkan ayam mencari makan sendiri di lingkungan sekitar.

Ayam pedaging atau ayam potong mengalami penurunan jumlah populasi yang sangat signifikan dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini disebabkan karena timbulnya wabah covid-19 berpengaruh terhadap akses transportasi yang membawa *Day Old Chick* (DOC)/bibit ayam pedaging baik melalui darat, laut, maupun udara ditutup atau tidak beroperasi sama sekali. Semua bibit didatangkan dari luar pulau sehingga sempat terjadi kelangkaan luar biasa terhadap persediaan bibit ayam pedaging saat itu. Lonjakan signifikan terjadi di tahun 2022 karena iklim usaha peternakan sudah pulih kembali pasca wabah covid-19. Namun kemudian turun di tahun 2023. Hal ini karena beberapa pengusaha peternakan ayam pedaging tidak memberikan akses data terkait jumlah populasi sehingga sedikit sekali data yang didapat.

Untuk ayam petelur terjadi penurunan jumlah populasi dari tahun 2020 ke 2021. Alasannya karena pandemi covid-19 yang terjadi saat itu. Seiring berjalannya waktu, perlahan jumlah populasi ayam petelur mengalami peningkatan populasi sejak tahun 2022 sampai 2024. Hal ini karena masyarakat sadar akan pentingnya nilai gizi telur dan perlindungan tubuh pasca wabah COVID-19. Ternak itik di Kabupaten Sikka dipelihara lebih kepada kegemaran atau hobi dan untuk konsumsi sendiri sehingga populasinya tidak begitu banyak.

Tabel 2.157

Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Jenis Penyakit Hewan Menular	Jumlah Kasus				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rabies*	4	1	5	66	42
2	ASF	3.128	60.000	1.000	1.500	2.000
3	SE	-	-	-	-	65
4	PMK	-	-	-	-	-
5	Hoq Cholera	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Antraks	-	-	-	-	-
7	Brucelosis	-	-	-	-	-

* kasus rabies pada hewan

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Bahwa kasus rabies sangat dipengaruhi langsung oleh cakupan vaksinasi terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) khususnya anjing dengan rata-rata cakupan per tahun yang masih di bawah 50 persen, masih jauh dari rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia yakni minimal cakupan 70 persen untuk dapat menekan kasus pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk Penyakit Hewan Menular (PHM) strategis lainnya baik yang zoonosis maupun non zoonosis, dukungan ketersediaan logistik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (vaksin, obat hewan dan vitamin, desinfektan, alat dan bahan) untuk pengujian laboratorium di laboratorium veteriner dan logistik lainnya ikut berpengaruh secara langsung. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 dukungan terhadap hal ini masih sangat terbatas dari segi pembiayaan sehingga belum bisa berdampak kepada penekanan kasus PHM strategis secara signifikan.

Tabel 2.158

Data Populasi Hewan Penular Rabies Anjing dan Realisasi Vaksinasi Hewan Penular Rabies Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Tahun	Populasi HPR (ekor)	Realisasi Vaksinasi HPR (ekor)
1	2020	55.000	20.000
2	2021	50.000	-
3	2022	45.000	10.850
4	2023	45.000	11.500
5	2024	40.000	10.700

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel 2.158 di atas maka realisasi tertinggi vaksinasi pada anjing terjadi pada tahun 2020 sebanyak 20.000 ekor. Itupun belum mencapai 50 persen dari total keseluruhan populasi anjing di Kabupaten Sikka. Tahun 2021 tidak terjadi pelaksanaan vaksinasi karena pemerintah fokus menyelesaikan dan mengatasi dampak wabah penyakit covid-19. Vaksinasi dilanjutkan kembali pada tahun 2022 sampai 2024 namun dengan tingkat realisasi yang masih juga tidak mencapai 50 persen. Hal ini berkaitan dengan penyediaan vaksin HPR yang masih terbatas di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

28) Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi suatu daerah, yang memegang peran strategis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB, Pertumbuhan sektor perdagangan, jumlah pedagang dan kelompok pedagang, dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Sikka cukup tinggi, dengan tingkat pertumbuhan yang juga tinggi. Pertumbuhan yang rendah di masa pandemi COVID-19, merupakan anomali yang terjadi pada semua sektor. Aktivitas ini melibatkan lebih dari 6.000 pedagang yang tergabung dalam 80-an kelompok pedagang, yang dari tahun ke tahun angkanya menunjukkan peningkatan.

Tabel 2.159
Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	10,84	10,36	10,79	11,12	11,41
2.	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	-5,18	1,42	7,03	5,71	9,20
3.	Jumlah Pedagang	6.088	6.088	6.088	1.000	1.000
4.	Jumlah kelompok pedagang	77	82	87	1.505	1.505

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka, 2024-2026; Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2020-2024

Fluktuasi kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh aliran barang yang masuk dan barang yang keluar. Data PDRB berdasar pengeluaran tercatat nilai ekspor bersih Kabupaten Sikka selalu dalam keadaan negatif, dengan nilai yang cukup besar. Sebagai contoh tahun 2023 tercatat net ekspor Kabupaten Sikka mencapai angka minus Rp 2,7 triliun atau sekitar 45 persen dari PDRB. Angka ini memberikan pesan bahwa sekalipun Kabupaten Sikka banyak menghasilkan uang dari ekspornya, namun uang tersebut kembali keluar untuk membeli barang barang dari luar daerah. Ini menjadi kata kunci penting mengapa potensi dan produksi yang dihasilkan belum mampu menciptakan kesejahteraan penduduk Kabupaten Sikka.

Komoditas yang masuk ke Kabupaten Sikka mulai dari kebutuhan pangan hingga bahan bangunan. Sejak tahun 2018, beras merupakan komoditas yang paling banyak diimpor ke Kabupaten Sikka. Meskipun jumlah beras yang masuk cenderung fluktuatif, akan tetapi jumlahnya tidak pernah berada di bawah angka 50.000 ton. Selain beras, komoditi pangan lain yang diimpor ke Kabupaten Sikka adalah Jagung yang pada tahun 2022 bahkan mencapai 66 ton. Selain itu, masih terdapat komoditi lain yang masuk ke Kabupaten Sikka pada tahun 2022 seperti tepung sebanyak 14.038 ton, sayuran sebanyak 11.205 ton, dan sebagainya. Hal ini menandakan adanya permintaan yang tinggi terhadap komoditi-komoditi ini sehingga

Kabupaten Sikka masih memerlukan pasokan dari daerah lain untuk memenuhi permintaan tersebut.

Untuk produk selain pangan tidak tersedia data secara memadai, namun demikian dari hasil FGD didapatkan informasi bahwa sebagian besar produk bahan bangunan juga didatangkan dari luar daerah. Setara dengan itu bahan pakaian maupun berbagai peralatan rumah tangga yang tidak dapat diproduksi oleh penduduk Sikka juga didatangkan dari luar daerah.

Pada sisi lain perdagangan yakni ekspor, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, hampir seluruh produk pertanian dan perikanan Kabupaten Sikka merupakan produk produk yang dijual keluar daerah, baik dalam bentuk mentah maupuan telah dilakukan pengolahan, baik ke daerah lain di Indonesia atau ekspor ke negara lain. Beberapa barang yang dijual keluar daerah di antaranya meliputi hewan ternak, komoditi tanaman hortikultura, buah dan sayuran, ikan, hingga produk perkebunan.

Pada tahun 2022, kelapa kupas menjadi barang yang paling banyak dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka yaitu sebanyak 2.648 ton. Masih dari produk perkebunan komoditas keluar terbanyak adalah Kakao sebanyak 779 ton. Untuk hewan ternak, sebanyak 1.508 ekor kambing menjadi barang yang paling banyak keluar dari Kabupaten Sikka, disusul oleh kuda (53 ekor), sapi (51 ekor) dan kerbau (46 ekor). Untuk komoditas perikanan telah dijelaskan dalam analisis urusan perikanan.

Analisis atas jenis barang yang dibeli dan yang dijual dari Kabupaten Sikka memberikan informasi yang cukup jelas mengapa net ekspor Kabupaten Sikka memiliki angka negatif. Produk yang dijual dari Sikka seluruhnya merupakan produk pertanian yang sebagian besar dijual dalam bentuk mentah. Secara alamiah produk pertanian yang belum diolah merupakan produk yang cepat rusak. Dalam kondisi produk cepat rusak maka petani sebagai produsen tidak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Itulah sebabnya produksi yang tinggi belum mampu mendatangkan kesejahteraan atau menghasilkan uang yang cukup untuk membeli barang dari luar daerah. Pada sisi lain produk yang dibeli dari luar daerah adalah produk makanan dan produk hasil industri. Produk makanan, merupakan produk kebutuhan pokok yang pasti akan dibeli dengan harga berapapun selama penduduk masih memiliki kemampuan untuk membelinya. Sementara itu produk industri secara alamiah memiliki daya tawar yang cukup tinggi, sebab selain produknya tidak mudah rusak, pada umumnya produk tersebut juga merupakan barang yang dibutuhkan sekalipun untuk memenuhi kebutuhan sekunder, misalnya peralatan rumah tangga.

Berkaitan dengan perdagangan, penting juga untuk mendiskusikan perdagangan di dalam daerah. Aktivitas perdagangan membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat dicermati dari jumlah sarana dan prasarana perdagangan. Jumlah pasar tradisional dan modern dapat memberikan gambaran ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan. Jumlah pasar tradisional dan modern mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Semakin banyak pasar, baik tradisional maupun modern, umumnya menandakan tingkat kegiatan jual beli yang aktif di tingkat lokal. Selain itu, jenis pasar juga bisa memberikan gambaran terkait karakteristik konsumen hingga aksesibilitas dan distribusi barang di Kabupaten Sikka. Berikut data terkait jumlah pasar berdasarkan jenisnya yang ada di Kabupaten Sikka yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.160
Jumlah Pasar di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Jenis Pasar	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pasar Tradisional	39	40	40	40	40
2.	Pasar Modern	178	178	178	178	178

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka, 2024-2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, kondisi pasar yang ada di Kabupaten Sikka pada tahun 2023 telah didominasi oleh pasar modern sebanyak 178 pasar, sedangkan jumlah pasar tradisional pada tahun 2023 hanya ada 40 pasar. Dominasi pasar modern di Kabupaten Sikka yang dimulai sejak tahun 2020 yang menunjukkan adanya potensi peningkatan permintaan terhadap jenis barang yang lebih spesifik dan kemampuan daya beli yang lebih tinggi.

Dilihat dari persebarannya, berdasar data dari Dinas perdagangan Koperasi dan UMKM, pasar tradisional tersedia hampir di setiap kecamatan dengan jumlah pasar yang bervariasi. Dari 21 kecamatan, terdapat 2 kecamatan yang tidak memiliki pasar yakni Kecamatan Koting dan Kecamatan Kangae. Sementara kecamatan dengan pasar tradisional terbanyak adalah Kecamatan Nita sebanyak 7 pasar dan Kecamatan Talibura sebanyak 5 pasar, sedangkan kecamatan lain bervariasi antara 1 sampai 3 pasar.

Untuk pasar modern hanya ada di 4 kecamatan yakni Kewapante, Kangae, Alok dan Alok Timur dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Alok (8 pasar) dan Kecamatan Alok Timur (11 pasar). Dua kecamatan ini memiliki pasar modern yang cukup banyak karena secara ekonomi memang di kedua kecamatan inilah aktivitas perekonomian masyarakat tumbuh dengan pesat. Posisinya sebagai pusat pemerintahan menjadikan kedua kecamatan ini berkembang lebih pesat dibandingkan kecamatan lainnya. Data tersebut menyiratkan bahwa kegiatan perekonomian di Sikka khususnya terkait dengan sektor perdagangan masih terpusat di wilayah tertentu. Hal tersebut bisa saja menimbulkan permasalahan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di Kabupaten Sikka.

29) Urusan Perindustrian

Sektor perindustrian merujuk pada bagian ekonomi yang terlibat dalam produksi barang-barang secara massal melalui pengolahan bahan mentah atau bahan baku menjadi produk jadi. Ini mencakup berbagai industri seperti manufaktur dan industri lainnya. Beberapa indikator yang umumnya digunakan termasuk pertumbuhan nilai tambah industri, kontribusi sektor perindustrian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri, hingga cakupan bina kelompok pengrajin. Data terkait indikator-indikator tersebut disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.161

Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	1,72	1,74	1,71	1,84	1,85
2	Laju Pertumbuhan sektor industri pengolahan	-3,26	0,95	6,54	7,53	3,84

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, Provinsi NTT Dalam Angka, 2024

Pada tabel di atas, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sikka menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2020 hingga 2024, dengan angka sekitar 1,72 hingga 1,85. Indikator ini menunjukkan betapa lemahnya kegiatan peningkatan nilai tambah di Kabupaten Sikka. Namun, Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan menunjukkan kinerja yang cukup bagus meskipun peningkatan pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Membaiknya kondisi perindustrian itu didukung oleh terus berkembangnya perusahaan industri baik industri besar maupun industri kecil. Tercatat industri besar dan sedang yang beroperasi di Kabupaten Sikka pada tahun 2022 sebanyak 3 perusahaan, meningkat dari tahun tahun sebelumnya yang hanya 2. Untuk industri kecil dan mikro jumlahnya jauh lebih banyak dan terus mengalami peningkatan (lihat Tabel 2.161). Sebagaimana karakter usaha maka usaha kecil secara makro memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan usaha besar, namun demikian jika dilihat per

perusahaan penyerapan tenaga kerja usaha besar tentu lebih tinggi dibandingkan usaha mikro dan kecil.

Tabel 2.162
Kinerja Industri Pengolahan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2023

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah industri mikro dan kecil	702	830	923	1.101	1.901
2	Jumlah tenaga kerja industri mikro dan kecil (orang)	24.767	40.283	-	6.687	6.730
3	Nilai pendapatan industri kecil dan mikro (Rp Miliar)	335,05	598,64	-	-	-
4	Pendapatan per usaha industri kecil dan mikro (Rp juta)	21,03	25,6	-	-	-
5	Jumlah industri Menengah	3	3	-	-	-
6	Jumlah Industri Besar	-	-	-	-	2
6	Jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang (orang)	-	-	-	-	<2
7	Cakupan bina kelompok pengrajin	29	9	76	7	7

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, Provinsi NTT Dalam Angka, 2024

Pada usaha mikro dan kecil terdapat data yang cukup baik untuk dilakukan analisis yakni pendapatan usaha. Rata rata usaha mikro dan kecil menghasilkan pendapatan/omset sekitar Rp 25 juta per tahun, artinya sekitar Rp 2 juta per bulan. Jika diasumsikan bahwa keuntungan yang didapat adalah 10 persen dari usaha, maka keuntungan yang didapat usaha usaha ini hanyalah Rp 200.000 per bulan, sebuah angka yang sangat kecil. Analisis ini sejalan dengan analisis pada urusan koperasi dan UMKM yang menunjukkan masih sangat lemahnya pelaku usaha UMKM ini.

Lemahnya usaha industri ini secara langsung berkaitan dengan kapasitas pengusaha. Dari data BPS Provinsi diperoleh informasi bahwa rata rata pelaku usaha mikro dan kecil hanya berpendidikan SD atau tidak tamat SD (73,85 persen), dan hanya sekitar 3 persen yang memiliki pendidikan perguruan tinggi. Lemahnya kapasitas pelaku usaha ini berdampak pada lemahnya jiwa kewirausahaan yang merupakan motor bagi pengembangan usaha.

Dilihat dari lapangan usahanya, industri besar dan sedang yang ada di Kabupaten Sikka bergerak di bidang pengolahan produk pertanian dan perikanan. Sementara itu usaha industri kecil dan mikro secara umum bergerak di bidang industri kreatif. Dari berbagai industri kreatif, maka seni dan budaya lokal termasuk kerajinan adalah subsektor yang sangat diunggulkan dan diakui keunggulannya, disusul oleh kuliner, pariwisata dan desain grafis. Kerajinan tenun, seni musik Kabupaten Sikka tidak diragukan lagi memang merupakan unggulan yang telah diakui di tingkat internasional. Banyak desainer dan musisi hebat lahir dari kerajinan dan musik dari kawasan ini.

Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga lain termasuk pemerintah daerah hingga saat ini telah membuahkan hasil. Namun demikian sejumlah permasalahan masih menghadang sehingga kesejahteraan pelaku usaha bidang ini masih belum kunjung membaik. Dari kajian yang dilakukan Tjeme (2022), industri kerajinan secara khusus dan industri kreatif Kabupaten Sikka secara umum berhadapan dengan permasalahan-permasalahan berikut. 1) Keterbatasan kepada akses permodalan. Dari analisis bidang koperasi, pada dasarnya permodalan tersedia di lembaga lembaga keuangan maupun koperasi kredit yang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Sikka, namun demikian kapasitas yang terbatas dari pelaku usaha membatasi akses untuk mendapatkan modal tersebut. 2) Kurangnya kapasitas pelaku usaha. Kapasitas pelaku usaha atau secara umum dikenal dengan jiwa kewirausahaan adalah sebuah jiwa yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Melalui jiwa kewirausahaan, pelaku usaha memiliki pengetahuan dan informasi, keterampilan/ inovasi dalam berproduksi sampai pada memasarkan produknya. 3) Dukungan pemerintah yang kurang tepat. Telah banyak program pemerintah diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, namun demikian tidak semua program itu sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Permasalahan besar yang dihadapi pelaku usaha adalah

pemasaran, namun demikian secara umum program yang dilakukan berada di seputar proses produksi.

Sementara itu bagi usaha industri besar, teridentifikasi permasalahan utama yang dihadapi adalah ketersediaan sarana dan prasarana, baik pada level produksi maupun angkutan. Pada tingkat produksi, apapun usaha yang hendak dilakukan dibutuhkan sejumlah input pendukung, misalnya air dan listrik. Keterbatasan air dan listrik ini menjadi penghambat utama bagi perusahaan besar maupun menengah untuk menjalankan usaha. Ketika produk sudah dihasilkan, dibutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Hal ini masih menjadi kendala yang cukup besar dalam rangka meningkatkan investasi usaha industri besar di Kabupaten Sikka. Sarana dan prasarana usaha sesungguhnya tidak hanya dibutuhkan oleh usaha besar, usaha mikro juga secara tidak langsung membutuhkan hal tersebut. Sarana transportasi yang terbatas berdampak pada biaya angkut yang mahal, ini akan berdampak pada produksi maupun pemasaran.

30) Urusan Transmigrasi

Transmigrasi diadakan dengan tujuan mendorong pemerataan penduduk, pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. selain itu adanya transmigrasi juga memungkinkan adanya pemukaan lahan dan pengembangan ekonomi baru. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sikka mengirimkan warga Kabupaten Sikka ke Kabupaten Mamasaha Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 4 KK. Pada Tahun 2023 tidak ada pengiriman warga transmigrasi.

Tabel 2.163
Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	25,42%	25,42%	25,42%	25,42%	25,42%
2.	Persentase KK Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	64%	50%	34%	34%	34%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, 2025

Pada tahun 2020, terdapat luas lahan total sebesar 1.180 hektar yang diperuntukan untuk kebutuhan transmigrasi, pada tahun 2020 sudah di kembangkan sekitar 300 hektar dari total lahan tersebut sehingga dicapai angka sekitar 25,4 persen. Namun demikian, belum terdapat perkembangan terkait dengan pengembangan lahan dimaksud. Pada tahun 2020 juga terdapat persentase yang tinggi pada KK transmigran yang dibina dan diberdayakan, sayangnya angka tersebut kerap menurun dan mencapai titik terendah di tahun 2022, yang kemudian stagnan di angka 34% hingga 2024. Kabupaten Sikka masih perlu meningkatkan upaya dalam membina transmigran, serta mengembangkan lahan transmigrasi yang sudah dialokasikan.

31) Urusan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah berfungsi untuk mengkoordinasi dan menyelaraskan penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Termasuk di antaranya adalah memastikan efektivitas kebijakan serta mengatur tata kelola organisasi. Termasuk juga pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi produk hukum. Kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dari Indeks Reformasi Hukum (sebagaimana dijelaskan di atas). Indeks reformasi hukum di Kabupaten Sikka sudah cukup bagus, meskipun penilaianya baru dimulai tahun 2023, tapi 2024 terjadi peningkatan nilai yang cukup besar hingga mencapai angka di atas 90. Menunjukkan kinerja Setda dalam koordinasi hukum yang ada di Kabupaten Sikka. Selanjutnya, kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Sikka juga dapat dilihat pada data sebagai berikut.

Tabel 2.164
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	*)	*)	24,33	24,33	24,33
2.	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	*)	*)	*)	100	100
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	*)	*)	*)	*)	Level 3 (Proaktif)

Keterangan: *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Tingkat kematangan perangkat daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah sudah tepat secara fungsi, ukuran dan sinergis yang berkelanjutan. Sehingga tingkat kematangan ini dilihat dari beragam unsur pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Penilaian TKPD pada Kabupaten Sikka baru dimulai di tahun 2022 dengan angka yang stagnan hingga 2024 di 24,33 (Tingkat Kematangan Rendah). Hal ini memang masih sejalan dengan nilai SAKIP Kabupaten Sikka baik terkait perencanaan dan pengawasan serta laporan dan evaluasi, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kematangan perangkat daerah. Namun di lain pihak, Kabupaten Sikka juga memiliki produk hukum yang bagus dilihat dari persentase produk hukum yang dihasilkan mencapai 100 persen, sesuai dengan IRB yang juga berada di angka yang cukup tinggi. Selanjutnya, untuk tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Sikka juga mendapat penghargaan atas perolehan tingkat di Level 3 yang 'Proaktif', hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka sudah memenuhi seluruh kelengkapan atribut dalam hal pengadaan barang dan jasa.

32) Urusan Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan adalah unit atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan dukungan administratif, teknis, dan logistik untuk kegiatan dan fungsi Dewan dalam suatu pemerintahan. Fungsi utama dari Sekretariat Dewan adalah memfasilitasi proses legislasi dan mendukung tugas-tugas anggota Dewan.

Tabel 2.165
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N	3	3	3	3	3
2.	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, 2025

Jika dilihat data tersebut maka Sekretariat Dewan di Kabupaten Sikka telah menunjukkan kinerja yang sangat baik selama periode tahun 2020-2024 dengan persentase penerapan ranperda dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan yang sempurna. Tingkat konsistensi dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan proses legislatif adalah hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan maka ditarik kesimpulannya, kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Sikka selama periode tersebut mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap efisiensi dan kedisiplinan dalam menjalankan fungsi legislatif. Hal ini merupakan aset penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Namun demikian, nilai ini belum dapat mencerminkan apa hasil yang didapat dan bisa dimanfaatkan dari penetapan ranperda dan perda tersebut.

33) Unsur Perencanaan

Perencanaan Pembangunan adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi dalam rangka mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara optimal guna mencapai pertumbuhan dan kemajuan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Berikut adalah tabel kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.

Tabel 2.166
Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai SAKIP (beserta masing-masing komponen)	58,93	59,06	61,91	61,48	60,78
2	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	18,57	18,7	20,96	20,98	20.78
3	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	98,3	100	100	97,52	96,6
4	Persentase keselarasan RPJMD dengan APBD	99,09	93,98	100	94,21	97,3

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sikka nilai SAKIP-nya cenderung naik dari tahun 2021 di kategori CC dengan predikat Cukup Memadai, menjadi peringkat B dengan predikat Cukup Baik di tahun 2022 hingga 2024. Sayangnya angka tersebut cenderung menurun dari yang awalnya mencapai 61,91 di tahun 2022 menjadi 60,78 di 2024. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang perlu dicermati lebih dalam untuk mengetahui hambatan yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka.

Gambar 2.57
Skor Pengukuran Kinerja dan Perencanaan AKIP Tahun 2019-2023

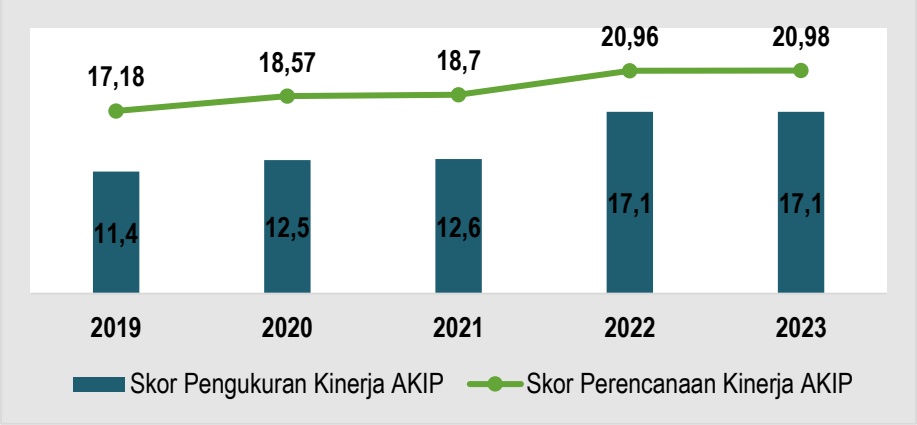

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 (2024)

Apabila dilihat dari data perencanaan dan pengukuran kinerja, terdapat peningkatan pada kedua item tersebut, namun angka itu memang masih belum maksimal. Pengukuran kinerja Kabupaten Sikka menunjukkan dari total bobot 30 pada tahun 2024, Kabupaten Sikka baru dapat mencapai 17,11. Sama halnya dengan perencanaan kinerja, meskipun dapat dibilang bahwa terkait perencanaan, Kabupaten Sikka memiliki nilai yang lebih bagus. Untuk skor perencanaan dari bobot maksimal di angka 30, Kabupaten Sikka mampu mencapai angka 20,98 pada akhir tahun 2024. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa meski masih terdapat hambatan dalam meningkatkan upaya dalam hal perencanaan dan juga pengukuran kinerja, namun upaya untuk mendorong cukup terlihat dengan adanya peningkatan nilai, Meskipun demikian hal ini tidak mengelakkan bahwa Kabupaten Sikka masih perlu banyak memperbaiki tata kelola yang ada, utamanya dengan nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai ideal yang diinginkan.

Gambar 2.58
Skor Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Tahun 2019-2023

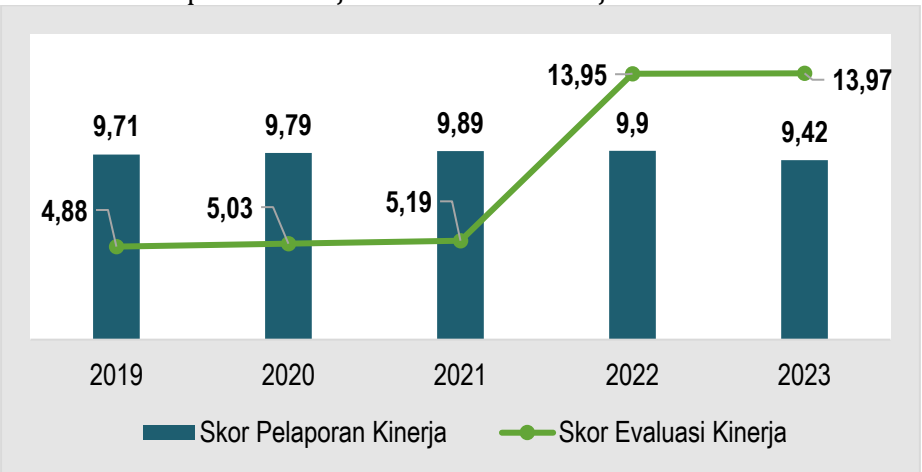

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 (2024)

Skor untuk pelaporan dan evaluasi kinerja Kabupaten Sikka juga belum mendapatkan penilaian yang cukup bagus. Pada bagian pelaporan kinerja, nilainya cukup stagnan untuk tahun 2019-2021. Setelahnya terjadi pergerakan yang cukup tinggi akibat dari perubahan perhitungan bobot yang awalnya di angka 10 menjadi 25. Dari total bobot evaluasi kinerja di angka 25, Kabupaten Sikka hanya mampu mendapatkan nilai 13,97 di tahun 2024, sama halnya dengan skor pencapaian kinerja, nilainya hanya mencapai 9,42 dari total bobot 15. Menunjukkan perlunya upaya meningkatkan evaluasi kinerja di Kabupaten Sikka.

Apabila melihat semua data yang ada secara keseluruhan, maka sebenarnya dapat disimpulkan bahwa kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang diukur dari konsistensi program Kabupaten Sikka sudah cukup baik. Hal ini kemudian dapat dilihat dari Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD yang relatif tinggi di kisaran angka 96 persen mendekati 100, serta nilai SAKIP komponen perencanaan yang meningkat setiap tahunnya. Namun terdapat masalah bahwa dalam penilaian tersebut belum teridentifikasi pencapaian hasil dari hal-hal yang telah direncanakan. Sehingga hal ini kemudian menjadi hambatan Kabupaten Sikka dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pada indikator Persentase Konsistensi Program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2020, Kabupaten Sikka mencapai tingkat konsistensi program RKPD ke dalam APBD sebesar 99,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh program yang direncanakan dalam RKPD berhasil diakomodasi dalam APBD, mencerminkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Kemudian, Kabupaten Sikka berhasil meraih 100 persen persentase yang menunjukkan bahwa semua program yang direncanakan berhasil diakomodasi dalam APBD, meski demikian nilai ini masih bersifat fluktuatif hingga terjadi penurunan menjadi 97,3 persen di tahun 2024. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih menunjukkan upaya yang kuat dalam memastikan bahwa program-program yang direncanakan terwujud dalam alokasi anggaran. Penting bagi Kabupaten Sikka untuk dapat meningkatkan upaya secara konsisten untuk mencapai kembali persentase di angka 100 persen.

Konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk mengukur sejauh mana visi, misi, serta program dan kegiatan strategis dalam RPJMD direalisasikan dalam RKPD. Persentase yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara rencana jangka menengah dengan program kerja

tahunan, yang berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka konsisten dalam melaksanakan rencana pembangunan. Hal ini ditunjukan dengan pencapaian persentase 100 persen selama periode 2021 dan 2022, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2023 dan 2024 dengan nilai akhir sebesar 96,6 persen namun angka tersebut masih dapat dibilang tinggi. Kabupaten Sikka menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD direalisasikan dalam RKPD.

34) Unsur Keuangan

Kinerja Keuangan Kabupaten Sikka menunjukkan seberapa baik pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Sikka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kinerja keuangan Kabupaten Sikka dapat diukur dengan berbagai indikator keuangan antara lain Persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap APBD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja Pengawasan Keuangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.167
Kinerja Pengawasan Keuangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan PAD	-10,94	1,67	11,35	11,35	10,32
2	Persentase SILPA terhadap APBD	3,45	10,03	9,0	9,05	3,64
3	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	10,48	9,37	8,85	9,16	8,69

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025; BPKAD Kabupaten Sikka, 2025

Pada tahun 2020, Kabupaten Sikka menunjukkan penurunan sebesar -10,94 persen dalam PAD. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti situasi ekonomi global atau dampak dari pandemi COVID-19. Lebih lanjut pada tahun 2022, Kabupaten Sikka mencatat peningkatan sebesar 1,67 persen dalam PAD. Meskipun angka ini lebih rendah dari peningkatan pada tahun 2019, masih menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki sumber pendapatan lokal. Pada tahun 2022 dan 2023, Kabupaten Sikka mengalami peningkatan sebesar 11,35 persen dalam PAD, yang kemudian dilanjutkan dengan peningkatan sebesar 10,32 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dalam sumber pendapatan lokal di wilayah tersebut.

Selanjutnya dalam persentase SILPA terhadap APBD ini sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Persentase SILPA terhadap APBD memberikan gambaran tentang seberapa baik keuangan daerah dikelola dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang disediakan. Peningkatan yang cukup besar dalam persentase SILPA terjadi pada tahun 2021. Hal ini merupakan akibat implementasi yang masih tidak menentu akibat adanya kebijakan pandemi seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan lainnya yang serupa. Persentase ini kemudian menurun lumayan tinggi pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan adanya surplus anggaran yang lebih kecil, meskipun surplus ini lebih kecil, namun angka ini diikuti dengan PAD dan APBD yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (lebih lanjut dapat dilihat pada bagian Gambaran Keuangan Daerah). Meski demikian, persentase SILPA yang tidak konsisten dengan jumlah yang cukup tinggi pada tahun 2021-2023 menunjukan masih kurangnya efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah sebagai salah satu indikator kinerja keuangan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri, tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini dilihat dengan menghitung nilai PAD Kabupaten Sikka terhadap APBD. Pada tahun 2020 Kabupaten Sikka menunjukan rasio yang tinggi di angka 10,48 persen, namun di tahun selanjutnya hingga tahun 2024

terlihat kurangnya stabilitas dengan kecenderungan adanya penurunan setelah peningkatan yang tidak begitu tinggi. Hal ini menandakan meskipun Kabupaten Sikka memiliki sumber pendapatan yang cukup kuat dari sumber-sumber internal, dan memungkinkan untuk melaksanakan program dan proyek pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer, namun kondisi ini tidak dapat dipertahankan. Sehingga menunjukan bahwa Kabupaten Sikka masih mempunyai kerentanan dalam hal kemandirian daerah. Masih dibutuhkan upaya yang lebih baik dalam mendorong PAD untuk mencapai rasio kemandirian yang lebih baik.

35) Unsur Kepegawaian

Berbicara terkait sumber daya manusia dalam konteks pemerintahan, Kepegawaian dan Pendidikan serta Pelatihan menjadi aspek kunci dalam memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh entitas pemerintah adalah kompeten, terampil, dan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif. Ini adalah faktor penting dalam mencapai tujuan dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Gambar 2.59
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024

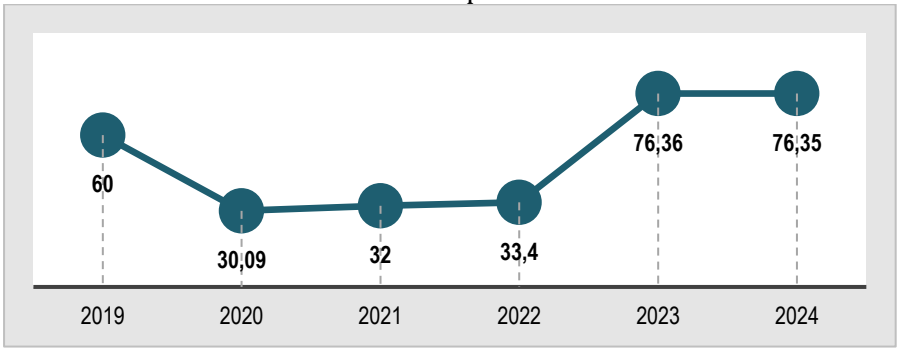

Sumber: BKPSDM Kabupaten Sikka, 2025

Lebih lanjut pada Dimensi Kompetensi dalam Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sikka 2021-2023, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut menunjukan upaya pertumbuhan yang dilakukan oleh Kabupaten Sikka mulai menunjukan hasil. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Kabupaten Sikka berusaha mengejar peningkatan profesionalitas ASN, salah satunya dalam upaya meningkatkan kompetensi ASN. Meskipun peningkatan yang pesat terjadi, namun apabila tapi angka tersebut masih dapat terbilang kecil dengan nilai 26,33 dari total bobot dimensi sebesar 40. Pemerintah Kabupaten Sikka dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan formal untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN.

36) Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan bagi ASN memegang peran krusial dalam meningkatkan kinerja birokrasi, tidak hanya itu secara keseluruhan peningkatan kapasitas ASN menjadi hal penting dalam seluruh pelaksanaan tata kelola pemerintahan, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya, SDM yang berkompetensi tidak hanya mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan efisien dan efektif, tapi juga diharapkan dapat memberikan inovasi yang pada akhirnya dapat turut mendorong pengembangan daerah.

Gambar 2.60

Dimensi Kompetensi dalam Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2023

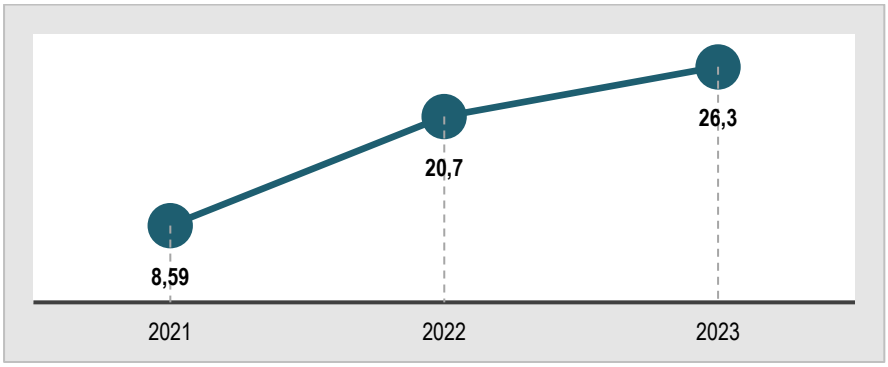

Sumber: Data olahan BKPSDM Kabupaten Sikka, 2025

Lebih lanjut pada Dimensi Kompetensi dalam Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sikka 2021-2023, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut menunjukan upaya pertumbuhan yang dilakukan oleh Kabupaten Sikka mulai menunjukan hasil. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Kabupaten Sikka berusaha mengejar peningkatan profesionalitas ASN, salah satunya dalam upaya meningkatkan kompetensi ASN. Meskipun peningkatan yang pesat terjadi, namun apabila tapi angka tersebut masih dapat terbilang kecil dengan nilai 26,33 dari total bobot dimensi sebesar 40. Pemerintah Kabupaten Sikka dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan formal untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN.

37) Unsur Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintahan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan mengembangkan solusi atau inovasi terhadap berbagai tantangan dan isu yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktivitas ini melibatkan proses penelitian untuk memahami masalah, menganalisis data, dan mencari solusi atau perbaikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

Tabel 2.168
Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan di kebijakan	*)	100%	100%	99%	72,73%
2	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan: *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Data olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tersebut selama periode tahun 2020 hingga 2022, Kabupaten Sikka mengalami perkembangan dalam Indeks Inovasi Daerah. Pada tahun 2020, Kabupaten Sikka memulai perjalanan inovasinya dengan mencapai skor 46, yang dikategorikan sebagai "Kurang Inovatif". Meskipun masih memiliki ruang untuk peningkatan, langkah awal ini menunjukkan upaya untuk menggalakkan inovasi di daerah Sikka. Tahun 2021 mengalami penurunan signifikan dalam Indeks Inovasi Daerah, mencapai skor 23,29 dengan kategori "Kurang Inovatif". Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti dampak dari pandemi COVID-19 atau perubahan dalam strategi inovasi. Terakhir pada pada tahun 2023, Kabupaten Sikka mengalami lonjakan signifikan dalam Indeks Inovasi Daerah, mencapai skor 43,36 yang menandakan kategori "Inovatif". Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk

mendorong inovasi telah memberikan hasil positif dan daerah tersebut berhasil meningkatkan tingkat inovasinya. Ada catatan bahwa terdapat perbedaan bobot poin penilaian pada tahun 2020 ke tahun selanjutnya yang menyebabkan penilaian dan kategori penilaian mengalami penyesuaian.

Kemudian pada indikator Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Pada tahun 2019 data yang disajikan menunjukkan 0 persen untuk kedua tahun ini yang menandakan bahwa bahwa belum ada upaya atau fasilitasi yang dilakukan untuk menerapkan inovasi di perangkat daerah Kabupaten Sikka selama periode ini. setelahnya di tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan dengan persentase 3,33 persen. Meskipun angka ini masih relatif rendah, namun terdapat upaya awal dalam mendorong penerapan inovasi di tingkat perangkat daerah. Tahun berikutnya di 2021 terjadi lonjakan yang signifikan dengan persentase mencapai 23,33 persen yang menunjukkan komitmen dan upaya yang lebih besar dari pihak berwenang dalam memfasilitasi penerapan inovasi di perangkat daerah. Terakhir tahun 2022 pencapaian meningkat lagi menjadi 33 persen, menandakan bahwa inisiatif dan strategi yang diterapkan dalam penerapan inovasi terus membuahkan hasil positif.

38) Unsur Pengawasan

Pengawasan pada pemerintah dengan kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengacu pada proses sistematis untuk memantau dan menilai kinerja serta kepatuhan pemerintah terhadap standar, aturan, dan prosedur yang berlaku. SPIP adalah rangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Sementara APIP adalah unit organisasi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintah.

Gambar 2.61
Nilai Maturitas SPIP dan Nilai APIP Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

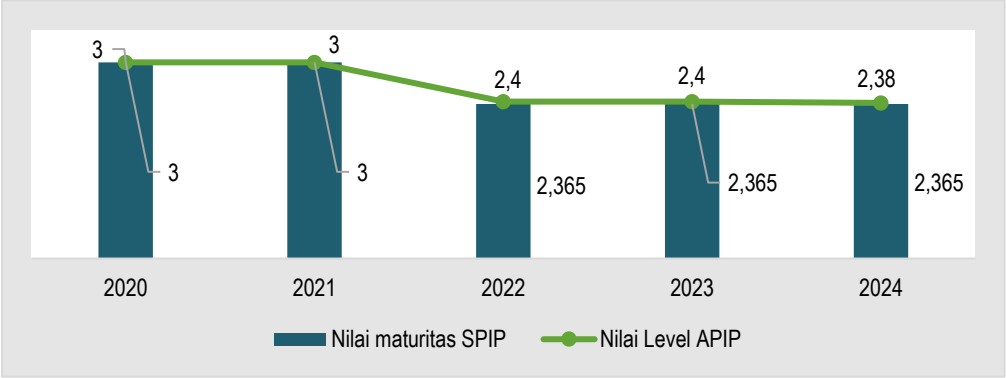

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tersebut maka pada indikator Nilai maturitas SPIP, berhasil mempertahankan Level 3 dalam maturitas SPIP. pada tahun 2020-2021 Hal Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengawasan internal di pemerintah daerah, menandakan bahwa sistem pengendalian intern berjalan dengan baik. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Sikka kembali ke Level 2 dalam maturitas SPIP. Hal ini menunjukkan adanya tantangan atau perubahan dalam pengawasan internal di tahun tersebut. Adapun Pengawasan berdasarkan indikator Nilai Level APIP pada tahun 2020, dan 2021 berhasil mempertahankan Level 3 dalam kategori Structured pada APIP. Hal ini menunjukkan bahwa APIP di Kabupaten Sikka telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi dan terstruktur.

Meskipun perubahan pada 3 tahun terakhir Ini menunjukkan adanya penyesuaian atau perubahan dalam kinerja pengawasan internal di tahun 2022 hingga 2024. Pengawasan yang efektif adalah salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan daerah. Salah satu mengukur efektivitas pengawasan adalah dari persentase tindak lanjut terhadap temuan yang telah dilakukan.

Gambar 2.62

Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

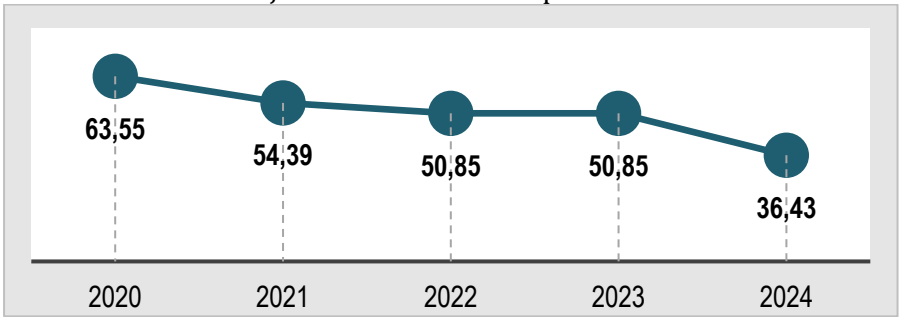

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sikka, 2025

Kabupaten Sikka sudah berhasil mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dilakukan tindak lanjut temuan BPK yang cukup signifikan di angka 63,55 persen. Menunjukkan upaya yang tinggi dalam menjalankan tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan, mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menanggapi masalah yang diidentifikasi. Selanjutnya pada 2021 terjadi penurunan menjadi 54,39 persen, hal ini mengindikasikan adanya tantangan atau hambatan tertentu yang mengurangi efektivitas pengawasan selama tahun tersebut. Terakhir di tahun 2022 dan 2023 menunjukkan angka 50,85 persen, yang sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk angka tindak lanjut terakhir sekaligus terendah ada di tahun 2024 dengan angka 36,43 persen. Menunjukkan turunnya upaya pemerintah dalam menindaklanjuti temuan BPK. Hal ini kemudian menunjukkan menurunnya kinerja pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Sikka, sehingga menjadi catatan bahwa diperlukan upaya yang lebih tinggi untuk meningkatkan pengawasan di Kabupaten Sikka.

39) Unsur Pemerintahan Umum

Pemerintahan umum diharapkan dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menciptakan fondasi konstitusional, mencapai stabilitas nasional serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dalam mencapai hal ini beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

Tabel 2.169

Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	0	150	0	0	100
2	Jumlah Peserta Pendidikan Politik bagi masyarakat	0	0	270	90	90
3	persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	97,32	97,58	97,71	97,63	97,52
4	Jumlah Dokumen Rekomendasi FKUB	3	4	1	2	2

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data, upaya yang diberikan oleh Kabupaten Sikka dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat saat ini belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari betapa fluktuatifnya ang-angka pada indikator urusan pemerintahan umum. Seperti halnya untuk penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaaan. Penguatan ideologi pancasila hanya dilakukan di 2021 dan 2024, sedangkan untuk pendidikan politik bagi masyarakat dilakukan

hanya dari 2022. Jumlahnya pun semakin menurun, hal ini menunjukkan semakin rendahnya minat politik masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk kemudian dapat meningkatkan etika dan budaya politik di tatanan masyarakat untuk dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM.

2.1.5 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Periode Tahun 2020-2024

Capaian Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Sikka selama periode 2020-2024 dapat dilihat dari indikator di bawah ini:

Tabel 2.170
Capaian Indikator Perurusan

No	Indikator	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Urusan Pendidikan					
1	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni					
2	APK					
	SD/MI/Paket A	104	112	110	110	101
	SMP/MTs/Paket B	98	113	109	103	91
	SMA/SMK/MA/Paket C	103	112	113	102	89
3	APM					
	SD/MI/Paket A	94	97	97	97	88
	SMP/MTs/Paket B	79	83	85	89	70
	SMA/SMK/MA/Paket C	52	53	54	56	61
4	APS					
	SD/MI/Paket A	97	99	99	99	96
	SMP/MTs/Paket B	80	98	98	98	91
	SMA/SMK/MA/Paket C	31	32	33	33	76
5	Indeks Distribusi Guru Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024					
	SD/MI	0	0	0	0	1
	SMP/MTs	0	0	0	0	1
6	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Sikka	93	93	94	98	99
7	Angka Putus Sekolah Kabupaten Sikka	0	1	0	1	1
	Urusan Kesehatan					
1	Jumlah Kelahiran Kabupaten Sikka	5.250	5.014	4.823	4.343	4.075
2	Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka	9	10	14	9	12
3	Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka	133	179	166	69	49
4	Jumlah Balita Gizi Buruk	114	117	151	210	331
5	Persentase posyandu siklus hidup yang aktif	-	-	-	-	100
6	Persentase Posyandu Aktif	61	69	73	92	-
7	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (per 100.000 penduduk)					
8	Dokter spesialis	6	7	7	7	8
9	Dokter umum	16	19	20	19	13
10	Dokter gigi	2	2	2	2	3
11	Perawat	249	247	273	296	230
12	Bidan	204	189	252	247	217
13	Cakupan Desa UCI	90	95	85	95	81
14	Persentase Desa STBM	34	36	41	49	51
15	Persentase cakupan sediaan farmasi	100	100	100	93	93
16	Persentase cakupan pemenuhan alat kesehatan sesuai standar	35	41	46	46	42

No	Indikator	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		N/A	56	56	57
2	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Baik		57	64	64	58
3	Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum		44	54	55	56
4	Kualitas Jembatan dalam Kondisi Baik		100	100	100	100
5	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik		46	46	46	47
6	Panjang drainase dalam kondisi baik		62	65	65	65
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak					51.03
8	Tingkat Kemantapan Jalan					57.75
9	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak					56.41
10	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik					65.36
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Persentase KK yang Menempati Rumah Layak Huni		53	61	61	76
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak		49	51	51	51
3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan		0	1	2	2
4	Luas pengurangan kumuh setelah diintervensi		6,28 ha .	6,28 ha	6,28 ha	6,28 ha
5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak		74	75	74	76
6	Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik		0	1	1	N/A
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak		44	54	55	56
8	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak		28.187	34.478	35.254	36.585
9	Persentase jalan lingkungan yang dibangun		0	N/A	N/A	N/A
10	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur					56.79
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Persen)	100	100	100	100	100
2	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100
3	Angka Kriminalitas (Jumlah Tindak Pidana)	80	190	286	286	67
4	Persentase perda dan perkada yang ditegakan	56	44	33	33	56
5	Persentase penyelenggarann trantibumlinmas	370.76	316	60	170	223
6	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100	100	100	100	100
7	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	0	0	0	1	1
8	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1	1	1	1	1
9	Respon cepat	1	1	1	1	1
10	Persentase penanganan pasca bencana	-	-	-	0	0

No	Indikator	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	1	1	1	1	1
12	Indeks Berakhlak	NA	NA	NA	62	66
13	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	1	1	1	1	1
14	Cakupan partai politik yang dibina	1	1	1	1	1
	Urusan Sosial					
1	Fakir Miskin	280.026	225.221	220.125	211.996	201.055
2	Anak Terlantar	3	87	656	52	282
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	40	92	44	33	57
4	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	NA	NA	40	NA	NA
5	Lanjut Usia Terlantar	70	70	136	39	37
6	Penyandang Disabilitas	95	47	141	81	110
7	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	35	103	20	NA	NA
8	Korban Trafficking	23	25	27	27	14
9	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	NA	NA	NA	NA	20
10	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	3	1	5	3	4
11	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	0	3	0	2	0
12	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	0	0	0	-	0
13	Korban Bencana Alam	920	NA	6.747	459	4.826
14	Korban Bencana Sosial	898	NA	128	89	163
15	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	100	100	100
16	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	-	-	1	0	0
	Urusan Tenaga Kerja					
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	45	45	55	44	15
2	Keselamatan dan perlindungan	2.086	2.286	2.486	28.523	7.139
3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	1	1	1	1	1
4	Persentase perusahaan yang memiliki RTK	2	3	2	2	1
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	-	-	1	1	1
6	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri	0	0	0	0	0
7	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar negeri	2	3	2	4	4
8	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak Hak Dasarnya	32	34	35	37	42
9	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	48	53	52	52	52
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak					
1	IDG	63	62	64	65	62

No	Indikator	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Rasio KDRT	0	0	0	NA	0
3	Prevalensi Kasus Kekerasan Anak	6	6	5	NA	7
4	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sikka					
	Laki-Laki	7	7	7	7	7
	Perempuan	7	7	7	7	7
5	Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas dengan Pendidikan SMA Ke Atas Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-Laki	27	31	28	26	28
	Perempuan	21	27	24	25	27
6	Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sikka					
	Laki-Laki	13	13	13	14	14
	Perempuan	13	14	14	14	14
7	Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-Laki	12.202	12.143	12.631	13.100	13.606
	Perempuan	6.279	6.218	646	6.670	6.951
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-Laki	85	83	80	83	82
	Perempuan	64	66	64	66	66
9	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	4	22	4	3	1
10	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	100	100
11	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	-	-	-	-	-
12	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100	100	100	100	100
13	Skor Kabupaten Layak Anak	-	490	175	97	-
14	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	100	100
	Urusan Pangan					
1	Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan Per Kapita					
2	Kebutuhan Pangan (Kg)	109	112	106	108	107
3	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Produksi (Kg)	31	21	20	22	22
4	Ketersediaan Pangan dari Luar Daerah (Kg)	217	271	225	140	186
5	Ketersediaan Pangan	248	292	245	161	208
6	Skor PPH Ketersediaan Kabupaten Sikka	77	65	65	90	84
7	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergisi Seimbang					1
8	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan					0
9	Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					1

No	Indikator	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase penanganan kerawanan pangan					2.58
11	Persentase pengawasan keamanan pangan					25.00
12	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan					1
13	Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan					1
	Urusan Pertanahan					
1	Kinerja Pertanahan di Kabupaten Sikka					
2	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Garapan	1	1	2	3	3
3	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	1	2	3	3
4	Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Pembangunan	-	5	1	8	7
5	Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum					7
	Urusan Lingkungan Hidup					
1	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup					
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68	61	69	75	73
3	Indeks Kualitas Air	54	53	50	60	53
4	Indeks Kualitas Udara	90	92	92	93	94
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60	41	66	69	68
6	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas pengolahan sampah	274.464 Kg	334.944 Kg	338.400 Kg	784.800 Kg	1.119.744 Kg
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	2.95%	3.47%	4.09%	4.81%	5.65%
8	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	N/A	N/A	N/A	N/A	16
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
2	Persentase Kepemilikan E-KTP	96	94	96	99	100
3	Persentase Kepemilikan KIA	20	35	35	37	41
4	Persentasi Aktivasi IKD	NA	NA	NA	0	0
5	Persentase Akta Kematian	100	100	100	100	100
6	Persentase Akta Kelahiran	44	45	46	47	48
7	Persentase Akta Perkawinan	43	49	52	54	56
8	Persentase Akta Perceraian	19	22	29	32	34
9	Jumlah informasi kependudukan yang dimanfaatkan	NA	NA	6 OPD	6 OPD	9 OPD
10	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	1	1	1	1	1
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kependudukan Kabupaten Sikka			1	1	1
12	Perekaman KTP elektronik					100
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 181
2	Jumlah kelompok binaan PKK	3.741	3.741	3.741	3.741	3.741
3	Jumlah LSM	4	4	4	4	
4	LPM Berprestasi	-	-	-	-	
5	PKK aktif	169	169	169	169	169
6	Posyandu aktif	628	650	650	650	591

No	Indikator	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
12	Desa Sangat Tertinggal	21	13	2	10	5
13	Desa Tertinggal	73	63	45	47	46
14	Desa Berkembang	45	57	79	95	82
15	Desa Maju	8	14	21	26	38
16	Desa Mandiri	-	-	-	3	10
17	Jumlah	147	147	147	181	181
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	3	3	2	2	2
2	Total Fertility Rate (TFR)	3	2	2	2	2
3	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	3	2	3	3	3
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	66	66	66	66	40
5	Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	21	22	23	24	25
6	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)		49	49	55	
7	Keluarga Sejahtera (KS)	-	0	4	7	11
	Urusan Perhubungan					
1	Rasio Konektivitas Kab/Kota	72	72	71	71	70
2	Konektivitas Darat	1	1	1	1	1
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	-	-	-	13	21
4	Konektivitas Penyeberangan	0	0	0	0	0
	Urusan Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					39.22
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota					78.00
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					46.15
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah					
1	Koperasi Simpan Pinjam	70				
2	Koperasi Non Simpan Pinjam	71				
3	Koperasi Serba Usaha	46				
4	Koperasi Jasa	5				
5	Koperasi Pemasaran	2				
6	Koperasi Produsen	6				
7	Koperasi Konsumen	3				
8	Koperasi Aktif	124	126	130	130	130
9	Koperasi Berbadan Hukum	181	183	187	187	187
10	Koperasi Sehat	10	5	9	7	11
11	Industri Pengolahan				508	508
12	Perdagangan				3.573	3.573
13	Jasa				594	594

No	Indikator	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Peternakan				665	665
15	Perikanan				62	62
16	Pertanian				145	145
17	Perkebunan				-	
18	Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka	6.288	5.994	5.547	8.005	8.500
19	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	18	4	13	31	6
20	Jumlah UMKM yang Berdaya Saing	80	80	385	80	190
21	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan	75	100	125	139	237
	Urusan Penanaman Modal					
1	Nilai Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Sikka	2.218	2.383	2.543	2.768	4.804
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	1.478	1.478	2.887	2.887	2.887
3	Jumlah Investor Berskala Internasional (PMA)	11	10	10	10	10
4	Total Nilai Investasi	912.254.087.000	NA	231.962.384.000	4876.000.000	48.040.892.683
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
1	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	15	15	15	15	88
2	Persentase Wirausaha Muda terhadap total wirausaha	-	-	2	2	2
3	Jumlah organisasi olahraga	8	8	8	8	14
4	Jumlah prestasi olahraga	9	-	2	6	6
5	Jumlah atlet berprestasi	39	-	7	28	37
6	Persentase Perolehan Prestasi di bidang Olahraga					66.60
7	Rasio Wirausaha Pemuda					1.72
8	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					100
	Urusan Statistik					
1	Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Sikka			1	2	3
	Urusan Persandian					
1	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024	0	0	0	0	1
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah					0.06
	Urusan Kebudayaan					
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	-	1	-	1	1
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	65	69	44	44	72
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	2	-	2	3
4	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	18	19	20	20	21
5	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan					21
	Urusan Perpustakaan					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	25.786	15.384	3.820	3.480	6.510

No	Indikator	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Rasio Perpustakaan persatuan penduduk	0	0	0	0	0
3	Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah	5.909	12.336	10.245	18.246	18.247
4	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	-	-	-	-	-
5	Indeks pembangunan literasi masyarakat					48.66
6	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					64.25
	Urusan Kearsipan					
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	24	28	28	32	41
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					63.73
	Urusan Kelautan dan Perikanan					
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Sikka	20.925	21.450	25.514	23.970	27.625
2	Konsumsi Ikan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024	62	63	75	70	80
2	Cakalang	506.220.587	36.933.385			
3	Tongkol	506.220.587	47.126.360			
4	Tuna	36.933.385	15.360.060			
5	Armada Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2024					
6	Perahu papan kecil sampan fibre glass < 5 M	50	50	50	50	332
7	Perahu Papan Sedang/sampan fiberglass >5 M	228	228	245	255	276
8	Motor Tempel < 5 GT	30	55	88	88	88
9	Kapal Motor < 5 GT	432	444	444	452	454
10	Kapal Motor 5-10 GT	101	101	102	102	104
11	Kapal Motor 10-20 GT	7	8	8	8	8
12	Kapal Motor 20-30 GT	67	67	67	67	67
13	Kapal Motor 30-50 GT	1	1	1	1	1
14	Pukat Pantai	644	644	644	644	107
15	Pukat Cincing/Purse seine	131	132	149	171	246
16	Jaring Insang Tetap	463	471	466	466	983
17	Jaring Insang Hanyut	990	990	990	991	991
18	Bagan	153	153	169	174	230
19	Longline	3	3	3	3	3
20	Rawai Dasar	92	92	92	92	92
21	Huhate / Pole and Line	75	75	75	75	75
22	Pancing / Hand Line	9.011	9.036	9.118	9.423	9.771
23	Bubu	179	179	179	179	21
24	Panah	913	913	913	913	65
25	Jala Tebar	166	166	166	166	180
26	Jumlah	12.820	12.854	12.964	13.297	12.764
	Urusan Pariwisata					

No	Indikator	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan wisata (orang)	20.986	25.933	36.041	36.041	41.861
2	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1	1	2	2	2
3	Jumlah destinasi wisata	87	87	87	87	126
4	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata	9	9	10	10	10
5	Jumlah Hotel di Kabupaten Sikka	40	40	42	44	42
	Urusan Pertanian					
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	36	37	38	39	39
2	Pertumbuhan Sektor Pertanian	1	4	4	4	3
3	Populasi HPR (ekor)	55.000	50.000	45.000	45.000	40.000
4	Realisasi Vaksinasi HPR (ekor)	20.000	-	10.850	11.500	10.700
5	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan					22.35
6	Produktivitas pangan					3.70
	Urusan Perdagangan					
1	Kontribusi Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	11	10	11	11	11
2	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	5	1	7	6	9
3	Jumlah Pedagang	6.088	6.088	6.088	1.000	1.000
4	Jumlah kelompok pedagang	77	82	87	1.505	1.505
5	Jumlah Pasar di Kabupaten Sikka					
6	Pasar Tradisional	39	40	40	40	40
7	Pasar Modern	178	178	178	178	178
	Urusan Perindustrian					
1	Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kabupaten Sikka					
2	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	2	2	2	2	2
3	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	3	1	7	8	8
4	Jumlah industri mikro dan kecil	702	830	923	1.101	1.901
5	Jumlah tenaga kerja industri mikro dan kecil (orang)	24.767	40.283	-	6.687	6.730
6	Nilai pendapatan industri kecil dan mikro (Rp Miliar)	335	599	-	-	
7	Pendapatan per usaha industri kecil dan mikro (Rp juta)	21	26	-	-	
8	Jumlah industri Menengah	3	3	-	-	-
9	Jumlah Industri Besar	-	-	-	-	2
10	Jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang (orang)					<2
11	Cakupan bina kelompok pengrajin	29	9	76	7	7
	Urusan Transmigrasi					
1	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	0	0	0	0	0
2	Persentase KK Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	1	1	0	0	0
	Urusan Sekretariat Daerah					

No	Indikator	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka					
2	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	NA	NA	24	24	24
3	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	NA	NA	NA	100	100
4	Tingkat Kematangan UKPBJ	NA	NA	NA	NA	Level 3 (Proaktif)
	Urusan Sekretariat DPRD					
1	Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N	3	3	3	3	3
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	1	1	1	1	1
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	1	1	1	1
	Perencanaan					
1	Nilai SAKIP (beserta masing-masing komponen)	59	59	62	61	61
2	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	19	19	21	21	NA
3	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	98	100	100	98	97
4	Persentase keselarasan RPJMD dengan APBD	99	94	100	94	97
5	Skor Pengukuran Kinerja AKIP	13	13	17	17	
6	Skor Perencanaan AKIP	19	19	21	21	
7	Skor Pelaporan Kinerja	5	5	10	9	
8	Evaluasi Kinerja	10	10	14	14	
	Keuangan					
1	Persentase Peningkatan PAD	- 11	2	11	11	10
2	Persentase SILPA terhadap APBD	3	10	9	9	4
3	Rasio Kemandiain Keuangan Daerah	10	9	9	9	9
4	Manajemen Aset					Ya
5	Deviasi Realisasi Belanja terhadap total belanja dalam APBD					100
6	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Kab/Kota)					Positif
7	Rasio Anggaran Sisa terhadap total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya					100
	Kepegawaian					
1	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sikka	30	32	33	76	76
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)					4.81
	Pendidikan dan Pelatihan					
1	Dimensi Kompetensi dalam Indeks Profesionalitas ASN		9	21	26	
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)					22.44
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)					27.66
	Penelitian dan Pengembangan					
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan di kebijakan	NA	1	1	1	1

No	Indikator	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	1	1	1	1	1
	Pengawasan					
1	Nilai Maturitas SPIP	3	3	2	2	2
2	Nilai APIP	3	3	2	2	2
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	64	54	51	51	36
4	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					Berkembang
	Pemerintahan Umum					
1	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	-	150	-	-	100
2	Jumlah Peserta Pendidikan Politik bagi masyarakat	-	-	270	90	90
3	persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	97	98	98	98	98
4	Jumlah Dokumen Rekomendasi FKUB	3	4	1	2	2

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Sikka secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagai dasar untuk menentukan rata- rata pertumbuhan. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Berikut merupakan realisasi dari Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sikka untuk periode tahun anggaran 2020 hingga 2024:

Tabel 2.171
Realisasi APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	**PENDAPATAN**					
	A. Pendapatan Asli Daerah	119.601.046.361,49	90.816.311.412,52	96.656.644.905,07	105.677.799.709,83	107.057.941.308,05
	B. Pendapatan Transfer	791.494.640.670,00	1.001.126.676.974,00	952.943.640.966,53	1.033.262.683.994,28	1.107.513.567.354,00
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	191.395.970.718,00	30.724.580.000,00	42.276.036.128,09	14.502.954.838,00	15.996.202.478,43
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.102.491.657.749,49**	**1.122.667.568.386,52**	**1.091.876.321.999,69**	**1.153.443.438.542,11**	**1.230.567.711.140,48**
2	**BELANJA**					
	A. Belanja Operasi	747.592.471.396,00	757.035.729.662,00	819.955.992.040,00	776.189.449.618,55	932.742.706.564,84
	B. Belanja Modal	93001041920,77	126.329.007.697,75	191.918.116.670,00	163.243.968.890,00	88.965.036.687,99
	C. Belanja Tak Terduga	63.342.443.194,00	13.754.138.057,00	3.352.464.956,00	169.044.570,00	879.144.037,00
	D. Belanja Transfer	217.951.575.307,00	215.137.225.537,00	203.510.842.366,00	198.602.295.880,00	227.579.116.166,00
	JUMLAH BELANJA	**1.136.735.890.459,77**	**1.112.256.100.953,75**	**1.218.737.416.032,00**	**1.138.204.758.958,55**	**1.250.166.003.455,83**
	SURPLUS/DEFISIT	**4.391.757.289,72**	**-143.118.992.938,42**	**-126.861.094.032,31**	**15.238.679.583,56**	**-19.598.292.315,35**
3	**PEMBIAYAAN**					
	A. Penerimaan Pembiayaan	68.023.868.104,57	93.305.736.418,94	236.613.333.790,43	98.252.239.758,12	104.414.699.451,23
	B. Pengeluaran Pembiayaan	9.250.000.000,00	6.524.108.602,05	11.500.000.000,00	9.076.219.890,45	39.964.783.513,22
	PEMBIAYAAN NETTO	**58.773.868.104,57**	**86.781.627.816,89**	**225.113.333.790,43**	**89.176.019.867,67**	**64.449.915.938,01**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)	**39.377.994.036,29**	**97.193.095.249,66**	**98.252.239.758,12**	**104.414.699.451,23**	**44.851.623.622,66**

* Angka sementara (Unaudited)
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2020; 2021; 2022; 2023; 2024*

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

- Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat kabupaten, meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-PP), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Retribusi Daerah sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Daerah, Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan ini berasal dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu PT Bank Pembangunan NTT.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diantaranya: Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti Rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaan, Pendapatan BLUD, dan lain-lain.

Dalam era otonomi daerah, PAD diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Berikut merupakan kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun Anggaran 2020-2024:

Tabel 2.172
Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024*
	PENDAPATAN					
A	**Pendapatan Asli Daerah**	**119.601.046.361,49**	**90.816.311.412,52**	**96.656.644.905,07**	**105.677.799.709,83**	**107.057.941.308,05**
	Pajak daerah	19.161.863.076,19	19.494.028.872,90	21.604.888.101,00	24.139.671.880,00	28.361.626.407,00
	Retribusi daerah	9.165.525.046,00	7.837.377.672,00	8.304.664.482,00	8.173.630.623,00	7.871.935.158,00
	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	2.602.950.139,00	2.694.036.222,00	1.707.467.340,00	3.479.066.260,00	1.698.073.291,00
	Lain-lain PAD yang sah	88.670.708.100,30	60.790.868.645,62	65.039.624.982,07	69.885.430.946,09	69.126.306.452,05
B	**Pendapatan Transfer**	**791.494.640.670,00**	**1.001.126.676.974,00**	**952.826.126.966,53**	**1.033.262.683.994,00**	**1.107.513.612.354,00**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765.074.025.024,00	978.946.525.981,00	923.420.002.309,53	994.823.636.145,00	1.067.605.148.494,00
	Dana Perimbangan	765.074.025.024,00	799.486.452.981,00	767.279.111.309,53	858.735.809.145,00	904.527.283.494,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	7.645.850.169,00	14.788.653.458,00	13.208.183.546,00	9.655.275.065,00	7.334.238.000,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	586.220.258.000,00	579.691.529.000,00	579.230.812.000,00	619.573.611.000,00	682.407.638.000,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	169.747.062.856,00	205.006.270.523,00	174.840.115.763,53	229.506.923.080,00	223.424.086.000,00
	Dana Insentif Daerah	0,00	26.695.841.000,00	14.806.884.000,00	0,00	0,00
	Dana Desa	0,00	152.764.232.000,00	141.334.007.000,00	136.087.827.000,00	157.479.215.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.420.615.646,00	22.180.150.993,00	29.406.124.657,00	38.439.047.849,00	39.908.463.860,00
	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.650.000,00
C	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**38.635.990.000,00**	**30.724.580.000,00**	**42.275.991.197,00**	**14.502.954.838,00**	**15.996.202.478,00**
	Hibah	38.635.990.000,00	30.724.580.000,00	30.253.250.051,00	0,00	200.000.000,00
	Dana darurat	0,00		0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	12.022.741.146,00	14.502.954.838,00	15.796.202.478,00
	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PENDAPATAN	**1.109.981.008.104,90**	**1.122.667.568.386,52**	**1.091.758.763.068,60**	**1.153.443.438.541,83**	**1.230.567.756.140,05**

* Angka sementara (Unaudited)
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2020; 2021; 2022; 2023; 2024*

Total Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total pendapatan tercatat sebesar Rp 1.109.981.008.104,90. Angka ini mengalami kenaikan signifikan di tahun 2021 menjadi Rp 1.122.667.568.386,51. Namun, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp 1.091.758.763.068,61, sebelum kembali menunjukkan pertumbuhan positif di tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp 1.153.443.438.541,83. Puncak pendapatan terlihat pada tahun 2024 yang mencapai Rp 1.230.567.756.140,05. Rata-rata pertumbuhan total pendapatan selama periode tersebut adalah 2,68 persen. Meskipun fluktuatif, secara agregat terdapat kecenderungan peningkatan total pendapatan daerah dalam kurun waktu lima tahun tersebut, mengindikasikan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Kabupaten Sikka menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan signifikan selama periode analisis. Pada tahun 2020, kontribusi PAD adalah sebesar Rp 119.601.046.361,49. Angka ini secara berurutan meningkat menjadi Rp 90.816.311.412,52 di tahun 2021, Rp 96.656.644.905,07 di tahun 2022, dan Rp 105.677.799.709,83 di tahun 2023. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024, di mana PAD mencapai Rp 107.057.941.308,05. Pertumbuhan PAD Kabupaten Sikka tercatat mengalami rata-rata pertumbuhan -1,75 persen dari tahun 2020-2024.

1) Pajak daerah merupakan kontributor utama PAD dan menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan cenderung mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2020, pajak daerah tercatat Rp 19.161.868.076,19 dan terus meningkat signifikan hingga mencapai Rp 28.361.626.407,00 pada tahun 2024 sehingga mampu mencatatkan rata-rata pertumbuhan hingga 10,45 persen. Pandemi COVID-19 berdampak pada rendahnya pertumbuhan Pajak Daerah di tahun 2020-2021. PAD Kabupaten Sikka mengalami pertumbuhan 1,73 persen akibat adanya beberapa komponen pajak yang tidak boleh dipungut pada saat pandemi COVID-19 serta tidak adanya aktivitas di beberapa sektor (salah satunya Hotel dan restoran). Namun demikian, pertumbuhan ini juga menandakan mulai kembalinya aktivitas masyarakat setelah pandemi COVID-19.
2) Retribusi daerah juga menunjukkan peningkatan yang stabil meskipun tidak sekuat pajak daerah. Komponen ini memiliki rata-rata pertumbuhan -3,45 persen, namun secara realisasi angkanya mengalami peningkatan dari Rp 9.165.525.046,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 7.871.935.158,00 pada tahun 2024. Rendahnya pertumbuhan retribusi ini terjadi akibat penurunan pada tahun 2020 yang turun hingga -14,49 persen di tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya beberapa komponen retribusi yang tidak dapat ditarik oleh daerah. Lebih lanjut, pada tahun 2024, komponen ini kembali mengalami penurunan hingga -3,69 persen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya retribusi yang dihilangkan seperti Retribusi Tera Ulang, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengendalian Menara Telkom, Sewa Pemakaian Alat Berat, Sewa Traktor dari Pemerintah Pusat yang dibebaskan, serta adanya Pabrik Es yang sudah tidak beroperasi.
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, tercatat Rp 2.602.950.139,00, dengan pertumbuhan 3,50 persen pada tahun 2020-2021. Angka ini mencerminkan bahwa Pemda Sikka tidak melakukan investasi penyertaan modal ke BPD NTT pada tahun tersebut. Kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021-2022 sebesar - 36,62 persen, sebelum melonjak tinggi pada tahun 2022-2023 sebesar 103,76 persen yang disebabkan oleh adanya pembagian hasil dari penyertaan modal. Namun, pada tahun 2023-2024, terjadi penurunan lagi sebesar -51,19 persen, dengan realisasi Rp 1.698.073.291,00 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan komponen ini adalah 4,86 persen.
4) Lain-lain PAD yang sah merupakan komponen terbesar dalam PAD, namun menunjukkan penurunan yang cukup drastis dari Rp 88.670.708.100,30 pada tahun 2020 menjadi Rp

69.126.306.452,05 pada tahun 2024. Penurunan tersebut diawali oleh pertumbuhan -31,44 persen pada tahun 2020-2021, di mana realisasi pada tahun 2021 adalah Rp60.790.866.645,62. Salah satu penyebab penurunan tersebut dikarenakan adanya pengalihan Dana BOS ke DAK Non Fisik. Namun, kemudian terjadi pertumbuhan positif 6,99 persen pada tahun 2021-2022 dan 7,45 persen pada tahun 2022-2023, sebelum kembali turun -1,09 persen pada tahun 2023-2024. Rata-rata pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah adalah -4,52 persen.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Sikka, dan menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp 791.494.640.670,00 dan meningkat menjadi Rp 1.107.513.612.354,00 pada tahun 2024. Pendapatan transfer menunjukkan pertumbuhan positif 26,49 persen pada tahun 2020-2021, kemudian pertumbuhan -4,81 persen pada tahun 2021-2022, diikuti pertumbuhan positif 8,44 persen pada tahun 2022-2023, dan pertumbuhan positif 7,19 persen pada tahun 2023-2024. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer adalah 4,00 persen. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Sub komponen penyusun Pendapatan Transfer juga menunjukkan tren yang bervariasi.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menunjukkan peningkatan yang konsisten dari Rp 765.074.025.024,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 1.067.605.148.494,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 9,33 persen. Ini mencerminkan peningkatan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Sikka. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan fluktuasi, dengan pertumbuhan 93,42 persen pada tahun 2020-2021, kemudian -10,69 persen pada tahun 2021-2022, -26,90 persen pada tahun 2022-2023, dan -24,04 persen pada tahun 2023-2024. Rata-rata pertumbuhan DBH adalah 7,95 persen, dengan realisasi dari Rp 765.074.025.024,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 7.334.238.000,00 pada tahun 2024.

   Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan. Dari Rp 586.220.258.000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 682.407.638.000,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 3,82 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menunjukkan peningkatan yang stabil. Dari Rp 169.747.062.856,00 pada tahun 2020, meningkat menjadi Rp 223.424.086.000,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 8,67 persen. Insentif Fiskal baru muncul pada tahun 2024 sebesar Rp 5.598.650.000,00, yang menandakan adanya kebijakan baru atau kinerja daerah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif ini.

   Dana Insentif Daerah (DID) mengalami fluktuasi dan bahkan tidak ada alokasi pada tahun 2020, 2023, dan 2024, dengan rata-rata pertumbuhan -72,27 persen. Akan tetapi, DID Kabupaten Sikka pernah mencapai Rp 26.695.841.000,00 pada tahun 2021 dan Rp 14.806.884.000,00 pada tahun 2022 dengan pertumbuhan -44,53 persen pada tahun 2021-2022 dan -100,00 persen pada tahun 2022-2023. Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang terjadi pada Kabupaten Sikka memberikan pesan adanya urgensi untuk melakukan perbaikan kinerja di various bidang tersebut. Terakhir, Dana Desa menunjukkan peningkatan yang stabil dari Rp 152.759.980.718,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 157.479.215.000,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 1,51 persen.
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari Rp 26.420.615.646,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 39.908.463.860,00 pada tahun 2024. Pertumbuhan komponen ini sempat -16,05 persen pada tahun 2020-2021, namun kemudian tumbuh positif 32,58 persen pada tahun 2021-2022, 30,72 persen pada tahun

2022-2023, dan 3,82 persen pada tahun 2023-2024. Rata-rata pertumbuhan komponen ini adalah 10,25 persen. Peningkatan ini bisa mencerminkan adanya kerja sama antar daerah atau alokasi dana dari provinsi. Khususnya pada tahun 2023, peningkatan ini juga didorong oleh adanya penyesuaian Dana Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (DBH PKB) Provinsi.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren penurunan yang drastis pada akhir periode analisis. Dari Rp 38.635.990.000,00 pada tahun 2020, menurun signifikan menjadi Rp 15.596.202.478,00 pada tahun 2024. Pertumbuhan komponen ini -20,48 persen pada tahun 2020-2021, kemudian tumbuh positif 37,60 persen pada tahun 2021-2022, namun kembali menurun drastis -65,69 persen pada tahun 2022-2023, sebelum tumbuh positif 10,30 persen pada tahun 2023-2024. Rata-rata pertumbuhan komponen ini adalah -9,57 persen. Penurunan ini perlu dicermati secara mendalam karena dapat mengindikasikan hilangnya sumber pendapatan non-reguler.

1) Hibah merupakan kontributor utama dalam kategori ini dan menunjukkan penurunan yang sangat drastis. Dari Rp 38.635.990.000,00 pada tahun 2020, menurun tajam menjadi hanya Rp 200.000.000,00 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan hibah selama periode 2020-2024 menunjukkan tren negatif sebesar -40,67 persen. Penurunan ini menandakan berkurangnya bantuan atau sumbangan yang diterima dari pihak ketiga, baik individu, kelompok, maupun lembaga. Pertumbuhan hibah adalah -20,48 persen pada tahun 2020-2021, -1,53 persen pada tahun 2021-2022, dan -100,00 persen pada tahun 2022-2023. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2020, angka Rp 38.635.990.000,00 yang tercatat sudah termasuk Hibah Dana BOS tahun berkenaan. Sementara itu, untuk tahun 2024 (Rp 200.000.000,00) hibah yang diterima merupakan CSR BPD NTT.
2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan baru muncul signifikan mulai tahun 2022 dengan nilai Rp 12.022.741.146,00, dan menunjukkan pertumbuhan 20,63 persen pada tahun 2022-2023 dan 8,92 persen pada tahun 2023-2024, sehingga terus meningkat menjadi Rp 15.796.202.478,00 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan komponen ini adalah 14,77 persen. Ini menunjukkan adanya potensi pendapatan baru yang diidentifikasi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.
3) Dana darurat dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya tidak pernah tercatat selama tahun anggaran 2020-2024, sehingga rata-rata pertumbuhannya adalah 0,00 persen.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan Kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Belanja Daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Struktur Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.173
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	BELANJA					
A	**Belanja Operasi**	**747.592.471.396,00**	**757.035.729.662,00**	**819.955.992.040,00**	**776.189.449.618,55**	**932.742.706.564,84**
1	Belanja Pegawai	451.829.087.651,00	459.111.201.374,00	466.138.859.580,00	453.083.989.213,00	529.719.265.320,00
2	Belanja Barang dan Jasa	289.223.879.786,00	291.974.368.131,00	331.022.568.674,00	304.072.591.129,55	324.875.806.291,06
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	10.434.457.729,00	10.933.822.119,00	8.538.510.958,78
5	Belanja Hibah	4.205.160.850,00	4.380.475.157,00	8.546.106.057,00	6.862.735.157,00	69.232.795.995,00
6	Belanja Bantuan Sosial	2.334.343.109,00	1.569.685.000,00	3.814.000.000,00	1.236.312.000,00	376.328.000,00
B	**Belanja Modal**	**93.001.041.920,77**	**126.329.007.698,00**	**191.918.116.670,00**	**163.243.968.890,00**	**88.965.036.687,99**
1	Belanja Tanah	1.134.243.000,00	1.732.618.030,00	3.085.098.903,00	760.000.000,00	578.792.830,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	52.862.916.964,00	27.367.133.269,00	43.082.003.350,00	66.011.658.637,00	23.915.437.125,99
3	Belanja Gedung dan Bangunan	15.583.287.548,00	40.212.047.561,00	45.896.392.953,00	44.360.353.638,00	35.481.463.339,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.420.594.408,77	56.837.248.837,75	99.342.916.464,00	51.223.546.665,00	25.136.631.037,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	888.409.950,00	3.734.712.356,00
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	179.960.000,00	511.705.000,00	0,00	118.000.000,00
C	**Belanja Tidak Terduga**	**63.342.443.194,00**	**13.754.138.057,00**	**3.352.464.956,00**	**169.044.570,00**	**879.144.037,00**
D	**Belanja Transfer**	**217.951.575.307,00**	**215.137.225.537,00**	**203.510.842.366,00**	**198.602.295.880,00**	**227.579.116.166,00**
1	Belanja Bagi Hasil	2.088.000.000,00	2.544.000.000,00	1.735.232.000,00	1.766.298.000,00	2.218.616.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	215.863.575.307,00	212.593.225.537,00	201.775.610.366,00	196.835.997.880,00	225.360.500.166,00
	TOTAL BELANJA	**1.121.887.531.817,77**	**1.112.256.100.953,75**	**1.218.737.416.032,00**	**1.138.204.758.958,55**	**1.250.166.003.455,83**

*: Angka sementara (Unaudited)
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2020; 2021; 2022; 2023; 2024*

Secara umum, total belanja daerah Kabupaten Sikka menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, total belanja tercatat sebesar Rp 1.121.887.531.817,77. Angka ini mengalami kenaikan tipis di tahun 2021 menjadi Rp 1.112.256.100.953,73, namun terjadi sedikit penurunan di tahun 2022 menjadi Rp 1.218.737.416.032,01. Belanja kembali menunjukkan pertumbuhan positif di tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp 1.138.204.758.958,58, dan puncaknya terlihat pada tahun 2024 yang mencapai Rp 1.250.166.003.455,83. Rata-rata pertumbuhan total belanja selama periode tersebut adalah 2,99 persen. Meskipun fluktuatif, secara agregat terdapat kecenderungan peningkatan total belanja daerah dalam kurun waktu lima tahun tersebut, mengindikasikan ekspansi fiskal pemerintah daerah Kabupaten Sikka.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah Kabupaten Sikka, dan menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, belanja operasi tercatat sebesar Rp 747.592.471.396,00 dan meningkat menjadi Rp 932.742.706.564,84 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 6,10 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat 1,26 persen pada 2021, 8,31 persen pada 2022, -5,34 persen pada 2023, dan 20,17 persen pada 2024. Sub komponen penyusun Belanja Operasi menunjukkan pola yang bervariasi:

1) Belanja Pegawai menunjukkan peningkatan yang stabil dan signifikan. Pada tahun 2020, belanja pegawai tercatat Rp 451.829.087.651,00 dan terus meningkat hingga mencapai Rp 529.719.265.320,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 4,31 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat 1,61 persen pada 2021, 1,53 persen pada 2022, -2,80 persen pada 2023, dan 16,91 persen pada 2024. Lebih lanjut, peningkatan pada tahun 2024 ini mengindikasikan adanya penyesuaian gaji, tunjangan, atau penambahan jumlah pegawai yang diakibatkan adanya pengangkatan P3K.
2) Belanja Barang dan Jasa juga menunjukkan peningkatan yang stabil. Dari Rp 289.223.879.786,00 pada tahun 2020, meningkat menjadi Rp 324.875.806.291,06 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 3,26 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat 0,95 persen pada 2021, 13,37 persen pada 2022, -8,14 persen pada 2023, dan 6,84 persen pada 2024.
3) Belanja Bunga menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Tidak ada alokasi pada tahun 2020 dan 2021, namun muncul pada tahun 2022 sebesar Rp 10.434.457.729,00 dan terus berfluktuasi hingga Rp 8.538.510.958,78 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tercatat -8,56 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat 4,79 persen pada 2023 dan -21,91 persen pada 2024.
4) Belanja Hibah menunjukkan peningkatan yang sangat drastis. Dari Rp 4.205.160.850,00 pada tahun 2020, meningkat secara eksponensial menjadi Rp 69.232.795.995,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 247,10 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat 4,17 persen pada 2021, 95,10 persen pada 2022, -19,70 persen pada 2023, dan 908,82 persen pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan pemberian hibah kepada pihak ketiga.
5) Belanja Bantuan Sosial menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Dari Rp 2.334.343.109,00 pada tahun 2020, menurun menjadi Rp 376.328.000,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan -6,73 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat -32,76 persen pada 2021, 142,98 persen pada 2022, -67,58 persen pada 2023, dan -69,56 persen pada 2024.

b. Belanja Modal

Belanja Modal menunjukkan tren yang fluktuatif, namun secara rata-rata tumbuh 6,83 persen. Pada tahun 2020, belanja modal tercatat sebesar Rp 93.001.041.920,77 dan

meningkat menjadi Rp 88.965.036.687,99 pada tahun 2024. Pertumbuhan tahunan tercatat 35,84 persen pada 2021, 51,92 persen pada 2022, -14,94 persen pada 2023, dan -45,50 persen pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan ketidakpastian dalam investasi infrastruktur daerah.

1) Belanja Tanah menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Dari Rp 1.134.243.000,00 pada tahun 2020, meningkat hingga Rp 3.085.098.903,00 pada tahun 2022, namun kemudian menurun tajam menjadi Rp 578.792.830,00 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tercatat 7,90 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat 52,76 persen pada 2021, 78,06 persen pada 2022, -75,37 persen pada 2023, dan -23,84 persen pada 2024.
2) Belanja Peralatan dan Mesin menunjukkan tren penurunan secara keseluruhan. Dari Rp 52.862.916.964,00 pada tahun 2020, menurun menjadi Rp 23.915.437.125,99 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan -0,34 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat -48,23 persen pada 2021, 57,42 persen pada 2022, 53,22 persen pada 2023, dan -63,77 persen pada 2024.
3) Belanja Gedung dan Bangunan menunjukkan peningkatan yang kuat dan stabil. Dari Rp 15.583.287.548,00 pada tahun 2020, meningkat signifikan hingga Rp 35.461.463.339,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 37,20 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat 158,05 persen pada 2021, 14,14 persen pada 2022, -3,35 persen pada 2023, dan -20,02 persen pada 2024.
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan menunjukkan peningkatan signifikan pada awal periode namun kemudian menurun. Dari Rp 23.420.594.408,77 pada tahun 2020, mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp 99.342.916.464,00, namun menurun menjadi Rp 25.136.631.037,00 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tercatat 29,53 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat 142,68 persen pada 2021, 74,78 persen pada 2022, -48,44 persen pada 2023, dan -50,93 persen pada 2024.
5) Belanja Aset Tetap Lainnya baru muncul signifikan pada tahun 2023 sebesar Rp 888.409.950,00 dan meningkat drastis menjadi Rp 3.734.712.356,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 320,38 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat 320,38 persen pada 2024.
6) Belanja Aset Lainnya menunjukkan fluktuasi dan baru muncul pada tahun 2021 sebesar Rp 179.960.000,00 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp 511.705.000,00, kemudian menurun menjadi Rp 118.000.000,00 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tercatat 42,17 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat 184,34 persen pada 2022, -100,00 persen pada 2023, dan -100,00 persen pada 2024.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga menunjukkan fluktuasi ekstrem. Dari Rp 63.342.443.194,00 pada tahun 2020, menurun drastis menjadi Rp 13.754.138.057,00 pada tahun 2021, dan terus menurun hingga Rp 169.044.570,00 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, belanja ini melonjak signifikan menjadi Rp 879.144.037,00. Rata-rata pertumbuhan tercatat 42,80 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat -78,29 persen pada 2021, -75,63 persen pada 2022, -94,96 persen pada 2023, dan 420,07 persen pada 2024. Fluktuasi ini kemungkinan besar terkait dengan kejadian tak terduga seperti bencana alam atau krisis lainnya seperti Pandemi Covid19 yang terjadi di tahun 2020 yang mengakibatkan angka pada tahun tersebut menjadi cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan. Pada tahun 2020, belanja transfer tercatat sebesar Rp 217.951.575.307,00 dan meningkat menjadi Rp 227.579.116.166,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 1,37

persen. Pertumbuhan tahunan tercatat -1,29 persen pada 2021, -5,40 persen pada 2022, -2,41 persen pada 2023, dan 14,59 persen pada 2024.

1) Belanja Bagi Hasil menunjukkan fluktuasi. Dari Rp 2.088.000.000,00 pada tahun 2020, mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp 2.544.000.000,00, kemudian menurun menjadi Rp 1.766.298.000,00 pada tahun 2023, dan sedikit meningkat menjadi Rp 2.218.616.000,00 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tercatat 4,36 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat 21,84 persen pada 2021, -31,79 persen pada 2022, 1,79 persen pada 2023, dan 25,61 persen pada 2024.
2) Belanja Bantuan Keuangan menunjukkan tren yang relatif stabil. Dari Rp 215.863.575.307,00 pada tahun 2020, meningkat menjadi Rp 225.360.500.166,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 1,36 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat -1,52 persen pada 2021, -5,09 persen pada 2022, -2,45 persen pada 2023, dan 14,49 persen pada 2024.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.174
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024*
	PEMBIAYAAN					
A	**Penerimaan Pembiayaan**	**68.023.868.104,57**	**93.305.736.418,94**	**236.613.333.790,43**	**98.252.239.758,12**	**104.414.699.451,23**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.023.868.104,57	39.242.033.168,47	97.193.111.419,43	98.252.239.758,12	104.414.699.451,23
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	54.063.703.250,00	139.420.222.371,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**9.250.000.000,00**	**6.524.108.602,05**	**11.500.000.000,00**	**9.076.219.890,45**	**39.964.783.513,22**
1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	6.124.037.198,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	400.071.404,05	0,00	0,00	0,00
C	**Pembiayaan Netto**	**58.773.868.104,57**	**86.781.627.816,89**	**225.113.333.790,43**	**89.176.019.867,67**	**64.449.915.938,01**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**39.377.994.036,29**	**97.193.095.249,66**	**98.252.239.758,12**	**104.414.699.451,23**	**44.851.623.622,66**

* Angka sementara (Unaudited)
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2020; 2021; 2022; 2023; 2024*

Secara umum, Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka menunjukkan tren yang sangat fluktuatif selama periode 2020-2024. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah adalah 34,64 persen. Pada tahun 2020, total Penerimaan Pembiayaan tercatat sebesar Rp 68.023.868.104,57. Angka ini mengalami kenaikan signifikan di tahun 2021 menjadi Rp 93.305.736.418,94 dengan pertumbuhan 37,17 persen, dan puncaknya di tahun 2022 mencapai Rp 236.613.333.790,43 dengan pertumbuhan 153,59 persen. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2023 menjadi Rp 98.252.239.758,12 atau -58,48 persen, sebelum kembali menunjukkan pertumbuhan positif di tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp 104.414.699.451,23 atau 6,27 persen.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan menunjukkan pola yang sangat bergejolak selama periode analisis. Pada tahun 2020, Penerimaan Pembiayaan tercatat sebesar Rp 68.023.868.104,57 dan meningkat signifikan hingga mencapai Rp 104.414.699.451,23 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 34,64 persen.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) merupakan kontributor utama Penerimaan Pembiayaan. Pada tahun 2020, SILPA tercatat Rp 68.023.868.104,57, kemudian menurun drastis menjadi Rp 39.242.033.168,47 pada tahun 2021 atau -42,31 persen. Angka ini melonjak tajam pada tahun 2022 menjadi Rp 97.193.111.419,43 atau tumbuh 147,68 persen, kemudian meningkat tipis menjadi Rp 98.252.239.758,12 pada tahun 2023 atau 1,09 persen, dan terus meningkat hingga Rp 104.414.699.451,23 pada tahun 2024 atau 6,27 persen. Rata-rata pertumbuhan SILPA adalah 28,18 persen. Fluktuasi SILPA ini mengindikasikan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran dan realisasi belanja tahunan.

Penerimaan Pinjaman Daerah menunjukkan adanya alokasi pada tahun 2021 sebesar Rp 54.063.703.250,00 dan meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 139.420.222.371,00. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, tidak ada penerimaan dari pinjaman daerah. Rata-rata pertumbuhan tercatat -100,00 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat -100,00 persen pada 2023. Terakhir, untuk komponen Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen tidak pernah tercatat selama periode tersebut.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan juga menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 91,51 persen. Pada tahun 2020, pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp 9.250.000.000,00 dan menurun menjadi Rp 6.524.108.602,05 pada tahun 2021 atau -29,47 persen. Angka ini melonjak tajam pada tahun 2022 menjadi Rp 11.500.000.000,00 atau tumbuh 76,27 persen. Kemudian menurun menjadi Rp 9.076.219.890,45 pada tahun 2023 atau -21,08 persen, dan melonjak drastis pada tahun 2024 menjadi Rp 39.964.783.513,22 atau tumbuh 340,32 persen. enyertaan Modal Daerah hanya tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp 6.124.037.198,00 dan tidak ada pada tahun-tahun lainnya. Rata-rata pertumbuhan tercatat -100,00 persen. Pertumbuhan tahunan tercatat -100,00 persen pada 2022. Di satu sisi, Pembayaran Pokok Utang hanya tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp 400.071.404,05 dan tidak ada pada tahun-tahun lainnya.

Berdasarkan hasil Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan di atas, maka dapat dilihat bahwa Pembiayaan Netto menunjukkan fluktuasi yang ekstrem. Dari Rp 58.773.868.104,57 pada tahun 2020, meningkat signifikan menjadi Rp 86.781.627.816,89 pada tahun 2021 atau tumbuh 47,65 persen, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp 225.113.333.790,43 atau tumbuh 159,40 persen. Namun, kemudian menurun drastis menjadi Rp 89.176.019.867,67 pada tahun 2023 atau -60,39 persen, dan kembali menurun menjadi Rp 64.449.915.938,01 pada tahun 2024 atau -27,73 persen. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Netto adalah 29,74 persen.

Selanjutnya, SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Berkenaan menunjukkan fluktuasi yang sangat besar. Pada tahun 2020, SILPA tercatat sebesar Rp 39.377.994.036,29. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan surplus SILPA yang signifikan menjadi Rp 97.193.095.249,66 atau tumbuh sebesar 146,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2024, SILPA kembali menurun drastis menjadi Rp 44.851.623.622,66 atau -57,04 persen. Rata-rata pertumbuhan SILPA adalah 24,28% persen. Fluktuasi ekstrim ini mengindikasikan tantangan serius dalam pengelolaan kas daerah dan keseimbangan anggaran.

2.2.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Sebagai cerminan posisi keuangan pemerintah daerah pada suatu waktu tertentu, Neraca Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2024 menjadi instrumen vital dalam mengevaluasi akuntabilitas fiskal dan kapasitas pengelolaan aset serta kewajiban. Penyusunan dan analisis Neraca Daerah ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Analisis komprehensif terhadap Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca ini tidak hanya memberikan gambaran statis kondisi keuangan, tetapi juga mengidentifikasi tren dan dinamika yang krusial bagi perumusan RPJMD Kabupaten Sikka, khususnya dalam aspek keberlanjutan fiskal dan efektivitas alokasi sumber daya. Data Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca Dareah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175
Neraca Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	Nilai (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
A	**ASET**					
	Aset Lancar	75.625.234.992,92	159.970.222.592,70	170.519.061.085,60	206.370.964.001,29	164.635.003.980,76
	Investasi Jangka Panjang	26.797.101.513,82	61.581.536.734,82	71.002.367.615,82	69.384.053.937,00	70.328.086.467,00
	Aset Tetap	1.475.610.274.961,39	1.611.535.648.264,54	1.767.059.970.104,93	1.693.424.130.167,13	1.541.232.119.024,34
	Aset Lainnya	46.352.256.870,59	49.206.965.209,48	92.053.006.531,04	121.470.794.770,72	64.555.084.531,13
	JUMLAH ASET	**1.624.384.868.338,72**	**1.882.294.372.802,00**	**2.100.634.405.337,00**	**2.090.649.942.876,00**	**1.840.750.294.003,23**
B	**KEWAJIBAN**					
	Kewajiban Jangka Pendek	10.436.714.607,08	14.481.049.577,10	20.486.129.375,23	54.566.643.392,38	53.825.323.619,05
	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	53.663.631.845,95	193.483.925.621,00	152.160.382.222,55	112.195.598.709,78
	JUMLAH KEWAJIBAN	**10.436.714.607,08**	**68.144.681.423,00**	**213.970.054.996,00**	**206.727.025.615,00**	**166.020.922.329,00**
C	**EKUITAS**					
	Ekuitas	1.613.948.153.731,64	1.814.149.691.378,49	1.886.664.350.341,16	1.883.922.917.261,21	1.674.729.371.674,40
	JUMLAH EKUITAS	**1.613.948.153.731,64**	**1.814.149.691.378,49**	**1.886.664.350.341,16**	**1.883.922.917.261,21**	**1.674.729.371.674,40**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.624.384.868.338,72**	**1.882.294.372.802,00**	**2.100.634.405.337,00**	**2.090.649.942.876,00**	**1.840.750.294.003,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka (2020; 2021; 2022; 2023; 2024)

1. Aset

Jumlah Aset Kabupaten Sikka menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dan konsisten sepanjang periode 2020-2024, meskipun terdapat sedikit penurunan di tahun terakhir. Pada tahun 2020, total aset tercatat sebesar Rp 1.624.384.868.338,72. Angka ini terus meningkat dengan pertumbuhan 15,88 persen di tahun 2021 menjadi Rp 1.882.294.372.801,52, kemudian tumbuh 11,60 persen di tahun 2022 menjadi Rp 2.100.634.405.337,39. Meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar -0,48 persen di tahun 2023 menjadi Rp 2.090.649.942.876,14, dan kembali menurun sebesar -11,95 persen di tahun 2024 menjadi Rp 1.840.750.294.003,23. Rata-rata pertumbuhan aset adalah 3,76 persen. Secara agregat, terlihat akumulasi kekayaan daerah yang positif, meskipun ada dinamika penurunan di akhir periode.

a. Aset Lancar

Aset Lancar menunjukkan fluktuasi yang signifikan namun cenderung meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan 29,73 persen. Dari Rp 75.625.234.992,92 pada tahun 2020, tumbuh 111,53 persen di tahun 2021 menjadi Rp 159.970.222.592,70. Kemudian tumbuh 6,59 persen di tahun 2022 menjadi Rp 170.519.061.085,60, dan tumbuh 21,03 persen di tahun 2023 menjadi Rp 206.370.964.001,29. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar -20,22 persen menjadi Rp 164.635.003.980,76. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh pergerakan kas, piutang, dan persediaan. Sisa kas di bendahara pengeluaran, penerimaan BOS, persediaan di RSUD dan Dinas Kesehatan, serta barang yang belum diserahkan ke masyarakat menjadi faktor dominan dalam pergerakan aset lancar. Kas di Kas Daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2020, tercatat Rp 21.468.001.395,29, mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp 85.507.990.075,19, dan menurun signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp 30.065.858.989,17. Pergerakan kas ini dapat mencerminkan pola penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah daerah.Selanjutnya, Piutang Pendapatan menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Dari Rp 28.167.862.290,40 pada tahun 2020, meningkat hingga Rp 36.839.658.980,40 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan efektivitas penagihan pendapatan atau peningkatan basis pendapatan yang belum tertagih.

b. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset terbesar dan menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dengan rata-rata pertumbuhan 1,43 persen. Dari Rp 1.475.610.274.961,39 pada tahun 2020, tumbuh 9,21 persen di tahun 2021 menjadi Rp 1.611.535.648.264,54. Kemudian tumbuh 9,65 persen di tahun 2022 menjadi Rp 1.767.059.970.104,93, namun menurun -4,17 persen di tahun 2023 menjadi Rp 1.693.424.130.167,13, dan kembali menurun -8,99 persen di tahun 2024 menjadi Rp 1.541.232.119.024,34. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pembangunan dan akuisisi infrastruktur serta aset fisik lainnya oleh pemerintah daerah. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh penghapusan aset karena hibah dan penjualan, serta koreksi terhadap akumulasi penyusutan.

Aset Tanah menunjukkan sedikit fluktuasi namun relatif stabil. Dari Rp 357.979.252.454,23 pada tahun 2020, sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi Rp 316.159.005.894,45. Aset Gedung dan Bangunan menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan. Dari Rp 556.700.567.553,18 pada tahun 2020, meningkat hingga Rp 727.167.989.335,54 pada tahun 2024. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan juga menunjukkan peningkatan yang konsisten. Dari Rp 942.809.248.732,24 pada tahun 2020, meningkat hingga Rp 1.206.589.347.747,56 pada tahun 2024.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya menunjukkan fluktuasi namun cenderung meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan 19,58 persen. Dari Rp 46.352.256.870,59 pada tahun 2020, tumbuh 6,16 persen di tahun 2021 menjadi Rp 49.206.965.209,48. Kemudian melonjak 87,07 persen di tahun 2022 menjadi Rp 92.053.006.531,04, dan tumbuh 31,94 persen di tahun 2023 menjadi Rp 121.470.794.770,72. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis sebesar -46,86 persen menjadi Rp 64.555.084.531,13. Perubahan ini dapat disebabkan oleh banyaknya barang yang rusak (re-klasifikasi), penghapusan, dan pemusnahan aset.

2. Kewajiban

Jumlah Kewajiban Kabupaten Sikka menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan selama periode 2020-2024, dengan rata-rata pertumbuhan 185,96 persen. Pada tahun 2020, total kewajiban tercatat sebesar Rp 10.436.714.607,08 dan melonjak drastis hingga mencapai Rp 166.020.922.328,83 pada tahun 2024. Pertumbuhan tahunan tercatat 552,93 persen pada 2021, 213,99 persen pada 2022, -3,39 persen pada 2023, dan -19,69 persen pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan penggunaan utang atau kewajiban lain untuk membiayai operasional dan investasi pemerintah daerah. Sub komponen penyusun Kewajiban yang paling menonjol meliputi:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan 61,30 persen. Dari Rp 10.436.714.607,08 pada tahun 2020, tumbuh 38,75 persen di tahun 2021 menjadi Rp 14.481.049.577,10. Kemudian tumbuh 41,47 persen di tahun 2022 menjadi Rp 20.486.129.375,23, dan melonjak 166,36 persen di tahun 2023 menjadi Rp 54.566.643.392,38. Pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan sebesar -1,36 persen menjadi Rp 53.825.323.619,05. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang pihak ketiga termasuk utang belanja.Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menunjukkan peningkatan yang sangat drastis. Dari Rp 77.472.210,00 pada tahun 2020, melonjak hingga Rp 345.731.244,90 pada tahun 2024. Terakhir, Utang Belanja menunjukkan peningkatan yang konsisten dan substansial. Dari Rp 10.056.251.590,00 pada tahun 2020, meningkat hingga Rp 21.016.467.853,23 pada tahun 2024.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, dengan rata-rata pertumbuhan 70,98 persen. Pada tahun 2020 tidak ada kewajiban jangka panjang. Namun, pada tahun 2021 mulai tercatat Rp 53.663.631.845,95, dan terus meningkat tajam sebesar 260,55 persen di tahun 2022 menjadi Rp 193.483.925.621,00. Kemudian menurun -21,36 persen di tahun 2023 menjadi Rp 152.160.382.222,55, dan kembali menurun -26,26 persen di tahun 2024 menjadi Rp 112.195.598.709,78. Munculnya kewajiban jangka panjang ini mengindikasikan adanya pengambilan pinjaman jangka panjang oleh pemerintah daerah, yang dipengaruhi oleh perubahan pagu pinjaman daerah dan pengembalian pokok pinjaman yang tidak dapat digunakan.

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban, dan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah. Perubahan pada Ekuitas ini mengikuti penurunan dan kenaikan nilai aset. Ekuitas Kabupaten Sikka menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan signifikan selama periode 2020-2024, dengan rata-rata pertumbuhan 1,29 persen. Dari Rp 1.613.948.153.731,64 pada tahun 2020, tumbuh 12,40 persen di tahun 2021 menjadi Rp 1.814.149.691.378,48. Kemudian tumbuh 4,00 persen di tahun 2022 menjadi Rp 1.886.664.350.341,16. Namun, mengalami sedikit penurunan sebesar -0,15 persen di tahun 2023 menjadi Rp 1.883.922.917.261,21, dan kembali menurun -11,10 persen di tahun 2024

menjadi Rp 1.674.729.371.674,40. Peningkatan ekuitas ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset secara keseluruhan lebih besar dibandingkan pertumbuhan kewajiban, meskipun terdapat dinamika penurunan di akhir periode.

2.2.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Proyeksi keuangan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Lebih lanjut, Kapasitas Rill keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam menentukan proyeksi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, selain berdasarkan hasil analisis atas gambaran keuangan pada periode sebelumnya perlu mempertimbangkan beberapa asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka. Berdasarkan hal tersebut maka Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.176
Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026-2030

No	Uraian	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
A	**PENDAPATAN**	1.230.567.711.140,48	1.311.287.625.252,66	1.360.942.126.742,05	1.413.635.575.961,02	1.469.608.151.347,87	1.529.120.749.745,79
1	**Pendapatan Asli Daerah**	107.057.941.308,05	123.465.693.605,95	132.249.367.756,95	141.733.264.562,57	151.978.499.050,24	163.051.852.388,25
	Pajak daerah	28.361.634.831,00	41.972.585.979,50	46.169.844.577,45	50.786.829.035,20	55.865.511.938,71	61.452.063.132,59
	Retribusi daerah	7.871.935.158,00	68.490.191.503,65	71.914.701.078,83	75.510.436.132,77	79.285.957.939,41	83.250.255.836,38
	Hasil pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	1.698.073.291,00	2.767.712.688,30	2.906.098.322,72	3.051.403.238,85	3.203.973.400,79	3.364.172.070,83
	Lain-lain PAD yang sah	68.181.957.090,05	10.235.203.434,50	11.258.723.777,95	12.384.596.155,75	13.623.055.771,32	14.985.361.348,45
2	**Pendapatan Transfer**	1.107.352.274.915,00	1.171.630.824.106,76	1.212.096.873.756,66	1.254.891.529.039,30	1.300.193.600.379,49	1.348.196.944.141,44
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.067.443.811.055,00	1.130.724.648.650,26	1.170.168.043.913,74	1.211.914.478.450,31	1.256.142.123.525,78	1.303.044.180.366,39
	Dana Perimbangan	904.365.991.055,00	981.378.098.708,96	1.018.566.361.068,33	1.058.023.610.193,93	1.099.927.503.158,73	1.144.470.719.231,80
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.291.870.000,00	7.555.915.343,55	7.669.254.073,70	7.784.292.884,81	7.901.057.278,08	8.019.573.137,25
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	683.934.251.174,00	709.976.906.575,20	724.176.444.706,70	738.659.973.600,84	753.433.173.072,86	768.501.836.534,31
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	212.139.869.881,00	263.845.276.790,21	286.720.662.287,92	311.579.343.708,29	338.593.272.807,80	367.949.309.560,23
	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Desa	157.479.170.000,00	149.346.549.941,30	151.601.682.845,41	153.890.868.256,38	156.214.620.367,05	158.573.461.134,59
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.908.463.860,00	40.906.175.456,50	41.928.829.842,91	42.977.050.588,99	44.051.476.853,71	45.152.763.775,05
	Insentif Fiskal	5.598.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	15.996.202.478,43	16.191.107.539,95	16.595.885.228,45	17.010.782.359,16	17.436.051.918,14	17.871.953.216,09
	Hibah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	15.796.202.478,43	16.191.107.539,95	16.595.885.228,45	17.010.782.359,16	17.436.051.918,14	17.871.953.216,09
	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BELANJA**		1.326.725.410.392,46	1.378.101.814.664,80	1.432.621.925.093,55	1.490.531.868.286,92	1.586.364.050.023,58
1	**Belanja Operasi**	932.739.106.164,84	956.868.293.197,34	968.884.240.750,53	972.232.195.996,24	963.237.388.308,61	971.196.811.258,40
	Belanja Pegawai	529.719.265.320,00	566.559.796.360,75	572.840.466.566,96	570.276.822.382,58	555.217.850.002,77	555.833.650.942,57
	Belanja Barang dan Jasa	324.872.316.291,06	338.000.788.865,22	344.760.804.642,52	351.656.020.735,38	358.689.141.150,08	365.862.923.973,08
	Belanja Bunga	8.538.510.958,78	6.994.698.793,00	4.970.865.725,00	2.957.198.030,00	925.972.036,00	0,00
	Belanja Hibah	69.232.685.595,00	36.187.309.178,37	36.730.118.816,05	37.281.070.598,29	37.840.286.657,26	38.407.890.957,12
	Belanja Bantuan Sosial	376.328.000,00	9.125.700.000,00	9.581.985.000,00	10.061.084.250,00	10.564.138.462,50	11.092.345.385,63
2	**Belanja Modal**	88.965.036.687,99	136.122.494.298,22	171.821.787.451,64	219.270.994.458,14	282.389.779.047,20	366.412.287.662,23
	Belanja Tanah	578.792.830,00	650.331.623,79	689.351.521,22	730.712.612,49	774.555.369,24	821.028.691,39
	Belanja Peralatan dan Mesin	23.915.437.125,99	24.396.137.412,22	24.640.098.786,34	24.886.499.774,21	25.135.364.771,95	25.386.718.419,67
	Belanja Gedung dan Bangunan	35.481.463.339,00	64.664.966.935,33	87.297.705.362,69	117.851.902.239,63	159.100.068.023,51	214.785.091.831,73

No	Uraian	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.136.631.037,00	42.480.906.452,53	55.225.178.388,29	71.792.731.904,78	93.330.551.476,21	121.329.716.919,07
	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.734.712.356,00	3.809.780.074,36	3.847.877.875,10	3.886.356.653,85	3.925.220.220,39	3.964.472.422,59
	Belanja Aset Lainnya	118.000.000,00	120.371.800,00	121.575.518,00	122.791.273,18	124.019.185,91	125.259.377,77
3	**Belanja Tidak Terduga**	879.144.037,00	914.661.456,09	932.954.685,22	951.613.778,92	970.646.054,50	990.058.975,59
4	**Belanja Transfer**	227.579.116.166,00	232.819.961.440,80	236.462.831.777,41	240.167.120.860,25	243.934.054.876,61	247.764.892.127,36
	Belanja Bagi Hasil	2.218.616.000,00	5.019.030.500,00	5.244.886.872,50	5.480.906.781,76	5.727.547.586,94	5.985.287.228,35
	Belanja Bantuan Keuangan	225.360.500.166,00	227.800.930.940,80	231.217.944.904,91	234.686.214.078,49	238.206.507.289,66	241.779.604.899,01
C	**PEMBIAYAAN**						
1	**Penerimaan Pembiayaan**	43.749.590.645,66	47.094.204.803,79	49.448.915.043,98	51.921.360.796,18	54.517.428.835,99	57.243.300.277,79
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.749.590.645,66	47.094.204.803,79	49.448.915.043,98	51.921.360.796,18	54.517.428.835,99	57.243.300.277,79
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	39.964.783.513,22	31.656.419.664,00	32.289.227.121,24	32.935.011.663,66	33.593.711.896,94	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	2.256.000.000,00	2.888.807.457,24	3.534.591.999,66	6.643.292.693,94	0,00
	Pembayaran Pokok Utang	0,00	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	26.950.419.203,00	0,00
D	**Pembiayaan Netto**	3.784.807.132,44	15.437.785.139,79	17.159.687.922,74	18.986.349.132,52	20.923.716.939,05	57.243.300.277,79
E	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)**	44.851.623.622,66	15.437.785.139,79	17.159.687.922,74	18.986.349.132,52	20.923.716.939,05	57.243.300.277,79

a. Proyeksi Pendapatan Daerah

Total pendapatan diproyeksikan menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2026 hingga 2030. Dimulai dari Rp 1.311.287.625.252,66 pada tahun 2026, total pendapatan diperkirakan akan mencapai Rp 1.529.120.749.745,79 pada tahun 2030, merefleksikan pertumbuhan agregat yang positif dan berkelanjutan. Peningkatan ini didorong oleh kontribusi dari komponen-komponen penyusun pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan konsisten sepanjang periode proyeksi. Dari Rp 123.465.693.665,95 pada tahun 2026, PAD diperkirakan meningkat secara progresif mencapai Rp 163.051.852.389,25 pada tahun 2030, menunjukkan rerata pertumbuhan tahunan yang substansial. Tren ini mengindikasikan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri. Peningkatan ini didorong oleh kontribusi dari Pajak Daerah yang diproyeksikan tumbuh dari Rp 41.972.585.579,50 pada tahun 2026 menjadi Rp 61.452.063.131,59 pada tahun 2030, serta Retribusi Daerah yang meningkat dari Rp 68.490.191.503,65 menjadi Rp 83.250.255.856,38 dalam periode yang sama. Selain itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah juga menunjukkan pertumbuhan positif, masing-masing dari Rp2.767.712.688,30 menjadi Rp3.364.172.070,83 dan dari Rp10.235.203.434,50 menjadi Rp14.985.361.348,45. Tren ini mengindikasikan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri. Peningkatan ini didasarkan pada beberapa asumsi seperti penataan kembali objek pajak dan potensi pajak baru, potensi pendapatan dari Pajak Burung Walet, potensi pendapatan opsen PKB dengan dasar pengenaan opsional pajak sebesar 24,6 persen dari Pemerintah Provinsi NTT, potensi retribusi terminal yang akan dioptimalkan, dan dividen penyertaan modal di Bank BPD NTT.

Namun demikian terdapat beberapa asumsi tantangan kedepan seperti penyesuaian regulasi yang menghilangkan beberapa jenis retribusi, seperti retribusi PBG yang tidak dipungut dan PBHTB yang dibebaskan. Selain itu, kondisi sarana perikanan yang rusak dan peralatan PUPR yang tidak optimal, serta tidak beroperasinya Pabrik Es juga diproyeksikan dapat mengurangi potensi pendapatan terutama pada komponen retribusi. Meskipun demikian, terdapat potensi retribusi terminal yang akan dioptimalkan.

Pendapatan Transfer diproyeksikan menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan PAD. Dari Rp 1.171.630.824.106,76 pada tahun 2026, komponen ini diperkirakan mencapai Rp 1.348.196.944.141,44 pada tahun 2030. Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mendominasi dengan proyeksi Rp1.130.724.648.650,26 pada tahun 2026 dan Rp1.303.044.180.366,39 pada tahun 2030, terutama dari Dana Perimbangan yang tumbuh dari Rp981.378.098.708,96 menjadi Rp1.114.470.719.231,80. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah juga menunjukkan peningkatan dari Rp40.906.175.456,50 menjadi Rp45.152.763.775,05. Pertumbuhan ini mencerminkan alokasi transfer dana dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya yang terus meningkat untuk mendukung stabilitas penerimaan daerah. Akan tetapi, komponen ini masih mendominasi struktur pendapatan daerah, menunjukkan ketergantungan yang berkelanjutan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Adapun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan dinamika proyeksi yang cenderung tumbuh. Dimulai dari Rp16.191.107.539,95 pada tahun 2026, komponen ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 dengan nilai Rp17.871.953.216,09. Hal ini mengindikasikan potensi variabilitas pada sumber-sumber pendapatan lain di luar PAD dan transfer, terutama dari Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan komponen lain, pertumbuhan ini menunjukkan upaya daerah untuk memanfaatkan sumber pendapatan tambahan yang sah. Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sikka

mencerminkan upaya peningkatan kapasitas fiskal melalui PAD, meskipun ketergantungan pada transfer tetap tinggi.

b. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Sikka menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2026-2030. Total belanja diproyeksikan mengalami peningkatan yang signifikan dan konsisten dari tahun 2026 hingga 2030. Dimulai dari Rp1.326.725.410.392,46 pada tahun 2026, total belanja diperkirakan akan mencapai Rp1.586.364.050.023,58 pada tahun 2030. Tren ini merefleksikan peningkatan aktivitas operasional dan investasi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik serta pembangunan infrastruktur. Peningkatan total belanja ini didorong oleh pertumbuhan pada komponen-komponen penyusunnya, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi diproyeksikan menjadi komponen terbesar dan menunjukkan peningkatan yang stabil sepanjang periode proyeksi. Dari Rp 956.868.293.197,34 pada tahun 2026, Belanja Operasi diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 971.196.811.258,40 pada tahun 2030. Kenaikan ini didorong oleh beberapa komponen utama, seperti Belanja Pegawai yang diproyeksikan mencapai Rp566.559.796.360,75 pada tahun 2026 dan Rp555.833.650.942,57 pada tahun 2030, serta Belanja Barang dan Jasa yang tumbuh dari Rp338.000.788.865,22 menjadi Rp365.862.923.973,08 dalam periode yang sama. Sementara itu, Belanja Bunga menunjukkan penurunan signifikan dari Rp6.994.698.793,00 pada tahun 2026 hingga Rp0 pada tahun 2030, mengindikasikan berkurangnya beban utang daerah. Komponen lain seperti Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial juga mengalami pertumbuhan, masing-masing dari Rp36.187.309.178,37 menjadi Rp38.407.890.957,12 dan dari Rp9.125.700.000,00 menjadi Rp11.092.345.385,63. Hal ini mencerminkan peningkatan alokasi untuk program sosial dan kolaborasi dengan pihak ketiga.

Belanja Modal menunjukkan pertumbuhan yang substansial dan berkelanjutan. Dari Rp 136.122.494.298 pada tahun 2026, Belanja Modal diproyeksikan meningkat pesat hingga mencapai Rp 366.412.287.662 pada tahun 2030. Peningkatan drastis ini terutama didorong oleh Belanja Gedung dan Bangunan yang melonjak dari Rp64.664.966.935,33 menjadi Rp214.785.091.831,73 serta Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang naik dari Rp42.480.906.452,53 menjadi Rp214.785.091.831,737. Komponen lain seperti Belanja Peralatan dan Mesin serta Belanja Tanah juga menunjukkan pertumbuhan, meskipun lebih moderat dari tahun 2026 hingga 2030.. Belanja Peralatan dan Mesin tumbuh dari Rp24.396.137.412,22 dan Belanja Tanah dari Rp650.331.623,79 menjadi Rp821.028.691,39. Proyeksi ini mengindikasikan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan aset tetap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Belanja Tak Terduga menunjukkan fluktuasi sepanjang periode proyeksi. Dimulai dari Rp 914.661.456 pada tahun 2026, belanja ini mencapai puncaknya pada tahun 2028 dengan nilai Rp 951.613.778, kemudian sedikit menurun menjadi Rp 990.058.975 pada tahun 2030. Meskipun secara nominal kecil dibandingkan komponen belanja lainnya, keberadaan alokasi ini mencerminkan antisipasi pemerintah daerah terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Transfer juga diproyeksikan mengalami peningkatan yang stabil. Dari Rp232.819.961.440,80 pada tahun 2026, komponen ini diperkirakan mencapai Rp247.764.892.127,36 pada tahun 2030. Peningkatan ini terutama berasal dari Belanja Bantuan Keuangan, yang tumbuh dari tahun 2026 senilai Rp227.800.930.940,80 menjadi Rp247.764.892.127,36 pada tahun 2030, serta Belanja Bagi Hasil yang naik dari Rp5.019.030.500,00 menjadi Rp5.985.287.228,35. Hal ini mencerminkan dukungan berkelanjutan pemerintah daerah terhadap pembangunan di tingkat desa atau entitas lainnya.

Secara keseluruhan, struktur dari proyeksi belanja Kabupaten Sikka menunjukkan peningkatan alokasi untuk Belanja Modal sebagai prioritas pembangunan, sementara Belanja Operasi tetap dominan untuk menjaga keberlangsungan layanan publik. Belanja Transfer dan Tak Terduga juga mengalami pertumbuhan, meskipun proporsinya lebih kecil, sebagai bentuk antisipasi dan dukungan terhadap program di tingkat lokal.

c. Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan Kabupaten Sikka menunjukkan tren yang sangat fluktuatif, mencerminkan dinamika antara kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan daerah. Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2026 hingga 2030. Dimulai dari Rp 47.094.204.803,79 pada tahun 2026, penerimaan ini diperkirakan akan mencapai Rp 57.243.300.277,79 pada tahun 2030. Kenaikan ini mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan di luar pendapatan rutin, yang dapat berasal dari utang, penjualan aset daerah, atau penerimaan kembali pinjaman, guna menutupi defisit anggaran atau mendanai program prioritas.

Di sisi lain, Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Dari Rp31.656.419.664,00 pada tahun 2026 yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp2.256.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp29.400.419.664,00, pengeluaran ini diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2029 dengan nilai Rp33.593.711.896,94 sebelum akhirnya turun menjadi Rp0 pada tahun 2030. Pola ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memproyeksikan akan menyelesaikan kewajiban pembayaran utang pokoknya sebelum tahun 2030, sekaligus menghentikan program penyertaan modal daerah di tahun tersebut

Pembiayaan Netto, sebagai selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, diproyeksikan menunjukkan tren positif dan meningkat sepanjang periode. Dari Rp 15.437.785.139,79 pada tahun 2026, Pembiayaan Netto diperkirakan akan mencapai Rp 57.243.300.277,79301 pada tahun 2030. Angka positif ini mengindikasikan bahwa penerimaan pembiayaan lebih besar dibandingkan pengeluaran pembiayaan, sehingga menambah sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk menutup defisit atau meningkatkan kas daerah. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sikka diproyeksikan menjadi Rp 0,00 dari tahun 2026 hingga 2030.

Secara keseluruhan, proyeksi kerangka pendanaan Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengandalkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang kuat, meskipun masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan belanja operasi, terutama belanja pegawai dan hibah, akan menjadi fokus. Fluktuasi pada belanja modal dan belanja tidak terduga mengindikasikan perlunya fleksibilitas anggaran. Proyeksi pembiayaan yang positif, yang didominasi oleh SILPA, menunjukkan optimisme dalam mengelola sisa anggaran untuk mendukung keberlanjutan fiskal. Namun, perlu dicermati proyeksi negatif pada beberapa komponen pendapatan seperti retribusi daerah dan hibah, serta tren yang tidak stabil pada beberapa pos belanja modal dan pembiayaan.

Setelah memahami dinamika proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi seberapa besar kapasitas riil keuangan Kabupaten Sikka untuk mendanai berbagai program pembangunan. Bagian ini akan menganalisis proyeksi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan untuk periode 2026 hingga 2030, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, serta proyeksi surplus/defisit anggaran. Analisis ini menjadi landasan penting dalam menentukan prioritas dan skala pembangunan yang realistis dan berkelanjutan dalam kerangka RPJMD.

Tabel 2.177
Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026-2030

No	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	1.311.287.625.252,66	1.360.942.126.742,05	1.413.635.575.961,02	1.469.608.151.347,87	1.529.120.749.745,79
2	Pencairan dana cadangan (Sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	**Total penerimaan (jumlah 1+2+3)**	**1.311.287.625.252,66**	**1.360.942.126.742,05**	**1.413.635.575.961,02**	**1.469.608.151.347,87**	**1.529.120.749.745,79**
	Dikurangi					
4	Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.227.448.112.698,33	1.282.078.177.578,68	1.319.856.444.699,19	1.359.298.841.056,44	1.400.518.613.870,79
5	Pengeluaran pembiayaan	31.656.419.664,00	32.289.227.121,24	32.935.011.663,66	33.593.711.896,94	0,00
B	**Total pengurang (jumlah (4+5)**	**1.259.104.532.362,33**	**1.314.367.404.699,92**	**1.245.334.328.520,15**	**1.240.765.155.082,16**	**1.218.961.703.385,76**
(A-B)	**Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah**	**52.183.092.890,33**	**46.574.722.042,13**	**60.844.119.598,17**	**76.715.598.394,49**	**128.602.135.875,00**

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah diperoleh melalui perhitungan antara Total Penerimaan yang terdiri dari Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan, dan Sisa lebih riil perhitungan anggaran yang dikurangi dengan Total Pengeluaran (pengurang) yang terdiri dari Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Pengeluaran Pembiayaan. Total Penerimaan diproyeksikan menunjukkan peningkatan yang stabil dan signifikan sepanjang periode. Dimulai dari Rp 1.311.287.625.252,66 pada tahun 2026, total penerimaan diperkirakan akan mencapai Rp 1.529.120.749.745,79 pada tahun 2030. Peningkatan ini didorong oleh kontribusi utama dari Pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sementara Pencairan dana cadangan (Sesuai Perda) tidak dialokasikan selama periode proyeksi.

Pengeluaran yang terdiri dari Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, dan Pengeluaran Pembiayaan, juga diproyeksikan meningkat secara konsisten. Pada tahun 2026, total pengurang pada kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah Rp1.259.104.532.362,33 dan diperkirakan akan mencapai Rp1.400.518.613.870,79 pada tahun 2030. Peningkatan ini merefleksikan peningkatan kebutuhan belanja daerah baik dari sisi operasional, transfer, maupun pengeluaran pembiayaan lainnya.

Berdasarkan hasil perhitungan antara Total Penerimaan dengan Total Pengeluaran, Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka untuk mendanai pembangunan selama periode 2026-2030 menunjukkan pola yang fluktuatif, namun secara umum mengindikasikan adanya kemampuan fiskal yang positif meskipun dengan tantangan tertentu.

Dengan demikian, Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menunjukkan tren positif dan meningkat secara konsisten sepanjang periode proyeksi. Dimulai dari Rp52.183.092.890,33 pada tahun 2026, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diproyeksikan meningkat signifikan hingga mencapai Rp128.602.135.875,00 pada tahun 2030. Peningkatan ini mengindikasikan adanya ruang fiskal yang semakin besar bagi Kabupaten Sikka untuk mendanai program-program pembangunan dan prioritas daerah. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan belanja, pertumbuhan penerimaan mampu melampaui pertumbuhan pengeluaran, menghasilkan surplus kapasitas fiskal yang terus bertumbuh.

Secara keseluruhan, proyeksi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sikka untuk mendanai pembangunan pada periode 2026-2030 menunjukkan optimisme. Setelah defisit di awal periode proyeksi (2026), pemerintah daerah diproyeksikan akan mencapai surplus yang berkelanjutan dalam belanja operasional dan belanja daerah secara keseluruhan. Dukungan dari pembiayaan neto yang positif dan peningkatan SILPA mengindikasikan bahwa Kabupaten Sikka memiliki pondasi fiskal yang cukup kuat untuk mendukung implementasi program-program pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMD. Namun, stabilitas dan kesinambungan tren positif ini sangat bergantung pada realisasi proyeksi pendapatan, terutama dari PAD, serta efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah

1. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kualitas hidup masyarakat merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial di suatu daerah, yang berfokus pada penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dapat menjadi obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan manusia tercermin dari tercapainya kesejahteraan penduduk yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta terwujudnya kesetaraan gender. Pembangunan manusia yang

dilaksanakan akan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia seiring dengan pertumbuhan perekonomian. Pembangunan fisik dan mental potensipotensi yang ada pada diri manusia berarti meningkatkan kapasitas dasar penduduk, sehingga meningkatkan peluang untuk ikut serta dalam upaya yang berkesinambungan.

Pembangunan kualitas manusia merupakan tolok ukur kemajuan suatu daerah, yang direfleksikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Kabupaten Sikka, kualitas pembangunan manusia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan permasalahan mendasar yang perlu ditangani secara komprehensif. Berdasarkan analisis permasalahan, masalah inti Kualitas Pembangunan Manusia yang masih rendah di Kabupaten Sikka dapat dirinci menjadi empat isu utama, yaitu Kualitas pendidikan yang masih rendah, Rendahnya derajat kesehatan masyarakat, Kualitas hidup masyarakat yang masih rendah, dan Masih adanya kesenjangan pembangunan manusia antar gender. Terdapat 8 (delapan) urusan yang terlibat dalam menangani permasalahan kualitas pembangunan manusia. Identifikasi atas permasalahan makro pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sikka dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.178
Analisis Permasalahan Makro Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka

Masalah Inti	Masalah	Urusan
Kualitas Pembangunan Manusia masih Kurang	1. Kualitas Pendidikan masih rendah	Pendidikan, Perpustakaan
	2. Masih rendahnya derajat Kesehatan Masyarakat	Kesehatan, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana
	3. Kualitas Hidup Masyarakat masih rendah	Sosial, Tenaga Kerja, Kepemudaan dan Olahraga
	4. Masih ada kesenjangan Pembangunan Manusia antar gender	Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Penjelasan dari setiap penyebab rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sikka dijelaskan sebagai berikut.

a. Kualitas Pendidikan Kabupaten Sikka Masih Rendah

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Di Kabupaten Sikka, kualitas pendidikan masih menghadapi sejumlah permasalahan fundamental yang perlu ditangani secara strategis. Kualitas pendidikan di Kabupaten Sikka masih rendah tercermin dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS Kabupaten Sikka sudah melampaui rata-rata provinsi dan nasional dan menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Sikka memiliki harapan lama sekolah sampai Perguruan Tinggi. Namun kenyataannya, RLS Kabupaten Sikka menunjukkan rata-rata Pendidikan yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sikka hanya setara tamat SMP. Rendahnya kualitas pendidikan dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Analisis permasalahan ini berfokus pada akar dan serabut masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah tersebut. Analisis permasalahan dari rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Sikka secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.179
Analisis Permasalahan Kualitas Pendidikan Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Kualitas Pendidikan masih rendah	Tingkat intelektualitas anak usia sekolah rendah	Masih rendahnya partisipasi anak usia sekolah	Pendidikan
		Kualitas kurikulum pendidikan dasar masih rendah	Pendidikan

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
		Mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan rendah	Pendidikan
		Kualitas dan distribusi satuan pendidikan masih rendah	Pendidikan
	Literasi masyarakat yang rendah	Layanan perpustakaan belum sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan
		Kualitas perpustakaan dan pustakawan rendah	Perpustakaan

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Dari hasil analisis permasalahan diatas, beberapa akar masalah yang diidentifikasi menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan adalah sebagai berikut. *Pertama*, Tingkat intelektualitas anak usia sekolah rendah. Tingkat intelektualitas anak usia sekolah merupakan cerminan dari keberhasilan sistem pendidikan dalam mengembangkan potensi kognitif dan karakter generasi muda. Di Kabupaten Sikka, permasalahan ini diidentifikasi sebagai salah satu akar masalah dari rendahnya kualitas pendidikan secara keseluruhan. Rendahnya intelektualitas tidak hanya berdampak pada hasil belajar akademik, tetapi juga pada kemampuan adaptasi, kreativitas, dan daya saing anak-anak di masa depan. Beberapa serabut masalah yang teridentifikasi menjadi penyebab rendahnya tingkat intelektualitas anak usia sekolah di Kabupaten Sikka, yaitu Masih rendahnya partisipasi anak usia sekolah yang ditunjukkan dari angka partisipasi kasar (APK) di Kabupaten Sikka yang masih relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya sehingga masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Kualitas kurikulum pendidikan dasar yang masih rendah dapat menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan dan kurikulum yang tidak sesuai dapat berdampak negatif pada hasil belajar siswa. Mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang rendah, dilihat dari Indeks Distribusi Guru di jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang menunjukkan meskipun guru tersebar merata namun kualitas pengajaran atau kompetensi mereka masih memerlukan peningkatan kualifikasi akademik. Kualitas dan distribusi satuan pendidikan yang masih rendah ditunjukkan dari banyaknya sekolah di Kabupaten Sikka yang masih belum memenuhi standar minimal kualitas pendidikan, seperti infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya fasilitas belajar.

Kedua, Literasi masyarakat yang rendah. Literasi merupakan fondasi esensial bagi kemajuan suatu masyarakat. Tingkat literasi yang tinggi berkorelasi langsung dengan kapasitas intelektual, inovasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Dari akar masalah tersebut, diidentifikasi beberapa serabut masalah, yaitu Layanan perpustakaan belum sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Kualitas perpustakaan dan pustakawan rendah. Layanan perpustakaan belum sesuai Standar Nasional Perpustakaan tercermin dari tingkat kegemaran membaca pada di Kabupaten Sikka masih rendah. Selain itu, perpustakaan memiliki peran vital sebagai pusat literasi masyarakat. Jika layanan perpustakaan belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), ini berarti terdapat defisiensi dalam berbagai aspek, seperti jam operasional yang tidak memadai, koleksi buku yang terbatas dan tidak relevan, fasilitas fisik yang kurang nyaman atau tidak representatif, serta kurangnya aksesibilitas bagi kelompok masyarakat tertentu (misalnya, penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil). Kualitas perpustakaan dan pustakawan rendah ditunjukkan dengan belum tersedianya pustakawan yang memiliki sertifikasi profesi di Kabupaten Sikka.

b. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia dan secara langsung berkontribusi pada Usia Harapan Hidup (UHH), yang menjadi komponen penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sikka sudah melampaui rata-rata provinsi dan nasional, namun

masih ditemui beberapa faktor yang memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat, antara lain kurangnya akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, kurangnya fasilitas kesehatan, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian, serta mengurangi produktivitas masyarakat. Di Kabupaten Sikka, meskipun terdapat upaya dalam meningkatkan kesehatan, masih banyak tantangan yang menyebabkan derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Analisis permasalahan dari masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.180
Analisis Permasalahan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Kualitas kesehatan keluarga rendah	Kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat rendah	Kesehatan
		Mutu dan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan masih rendah	Kesehatan
		Kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman rendah	Kesehatan
		Kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan masih rendah	Kesehatan
	Belum terwujudnya keluarga berkualitas	Pengendalian pertambahan jumlah penduduk masih rendah	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB masih rendah	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) rendah	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Dari hasil analisis permasalahan diatas, beberapa akar masalah yang diidentifikasi menyebabkan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut. *Pertama,* Kualitas Kesehatan Keluarga Rendah. Keluarga adalah unit terkecil yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan. Rendahnya kualitas kesehatan di tingkat keluarga akan secara langsung berdampak pada derajat kesehatan masyarakat secara luas. Hal ini dapat ditelusuri dari beberapa serabut masalah yang teridentifikasi, yaitu Kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat rendah yang tergambar dari masih adanya tantangan terkait masalah gizi dan kesehatan dasar pada anak balita, masih tingginya angka kematian Balita (AKB) dan Ibu (AKI), serta cakupan layanan kesehatan yang belum optimal. Mutu dan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan masih rendah, dapat dilihat dari rasio tenaga medis dan kesehatan di Kabupaten Sikka yang mengindikasikan kurangnya ketersediaan SDM kesehatan di lapangan. Kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman rendah ditunjukkan dari cakupan pemenuhan alat kesehatan di fasilitas pelayanan belum memenuhi standar dan cakupan sediaan farmasi yang belum merata hingga ke pelosok atau sesuai dengan kebutuhan pasien. Kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan masih rendah yang tercermin dari kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan secara mandiri belum berjalan optimal.

Kedua, Belum terwujudnya keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas adalah fondasi bagi kesehatan masyarakat. Jika keluarga belum berkualitas, berbagai aspek kesehatan dasar, baik fisik maupun mental, tidak akan terpenuhi secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa serabut masalah sebagai berikut, Pengendalian pertambahan jumlah penduduk masih rendah ditunjukkan dengan masih banyaknya kelahiran pada usia terlalu muda dan tingkat kesuburan yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk masih perlu dikelola dengan baik agar tidak membebani sumber daya dan pelayanan kesehatan. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB masih rendah terlihat dari penurunan drastis mCPR dan peningkatan unmet need secara langsung

mengindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) belum efektif. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) rendah tercermin dari masih rendahnya partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan ketahanan keluarga, yang menunjukkan bahwa banyak keluarga belum mendapatkan dukungan dan informasi yang cukup untuk menjadi keluarga berkualitas.

c. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah

Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dimensi krusial dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan kualitas hidup dan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Hal ini tercermin dari Angka Kemiskinan yang masih tinggi dibandingkan nasional dan Pengeluaran Per Kapita yang masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita, sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan dan kesempatan kerja. Rendahnya kualitas hidup masyarakat dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Di Kabupaten Sikka, meskipun terdapat upaya pembangunan, data menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Adapun analisis permasalahan dari tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah di Kabupaten Sikka secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.181
Analisis Permasalahan Kualitas Hidup Layak Masyarakat Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah	Kesejahteraan sosial masih rendah	Pemberdayaan sosial yang masih rendah	Sosial
		Perlindungan dan jaminan sosial yang rendah	Sosial
		Rehabilitasi sosial masih rendah	Sosial
		Tingkat perlindungan korban bencana masih rendah	Sosial
		Masih minimnya penanganan terpadu dan efektif bagi Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	Sosial
		Masih minimnya pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Sosial
	Kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja masih rendah	Informasi tenaga kerja belum maksimal	Tenaga Kerja
		Produktivitas tenaga kerja masih rendah	Tenaga Kerja
		Penempatan Tenaga Kerja masih rendah	Tenaga Kerja
		Pemberi kerja yang melindungi tenaga kerja masih sedikit	Tenaga Kerja
	Peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga masih rendah	Daya saing kepemudaan masih rendah	Pemuda dan Olahraga
		Pembudayaan dan prestasi olahraga masih rendah	Pemuda dan Olahraga
		Kualitas kepramukaan masih rendah	Pemuda dan Olahraga

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Dari hasil analisis permasalahan diatas, beberapa akar masalah yang diidentifikasi menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah adalah sebagai berikut. *Pertama*, Kesejahteraan sosial masih rendah. Kesejahteraan sosial yang rendah mengindikasikan bahwa kelompok rentan dan masyarakat secara umum belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang memadai untuk mencapai kualitas hidup yang layak. Hal ini dapat diuraikan melalui beberapa serabut masalah, yaitu Pemberdayaan sosial yang masih

rendah terlihat dari menurunnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berperan penting dalam pelayanan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Perlindungan dan jaminan sosial yang rendah ditunjukkan dengan masih terdapat PPKS yang tidak mendapatkan bantuan, yang berarti mereka rentan terhadap kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Rehabilitasi sosial masih rendah terlihat dari persentase yang sangat rendah untuk pemenuhan kebutuhan dasar di luar panti bagi kelompok rentan. Tingkat perlindungan korban bencana masih rendah terlihat dari persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya masih sangat rendah dan rendahnya kesiapsiagaan yang berarti masyarakat belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi dan pulih dari bencana. Penanganan kasus tindak kekerasan bagi Warga Negara Migran juga masih minim dan belum berjalan secara terpadu, karena keterbatasan sumber daya, minimnya layanan pendukung seperti bantuan hukum dan konseling trauma, serta lemahnya sistem pendataan dan monitoring juga menjadi kendala utama. Masih minimnya pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kabupaten Sikka disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk perawatan rutin dan rehabilitasi, kurangnya tenaga pengelola yang terlatih, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait

Kedua, Kesempatan dan produktivitas tenaga kerja masih rendah. Ketersediaan kesempatan kerja yang memadai dan tenaga kerja yang produktif adalah prasyarat untuk peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Rendahnya kesempatan dan produktivitas ini di Kabupaten Sikka dapat diuraikan melalui beberapa serabut masalah, diantaranya Informasi tenaga kerja belum diperbarui yang mengindikasikan bahwa informasi ketenagakerjaan yang belum akurat, belum merata, atau terlambat dapat menghambat mobilitas tenaga kerja dan menyebabkan ketidakcocokan antara ketersediaan dan permintaan di pasar kerja. Produktivitas tenaga kerja masih rendah yang disebabkan beberapa faktor seperti keterbatasan keterampilan dan kualitas SDM yang belum optimal. Penempatan tenaga kerja masih rendah yang ditunjukkan oleh jumlah pencari kerja yang ditempatkan sangat berfluktuasi dan relatif rendah, baik dalam maupun luar negeri. Pemberi kerja yang melindungi tenaga kerja masih sedikit dengan menurunnya persentase perusahaan yang memiliki RTK dan rendahnya pemberi kerja di Sikka menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan mempraktikkan dialog sosial.

Ketiga, Peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga masih rendah. Pemuda adalah agen perubahan dan motor penggerak pembangunan. Jika peran mereka dalam pembangunan dan olahraga masih rendah, ini mengindikasikan bahwa potensi besar ini belum sepenuhnya termanfaatkan untuk kemajuan daerah dan peningkatan kualitas hidup. Berikut beberapa serabut masalah yang teridentifikasi, adalah Daya saing kepemudaan masih rendah ditunjukkan oleh persentase wirausaha muda terhadap total wirausaha di Kabupaten Sikka masih sangat rendah, yang mengindikasikan kurangnya minat, keterampilan, atau kesempatan bagi pemuda untuk mengembangkan usaha mandiri. Pembudayaan dan prestasi olahraga masih rendah yang terlihat dari jumlah organisasi, prestasi, dan atlet yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi daerah atau harapan untuk mengangkat nama Kabupaten Sikka di kancah yang lebih luas. Kualitas kepramukaan masih rendah tercermin dari belum tersedianya data untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan.

d. Masih ada kesenjangan pembangunan antargender

Kesenjangan pembangunan antargender merupakan hambatan serius dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang optimal dan pembangunan berkelanjutan. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan akses, partisipasi, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya, kesempatan, dan manfaat pembangunan. Kesenjangan pembangunan manusia antar gender di Kabupaten Sikka yang

masih rendah tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Kesenjangan pembangunan manusia antar gender dapat menghambat kemampuan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Di Kabupaten Sikka, indikasi menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pembangunan antargender, yang berakar pada rendahnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. Adapun analisis permasalahan dari masih ada kesenjangan pembangunan antargender di Kabupaten Sikka secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.182
Analisis Permasalahan Kesenjangan Pembangunan Manusia Antargender
Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Masih ada kesenjangan Pembangunan antargender	Kesetaraan gender dan perlindungan anak masih rendah	Kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak masih rendah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pemanfaatan data gender dan anak masih rendah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jaminan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif masih rendah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tingkat pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan masih rendah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Dari hasil analisis permasalahan di atas, diidentifikasi akar masalah yang menyebabkan masih ada kesenjangan pembangunan antargender adalah Kesetaraan gender dan perlindungan anak masih rendah. Rendahnya kesetaraan gender dan perlindungan anak adalah fondasi yang menyebabkan kesenjangan dalam pembangunan. Hal ini dapat diuraikan melalui beberapa serabut masalah, sebagai berikut Kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan yang dapat dilihat dari penurunan yang sangat drastis pada Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Sikka yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan. Kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, ditunjukkan dalam masih adanya kasus KDRT dan TPPO (meskipun rasio KDRT menurun) yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang perlu dicegah.

Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak masih rendah tercermin dari belum tersedianya data Persentase pembelajaran keluarga (pusat pembelajaran keluarga/puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar, yang mengindikasikan kurangnya pemahaman keluarga tentang kesetaraan gender dan hak anak dapat mengakibatkan pola asuh yang tidak mendukung perkembangan optimal anak, diskriminasi gender dalam rumah tangga, dan rentannya anak terhadap kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Pemanfaatan data gender dan anak masih rendah terlihat pada rendahnya ARG yang mengindikasikan rendahnya kualitas pemanfaatan data gender dan anak, pemanfaatan data yang efektif seharusnya berujung pada alokasi anggaran dan program yang benar-benar responsif gender dan anak. Jaminan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif masih rendah ditunjukkan oleh Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) yang mengalami penurunan signifikan,

mencerminkan bahwa hak-hak anak (sipil, kesehatan, pendidikan, perlindungan) belum sepenuhnya terpenuhi secara komprehensif. Tingkat pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan masih rendah tercermin pada peningkatan prevalensi kekerasan anak, yang merupakan bukti nyata dari rendahnya tingkat pencegahan dan penanganan masalah ini.

2. Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Sikka menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, hal ini dapat dilihat dari data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi sebesar -0.85 persen dan meningkat secara terus menerus hingga tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka sebesar 3,95 persen. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal ini menandakan adanya tantangan dan permasalahan mendasar yang perlu diidentifikasi dan diatasi agar pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif secara langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, penting dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai sektor penopang perekonomian daerah, khususnya sektor primer, sekunder, dan tersier, yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi Kabupaten Sikka. Sektor-sektor ini sejalan dengan sektor potensial yang telah diidentifikasi pada penelitian yang dilakukan oleh BRIN dalam dokumen Policy Brief "Rekomendasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka". Policy brief ini merekomendasikan tiga sektor unggulan sebagai prioritas utama yaitu; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor industri pengolahan; sektor pariwisata, akomodasi makan dan minum, dan ekonomi kreatif. Sektor-sektor ini merupakan bagian dari sektor primer, sekunder, dan tersier. Analisis permasalahan dari tingkat kesejahteraan Masyarakat masih relatif rendah secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.183
Analisis Permasalahan Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sikka

Masalah Inti	Masalah	Urusan
Perekonomian Kabupaten Sikka meningkat dengan baik, namun tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah	Sektor primer (pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan,) yang menjadi penopang PDRB mengalami pertumbuhan yang relatif rendah	Pertanian, Perikanan, Pangan, Kehutanan, PMD
	Sektor sekunder belum memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor sekunder yang rendah dengan pertumbuhan yang juga relatif rendah	Perindustrian, Koperasi, UMKM, Penanaman Modal
	Sektor Tersier memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi namun demikian belum mampu menarik pertumbuhan ekonomi, karena barang yang diperdagangkan produk mentah sehingga belum menghasilkan nilai tambah.	Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Penjelasan dari setiap penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan di Kabupaten Sikka dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, sektor primer yang meliputi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan), perikanan, ketahanan pangan, dan kehutanan merupakan penopang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sikka. Sayangnya, sektor ini mengalami pertumbuhan yang relatif rendah sehingga belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan dalam

pengelolaan sumber daya alam, sarana produksi, serta berbagai tantangan teknis dan manajerial menjadi faktor yang menghambat perkembangan sektor primer ini.

Kedua, sektor sekunder, yang terdiri dari perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penanaman modal, juga belum mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disebabkan oleh Kabupaten Sikka masih berfokus pada barang mentah dan belum optimal dalam hilirisasi produk. Kontribusi sektor ini masih rendah dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lambat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan dan pengembangan sektor industri dan usaha lokal agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Sikka.

Ketiga, sektor tersier yang mencakup perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan menunjukkan kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi. Namun demikian, sektor ini belum mampu menarik pertumbuhan ekonomi secara optimal karena sebagian besar barang yang diperdagangkan masih berupa produk mentah yang belum diolah sehingga belum menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Oleh karena itu, pengembangan produk bernilai tambah dan peningkatan kualitas layanan di sektor tersier menjadi hal yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Sikka.

Lebih jelasnya penjabaran analisis permasalahan masing-masing sektor adalah sebagai berikut.

a. Sektor primer (pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan) yang menjadi penopang PDRB tidak tumbuh dan berkembang

Analisis permasalahan sektor primer dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sikka menunjukkan sejumlah kendala yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan sektor ini sebagai penopang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan), perikanan, ketahanan pangan, dan kehutanan masih relatif rendah, yang berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan petani dan nelayan yang masih tergolong rendah. Adapun analisis permasalahan dari sektor primer tidak bertumbuh dan berkembang di Kabupaten Sikka secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.184
Analisis Permasalahan Sektor Primer Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Sektor primer (pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan) yang menjadi penopang PDRB tidak tumbuh dan berkembang Data: Pertumbuhan sektor pertanian	Tingkat Kesejahteraan petani masih Rendah Data: NTP, pendapatan perkapita pertanian (PDRB pertanian/ jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian)	Terjadi fluktuasi produksi tanaman pangan setiap tahun akibat dari keterbatasan sarana produksi pertanian	Pertanian, peternakan, perkebunan
		Prasarana pertanian yang berupa PLP2B telah ditetapkan dalam tahun 2020, namun belum diimplementasikan secara konsisten, demikian juga dengan sarana lainnya seperti jalan pertanian maupun jaringan irigasi yang relatif terbatas	
		Masih minimnya upaya penanganan kasus penyakit hewan	
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian masih belum optimal. Setiap tahun terjadi bencana pertanian akibat musim dan manajemen pertanian	
		Pelayanan untuk izin pembukaan usaha belum ada, akan tetapi pelayanan pendampingan usaha sudah ada.	
		Kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian masih terbatas dan kompetensi belum memadai	
	Ketahanan pangan kabupaten sikka masih relatif rendah	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi lokal sehingga Sikka masih bergantung dengan pasokan dari luar	Pangan

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
		Tingkat keragaman konsumsinya masih relatif lebih rendah dari angka capaian nasional	
		Masih terdapat desa-desa yang mengalami rawan pangan transien akibat dari perubahan iklim atau bencana pertanian	
		Masih terdapat pangan segar yang terindikasi mengandung residu pestisida, walaupun tingkat kejadiannya semakin menurun	
	Kesejahteraan Nelayan dan pembudidaya ikan cenderung fluktuatif dan rendah	Produksi perikanan tangkap masih fluktuatif diakibatkan perubahan cuaca, sarpras nelayan tidak mumpuni, manajemen yang belum baik dan adanya pembatasan kewenangan kabupaten.	Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan budidaya belum berkembang dengan optimal, karena kemampuan SDM pembudidaya ikan dalam pengembangan perikanan masih rendah, juga adanya regulasi yang membatasi budidaya laut	
		Pengolahan produk perikanan sudah mulai berkembang namun belum optimal.	
	Pemberdayaan Masyarakat dan kemandirian desa masih perlu ditingkatkan	Kualitas penataan Desa belum maksimal.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Sudah ada kerja sama antar desa dan dengan pihak lain namun implementasinya belum optimal	
		Administrasi pemerintahan desa sudah terintegrasi namun SDM yang mengimplementasikan masih terbatas	
		Kapasitas Lembaga kemasyarakatan belum optimal.	

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Dari hasil analisis permasalahan di atas, diidentifikasi akar masalah yang menyebabkan sektor primer tidak bertumbuh dan berkembang adalah sebagai berikut.

Sektor primer yang meliputi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan), perikanan, ketahanan pangan, dan kehutanan merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Sikka. Namun, sektor ini menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan sektor primer tersebut masih belum optimal. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian relatif stagnan, sementara tingkat kesejahteraan petani masih rendah, yang tercermin dari nilai tukar petani (NTP) dan pendapatan per kapita pertanian yang belum memadai.

Salah satu akar masalah *pertama* adalah fluktuasi produksi tanaman pangan setiap tahun yang disebabkan oleh keterbatasan sarana produksi pertanian. Meskipun Pemerintah Kabupaten Sikka telah menetapkan Program Layanan Prima Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B) sejak tahun 2020, implementasinya belum konsisten. Selain itu, prasarana pendukung seperti jalan pertanian dan jaringan irigasi masih terbatas, sehingga menghambat akses dan efisiensi produksi. Serabut masalah lainnya itu masih minimnya upaya penanganan kasus penyakit hewan di Kabupaten Sikka, yang ditandai dengan semakin banyaknya kasus penyakit hewan menular strategis terjadi. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian juga belum optimal, sehingga kerugian akibat musim dan manajemen yang kurang baik sering terjadi. Pelayanan perizinan pembukaan usaha pertanian belum tersedia, meskipun pendampingan usaha sudah diberikan. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penyuluhan pertanian juga masih terbatas dan kompetensinya belum memadai, sehingga transfer teknologi dan pendampingan kepada petani belum maksimal.

Akar masalah *kedua* yaitu ketahanan pangan Kabupaten Sikka masih relatif rendah, meskipun menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir. Pengelolaan sumber daya

ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi lokal, sehingga Kabupaten Sikka masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Keragaman pangan masyarakat memang meningkat, tetapi konsumsi pangan lokal masih relatif lebih rendah dibandingkan capaian nasional. Beberapa desa masih mengalami rawan pangan transien akibat perubahan iklim atau bencana pertanian. Selain itu, masih ditemukan pangan segar yang mengandung residu pestisida, meskipun tingkat kejadiannya semakin menurun.

Akar masalah *ketiga*, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan cenderung fluktuatif dan rendah. Produksi perikanan tangkap masih tidak stabil akibat perubahan cuaca, sarana prasarana nelayan yang kurang memadai, manajemen yang belum baik, serta adanya pembatasan kewenangan kabupaten dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Produksi perikanan budidaya juga belum berkembang optimal karena kemampuan SDM pembudidaya ikan masih rendah dan regulasi yang membatasi pengembangan budidaya laut. Pengolahan produk perikanan mulai berkembang, tetapi belum optimal. Akar masalah *keempat*, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa juga masih perlu ditingkatkan. Penataan desa belum maksimal, meskipun sudah ada kerja sama antar desa dan dengan pihak lain, implementasinya belum optimal. Administrasi pemerintahan desa sudah terintegrasi, namun SDM yang mengimplementasikan masih terbatas.

Secara keseluruhan, permasalahan sektor primer di Kabupaten Sikka sangat kompleks dan saling terkait, mulai dari keterbatasan sarana produksi, infrastruktur, kapasitas SDM, hingga pengelolaan sumber daya dan kelembagaan yang belum optimal. Penanganan terpadu dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan sektor primer yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sikka.

b. Sektor sekunder belum memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi

Sektor sekunder merupakan motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi, terutama dengan kaitannya yang sangat erat dengan produksi melalui proses pemberian nilai tambah terhadap bahan baku yang dihasilkan. Kabupaten Sikka belum memiliki sektor ekonomi sekunder yang kuat untuk dapat menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Analisis permasalahan sektor sekunder disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.185
Analisis Permasalahan Sektor Sekunder Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Sektor sekunder belum memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.	Daya Saing Industri masih rendah	Perencanaan dan Pembangunan industri dijalankan tanpa ada Perda sehingga menghambat pengelolaan bidang Perindustrian	Perindustrian
		Perizinan berusaha sektor Perindustrian sudah berbasis online melalui aplikasi OSS di DPMPTSP sehingga kewenangan Dinas Perindustrian menjadi terbatas untuk melakukan pengawasan usaha perindustrian	
		Informasi industri sudah tersedia tetapi pelaku usaha masih belum mampu menggunakan aplikasi digital	
	Kinerja UMKM dalam perekonomian masih belum optimal	Pelayanan izin usaha simpan pinjam masih rendah akibat adanya perubahan regulasi yang membebani pengawas dan pengurus	Koperasi, UMKM
		Kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi masih rendah	
		Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi tidak mengalami kendala namun koperasi yang mendapatkan fasilitas penilaian terbatas	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
		Pendidikan dan pelatihan perkoperasian belum optimal diakibatkan keterbatasan anggaran	
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi belum optimal	
		Pemberdayaan UMKM belum merata meskipun pertumbuhan usaha mikro meningkat setiap tahunnya	
		Pengembangan UMKM sudah dilaksanakan namun belum optimal hanya sedikit Usaha Mikro yang memiliki daya saing dan belum mumpuni untuk ekspor	
	Kinerja Penanaman modal dalam perekonomian masih rendah	Pengembangan iklim penanaman modal masih belum maksimal, hal ini tercermin dari tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan	Penanaman Modal
		Promosi penanaman modal masih dikelola secara tradisional dan parsial, akibatnya jumlah investor masih terbatas	
		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal masih kurang	
		Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal masih dilakukan secara konvensional	
		Masih belum optimalnya pelayanan penanaman modal	

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Pada sisi perindustrian, meskipun pertumbuhan sektor industri pengolahan menunjukkan angka yang cukup bagus, kontribusi sektor industri tergolong rendah, dengan peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penambahan nilai tambah pada bahan baku di Kabupaten Sikka. Seperti yang terjadi pada industri pengolahan yang sebagian besar dilakukan oleh usaha industri sedang dan besar, masih ada kekurangan sarana prasarana yang cukup vital, seperti halnya air dan listrik, serta sarana transportasi. Selanjutnya, pada usaha mikro dan kecil masih terdapat permasalahan terkait dengan kapasitas SDM serta target program yang kurang tepat sasaran. Hal ini kemudian dapat dibilang berhubungan pada perencanaan dan pembangunan industri yang berjalan tanpa adanya Perda. Sehingga, perencanaan menjadi tidak tertata dan tertib pada aturan. Selain itu meskipun sudah ada kemudahan dalam perizinan berusaha sektor perindustrian, namun hal ini justru memunculkan keterbatasan dalam pengawasan. Permasalahan dalam kapasitas kemampuan digital ini kemudian juga datang dari sisi masyarakat, dimana informasi industri sudah tersedia, tetapi pelaku usaha belum mampu menggunakan aplikasi digital. Masalah kapasitas SDM dalam mengaplikasikan kemampuan digital masih menjadi hambatan bagi pelaku industri untuk dapat menargetkan pasar baru, serta pemerintah untuk dapat mengawasi industri baru apa saja yang sudah berizin di Kabupaten Sikka.

Terkait dengan kapasitas SDM hal yang sama juga terjadi pada sektor UMKM dan koperasi. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi masih rendah, hal ini terjadi karena pendidikan dan pelatihan yang belum merata, sehingga pemberdayaan dan perlindungan yang dapat diberikan kepada koperasi menjadi tidak maksimal. Selain itu, koperasi yang mendapatkan fasilitas penilaian masih terbatas. Selanjutnya dari bidang UMKM, masih sedikit usaha mikro yang memiliki daya saing tinggi, sehingga mereka tidak mempunyai kapasitas untuk mengekspor produk. Keterbatasan ini kemudian menghambat mereka untuk dapat menargetkan pasar global yang mempunyai potensi besar. Hal ini sebenarnya juga dikontribusikan dengan pemberdayaan UMKM yang belum merata.

Pengelolaan ekonomi lokal daerah membutuhkan penanaman modal yang efektif dan merata. Namun, pertumbuhan masih terhambat meskipun dengan kontribusi PMTB yang cukup tinggi. Meskipun pada tahun 2023 nilai investasi Kabupaten Sikka berhasil mencapai angka hampir Rp 3 triliun, tapi terdapat nilai net ekspor negatif di kisaran 45 persen. Hal ini menunjukkan tingginya angka impor yang dilakukan oleh Kabupaten Sikka dibandingkan dengan ekspor yang dilakukan, meskipun dengan jumlah ekspor yang sudah tinggi.

Permasalahan pada impor ini terletak di jenis bahan impor yang merupakan barang jadi siap konsumsi, bukan bahan baku yang kemudian dapat diolah sehingga dapat mendorong industri pengolahan lokal. Sehingga impor tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Tidak hanya itu, kebanyakan investor di Kabupaten Sikka masih berupa investor lokal, dengan jumlah investor internasional yang sedikit dan cenderung menurun. Hal ini menunjukkan promosi penanaman modal yang kurang menargetkan pada pasar global, padahal Kabupaten Sikka mempunyai potensi ekspor yang sangat tinggi. Sehingga dari hasil analisis ini, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sikka masih mempunyai permasalahan dalam pengelolaan penanaman modal, serta promosi potensi daerah yang harusnya dapat ditargetkan pada pasar global, terutama dengan nilai ekspor yang cukup tinggi. Terlebih dari itu, masih belum optimalnya pelayanan penanaman modal yang menyebabkan rendahnya minat dan kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan modal di daerah.

c. Sektor Tersier memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi namun demikian belum mampu menarik pertumbuhan ekonomi

Untuk mendorong perekonomian lokal, sektor tersier diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan yang tinggi dalam sektor tersier di Kabupaten Sikka belum dapat mendongkrak perdagangan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya analisis permasalahan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.186
Analisis Permasalahan Sektor Tersier Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Sektor Tersier memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi namun demikian belum mampu menarik pertumbuhan ekonomi, akibat dari barang yang diperdagangkan produk mentah sehingga belum menghasilkan nilai tambah	Pertumbuhan sektor perdagangan yang tinggi kurang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal	Pertumbuhan sektor perdagangan yang tinggi kurang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal	Perdagangan
		Kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien dan terintegrasi belum merata	
		Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masih sangat bergantung dari pasokan luar daerah	
		Pelaku usaha yang berorientasi pasar luar kabupaten masih terbatas dengan produk utama adalah produk mentah	
		Tertib niaga dan mutu produk masih rendah	
		Masih minimnya penggunaan produk lokal	
	Nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah	Daya tarik destinasi pariwisata memiliki potensi yang sangat banyak, namun demikian belum semua dapat dikelola, sehingga daya Tarik wisata yang tersedia menjadi terbatas	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jangkauan pemasaran pariwisata masih rendah, akibat dari kemampuan dalam pemanfaatan media media promosi non tradisional yang masih kurang	
		Kualitas ekosistem ekonomi kreatif masih rendah. Dari 17 sektor Ikraf, Sikka baru fokus pada sektor Kriya Seni pertunjukan dan kuliner	
		Kapasitas SDM pariwisata dan ekosistem kreatif masih rendah (jiwa kewirausahaan Masyarakat dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah)	
	Adanya degradasi nilai-nilai budaya sehingga menyebabkan hilangnya	Pengembangan kebudayaan masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan masih belum bersifat penuh	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
	identitas dan budaya tradisional	Pengembangan kesenian tradisional belum dapat dilakukan sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari kemampuan untuk mengembangkan kesenian baru mencapai angka 45 persen	
		Pembinaan sejarah belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini data dilihat dari kemampuan untuk melakukan peninjauan terhadap sejarah lokal baru mencapai 50 persen dari jumlah desa.	
		Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya belum dapat dilakukan secara baik. WBTB dan Cagar Budaya yang dilestarikan baru mencapai 11,46 persen; demikian juga dengan budaya tak benda yang dilestarikan masih rendah	
		Pengelolaan museum masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan ke museum yang masih rendah	

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Sikka cukup tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya, tidak hanya itu aktivitas perdagangan ini juga melibatkan banyak pedagang dan kelompok dagang yang terlibat di dalamnya, namun barang yang diperdagangkan oleh Kab. Sikka masih berupa bahan baku mentah. Penjualan bahan baku mentah ini, kemudian hanya menempatkan sistem pasok berfokus kepada produsen, dan tidak banyak melibatkan komponen masyarakat lainnya, pada akhirnya barang yang dijual tidak memiliki nilai tambah dan kualitasnya tidak meningkat. Tidak banyak pedagang yang kemudian menargetkan pada pasar luar daerah, padahal produk industri sendiri memiliki daya tawar yang tinggi serta produk yang lebih tahan lama dibandingkan bahan mentah. Sedangkan mereka yang menjual bahan mentah, mau tidak mau harus menganggun kondisi produk yang cepat rusak, sehingga kesejahteraan mereka tidak terlalu meningkat meskipun dengan produktivitas yang tinggi. Selain itu beberapa bahan pokok pangan di Kabupaten Sikka masih didatangkan dari daerah lain (seperti beras, jagung, tepung dan bahan bangunan), sehingga hal ini menyebabkan sulitnya pengendalian pada harga komoditas pasar akibat ketergantungan dengan daerah lain. Hal ini kemudian juga diperparah dengan sarana perdagangan yang belum efisien dan merata. Kecamatan dengan jumlah pasar modern yang cukup banyak seperti Kecamatan Alok dan Kecamatan Alok Timur, mengalami peningkatan ekonomi yang cukup pesat. Faktor masalah perdagangan lainnya juga disebabkan oleh masih minimnya penggunaan produk lokal, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang lebih menarik konsumen.

Pariwisata juga masih memiliki permasalahan, meskipun dengan potensi destinasi yang begitu ragam (hingga sekitar 40 destinasi wisata) namun pengelolanya masih terbatas. Hal ini kemudian juga dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan di tahun 2020 dan 21. Meskipun jumlah kunjungan wisata meningkat seiring meningkatnya jumlah destinasi, tapi rata-rata lama tinggal wisatawan tidak berubah. Selain itu, kelompok masyarakat yang mengelola objek juga masih sedikit, menunjukkan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, kualitas ekonomi kreatif juga masih rendah, yang berfokus pada sektor kriya dan seni pertunjukan kuliner dari 17 sektor ekonomi kreatif yang ada. Hal ini menunjukkan minat wirausaha masyarakat yang rendah dalam memanfaatkan potensi pariwisata. Tidak hanya itu, pelestarian budaya yang dilakukan oleh Kabupaten Sikka juga masih belum menunjukkan kinerja yang bagus, padahal sisi kebudayaan, dari sektor seni historikal juga merupakan bagian penting yang tidak hanya perlu diperkuat untuk menjaga kebangsaan, namun juga

sebagai potensi daya tarik wisata. Lebih parahnya lagi, degradasi nilai-nilai budaya yang ada bahkan menyebabkan hilangnya identitas dan budaya tradisional. Pengembangan kesenian masih rendah dengan hanya 45 persen kesenian yang berhasil dikembangkan. Pengelolaan museum juga masih kurang baik dengan kunjungan yang masih rendah. Selain itu, pelestarian dan cagar budaya juga tidak dikelola dengan baik ditambah peninjauan sejarah lokal yang dilakukan baru mencapai 50 persen. Padahal aspek-aspek ini dapat menjadi daya tarik wisata seperti halnya traditional village tourism dimana wisatawan dapat mengunjungi desa, mempelajari sejarah serta menikmati seni budaya yang menjadi daya tarik untuk wisatawan mancanegara. Namun kesiapan yang dimiliki Kabupaten Sikka terkait potensi ini masih kurang. Hal ini kemungkinan juga dipengaruhi oleh jumlah pokdarwis yang tidak terlalu banyak di Kabupaten Sikka.

3. Permasalahan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup

Pembangunan di Kabupaten Sikka sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup yang menjadi fondasi utama dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Keterkaitan antara pembangunan wilayah dan kualitas lingkungan menunjukkan bahwa kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sarana fisik, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keseimbangan ekologi. Berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Sikka dalam kedua aspek tersebut memiliki dampak langsung terhadap efektivitas dan keberlanjutan proses pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kondisi aktual infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup sebagai dasar perencanaan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup di Kabupaten Sikka memberikan dampak langsung terhadap keberhasilan proses pembangunan serta pencapaian hasil yang berkelanjutan dalam wilayah administrasinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan di kedua aspek tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan dan implementasi pembangunan daerah. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, Tabel 2.187 berikut menyajikan analisis permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Sikka dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan, khususnya pada aspek infrastruktur dan lingkungan hidup.

Tabel 2.187
Analisis Permasalahan Makro Infrastruktur Wilayah Kabupaten Sikka

Masalah Inti	Masalah	Akar Masalah	Urusan
Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah Masih Rendah	Kualitas aksesibilitas infrastruktur masih rendah	Akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas masih rendah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kualitas Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau Masih Rendah	Urusan Perhubungan
		Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan masih sangat rendah	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah	Masih rendahnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah	Urusan Lingkungan Hidup

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Berdasarkan analisis data yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat dua masalah utama yang disoroti dalam aspek infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup di Kabupaten Sikka.

Permasalahan inti pertama yang dihadapi Kabupaten Sikka adalah rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah. Hal ini tercermin dari belum optimalnya akses terhadap

jalan, transportasi, dan hunian layak. Keterbatasan ini menghambat konektivitas antarkawasan dan menurunkan efektivitas pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari.

Permasalahan inti kedua berkaitan dengan masih rendahnya kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini terlihat dari pencemaran air dan udara, menurunnya tutupan lahan, serta belum optimalnya pengelolaan sampah. Lingkungan yang kurang sehat memberikan tantangan tersendiri dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem dan kenyamanan hidup masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Dua permasalahan tersebut menunjukkan perlunya penanganan terpadu antara peningkatan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Ketimpangan dalam kedua aspek ini dapat menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan penguatan kebijakan, koordinasi antar sektor, serta pelibatan masyarakat, Kabupaten Sikka diharapkan mampu menciptakan wilayah yang lebih tangguh, nyaman, dan berwawasan lingkungan.

a. Kualitas pembangunan infrastruktur daerah masih rendah

Kualitas aksesibilitas infrastruktur di Kabupaten Sikka masih tergolong rendah, sehingga membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan dasar dan menghambat konektivitas antar wilayah. Rendahnya kualitas aksesibilitas ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan wilayah secara menyeluruh. Adapun faktor-faktor tersebut terdiri atas:

Tabel 2.188
Analisis Permasalahan Kualitas Aksesibilitas Infrastruktur Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Kualitas aksesibilitas infrastruktur masih rendah	Akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas masih rendah	Aksesibilitas transportasi masyarakat yang nyaman dan aman masih rendah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kualitas irigasi yang masih rendah	
		Kualitas sistem drainase perkotaan yang masih rendah	
		Akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum masih rendah	
		Akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah masih rendah	
		Layanan persampahan regional masih rendah	
		Kualitas bangunan gedung yang masih rendah	
		Bangunan dan lingkungan yang tertata masih rendah	
		Kompetensi tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil masih rendah	
		Kualitas penyelenggaraan penataan ruang masih rendah	
	Kualitas Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau Masih Rendah	Kualitas Layanan Transportasi Darat Masih Rendah	Urusan Perhubungan
		Kualitas Layanan Transportasi Penyeberangan Masih Rendah	
	Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan yang masih sangat rendah	Rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah masih rendah	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kawasan permukiman kumuh masih tinggi	
		Masih rendahnya rumah layak huni MBR	
		Penyediaan PSU permukiman masih rendah	

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Berdasarkan tabel analisis masalah di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan kualitas aksesibilitas infrastruktur masih rendah di Kabupaten Sikka.

Pertama, akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di Kabupaten Sikka masih tergolong rendah. Kondisi ini terlihat dari belum meratanya layanan seperti sistem irigasi, drainase perkotaan, air minum, pengelolaan air limbah, serta fasilitas persampahan. Selain itu, kualitas bangunan gedung, penataan kawasan, dan kompetensi tenaga kerja konstruksi juga belum optimal. Ketimpangan ini berdampak langsung pada keterbatasan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar secara layak.

Kedua, kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau juga masih menjadi tantangan. Baik transportasi darat maupun penyeberangan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil atau kepulauan. Kondisi prasarana yang belum memadai dan layanan yang tidak merata menghambat mobilitas masyarakat serta memperlambat distribusi barang dan jasa antarwilayah. Hal ini memerlukan perbaikan sistem transportasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi geografis Sikka.

Ketiga, faktor yang cukup krusial adalah rendahnya akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Banyak warga yang belum memperoleh rumah memadai, terutama mereka yang terkena relokasi atau terdampak bencana. Kawasan permukiman kumuh masih cukup banyak, rumah layak huni bagi MBR belum terpenuhi, dan penyediaan PSU permukiman juga belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kebijakan perumahan menjadi aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan sosial masyarakat.

b. Kualitas lingkungan hidup masih rendah

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sikka masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Hal ini tercermin dari fluktuasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai IKLH tercatat sebesar 67,88, kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 60,6 di tahun 2021. Meski sempat membaik menjadi 68,98 pada 2022 dan meningkat signifikan ke 75,44 pada 2023, namun pada tahun 2024 kembali menurun ke angka 72,82. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup belum berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengelolaan sampah yang belum optimal, pencemaran air dan udara, serta menurunnya tutupan lahan. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya penegakan regulasi lingkungan dan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam mengawasi aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga turut menjadi hambatan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Tabel 2.189
Analisis Permasalahan Masih Rendahnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Masih rendahnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah	Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Masih Rendah	Urusan Lingkungkan Hidup
		Rendahnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	
		Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masih Rendah	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
		Masih rendahnya tata Kelola persampahan	
		Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP masih rendah	
		Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang masih tinggi	
		Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH masih rendah	
		Kapasitas SDM bidang lingkungan hidup masih rendah	
		Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana LH masih rendah	
		Kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati masih rendah	

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sikka masih menunjukkan berbagai tantangan serius, yang tercermin dari fluktuasi capaian Indeks Kualitas Air (IKA). Pada tahun 2020, IKA tercatat sebesar 53,75 dan sempat turun menjadi 50 pada 2022, sebelum meningkat menjadi 60,00 pada 2023 dan kembali menurun ke 53,33 pada 2024. Kondisi ini menandakan belum optimalnya pengendalian limbah B3 serta rendahnya kualitas pengelolaan sumber air. Hal ini diperparah oleh menurunnya persentase limbah B3 yang terkelola, dari 99,08 persen pada 2022 menjadi hanya 73,64 persen di 2024, menunjukkan adanya penurunan efektivitas pengelolaan limbah berbahaya.

Di sisi lain, kualitas udara secara umum menunjukkan tren positif dengan peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 90,30 di tahun 2020 menjadi 93,72 pada 2024. Namun demikian, capaian ini tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan menyeluruh, mengingat aspek pengelolaan lainnya masih tertinggal. Misalnya, meskipun tingkat partisipasi masyarakat dan tindak lanjut terhadap kajian lingkungan telah mencapai 100 persen setiap tahun, namun tingkat ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hanya mencapai 33,17 persen pada 2024, setelah sebelumnya sempat menyentuh 52,94 persen di 2023. Ini menunjukkan kesenjangan antara dukungan kebijakan dan implementasi di lapangan.

Sementara itu, kondisi tutupan lahan dan pengelolaan sampah juga mengindikasikan adanya tantangan besar. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sempat turun drastis dari 59,59 di 2020 menjadi 41,17 pada 2021, sebelum pulih ke 68,91 pada 2023 dan sedikit menurun lagi menjadi 67,60 pada 2024. Persentase ruang terbuka hijau di tahun 2024 baru mencapai 13,9 persen, masih jauh dari ideal. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah juga sangat rendah, hanya 5,65 persen pada 2024, meskipun menunjukkan tren peningkatan. Hal ini memperjelas bahwa tata kelola persampahan dan pemanfaatan ruang terbuka belum berjalan optimal. Sementara itu, peran Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pengelolaan lingkungan belum dimaksimalkan. Persentase kelompok MHA yang ditingkatkan kapasitasnya hanya mencapai 60 persen pada tahun 2023 dan 2024, dengan jumlah kelompok yang terlibat stagnan di angka lima kelompok. Data ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas MHA secara lebih merata dan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan komitmen penegakan hukum yang konsisten untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sikka secara berkelanjutan.

4. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintah, tata kelola merupakan poin penting untuk memenuhi dan mencapai tujuan guna kepentingan masyarakat. Tata

kelola pemerintahan yang baik akan mampu mendorong kemajuan suatu daerah. Perbaikan tata kelola kemudian dilakukan dengan cara meningkatkan Reformasi Birokrasi yang ada di daerah. Penerapan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 .

Salah satu poin penting yang dapat dimandatkan untuk mendorong reformasi birokrasi adalah dengan melibatkan pengembangan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan daerah. Sementara itu, aspek manajemen sumber daya manusia juga menjadi fokus dalam reformasi birokrasi. Peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai pemerintah daerah dilakukan agar terciptanya ASN yang mempunyai kapabilitas untuk menghadapi tantangan dan perkembangan yang muncul.

Melalui reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan daerah diharapkan dapat berubah menjadi lebih responsif, inovatif, dan berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah beberapa poin penting yang ingin dicapai melalui reformasi ini. Tentunya dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dan pemerintah, reformasi birokrasi dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan lebih efektif dalam melayani kepentingan masyarakat di Kabupaten Sikka. Lebih lanjut permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sikka dalam kondisi saat ini bisa dilihat melalui kinerja reformasi birokrasi. Dalam hal ini Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sikka masih sangat rendah yang ditunjukan dengan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada tahun 2024 pada kategori CC dengan nilai 58,92.

Penilaian ini kemudian disebabkan oleh beberapa hal seperti akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, efektivitas pemerintahan, ketertiban dan keamanan serta Kualitas pelayanan publik. Oleh karenanya dapat di identifikasikan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Sikka masih rendah pada tabel berikut:

Tabel 2.190
Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sikka

Inti Masalah	Masalah	Urusan yang Terlibat
Tatakelola pemerintahan Kabupaten Sikka masih belum baik	Akuntabilitas Kinerja masih belum baik	Perencanaan, Pengawasan
	Akuntabilitas Keuangan sudah baik, namun masih terdapat catatan dan kemandirian fiskal daerah yang masih rendah	Keuangan
	Efektivitas Pemerintahan masih belum baik	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Transmigrasi, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Pertanahan
	Masih terus terjadi gangguan ketertiban dan keamanan di daerah	Ketenteraman dan Ketertban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik
	Kualitas Pelayanan Publik belum baik	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Transmigrasi, Kearsipan, PTSP, Kecamatan, Puskesmas

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat permasalahan inti atau permasalahan pokok ada pada capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang belum cukup baik dan selanjutnya permasalahan ini diuraikan menjadi masalah dan akar masalah yang menyebabkannya. Permasalahan akuntabilitas kinerja merupakan urusan perencanaan dan inspektorat, akuntabilitas keuangan merupakan masalah dari BPKAD, efektivitas pemerintahan merupakan permasalahan Setda, Setwan, BKD, Kominfo, Kearsipan, Litbang, statistik,

persandian, pertanahan, permasalahan ketertiban dan keamanan adalah urusan Kebangpol, Satpol PP, Damkar, BPBD, dan permasalahan Kualitas pelayanan publik adalah urusan Dukcapil. Berikut uraian masalah yang dibagi menjadi empat masalah dan beberapa akar masalah.

a. Akuntabilitas kinerja pemerintahan masih belum baik

Akuntabilitas kinerja pemerintah secara keseluruhan masih belum dirasa baik. Hal ini kemudian dilihat dari sisi perencanaan dan pengawasan di Kabupaten Sikka yang masih belum bisa mencapai nilai yang baik dan masih cenderung fluktuatif. Analisis permasalahan Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.191
Analisis Permasalahan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah masih belum baik	Perencanaan masih belum baik	Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan yang diukur dari konsistensi program sudah cukup baik, namun dalam penilaian tersebut belum teridentifikasi pencapaian hasil dari hal hal yang telah direncanakan	Perencanaan
		Kualitas perencanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah masih rendah	
	Kualitas pengawasan internal masih buruk	Penyelenggaraan pengawasan belum maksimal	Pengawasan
		Pendampingan dan asistensi masih rendah	

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Akuntabilitas kinerja suatu daerah bisa dilihat dari capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Kabupaten Sikka masih konsisten dari tahun sebelumya dengan nilai B dan predikat Cukup Baik, meskipun dengan adanya penurunan sebesar satu poin. Namun demikian, perlu dicermati juga bahwa Kabupaten Sikka masih mempunyai tugas utamanya untuk meningkatkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang masih rendah. Selain itu, meskipun indeks kualitas perencanaan Kabupaten Sikka sudah cukup baik, namun angka tersebut belum dapat menjelaskan identifikasi pencapaian hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan.

Masih dalam akuntabilitas pemerintahan, maturitas SPIP dan APIP Kabupaten Sikka sebenarnya cenderung menurun. Pada tahun 2020-2021 sebenarnya Kabupaten Sikka sudah adad alam Level 3 pada maturitas SPIP, namun terdapat perubahan dalam pengawasan internal sehingga levelnya turun ke Level 2 pada tahun 2022 hingga 2023. Hal yang sama kemudian kembali terjadi pada tahun 2024, bedanya pada tahun 2024, nilai level APIP menurun menjadi 2,38 dan maturitas SPIP berjalan memakai data yang sama pada tahun 2022 akibat adanya bencana alam. Namun, tetap saja hal ini masih menunjukkan rendahnya Kualitas pengawasan internal Kabupaten Sikka. Hal ini kemudian juga ditambah dengan faktor lain seperti Tindak lanjut temuan BPK. Persentase tindak lanjut temuan BPK Kabupaten Sikka pada tahun 2024 menurun cukup besar dari yang awalnya di kisaran 50 persen, menjadi 36,43 persen. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Meskipun WTP didapat setiap tahunnya, namun masih setiap tahunnya selalu ada catatan untuk ditindaklanjuti.

b. Akuntabilitas keuangan sudah baik, namun masih terdapat catatan dan kemandirian fiskal daerah yang masih rendah

Meskipun secara keseluruhan akuntabilitas keuangan Kabupaten Sikka sudah meningkat, namun masih terdapat catatan BPK yang perlu ditindaklanjuti. Selain itu masih terdapat permasalahan terkait dengan kemandirian fiskal serta pengelolaan aset yang dimiliki oleh daerah. Analisis permasalahan Akuntabilitas keuangan dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.192
Analisis Permasalahan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Akuntabilitas Keuangan sudah baik, namun setiap tahun masih terdapat catatan dan kemandirian fiskal daerah yang masih rendah	Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan masih kurang	Tata kelola anggaran, perbendaharaan dan pelaporan belum baik (keuangan)	Keuangan
	Pengelolaan aset belum baik	Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah (keuangan)	
	Pendapatan Daerah (PAD) yang masih rendah	Tata kelola PAD dan pengelolaan keuangan yang belum efektif	

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Sikka secara umum sudah berhasil mendapatkan penilaian Opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian selalu ada catatan sisa yang perlu ditindaklanjuti setiap tahunnya. Pada tahun 2024 saja, ada sekitar Rp 41.890.269.361,17 yang harus ditindaklanjuti oleh BPKAD Kabupaten Sikka. Hal ini menunjukkan akuntabilitas keuangan yang belum maksimal serta masih rentannya akuntabilitas keuangan Kabupaten Sikka.

Selanjutnya, dari sisi tata kelola anggaran, meskipun peningkatan PAD terjadi di tiap tahunnya, peningkatan tahun ini dapat dibilang menurun, bila pada 2 tahun sebelumnya peningkatan bisa mencapai 11,35, namun di tahun ini hanya mencapai 10,32 persen. Hal ini menunjukkan tata kelola anggaran dan dan aset yang belum baik. Sebab pengelolaan anggaran serta aset yang dimiliki justru tidak memberikan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Hal ini kemudian diperkuat dalam permasalahan keuangan daerah, dimana hasil pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Sikka menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi akibat tidak adanya investasi penyertaan modal yang dilakukan ke BPD NTT.

Selain itu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga masih menjadi kekhawatiran, sebab pada tahun 2024 ini PAD Kabupaten Sikka hanya dapat mencapai 8,69 untuk proporsi PAD terhadap APBD. Ini adalah angka terendah proporsi PAD pada lima tahun Terakhir di Kabupaten Sikka. Masalah-masalah ini menunjukkan meskipun secara tata kelola, akuntabilitas keuangan sudah cukup baik dengan nilai WTP yang dapat dipertahankan setiap tahunnya, tetapi dari sisi efektivitas, pengelolaan keuangan Sikka masih buruk. Utamanya pada tahun 2024, selain tindak lanjut opini BPK yang rendah, PAD dalam APBD mencapai titik terendah. Menunjukkan masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas tata kelola keuangan.

c. Efektivitas pemerintahan masih belum baik

Kurangnya efektivitas pemerintah menunjukkan hasil kinerja yang tidak sesuai dengan harapan perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Apabila hal ini terus dibiarkan,

maka akan terjadi masalah dalam keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sikka. Dalam pendalaman masalah adapun yang memengaruhi efektivitas pemerintahan Kabupaten Sikka seperti minimnya peran riset, tata kelola SPBE yang belum maksimal, SDM yang belum profesional, kapasitas setwan yang rendah, penataan organisasi yang belum maksimal, keadilan pada kepemilikan tanah, tingkat keamanan persandian, serta kearsipan yang belum baik dan statistik yang belum terintegrasi. Analisis permasalahan Kabupaten Sikka selanjutnya dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 2.193
Analisis Efektivitas Pemerintahan Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Efektivitas Pemerintahan masih belum baik	Peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah masih rendah	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan belum maksimal	Penelitian dan Pengembangan
	Penerapan Tata Kelola SPBE belum maksimal	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik perlu diperbaiki	Komunikasi dan Infomatika
		Masih rendahnya pengelolaan aplikasi informatika.	
	SDM Aparatur yang belum profesional	Pengelolaan pegawai daerah masih rendah	Kepegawaian
	Kompetensi ASN yang masih rendah	Upaya untuk pengembangan profesionalitas ASN masih rendah	Kepegawaian
	Kapasitas Setwan untuk mendukung kelancaran kerja anggota dewan masih rendah	Dukungan Setwan terdapa kinerja dewan belum maksimal	Seketariat Dewan
	Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan	Tata kelola organisasi pemerintah daerah masih belum baik	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat belum efektif	
		Pelaksanaan kebijakan Perekonomian dan Pembangunan belum maksimal	
	Masih rendahnya Kualitas Sistem dan Praktik Hukum	Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum masih kurang baik	Sekretariat Daerah
	Keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah belum baik	Kurangnya perencanaan alokasi tanah dalam pembangunan	Pertanahan
		Masih terdapat kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan	
	Tingkat keamanan persandian masih rendah	Pengelolaan dan pengawasan persandian masih kurang baik	Persandian
	Penerapan layanan statistik belum maksimal	Penyelenggaraan Statistik belum terintegrasi ke semua perangkat daerah	Statistik
	Pengelolaan Arsip belum baik	Tata kelola arsip dinamis dan statis masih rendah	Kearsipan
		Belum ada mekanisme perlindungan dan penyelamatan arsip	

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Efektivitas pemerintahan Kabupaten Sikka masih kurang baik yang diindikasikan oleh capaian penilaian LPPD tahun 2022 dan 2023 sebesar 31.395. Dari sisi riset dan inovasi, perannya masih dapat dibilang rendah dengan pemanfaatan hasil penelitian yang belum maksimal, seperti halnya pada tahun 2024 meskipun sudah banyak kajian yang dilakukan, namun masih ada yang belum diimplementasikan. Kabupaten Sikka. Indeks Inovasi daerah Kabupaten Sikka juga masih sangat fluktuatif dengan penurunan status menjadi kurang inovatif di tahun 2024. Meski demikian, Kabupaten Sikka berhasil meningkatkan nilai SPBE dan tahun ini berhasil mendapat nilai 2,02. Menunjukkan peningkatan yang tinggi untuk SPBE, meskipun demikian nilai ini masih jauh untuk mencapai nilai maksimal SPBE dengan

predikat memuaskan di dalam kisaran angka 4,2 – 5. Kabupaten Sikka harus lebih banyak berfokus pada peningkatan manajemen dan tata kelola SPBE seperti halnya perencanaan strategis SPBE, Manajemen SPBE, Penyelenggaraan dan audit TIK dsb. Selain itu, keamanan siber juga masih membutuhkan peningkatan di Kabupaten Sikka, sebab baru 59,6 persen total Perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkatnya di tahun 2024. Tidak hanya itu, kapasitas SDM juga masih menjadi tantangan dalam penerapan efektivitas pemerintah, sebab Profesionalitas ASN di Kabupaten Sikka baru dapat meningkat pada 2 tahun terakhir, itu pun masih dengan angka yang belum konsisten. Hal ini kemudian diperparah dengan penurunan persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya di tahun 2024 yang hanya sebesar 22,44 persen.

Dari sisi sekretariat baik daerah maupun dewan juga masih terdapat permasalahan seperti tingkat kematangan perangkat daerah yang rendah, serta hasil penetapan ranperda yang belum diketahui pemanfaatanya. Pada produk hukum sudah terlihat peningkatan yang sangat bagus pada tahun 2024, namun masih diperlukan upaya untuk mempertahankan peningkatan tersebut. Pada pengelolaan pertanahan, meskipun persentase penyelesaian kasus tanah negara dan izin diselesaikan dengan baik, tapi masih adanya sengketa, konflik pertanahan serta pemberian ganti rugi pembangunan menjadi permasalahan tersendiri. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan pemerintah dalam pengelolaan lahan bersertifikat sehingga terjadi kebingungan dalam kepemilikan lahan dan menimbulkan konflik. Hal ini nantinya dapat berdampak pada proses kinerja pemerintahan lainnya seperti urusan pajak dan berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Meskipun Kabupaten Sikka sudah mendapat nilai baik 2,84 pada Indeks Pembangunan Statistik, namun masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan. Seperti halnya sistem data statistik sektoral yang belum terintegrasi. Pada sisi Kearsipan juga, masih ada lebih dari setengah perangkat daerah yang belum dapat mengelola arsip mereka secara baku, sehingga masih dibutuhkan pengelolaan dan perlindungan terhadap arsip.

d. Masih terus terjadi gangguan ketertiban dan keamanan di daerah

Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi poin penting dalam menciptakan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Hal-hal yang menghambat terwujudnya keamanan dan ketertiban seperti halnya penegakan hukum yang kurang tegas, kurangnya manajemen risiko bencana dan kebakaran, serta kehidupan berlandaskan demokrasi, Pancasila dan HAM yang terganggu. Analisis permasalahan keamanan dan ketertiban Kabupaten Sikka selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.194
Analisis Permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Ketentraman dan ketertiban kehidupan Bermasyarakat belum baik	Kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada masih perlu ditingkatkan	Satuan Polisi Pamong Praja
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penanganan bencana pada saat pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana masih perlu ditingkatkan	BPBD
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non- Kebakaran belum maksimal	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non-Kebakaran perlu diperbaiki	Pemadam Kebakaran
	Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM terganggu	Diperlukan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Kesatuan Bangsa dan Poltik
		Masih lemahnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
		Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (Kesbangpol)	
		Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik masih kurang	
		Organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan daerah semakin menurun	

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Meskipun ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sikka sudah meningkat, namun persentase perda dan perkada yang ditegakan masih harus diperkuat. Sebab persentase tersebut baru mencapai sekitar 55,55 persen, menunjukkan masih ada hampir setengah masalah perda dan perkada yang tidak ditegakan di Kabupaten Sikka. Masalah manajemen risiko bencana juga masih perlu dicermati, pada tahun 2023 dan 2024, persentase penanganan pasca bencana hanya mencapai 30 persen. Meskipun Kabupaten Sikka sudah bekerja sama dengan pihak ke-3 untuk mengatasi permasalahan ini namun tingkat risiko bencana yang muncul masih sangat tinggi dengan mitigasi dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang rendah. Selanjutnya, kinerja damkar menunjukkan peningkatan yang baik setiap tahunnya dengan kinerja layanan penyelamatan dan respon cepat yang tinggi, menunjukkan SOP yang dilaksanakan dengan baik. Namun untuk memperkuat keamanan yang ada, mitigasi bencana secara keseluruhan baik bencana alam ataupun kebakaran masih memerlukan perbaikan.

Keamanan dan ketertiban tidak hanya berbicara tentang upaya yang dilakukan untuk masyarakat, namun juga tentang bagaimana upaya memperkuat masyarakat melalui penguatan ideologi Pancasila, karakter kebangsaan, serta keilmuan politik. Meskipun jumlah masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan cukup tinggi, namun angkanya masih sangat fluktuatif dan tidak konsisten diadakan setiap tahun. Sama halnya dengan peran masyarakat dalam politik dan organisasi kemasyarakatan, angkanya bersifat fluktuatif dan cenderung menurun. Menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat terhadap politik serta pembangunan daerah melalui organisasi kemasyarakatan. Hal ini kemudian perlu dicermati dengan baik, sebab ini juga menunjukkan kerentanan masyarakat terhadap politik yang terjadi, sehingga mereka tidak menjadi individu yang kritis. Apabila hal ini dibiarkan maka bisa jadi mereka terlibat dalam konflik sosial yang justru melukai diri mereka sendiri.

e. Kualitas pelayanan publik belum baik

Kualitas pelayanan publik juga menjadi titik awal dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan pada akhirnya dapat berkontribusi kepada efektivitas kebijakan di Kabupaten Sikka. Namun, meskipun kualitas pelayanan publik sudah meningkat masih terdapat beberapa masalah yang ada dalam pemberian layanan publik. Seperti halnya proses pelayanan yang belum sesuai standar, serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan publik yang belum memadai. Analisis permasalahan kualitas pelayanan publik Kabupaten Sikka dapat dilihat sebagaimana berikut.

Tabel 2.195
Analisis Permasalahan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Kualitas Pelayanan Publik belum baik	Proses pelayanan belum sesuai standar yang ditetapkan	Kualitas layanan pendaftaran penduduk masih rendah	Disdukcapil
		Rendahnya kualitas layanan pencatatan sipil	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
		Masih belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan informasi kependudukan	
		Belum meningkatnya kualitas profil kependudukan	
	Kualitas dan kuantitas sarpras masih kurang	Pelaksanaan transmigrasi belum terlaksana dengan baik	Transmigrasi
		Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi masih rendah	Tenaga Kerja
	Iklim investasi yang belum kompetitif	Masih belum optimalnya pelayanan penanaman Modal	Penanaman Modal
	Pelayanan publik di kecamatan belum optimal	Pelayanan publik di setiap kecamatan belum optimal	Kecamatan
		Masih minimnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum	
		Masih terjadi ketidaksinkronan antar kelurahan/desa, UPTD, dan lembaga vertikal di kecamatan	
		Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Masih Perlu Ditingkatkan	

Sumber: Diskusi Kelompok Terkoordinir

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sikka sudah mulai meningkat, namun masih menemui banyak kendala dan masalah yang menghambat peningkatan kualitas pelayanan tersebut. Di dalam masalah terakhir permasalahan kualitas pelayanan publik juga berkontribusi pada persoalan tata pemerintahan di Kabupaten Sikka. Pada tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Sikka mendapatkan nilai C- (Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, 2025). Hal ini menunjukkan masih buruknya pelayanan publik di Kabupaten Sikka secara keseluruhan. Meskipun indeks kepuasan masyarakat di beberapa perangkat daerah sudah cukup baik, tapi masih banyak perangkat daerah lainnya yang belum mencapai standar pelayanan yang baik. Pada permasalahan administrasi sendiri, meskipun persentase Kepemilikan E-KTP sudah mencapai 100 persen, namun angka ini tidak diikuti dengan peningkatan pesat pada dokumen identifikasi kependudukan lainnya seperti Kepemilikan KIA, akta kelahiran, serta perkawinan dan perceraian. Padahal dokumen kependudukan ini seringkali menjadi dasar masyarakat dalam kepentingan administrasi pelayanan pemerintah lainnya serta untuk kepentingan pendidikan. Cakupan pengelolaan profil kependudukan juga masih rendah dengan total hanya 1 cakupan profil kependudukan yang dilakukan.

Tidak hanya itu, pada perihal pengembangan kawasan transmigrasi, belum terdapat perkembangan kawasan transmigrasi sejak tahun 2020. Padahal, Kabupaten Sikka sudah mempunyai alokasi lahan sebesar 1180 hektar yang khusus diperuntukan untuk kebutuhan transmigrasi. Kurangnya pelaksanaan transmigrasi juga terlihat dari pembinaan transmigran, dimana setiap tahunnya persentase yang diberdayakan oleh Kabupaten Sikka semakin menurun. Selain itu masih rendahnya kesejahteraan transmigran yang disebabkan oleh pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi masih rendah dan berfluktuasi untuk persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan. Tanpa pemberdayaan yang kuat, transmigran akan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, mengembangkan usaha, atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka bisa terperangkap dalam kemiskinan dan bergantung pada bantuan eksternal.

Kualitas pelayanan publik yang belum baik di Kabupaten Sikka juga tergambar pada iklim investasi yang belum kompetitif akibat masih belum optimalnya pelayanan bagi para

investor. Hal ini salah satunya tergambar dari masih kurangnya pemberian konsultasi bagi investor terkait potensi investasi di Kabupaten Sikka. Selain itu pelayanan publik yang belum baik juga tergambar di Kecamatan. Masih terdapat berbagai masalah yang terjadi dalam pelayanan kecamatan di Kabupaten Sikka, seperti belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan, minimnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, masih terjadi ketidaksinkronan antar kelurahan/desa, UPTD, dan lembaga vertikal di kecamatan, hingga masalah kualitas SDM kecamatan yang perlu ditingkatkan.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis merujuk pada kondisi yang belum terjadi namun dianggap memiliki dampak signifikan terhadap tujuan atau arah pembangunan daerah. Isu-isu ini memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang cermat karena dapat memengaruhi keseluruhan kinerja atau pencapaian tujuan yang diinginkan. Kepentingan isu strategis ini terletak pada pengaruh besar yang dapat diberikannya terhadap Kabupaten Sikka di masa mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks penyusunan dokumen RPJMD, Isu strategis merupakan elemen yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan di kabupaten Sikka dalam lima tahun mendatang. Terdapat dua kondisi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan dalam menyusun kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sikka ke depan, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal (Witcher, 2020). Berdasarkan hasil diskusi dan analisis diperoleh isu-isu seperti tersaji di tabel berikut.

Tabel 2.196
Isu Strategis Daerah Kabupaten Sikka

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
• Komitmen Pemerintah Daerah pada Pengembangan Pembangunan • Potensi Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan yang Melimpah • Potensi Industri Kreatif yang Sangat Tinggi • Potensi Pariwisata Alam, Budaya, dan Religi • Sudah Ada Perusahaan Industri Besar dan Sedang yang Berkembang • Mulai Berkembangnya Kelembagaan Ekonomi dalam Masyarakat	• Kualitas Pembangunan Manusia masih rendah • Perekonomian kabupaten Sikka meningkat dengan baik, namun tingkat kesejahteraan Masyarakat masih relatif rendah • Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah Masih Rendah • Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah • Tata Kelola pemerintahan kabupaten Sikka masih belum baik	• Belum meratanya pelayanan pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia • Belum optimalnya ekonomi wilayah dan sistem pemerintahan • Belum optimalnya pelayanan kesehatan • Belum optimalnya upaya ketahanan pangan • Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak belum optimal • Penyediaan Infrastruktur dasar masyarakat yang belum merata • Permasalahan perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan ekosistem • Tingginya angka Kemiskinan	• Bonus Demografi Global • Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi • Konstelasi Perdagangan Global • Tata Kelola Keuangan Global • Pertumbuhan Kelas Menengah • Persaingan SDA • Perubahan Iklim	Peluang: • Komitmen Pemerintah Pusat untuk Memperkuatan Kelautan: Kawasan Ekonomi Perikanan (KEP) • Posisi Strategis Sikka dalam Wilayah Pusat Pengembangan II • Kemajuan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendapatan Per Kapita yang Tumbuh Pesat • Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun • Bonus Demografi • Daya Saing Sumber Daya Manusia Membaik • Pesat Pembangunan Infrastruktur • Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat • Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun • Kebijakan Pusat Regulasi Satu Data dan SPBE Ancaman: • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 Secara Resmi Mencoret PPI Alok dari Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional	• Investasi, Perdagangan, dan Industri Pariwisata • Adanya Arah Pembangunan Provinsi yang Mendorong Kemandirian Lokal • Adanya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2019-2039 • Peluncuran Program Strategis Provinsi: One Village One Product (OVOP) dan Gerakan Beli Produk NTT	• Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sikka Belum Merata • Kualitas Kesehatan Masyarakat Masih Rendah • Masih Tingginya Angka Kemiskinan • Sektor Pertanian Belum Mampu Menjadi Sumber Kesejahteraan Masyarakat • Sektor Industri Pengolahan Belum Berkembang • Multiplier Effect Sektor Sekunder Sangat Rendah • Keterbatasan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah • Tingginya Potensi Bencana • Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup • Profesionalitas dan Inovasi ASN di Kabupaten Sikka Masih Perlu Ditingkatkan • Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah Masih Belum Baik • Kualitas Sarpras Pelayanan Publik Masih Belum Baik

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				• Absennya Kabupaten Sikka dalam Daftar Calon Lokasi Kampung Nelayan Modern (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024) • Produktivitas Rendah • IPTEKIN dan Riset Lemah • Deindustrialisasi Dini • Pariwisata di Bawah Potensinya • Ekonomi Laut Belum Optimal • Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil • Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah • Pembangunan Belum Berkelanjutan • Integrasi Domestik Terbatas serta Kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa • Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal • Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah • Demokratisasi Belum Optimal		

1. Isu Strategis Internal

Isu strategis internal merujuk pada pada faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pembangunan Kabupaten Sikka dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, Isu strategis internal ini mencakup dua aspek penting: pertama, permasalahan pembangunan yang teridentifikasi dalam bagian sebelumnya yang dapat menjadi kelemahan dan kedua, potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka yang diidentifikasi sebagai kekuatan. Permasalahan pembangunan yang diidentifikasi sebagai isu strategis internal mengacu pada tantangan konkret yang mungkin dihadapi dalam upaya pembangunan daerah jangka panjang. Ini mencakup hambatan-hambatan yang perlu diatasi agar pembangunan dapat berjalan lancar dan efektif. Isu-isu strategis internal yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sikka untuk mendapatkan pandangan yang menyeluruh mengenai pembangunan di Kabupaten Sikka dijelaskan sebagai berikut.

1) Kualitas pendidikan di Kabupaten Sikka belum merata

Kualitas pendidikan di Kabupaten Sikka masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Salah satu indikator utama ketimpangan ini adalah masih tingginya angka anak putus sekolah, yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Upaya pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan bahaya keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi telah dilakukan, namun belum mampu menekan fenomena ini secara optimal. Ketimpangan kualitas pendidikan juga terlihat dari belum meratanya infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah kabupaten. Terdapat kesenjangan distribusi fasilitas pendidikan formal, terutama di daerah-daerah terpencil. Meskipun layanan pendidikan di pusat kabupaten relatif memadai, wilayah-wilayah pinggiran masih kekurangan fasilitas pendidikan yang layak. Ketimpangan akses dan mutu pendidikan ini akan memiliki konsekuensi langsung dalam menghasilkan lulusan yang tidak merata dalam hal kompetensi dan keterampilan dasar. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya kesiapan generasi muda di Kabupaten Sikka dalam menghadapi tantangan dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Selain itu, Putus sekolah dan kurangnya pendidikan formal akan memperbesar potensi permasalahan sosial, seperti peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan struktural. Serta, meningkatnya potensi keterlibatan remaja dalam aktivitas negatif termasuk pernikahan dini.

2) Kualitas kesehatan masyarakat masih rendah

Kualitas kesehatan masyarakat sangat terkait dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sikka. Kenyataannya, pelayanan kesehatan belum merata. Pelayanan kesehatan di beberapa wilayah di Kabupaten Sikka masih terkendala karena buruknya infrastruktur jalan. Tidak sedikit kasus ibu melahirkan dibawa menuju fasilitas kesehatan dengan menggunakan gerobak. Kondisi ini sangat berisiko bagi masyarakat di Kabupaten Sikka. Selain itu akses air minum terbatas, masalah jamban, kondisi rumah, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga kurang higienis menyebabkan kondisi kesehatan balita di Kabupaten Sikka menjadi rendah. Padahal, Kabupaten Sikka harus menyiapkan generasi emas pada masa yang akan datang. Isu rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka berpotensi menciptakan lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*), di mana keluarga yang kurang sehat cenderung memiliki produktivitas rendah, beban ekonomi tinggi akibat biaya kesehatan, serta terbatas dalam akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. Kondisi ini bukan hanya menurunkan produktivitas tenaga kerja lokal, tetapi juga memperlebar kesenjangan antarwilayah, terutama antara pusat dan daerah terpencil yang kurang terlayani. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan daya saing daerah, baik dalam hal pembangunan SDM, investasi, maupun kemampuan daerah dalam bersaing secara regional dan nasional.

3) Masih tingginya Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sikka masih tergolong tinggi dan menunjukkan tantangan serius dalam proses graduasi atau pengentasan secara berkelanjutan. Banyak rumah tangga miskin mengalami stagnasi kesejahteraan, bahkan berisiko kembali jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem ketika menghadapi tekanan ekonomi, bencana, atau fluktuasi harga kebutuhan pokok. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur sosial ekonomi masyarakat masih sangat rapuh, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada sektor informal dan produktivitas yang rendah. Kemiskinan yang bersifat struktural ini menjadikan sebagian besar masyarakat Kabupaten Sikka sangat rentan terhadap dinamika global seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok, serta bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan gempa bumi yang kerap melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Kerentanan ini tidak hanya berdampak pada ketahanan ekonomi rumah tangga, tetapi juga memperbesar beban negara dan daerah dalam penanganan sosial, menghambat investasi sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi efektivitas program pembangunan berbasis masyarakat. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sikka bukan sekadar tantangan ekonomi, melainkan ancaman multidimensional yang akan menghambat kemajuan pembangunan secara keseluruhan dalam lima tahun ke depan. Isu ini akan menurunkan efektivitas program pembangunan, meningkatkan beban fiskal, dan memperlambat pencapaian target RPJMD jika tidak segera diatasi melalui kebijakan intervensi struktural, pemberdayaan ekonomi lokal, perlindungan sosial adaptif, dan pemerataan pembangunan wilayah.

4) Sektor pertanian belum mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat

Sektor pertanian hingga kini masih menjadi tulang punggung utama perekonomian Kabupaten Sikka. Namun demikian, kontribusi besar sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha tani. Sektor ini belum mampu menjadi lokomotif pembangunan ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Beberapa kendala utama yang menghambat optimalisasi sektor pertanian di antaranya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi iklim. Sistem budidaya yang masih bersifat tradisional dan minim teknologi adaptif menyebabkan tingkat produktivitas pertanian sangat rentan terhadap perubahan musim, cuaca ekstrem, dan dampak perubahan iklim. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hasil panen dan pendapatan petani. Selain itu, sebagian besar komoditas pertanian masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan yang bernilai tambah. Ketiadaan atau lemahnya industri pengolahan pascapanen mengakibatkan nilai jual produk cenderung rendah dan sangat fluktuatif mengikuti pasar primer. Situasi ini memperkuat ketergantungan petani terhadap tengkulak dan rantai distribusi yang tidak menguntungkan. Rendahnya pemberdayaan kelembagaan petani menyebabkan minimnya inovasi, rendahnya adopsi teknologi, serta lemahnya posisi tawar dalam sistem agribisnis. Ketidakmampuan sektor ini menciptakan nilai tambah dan distribusi pendapatan yang merata akan menyebabkan stagnasi ekonomi di tingkat rumah tangga petani, menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif, serta membatasi perluasan lapangan kerja yang layak di pedesaan.

5) Sektor industri pengolahan belum berkembang

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Sikka masih belum berkembang secara optimal dan belum mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun telah terdapat industri pengolahan berskala besar, khususnya di sektor perikanan dan pengolahan kakao, namun pengembangannya masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, air bersih, serta sistem transportasi dan

logistik yang belum memadai. Kondisi ini mengurangi daya tarik investasi skala besar yang dibutuhkan untuk memperkuat sektor hilir. Di sisi lain, industri kecil dan mikro—yang mayoritas bergerak di sektor industri kreatif dan usaha berbasis potensi lokal—masih menghadapi berbagai kendala seperti terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan permodalan, rendahnya kapasitas kewirausahaan, serta lemahnya kelembagaan usaha yang dapat memperkuat kolaborasi dan skala produksi. Keterbatasan ini menyebabkan sektor industri belum mampu menciptakan nilai tambah secara signifikan terhadap komoditas unggulan daerah, maupun membuka lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan. Ketergantungan Kabupaten Sikka terhadap sektor primer seperti pertanian dan perikanan akan terus berlangsung apabila sektor industri pengolahan tidak berkembang. Hal ini menyebabkan struktur ekonomi daerah tetap rapuh dan tidak tahan terhadap fluktuasi harga komoditas karena ketidakmampuan daerah untuk menciptakan basis ekonomi baru yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi. Ketiadaan proses hilirisasi yang kuat menyebabkan sebagian besar komoditas unggulan hanya dijual dalam bentuk mentah. Ini akan mengurangi potensi peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD, serta menghambat penciptaan branding produk lokal unggulan yang kompetitif di pasar nasional dan internasional.

6) *Multiplier effect* sektor sekunder sangat rendah

Sektor sekunder didominasi oleh sektor perdagangan, transportasi, dan pemerintahan serta pembangunan. Pada sektor perdagangan, di satu sisi produk yang diperdagangkan keluar daerah adalah produk mentah sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas. Pada sisi lain, begitu banyak produk kebutuhan masyarakat yang harus didatangkan dari luar daerah, mulai dari produk pangan sampai peralatan rumah tangga dan bahan bangunan. Hasil akhirnya net ekspor Kabupaten Sikka menjadi negatif, inilah yang disebut sebagai kebocoran konsumsi. Kebutuhan produk dari luar daerah itu tidak hanya dari sektor masyarakat tetapi juga dari sektor pemerintah. Makna dari net ekspor yang negatif itu adalah bahwa uang yang dihasilkan di Kabupaten Sikka lebih banyak dibelanjakan di luar daerah. Akibat dari hal ini menjadi sangat jelas, bahwa uang yang beredar di Sikka menjadi terbatas, hal ini berdampak pada rendahnya permintaan. Permintaan yang rendah tentu menghambat terjadinya aktivitas ekonomi selanjutnya.

7) Keterbatasan ketersediaan infrastruktur wilayah

Kabupaten Sikka memiliki keterbatasan infrastruktur hampir di setiap bidang. Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh kondisi topografi Kabupaten Sikka yang didominasi oleh perbukitan, gunung, serta lembah dengan lereng-lereng yang curam dan biasanya terletak di daerah pantai. Topografi dengan ketinggian 100-500 mdpl serta luas 48.171 hektar merupakan wilayah lereng atau kaki gunung perbukitan. Kemiringan yang tinggi mengakibatkan kesulitan dalam membangun infrastruktur dan menyebabkan anggaran dalam membangun menjadi tinggi. Keterbatasan ini mencakup hal berikut, pertama, keterbatasan terhadap konektivitas wilayah yang masih rendah disebabkan oleh kualitas dan kuantitas jalan yang mengakibatkan konektivitas wilayah yang rendah, mencakup permasalahan belum adanya master plan jalan, database jalan desa yang tidak ada, fasilitas jalan kabupaten yang sangat kurang seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), rasio panjang jalan yang stagnan, aksesibilitas transportasi yang belum baik. Hal ini berdampak pada aktivitas ekonomi yang kurang berkembang di Kabupaten Sikka, dan daya saing daerah yang rendah. Kedua, sarana dan prasarana infrastruktur dasar belum merata disebabkan oleh beberapa hal di antaranya adalah ketersediaan rumah layak huni yang masih sangat rendah yang sejalan dengan permukiman kumuh yang semakin meningkat, dimana hal ini sangat berkaitan dengan rendahnya elektrifikasi, akses terhadap air bersih, sanitasi layak dan drainase yang ada di Kabupaten Sikka. Selanjutnya isu ini juga mencakup keterbatasan terhadap aksesibilitas komunikasi akibat infrastruktur teknologi informasi yang rendah

karena masih banyaknya daerah *blank spot*. Kemudian adanya keterbatasan terhadap infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang masih rendah.

Keterbatasan infrastruktur dasar ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam penataan ruang. Kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sikka yang melakukan pemakaman keluarga di depan rumah menjadi penyebab kendala dalam pembangunan jalan di Kabupaten Sikka. Rumah tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya. Menjadi sebuah tantangan besar bagi Sikka ke depan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang harus dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat dalam penataan ruang sehingga infrastruktur dapat dibangun dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

8) Tingginya potensi bencana

Kabupaten Sikka menempati urutan pertama rawan bencana di Provinsi NTT. Bahkan secara nasional, Indeks Risiko Bencana di Sikka berada di urutan ke-45. Terdapat 12 jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Sikka di antaranya, Gunung berapi, tsunami, kebakaran, kekeringan, longsor, banjir, puting beliung, abrasi pantai, angin kencang dan gelombang besar, rob (banjir pantai), dan gempa bumi. Kabupaten Sikka mengalami kendala dalam meningkatkan kawasan layak huni diakibatkan bencana alam yang sering terjadi dan mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur dan permukiman masyarakat terus menerus. Selain itu, pada bencana kekeringan yang cukup buruk sering terjadi di Kabupaten Sikka, hal ini mengakibatkan semakin sulitnya akses terhadap air bersih karena debit air yang semakin berkurang, dan berdampak pula pada aktivitas ekonomi, pertanian dan menurunnya minat wisatawan untuk berwisata ke Kabupaten Sikka. Kemudian yang menjadi penyebab terkendalanya penanggulangan bencana di Kabupaten Sikka adalah keterbatasan anggaran untuk membangun dan mengembangan Desa Tangguh Bencana, terutama dalam hal memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana yang masih rendah. Sehingga dari isu strategis internal ini diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana yang tepat agar Kabupaten Sikka dapat dikategorikan sebagai daerah yang tangguh bencana sepenuhnya, tentunya akan berdampak positif terhadap semua aspek pembangunan Kabupaten Sikka.

9) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup

Kabupaten Sikka kaya akan sumber daya alam, termasuk deposit mineral yang menarik minat industri pertambangan. Namun, adanya tantangan serius terkait pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas dan kuantitas air di Sikka masih buruk yang ditunjukkan dengan masih belum optimalnya upaya pemenuhan akses terhadap air bersih yang merata sehingga bencana kekeringan kerap terjadi. Diperburuk dengan pengelolaan dan pembuangan sampah dan limbah baik rumah tangga dan industri yang juga menjadi sumber pencemaran air. Rendahnya jumlah sanitasi layak, BABS dan perilaku hidup bersih dan sehat yang juga menjadi ancaman kualitas air. Ini diperparah dengan meningkatnya aktivitas perambahan hutan dan pertambangan mineral dan non-minerba baik legal maupun ilegal di Kabupaten Sikka. Salah satu pertambangan batuan dan pasir ilegal di Kabupaten Sikka yaitu di wilayah Desa Egon Kecamatan Waigete berada di lokasi sumber mata air, sehingga hal ini menyebabkan kualitas air yang buruk. Aktivitas tambang ini dinilai sebagai pemicu terjadinya banjir yang merendam rumah warga di lokasi pertambangan. Aktivitas tambang ini juga memperburuk kualitas tutupan lahan, ditambah dengan besarnya kerawanan bencana Sikka yang juga menjadi penyebab rendahnya kualitas tutupan lahan.

Faktor kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang masih rendah juga menjadi penyebab kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sikka. Kebakaran lahan yang sering terjadi selain karena kondisi geografis yang kering, juga disebabkan oleh perilaku masyarakat yang sering membuang puntung rokok sembarangan,

membakar sampah sembarangan, dan pembukaan lahan dengan cara membakar, sehingga kebakaran hutan lindung sering terjadi di Kabupaten Sikka. Ini dalam jangka panjang akan semakin memperburuk kualitas udara seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kepemilikan kendaraan bermotor. Hal serupa terjadi pada kasus perambahan hutan yang tanpa diikuti oleh kesadaran akan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Oleh karena itu diperlukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif bagi Sikka dalam menjawab tantangan tersebut.

10) Profesionalitas dan inovasi ASN di Kabupaten Sikka masih perlu ditingkatkan

Profesionalitas dan kapasitas inovatif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sikka masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi kinerja pelayanan publik secara menyeluruh. Temuan dari berbagai forum diskusi menunjukkan adanya kecenderungan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan etika kerja, termasuk praktik pengajuan izin tidak masuk kerja dalam durasi panjang untuk menghadiri upacara adat. Praktik ini secara langsung berdampak pada kontinuitas layanan publik dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain itu, munculnya gangguan mental dan penurunan konsentrasi kerja akibat penyalahgunaan media sosial juga mulai menjadi perhatian. Meskipun demikian, terdapat potensi kekuatan yang mendukung perbaikan tata kelola birokrasi, yakni tersedianya perangkat regulasi kelembagaan dan pengelolaan anggaran, pengawasan internal yang berjalan, koordinasi lintas perangkat daerah yang cukup baik, serta adanya komitmen yang tinggi terhadap akuntabilitas publik. Potensi ini perlu diperkuat dengan reformasi budaya kerja ASN, peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang adaptif terhadap era digital, serta penegakan disiplin yang konsisten, agar ASN dapat menjadi motor penggerak pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

11) Pengelolaan anggaran dan aset daerah masih belum baik

Pengelolaan anggaran dan aset daerah di Kabupaten Sikka masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi kinerja fiskal dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu indikator yang mencolok adalah rendahnya tingkat pemanfaatan aset-aset milik daerah yang belum dikelola secara produktif, sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah. Di samping itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan, dimana terdapat praktik mismanajemen yang menyebabkan kerugian berulang dan pada akhirnya membebani keuangan daerah. Situasi ini mencerminkan belum optimalnya tata kelola keuangan dan aset, baik dari sisi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, maupun akuntabilitas. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas program pembangunan, tetapi juga membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam mendanai inisiatif strategis yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik.

12) Kualitas sarpras pelayanan publik masih belum baik

Kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka masih belum memadai, baik dari aspek fisik maupun non-fisik. Kondisi ini mencakup keterbatasan fasilitas gedung perkantoran, peralatan kerja, sistem teknologi informasi, serta infrastruktur pendukung lainnya yang berfungsi sebagai elemen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketidaksesuaian sarpras dengan standar pelayanan minimal (SPM) turut berdampak pada rendahnya efisiensi kerja ASN, terbatasnya aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat, serta menurunnya kualitas layanan publik secara keseluruhan. Permasalahan ini tidak hanya memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah, tetapi juga menghambat pencapaian target reformasi

birokrasi dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, perbaikan dan modernisasi sarpras menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif.

Meskipun terdapat isu-isu strategis internal Kabupaten Sikka yang dapat menjadi kelemahan, namun Kabupaten Sikka juga memiliki isu strategis internal yang dapat menjadi kekuatan pembangunan dalam lima tahun yang akan datang. Beberapa potensi daerah yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1) Komitmen pemerintah daerah pada pengembangan pembangunan

Pemerintah Kabupaten Sikka menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendorong pembangunan sektor-sektor strategis, khususnya pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini tercermin dari prioritas program Bupati terpilih yang secara langsung menargetkan penguatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai contoh di bidang pendidikan, program seperti Jaminan Pendidikan satu sarjana bagi keluarga miskin ekstrem, peningkatan kuota beasiswa secara tepat sasaran, dan percepatan penegerian UNIPA menunjukkan upaya nyata untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintah daerah mendorong pelayanan kesehatan gratis berbasis E-KTP, percepatan penanganan stunting, serta peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis, termasuk pemberian insentif tambahan bagi dokter, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu. Kekuatan ini menjadi modal penting bagi Kabupaten Sikka dalam membangun fondasi pembangunan manusia yang tangguh dan inklusif. Namun demikian, keberhasilan implementasi seluruh program ini sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas birokrasi, serta keberlanjutan pendanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan.

2) Potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang melimpah

Kabupaten Sikka menjadi penghasil komoditas perkebunan terbesar di Nusa Tenggara Timur. Contohnya tanaman kakao, dari lahan 19.714 hektar dihasilkan 4.059 ton. Jumlah ini menyumbang 79 persen dari total produksi kakao NTT. Kabupaten Sikka unggul pada produk kelapa, kakao maupun kacang mete yang produksinya juga menjadi nomor dua tertinggi di NTT. Sementara, pada tanaman pangan, Kabupaten Sikka adalah produsen singkong terbesar di NTT. Kabupaten Sikka juga merupakan wilayah kepulauan yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiversitas) sangat besar, baik yang bersifat dapat pulih (*renewable resources*) seperti perikanan, terumbu karang, mangrove, rumput laut, industri pengolahan dan bioteknologi, energi terbarukan seperti pasang surut, gelombang, angin, OTEC (*ocean thermal energy conversion*). Selain itu terdapat jasa-jasa lingkungan kelautan yang dimanfaatkan untuk industri pariwisata bahari, industri maritim dan jasa transportasi laut; sumber daya yang tak pulih (*non-renewable resources*) seperti bahan tambang serta sumber daya mineral lainnya (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, 2010). Dengan demikian, patutlah Kabupaten Sikka menjadi kabupaten penyumbang produk perikanan laut tertinggi di NTT. Seluruh komoditi unggulan tersebut telah menjadi bagian terpenting dari perkembangan ekonomi Kabupaten Sikka. Perdagangan atas produk hasil pertanian, perkebunan, dan kelautan tidak hanya dipasarkan ke daerah sekitar, namun telah mencapai pasar dunia.

3) Potensi industri kreatif yang sangat tinggi

Kabupaten Sikka memiliki kekayaan potensi ekonomi kreatif yang unik dan khas. Beberapa produk unggulan berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Sikka terdiri dari kain tenun ikat, produk olahan ikan, kawasan wisata, kerajinan tangan, minuman tradisional, atraksi seni dan budaya, cemilan atau makan ringan. Produk industri kerajinan (khususnya

tenun) telah menjadi bagian dari kiblat fashion dunia. Demikian pula dengan musik dan tarian dari Sikka. Kabupaten Sikka memiliki budaya dan seni tradisional begitu beragam. Salah satunya adalah tarian dan musik Sikka. Seni tari dan musik dalam tataran budaya tak bisa dipisahkan. Tari musik dan doa, dipadukan dan dijalankan dalam berbagai ritus tahunan daerah. Berbagai tarian di Sikka dengan gerak improvisasi beragam, uniknya tak membutuhkan garapan seorang seniman khusus, kecuali tarian tersebut telah dipadu dengan berbagai unsur-unsur gerak modern. Musisi dan desainer hebat telah terinspirasi dari budaya masyarakat Sikka kemudian membawanya untuk diakui pada level internasional.

4) Potensi pariwisata alam, budaya, dan religi

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan adat istiadat. Potensi tersebut merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui kepariwisataan. Kepariwisataan merupakan salah satu industri strategi di dunia. Hal ini disebabkan negara-negara yang ada di dunia mendapatkan devisa dari sektor kepariwisataan. Dari sisi regulasi, Kabupaten Sikka telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2030.

Salah satu objek wisata yang menarik perhatian para wisatawan domestik dan wisatawan asing adalah objek wisata Wair Nokerua yang mempunyai kisah sejarah, nilai-nilai religius dan keunikan alam yang melekat pada destinasi ini. Masyarakat Kabupaten Sikka, NTT meyakini legenda ataupun cerita para leluhur bahwa Wair Nokerua (dalam Bahasa Sikka, Wair artinya air dan Nokerua artinya imam) merupakan sebuah mata air ajaib peninggalan mukjizat Santo Fransiskus Xaverius yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, memberikan berkat bagi kesuburan tanaman.

Objek wisata lainnya adalah Kawasan Taman Laut Teluk Maumere yang menyajikan keindahan bawah laut yang mempesona dengan berbagai jenis terumbu karang yang indah. Desa Kojadoi terdiri dari dua pulau yakni Pulau Kojadoi dan Pulau Besar, dimana kedua pulau ini dihubungkan dengan jembatan batu yang digunakan masyarakat setempat sekaligus dijadikan sebagai daya tarik wisata. Selain itu Desa Wisata Kojadoi menyuguhkan keindahan wisata alamnya, seperti wisata bahari (*snorkeling dan diving*), pemandangan sunset, juga bukit batu purba.

Selain wisata alam, Kabupaten Sikka memiliki wisata budaya berupa kain tenun Sikka. Kain tenun ikat tradisional ini merupakan karya seni dan identitas dari masyarakat di Kabupaten Sikka yang memiliki daya pikat yang sangat kuat. Motif sebuah kain tenun ikat Sikka bagi masyarakat dapat dianggap mempunyai nilai yang dalam. Nilai-nilai itu antara lain nilai spiritual, nilai politis (dikaitkan dengan ritual-ritual adat dan oleh pemangku adat), dan nilai sosial ekonomis (sebagai denda adat untuk mengembalikan keseimbangan sosial). Kain tenun ikat memiliki daya tarik yang unik dan berkelas, memiliki berbagai macam motif dan corak yang memiliki arti dan makna tersendiri. Daya tarik ini yang menyebabkan Desa Uma Uta, Kecamatan Bola, masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022, karena memiliki daya tarik wisata dengan mempertahankan tradisi budaya dan tenun ikat menggunakan bahan alami. Munculnya konsep desa wisata di Uma Uta juga sangat unik, yakni berawal dari sebuah tradisi tenun ikat khas Sikka yang dihasilkan oleh Sanggar Tari Dokka Tawa Tana, dimana tradisi ini kemudian memunculkan wisata atraksi seni budaya lainnya, seperti seni musik dan seni tari tradisional. Tidak sedikit wisatawan datang berkunjung untuk belajar menenun, mempelajari filosofi motif, atau sekadar untuk berfoto dengan mengenakan kain tenun.

Kabupaten Sikka tidak saja terkenal dengan wisata bahari dan budaya, tetapi juga memiliki sejumlah tempat wisata religius. Bagi umat Nasrani keberadaan berbagai tempat ibadah yang sangat agung di kawasan Sikka menjadi magnet untuk berkunjung ke Sikka. Sanctuarium Wisung Fatima Lela, 24 km ke arah selatan dari Maumere merupakan salah satu

situs rohani bersejarah di Kabupaten Sikka, dan menjadi tempat ziarah umat Katolik yang ramai dikunjungi para peziarah setiap hari, teristimewa pada Bulan Maria atau Bulan Rosario, yaitu Mei dan Oktober.

5) Sudah ada perusahaan industri besar dan sedang yang berkembang

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, sudah ada industri besar yang berkembang di Kabupaten Sikka. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dan hingga saat ini masih tetap beroperasi menunjukkan bahwa Sikka memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Keberadaan industri besar dan menengah ini nantinya diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan, diantaranya melalui kerja sama dan pendampingan antara perusahaan besar dengan usaha mikro dan kecil.

6) Banyaknya lembaga pendidikan

Sikka memiliki banyak lembaga pendidikan berbasis keagamaan, tidak saja sekolah Katolik namun juga sekolah berbasis agama Islam. Lela merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sikka yang dikenal sebagai sentra pendidikan Flores. Lembaga pendidikan bersejarah Standaardschool Lela didirikan tahun 1897 merupakan sekolah resmi pertama Flores dan Sikka yang menerapkan kurikulum berbasis Eropa. Standaardschool Lela ini menjadi sentra sekaligus model bagi pengembangan pendidikan modern di Flores. Lembaga-lembaga pendidikan ini tentu dapat menjadi sumber pengetahuan dan sumber belajar bagi masyarakat tidak hanya untuk ilmu agama melainkan juga ilmu hidup secara umum. Melalui lembaga pendidikan ini diharapkan akan muncul inovasi inovasi yang akan membantu masyarakat Sikka untuk meningkatkan kesejahteraannya, tidak hanya kesejahteraan ekonomi, namun juga kesejahteraan sosial.

7) Mulai berkembangnya kelembagaan ekonomi dalam masyarakat

Kelembagaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sikka mulai menunjukkan perkembangan positif sebagai bagian dari kekuatan internal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Masyarakat memiliki potensi dan kemauan untuk berkembang, yang apabila didukung dengan pendampingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan, dapat menjadi kekuatan penggerak pembangunan berbasis komunitas. Saat ini telah teridentifikasi sejumlah kelompok masyarakat yang berperan sebagai agen perubahan, seperti kelompok sadar wisata, kelompok petani perempuan, dan desa mandiri yang tumbuh di berbagai wilayah. Kelembagaan ini tidak hanya menjadi wadah partisipasi, tetapi juga berperan dalam menciptakan inovasi ekonomi, memperkuat kemandirian desa, serta mendorong pengelolaan potensi lokal secara produktif. Namun demikian, keberlanjutan pengembangan kelembagaan ekonomi ini sangat bergantung pada konsistensi pendampingan, akses terhadap pembiayaan, peningkatan literasi kewirausahaan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Jika dikembangkan secara strategis, kelembagaan ekonomi masyarakat ini dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sikka.

Lebih lanjut, isu strategis daerah juga dapat diperoleh dari dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Rangkuman/rumusan isu strategis berdasarkan empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan adalah berikut: 1) Belum meratanya pelayanan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia; 2) Belum optimalnya ekonomi wilayah dan sistem pemerintahan; 3) Belum optimalnya pelayanan kesehatan; 4) Belum optimalnya upaya ketahanan pangan; 5) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal; 6) Penyediaan infrastruktur dasar

masyarakat yang belum merata; 7) Permasalahan perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan ekosistem; 8) Tingginya angka kemiskinan.

2. Isu Strategis Eksternal

Proses analisis lingkungan eksternal merupakan upaya untuk memahami faktor-faktor di luar kendali langsung Kabupaten Sikka. Identifikasi lingkungan eksternal melibatkan pemanfaatan informasi dari berbagai tingkatan seperti regional, nasional, dan internasional yang dapat memengaruhi pembangunan di Kabupaten Sikka selama lima tahun yang akan datang. Dalam konteks ini, isu-isu strategis eksternal dianalisis baik yang dapat menjadi tantangan maupun peluang untuk pembangunan Kabupaten Sikka.

a. Isu Strategis Provinsi/Regional

Terdapat isu strategis regional di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Sikka sebab memiliki dampak yang penting terhadap perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan, tersaji dalam uraian berikut:

1) Investasi, perdagangan, dan industri pariwisata

Provinsi NTT memiliki potensi ekonomi regional yang besar, yang dapat dimanfaatkan melalui peningkatan investasi dan perdagangan, baik domestik maupun luar negeri. Percepatan pertumbuhan sektor industri dan pariwisata di NTT menunjukkan tren yang positif, dengan kontribusi yang semakin signifikan terhadap pendapatan daerah dan upaya diversifikasi ekonomi. Industri pariwisata, khususnya, memiliki daya tarik tinggi dengan kekayaan budaya dan keindahan alam yang khas, yang dapat menjadi penggerak utama ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, letak geografis NTT yang strategis memberikan keunggulan dalam pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman. Potensi ini dapat dioptimalkan melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan, transportasi maritim, serta pariwisata bahari yang berkelanjutan. Sinergi antar sektor tersebut menjadi kunci untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah di tingkat nasional maupun global. Sebagai bagian dari wilayah strategis NTT, Kabupaten Sikka berpotensi untuk menarik arus investasi yang lebih besar, terutama pada sektor-sektor unggulan seperti perikanan, tenun ikat, pariwisata budaya, dan produk olahan lokal. Dengan adanya kebijakan regional yang mendorong investasi dan perdagangan, Sikka dapat memperoleh manfaat dari peningkatan infrastruktur ekonomi, insentif usaha, serta peluang kemitraan dengan pelaku usaha nasional dan asing.

2) Adanya Arah Pembangunan Provinsi yang mendorong kemandirian lokal

Arah Pembangunan Provinsi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal, efisien dan berkelanjutan di Provinsi NTT. Arah pembangunan ini juga mengutamakan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan dasar, pemberdayaan, perlindungan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, arah pembangunan ini juga menekankan pentingnya pengembangan industri pariwisata sebagai sektor unggulan yang dapat menggerakkan sektor lainnya, seperti pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, budaya dan lain-lain. Penekanan provinsi terhadap pemanfaatan sumber daya lokal akan mendorong Kabupaten Sikka untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulannya. Hal ini menjadi landasan kuat bagi Kabupaten Sikka untuk memperkuat sektor ekonomi rakyat dan membangun ekonomi berbasis komunitas.

3) Adanya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2019-2039

Perda ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan ruang di wilayah NTT. Perda ini mengatur tentang zonasi, fungsi, alokasi dan pemanfaatan ruang, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perda ini juga mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat, serta memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah NTT yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Perda ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan, berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing. RTRW Provinsi NTT menekankan pemanfaatan ruang berdasarkan karakteristik pulau-pulau dan potensi unggulan masing-masing daerah. Dalam konteks Kabupaten Sikka, hal ini mendorong pengembangan kawasan pesisir, pariwisata, sentra perikanan, dan pertanian sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Ini menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan kawasan strategis, seperti Maumere sebagai pusat pertumbuhan wilayah timur Flores.

4) Peluncuran Program Strategis Provinsi: O*ne Village One Product* (OVOP) dan Gerakan Beli Produk NTT

Menjelang 100 hari kerja kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, Pemerintah Provinsi NTT resmi meluncurkan dua program strategis yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dua program tersebut adalah *One Village One Product* (OVOP) dan Gerakan Beli Produk NTT. Program OVOP bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan satu produk unggulan dari setiap desa di Provinsi NTT. Pendekatan ini mendorong masyarakat desa untuk mengelola potensi lokal secara inovatif dan berkelanjutan, baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan tangan, maupun produk olahan makanan khas daerah. Sementara, Program Gerakan Beli Produk NTT merupakan kampanye kolaboratif untuk membangkitkan rasa bangga dan cinta terhadap produk-produk lokal NTT. Gerakan ini mendorong masyarakat, pelaku usaha, instansi pemerintah, dan sektor swasta untuk lebih mengutamakan konsumsi dan penggunaan produk buatan lokal. Program OVOP dan Gerakan Beli Produk NTT dapat memberi stimulus ekonomi yang konkret bagi Kabupaten Sikka dalam meningkatkan produktivitas dan kemandirian desa, memperluas pasar dan memperkuat identitas produk lokal, mendorong transformasi UMKM, serta menciptakan sinergi pembangunan antar sektor (ekonomi, budaya, pariwisata, sosial).

b. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional merujuk pada masalah ataupun tantangan yang memiliki dampak signifikan terhadap keamanan, stabilitas, dan kepentingan nasional khususnya di Indonesia. Isu strategis nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 terbagi menjadi peluang dan ancaman. Isu strategis nasional yang dapat menjadi peluang, adalah:

1) Komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat kelautan: Kawasan Ekonomi Perikanan (KEP)

Komitmen Pemerintah Pusat dalam memperkuat sektor kelautan merupakan salah satu isu strategis nasional yang membuka peluang besar bagi pembangunan daerah, khususnya wilayah pesisir dan kepulauan. Dalam dokumen RPJMN 2025–2029, penguatan sektor kelautan diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dengan menekankan pada peningkatan produktivitas, kedaulatan, dan keberlanjutan sumber daya laut. Peluang ini ditandai dengan berbagai kebijakan nasional seperti pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu, penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kelautan, peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya, serta modernisasi sistem logistik perikanan nasional. Komitmen ini juga diwujudkan dalam dukungan infrastruktur

pelabuhan, sistem rantai dingin (*cold storage*), dan digitalisasi tata kelola hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global.

Bagi daerah seperti Kabupaten Sikka yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, kebijakan ini menjadi peluang emas untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Perikanan (KEP), memperkuat ketahanan pangan laut, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggerakkan ekonomi lokal berbasis sumber daya pesisir. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan regulasi dan investasi, penguatan sektor kelautan dapat menjadi motor penggerak pembangunan wilayah sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pencapaian tujuan nasional.

2) Posisi strategis Sikka dalam Wilayah Pusat Pengembangan II

Kabupaten Sikka memiliki posisi strategis sebagai bagian dari Wilayah Pusat Pengembangan (WPP) II, yaitu Pulau Flores. Wilayah ini meliputi Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata, dengan potensi pengembangan utama di bidang perikanan, perindustrian, perkebunan, dan pariwisata. Sikka juga berpotensi menjadi pusat kegiatan industri dan jasa, serta simpul ekspor-impor yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Penetapan Sikka sebagai bagian dari WPP II menandai perannya sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan di kawasan timur Indonesia. Sikka memiliki peluang untuk menjadi simpul dalam distribusi dan perdagangan antarwilayah melalui pemanfaatan pelabuhan laut, bandara, dan jaringan jalan nasional. Ini akan memperkuat konektivitas logistik serta mempercepat arus barang dan jasa dari dan ke luar NTT, termasuk kegiatan ekspor-impor komoditas unggulan daerah. Hal ini membuka peluang bagi Sikka untuk menarik investor dengan menyediakan kawasan industri terpadu, insentif usaha, serta dukungan infrastruktur dasar dan penataan tata ruang yang mendukung aktivitas ekonomi skala menengah hingga besar.

3) Kemajuan pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan per kapita yang tumbuh pesat

Indonesia telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2005 hingga 2022. Peningkatan ini tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita, stabilitas inflasi yang terjaga, dan stabilitas ekonomi yang terjaga pula. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia telah mengalami perkembangan positif dalam menghadapi tekanan global dan mendapat pengakuan yang semakin luas di kancah internasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif memberikan peluang bagi Kabupaten Sikka untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, perkembangan ekonomi daerah yang meningkat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.

4) Kemiskinan dan ketimpangan menurun

Tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka secara nasional telah mengalami penurunan yang signifikan. Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,57 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,86 persen pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa Indonesia berhasil mengurangi disparitas sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan secara nasional dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sikka. Penurunan kemiskinan secara nasional dapat memicu peningkatan alokasi dana pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk Kabupaten Sikka. Alokasi dana yang lebih besar dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan infrastruktur yang dapat membantu

mengurangi kemiskinan di tingkat lokal.Penurunan kemiskinan secara nasional juga dapat memengaruhi program-program transfer dan bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Sikka. Dengan adanya peningkatan dana dari pemerintah pusat untuk program-program ini, maka dapat diharapkan bahwa lebih banyak penduduk di Kabupaten Sikka yang akan menerima manfaat dari program-program tersebut. Selain itu, dengan penurunan kemiskinan secara nasional, dapat diharapkan peningkatan akses dan kualitas layanan publik ke daerah-daerah terutama yang berada di daerah terpencil, terisolir, atau tertinggal di Kabupaten Sikka. Infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi, dapat meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial.

5) Bonus Demografi

Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Bonus demografi merupakan fenomena yang memberikan kesempatan besar untuk memajukan ekonomi dan kehidupan sosial. Dukungan untuk peluang positif bonus demografi semakin diperkuat dengan peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kemajuan pembangunan SDM terlihat dari peningkatan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,77 persen per tahun dari tahun 2010 hingga 2022. Hal ini mencerminkan peningkatan status kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan wilayah. Dengan bonus demografi, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan pasokan tenaga kerja di Kabupaten Sikka. Dengan memiliki lebih banyak pekerja muda, Kabupaten Sikka dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat jika potensi tenaga kerja ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Meskipun bonus demografi menawarkan potensi untuk pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sikka juga perlu menghadapi tantangan dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi jumlah penduduk usia produktif yang meningkat. Dibutuhkan investasi yang besar dalam sektor pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks.

Bonus demografi juga dapat mengakibatkan peningkatan permintaan konsumsi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sikka. Dengan lebih banyak penduduk usia produktif yang memiliki pendapatan, permintaan akan barang dan jasa juga dapat meningkat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Sikka. Dengan pertumbuhan populasi yang cepat, Kabupaten Sikka juga dapat menjadi target investasi bagi sektor-sektor seperti infrastruktur, perumahan, dan industri. Pemerintah dan investor swasta dapat melihat potensi pasar yang besar di Kabupaten Sikka, yang mendorong pengembangan infrastruktur dan meningkatkan aksesibilitas ke wilayah tersebut. Di sisi yang lain, bonus demografi juga dapat menimbulkan peningkatan permintaan akan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi di Kabupaten Sikka. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan diri untuk meningkatkan kapasitas layanan publik agar dapat memenuhi kebutuhan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi.

6) Daya saing sumber daya manusia membaik

Indonesia telah mencapai peningkatan signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam meningkatkan daya saingnya. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,77 persen hingga tahun 2022. Peningkatan IPM menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakatnya secara keseluruhan. Capaian ini menandai peningkatan angka rata-rata tahun sekolah juga mencerminkan

peningkatan dalam bidang pendidikan, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM. Dengan demikian, perbaikan dalam daya saing SDM Indonesia memberikan harapan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan termasuk masyarakat di Kabupaten Sikka. Peningkatan daya saing SDM secara nasional dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Sikka. Infrastruktur yang baik dan layanan publik yang berkualitas adalah faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, serta memberikan dukungan bagi pembangunan SDM yang lebih baik di tingkat lokal. Kabupaten Sikka dapat memanfaatkan kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan pembangunan SDM. Melalui kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, Kabupaten Sikka dapat memperoleh dukungan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan daya saing SDM lokalnya.

7) Pesatnya pembangunan infrastruktur

Hingga tahun 2024, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur yang mencakup konektivitas darat, laut, udara, dan energi. Pemerintah telah menyelesaikan berbagai proyek strategis nasional seperti pembangunan 2.040 km jalan tol, 143 pelabuhan, 27 bandara, serta 42 bendungan baru (Data Kementerian PUPR dan Bappenas). Selain itu, program Tol Laut dan Jembatan Udara terus diperluas untuk mendukung konektivitas antarwilayah, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pembangunan jalur kereta api dan penyediaan akses listrik ke daerah-daerah terpencil juga menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur dasar nasional. Tren pesatnya pembangunan infrastruktur ini menjadi peluang strategis bagi daerah-daerah seperti Kabupaten Sikka, terutama dalam mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan infrastruktur konektivitas dan logistik akan membuka akses yang lebih luas terhadap pasar, memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, dan industri lokal, serta memperkuat rantai pasok ekonomi daerah. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, energi, dan teknologi digital memberi peluang percepatan peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, dan inklusi sosial di wilayah perdesaan dan pesisir. Dengan memanfaatkan sinergi kebijakan pusat dan daerah, serta penguatan perencanaan tata ruang dan kesiapan infrastruktur pendukung lokal, Kabupaten Sikka berpeluang mengintegrasikan diri dalam jaringan ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan. Terlebih, arah kebijakan RPJMN 2025–2029 menekankan transformasi ekonomi inklusif berbasis wilayah dan konektivitas, yang dapat dijadikan momentum bagi Sikka untuk mempercepat pembangunan kawasan strategis berbasis potensi lokal.

8) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat

Indonesia saat ini semakin diakui sebagai kekuatan regional dan global yang berpengaruh, baik secara ekonomi maupun diplomatik. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai US$1,42 triliun pada tahun 2023 (*sumber:* IMF, World Economic Outlook), Indonesia mempertahankan posisinya sebagai ekonomi terbesar ke-16 dunia dan terbesar di ASEAN. Status Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota tetap G20 semakin memperkuat legitimasi internasional, terutama dalam isu-isu strategis seperti transisi energi, ketahanan pangan, dan reformasi arsitektur keuangan global. Kinerja demokrasi Indonesia juga menunjukkan perbaikan. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencatat skor 80,5 pada tahun 2023, tertinggi dalam dua dekade terakhir, menunjukkan kemajuan dalam transparansi pemerintahan, kebebasan berekspresi, dan partisipasi publik. Di sektor pertahanan, kontribusi industri dalam negeri terhadap

pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) mencapai 58,9 persen pada 2022, mencerminkan kemandirian dan kapasitas teknologi nasional yang terus berkembang, dengan ruang besar untuk riset dan inovasi kolaboratif.
Peningkatan reputasi dan pengaruh Indonesia di dunia internasional dapat membuka pintu bagi Kabupaten Sikka untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap sumber daya dan investasi asing. Hal ini dapat meningkatkan potensi pembangunan infrastruktur, industri, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya di Kabupaten Sikka, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya, kepemimpinan yang kuat dan pengaruh yang meningkat dari Indonesia di dunia internasional dapat membantu mempromosikan potensi pariwisata dan investasi di Kabupaten Sikka. Kabupaten Sikka dapat menarik minat wisatawan dan investor asing dengan memanfaatkan citra positif Indonesia sebagai tujuan yang menarik untuk dikunjungi dan diinvestasikan. Selain itu, Peningkatan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional juga dapat membuka pintu bagi Kabupaten Sikka untuk memperluas jaringan kerja sama internasional. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lain di luar negeri dapat membawa manfaat dalam bentuk pertukaran pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam pembangunan lokal.

9) Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) menurun

Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan rendah karbon dan pengendalian perubahan iklim. Berdasarkan laporan *Indonesia's Third Biennial Update Report* (BUR) dan *Nationally Determined Contribution* (NDC)2023, pemerintah telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) secara kumulatif sebesar 7,8 $GtCO_2e$ sejak 2010 hingga 2022. Penurunan ini setara dengan 29,4 persen terhadap baseline dalam skenario tanpa bantuan internasional, dan hingga 41 persen jika didukung oleh kerja sama internasional, sesuai target NDC Indonesia tahun 2030. Penurunan intensitas GRK ini didorong oleh berbagai program pembangunan rendah karbon, terutama pada sektor berbasis lahan (pertanian, kehutanan), energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan transportasi ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah telah menginisiasi dan memperkuat berbagai sistem peringatan dini kebencanaan seperti *Tsunami Early Warning System* (TEWS), *Meteorological Early Warning System* (MEWS), *Flood Forecasting and Early Warning System* (FFEWS), dan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan (*Karhutla Monitoring System*), yang semakin terintegrasi dengan pendekatan digital dan spasial.

Penurunan intensitas GRK ini menciptakan peluang penting bagi Kabupaten Sikka, yang merupakan salah satu daerah rawan bencana hidrometeorologis dan geologis di kawasan timur Indonesia. Dengan berkurangnya emisi GRK secara nasional, risiko bencana yang dipicu oleh perubahan iklim seperti banjir, kekeringan ekstrem, abrasi pantai, dan gagal panen akibat cuaca ekstrem dapat ditekan. Hal ini sangat relevan bagi Sikka yang memiliki garis pantai panjang, ekosistem pesisir yang rentan, serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata alam. Selain itu, penurunan emisi GRK akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta mendukung pengembangan ekonomi hijau dan energi bersih yang dapat membuka peluang investasi baru di bidang energi surya, konservasi mangrove, ekowisata, dan pertanian berkelanjutan.

10) Kebijakan pusat regulasi Satu Data dan SPBE

Dalam rangka mendukung pengembangan tata kelola yang berbasis digital, regulasi Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan dalam rangka menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi, andal dan dapat dipertanggungjawabkan. SDI diterapkan dalam rangka terciptanya ekosistem data yang terintegrasi dan memenuhi standar baku yang dapat diakses oleh seluruh kalangan

masyarakat. Sehingga dengan adanya penerapan ini, dapat dicapai transparansi dalam pemerintahan, sekaligus memenuhi akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Harmonisasi data ini akan memudahkan perangkat daerah untuk dapat menyusun kebijakan yang berbasis data. Selanjutnya pada sistem SPBE merujuk pada kerangka besar untuk melakukan proses transformasi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, hal ini dilakukan guna menjawab tantangan baik di tingkat global, nasional dan regional yang semakin meningkat. SPBE tidak hanya berbicara terkait teknis pelaksanaan, namun juga mencakup keseluruhan seperti pengawasan, perencanaan, kebijakan serta kapasitas SDM. Kedua kebijakan ini dapat menjadi pendukung dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Sikka yang saat ini diarahkan pada transformasi digital.

Isu strategis nasional yang dapat menjadi ancaman untuk pembangunan di Kabupaten Sikka, adalah:

1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 secara resmi mencoret PPI Alok dari Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2023 yang secara resmi menghapus Pelabuhan Perikanan Alok (PPI Alok) dari Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) menimbulkan dampak signifikan bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sikka. Pencoretan ini tidak hanya menurunkan status kelembagaan dan strategis PPI Alok di tingkat nasional, tetapi juga secara langsung menutup akses Kabupaten Sikka terhadap berbagai program pembangunan perikanan tangkap yang difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dampak praktis dari kebijakan ini sangat dirasakan oleh para nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Sikka. Kini mereka menghadapi beban administratif dan biaya tambahan karena keharusan mengurus perizinan penangkapan ikan melalui Kabupaten Flores Timur, satu-satunya wilayah di sekitar yang pelabuhannya masih tercatat dalam sistem nasional. Hal ini tidak hanya memperpanjang proses birokrasi, tetapi juga menimbulkan ketimpangan pelayanan publik serta ketidakadilan administratif yang merugikan pelaku ekonomi kelautan di Sikka.

Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan kebijakan dan pengakuan kelembagaan, di mana wilayah yang secara faktual memiliki potensi sumber daya kelautan dan kapasitas nelayan yang besar tidak memperoleh posisi strategis yang semestinya dalam sistem nasional. Padahal, Kabupaten Sikka memiliki garis pantai yang panjang, potensi perikanan tangkap yang besar di perairan Flores, serta komunitas nelayan yang aktif dan bergantung secara langsung pada keberfungsian pelabuhan perikanan tersebut. Jika tidak direspons melalui langkah advokasi dan kolaborasi lintas tingkat pemerintahan, keputusan ini dapat berimplikasi lebih luas terhadap menurunnya daya saing sektor perikanan lokal, tertutupnya peluang bantuan pemerintah pusat, seperti program penguatan armada, modernisasi pelabuhan, pengawasan sumber daya ikan, dan cold storage, menurunnya pendapatan nelayan dan stagnasi ekonomi pesisir, dan melemahnya posisi Kabupaten Sikka dalam jaringan logistik dan distribusi perikanan nasional.

2) Absennya Kabupaten Sikka dalam daftar Calon Lokasi Kampung Nelayan Modern (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Lokasi Kampung Nelayan Modern (Kalamo) tidak mencantumkan Kabupaten Sikka sebagai bagian dari skema nasional tersebut. Ketidakhadiran Sikka dalam daftar program strategis ini merupakan sinyal ancaman bagi inklusivitas pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah timur Indonesia, khususnya bagi daerah yang secara faktual memiliki potensi sumber daya laut dan komunitas nelayan yang signifikan. Program

Kampung Nelayan Modern merupakan salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pendekatan pembangunan terintegrasi—meliputi perbaikan infrastruktur permukiman, penguatan kelembagaan nelayan, penyediaan sarana tangkap dan budidaya, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas pesisir. Dengan tidak disertakannya Kabupaten Sikka dalam daftar calon lokasi, maka daerah ini kehilangan akses terhadap berbagai manfaat program nasional tersebut, termasuk dukungan anggaran infrastruktur, pelatihan SDM nelayan, modernisasi sarana perikanan, dan skema pemberdayaan berbasis kawasan pesisir. Padahal, Kabupaten Sikka memiliki karakteristik wilayah pesisir yang kuat, dengan garis pantai yang panjang, desa-desa nelayan yang aktif, serta kontribusi sektor kelautan dan perikanan yang signifikan terhadap ekonomi lokal. Ketidakhadiran Sikka dalam program Kalamo menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan pusat-daerah, sekaligus melemahkan peluang kabupaten ini dalam mempercepat transformasi sektor perikanan rakyat menuju sistem yang lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

3) Produktivitas rendah

Rata-rata *Total Factor Productivity Index* Indonesia pada tahun 2005-2019 menurun sebesar -0,66 poin. Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya pada tahun 2015-2019 tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,0 persen dan 5,3 persen pada tahun 2022. Selain itu, produktivitas yang rendah telah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial, dan bahkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di bawah 5 persen. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat.

Penurunan produktivitas dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada upaya pembangunan Kabupaten Sikka. Produktivitas yang rendah dapat mengakibatkan keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk pembangunan di Kabupaten Sikka. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terhambat, sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan daerah juga dapat menjadi terbatas, menghambat implementasi proyek-proyek pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sikka.

4) Iptekin dan riset lemah

Komitmen alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi masih rendah hanya 0,28 persen dari PDB yang mana jauh tertinggal dibanding Korea Selatan sebesar 4,81 persen dari PDB, Thailand sebesar 1,31 persen dari PDB dan Malaysia sebesar 1,04 persen dari PDB pada tahun 2020. Padahal, kapasitas IPTEKIN sangat krusial perannya untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dengan alokasi anggaran yang rendah untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Kabupaten Sikka mungkin mengalami keterbatasan dalam mengadopsi inovasi baru dan teknologi canggih. Hal ini dapat menghambat kemajuan ekonomi dan kemampuan daerah untuk bersaing di pasar global yang semakin terhubung. Ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam akses terhadap teknologi dan inovasi yang dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di Kabupaten Sikka.

5) Deindustrialisasi dini

Kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun dari 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi 18,34 persen pada tahun 2022 yang disebabkan oleh pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan

adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, terbatasnya dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga tergolong rendah yang diakibatkan lambatnya regenerasi tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

Deindustrialisasi dini cenderung mengurangi keberagaman sektor ekonomi karena industri manufaktur memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian. Jika terjadi deindustrialisasi, maka Kabupaten Sikka yang mungkin belum sepenuhnya terdiversifikasi dalam sektor ekonomi selain pertanian atau perikanan, akan menghadapi risiko ketergantungan yang lebih besar pada sektor-sektor primer tersebut. Selain itu, deindustrialisasi dini dapat meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi di Kabupaten Sikka karena sebagian besar pekerja industri mungkin kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, sementara sektor-sektor lain mungkin tidak mampu menyerap tenaga kerja yang terdampak.

6) Pariwisata di bawah potensinya

Kinerja pariwisata masih di bawah potensinya yang disebabkan masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Selain itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Di sisi lain, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal yang disebabkan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai, transformasi digital yang belum merata, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem yang mendukung komersialisasi belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional masih terbatas.

Terbatasnya atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kapasitas pengelolaan pariwisata berkelanjutan dapat menghambat pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Sikka. Ini bisa berdampak pada pengurangan pendapatan dari industri pariwisata dan kesempatan kerja yang terkait. Selain itu, kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai untuk ekonomi kreatif dapat menghambat pertumbuhan industri ini di Kabupaten Sikka. Ini mengurangi potensi pendapatan dan kesempatan kerja dari sektor ekonomi kreatif seperti seni, kerajinan, dan industri kreatif lainnya. Sementara, perubahan preferensi pasar dan distrupsi teknologi serta digitalisasi dapat membuat industri lokal di Kabupaten Sikka semakin kesulitan bersaing. Jika tidak diantisipasi dengan baik, ini dapat mengancam keberlangsungan usaha-usaha lokal dan berdampak pada penurunan pendapatan dan lapangan kerja.

7) Ekonomi laut belum optimal

Optimalisasi Ekonomi Biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga PDB Kemaritiman masih berada pada level 7,60 persen. Kontribusi yang rendah tersebut disebabkan karena belum optimalnya tata kelola Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan emerging sector lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa isu seperti rendahnya penangan sampah plastik yang mencemari laut, tingginya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

Rendahnya kontribusi sektor kemaritiman terhadap PDB Kemaritiman menunjukkan bahwa potensi Ekonomi Biru di Kabupaten Sikka belum dimanfaatkan secara optimal. Jika ini terus berlangsung, maka hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi pendapatan serta kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Tata kelola Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan yang belum optimal dapat menghambat pertumbuhan sektor perikanan di Kabupaten Sikka. Ini bisa mengurangi pendapatan nelayan dan pelaku usaha perikanan serta berdampak negatif pada ketahanan pangan lokal.

Kurangnya diversifikasi industri dan pengembangan sektor-sektor baru yang memanfaatkan sumber daya laut dapat membuat Kabupaten Sikka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas laut tertentu dan berpotensi merugikan ekonomi daerah. Kondisi ini akan semakin parah oleh terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan dapat menghambat inovasi dan peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya laut di Kabupaten Sikka. Hal ini dapat mengurangi daya saing sektor kemaritiman lokal dalam pasar global. Sementara, isu lingkungan maritim seperti pencemaran plastik, kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF), serta tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut yang belum optimal dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan ekosistem laut di sekitar Kabupaten Sikka. Ini dapat merugikan sektor pariwisata dan perikanan, serta mengurangi daya tarik wilayah tersebut sebagai destinasi wisata.

8) Kontribusi UMKM dan koperasi Kecil

UMKM dan koperasi mempunyai peran besar dalam serapan tenaga kerja yaitu sebesar 96,92 persen pada tahun 2019, namun kontribusi terhadap perekonomian masih rendah. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB masih 1,07 persen pada tahun 2019. Tantangan yang harus dihadapi UMKM adalah pekerja UMKM yang berkeahlian rendah (low-skilled workers), UMKM masih bergerak pada sektor yang bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak pada sektor riil.

Kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian yang masih rendah ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka karena UMKM dan koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi lokal. Sementara, keterbatasan keahlian dan keterampilan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Sikka akan menghambat produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga memengaruhi daya saing dan daya tarik pasar bagi produk-produk dari Kabupaten Sikka. Rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi dapat mengurangi nilai tambah lokal dan keterkaitan dengan pasar yang lebih luas. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Sikka.

9) Infrastruktur dan literasi digital rendah

Tantangan dalam pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Masyarakat yang terjangkau jaringan 4G berkualitas dan kecepatan internet yang memadai masih terbatas dan tidak merata. Jumlah pengguna internet hanya 62,1 persen dari total populasi (2021) yang relatif tertinggal dibanding negara sebanding yaitu Malaysia sebesar 96,8 persen dan Thailand sebesar 85,3 persen. Kesiapan infrastruktur TIK yang masih rendah, seperti rendahnya penetrasi jaringan dan kapasitas data center yang terbatas, dapat menghambat akses masyarakat Kabupaten Sikka terhadap teknologi digital. Hal ini dapat mengurangi

kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan publik, pendidikan online, dan kesempatan ekonomi digital. Selanjutnya, keterbatasan dalam manajemen spektrum TIK dapat menghambat pengembangan jaringan yang lebih luas dan berkualitas di Kabupaten Sikka. Hal ini dapat menyulitkan upaya untuk meningkatkan konektivitas internet dan layanan telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sikka.

10) Pembangunan belum berkelanjutan

Pembangunan kebudayaan masih rendah sebagaimana tercermin pada indeks pembangunan kebudayaan masih 51,90 pada tahun 2021. Pembangunan keluarga juga masih rendah sebagaimana terlihat pada Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang baru mencapai 58,49 di tahun 2022. Sementara, kerukunan umat beragama masih lemah yang terlihat pada Indeks Kerukunan Umat Beragama masih sebesar 73,09 pada tahun 2022. Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender masih cukup tinggi yaitu, 0,458 pada tahun 2022. Kondisi nasional ini dapat menghambat pengembangan pariwisata budaya dan industri kreatif yang menjadi potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sikka, sekaligus dapat menggerus kebanggaan dan kesejahteraan masyarakat.

Tingginya Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan pengambilan keputusan antara pria dan wanita. Tentu saja, kondisi ketimpangan gender yang ada secara nasional dapat berpengaruh langsung pada pembangunan di daerah, termasuk di Kabupaten Sikka. Ketimpangan gender yang terjadi di tingkat nasional mencerminkan adanya pola-pola, norma-norma, dan struktur sosial yang mungkin juga terdapat dalam skala lokal, meskipun dengan variasi yang mungkin. Ketimpangan gender yang terjadi di tingkat nasional dapat memengaruhi alokasi sumber daya dan kebijakan pembangunan yang diterapkan di daerah. Misalnya, jika ada ketimpangan dalam akses perempuan terhadap pendidikan atau peluang kerja di tingkat nasional, ini dapat tercermin dalam prioritas pembangunan yang kurang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi perempuan di Kabupaten Sikka. Sementara, di Kabupaten Sikka, budaya patriarki mengakar dalam struktur sosial dan nilai-nilai tradisional yang masih dominan. n. Akibatnya, perempuan di Kabupaten Sikka menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, atau sumber daya ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat menghambat partisipasi ekonomi dan sosial mereka. Lebih lanjut, hal ini dapat menghambat partisipasi ekonomi dan sosial perempuan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif di wilayah tersebut.

11) Integrasi domestik terbatas serta kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa

Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antarpulau belum optimal sehingga menjadi tantangan utama konektivitas domestik dan global. Pembangunan selama ini lebih terfokus pada Pulau Jawa (Java centris), dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional sebesar 57,8 persen pada tahun 2022. Sedangkan kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih pada angka 20,6 persen pada tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya ketimpangan antar wilayah indonesia pada aspek SDM, infrastruktur, dan anggaran pemerintah daerah.

Ancaman signifikan kondisi ini terhadap pembangunan jangka panjang di Kabupaten Sikka, antara lain: pertama, keterbatasan integrasi domestik, terutama dalam hal konektivitas laut dan udara, menghambat aksesibilitas Kabupaten Sikka ke pasar nasional dan internasional. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan membatasi peluang investasi serta perdagangan dengan daerah lain. Jika konektivitas laut dan udara tidak optimal, maka sulit bagi Kabupaten Sikka untuk mengembangkan sektor pariwisata dan menggerakkan ekonomi lokal secara efektif. Kedua, kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, khususnya dalam alokasi sumber daya dan investasi pembangunan, dapat membuat Kabupaten Sikka terpinggirkan dari pembangunan nasional. Fokus pembangunan yang

cenderung terpusat di Pulau Jawa dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak proporsional, sehingga daerah di luar Jawa, termasuk Kabupaten Sikka, mungkin kurang mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup dari pemerintah pusat. Ketiga, tingginya ketimpangan antar wilayah Indonesia dalam aspek SDM, infrastruktur, dan anggaran pemerintah daerah juga dapat menyulitkan Kabupaten Sikka dalam mengatasi tantangan pembangunan. Kurangnya investasi dalam infrastruktur dan kurangnya dukungan pemerintah daerah dapat menghambat upaya Kabupaten Sikka untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

12) Tata kelola pemerintahan belum optimal

Tata kelola yang belum optimal disebabkan oleh regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun di daerah sebagaimana terdata terdapat 18.045 peraturan menteri dan 18.661 peraturan daerah.. Selain itu, kelembagaan instansi publik masih memiliki struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif sehingga menyebabkan silo dan ego sektoral. Demikian pula, proses bisnis dan tata kelola pemerintahan juga masih terfragmentasi dan tidak adaptif. Pada segi SDM aparatur, saat ini manajemen talenta belum sepenuhnya terimplementasi pada kementerian/ lembaga/daerah. ASN juga cenderung mempunyai posisi yang rentan terhadap intervensi politik. Data menunjukkan bahwa terdapat 1.703 pengaduan tentang pelanggaran netralitas ASN pada periode 2020-2022. Lalu, kualitas pelayanan publik dan proses pembangunan juga masih belum merata dan belum memenuhi harapan masyarakat. Selanjutnya, masih terdapat disparitas implementasi transformasi digital pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang belum optimal memiliki dampak yang signifikan pada ancaman pembangunan di Kabupaten Sikka ke depan. Pertama, kelembagaan publik yang masih memiliki struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif dapat menghambat koordinasi antarinstansi dan menyebabkan tumpang tindih dalam kebijakan serta program pembangunan. Hal ini dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya serta memperlambat proses pembangunan di Kabupaten Sikka. Kedua, kekurangan dalam manajemen talenta dan rentannya ASN terhadap intervensi politik dapat mengganggu kinerja birokrasi dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Jika ASN terlibat dalam intervensi politik, maka keputusan dan kebijakan yang diambil mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga mengurangi kualitas pelayanan publik dan proses pembangunan. Ketiga, disparitas dalam implementasi transformasi digital pemerintahan juga dapat menjadi hambatan bagi pembangunan di Kabupaten Sikka. Kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi dalam proses pelayanan publik dan pengelolaan administrasi dapat menghambat efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

13) Kepastian dan penegakan hukum masih lemah

Potensi pelanggaran HAM masih tinggi, pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal dan pengawasan institusi penegak hukum masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah merupakan hal-hal yang harus dibenahi. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Ketidakpastian dan lemahnya penegakan hukum memiliki dampak yang serius terhadap ancaman pembangunan di Kabupaten Sikka ke depan. Pertama, tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Sikka. Pelanggaran HAM seperti diskriminasi, kekerasan, atau penindasan dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat dan menghambat partisipasi aktif serta kontribusi positif dari seluruh anggota masyarakat dalam pembangunan. Kedua, pemulihan

aset dari tindak pidana yang belum optimal dapat memberikan kesan bahwa tindakan kriminal tidak dihukum secara tegas, sehingga memperkuat budaya pelanggaran hukum dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Hal ini dapat memperburuk masalah keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sikka serta menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, lemahnya pengawasan institusi penegak hukum dapat memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela. Praktik KKN ini dapat menghambat alokasi sumber daya yang efisien, serta merugikan masyarakat dengan memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi. Keempat, budaya hukum yang rendah dalam masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum dapat menghambat kepatuhan terhadap aturan hukum dan proses penegakan hukum yang adil. Kurangnya kesadaran akan pentingnya hukum dan kepatuhan terhadapnya dapat memperkuat sikap yang tidak bertanggung jawab dan merugikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

14) Demokratisasi belum optimal

Terdapat beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi masih belum optimal. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terbaru diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. Pada aspek politik, demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh antara lain adanya kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bag masyarakat sipil.

Masalah integritas dalam partai politik secara nasional dapat menciptakan ketidakstabilan politik yang berpotensi merembet ke daerah. Jika partai politik di tingkat nasional mengalami masalah integritas seperti korupsi atau praktik-praktik tidak etis lainnya, maka ini dapat mengganggu stabilitas politik di Kabupaten Sikka. Ketidakstabilan politik dapat menghambat proses pembangunan dan menciptakan ketidakpastian bagi investor dan masyarakat setempat. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah yang belum diutamakan secara nasional dapat menciptakan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan. Jika pemerintah pusat tidak memprioritaskan keterbukaan dan akuntabilitas, maka ini dapat menciptakan ruang untuk praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak negatif pada pembangunan di daerah, termasuk Kabupaten Sikka.

c. Isu Strategis Internasional

Terdapat isu-isu strategis internasional atau global yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sikka, yaitu:

1) Bonus Demografi global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Penduduk dunia diprediksi akan berpusat di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan negara-negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi daya tarik bagi para investor pada kawasan tersebut. Di sisi lain, kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di kawasan Asia. Dengan adanya bonus demografi ini, tentunya Indonesia memerlukan strategi dan dukungan dari masing-masing daerah untuk dapat memaksimalkan peluang tersebut.

Dengan perkembangan demografi global yang menyoroti pertumbuhan populasi di kawasan Asia, termasuk Indonesia, Kabupaten Sikka dapat mengantisipasi peningkatan permintaan pasar atas berbagai komoditas. Hal ini memberikan peluang ekonomi bagi daerah tersebut, baik melalui peningkatan produksi lokal maupun melalui pemanfaatan sektor pariwisata yang bisa menjadi daya tarik bagi investor. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang kuat, Kabupaten Sikka dapat memanfaatkan bonus demografi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2) Geopolitik dan geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Hal ini berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan utama dari isu ini adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru ini telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Krisis di berbagai sektor dapat menjadi ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Hal ini menyebabkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi secara global. Pada aspek geoekonomi, saat ini sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di negara berkembang melihat ketergantungan yang tinggi akan ekspor komoditas.

Dinamika geopolitik global yang diproyeksikan hingga tahun 2045 akan memberikan dampak yang signifikan terhadap Kabupaten Sikka, terutama dalam hal ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Peluang terbuka bagi kesempatan kerja dan alih teknologi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, potensi konflik dan krisis keamanan dapat mengancam stabilitas sosial di tengah perubahan tersebut. Ketidakstabilan ekonomi global juga berpotensi mengurangi dana yang tersedia untuk pengembangan infrastruktur, yang menjadi tulang punggung untuk pertumbuhan wilayah.

3) Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi telah berdampak pada disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan ini memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi tersebut perlu ditopang oleh tingkat literasi pola pikir yang baik agar mampu memanfaatkan teknologi yang berkembang secara maksimal untuk menghindari adanya disrupsi teknologi.

Perkembangan teknologi memiliki dampak yang beragam bagi Kabupaten Sikka. Dari segi ekonomi, teknologi membuka peluang untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas di setiap sektor. Namun, tantangan muncul dalam hal kesiapan masyarakat untuk mengadopsi teknologi baru secara adaptif dan literasi pola pikir yang baik. Secara positif, teknologi memberikan akses informasi digital yang mudah untuk mendukung perkembangan pendidikan dan kesehatan. Namun, ancaman terhadap privasi dan keamanan informasi juga perlu diwaspadai dengan melihat kesiapan dari infrastruktur yang tersedia saat ini. Akan tetapi, teknologi juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan pelayanan publik, tetapi ketersediaan infrastruktur telekomunikasi menjadi krusial mengingat konektivitas yang belum memadai. Sementara itu, perhatian terhadap lingkungan hidup menjadi penting karena perkembangan teknologi dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam jika tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

4) Konstelasi perdagangan global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian negara berkembang diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian

global menggantikan negara maju. Selain itu, peningkatan pendapatan dan proyeksi bonus demografi di kawasan Asia-Afrika mendorong perdagangan bergerak ke kawasan yang memiliki kebutuhan penduduk yang tinggi. Penerapan GVC memberikan peluang kerja sama global dalam memproduksi berbagai komoditas ekspor.

Isu Megatrend 2045 tentang Konstelasi Perdagangan Global memberikan potensi peluang bagi Kabupaten Sikka. Secara ekonomi, peningkatan permintaan pasar atas berbagai komoditas dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dari segi SDM, Kabupaten Sikka dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia lokal untuk memenuhi kebutuhan industri yang berkembang. Namun, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari perdagangan global tersebar merata dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Infrastruktur wilayah juga perlu diperkuat agar Kabupaten Sikka dapat menjadi bagian yang relevan dalam rantai pasok global. Selain itu, perlindungan lingkungan hidup harus diperhatikan secara serius agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak ekosistem lokal yang penting bagi keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, Kabupaten Sikka perlu memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pergeseran perdagangan global ini sambil mengatasi tantangan tata kelola, infrastruktur, dan perlindungan lingkungan hidup untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

5) Tata kelola keuangan global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian negara berkembang diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian global menggantikan negara maju. Selain itu, peningkatan pendapatan dan proyeksi bonus demografi di kawasan Asia-Afrika mendorong perdagangan bergerak ke kawasan yang memiliki kebutuhan penduduk yang tinggi. Penerapan GVC memberikan peluang kerja sama global dalam memproduksi berbagai komoditas ekspor.

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara dan daerah akan sangat bergantung pada perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan negara dan daerah. Dalam konteks Kabupaten Sikka, isu terkait Tata Kelola Keuangan Global memiliki potensi dampak yang signifikan. Sementara pendapatan negara dan daerah bisa meningkat melalui pertumbuhan penerimaan, ancaman terjadi dengan adanya persaingan dari perekonomian global yang bisa mengancam sektor produksi lokal. Dari segi SDM, diperlukan peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja untuk bersaing dalam lingkup global yang lebih terbuka. Tata kelola yang baik akan menjadi kunci untuk mengelola potensi pertumbuhan ekonomi dengan efisien dan transparan. Sementara itu, investasi dalam infrastruktur regional diperlukan untuk mendukung konektivitas dan mobilitas dalam rantai pasok global. Dari perspektif lingkungan hidup, perlu diupayakan kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam yang penting bagi Kabupaten Sikka.

6) Pertumbuhan kelas menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap keseluruhan populasi global. Setiap tahun, sekitar 140 juta individu masuk ke dalam status kelas menengah. Pertumbuhan ini menciptakan peluang ekonomi. Proporsi kelas menengah yang meningkat pesat semakin mendorong penciptaan jenis dan lapangan kerja baru serta kebutuhan konsumsi yang beragam. Jenis pekerjaan baru ini berhubungan dengan teknologi tinggi serta bersifat fleksibel dan memiliki mobilitas yang tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis dan aktivitas ekonomi. Bagi Kabupaten Sikka yang didominasi oleh penduduk dengan usia produktif,

pertumbuhan ini menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan penduduk yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan kelas menengah ini juga menggeser permintaan atas jenis barang dan jasa yang berbeda. Perubahan selera konsumen yang semakin besar akan kesehatan menjadi peluang bagi pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Sikka yang hingga saat ini masih berbasis tradisional (ramah terhadap lingkungan maupun konsumen).

Pertumbuhan kelas menengah secara global membawa potensi peluang besar bagi Kabupaten Sikka. Hal ini dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan penduduk serta mengangkat kesejahteraan masyarakat. Namun, Kabupaten Sikka perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil agar dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Dalam hal tata kelola, diperlukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur wilayah harus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas tenaga kerja. Selain itu, perlu perhatian khusus terhadap dampak lingkungan dari pertumbuhan ekonomi yang cepat, dengan memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

7) Persaingan sumber daya alam (SDA)

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (SDA) akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan SDA sehingga mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran di antaranya efektivitas pengelolaan dan konservasi SDA, pengembangan teknologi, serta perubahan pola konsumsi dan produksi suatu daerah.

Kabupaten Sikka memiliki potensi SDA yang cukup melimpah. Persaingan SDA tentunya akan membawa dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Sikka. Hal ini bisa menjadi peluang untuk mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Namun, dari segi SDM, tantangan akan muncul dalam upaya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan dan konservasi SDA. Selain itu, diperlukan kebijakan yang kuat dan transparan untuk mengatur akses dan pemanfaatan SDA secara adil dan berkelanjutan. Di sisi lain, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Sikka untuk meningkatkan investasi yang lebih besar dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan SDA yang lebih efisien. Namun, upaya konservasi dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi krusial untuk menjaga kelestarian alam dan ekosistem Kabupaten Sikka.

8) Perubahan iklim

The Triple Planetary Crisis yang terdiri dari perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta hilangnya keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena tersebut akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Isu ini mendorong transformasi paradigma pembangunan lama secara business as usual menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Sikka, perubahan iklim dapat memberikan berbagai dampak baik maupun sebaliknya. Ancaman terhadap sektor pertanian akan merugikan, mengingat kabupaten ini bergantung pada sektor tersebut. Selain itu, bencana alam dan perubahan iklim dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur wilayah perlu dipersiapkan untuk menghadapi potensi dampak eksternal yang lebih sering terjadi akibat

perubahan iklim. Lingkungan hidup menjadi rentan terhadap kenaikan suhu, pola hujan yang berubah, dan cuaca ekstrem, yang dapat mengancam sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi ancaman tambahan yang harus diatasi. Oleh karena itu, strategi adaptasi dan mitigasi perlu diimplementasikan secara holistik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk meminimalkan dampak negatif dan memanfaatkan potensi peluang yang muncul.

Keterkaitan Permaslaahan dan Isu Strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.187

NO	Permasalahan	Isu Strategis
1	Kualitas Pendidikan masih rendah	Kualitas Pembangunan Manusia masih rendah
2	Derajat kesehatan Masyarakat masih rendah	
3	Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah	
4	Masih ada kesenjangan pembangunan antar gender	
5	Sektor primer (pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan), yang menjadi penopang PDRB mengalami pertumbuhan yang relatif rendah	Perekonomian Kabupaten Sikka meningkat dengan baik, namun tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah
6	Sektor sekunder belum memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor sekunder yang rendah dengan pertumbuhan yang juga relatif rendah	
7	Sektor Tersier memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi namun demikian belum mampu menarik pertumbuhan ekonomi, karena barang yang diperdagangkan produk mentah sehingga belum menghasilkan nilai tambah	
8	Kualitas aksesibilitas infrastruktur masih rendah	Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah Masih Rendah
9	Masih rendahnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah
10	Akuntabilitas Kinerja masih perlu ditingkatkan	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sikka masih rendah
11	Akuntabilitas Keuangan masih belum optimal	
12	Efektivitas Pemerintahan masih perlu ditingkatkan	
13	Keamanan dan Ketertiban masih perlu diperbaiki	
14	Kualitas pelayanan publik belum baik	

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi cita-cita daerah selama lima tahun yang akan datang untuk dicapai oleh Pemerintah daerah. Perumusan visi juga menjadi fondasi normatif yang menjadi arah dan orientasi strategis bagi penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, visi dirumuskan berdasarkan potensi, masalah, tantangan, peluang pembangunan, dan aspirasi masyarakat.

Perumusan visi pembangunan daerah disusun secara sistematis dengan berbagai pendekatan dan merepresentasikan harapan pembangunan daerah dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka yang terpilih untuk lima tahun ke depan. Visi RPJMD ini diharapkan mampu mengonsolidasikan potensi dan sumber daya daerah secara optimal untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Berikut visi dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029:

"Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru"

Adapun artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi adalah sebagai berikut:

- *Produktif,* dapat dipahami sebagai kemampuan menghasilkan atau menciptakan hasil yang bernilai atau berguna. Dalam konteks ekonomi, produktif juga dapat merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah yang efisien. Dalam teori ekonomi, produktivitas dapat diukur dengan membandingkan keluaran yang dihasilkan dengan faktor-faktor produksi yang digunakan. Dalam hal pembangunan daerah, produktif dimaknai dengan pengoptimalan sumber daya untuk menghasilkan nilai tambah di berbagai sektor, termasuk kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka. Pemerintah berupaya dan bekerja keras memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki daerah untuk mengisi ruang produksi pendukung kegiatan ekonomi.
- *Kreatif,* secara umum merujuk pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide atau solusi yang baru dan original. Kreativitas sering dikaitkan dengan proses berpikir divergen dan imajinatif yang menghasilkan sesuatu yang unik. Menurut teori psikologi, kreativitas dapat diperkuat melalui latihan, pembelajaran, dan lingkungan yang mendukung. Dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Sikka, visi Kreatif dimaknai dengan Meningkatkan kemampuan berinovasi dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan, dan menciptakan ruang yang mampu mendorong, menampung dan menyalurkan daya cipta dan daya kreasi.
- *Unggul,* berarti memiliki kualitas atau keunggulan yang menjadikan sesuatu lebih baik atau lebih superior dibandingkan yang lain. Konsep keunggulan ini juga sering diasosiasikan dengan kompetisi di pasar atau industri, di mana produk atau layanan yang unggul akan lebih diminati oleh konsumen. Dalam teori manajemen, konsep keunggulan kompetitif menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan sebuah perusahaan. Dalam visi Kabupaten Sikka, unggul ditujukan untuk memiliki keunggulan berbasis potensi daerah baik itu SDA maupun SDM, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah yang berkelanjutan.
- *Mandiri,* mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertindak, bekerja, atau hidup tanpa ketergantungan pada pihak lain. Konsep mandiri juga dapat merujuk pada

otonomi, kemandirian, dan kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam teori psikologi perkembangan, kemampuan mandiri merupakan tujuan penting dalam setiap tahap perkembangan individu. Makna Mandiri dalam Visi Kabupaten Sikka mengarah pada kemampuan kebutuhan pokok masyarakat dan pemenuhan layanan dasar yang berorientasi pada kesejahteraan berbasis sumber daya lokal.

- *Menuju Maumere Baru,* merupakan frasa yang menggambarkan arah transformasi dan semangat pembaruan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Maumere Baru tidak hanya merujuk pada perubahan fisik wilayah ibukota, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma pembangunan yang berfokus pada kemajuan ekonomi, modernisasi infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik. Konsep ini juga mengandung cita-cita kolektif untuk menghadirkan wajah baru Kabupaten Sikka yang lebih bersih, tertata, dan berdaya saing, dengan Maumere sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Maumere Baru diharapkan menjadi simbol dari kemajuan peradaban lokal, di mana nilai-nilai budaya tetap lestari namun mampu beradaptasi dengan dinamika zaman melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Dengan demikian, "Menuju Maumere Baru" adalah panggilan untuk melakukan transformasi menyeluruh yang menyeimbangkan antara pembangunan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

3.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum terkait upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Misi juga merupakan komitmen kepala daerah terpilih yang telah mendapatkan legitimasi langsung dari masyarakat. Wujud komitmen kepala daerah ini digambarkan dalam beberapa misi:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul, inovatif, dan berkarakter sosial
2. Meningkatkan distribusi dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan mudah diakses
3. Mewujudkan perekonomian yang stabil, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan (STABIL: progres sama dengan tahun kembali)
4. Mewujudkan infrastruktur antarwilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
6. Meningkatkan kesadaran akan ketertiban hidup bermasyarakat
7. Mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan efisien serta Bebas KKN
8. Mewujudkan Pembangunan yang kolaboratif, integratif dan berkesinambungan.

Secara teknokratis, rumusan misi politis tersebut telah mencerminkan langkah-langkah strategis untuk dapat mewujudkan visi yang diusung. Namun demikian, misi-misi tersebut memerlukan penajaman dan penyesuaian untuk mempertegas fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis daerah dan logika perencanaan yang baik. Oleh karena itu, melalui konsensus antara tim teknokrat dan Kepala Daerah Terpilih, disepakati bahwa misi politis yang telah dirumuskan diselaraskan kembali dengan pendekatan teknokratis berbasis perencanaan yang logis. Berdasarkan hasil penajaman dan penyempurnaan tersebut, berikut merupakan gambaran perubahan misi pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan secara teknokratis:

Gambar 3.1
Perubahan Misi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 Secara Teknokratis

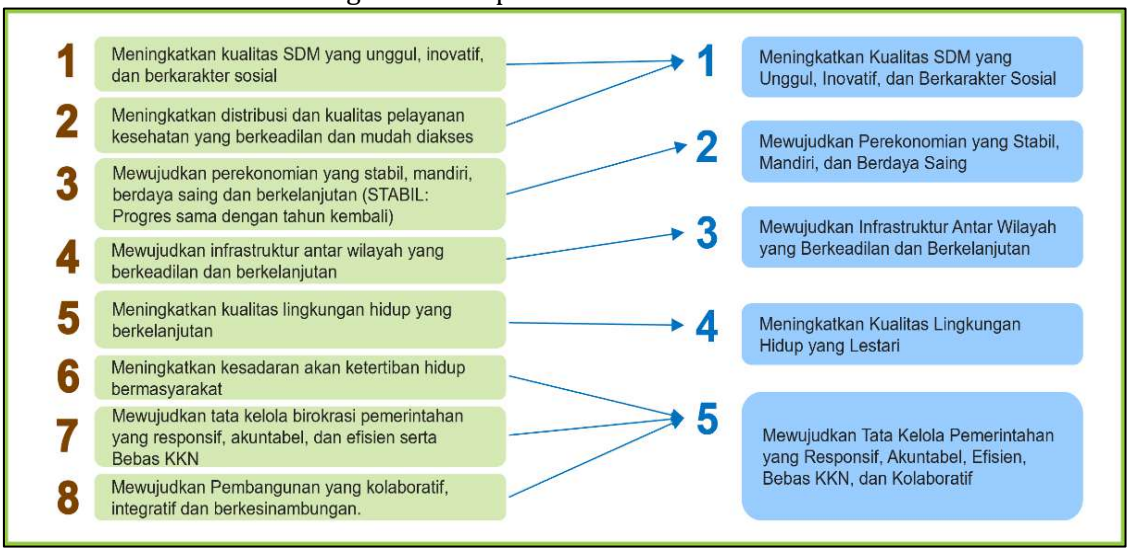

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029:

1. **Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial**
   Misi ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Kualitas SDM tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan formal, tetapi juga dari kemampuan berinovasi, berpikir kritis, memiliki kepekaan sosial, dan nilai-nilai karakter seperti integritas, gotong royong, dan etos kerja. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan mutu layanan pendidikan dari PAUD hingga menengah, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, peningkatan akses layanan kesehatan, serta pembinaan nilai-nilai sosial dan budaya melalui pendidikan karakter, literasi, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. SDM yang unggul dan berkarakter akan mampu menjadi penggerak transformasi ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

2. **Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing**
   Misi ini bertujuan untuk membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Stabilitas ekonomi dicapai melalui penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Kemandirian ekonomi diarahkan pada pengurangan ketergantungan terhadap pasar luar dan peningkatan kemampuan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sementara itu, daya saing ditingkatkan melalui inovasi, digitalisasi ekonomi, hilirisasi komoditas, dan penguatan ekosistem kewirausahaan masyarakat. Misi ini juga mencakup peningkatan investasi daerah, akses ke pasar nasional/internasional, dan penciptaan lapangan kerja produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

3. **Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**
   Misi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah secara merata untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan dan desa. Fokusnya meliputi pengembangan jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat. Aspek keberlanjutan diintegrasikan melalui infrastruktur ramah lingkungan

dan tahan bencana, serta mempertimbangkan aspek tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Misi ini mendukung mobilitas ekonomi, pelayanan publik, serta memperkuat keterhubungan wilayah pesisir, pedalaman, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

4. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan**
   Misi ini merespons tantangan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan lingkungan melalui perlindungan kawasan lindung, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengelolaan sampah terpadu. Edukasi dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan akan diperluas melalui gerakan sadar lingkungan, sekolah hijau, dan komunitas hijau. Misi ini juga selaras dengan arah pembangunan rendah karbon, ketahanan bencana, dan penguatan ekonomi berbasis ekosistem seperti ekowisata dan pertanian ramah lingkungan.

5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif**
   Misi ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan melayani. Pemerintah Kabupaten Sikka akan membangun sistem pelayanan publik yang cepat, berbasis digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penguatan sistem pengawasan internal, manajemen kinerja, dan pelaporan yang akuntabel menjadi prioritas untuk mencegah praktik KKN. Efisiensi anggaran dan proses birokrasi didorong melalui simplifikasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Di samping itu, kolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan diperluas untuk mendorong partisipasi dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 selaras dengan visi dan misi jangka panjang yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045. Keselarasan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045

Visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029		**Visi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045**
"Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru"	**SELARAS**	"Nian(g) Tanah Sikka Sebagai Kawasan Sentra Produksi Terpadu Bertaraf Internasional yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"
Misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029		**Misi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045**

Visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029		Visi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045
Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial	**SELARAS**	**Misi 1** Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Sejahtera **Misi 5** Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang inklusif dan tangguh **Misi 8** Mewujudkan pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berkesinambungan
Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing	**SELARAS**	**Misi 2** Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing **Misi 5** Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang inklusif dan tangguh **Misi 8** Mewujudkan pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berkesinambungan
Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	**SELARAS**	**Misi 6** Mewujudkan infrastruktur antarwilayah yang berkeadilan **Misi 8** Mewujudkan pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berkesinambungan
Misi 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan	**SELARAS**	**Misi 5** Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang inklusif dan tangguh **Misi 7** Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan **Misi 8** Mewujudkan pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berkesinambungan
Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif	**SELARAS**	**Misi 3** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Akuntabel **Misi 4** Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat **Misi 8** Mewujudkan pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berkesinambungan

Tabel keselarasan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan visi dan misi RPJPD kabupaten sikka Tahun 2025-2045 menunjukkan visi jangka menengah dalam RPJMD memiliki orientasi pada penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar utama

pembangunan daerah. Kata kunci "Produktif, Kreatif, Unggul, dan Mandiri" menekankan pembangunan masyarakat yang inovatif, berdaya saing, dan mampu mengelola potensi daerah secara optimal, sementara "Maumere Baru" menjadi simbol transformasi wilayah baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Sementara itu, visi jangka panjang RPJPD menetapkan arah strategis Kabupaten Sikka sebagai kawasan sentra produksi bertaraf internasional, yang menekankan peran daerah dalam rantai ekonomi global, serta menargetkan keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang. Kedua visi tersebut selaras karena RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 berperan sebagai fondasi atau tahapan awal atau periode pertama dalam perspektif pembangunan jangka panjang dalam membangun kapasitas masyarakat yang akan mendukung terwujudnya visi besar RPJPD. Nilai-nilai produktivitas, kemandirian, dan keunggulan yang dibangun dalam RPJMD menjadi prasyarat untuk menjadikan Sikka sebagai pusat produksi internasional yang maju dan berkelanjutan. Visi RPJMD memperkuat dimensi SDM dan inovasi lokal, sedangkan visi RPJPD mengarah pada transformasi struktural dan kawasan ekonomi internasional, yang bersifat jangka panjang dan berorientasi kawasan. Selanjutnya, keselarasan misi antara RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 dan RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2045 menunjukkan kesinambungan arah kebijakan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang. Misi dalam RPJMD lebih berfokus pada penguatan pondasi pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi lokal, transformasi tata kelola pemerintahan, dan pengembangan infrastruktur dasar. Ini selaras dengan misi jangka panjang dalam RPJPD yang menargetkan transformasi struktural dan penguatan posisi Sikka sebagai sentra produksi internasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 juga memiliki keselarasan dengan visi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan Visi RPJMN 2025-2029 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2
Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan Visi RPJMN 2025-2029

Visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029	Visi RPJMN Tahun 2025-2029
Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru	NTT Maju, Sehat Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Gambar keselarasan visi di atas menunjukkan bahwa visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 untuk mendorong masyarakat yang produktif dan unggul sejalan dengan semangat RPJMD Provinsi NTT yang ingin menciptakan masyarakat yang cerdas dan sejahtera, dan mendukung arah nasional dalam mencetak SDM unggul untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sementara, kata kunci "mandiri" dan "kreatif" dari visi Sikka mendukung cita-cita NTT menjadi maju dan berkelanjutan, serta nasional yang menekankan kemandirian ekonomi dan inovasi. secara substansi, Terdapat kesamaan nilai antara visi daerah, provinsi, dan nasional: yaitu kemajuan, kemandirian, inovasi, dan kesejahteraan. Demikian juga dengan misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 memiliki keselarasan dengan misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan misi RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-29
Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial	**Misi 2** Memperluas Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Sosial Yang Lebih Inkusif, Terjangkau Dan Mudah Diakses (Sehat)	**Asta Cita 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). **Asta Cita 2** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. **Asta Cita 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
	Misi 3 Menghadirkan Pendidikan Berkualitas Yang Merata, Partisipatif Dan Tepat Sasaran (Cerdas)	
	Misi 4 Mewujudkan Kesejahteraan Kesetaraan Akses, Kualitas Hidup Berkeadilan Dan Madani Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (Sejahtera)	
Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing	**Misi 1** Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Yang Berdaya Saing (Maju)	**Asta Cita 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-29
Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan		**Asta Cita 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. **Asta Cita 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. **Asta Cita 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Misi 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan	**Misi 5** Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Manusia Yang Bijak Serta Pemenuhan HAM Untuk Menciptakan Masa Depan Yang Inklusif (berkelanjutan)	**Asta Cita 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). **Asta Cita 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. **Asta Cita 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif		

Berdasarkan tabel di atas, Misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 menunjukkan keselarasan yang kuat dengan arah pembangunan di tingkat Provinsi NTT maupun nasional (RPJMN 2025–2029). Misi peningkatan kualitas SDM yang unggul, inovatif, dan berkarakter sosial (Misi 1 Sikka) selaras dengan Misi RPJMD NTT yang berfokus pada layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan mudah diakses, serta RPJMN yang menggarisbawahi pembangunan SDM, penguatan generasi muda, dan kesetaraan gender. Misi ekonomi Sikka (Misi 2) yang menekankan stabilitas, kemandirian, dan daya saing, sejalan dengan Misi Provinsi NTT tentang ekonomi berbasis potensi daerah dan Misi RPJMN terkait pertumbuhan ekonomi daerah, ekonomi hijau, dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Di bidang infrastruktur (Misi 3 Sikka), terdapat keselarasan dengan Misi Provinsi NTT dan RPJMN yang sama-sama menekankan infrastruktur berkeadilan, konektivitas wilayah, dan peningkatan akses antarwilayah. Misi peningkatan kualitas lingkungan hidup (Misi 4 Sikka) berpadu dengan misi pembangunan berkelanjutan Provinsi NTT serta misi RPJMN yang menekankan harmoni lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengurangan dampak perubahan iklim. Terakhir, Misi 5 Sikka tentang tata kelola

pemerintahan responsif dan bebas KKN sejalan dengan RPJMN yang menekankan pada penguatan demokrasi, HAM, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, misi Kabupaten Sikka terintegrasi secara vertikal dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.3
Target sasaran Visi RPJPD Kabupaten Sikka Untuk Periode I RPJMD tahun 2025-2029

Sasaran Visi RPJPD	Indikator	Base-line	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pendapatan per kapita yang menggambarkan ekonomi yang stabil, mandiri dan berdaya saing berbasis potensi lokal	PDRB per Kapita (Rp Juta)	18,472.00	19.322.000	20.172.000	21.022.000	21.872.000	22.7222.000
	Kontribusi PDRB Sektor Primer (%)	38.51	38.57	38.63	38.69	38.75	38.81
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	1.94	2.02	2.10	2.18	2.26	2.34
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	12.56	11,51	11,13	10,76	10,38	10,00
	Rasio Gini	0.236	0,2349	0,2355	0,2349	0,2344	0,2338
	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	4.93	5.04	5.16	5.27	5.39	5.50
	Pertumbuhan Ekonomi	3.95	4.09	4.23	4.38	4.52	4.66
Daya saing Kabupaten Sikka di kancah Nasional meningkat	Indeks Inovasi Daerah	34.73	36.73	38,73	40,73	42,73	44,73
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia		71.10	72,24	73,37	74,51	75,65
Penurunan emisi GRK menuju net zero emission dengan pembangun-an yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		74,83	75,21	75,59	75,97	76,35

Setelah dilakukan penyesuaian antara visi dan misi RPJMD Tahun 2025–2029 dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2025–2045, langkah berikutnya adalah memastikan pencapaian target sasaran visi RPJPD Kabupaten Sikka pada periode pertama (RPJMD Tahun 2025–2029). Periode ini memiliki

peran penting sebagai tahap awal dalam meletakkan dasar pencapaian visi jangka panjang daerah, dengan fokus pada pembangunan yang bertahap, berkelanjutan, dan terukur. Target sasaran pada RPJMD periode pertama ini diarahkan untuk membangun fondasi yang kuat di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, periode ini menjadi landasan strategis dalam mewujudkan transformasi pembangunan Kabupaten Sikka menuju visi tahun 2045.

Tabel 3.4
Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJMD Kabupaten Sikka

No	Indikator Makro	Target Daerah					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tranformasi Sosial							
Kesehatan untuk Semua							
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74.48	74.72	74.96	75.20	75.44	75.68
2	Kesehatan ibu dan anak:						
	a. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	32,28	30,24	29,22	28,20	27,18	26,16
3	Penanganan Tuberkulosis						
	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	90	90	90	90
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	90	90	90	90
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,33	98,43	98,48	98,53	98,58	98,63
Pendidikan Berkualitas yang Merata							
5	Hasil Pembelajaran:						
	a. Skor Kompetensi Literasi hasil assessment Tingkat Nasional						
	- SD	52.84	55.34	57.84	60.34	62.84	65.34
	- SMP	66.03	67.13	68.23	69.33	70.43	71.53
	b. Skor Kompetensi Numerasi hasil assessment Tingkat nasional						
	- SD	47.97	50.87	53.77	56.67	59.57	62.47
	- SMP	58.83	60.33	61.83	63.33	64.83	66.33
	c. Iklim Keamanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	-SD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	-SMP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	d. Iklim Kebhinekaan:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	SMP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	e. Iklim Inklusivitas:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	-SD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	-SMP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9.78	10.38	10.98	11.58	12.18	12.67
7	Harapan Lama Sekolah (tahun)	16.47	17.04	17.61	18.17	18.74	19.20
8	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemenuhan Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat							
9	Tingkat Kemiskinan (%)	11.51	11.13	10.76	10.38	10.00	9.62
10	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	21.98	22.06	22.14	22.22	22.30	22.38

No	Indikator Makro	Target Daerah					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Transformasi Ekonomi							
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi							
12	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1.83	1.93	2.03	2.13	2.2	2.33
13	Pengembangan Pariwisata						
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.65
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9	10,9
14	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD							
15	Proporsi Jumlah UMKM Terhadap PDRB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kabupaten (%)	84.48	84.68	84.88	85.08	85.28	85.48
	b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2.04	2.16	2.28	2.41	2.53	2.65
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	10.55	10.61	10.67	10.73	10.79	10.85
	d. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	42.3	43.5	44.7	45.9	47.1	48.3
Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik							
16	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.53	2.50	2.47	2.44	2.41	2.38
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	64.2	64.4	64.6	664.8	65.0	65.2
Tingkat Penguasaan IPTEK							
18	a. Indeks inovasi daerah	36.73	38.73	40.72	42.73	44.73	46.73
Penerapan Ekonomi Hijau							
Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:							
19	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB di luar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Transformasi Digital							
20	Indeks Masyarakat Digital Indonesia						
Produktivitas Ekonomi							
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,00	0,002	0,004	0,006	0,008	0,10
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan						
	a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	76,30	76,96	77,65	78,02	78,55	79,06
	b. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Terhadap Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	c. Indeks Desa Membangun (Indeks Desa)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Transformasi Tata Kelola							
Tata Laksana Pemerintah yang Efektif dan Efisien							
24	Indeks Reformasi Hukum	96.46	96.46	96.46	96.46	96.46	96.46
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00
26	Indeks Pelayanan Publik	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00	3.10
27	Indeks Integritas Kabupaten (hasil SPI)	63.65	64.15	64.65	65.15	65.65	66.15
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi							
Penegakan Peraturan Daerah							
28	Indeks Pembangunan Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Indeks Demokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Angka kriminalitas (per 100.000 penduduk)	90	86	82	78	74	70
31	Persentase penyelesaian konflik	88.24	89.14	89.35	89.50	89.80	89.80
Stabilitas Ekonomi Makro							
32	Rasio PAD Terhadp PDRB (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Makro	Target Daerah					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
33	Tingkat Inflasi (%)	1,816	1,812	1,808	1,804	1,8	1,796
Ketimpangan Antar Wilayah dan Pendapatan Berkurang							
	Ketimpangan Berkurang						
34	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi							
Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju							
35	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	66,5	67	67,5	68	68,5	69
36	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif							
37	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
Lingkungan Hidup Berkualitas							
40	Kualitas LIngkungan Hidup						
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,83	75,21	75,59	75,97	76,35	76,73
	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	51,28	51,52	51,77	52,02	52,26	52,51
	c. Pengelolaan Sampah						
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	50.940,65	51.959,46	52.998,65	54.058,62	55.139,80	56.242,59
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	4,74	5,45	6,27	7,21	8,19	8,21
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan							
41	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						
	a. Ketahanan Energi						
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	99,01	99,15	99,29	99,43	99,57	99,63
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	12.30	12.10	11.90	11.70	11.50	11.30
	c. Ketahanan Air						
	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	772,2	772,2	772,2	772,2	772,2	772,2
	- Persentase Jumlah KK yang Terlayani air bersih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim							
42	Indeks Resiko Bencana (IRB)	140.81	140.31	139.81	139.31	138.31	138.31

Sebagai upaya untuk mengarahkan pembangunan daerah secara lebih fokus dan terukur, Pemerintah Kabupaten Sikka telah menetapkan Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagai instrumen strategis dalam mengawal pencapaian visi jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD. Penetapan target IUP ini menjadi dasar evaluatif serta rujukan dalam perumusan kebijakan, pengendalian kinerja, dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan akuntabel. Indikator utama yang ditetapkan untuk dicapai selama periode pertama RPJMD Tahun 2025–2029 mencakup berbagai aspek pembangunan strategis, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, daya saing daerah, serta pelestarian lingkungan hidup.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Sikka secara keseluruhan. Berdasarkan visi, misi dan permasalahan daerah yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Penjelasan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 berdasarkan misi, dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial

Tujuan 1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing

Tujuan ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Sikka untuk menyiapkan manusia sebagai aktor utama pembangunan yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan teknis, tetapi juga fisik yang sehat, mental yang kuat, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang kokoh. Kualitas SDM yang dimaksud bukan hanya dalam konteks akademik semata, melainkan juga menyangkut kapasitas adaptasi terhadap perubahan, etos kerja produktif, serta daya saing di tingkat lokal, nasional, dan global. Ini menjadi pondasi utama untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi daerah. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing, ditetapkan empat sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal

Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan sistem pendidikan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak-anak dari kelompok rentan, disabilitas, dan wilayah terpencil. Pendidikan yang inklusif menjamin hak belajar bagi semua, sedangkan pendidikan adaptif merespon dinamika zaman, seperti digitalisasi dan tuntutan kompetensi abad 21. Integrasi kearifan lokal ke dalam kurikulum dan proses belajar juga penting untuk memperkuat identitas dan karakter budaya masyarakat Kabupaten Sikka.

Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan

Sasaran ini bertujuan memperkuat sistem layanan kesehatan primer dan rujukan, baik dari sisi infrastruktur, SDM kesehatan, maupun ketersediaan layanan dasar yang mudah diakses. Fokus juga diberikan pada promosi dan pencegahan penyakit, serta penguatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko kesehatan (seperti stunting, penyakit menular, dan penyakit tidak menular). Kemandirian dan keberlanjutan menjadi prinsip utama, agar masyarakat tidak selalu bergantung pada intervensi eksternal untuk hidup sehat.

Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Kehidupan Layak Masyarakat yang Bermartabat

Sasaran ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti perumahan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial. Kehidupan layak mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan agar masyarakat Sikka dapat menjalani hidup yang sejahtera dan bermartabat. Ini termasuk penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan penguatan daya beli masyarakat.

Sasaran 1.1.4 Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sasaran ini menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh kelompok, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, dalam seluruh aspek pembangunan. Sasaran ini mendorong pengarusutamaan gender (PUG) dalam kebijakan dan program daerah, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal (no one left behind), serta memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi melalui pembangunan yang ramah lingkungan dan menjamin keberlanjutan antar generasi.

Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing

Tujuan 2.1 Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka

Tujuan "Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka" adalah salah satu inti dari upaya pembangunan daerah untuk periode 2025-2029, secara spesifik merupakan penjabaran operasional dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Sikka yaitu "Mewujudkan perekonomian yang stabil, mandiri dan berdaya saing". Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka adalah tujuan strategis yang akan diterjemahkan ke dalam program-program dan kegiatan konkret dalam RPJMD 2025-2029. Program-program ini akan berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan, pengembangan UMKM, serta pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, semuanya demi menciptakan masyarakat Sikka yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi, serta memiliki daya saing yang kuat.

Kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah indikator utama keberhasilan pembangunan. Apabila masyarakat sejahtera, maka berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, akan turut membaik. Tujuan ini juga menjadi landasan untuk menciptakan stabilitas ekonomi di Kabupaten Sikka, karena masyarakat yang memiliki daya beli dan pendapatan yang cukup akan berkontribusi pada perputaran ekonomi yang sehat.

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten Sikka, ditetapkan empat sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 2.1.1 Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka

Sasaran pertama yang ingin diciptakan adalah tumbuh kembangnya Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka. Untuk memastikan sasaran ini tercapai dan dapat terukur, keberhasilannya akan dipantau melalui Indikator Pertumbuhan sektor primer (pangan, horti, peternakan, Perkebunan, perikanan. Sasaran ini ditetapkan untuk menjawab permasalahan Sektor primer (pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan) yang menjadi penopang PDRB tidak tumbuh dan berkembang. Laju pertumbuhannya tidak meningkat signifikan. Sasaran ini adalah bagian krusial dari upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Sikka, dan secara spesifik menargetkan sektor pertanian sebagai motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat. Ini bukan hanya tentang meningkatkan produksi, melainkan menjadikan pertanian sebagai fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan bagi Kabupaten Sikka. Sebagian besar masyarakat Sikka masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Mengembangkan sektor ini secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sebagian besar penduduk.

Sasaran 2.1.2 Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal

Sasaran ini merupakan langkah strategis lanjutan dari Sasaran 2.1 yang fokus pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi. Jika Sasaran 2.1 menekankan pada produksi bahan mentah, maka Sasaran 2.2 ini berorientasi pada nilai tambah dan diversifikasi ekonomi melalui industri pengolahan produk pertanian. Ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi lokal yang lebih kuat, tangguh, dan tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas mentah. Bahan mentah pertanian seringkali memiliki harga jual yang rendah. Dengan diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi (misalnya, kopi bubuk dari biji kopi, keripik dari ubi, atau ikan asap dari ikan segar), nilai jual produk akan meningkat secara signifikan. Ini berarti pendapatan petani dan pelaku usaha akan lebih besar. Selain itu ketergantungan pada penjualan bahan mentah membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Industri pengolahan dapat menyerap kelebihan produksi saat panen raya dan

mengubahnya menjadi produk yang lebih tahan lama, sehingga membantu menstabilkan harga dan memberikan kepastian pasar bagi petani.

Keberhasilan Sasaran 2.2 akan diukur melalui dua indikator utama. Indikator pertama adalah Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, indikator ini akan mengukur seberapa pesat peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sikka. Indikator yang kedua adalah Pertumbuhan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), PMTB mencerminkan investasi yang dilakukan dalam bentuk aset tetap (misalnya, pembangunan pabrik, pembelian mesin produksi, atau perluasan fasilitas pengolahan).

Sasaran 2.1.3 Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata

Sasaran ini melengkapi upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Sikka dengan fokus pada sektor tersier, yaitu perdagangan dan pariwisata. Jika sasaran sebelumnya berfokus pada produksi (pertanian) dan pengolahan (industri), sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut dapat didistribusikan, dijual, dan dinikmati, sekaligus menarik pengunjung yang akan membawa dampak ekonomi langsung. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekonomi lokal yang kokoh, beragam, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi pasar dan daya tarik wisata daerah.

Sasaran ini penting karena beberapa alasan. Alasan pertama karena sektor perdagangan adalah jembatan vital antara produsen (petani dan industri pengolahan) dan konsumen. Dengan berkembangnya perdagangan, produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Sikka, sehingga meningkatkan penjualan dan pendapatan. Alasan kedua adalah karena baik sektor perdagangan maupun pariwisata adalah padat karya. Perdagangan membutuhkan pedagang, distributor, dan staf toko. Pariwisata memerlukan pemandu wisata, staf hotel dan restoran, pengelola objek wisata, pengemudi, dan banyak lagi. Ini akan menciptakan banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal. Alasan ketiga adalah pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor terkait, seperti pembangunan hotel, restoran, pusat perbelanjaan, atau fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Alasan keempat adalah Pariwisata menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan keindahan alam, kekayaan budaya, dan produk-produk khas Kabupaten Sikka kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Keberhasilan Sasaran 2.3 akan diukur melalui dua indikator utama yaitu pertumbuhan sektor akomodasi makan minum dan pertumbuhan sektor perdagangan.

Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur Antarwilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tujuan 3.1 Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri

Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri mencerminkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menekankan aspek fisik semata, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, ketangguhan terhadap risiko, dan kemandirian daerah dalam penyediaan layanan dasar. Infrastruktur berkelanjutan berarti dirancang ramah lingkungan, efisien energi, dan mendukung kelestarian sumber daya alam melalui prinsip pembangunan hijau. Infrastruktur tangguh diwujudkan melalui desain adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim, serta sistem manajemen risiko yang terintegrasi sejak tahap perencanaan. Sementara itu, aspek mandiri mengarah pada kemampuan daerah dalam merencanakan, membiayai, mengelola, dan memelihara infrastruktur secara berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak. Tujuan ini penting untuk menjamin pelayanan publik yang merata

dan inklusif antar kawasan, mengurangi ketimpangan spasial, dan memperkuat resiliensi daerah terhadap tekanan sosial dan ekologis. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi strategis bagi pertumbuhan wilayah yang adil dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan

Sasaran ini merupakan landasan strategis dalam pencapaian infrastruktur daerah yang mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Sasaran ini menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur dasar yang memenuhi standar teknis mutu, mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil, dan dirancang untuk tahan terhadap risiko bencana serta perubahan iklim. Cakupan aksesibilitas mencakup konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, jembatan, transportasi publik, serta sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan energi yang efisien. Selain itu, prinsip keberlanjutan mengharuskan infrastruktur tidak hanya dibangun untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang melalui integrasi dengan tata ruang, konservasi lingkungan, dan penggunaan teknologi tepat guna. Dengan demikian, sasaran ini berperan penting dalam menciptakan infrastruktur yang inklusif, adaptif, dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berdaya saing.

Misi 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.

Tujuan 4.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berdaya dukung bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Strategi pencapaiannya meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas udara, air, dan tutupan lahan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Di samping itu, pendekatan pembangunan berkeadilan turut ditekankan melalui partisipasi masyarakat, peningkatan akses kelompok rentan terhadap layanan lingkungan, serta penguatan tata kelola lingkungan yang transparan dan berbasis data. Peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi lingkungan juga menjadi pilar penting untuk mendukung terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan inklusif di tingkat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan fisik, biologis, dan sosial terus membaik guna mendukung kehidupan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Fokus intervensi diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara, dan tanah; penguatan kapasitas sistem pengelolaan limbah dan persampahan; pengendalian pencemaran; serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem strategis, seperti kawasan pesisir, hutan lindung, dan daerah aliran sungai. Sasaran ini juga mencakup peningkatan resiliensi ekosistem terhadap tekanan perubahan iklim, termasuk pencegahan dan mitigasi risiko bencana ekologis. Dengan pendekatan berbasis data dan

kolaboratif, sasaran ini mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga fungsi ekologis dan memperkuat daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif

Tujuan 5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN

Tujuan ini mengarahkan Kabupaten Sikka pada tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta penyelenggaraan yang efisien dan bebas dari KKN. Reformasi birokrasi sebagai landasan akan membantu dalam menghilangkan hambatan dalam pelayanan publik, meningkatkan Kualitas pengambilan keputusan dan mempromosikan keterbukaan dan partisipasi publik. Untuk membangun landasan tersebut, maka dibutuhkan pemerintahan yang responsif, akuntabel dan efisien serta bebas dari KKN. Pemerintahan yang akuntabel baik dari sisi kinerja dan perencanaan akan dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih sistematis dan transparan, serta tertib pada penegakan hukum dan regulasi. Selanjutnya pemerintahan yang efisien hadir dari penyederhanaan birokrasi, penguatan koordinasi dan juga peningkatan Kualitas SDM aparatur. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan tata kelola yang baik, menekankan pada penguatan masyarakat terkait ideologi Pancasila, kerukunan sosial dan juga pendidikan politik. Tata kelola, sebagai perwujudan fungsinya juga turut andil dalam menciptakan Kualitas layanan publik yang lebih baik, berkualitas, cepat dan mudah diakses sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dengan berbasis pada pemanfaatan teknologi digital.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif, akuntabel dan efisien serta bebas KKN., ditetapkan 5 sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 5.1.1 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel

Berfokus pada upaya perwujudan akuntabilitas kinerja yang akuntabel. Sasaran ini berfokus pada peningkatan perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan Kualitas dalam pengawasan pembangunan daerah. Program-program pada sasaran ini nantinya akan berfokus pada perencanaan yang lebih baik, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Termasuk juga peningkatan Kualitas perencanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Pada aspek pengawasan maka akan menyasar pada penyelenggaraan pengawasan serta perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa perencanaan yang disusun sudah berkualitas dan harmonis, serta memastikan bahwa pengawasan berjalan dengan baik. Sasaran ini akan diukur dengan Nilai Sakip Daerah

Sasaran 5.1.2 Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel, diperlukan akuntabilitas keuangan yang baik. Akuntabilitas keuangan yang baik akan diutamakan pada ketepatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pentingnya ketepatan ini guna memastikan bahwa anggaran yang dimiliki digunakan dengan bijak, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas, serta transparansi untuk memastikan bahwa pengelolaan tidak disalahgunakan. Selain itu penting untuk Kabupaten Sikka dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan produktivitas aset daerah, serta pertumbuhan PAD. Kemandirian keuangan akan menciptakan keleluasaan dan ruang bagi Kabupaten Sikka untuk dapat tumbuh sesuai dengan arah kebijakan dan visi yang sudah ditentukan

dalam perencanaan. Sehingga dapat terwujud tata kelola yang baik dan dapat mendorong pembangunan daerah. Sasaran ini akan diukur menggunakan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sasaran 5.1.3 Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan

Sistem pemerintahan yang efektif tidak hanya akan berdampak positif pada tata kelola, namun sistem pemerintahan secara keseluruhan. Sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan data yang trasnparan akan mendorong dalam pengambilan kebijakan yang lebih terbuka, dengan semakin terbukanya informasi ini maka diharapkan dapat mendorong kerjasama antar sektor. Selanjutnya sasaran ini juga sebagai upaya dalam menargetkan peningkatan integritas aparatur melalui transparansi. Selanjutnya, Penggunaan teknologi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tata kelola berjalan dengan efektif, terutama di era dimana jaringan teknologi sudah sangat meluas di Kabupaten Sikka. Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan efektifitas tidak hanya bagi pelayanan namun juga kinerja pemerintah dan sehingga didapatkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kebijakan Publik, dan Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

Sasaran 5.1.4 Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat

Keamanan dan kerukunan masyarakat merupakan bagian integral yang tidak dapat dielakan dalam pelaksanaan fungsi tata kelola pemerintahan. Perwujudan masyarakat yang mandiri akan menjadi fondasi utama dalam stabilitas pemerintahan yang berkeadilan. Keamanan menjamin masyarakat untuk dapat menjalani kehidupannya tanpa adanya gangguan, kerukunan masyarakat mencegah konflik sosial terjadi serta membangun kepercayaan sosial. Hal-hal ini kemudian turut berkontribusi dalam membentuk lingkungan dan kehidupan yang harmonis, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sehingga dengan menyasar pada sasaran ini, dapat dijalankan kebijakan yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendorong kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sasaran ini diukur menggunakan Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas) dan Indeks Ketentraman dan Ketertiban.

Sasaran 5.1.5 Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan jalan menuju penguatan legitimasi pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas serta kesejahteraan yang inklusif. Dengan penguatan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka dapat terbentuk kepercayaan masyarakat, yang kemudian akan berdampak pada efektivitas kebijakan yang lebih baik. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berarti paham bahwa pelayanan dibuat untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat, tidak semata karena kepentingan kaum elit. Sehingga selain terbentuk kepercayaan masyarakat, peningkatan efektivitas kebijakan, dapat terbentuk juga kebijakan berbasis bukti (*evidence based*) atas kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan fondasi pemerintahan yang mempunyai akuntabilitas tidak hanya kepada pejabat, tapi juga kepada masyarakat. Sasaran ini diukur menggunakan Indeks Pelayanan Publik.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Penetapan target atau proyeksi pada setiap indikator tujuan dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2030

Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: **Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru**								
Misi 1: Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial	T1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing	IPM (Indeks)	71,1	72,24	73,37	74,51	75,65	76,79
	S1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif berbasis Kearifan Lokal	RLS (Tahun)	9,78	10,38	10,98	11,58	12,18	12,67
		HLS (Tahun)	16,47	17,04	17,61	18,17	18,74	19,2
	S.2 Meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan	UHH (Angka)	74,48	74,72	74,96	75,2	75,44	75,68
	S3. Meningkatnya Kehidupan Layak masyarakat yang bermartabat	Angka Kemiskinan (Angka)	11,51	11,13	10,76	10,38	10	9,62
		Pengeluaran Per Kapita (Rp Juta/Orang/Bulan	9,463	9,694	9,924	10,155	10,385	10,615
	S.4. Terwujudnya pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan	IPG (Indeks)	89,99	90,04	90,1	90,16	90,22	90,27
		IKG (indeks)	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri dan Berdaya Saing	T2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka	Pendapatan Per Kapita (Rp)	19.322.000	20.172.000	21.022.000	21.872.000	22.722.000	23.572.000
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,95	4,11	4,28	4,44	4,6	4,76
		Rasio Gini (Indeks)	0,236	0,2355	0,2349	0,2344	0,2338	0,233
	S1. Tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal kabupaten Sikka	Pertumbuhan sektor pertanian (%)	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,5
		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	77,72	78,25	78,75	79,22	79,72	80,12
	S.2. Berkembangnya industri pengolahan produk pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	4	4,2	4,4	4,6	4,8	5
		Pertumbuhan PMTB (%)	1,5	1,8	2	2,2	2,4	2,6
	S.3. Terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata	pertumbuhan sektor akomodasi makan minum (%)	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
		Pertumbuhan sektor perdagangan (%)	9,4	9,6	9,8	10	10,2	10,4
Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang	T3.. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri	IKID (Indeks)	57,18	57,57	57,96	58,35	58,74	59,13
	S.1. Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	IKID (Indeks)	57,18	57,57	57,96	58,35	58,74	59,13

Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Berkeadilan dan Berkelanjutan								
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan berkelanjutan	T.4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan	IKLH (Indeks)	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95	73,96
	S.1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	IKLH (Indeks)	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95	73,96
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif.	T.5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	CC	B	B	B	BB	BB
	S.1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	B	B	BB	BB	BB	BB
	S..2. Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	S..3 Terwujudnya Sistim Pemerintahan yang Efektif dan Transparan	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	36,73	38,73	40,73	42,73	44,73	46,73
		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,35	80,35	82,35	84,35	86,35	88,35
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
		Indeks Kebijakan Publik (Indeks)	2,75	3,25	3,7	4	4,25	4,5
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	40	50	60	70	80	90
	S5.1.4. Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas) (Indeks)	90	86	82	78	74	70
		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Indeks)	68	72	76	80	84	86
	S5.1.5. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1

Dengan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah yang dirancang secara strategis tersebut, diharapkan terwujud masyarakat Sikka yang produktif, kreatif, unggul, dan mandiri sebagaimana termuat dalam visi pembangunan jangka menengah daerah. Untuk mengarahkan program dan kegiatan pembangunan secara lebih terukur dan tepat sasaran, maka setiap kata kunci dalam visi dijabarkan ke dalam pemetaan sasaran daerah. Pemetaan ini menjadi dasar dalam perumusan indikator kinerja serta penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Adapun pemetaan sasaran daerah terhadap kata-kata kunci dalam visi "Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul, dan Mandiri Menuju Maumere Baru" disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6
Keterkaitan Kunci dalam Visi dengan Sasaran Daerah

Kata Kunci Visi	Sasaran Daerah	Indikator
Produktif	Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
		Pertumbuhan PMTB
	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kreatif	Meningkatnya Kehidupan Layak Masyarakat yang Bermartabat	Angka Kemiskinan
		Pengeluaran Per Kapita
Unggul	Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal	RLS
		HLS
	Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat Secara Mandiri dan Berkelanjutan	UHH
	Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan	IPG
		IKG
	Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	IKID
	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	IKLH
Mandiri	Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh Melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makan Minum
		Pertumbuhan Sektor Perdagangan
	Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Opini BPK

3.4 Lokus Pembangunan Wilayah

Dalam mencapai pembangunan lima tahun yang efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Sikka telah menetapkan lokasi prioritas berdasarkan kawasan strategis. Melalui pemetaan lokasi yang jelas dapat memastikan pemerataan pembangunan antar wilayah, sehingga daerah yang tertinggal dapat mendapat perhatian khusus. Data lokasi prioritas pembangunan wilayah dalam lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Lokasi Prioritas Berdasarkan Kawasan Strategis

Sektor	Kawasan	Kecamatan
Ekonomi	Pertanian dan Perkebunan	Kecamatan Paga, Kecamatan Mego, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Koting, Kecamatan Nelle, Kecamatan Magepanda
	Peternakan	Kecamatan Magepanda, Kecamatan Nita, Kecamatan Kangae, Kecamatan Waigete, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, Kecamatan Mego, Kecamatan Lela

Sektor	Kawasan	Kecamatan
	Perikanan	Pantai utara Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Waigete, Talibura, Magepanda; Pantai selatan Waiblama, Waigete, Mapitara, Doreng, Bola, Lela, Mego dan Paga
	Pariwisata	
	Wisata Budaya	Kecamatan Paga, Kecamatan Mego, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Nita, Kecamatan Bola Hewokloang
	Wisata Rohani	Kecamatan Lela, Kecamatan Nita,Kecamatan Waigete, Kecamatan Bola, Kecamatan Nelle, Kecamatan Alok, Kecamatan Paga
	Wisata Bahari	Taman Laut Teluk Maumere, Doreng, Paga, Magepanda, Alok Timur
	Wisata Alam	Kecamatan Waigete, Kecamatan Palue, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Nita, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Waiblama.
	Pertambangan	Kecamatan Paga, Kecamatan Talibura, Kecamatan Lela, Kecamatan Waigete, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Nelle, Kecamatan Bola, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Palue
Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Jaringan Transportasi	
	Transportasi Udara	Bandar Udara Frans Seda di Kecamatan Alok Timur
	Transportasi Laut	Pembangunan pelabuhan penyeberangan Aewige di Kecamatan Paga, pelabuhan perikanan di Kecamatan Paga, Pelabuhan petikemas ke wilayah barat Kabupaten Sikka
	Transportasi Darat	Pembangunandan pemeliharaan jalan kabupaten untuk membuka akses-akses penghubung antar wilayah kecamatan dan desa

3.5 Strategi dan Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

3.5.1 Strategi

Adapun rincian strategi masing-masing Misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial

Strategi pada Misi 1 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Strategi Pembangunan Misi 1

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif berbasis Kearifan Lokal	1. Transformasi pendidikan dengan integrasi Digital dan Inovasi Pembelajaran terkini 2. Pemerataan Akses dan Inklusi Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar 3. Peningkatan Kualitas, Kompetensi, dan kesejahteraan Tenaga Pendidik 4. Penguatan Pendidikan Nonformal dan Pembelajaran Alternatif 5. Pendidikan Karakter dan Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan 6. Pemerataan dan Peningkatan Infrastruktur sarana Pendidikan, dan distribusi tenaga pendidikan 7. Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga dan antar komunitas satuan pendidikan untuk menjaga ekosistem pendidikan 8. Integrasi kearifan lokal dan pelestarian bahasa dan budaya daerah dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
		sistem pendidikan 9. membangun Ketahanan pendidikan dalam situasi bencana, ekonomi, dan konflik
	Meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan	1. Transformasi Layanan Kesehatan Berbasis Teknologi dan Inovasi 2. Penguatan Kompetensi dan Pemerataan SDM Kesehatan 3. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Kesehatan 4. Penanganan Mortalitas, Stunting, dan Masalah Gizi Masyarakat bersama lintas sektor 5. Promosi Kesehatan dan Edukasi Masyarakat berbasis komunitas 6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit tidak menular berbasis surveilans 7. membangun sistem layanan kesehatan Jiwa dan Perlindungan Sosial 8. penguatan sistem pengawasan keamanan pangan, obat-obatan, dan produk konsumsi untuk perlindungan konsumen yang kolaboratif 9. Sinkronisasi Kebijakan dan Tata Kelola kesehatan Lintas Level
	Meningkatnya Kehidupan Layak masyarakat yang bermartabat	1. penguatan Perlindungan dan jaminan Sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi 2. Penguatan SDM dan sistem pelatihan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. 3. Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal dan UMKM berbasis desa/kelurahan, SDA, dan kewirausahaan komunitas. 4. Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya dari ancaman sosial-budaya 5. Penguatan sistem Perlindungan Migran dan Tenaga Kerja Rentan 6. penguatan kapasitas keluarga dengan Literasi Digital dan Keuangan 7. Penguatan Perlindungan Keluarga dan Anak 8. Membangun sistem penempatan tenaga kerja pemuda yang responsif terhadap kebutuhan wilayah dan perkembangan pasar kerja. 9. Meningkatkan akses perlindungan sosial dan kesetaraan pemuda rentan terhadap layanan dasar dan ketenagakerjaan. 10. Meningkatkan kesempatan kerja lokal, menekan migrasi kerja informal, dan menciptakan skema kerja layak bagi pemuda.
	Terwujudnya pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan	1. Penguatan Tata Kelola Responsif Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG) 2. Penguatan Sistem Data dan Perencanaan Responsif Gender 3. Penguatan Sistem Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Akses ke Lapangan Kerja Produktif 5. Peningkatan Akses layanan dasar yang responsif gender untuk peningkatan kualitas hidup. 6. Afirmasi ekonomi, sosial, politik, birokrasi, dan penguatan peran strategis perempuan dalam pengambilan keputusan. 7. Reformasi Sosial dan Edukasi Anti-Patriarki

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing, maka penjelasan strategi pada masing-masing sasaran daerah adalah sebagai berikut:

Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

1) Transformasi pendidikan dengan integrasi Digital dan Inovasi Pembelajaran terkini
   Strategi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan yang inklusif dan adaptif di Kabupaten Sikka, khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran yang semakin beragam. Strategi ini mencakup beberapa komponen utama. Pertama, dilakukan penguatan tata kelola pendidikan yang inklusif dan berbasis teknologi, dengan memperkuat kebijakan, sistem manajemen, dan kapasitas penyelenggara pendidikan agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Kedua,

didorong digitalisasi dan modernisasi sistem perpustakaan serta literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan digital, pusat literasi berbasis komunitas, dan layanan akses informasi berbasis teknologi. Ketiga, strategi ini menekankan integrasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran inklusif, seperti penggunaan platform belajar daring, media interaktif, dan sistem manajemen pembelajaran yang memungkinkan fleksibilitas bagi peserta didik dari berbagai latar belakang. Keempat, dilakukan peningkatan infrastruktur dan literasi digital di sekolah dan lingkungan belajar, termasuk penyediaan perangkat TIK dan pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa. Terakhir, diperkuat sistem literasi dan perpustakaan digital yang terstandar, terintegrasi dengan sistem informasi nasional maupun lokal, serta mengakomodasi konten pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dengan pendekatan ini, pendidikan di Kabupaten Sikka diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas digital, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki identitas dan karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai budaya lokal

2) Pemerataan Akses dan Inklusi Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar
Strategi ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh anak di Kabupaten Sikka, tanpa terkecuali. Strategi ini menekankan pentingnya perluasan akses pendidikan dan penanggulangan anak tidak sekolah, melalui pendataan berbasis desa, intervensi sosial, serta fasilitasi pendidikan nonformal dan alternatif bagi anak usia sekolah yang berada di luar sistem pendidikan formal. Selanjutnya, dilakukan perluasan akses dan layanan pendidikan untuk menekan angka putus sekolah dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang merata, beasiswa pendidikan, serta sistem dukungan sosial bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau wilayah terpencil. Strategi ini juga mencakup penguatan edukasi bagi keluarga rentan dan komunitas di wilayah tertinggal, dengan mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak. Selain itu, peningkatan akses dan perlindungan pendidikan untuk anak usia dini dan remaja menjadi fokus penting, melalui pengembangan lembaga PAUD yang terstandar, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan layanan perlindungan dan konseling bagi remaja. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka menegaskan komitmennya terhadap pembangunan pendidikan yang inklusif, adil, dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang selama ini belum terlayani secara optimal.

3) Peningkatan Kualitas, Kompetensi, dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik
Strategi ini merupakan langkah kunci dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan bermutu di Kabupaten Sikka. Strategi ini berfokus pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru tetap, honorer, maupun pendidik nonformal, sebagai pilar utama keberhasilan proses pembelajaran. Upaya peningkatan ini mencakup penyediaan program pelatihan berkelanjutan berbasis kebutuhan, penguatan sertifikasi profesi, serta insentif dan dukungan sosial ekonomi yang memadai, terutama bagi guru yang bertugas di daerah terpencil atau memiliki beban kerja tinggi. Selain itu, dilakukan penguatan sistem pelatihan dan pengembangan profesi guru secara sistematis melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi, komunitas belajar guru (KKG/MGMP), serta pemanfaatan platform digital pelatihan. Program pelatihan ini diarahkan untuk membekali guru dengan keterampilan pedagogik inovatif, kemampuan literasi digital, serta pemahaman terhadap pendekatan pembelajaran yang inklusif dan berbasis kearifan lokal. Dengan strategi ini, diharapkan tercipta tenaga pendidik yang profesional, berdedikasi tinggi, dan mampu menjadi agen perubahan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sikka.

4) Penguatan Pendidikan Non-Formal dan Pembelajaran Alternatif
Strategi ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh jalur formal, serta memperluas akses terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Strategi ini mencakup penguatan layanan pendidikan nonformal dan perlindungan anak, melalui peningkatan kapasitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pendidikan kesetaraan, dan kursus keterampilan yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak rentan, pekerja anak, serta masyarakat marginal. Di samping itu, dilakukan revitalisasi pendidikan nonformal dan penguatan pendidikan alternatif dengan mengembangkan model pembelajaran fleksibel, berbasis komunitas, serta dukungan pembelajaran berbasis teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah terpencil atau kelompok usia dewasa. Strategi ini juga mendorong pengembangan program pendidikan alternatif yang berbasis kearifan lokal dan ketahanan sosial, seperti pelatihan berbasis budaya, tradisi lokal, dan kearifan lingkungan, yang tidak hanya memperkuat identitas budaya masyarakat tetapi juga membangun solidaritas sosial dan ketangguhan komunitas. Melalui strategi ini, Kabupaten Sikka berupaya menghadirkan sistem pendidikan yang lebih terbuka, relevan dengan konteks lokal, serta mampu menjangkau seluruh warga tanpa diskriminasi.

5) Pendidikan Karakter dan Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan
Strategi ini diarahkan untuk membentuk generasi muda Kabupaten Sikka yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan nilai-nilai moral yang kuat. Strategi ini mencakup penguatan pendidikan karakter dan moral kebangsaan di semua jenjang pendidikan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, toleransi, gotong royong, serta penghargaan terhadap budaya lokal dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas satuan pendidikan dalam memberikan perlindungan anak dari berbagai risiko sosial, termasuk perundungan, eksploitasi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan perlakuan di lingkungan sekolah. Langkah ini juga diperkuat dengan penyediaan layanan konseling, pembentukan satuan tugas perlindungan anak, dan pelatihan guru terkait pendekatan pembelajaran yang sensitif terhadap hak dan kebutuhan anak. Di sisi lain, strategi ini juga menekankan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak dan penguatan peran keluarga, melalui edukasi kepada orang tua, penyuluhan pola asuh positif, serta peningkatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan strategi ini, diharapkan terbentuk lingkungan pendidikan yang aman, mendukung perkembangan karakter peserta didik secara menyeluruh, dan memperkuat peran keluarga sebagai mitra utama dalam mendidik anak.

6) Pemerataan dan Peningkatan Infrastruktur Sarana Pendidikan, dan Distribusi Tenaga Pendidikan
Strategi ini bertujuan untuk memastikan tersedianya layanan pendidikan yang setara, layak, dan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Sikka, termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Strategi ini mencakup pemerataan dan peningkatan kualitas guru serta infrastruktur pendidikan, dengan menempatkan tenaga pendidik secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah, memberikan insentif bagi guru di daerah 3T, serta melakukan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Di sisi lain, dilakukan akselerasi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya, yang dirancang secara adaptif terhadap perubahan iklim dan kemajuan teknologi. Strategi ini juga mendukung penyediaan sarana pendidikan yang ramah anak dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Sikka berupaya menciptakan

lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan merata, guna mendukung transformasi pendidikan yang berkelanjutan dan menjangkau seluruh peserta didik tanpa kesenjangan wilayah atau sosial.

7) Kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga dan Antarkomunitas Satuan Pendidikan untuk Menjaga Ekosistem Pendidikan
   Strategi ini bertujuan untuk membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Strategi ini mencakup penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan layanan pendidikan, baik dari sisi pendanaan, pemantauan mutu, maupun pendampingan bagi peserta didik dan satuan pendidikan. Peran aktif masyarakat dan organisasi lokal sangat penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya, menjaga keberlangsungan sekolah di wilayah terpencil, serta menciptakan rasa kepemilikan terhadap pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Selain itu, strategi ini mendorong penguatan kemitraan antara satuan pendidikan dengan lembaga keagamaan dan swasta, melalui penyediaan dukungan moral, materiil, dan program pengembangan karakter serta vokasional yang relevan dengan kebutuhan lokal. Kolaborasi ini juga dapat menghadirkan inovasi pembelajaran, peluang magang, serta program beasiswa atau CSR yang mendukung peningkatan mutu pendidikan secara merata. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka menegaskan pentingnya sinergi multipihak dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berakar pada nilai lokal, dan responsif terhadap tantangan global.

8) Integrasi Kearifan Lokal dan Pelestarian Bahasa dan Budaya Daerah dalam Sistem Pendidikan
   Strategi integrasi kearifan lokal dan pelestarian bahasa serta budaya daerah dalam sistem pendidikan merupakan upaya strategis untuk memperkuat identitas, karakter, dan jati diri peserta didik di tengah arus globalisasi. Strategi ini mencakup pelestarian bahasa dan budaya lokal melalui kurikulum kontekstual, yaitu dengan mengintegrasikan materi pembelajaran yang berbasis tradisi, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, serta praktik kehidupan masyarakat Sikka ke dalam proses belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Kurikulum kontekstual ini tidak hanya memperkaya wawasan siswa, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri sejak dini. Selain itu, strategi ini menempatkan pelestarian bahasa dan budaya lokal sebagai penyangga krisis identitas, guna mencegah tergerusnya nilai-nilai kultural akibat modernisasi dan penetrasi budaya luar. Melalui penguatan bahasa daerah sebagai bagian dari ekspresi budaya dan komunikasi sosial, serta revitalisasi seni, adat istiadat, dan praktik budaya dalam kegiatan pendidikan, strategi ini berkontribusi menjaga kesinambungan warisan budaya daerah. Dengan demikian, sistem pendidikan di Kabupaten Sikka tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai benteng pelindung identitas lokal yang memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

9) Membangun Ketahanan Pendidikan dalam Situasi Bencana, Ekonomi, dan Konflik
   Strategi ini ditujukan untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan yang inklusif dan adaptif meskipun dalam kondisi darurat atau krisis. Strategi ini mencakup penguatan sistem pendidikan yang inklusif dan resilien terhadap krisis, melalui penyusunan protokol tanggap darurat pendidikan, pelatihan kesiapsiagaan bagi pendidik dan peserta didik, serta penyediaan sarana pembelajaran alternatif seperti modul belajar mandiri dan platform digital yang dapat diakses saat terjadi gangguan pembelajaran tatap muka akibat bencana alam, pandemi, atau kedaruratan lainnya. Selain itu, diterapkan sistem resiliensi pendidikan terhadap krisis ekonomi dan konflik, yang mencakup dukungan sosial ekonomi bagi keluarga rentan agar anak tetap bersekolah, penyediaan

beasiswa darurat, dan mediasi berbasis komunitas untuk mencegah dan menangani konflik sosial di lingkungan pendidikan. Strategi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam menciptakan sistem pendidikan yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Sikka berupaya membangun sistem pendidikan yang tidak hanya tangguh secara fisik dan operasional, tetapi juga memiliki daya lenting sosial dan emosional yang tinggi dalam menghadapi berbagai bentuk krisis.

Sasaran 1.2 Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri dan Berkelanjutan, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

1) Transformasi Layanan Kesehatan Berbasis Teknologi dan Inovasi
   Strategi ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka melalui modernisasi layanan yang efisien, responsif, dan terintegrasi. Strategi ini mencakup penguatan layanan primer dan rujukan yang terintegrasi berbasis teknologi, dengan membangun sistem informasi kesehatan yang saling terhubung antara puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas rujukan lainnya untuk mempercepat akses dan akurasi pelayanan. Transformasi layanan kesehatan berbasis teknologi dan inovasi juga dilakukan dengan mengadopsi platform digital untuk registrasi pasien, telemedisin, sistem antrean online, serta pemantauan kondisi pasien secara *real-time*, sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan khususnya di wilayah terpencil. Di samping itu, dikembangkan inovasi layanan kesehatan yang ramah digital dan kolaboratif, yang melibatkan masyarakat, tenaga medis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam sistem layanan yang inklusif dan mudah diakses. Untuk menjamin perlindungan data pribadi dan operasional sistem, dilakukan manajemen dan perlindungan data kesehatan yang aman dan terintegrasi, termasuk penerapan standar enkripsi dan keamanan siber. Sebagai pelengkap, diterapkan penguatan sistem keamanan informasi kesehatan agar layanan digital tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga aman dan terpercaya. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka membangun fondasi layanan kesehatan modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

2) Penguatan Kompetensi dan Pemerataan SDM Kesehatan
   Strategi ini merupakan upaya kunci dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Sikka. Strategi ini mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan daerah melalui program pelatihan berkelanjutan, peningkatan kualifikasi tenaga medis dan paramedis, serta penguatan soft skills seperti komunikasi, empati, dan manajemen layanan kesehatan. Selain itu, dilakukan pemerataan tenaga kesehatan ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan, dengan penataan pola distribusi yang berbasis kebutuhan, pemberian insentif, dan dukungan logistik yang memadai guna mendorong keberadaan tenaga kesehatan secara adil dan berkelanjutan. Strategi ini juga menekankan penataan sistem promosi kesehatan yang lebih terstruktur, dengan melibatkan SDM yang kompeten dalam edukasi masyarakat, kampanye preventif, serta pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Melalui kombinasi antara peningkatan kapasitas, pemerataan distribusi, dan penguatan fungsi edukatif, strategi ini diharapkan mampu menciptakan sistem layanan kesehatan yang tidak hanya reaktif terhadap penyakit, tetapi juga proaktif dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

3) Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Kesehatan

Strategi ini bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sikka, termasuk yang berada di wilayah terpencil, memiliki akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Strategi ini mencakup penguatan infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar, melalui pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas, Pustu, serta fasilitas kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan peralatan medis sesuai standar. Selain itu, dilakukan perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan penghubung antarwilayah, transportasi medis, serta jaringan komunikasi yang mendukung mobilitas tenaga kesehatan dan kelancaran pelayanan, terutama di daerah kepulauan dan sulit dijangkau. Guna mempercepat pemerataan dan keberlanjutan layanan, strategi ini juga mendorong pemanfaatan pendanaan multisumber, termasuk dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa, CSR, dan kemitraan swasta, sehingga pembangunan infrastruktur kesehatan tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Sikka berkomitmen mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berdaya jangkau tinggi, sebagai fondasi bagi kehidupan masyarakat yang sehat secara mandiri dan berkelanjutan.

4) Penanganan Mortalitas, Stunting, dan Masalah Gizi Masyarakat Bersama Lintas-Sektor
Strategi ini merupakan langkah prioritas dalam memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka, khususnya dalam menghadapi tantangan gizi buruk dan tingginya angka kematian yang berhubungan dengan kondisi kesehatan ibu, bayi, dan anak. Strategi ini mencakup percepatan penanganan mortalitas dan rendahnya gizi rumah tangga, melalui peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan gizi keluarga, serta intervensi langsung terhadap rumah tangga berisiko tinggi. Selain itu, dilakukan akselerasi penurunan stunting dan perbaikan gizi anak, dengan fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), pemberian makanan tambahan bergizi, pemantauan pertumbuhan anak secara berkala, serta penguatan kapasitas kader Posyandu dan tenaga gizi. Strategi ini juga menekankan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, seperti integrasi data gizi, kesehatan, dan sosial ekonomi untuk targeting yang tepat sasaran, serta keterlibatan aktif dinas terkait seperti pendidikan, sosial, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, dilakukan penanganan gizi buruk dan stunting secara terpadu, melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif baik di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka berkomitmen membangun generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh secara kolaboratif, sistematis, dan berbasis bukti.

5) Promosi Kesehatan dan Edukasi Masyarakat Berbasis Komunitas
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup revitalisasi program promosi kesehatan dan edukasi masyarakat, dengan memperkuat peran tenaga promosi kesehatan, kader Posyandu, serta tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang kontekstual dan mudah dipahami oleh semua lapisan. Edukasi dilakukan melalui berbagai media, pendekatan berbasis budaya lokal, serta kegiatan langsung di tingkat desa dan dusun untuk menjangkau kelompok rentan dan terpencil. Selain itu, strategi ini mendorong sinergi lintas sektor untuk promosi kesehatan, dengan melibatkan instansi terkait seperti dinas pendidikan, dinas sosial, tokoh agama, organisasi keagamaan, dan kelompok pemuda dalam menyusun dan melaksanakan program edukasi kesehatan secara terpadu. Pendekatan berbasis komunitas ini memungkinkan terjadinya perubahan perilaku hidup sehat secara kolektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan kesehatan. Melalui strategi ini, Kabupaten Sikka memperkuat pilar

preventif dan promotif dalam sistem kesehatan, guna menciptakan masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan mandiri.

6) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Berbasis Surveilans
Strategi ini merupakan komponen penting dalam memperkuat sistem ketahanan kesehatan masyarakat Kabupaten Sikka agar mampu merespons ancaman penyakit secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pengendalian penyakit menular dan rabies berbasis wilayah, dengan pendekatan spasial yang menyesuaikan karakteristik daerah, termasuk peningkatan cakupan vaksinasi, pelacakan kasus, dan penanganan secara terpadu. Selain itu, dilakukan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan secara sinergis, seperti malaria, TB, dan kusta, melalui kolaborasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat dalam pencegahan. Strategi ini juga mengedepankan penguatan layanan deteksi dini dan respons cepat terhadap penyakit menular, melalui pengembangan sistem surveilans aktif, pelatihan tenaga kesehatan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan analisis kasus secara real-time. Di sisi lain, dilakukan mitigasi penyakit menular dan peningkatan ketahanan terhadap krisis kesehatan, dengan menyiapkan protokol tanggap darurat, logistik kesehatan, dan komunikasi risiko untuk menghadapi potensi wabah atau kedaruratan kesehatan. Melalui pendekatan berbasis data dan wilayah serta keterlibatan multisektor, strategi ini memperkuat upaya preventif dan responsif Kabupaten Sikka dalam menurunkan beban penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

7) Membangun Sistem Layanan Kesehatan Jiwa dan Perlindungan Sosial
Strategi ini merupakan bagian penting dari upaya holistik untuk meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka, khususnya dalam aspek kesehatan mental dan kesejahteraan kelompok rentan. Strategi ini mencakup peningkatan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi sosial, melalui penyediaan layanan psikososial di fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelatihan tenaga kesehatan dalam deteksi dan penanganan gangguan jiwa, serta penguatan program rehabilitasi berbasis komunitas bagi individu dengan gangguan kejiwaan. Di samping itu, dilakukan penguatan perlindungan dan layanan bagi kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan penyintas bencana, dengan mengintegrasikan pendekatan kesehatan dan perlindungan sosial secara kolaboratif. Layanan ini meliputi akses terhadap bantuan sosial, konseling, pendampingan, dan rujukan medis maupun sosial secara terkoordinasi antar perangkat daerah dan mitra non-pemerintah. Melalui strategi ini, Kabupaten Sikka berkomitmen untuk menghadirkan sistem kesehatan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok-kelompok yang selama ini kurang terjangkau dalam pelayanan publik, sekaligus memperkuat solidaritas sosial sebagai fondasi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

8) Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan, Obat-Obatan, dan Produk Konsumsi untuk Perlindungan Konsumen yang Kolaboratif
Strategi ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat melalui pengendalian risiko yang berasal dari makanan, obat, dan produk konsumsi lainnya secara menyeluruh dan lintas sektor. Strategi ini mencakup penguatan layanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner terintegrasi, guna mencegah zoonosis atau penularan penyakit dari hewan ke manusia, termasuk pengawasan terhadap proses produksi, distribusi, dan konsumsi produk hewani yang layak dan aman. Selain itu, dilakukan penguatan ketahanan pangan

dan sistem pengawasan obat serta produk konsumsi, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian mutu, memperketat pengawasan distribusi pangan dan obat-obatan, serta mendorong literasi konsumen terhadap keamanan produk yang dikonsumsi. Strategi ini juga melibatkan kerja sama lintas perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam sistem pengawasan terpadu, termasuk pelaporan masyarakat, inspeksi rutin, dan edukasi publik. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari paparan produk berisiko dan membangun sistem kesehatan yang proaktif, preventif, dan berbasis kolaborasi dalam menjamin keselamatan konsumen.

9) Sinkronisasi Kebijakan dan Tata Kelola Kesehatan Lintas Level
Strategi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Strategi ini mencakup sinkronisasi lintas sistem dan koordinasi kebijakan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, guna menghindari tumpang tindih program, memperkuat integrasi perencanaan, serta memastikan implementasi kebijakan nasional dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal di Kabupaten Sikka. Di samping itu, dilakukan penguatan tata kelola dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan, baik di fasilitas layanan primer maupun rujukan, melalui peningkatan kapasitas manajemen kesehatan, supervisi berkala, serta evaluasi kinerja berbasis indikator mutu pelayanan. Strategi ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan data yang valid dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program kesehatan lintas sektor. Dengan tata kelola yang solid dan kebijakan yang sinkron, Kabupaten Sikka dapat membangun sistem kesehatan yang terintegrasi, responsif, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Sasaran 1.3 Meningkatnya Kehidupan Layak Masyarakat yang Bermartabat, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

1) Penguatan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, serta Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi
Strategi ini diarahkan untuk menciptakan kehidupan layak yang bermartabat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sikka, khususnya kelompok miskin, rentan, dan marjinal. Strategi ini mencakup integrasi program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan berbasis data, dengan memastikan bahwa seluruh intervensi sosial didasarkan pada data yang valid, terpadu, dan terupdate melalui sistem satu data kesejahteraan sosial. Selanjutnya, dilakukan penanggulangan kemiskinan terpadu dan perlindungan sosial yang inklusif, yang tidak hanya berfokus pada bantuan langsung tunai atau barang, tetapi juga pada intervensi struktural seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Strategi ini juga mencakup penguatan sistem jaminan sosial dan ketenagakerjaan, termasuk perluasan cakupan perlindungan bagi pekerja informal dan rentan, serta penyediaan akses terhadap pelatihan dan pekerjaan produktif. Selain itu, dilakukan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan lansia melalui sistem perlindungan terintegrasi, yang mencakup layanan rehabilitasi sosial, bantuan sosial, serta dukungan psikososial dan komunitas. Pemberdayaan PPKS dan kelompok rentan secara berkelanjutan juga menjadi fokus, melalui program peningkatan kapasitas, wirausaha sosial, dan pembentukan kelompok usaha berbasis komunitas. Terakhir, strategi ini mendorong penguatan sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan secara menyeluruh, melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga solidaritas sosial. Dengan pendekatan

ini, Kabupaten Sikka meneguhkan komitmennya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2) Penguatan SDM dan Sistem Pelatihan untuk Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Lokal
Strategi ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan masyarakat Kabupaten Sikka agar mampu beradaptasi dan bersaing dalam pasar kerja yang dinamis dan kompetitif. Strategi ini mencakup peningkatan daya saing SDM melalui pelatihan vokasi dan penempatan kerja, dengan menyediakan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk memperluas peluang penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, dilakukan reformulasi perencanaan dan regulasi tenaga kerja daerah, dengan menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap dinamika lokal dan global, serta mendorong perlindungan dan peningkatan kapasitas pekerja informal. Strategi ini juga mencakup pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) daerah dan peningkatan akses pelatihan keterampilan, khususnya di sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Pembangunan pusat pelatihan kerja diarahkan untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi, dengan fokus pada generasi muda sebagai aktor utama pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, dilakukan reformasi sistem tenaga kerja daerah dan penataan BLK agar lebih adaptif, terstandar, dan terintegrasi dengan sistem sertifikasi kompetensi nasional. Melalui strategi ini, Kabupaten Sikka berupaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang produktif, berkeadilan, dan inklusif, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3) Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal dan UMKM Berbasis Desa/Kelurahan, SDA, dan Kewirausahaan Komunitas
Strategi ini diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi masyarakat yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi SDA dan penguatan kelas menengah produktif, dengan mengembangkan usaha-usaha masyarakat yang mengelola hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan lokal secara bernilai tambah. Selain itu, dilakukan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi sosial di tingkat desa/kelurahan, yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pemberdayaan dan kesejahteraan warga desa. Strategi ini juga menekankan penguatan ekosistem UMKM dan pengembangan wirausaha sosial produktif, melalui dukungan akses pembiayaan, pemasaran digital, kemitraan usaha, serta fasilitasi regulasi yang ramah usaha mikro dan kecil. Pelatihan dan pendampingan wirausaha produktif bagi pemuda dan pekerja informal menjadi bagian penting dari strategi ini, untuk mendorong transformasi ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan kemandirian. Selain itu, dilakukan peningkatan sarana pendukung UMKM dan kelompok UPPKA (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) berbasis komunitas, guna memperkuat peran perempuan dan kelompok marginal dalam kegiatan ekonomi. Strategi ini juga mengintegrasikan pengembangan ekonomi lokal dengan pendekatan konservasi lingkungan, agar pemanfaatan SDA tidak merusak ekosistem dan tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Sikka berupaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal, memperkuat daya tahan ekonomi keluarga, serta memperluas kesempatan kerja dan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat.

4) Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya dari Ancaman Sosial-Budaya
Strategi ini bertujuan untuk membangun masyarakat Kabupaten Sikka yang tangguh secara sosial dan budaya dalam menghadapi perubahan zaman, disrupsi nilai, serta ancaman eksternal terhadap harmoni sosial. Strategi ini mencakup peningkatan peran

lembaga kesejahteraan sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat sosial maupun bencana, serta memperkuat solidaritas dan gotong royong sebagai nilai dasar ketahanan masyarakat. Selain itu, dilakukan peningkatan kesadaran dan ketahanan sosial masyarakat melalui pendidikan nilai, penguatan peran keluarga, komunitas adat, dan tokoh lokal dalam membina moralitas dan kohesi sosial. Strategi ini juga menekankan upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial-budaya, dengan menghidupkan kembali tradisi, kesenian, bahasa daerah, serta institusi sosial lokal sebagai benteng identitas dan pemersatu masyarakat. Di sisi lain, strategi ini mendorong pengendalian budaya konsumtif dan penguatan ketahanan sosial masyarakat, dengan edukasi kritis terhadap arus informasi, promosi gaya hidup sederhana, serta pengembangan kegiatan produktif dan edukatif yang memperkuat nilai-nilai kebersamaan, keberlanjutan, dan kemandirian. Melalui strategi ini, Kabupaten Sikka berkomitmen menjaga keutuhan sosial dan memperkuat karakter budaya masyarakat dalam menghadapi tantangan global secara bijak dan berkelanjutan.

5) Penguatan Sistem Perlindungan Migran dan Tenaga Kerja Rentan
   Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga Kabupaten Sikka, khususnya para migran dan tenaga kerja perantau, mendapatkan perlindungan yang memadai, akses terhadap hak-haknya, serta dukungan untuk membangun kehidupan yang layak dan bermartabat. Strategi ini mencakup reintegrasi tenaga kerja perantau, dengan menyediakan program pelatihan, pendampingan usaha, dan akses permodalan bagi para pekerja migran yang kembali ke daerah asal agar mereka dapat berkontribusi secara produktif dalam perekonomian lokal. Selain itu, dilakukan perlindungan terhadap migran lokal, termasuk tenaga kerja informal dan pekerja rentan yang bekerja di dalam maupun luar daerah, melalui penyediaan informasi ketenagakerjaan yang akurat, pendampingan hukum, serta penguatan peran pemerintah desa dan keluarga dalam mencegah migrasi non-prosedural dan perdagangan orang. Strategi ini juga mendorong pembentukan sistem rujukan dan layanan terpadu bagi pekerja migran, termasuk kerja sama lintas daerah dan lembaga untuk perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Sikka berupaya menciptakan sistem migrasi dan ketenagakerjaan yang aman, adil, dan berpihak pada perlindungan martabat serta kesejahteraan masyarakatnya.

6) Penguatan Kapasitas Keluarga Dengan Literasi Digital dan Keuangan
   Strategi ini diarahkan untuk membangun ketahanan keluarga dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi modern, serta memperkuat peran keluarga sebagai unit dasar pembangunan masyarakat. Strategi ini mencakup penguatan literasi digital dan perlindungan sosial, melalui edukasi penggunaan teknologi informasi secara bijak dan aman, peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga dalam mengakses layanan digital publik maupun sosial, serta perlindungan terhadap risiko digital seperti penipuan daring dan eksploitasi anak di ruang siber. Selain itu, dilakukan penguatan literasi digital dan keuangan, guna mendorong keluarga mengelola keuangan rumah tangga secara cerdas, produktif, dan berkelanjutan. Edukasi ini mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan utang, tabungan keluarga, serta pemanfaatan layanan keuangan digital dan inklusif, terutama bagi kelompok perempuan, pelaku UMKM keluarga, dan kelompok rentan. Melalui strategi ini, Kabupaten Sikka membangun fondasi keluarga yang adaptif terhadap era digital, mandiri secara ekonomi, dan terlindungi secara sosial, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan.

7) Penguatan Perlindungan Keluarga dan Anak

Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi tumbuh kembang anak serta ketahanan keluarga sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Strategi ini mencakup perlindungan terhadap keluarga berkualitas dari risiko ekonomi dan sosial, melalui intervensi yang menyasar keluarga-keluarga rentan agar tetap mampu menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak secara optimal. Upaya ini dilakukan dengan memberikan akses kepada bantuan sosial, layanan konseling keluarga, edukasi pola asuh positif, serta penguatan peran orang tua dalam membangun komunikasi dan relasi yang sehat di dalam keluarga. Selain itu, strategi ini juga memperhatikan aspek perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, pernikahan dini, serta pengabaian, dengan mengintegrasikan layanan lintas sektor yang responsif terhadap kebutuhan anak dan keluarga. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Sikka menegaskan komitmennya untuk membangun keluarga yang kuat, adaptif terhadap perubahan sosial, dan menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan.

8) Membangun Sistem Penempatan Tenaga Kerja Pemuda yang Responsif terhadap Kebutuhan Wilayah dan Perkembangan Pasar Kerja
Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang mampu menjembatani potensi pemuda dengan dinamika kebutuhan dunia kerja, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Strategi ini mencakup penguatan sistem perencanaan dan penempatan tenaga kerja pemuda yang terintegrasi, dengan membangun database tenaga kerja muda, pemetaan potensi sektor unggulan daerah, serta integrasi sistem informasi ketenagakerjaan berbasis digital yang dapat diakses oleh pemuda, lembaga pelatihan, dan pelaku usaha. Selain itu, dilakukan penguatan perencanaan dan kelembagaan tenaga kerja pemuda berbasis wilayah dan kompetensi lokal, melalui pengembangan program pelatihan kerja yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing kecamatan atau desa, serta mendorong terbentuknya pusat layanan karir dan bursa kerja berbasis komunitas. Strategi ini juga mengedepankan kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan dalam membentuk sistem penempatan kerja yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka diharapkan mampu menekan angka pengangguran pemuda, meningkatkan produktivitas tenaga kerja muda, serta mendorong pemerataan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

9) Meningkatkan Akses Perlindungan Sosial dan Kesetaraan Pemuda Rentan terhadap Layanan Dasar dan Ketenagakerjaan
Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemuda, khususnya yang tergolong rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS), memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses layanan dasar dan peluang ketenagakerjaan. Strategi ini mencakup perluasan akses jaminan sosial dan perlindungan bagi pemuda rentan dan PPKS, melalui integrasi mereka ke dalam sistem perlindungan sosial daerah, penyediaan bantuan sosial berbasis kebutuhan, serta pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi. Selain itu, dilakukan pemberdayaan pemuda difabel dan perluasan aksesibilitas inklusif terhadap fasilitas dan peluang kerja, dengan membangun lingkungan fisik dan sosial yang ramah difabel, menyediakan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta mendorong rekrutmen inklusif di sektor publik maupun swasta. Strategi ini juga mencakup peningkatan inklusi sosial dan layanan dasar bagi pemuda rentan dan difabel, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta ruang partisipasi dalam pembangunan sosial dan kewirausahaan. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka menegaskan komitmennya untuk menciptakan pembangunan yang adil,

serta membangun generasi muda yang berdaya, setara, dan berkontribusi aktif bagi kemajuan daerah.

10) Meningkatkan Kesempatan Kerja Lokal, Menekan Migrasi Kerja Informal, dan Menciptakan Skema Kerja Layak bagi Pemuda
Strategi ini bertujuan untuk memberikan alternatif yang bermartabat dan berkelanjutan bagi pemuda Kabupaten Sikka agar tidak terdorong melakukan migrasi kerja secara informal dan berisiko. Strategi ini mencakup perluasan lapangan kerja lokal melalui pengembangan sektor-sektor potensial seperti pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kecil menengah yang berbasis sumber daya lokal, sehingga tercipta lebih banyak ruang kerja di wilayah sendiri. Selain itu, dilakukan penguatan skema kerja layak bagi pemuda, termasuk pengaturan standar upah minimum yang adil, kondisi kerja yang aman, serta perlindungan hak-hak tenaga kerja muda. Strategi ini juga berupaya menekan angka migrasi kerja tidak terlindungi, dengan menyediakan akses informasi ketenagakerjaan yang transparan, pendidikan vokasi yang relevan, serta program pendampingan bagi pemuda pencari kerja. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Sikka diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, mengurangi ketergantungan pada kerja luar daerah yang rawan eksploitasi, dan membangun masa depan pemuda yang lebih aman, mandiri, dan bermartabat di tanah kelahirannya.

Sasaran 1.4 Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

1) Penguatan Tata Kelola Responsif Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)
Strategi ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi gender. Strategi ini mencakup penguatan tata kelola gender responsif di semua tingkat pemerintahan, dengan memastikan bahwa kebijakan, program, dan anggaran pembangunan di Kabupaten Sikka disusun dan diimplementasikan berdasarkan analisis gender yang menyeluruh serta mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan, laki-laki, anak, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG), melalui pelatihan teknis, pendampingan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Strategi ini juga mendorong revitalisasi peran *Gender Focal Point* dan Pokja PUG di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berfungsi secara aktif dalam mendorong integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan sektoral. Melalui strategi ini, Kabupaten Sikka berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang adil gender, mendorong partisipasi setara dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

2) Penguatan Sistem Data dan Perencanaan Responsif Gender
Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sikka didasarkan pada data yang akurat, terpilah, dan mencerminkan realitas kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat berdasarkan jenis kelamin dan kerentanannya. Strategi ini mencakup pemanfaatan data gender untuk perencanaan dan intervensi berbasis bukti, dengan mengintegrasikan data terpilah gender dalam sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program di seluruh sektor. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender, mengukur dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki secara berbeda, serta merancang intervensi yang lebih adil dan efektif. Selain itu, strategi ini juga mencakup pencegahan pengiriman tenaga kerja perempuan secara ilegal, melalui penguatan sistem

pemantauan migrasi kerja, penyediaan akses informasi yang akurat dan ramah perempuan, serta perlindungan hukum dan sosial bagi calon pekerja migran perempuan. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka memperkuat tata kelola pembangunan yang berbasis bukti dan menjamin perlindungan serta partisipasi setara bagi perempuan dalam seluruh proses pembangunan.

3) Penguatan Sistem Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Strategi ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan melindungi hak-hak perempuan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Strategi ini mencakup penguatan mekanisme perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi perempuan, melalui pengembangan sistem pelaporan yang mudah diakses, layanan pengaduan yang ramah korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, dilakukan penguatan sistem perlindungan perempuan secara komprehensif, yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga layanan, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan pendampingan psikososial, hukum, dan rehabilitasi bagi korban. Strategi ini juga merespons tantangan era digital dengan penguatan layanan perlindungan perempuan dari eksploitasi dan kekerasan digital, termasuk upaya preventif melalui literasi digital, pengawasan konten berbasis gender, serta pengembangan unit layanan khusus untuk menangani kasus kekerasan berbasis siber. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka menegaskan komitmennya untuk membangun sistem perlindungan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan bagi perempuan, sekaligus menciptakan ruang aman yang mendukung partisipasi aktif dan bermartabat bagi semua.

4) Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Akses ke Lapangan Kerja Produktif
Strategi ini diarahkan untuk memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah serta mendorong kemandirian dan kontribusi mereka dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Strategi ini mencakup percepatan pemberdayaan perempuan melalui kemitraan, dengan melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat dalam membuka akses pelatihan, pembiayaan, serta pasar bagi pelaku usaha perempuan. Selain itu, dilakukan penguatan peran perempuan dalam ekonomi lokal dan UMKM, melalui dukungan teknis dan manajerial, fasilitasi legalitas usaha, serta pemberdayaan perempuan sebagai pelaku utama dalam rantai pasok lokal dan koperasi berbasis komunitas. Strategi ini juga menekankan pemanfaatan potensi demografis perempuan dalam pembangunan ekonomi lokal, dengan memberikan ruang partisipasi yang luas dalam perencanaan ekonomi, pemberdayaan desa, serta program padat karya berbasis perempuan. Di samping itu, diupayakan perlindungan dan penguatan ekonomi perempuan dalam pekerjaan produktif, termasuk penjaminan upah yang adil, perlindungan kerja informal, serta fasilitas ramah gender di tempat kerja. Melalui strategi ini, Kabupaten Sikka berkomitmen menciptakan lingkungan ekonomi yang setara, mendukung kemandirian perempuan, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas.

5) Peningkatan Akses Layanan Dasar yang Responsif Gender untuk Peningkatan Kualitas Hidup
Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan kelompok rentan memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar berkualitas sebagai prasyarat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Strategi ini mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan, dengan mendorong kesetaraan kesempatan pendidikan di semua jenjang, pencegahan putus sekolah pada anak perempuan, serta penguatan kurikulum yang mendukung pemberdayaan perempuan dan penghapusan

stereotip gender. Selain itu, strategi ini juga menekankan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang gender-responsif, melalui penyediaan fasilitas yang aman, ramah perempuan, serta pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan agar memiliki perspektif kesetaraan gender dalam memberikan layanan. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Sikka berupaya menciptakan sistem layanan dasar yang tidak hanya merata secara fisik, tetapi juga adil secara sosial, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan mendukung partisipasi aktif mereka dalam pembangunan.

6) Afirmasi Ekonomi, Sosial, Politik, Birokrasi, dan Penguatan Peran Strategis Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ruang partisipasi yang adil dan setara bagi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan publik dan kelembagaan. Strategi ini mencakup dorongan terhadap partisipasi perempuan dalam politik, birokrasi, dan pengambilan keputusan, melalui kebijakan afirmatif, pelatihan kepemimpinan perempuan, serta peningkatan kapasitas dalam advokasi dan perumusan kebijakan publik. Selain itu, dilakukan peningkatan partisipasi perempuan dalam birokrasi dan kepemimpinan komunitas, dengan mendorong keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural pemerintahan, lembaga legislatif, serta dalam organisasi masyarakat dan kelembagaan desa. Strategi ini juga memperkuat dukungan kelembagaan dan regulasi untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses, ruang, dan kesempatan yang setara dalam menentukan arah pembangunan. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Sikka menegaskan komitmennya untuk memperkuat demokrasi yang inklusif, menjamin keterwakilan yang berkeadilan, dan memaksimalkan potensi perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

7) Reformasi Sosial dan Edukasi Anti-Patriarki
Strategi ini bertujuan untuk mengatasi akar struktural ketidaksetaraan gender yang bersumber dari norma dan budaya patriarki yang masih mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Strategi ini mencakup reformasi sosial budaya untuk mengatasi budaya patriarki, melalui peninjauan kembali nilai-nilai tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, serta mendorong transformasi sosial yang lebih adil dan setara gender. Selain itu, dilakukan edukasi publik untuk melawan budaya patriarki dan diskriminasi gender, dengan melibatkan institusi pendidikan, tokoh masyarakat, dan media dalam menyebarkan pesan-pesan kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak perempuan dan kelompok rentan. Strategi ini juga melibatkan edukasi anti-patriarki dan kampanye kesadaran publik tentang gender setara, yang bertujuan mengubah persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat melalui berbagai media komunikasi, forum dialog, serta kegiatan seni dan budaya. Lebih lanjut, dilakukan kemitraan antara pemerintah dan NGO (lembaga swadaya masyarakat) dalam memperluas jangkauan program pemberdayaan dan edukasi kesetaraan gender, sehingga membangun basis masyarakat yang lebih kritis, inklusif, dan berdaya dalam memperjuangkan keadilan gender. Melalui strategi ini, Kabupaten Sikka berkomitmen mendorong perubahan budaya secara progresif demi mewujudkan masyarakat yang bebas diskriminasi, adil gender, dan berkelanjutan.

Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing

Strategi pada Misi 2 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9

Strategi Pembangunan Misi 2

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 2. Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing		
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka	Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka	1. Mendorong pengembangan sentra produksi berbasis potensi lokal dan mendorong diversifikasi komoditas unggulan sektor kelautan, perikanan, dan pertanian untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal. 2. Pembangunan Infrastruktur dan Sistem Distribusi terintegrasi yang terintegrasi antar wilayah guna mendukung kelancaran rantai pasok sektor primer. 3. Peningkatan Kapasitas SDM, Regenerasi, dan Kelembagaan Petani–Nelayan 4. Memperkuat akses pembiayaan, kemitraan, serta pemasaran berbasis teknologi. 5. Penguatan sistem ketahanan pangan melalui diversifikasi produksi pangan lokal, pengembangan pangan berbasis sumber daya perairan, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan. 6. Membangun pendekatan adaptif berbasis ekosistem serta sistem mitigasi risiko untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana dalam pengelolaan sektor kelautan, perikanan, dan pertanian 7. Integrasi Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata berbasis potensi lokal untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. 8. Mendorong adopsi inovasi teknologi dan pengembangan *smart farming* dan *smart fisheries* guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing sektor primer secara berkelanjutan.
	Berkembangnya industri pengolahan produk pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal	1. Mendorong pengembangan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan serta peningkatan nilai tambah melalui penguatan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. 2. Mempercepat transformasi digital pada industri kecil, menengah, dan UMKM, termasuk sistem pemasaran dan promosi produk perikanan dan kelautan secara terpadu. 3. Penguatan UMKM, Koperasi, dan Ekosistem Industri Rakyat sebagai pendorong utama industrialisasi berbasis rakyat. 4. Akselerasi Investasi dan Pembiayaan Industri untuk mempercepat pertumbuhan industri berbasis sumber daya kelautan dan perikanan. 5. Memperluas jangkauan pasar melalui penguatan identitas produk, sertifikasi mutu, dan pengembangan saluran ekspor. 6. Penguatan SDM Industri dan Kewirausahaan Yang kompeten dan berdaya saing tinggi 7. Membangun infrastruktur fisik dan fasilitas pendukung logistik fasilitas logistik terpadu guna mendukung efisiensi produksi, distribusi, dan konektivitas antar wilayah. 8. Memperkuat ketahanan dan keberlanjutan industri lokal melalui penerapan prinsip industri tangguh, rendah emisi, dan ramah lingkungan berbasis sumber daya laut.
	Terwujudnya Ekonomi Lokal Yang Kokoh Melalui Dukungan Perdagangan Dan Pariwisata.	1. Transformasi digital dan pembangunan infrastruktur pendukung sektor tersier yang terintegrasi dan adaptif. 2. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif berbasis Budaya, komunitas, dan kemitraan 3. Transformasi pariwisata tangguh, berkelanjutan, dan inklusif, serta berorientasi pada pasar wisata tematik. 4. Revitalisasi Perdagangan Serta Pelaku Usaha Lokal 5. Penguatan Promosi, Branding, dan Positioning Daerah 6. Mendorong ekosistem kelembagaan yang adaptif dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan sektor tersier. 7. Membangun sistem Adaptasi dan Mitigasi Risiko Ekonomi terhadap Geopolitik dan Krisis Eksternal

Penjelasan secara rinci strategi pada Misi 2 berdasarkan sasaran daerah adalah sebagai berikut:

Sasaran 2.1 Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka, memiliki beberapa strategi sebagai berikut:

1) Mendorong pengembangan sentra produksi berbasis potensi lokal dan mendorong diversifikasi komoditas unggulan sektor kelautan, perikanan, dan pertanian untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal.
   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas produksi komoditas unggulan sektor kelautan, perikanan, dan pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas. Strategi ini berfokus pada Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan; Diversifikasi Produk dan Hilirisasi Komoditas; Penguatan Sistem Ketahanan dan Keamanan Pangan Berbasis Lokal; Diversifikasi dan Perlindungan Komoditas Pangan Lokal. Ini termasuk komoditas pangan (misalnya, padi, jagung), hortikultura (misalnya, buah-buahan atau sayuran spesifik), perkebunan (misalnya, kopi, kakao, kelapa), peternakan (misalnya, sapi, kambing), dan perikanan (misalnya, budidaya air tawar atau tangkapan laut).
   Pengembangan sentra produksi berarti menyediakan dukungan spesifik seperti bibit unggul, pendampingan teknis, dan infrastruktur dasar yang sesuai dengan kebutuhan komoditas tersebut. Diversifikasi komoditas penting untuk mengurangi risiko kerugian akibat kegagalan panen atau fluktuasi harga pada satu komoditas, serta untuk memperkaya pilihan produk pertanian Sikka.

2) Pembangunan Infrastruktur dan Sistem Distribusi yang terintegrasi antar wilayah guna mendukung kelancaran rantai pasok sektor primer.
   Tujuan dari strategi ini adalah mendukung peningkatan produksi, efisiensi rantai pasok, dan akses pasar yang lebih baik bagi produk sektor kelautan, perikanan, dan pertanian dari hulu ke hilir. Ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah kunci. Strategi yang akan diterapkan adalah Pembangunan Infrastruktur Pendukung Produksi dan Distribusi; Modernisasi Sarana-Prasarana dan Irigasi Pertanian secara Kolaboratif; Pengembangan Sistem Logistik dan Rantai Dingin; Rehabilitasi dan Perlindungan Infrastruktur Sektor Primer.
   Selain itu, pembangunan sistem distribusi terintegrasi berarti menciptakan konektivitas yang efisien antara sentra produksi dengan pasar lokal, regional, bahkan nasional. Ini bisa melalui pusat-pusat logistik pertanian atau kemitraan dengan distributor besar, sehingga produk petani dapat mencapai konsumen dengan biaya yang efisien dan dalam kondisi terbaik.

3) Peningkatan Kapasitas SDM, Regenerasi, dan Kelembagaan Petani–Nelayan
   Tujuan strategi ini adalah guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas pengelolaan bagi para petani dan nelayan, serta memastikan keberlanjutan sektor melalui penarikan minat generasi muda.
   Sumber daya manusia (SDM) adalah aset utama. Strategi ini fokus pada Penguatan SDM dan Regenerasi Petani–Nelayan; Transformasi Teknologi dan Mekanisasi Pertanian; Penguatan Sistem Resiliensi Bencana dan Biosekuriti; Advokasi Kebijakan Daerah yang Adaptif dan Responsif; Sinergi Kelembagaan dan Advokasi Kebijakan Berbasis Daerah.
   Regenerasi petani dan nelayan sangat penting untuk keberlanjutan sektor ini; ini melibatkan program-program yang menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dan perikanan, misalnya melalui pendampingan, akses permodalan khusus, atau pengenalan pertanian berbasis teknologi. Penguatan kelembagaan (kelompok tani,

koperasi, atau asosiasi nelayan) akan meningkatkan posisi tawar mereka, mempermudah akses informasi, dan mengkoordinasikan upaya produksi serta pemasaran.

4) Memperkuat Akses Pembiayaan, Kemitraan, serta Pemasaran Berbasis Teknologi
Tujuan dari strategi ini adalah untuk mempermudah petani dan nelayan mendapatkan modal usaha, menjalin hubungan saling menguntungkan dengan pihak lain, dan memasarkan produk secara lebih luas dan efektif.
Banyak petani dan nelayan kesulitan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal. Strategi ini berupaya memfasilitasi akses ke skema pembiayaan yang sesuai (misalnya, Kredit Usaha Rakyat/KUR, pinjaman lunak, atau skema permodalan desa). Oleh karena itu strategi yang akan diterapkan adalah Peningkatan Akses Pasar dan Kemitraan Agribisnis; Meningkatkan Akses Modal Usaha dan Kemitraan Agribisnis; Digitalisasi Produksi dan Informasi Pasar; Manajemen Risiko Harga dan Perlindungan Petani–Nelayan.
Kemitraan penting untuk keberlanjutan, baik dengan industri pengolahan (*off-taker*), eksportir, maupun pelaku usaha lain yang dapat menjamin penyerapan produk. Pemasaran berbasis teknologi berarti memanfaatkan platform digital (*e-commerce*, media sosial) untuk memperluas jangkauan pasar, mengurangi biaya promosi, dan menghubungkan petani/nelayan langsung dengan konsumen, bahkan dengan konsumen di luar Sikka.

5) Penguatan sistem ketahanan pangan melalui diversifikasi produksi pangan lokal, pengembangan pangan berbasis sumber daya perairan, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh masyarakat Sikka, serta mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber pangan. Strategi ini menitikberatkan pada Diversifikasi Produk dan Pengolahan Hasil; Peningkatan Sistem Ketahanan dan Keamanan Pangan; Penguatan Sistem Ketahanan dan Diversifikasi Pangan. Penguatan ketahanan pangan juga melibatkan pengelolaan cadangan pangan daerah, penyuluhan gizi seimbang, dan pengembangan teknologi pangan lokal untuk mengolah produk pertanian menjadi pangan yang lebih tahan lama. Ini juga mencakup diversifikasi sistem pangan, yaitu mendorong masyarakat untuk mengonsumsi berbagai jenis pangan lokal (misalnya, sagu, umbi-umbian, ikan) selain beras, sehingga pola konsumsi lebih beragam dan seimbang gizi.

6) Membangun pendekatan adaptif berbasis ekosistem serta sistem mitigasi risiko untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana dalam pengelolaan sektor pertanian dan perikanan.
Tujuan dari strategi ini adalah untuk melindungi sektor pertanian dan perikanan dari dampak perubahan iklim dan bencana alam, serta menjaga keberlanjutan ekosistem pendukungnya. Perubahan iklim dan potensi bencana (kekeringan, banjir, gelombang tinggi) menjadi ancaman serius bagi pertanian dan perikanan. Strategi ini berfokus pada Optimalisasi Lahan dan Infrastruktur untuk Ketahanan Produksi; Revitalisasi Pengelolaan Pertanian–Perikanan Berkelanjutan; Pengurangan Ketergantungan Musim dan Adaptasi Cuaca Ekstrem; Revitalisasi Perlindungan Pertanian dan Peternakan dari Hama dan Penyakit. Membangun sistem mitigasi berarti menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dampak bencana, termasuk sistem peringatan dini, asuransi pertanian, dan upaya konservasi lingkungan (misalnya, reboisasi lahan kritis, konservasi terumbu karang) untuk menjaga resiliensi ekosistem yang menjadi basis produksi.

7) Integrasi Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata berbasis potensi lokal untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antar sektor yang menghasilkan nilai ekonomi tambahan dan pengalaman unik bagi wisatawan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Strategi ini melihat peluang untuk menghubungkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata serta Pengembangan Pariwisata Bahari dan Agrowisata. Contohnya, pengembangan agrowisata (wisata di kebun kopi, kebun buah), ekowisata bahari yang melibatkan nelayan lokal, atau wisata kuliner yang menggunakan produk pertanian dan perikanan segar khas Sikka. Integrasi ini dapat menciptakan rantai nilai baru, di mana petani dan nelayan tidak hanya menjual produk mentah, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pariwisata (misalnya, menjadi pemandu wisata, menyediakan penginapan, atau menjual produk olahan langsung kepada wisatawan). Ini akan memperkuat branding produk lokal dan menarik lebih banyak kunjungan ke Sikka.

8) Mendorong adopsi inovasi teknologi dan pengembangan *smart farming* dan *smart fisheries* guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing sektor primer secara berkelanjutan.
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi dan efisiensi operasional di sektor pertanian dan perikanan melalui pemanfaatan teknologi modern. Strategi ini Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Digitalisasi Sektor Primer yang dapat meningkatkan produktivitas dengan sumber daya yang lebih sedikit. Ini bisa berupa penggunaan sensor untuk memantau kelembaban tanah atau nutrisi tanaman, sistem irigasi presisi, penggunaan drone untuk pemetaan lahan atau penyemprotan, aplikasi berbasis data untuk prediksi cuaca, atau penggunaan teknologi budidaya ikan yang efisien (misalnya, akuakultur sirkulasi).
Inovasi teknologi juga mencakup pengembangan varietas unggul yang tahan hama dan penyakit, serta penggunaan bioteknologi yang aman dan bertanggung jawab. Penerapan teknologi ini akan membantu petani dan nelayan bekerja lebih cerdas, mengurangi kerugian, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas.

Sasaran 2.2 Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal, memiliki beberapa strategi sebagai berikut:

1) Mendorong pengembangan hilirisasi sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) dan perikanan serta peningkatan nilai tambah melalui penguatan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.
Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi produk-produk lokal, khususnya dari sektor pertanian dan perikanan, melalui proses pengolahan lebih lanjut sehingga tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Strategi ini berfokus pada Penguatan Industri Pengolahan Berbasis Potensi Lokal Lintas Sektor; Diversifikasi Produk dan Hilirisasi Industri Lokal; Peningkatan Produktivitas dan Inovasi Industri Lokal. Dengan hilirisasi, pendapatan masyarakat dan daerah akan meningkat karena produk yang dijual memiliki harga yang lebih baik. Ini juga membuka peluang pekerjaan baru di sektor pengolahan dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas mentah.

2) Mempercepat transformasi digital pada industri kecil, menengah, dan UMKM, termasuk sistem pemasaran dan promosi produk pertanian perikanan, dan pariwisata secara terpadu.

3) Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memodernisasi cara promosi produk dan potensi pariwisata Kabupaten Sikka.

Di era digital, pemanfaatan teknologi menjadi kunci. Strategi ini mendorong Digitalisasi dan Inovasi Industri Lokal, Transformasi Digital Industri dan Koperasi, Digitalisasi UMKM dan Legalitas Usaha, Modernisasi dan Perlindungan Keamanan Digital, Peningkatan Daya Saing dan Akses Pasar Industri Lokal.
Digitalisasi juga akan diterapkan dalam sistem promosi pariwisata, seperti pengembangan website pariwisata yang interaktif, penggunaan media sosial untuk kampanye promosi, atau pengembangan aplikasi pemesanan dan informasi wisata. Hal ini akan memperluas pasar, menjangkau lebih banyak wisatawan, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

4) Penguatan UMKM, Koperasi, dan Ekosistem Industri Rakyat sebagai Pendorong Utama Industrialisasi Berbasis Rakyat
Tujuan strategi ini adalah untuk menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi sebagai pilar utama dalam pengembangan industri lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini mengakui bahwa UMKM dan Koperasi adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Penguatan dilakukan melalui Pemberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai Motor Industri Rakyat, Reformasi dan Penguatan Tata Kelola Koperasi, Penguatan Kelembagaan dan Profesionalisme Koperasi

5) Akselerasi Investasi dan Pembiayaan Industri untuk Mempercepat Pertumbuhan Industri
Tujuan strategi ini adalah untuk menarik lebih banyak investasi dan mempermudah akses pembiayaan yang dibutuhkan oleh pelaku industri lokal guna mengembangkan usahanya. Pertumbuhan industri membutuhkan modal. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sikka, misalnya melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan informasi potensi investasi, atau pemberian insentif bagi investor. Oleh karena itu strategi ini akan difokuskan pada Akselerasi Investasi Industri dan Kolaborasi Antarwilayah, Penguatan Akses Pembiayaan dan Insentif Ekonomi, Penguatan Promosi dan Akses Pembiayaan, Stabilitas Investasi dan Tata Kelola Daerah.

6) Memperluas Jangkauan Pasar melalui Penguatan Identitas Produk, Sertifikasi Mutu, dan Pengembangan Saluran Ekspor
Tujuan strategi ini adalah untuk memastikan produk-produk lokal Sikka dapat bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Strategi ini berfokus pada Penguatan Branding, Sertifikasi, dan Ekspor Produk Lokal,Ketahanan Pasar dan Perlindungan Produk Lokal. Penguatan identitas produk berarti membangun merek atau branding yang kuat dan unik untuk produk khas Sikka. Sertifikasi mutu (misalnya, SNI, BPOM, halal) adalah jaminan kualitas dan keamanan yang esensial untuk masuk ke pasar yang lebih kompetitif. Pengembangan saluran ekspor berarti mengidentifikasi pasar potensial di luar negeri dan memfasilitasi pelaku usaha untuk memenuhi standar ekspor, baik melalui pameran dagang, kemitraan dengan eksportir, atau platform e-commerce global.

7) Penguatan SDM Industri dan Kewirausahaan yang Kompeten dan Berdaya Saing Tinggi
Tujuan strategi ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta mendorong lahirnya wirausahawan baru. Ketersediaan SDM yang berkualitas adalah kunci pertumbuhan industri. Strategi ini difokuskan pada Penguatan SDM Industri Lokal Kolaboratif, Peningkatan Kapasitas SDM dan Wirausaha Industri & Koperasi. Selain itu, penting untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, melalui inkubator bisnis, mentoring, dan dukungan awal untuk memulai

usaha. SDM yang kompeten dan berjiwa wirausaha akan menjadi penggerak utama inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

8) Membangun infrastruktur fisik dan fasilitas pendukung logistik fasilitas logistik terpadu guna mendukung efisiensi produksi, distribusi, dan konektivitas antar wilayah.
Tujuan strategi ini adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran proses produksi, distribusi, dan perdagangan produk industri lokal. Strategi ini mengakui pentingnya Penguatan Infrastruktur Penunjang Industri. Ini mencakup pembangunan atau peningkatan kualitas jalan akses ke sentra industri dan pelabuhan, ketersediaan pasokan listrik dan air yang stabil, serta pengembangan fasilitas logistik seperti gudang penyimpanan, *cold storage* (penyimpanan dingin), dan pusat konsolidasi barang. Infrastruktur yang memadai akan mengurangi biaya produksi dan distribusi, mempercepat waktu pengiriman, dan meningkatkan efisiensi operasional bagi seluruh pelaku industri dan perdagangan.

9) Memperkuat ketahanan dan keberlanjutan industri lokal melalui penerapan prinsip industri tangguh, rendah emisi, dan ramah lingkungan berbasis sumber daya laut.
Tujuan strategi ini adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri lokal berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, serta mampu bertahan menghadapi tantangan dan gejolak di masa depan.
Strategi ini menekankan pentingnya pembangunan industri yang bertanggung jawab. Oleh karena itu strategi ini fokus pada Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan Industri, Ketahanan Industri Lokal terhadap Persaingan dan Perdagangan Bebas, Reformasi Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan.
Pendekatan tangguh berarti industri lokal harus mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi, teknologi, maupun dampak perubahan iklim. Ini bisa melalui diversifikasi produk, adopsi teknologi yang adaptif, atau pengembangan rencana kontingensi. Pendekatan ramah lingkungan berarti mendorong praktik produksi yang minim limbah, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, dan sertifikasi ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya menjaga kelestarian alam Sikka, tetapi juga dapat menjadi nilai tambah bagi produk-produk lokal di pasar global yang semakin peduli lingkungan.

Sasaran 2.3 Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata, memiliki beberapa strategi sebagai berikut:

1) Transformasi Digital dan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Sektor Tersier yang Terintegrasi dan Adaptif
Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan daya saing sektor perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi digital dan penyediaan infrastruktur modern yang relevan. Pembangunan infrastruktur pendukung berarti memastikan ketersediaan sarana fisik yang relevan, seperti akses internet yang stabil dan merata di seluruh wilayah potensial pariwisata dan pusat perdagangan, serta pengembangan fasilitas seperti co-working space atau digital hub untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif. Terintegrasi dan adaptif berarti infrastruktur dan sistem digital harus saling terhubung dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi serta kebutuhan pasar di masa depan. Strategi ini berfokus pada Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem Digital untuk Perdagangan dan Pariwisata, Pengembangan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wisata Strategis, Penguatan Infrastruktur Akses Pariwisata dan Destinasi Alternatif, Penguatan Sistem Logistik dan Stabilisasi Harga Komoditas. Ini juga mencakup pengembangan basis data pariwisata dan perdagangan yang terpusat untuk analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

2) Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya, Komunitas, dan Kemitraan
Tujuan strategi ini adalah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang unik, dengan memanfaatkan kekayaan budaya lokal, melibatkan komunitas, dan membangun kemitraan strategis.
Strategi ini mengakui bahwa UMKM dan ekonomi kreatif adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi inklusif. Penguatan UMKM dilakukan melalui Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif melalui Kolaborasi dan Promosi, Penguatan Ekosistem UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya dan Teknologi, Pembangunan Pusat Kreatif dan Inkubasi Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berbasis Komunitas. Fokusnya adalah pada ekonomi kreatif berbasis budaya, artinya mengembangkan produk atau jasa yang memiliki nilai tambah dari kearifan lokal, seni, atau tradisi Sikka (misalnya, kerajinan tangan, kuliner khas, pertunjukan seni).
Keterlibatan komunitas sangat penting, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai penerima manfaat langsung. Kemitraan dapat dibangun dengan pihak swasta, lembaga pendidikan, atau organisasi lain untuk memfasilitasi pengembangan produk, akses pasar, atau pelatihan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan produk dan pengalaman yang otentik dan memiliki daya tarik tersendiri.

3) Transformasi Pariwisata Tangguh, Berkelanjutan, dan Inklusif, serta Berorientasi pada Pasar Wisata Tematik
Tujuan strategi ini adalah untuk membangun sektor pariwisata yang mampu bertahan dari tantangan, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, memberikan manfaat bagi semua pihak, serta fokus pada segmen pasar yang spesifik dan bernilai tinggi. Pariwisata Sikka harus memiliki kapasitas untuk pulih dengan cepat dari krisis (misalnya pandemi, bencana alam) dan beradaptasi dengan perubahan tren pasar. Ini melibatkan pengembangan rencana kontingensi dan diversifikasi produk wisata.
Strategi ini akan berfokus pada Integrasi Pariwisata, Budaya, dan Kesehatan sebagai Daya Ungkit Ekonomi Baru, Transformasi Wisata Daerah yang Adaptif dan Tangguh, Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pendukung Pariwisata, Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata dan Hospitality Lokal, Mitigasi Risiko Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Berbasis Komunitas, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pariwisata

4) Revitalisasi Perdagangan serta Pelaku Usaha Lokal
Tujuan strategi ini adalah untuk menghidupkan kembali dan memodernisasi sektor perdagangan tradisional, serta memperkuat posisi dan daya saing pelaku usaha lokal di tengah persaingan pasar.
Strategi ini berfokus pada upaya Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha dan Pelayanan Perdagangan, Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Sektor Perdagangan Lokal, Revitalisasi Sarana Perdagangan dan Penguatan Rantai Logistik Lokal, Penguatan Tata Kelola Pasar dan Pelayanan Perdagangan, Reformulasi Tata Kelola dan Pembiayaan Sektor Tersier

5) Penguatan Promosi, *Branding*, dan *Positioning* Daerah
Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan citra dan daya tarik Kabupaten Sikka sebagai tujuan perdagangan dan pariwisata, serta menempatkannya secara strategis di benak calon pengunjung dan investor.
Strategi ini adalah tentang bagaimana Sikka "menjual" dirinya sendiri. Penguatan promosi berarti melakukan kampanye pemasaran yang efektif melalui berbagai media (digital, cetak, acara pameran), baik di tingkat domestik maupun internasional. *Branding*

adalah penciptaan identitas visual dan naratif yang kuat dan konsisten untuk Sikka (misalnya, "Sikka: *The Heart of Flores*" atau slogan lain yang menggambarkan keunikan daerah).
Positioning daerah adalah upaya menempatkan Sikka secara strategis di pasar, menyoroti keunggulan komparatifnya (misalnya, keindahan alam bawah laut, kekayaan tenun ikat, atau keramahtamahan penduduk). Tujuannya adalah agar Sikka dikenali, diingat, dan menjadi pilihan utama bagi wisatawan dan pelaku usaha.
Strategi ini akan difokuskan pada Promosi dan Branding Daerah Secara Konsisten dan Kolaboratif, Penguatan Branding Daerah dan Aktivasi Event Promosi Wisata

6) Mendorong Ekosistem Kelembagaan yang Adaptif dan Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Sektor Tersier
Tujuan strategi ini adalah untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang kolaboratif, responsif, dan sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, demi mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata.Strategi ini berfokus pada Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan Penunjang Sektor Tersier, Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Pendukung Produktivitas Sektor Tersier.
Ekosistem kelembagaan berarti adanya koordinasi yang baik antara dinas terkait (pariwisata, perdagangan, perindustrian, UMKM), asosiasi pelaku usaha (hotel, restoran, pedagang), kelompok masyarakat, dan akademisi. Adaptif berarti kelembagaan ini mampu merespons cepat terhadap perubahan tren pasar, kebijakan, atau tantangan yang muncul. Terintegrasi berarti tidak ada silo kerja, melainkan semua pihak bergerak dalam satu visi dan misi yang sama. Hal ini akan mempercepat proses perizinan, penyaluran bantuan, pengembangan kebijakan, dan penyelesaian masalah yang dihadapi sektor tersier.

7) Membangun Sistem Adaptasi dan Mitigasi Risiko Ekonomi terhadap Geopolitik dan Krisis Eksternal
Tujuan strategi ini adalah untuk melindungi ekonomi lokal, khususnya sektor perdagangan dan pariwisata, dari dampak negatif gejolak politik global, krisis ekonomi eksternal, atau kejadian tak terduga lainnya.
Dunia terus berubah, dan ekonomi lokal rentan terhadap faktor-faktor eksternal. Strategi ini bertujuan untuk membangun "daya tahan" ekonomi Sikka dengan fokus pada Meningkatkan Adaptasi Sektor terhadap Ketidakpastian Eksternal dan Geopolitik, Diversifikasi Produk Lokal dan Hilirisasi Komoditas Unggulan. Sistem adaptasi berarti kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri dengan kondisi baru, misalnya dengan mencari pasar alternatif jika pasar utama terganggu, atau mengembangkan jenis pariwisata baru jika pasar tertentu mengalami penurunan.
Mitigasi risiko melibatkan identifikasi potensi ancaman (misalnya, inflasi global, pembatasan perjalanan, perubahan kebijakan perdagangan internasional) dan penyusunan rencana untuk mengurangi dampaknya. Ini bisa berupa diversifikasi sumber pendapatan daerah, peningkatan kapasitas cadangan, atau pengembangan skema asuransi bagi pelaku usaha. Tujuannya adalah agar ekonomi Sikka tidak mudah terombang-ambing oleh krisis dari luar.

Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur Antarwilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Strategi pada Misi 3 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Strategi Pembangunan Misi 3

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 3. Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan		
Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	1. Penguatan infrastruktur jalan, transportasi, dan konektivitas wilayah yang terintegrasi untuk pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal. 2. Penataan permukiman dan pengurangan kawasan kumuh inklusif berbasis kolaborasi dan tata ruang 3. Penguatan sistem penyediaan infrastruktur dasar yang adaptif, efisien dan berkelanjutan 4. Ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana dan perubahan iklim 5. Modernisasi tata kelola infrastruktur berbasis teknologi, data, dan digitalisasi infrastruktur 6. Penguatan penataan ruang dan Percepatan Legalisasi Dokumen Perencanaan Infrastruktur serta sinkronisasi lintas sektor 7. Memperkuat kapasitas dan koordinasi kelembagaan untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan 8. Penguatan kolaborasi dan kemandirian infrastruktur 9. Peningkatan Infrastruktur Informasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri, maka penjelasan strategi pada masing sasaran daerah adalah sebagai berikut:

Sasaran 3.1 Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

1) Penguatan Infrastruktur Jalan, Transportasi, dan Konektivitas Wilayah yang Terintegrasi untuk Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Ekonomi Lokal
   Strategi ini bertujuan untuk menciptakan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah serta memperkuat konektivitas ekonomi daerah di Kabupaten Sikka. Strategi ini mencakup peningkatan infrastruktur jalan dan konektivitas wilayah, melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan strategis yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan perdesaan, serta wilayah terpencil. Selain itu, diarahkan pula pengembangan infrastruktur transportasi laut dan darat yang terintegrasi, guna mendukung pergerakan barang dan jasa secara efisien, termasuk penguatan pelabuhan rakyat, terminal, dan sistem angkutan antardesa atau antarwilayah. Peningkatan aksesibilitas transportasi menjadi prioritas untuk membuka isolasi geografis, menurunkan biaya logistik, dan memperluas kesempatan kerja dan usaha di wilayah-wilayah hinterland. Terakhir, strategi ini juga menekankan peningkatan akses dan konektivitas antarwilayah melalui pengembangan jaringan jalan, terminal, serta moda transportasi yang saling terhubung, guna menciptakan sistem transportasi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan infrastruktur yang terintegrasi dan merata, Kabupaten Sikka diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

2) Penataan Permukiman dan Pengurangan Kawasan Kumuh Inklusif Berbasis Kolaborasi dan Tata Ruang
   Strategi ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah permukiman yang rentan terhadap degradasi kualitas lingkungan. Strategi ini mencakup penataan permukiman dan pengurangan kawasan kumuh secara terintegrasi, melalui pendekatan berbasis tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan

ekonomi masyarakat setempat. Revitalisasi kawasan kumuh dilakukan melalui kolaborasi multisektor, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan lingkungan permukiman. Selain itu, dilakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar permukiman, seperti akses jalan lingkungan, sistem drainase, sanitasi, air bersih, dan listrik, untuk menunjang kehidupan yang layak dan sehat. Upaya ini juga mencakup peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan permukiman dan perumahan rakyat secara merata. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka berkomitmen mendorong terciptanya kawasan hunian yang aman, tertata, inklusif, dan bermartabat, sebagai bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.

3) Penguatan Sistem Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Adaptif, Efisien dan Berkelanjutan

Strategi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan layanan infrastruktur dasar yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, efisien, dan ramah lingkungan. Strategi ini mencakup optimalisasi sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah, dengan fokus pada peningkatan cakupan layanan air bersih berbasis kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta sistem pengolahan limbah domestik yang aman dan sesuai standar kesehatan lingkungan. Selain itu, dilakukan pembangunan sistem pengelolaan air minum, air limbah, dan irigasi yang efisien, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, pemeliharaan jaringan distribusi, serta penyusunan sistem manajemen terpadu berbasis kawasan. Pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya air, termasuk efisiensi pemanfaatan air untuk pertanian melalui penguatan sistem irigasi. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka diharapkan mampu membangun sistem layanan infrastruktur dasar yang tahan terhadap krisis, menjangkau seluruh wilayah, serta mendukung kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4) Ketahanan Infrastruktur terhadap Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

Strategi ini bertujuan untuk membangun sistem infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga aman, tangguh, dan adaptif dalam menghadapi ancaman bencana alam serta dampak perubahan iklim. Strategi ini mencakup perencanaan infrastruktur yang antisipatif terhadap risiko bencana, dengan mengintegrasikan analisis risiko geologis, hidrometeorologis, dan perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan tata ruang, pembangunan jalan, jembatan, permukiman, dan fasilitas publik lainnya. Selanjutnya, dilakukan penguatan sistem infrastruktur wilayah yang tangguh bencana dan perubahan iklim, melalui penerapan standar teknis bangunan tahan bencana, sistem peringatan dini, serta tata kelola berbasis mitigasi risiko dan pemulihan cepat pascabencana. Strategi ini juga menitikberatkan pada penguatan infrastruktur adaptif terhadap risiko iklim, termasuk di kawasan pesisir, daerah aliran sungai, dan wilayah lereng rawan longsor, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi ekosistem penyangga. Selain itu, penguatan infrastruktur tangguh bencana secara khusus difokuskan pada kawasan rawan bencana, seperti desa-desa yang sering terdampak banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Sikka diharapkan mampu membangun sistem infrastruktur yang berkelanjutan, melindungi kehidupan masyarakat, dan mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana dan krisis iklim di masa mendatang.

5) Modernisasi Tata Kelola Infrastruktur Berbasis Teknologi, Data, dan Digitalisasi Infrastruktur

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketangguhan sistem infrastruktur di Kabupaten Sikka melalui pemanfaatan teknologi digital dan data. Strategi ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan infrastruktur, yang memungkinkan monitoring real-time, pengambilan keputusan berbasis data, serta respon cepat terhadap gangguan atau kerusakan. Selain itu, dilakukan digitalisasi manajemen infrastruktur dan transportasi, termasuk sistem tiket digital, pelacakan kendaraan umum, dan pengelolaan lalu lintas berbasis sensor, untuk mendorong efisiensi dan resiliensi pelayanan publik. Strategi ini juga menekankan pada pemanfaatan teknologi alternatif dalam penyediaan air bersih dan energi terbarukan, khususnya untuk wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau, guna menjamin akses infrastruktur dasar secara adil dan berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan infrastruktur digital seperti jaringan internet dan sistem layanan publik berbasis data turut didorong sebagai tulang punggung transformasi infrastruktur yang adaptif dan terintegrasi. Dengan strategi ini, Kabupaten Sikka diarahkan menuju tata kelola infrastruktur modern yang mendukung pembangunan cerdas, inklusif, dan tangguh di era transformasi digital.

6) Penguatan Penataan Ruang dan Percepatan Legalisasi Dokumen Perencanaan Infrastruktur serta Sinkronisasi Lintas-Sektor

Strategi ini bertujuan untuk menciptakan landasan tata ruang yang kuat, terintegrasi, dan legal sebagai acuan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sikka. Strategi ini mencakup pengendalian pemanfaatan ruangsecara efektif guna mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan mengurangi konflik penggunaan lahan, khususnya di wilayah strategis, rawan bencana, serta kawasan lindung. Selain itu, strategi ini menekankan penyusunan dokumen perencanaan dan regulasi infrastruktur dasar secara komprehensif, seperti Rencana Induk Infrastruktur, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, serta regulasi teknis lainnya yang menjadi prasyarat pelaksanaan pembangunan. Percepatan legalisasi dokumen perencanaan infrastruktur strategis, termasuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan DED (*Detail Engineering Design*), juga menjadi fokus penting agar proses pembangunan tidak mengalami hambatan administratif dan memperoleh kepastian hukum. Terakhir, strategi ini mendorong sinkronisasi lintas sektor, baik antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah pusat dan sektor swasta, agar seluruh rencana infrastruktur selaras dan saling mendukung dalam mewujudkan infrastruktur yang merata, efisien, dan berkelanjutan.

7) Memperkuat Kapasitas dan Koordinasi Kelembagaan untuk Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan

Strategi ini difokuskan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan perumahan di Kabupaten Sikka berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan investasi di sektor perumahan serta penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi guna menunjang konektivitas dan aksesibilitas wilayah, terutama di kawasan padat dan berkembang. Selain itu, strategi ini juga menekankan mitigasi alih fungsi lahan, yang kerap menjadi tantangan dalam penyediaan ruang perumahan dan infrastruktur, melalui penguatan regulasi dan pengawasan pemanfaatan ruang. Di sisi kelembagaan, penguatan institusi pertanahan dan koordinasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk mempercepat perizinan, pengendalian pembangunan, serta penyelesaian persoalan lahan dan kepemilikan. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan sinergi antar sektor,

pembangunan infrastruktur dan perumahan dapat dilaksanakan secara terpadu, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

8) Penguatan Kolaborasi dan Kemandirian Infrastruktur
Strategi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembangunan infrastruktur yang tidak hanya bergantung pada pembiayaan pemerintah semata, tetapi juga mengedepankan prinsip gotong royong, kemitraan, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Melalui penguatan kolaborasi multilevel dan multisektor, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk melibatkan peran aktif dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, serta lembaga non-pemerintah dalam proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur. Strategi ini juga menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur, baik melalui penguatan kelembagaan lokal, diversifikasi sumber pembiayaan, maupun inovasi teknologi. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Sikka diharapkan mampu mewujudkan infrastruktur yang tangguh, efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

9) Peningkatan Infrastruktur Informasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Strategi ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan publik dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan. Upaya ini mencakup perbaikan sistem dan sarana infrastruktur informasi, termasuk digitalisasi kanal komunikasi dan penyediaan data pembangunan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, strategi ini juga mendorong peningkatan kesadaran dan kapasitas partisipatif masyarakat melalui edukasi publik, sosialisasi program pembangunan, serta fasilitasi forum-forum dialog partisipatif. Dengan memperkuat peran serta masyarakat secara aktif, pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan lokal serta memperkuat akuntabilitas dan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan.

Misi 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Risilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan

Strategi pada Misi 4 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Strategi Pembangunan Misi 4

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan		
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan	1. Penguatan sistem pengelolaan sampah dan air limbah berbasis regulasi, teknologi, dan kolaborasi komunitas 2. Penguatan peran komunitas dan CSR dalam menjaga pengelolaan lingkungan dan mendorong perubahan perilaku 3. Pengendalian Pertambangan dan Pengelolaan Konservasi DAS Berbasis Data dan Komunitas 4. Digitalisasi dan pemantauan lingkungan berbasis data dan peralatan modern 5. Pengembangan RTH dan Ekowisata berbasis komunitas, data dan teknologi untuk Rehabilitasi Lahan dan Pengendalian Ruang 6. Penguatan perlindungan kawasan lindung dan rawan melalui pemantauan, penghijauan, dan pemberdayaan

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
		7. Penguatan perangkat hukum dan penegakan aturan untuk perlindungan lingkungan 8. Pengendalian dampak urbanisasi dan integrasi lingkungan dalam perencanaan ruang 9. Tata kelola adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko lingkungan

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari, maka penjelasan strategi pada sasaran daerah adalah sebagai berikut:

Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

1) Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Berbasis Regulasi, Teknologi, dan Kolaborasi Komunitas
   Strategi ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat melalui sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah optimalisasi implementasi regulasi terkait pengelolaan sampah, termasuk penegakan aturan mengenai pengurangan sampah plastik dan pemilahan sampah dari sumber. Selain itu, penguatan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah dan air limbah, seperti fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan sistem drainase ramah lingkungan. Strategi ini juga mendorong penerapan teknologi tepat guna serta kolaborasi aktif komunitas lokal dalam mengelola limbah rumah tangga maupun industri skala kecil. Dengan pendekatan regulatif, teknologis, dan partisipatif ini, sistem pengelolaan sampah dan air limbah diharapkan menjadi lebih efektif dalam menjaga kualitas lingkungan dan mendukung ketahanan ekosistem daerah secara berkelanjutan.

2) Penguatan Peran Komunitas dan CSR dalam Menjaga Pengelolaan Lingkungan dan Mendorong Perubahan Perilaku
   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan berbasis komunitas, program-program edukasi lingkungan dan pengelolaan sampah diperkuat dengan dukungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari dunia usaha, guna menyediakan sumber daya, inovasi, dan insentif perubahan perilaku. Strategi ini juga mencakup kampanye massif edukasi publik, khususnya dalam penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta praktik ramah lingkungan, untuk membangun kebiasaan dan budaya ekologis sejak dini. Keterlibatan komunitas lokal dan sektor swasta diposisikan sebagai mitra strategis dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berakar pada kebutuhan serta potensi lokal.

3) Pengendalian Pertambangan dan Pengelolaan Konservasi DAS Berbasis Data dan Komunitas
   Strategi ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan DAS, termasuk upaya pemantauan kualitas air secara berkelanjutan melalui sistem berbasis data yang akurat dan terkini. Di sisi lain, pengendalian aktivitas pertambangan dilakukan secara ketat dengan mengacu pada data spasial dan kajian lingkungan, serta mengintegrasikan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan konservasi. Strategi ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pengelolaan DAS dan pertambangan yang lebih transparan,

partisipatif, dan berbasis bukti, guna memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan ketahanan ekosistem daerah.

4) Digitalisasi dan Pemantauan Lingkungan Berbasis Data dan Peralatan Modern
Strategi ini difokuskan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan kualitas lingkungan secara *real-time* dan berbasis bukti. Melalui peningkatan sistem pemantauan lingkungan yang mengintegrasikan teknologi sensor, data spasial, dan perangkat digital, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi akurat terkait kualitas udara, air, tanah, dan potensi pencemaran lainnya. Revitalisasi laboratorium lingkungan dilakukan guna mendukung kegiatan pengujian dan analisis lingkungan yang lebih andal, dengan penambahan tenaga teknis yang kompeten dan sarana prasarana yang modern. Selain itu, strategi ini juga mendorong penguatan pengawasan lingkungan secara menyeluruh, baik melalui pemanfaatan teknologi digital maupun peningkatan kapasitas kelembagaan, untuk memastikan keberlanjutan ekosistem serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup di tingkat daerah.

5) Pengembangan RTH dan Ekowisata Berbasis Komunitas, Data dan Teknologi untuk Rehabilitasi Lahan dan Pengendalian Ruang
Strategi ini bertujuan untuk memperkuat kesehatan lingkungan dan ketahanan ekosistem melalui pendekatan yang integratif dan partisipatif. Fokus utama strategi ini adalah pengembangan RTH dan ekowisata hijau yang tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi komunitas lokal melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan. Pendekatan berbasis data dan teknologi diterapkan dalam pengendalian serta rehabilitasi lahan kritis dan RTH, termasuk penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk identifikasi wilayah prioritas konservasi. Selain itu, strategi ini juga menekankan pentingnya penataan ruang terbuka hijau secara terpadu dan penertiban lahan pasca-pertambangan yang merusak lingkungan, guna memastikan keberlanjutan fungsi ekologis serta memperkuat daya dukung lingkungan hidup daerah secara menyeluruh.

6) Penguatan Perlindungan Kawasan Lindung dan Rawan Melalui Pemantauan, Penghijauan, dan Pemberdayaan
Strategi ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan melalui pendekatan yang terpadu antara pemantauan, penghijauan, dan pemberdayaan masyarakat. Fokus utama strategi ini adalah pada pengelolaan dan rehabilitasi kawasan lindung serta wilayah yang rawan kebakaran, termasuk peningkatan kapasitas deteksi dini dan respons terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Di samping itu, dilakukan juga penataan dan konservasi kawasan lindung secara sistematis guna menjaga keseimbangan ekologis, serta rehabilitasi tutupan lahan melalui program penghijauan yang melibatkan peran aktif komunitas lokal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan lingkungan terhadap degradasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dalam menjaga fungsi ekologis wilayah lindung secara berkelanjutan.

7) Penguatan Perangkat Hukum dan Penegakan Aturan untuk Perlindungan Lingkungan
Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat ditegakkan secara efektif. Strategi ini mencakup pengkajian dan penyusunan regulasi lingkungan hidup secara menyeluruh, yang mencakup aspek konservasi, pengelolaan sumber daya alam, hingga pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, dilakukan pula penegakan regulasi secara konsisten dan berkeadilan, agar pelanggaran terhadap aturan lingkungan dapat diminimalkan dan memberikan efek jera. Melalui penguatan

instrumen hukum ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang lebih tegas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian ekosistem secara berkelanjutan.

8) Pengendalian Dampak Urbanisasi dan Integrasi Lingkungan dalam Perencanaan Ruang
Strategi ini bertujuan untuk mengelola pertumbuhan wilayah perkotaan agar tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap lingkungan hidup. Strategi ini mencakup manajemen urbanisasi yang terencana, melalui pengendalian konversi lahan, pengaturan zonasi, serta penyediaan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan. Selain itu, perencanaan tata ruang diintegrasikan secara menyeluruh dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, guna menciptakan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam dokumen perencanaan ruang, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan perlindungan ekosistem, sehingga urbanisasi dapat diarahkan menjadi proses yang adaptif, tertib, dan ramah lingkungan.

9) Tata Kelola Adaptif terhadap Perubahan Iklim dan Risiko Lingkungan
Strategi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana lingkungan. Hal ini meliputi upaya adaptasi terhadap perubahan iklim melalui peningkatan kesadaran masyarakat, perencanaan wilayah yang responsif iklim, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Di sisi lain, dilakukan pula mitigasi risiko bencana lingkungan melalui sistem peringatan dini, pemetaan risiko berbasis data, serta penguatan kelembagaan dan komunitas lokal dalam penanggulangan bencana. Strategi ini bertujuan menciptakan tata kelola lingkungan yang tangguh dan fleksibel, sehingga mampu melindungi ekosistem sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat di tengah dinamika iklim global.

Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif

Strategi pada Misi 5 disusun berdasarkan tujuan daerah,, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Strategi Pembangunan Misi 5

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif, akuntabel dan efisien serta bebas KKN	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital 2. Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam memperkuat tata organisasi, serta dan mitigasi keamanan dan kebencanaan. 3. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah untuk peningkatan PAD 4. Penyelarasan dan penegakkan regulasi pusat dan daerah 5. Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan pelatihan 6. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas
	Akuntabilitas Keuangan yang semakin baik diikuti dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah	
	Terwujudnya sistim pemerintahan yang efektif dan transparan	
	Meningkatnya keamanan dan kerukunan Masyarakat	
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, dan Efisien serta Bebas KKN, maka penjelasan strategi pada sasaran daerah adalah sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
Strategi ini berfokus pada transformasi digital pada penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Termasuk di antaranya adalah mengintegrasikan data pemerintah, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi berbasis digital (*e-government*), transformasi sistem perpajakan, membangun stabilitas pertahanan dan dan mendorong kapasitas sistem pelayanan publik digital, serta peningkatan keamanan digital dan mengembangkan layanan digital OPD. Transformasi ini kemudian tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi, namun juga digunakan untuk memperkuat akuntabilitas seperti halnya peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan hingga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan profesionalitas SDM.

2) Penguatan Kolaborasi Antar-*stakeholder* dalam Memperkuat Tata Organisasi, serta Mitigasi Keamanan dan Kebencanaan
Strategi ini menekankan pada pentingnya keterlibatan *stakeholder* dalam penyelenggaraan pemerintah untuk turut ikut serta dalam membantu tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Tata kelola organisasi yang lebih baik dengan mengusung kolaborasi, serta penguatan dari segi manajemen dan pengelolaan keuangan akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih baik pula. Seperti halnya pengelolaan kekuatan melalui penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dapat membantu daerah dalam memberikan layanan umum yang lebih efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, peningkatan kolaborasi juga dapat mendorong organisasi bertindak dan membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat, hal ini penting utamanya dalam melakukan mitigasi keamanan dan kebencanaan yang membutuhkan tindakan cepat. Dalam strategi ini yang akan dilakukan antara lain membangun membangun kolaborasi antar aktor dalam menyelenggarakan pelayanan publik, melakukan kolaborasi dalam mengelola potensi gangguan keamanan, serta memperkuat tata organisasi pelayanan publik dasar melalui pemanfaatan potensi daerah dan kolaborasi lintas sektor.

3) Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Daerah untuk Peningkatan PAD
Pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan dengan sangat efisien dan efektif, mengingat adanya efisiensi yang saat ini sedang diberlakukan di seluruh Indonesia. Idealnya, pendapatan anggaran yang diraih oleh Kabupaten Sikka kemudian dapat dikelola kembali sebagai sumberdaya untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Dalam strategi ini, maka akan dilakukan memperkuat pengelolaan potensi pajak untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di tengah pengetatan anggaran pemerintah pusat serta memaksimalkan pengelolaan potensi daerah di tengah pengetatan anggaran pemerintah pusat;

4) Penyelarasan dan Penegakan Regulasi Pusat dan Daerah
Penegakan hukum menjadi poin penting dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah. Strategi ini disusun untuk memperkuat penegakan hukum serta menyelaraskan regulasi daerah dengan pusat sehingga dapat dicapai pembangunan yang berkelanjutan. Pada strategi ini kemudian akan ditekankan pada memperkuat kepastian dan penegakan hukum melalui penyelarasan regulasi daerah dan pusat, akselerasi dalam penyelarasan regulasi pusat ke daerah untuk mendorong implementasi dan sinergitas regulasi,

memperkuat manajemen keamanan informasi melalui pembentukan regulasi terkait pelayanan adminduk standar SMKI serta mengoptimalisasi forum kerukunan umat beragama, kewaspadaan dini, dan pembaruan kebangsaan di masyarakat melalui regulasi untuk mendorong demokratisasi.

5) Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan
Untuk membentuk tata kelola yang efektif, maka dibutuhkan kapasitas SDM yang mumpuni di dalamnya. Peningkatan Kualitas SDM menjadi poin yang krusial, utamanya karena adanya tuntutan yang lebih besar baik dari tatanan pemerintahan maupun masyarakat terhadap tata kelola pemerintah daerah, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga strategi ini menekankan pada peningkatan profesionalitas SDM dengan memanfaatkan program beasiswa serta berkolaborasi dengan *stakeholder* lainnya.

6) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Akuntabilitas keuangan menjadi hal yang penting ditengah pengetatan anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, dan harus diikuti oleh seluruh daerah tidak terkecuali Kabupaten Sikka. Sehingga dalam hal ini pengawasan menjadi sangat penting untuk memperhatikan apakah anggaran yang dimiliki sudah dikelola dengan bijak dan efektif. Strategi ini kemudian menekankan pada meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan tata Kelola keuangan di Tengah pengetatan anggaran pemerintah pusat.

3.5.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029, pembangunan lima tahunan dirancang secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan. Setiap tahapan pembangunan disusun berdasarkan prinsip kesinambungan, efektivitas, dan adaptabilitas terhadap dinamika kondisi lokal, nasional, maupun global. Tahapan ini mencerminkan proses konsolidasi sumber daya, penguatan kapasitas kelembagaan, serta akselerasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Secara teknis, tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 dibagi ke dalam lima fase tahunan, yang masing-masing memiliki fokus kebijakan dan arah pembangunan yang berbeda namun saling terkait. Penyusunan tahapan ini mengacu pada prinsip sinkronisasi dengan RPJPD Kabupaten Sikka 2025–2045, RPJMD Provinsi NTT, serta RPJMN Tahun 2025–2029, sehingga capaian pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional dan regional. Adapun rincian tahapan pembangunan dimaksud disajikan dalam gambar berikut:

Tabel 3.13
Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pondasi Inklusif dan Adaptif untuk Pembangunan Berkelanjutan	Penguatan Kapasitas dan Sistem Lintas Sektor yang Efektif dan Berkelanjutan	Transformasi Inklusif Berbasis Inovasi dan Komunitas	Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Ekologis	Kemandirian dan Keberlanjutan Daerah Menuju Daya Saing Global

Fokus pada pembangunan dasar kebijakan SDM yang inklusif, fondasi ekonomi sektor primer, penguatan tata kelola infrastruktur dan lingkungan hidup berbasis komunitas dan tata ruang adaptif, serta tata kelola pemerintahan yang berorientasi regulasi dan akuntabilitas.	Menitikberatkan pada pemantapan sistem pembangunan manusia lintas sektor, memperkuat sektor ekonomi berkelanjutan, integrasi pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup dengan teknologi, serta penguatan kolaborasi tata kelola pemerintahan.	Fokus pada daya saing dan kesejahteraan berbasis inovasi sosial, pengembangan sektor industri berbasis lokal, transformasi infrastruktur dan lingkungan berbasis teknologi, serta tata kelola SDM dan akuntabilitas pemerintahan.	Penekanan pada pembangunan SDM tangguh dan adaptif, penguatan kemandirian ekonomi lokal, transformasi hijau dan keadilan ekologis dalam infrastruktur, serta digitalisasi pelayanan publik dan akuntabilitas tata kelola.	Berfokus pada keberlanjutan SDM yang unggul, daya saing ekonomi yang mapan, infrastruktur regeneratif dan digital menyeluruh, serta penyelenggaraan pemerintahan efektif melalui digitalisasi layanan publik.

Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 disusun secara bertahap dan strategis untuk memastikan kesinambungan pembangunan menuju daerah yang mandiri dan berdaya saing global. Pada Tahap I (2026), fokus utama adalah membangun pondasi yang inklusif dan adaptif dengan memperkuat kebijakan SDM, ekonomi sektor primer, serta tata kelola infrastruktur dan lingkungan berbasis komunitas dan regulasi yang akuntabel. Selanjutnya, Tahap II (2027) diarahkan pada penguatan kapasitas dan sistem lintas sektor yang berkelanjutan melalui integrasi pembangunan manusia, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan infrastruktur dan lingkungan, serta kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. Memasuki Tahap III (2028), pembangunan mulai ditransformasikan secara inklusif melalui inovasi sosial dan pemberdayaan komunitas, dengan menitikberatkan pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan industri lokal, serta transformasi infrastruktur dan lingkungan berbasis teknologi. Tahap IV (2029)menjadi momentum untuk memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi dinamika sosial dan ekologis, dengan menekankan pada pembangunan SDM tangguh, kemandirian ekonomi lokal, transformasi hijau dan digitalisasi layanan publik. Terakhir, Tahap V (2030) merupakan tahap konsolidasi untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan daerah dengan mendorong keunggulan SDM, daya saing ekonomi yang mapan, infrastruktur regeneratif dan digital menyeluruh, serta penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui layanan publik berbasis digital. Keseluruhan tahapan ini menunjukkan arah pembangunan yang progresif, adaptif, dan terintegrasi demi terwujudnya Kabupaten Sikka yang produktif, kreatif, unggul, dan mandiri.

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman strategis yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Setiap misi pembangunan dirinci ke dalam arah kebijakan sebagai bentuk nyata dari rencana kerja yang akan mengarahkan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pembangunan. Dalam jangka menengah, arah kebijakan ditetapkan untuk lima tahun, dengan penekanan atau fokus yang berbeda setiap tahunnya pada masing-masing sektor pembangunan. Meskipun memiliki prioritas yang bervariasi tiap tahun, arah kebijakan tersebut disusun secara sinergis dan berkesinambungan agar saling mendukung satu sama lain. Penjelasan arah kebijakan bagi pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sikka dari setiap misi adalah sebagai berikut.

Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial

Untuk dapat mewujudkan Misi 1 maka pembangunan diarahkan pada pencapaian kinerja seluruh sasaran pada misi ini, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dan adaptif berbasis kearifan lokal, meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan, meningkatnya kehidupan layak

masyarakat yang bermartabat, dan terwujudnya pembangunan berkeadilan gender yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai seluruh sasaran pada misi ini, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah spesifik Misi 1 pada setiap periodisasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

Tabel 3.14
Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Memantapkan tata kelola dan infrastruktur layanan SDM yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	Meningkatkan daya saing dan kesejahteraan manusia melalui inovasi dan integrasi sosial berbasis komunitas.	Membangun SDM yang tangguh, adil gender, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan lingkungan.	Menjamin keberlanjutan pembangunan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan responsif terhadap dinamika global.

Secara terperinci, arah kebijakan yang terkait dengan pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dalam setiap tahap RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I: Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal

Pada tahap awal ini, kebijakan difokuskan pada penguatan fondasi kelembagaan dan sistem pelayanan SDM yang berpihak pada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan. Penyusunan kebijakan dilakukan dengan mengutamakan prinsip inklusivitas dan responsivitas, sehingga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Nilai-nilai lokal dan kearifan budaya Sikka menjadi basis dalam merancang layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang kontekstual serta membumi. Fokus utama arah kebijakan pada Tahun I diarahkan untuk membangun fondasi awal yang kuat bagi transformasi sistem pelayanan dasar publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis nilai-nilai lokal. Di sektor pendidikan, upaya difokuskan pada penciptaan landasan pendidikan yang inklusif dan merata, melalui penerapan transformasi digital, penguatan ekosistem pembelajaran, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai pendekatan kontekstual dalam proses belajar mengajar. Di bidang kesehatan, kebijakan diarahkan pada pembangunan fondasi layanan yang inklusif dan responsif, melalui penguatan kapasitas SDM kesehatan, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk menanggulangi permasalahan mortalitas, penyakit, dan gizi buruk secara preventif. Dalam aspek kualitas hidup dan perlindungan sosial, fokus diberikan pada penguatan sistem perlindungan sosial dan ketenagakerjaan yang responsif terhadap wilayah dan inklusif terhadap kelompok rentan seperti pemuda, keluarga, dan migran. Sementara itu, pada bidang kesetaraan gender, penekanan diberikan pada penguatan tata kelola yang responsif gender serta penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh tingkatan pemerintahan sebagai pondasi awal mewujudkan pembangunan manusia yang adil dan setara. Dengan demikian, arah kebijakan pada tahap pertama ini tidak hanya memperkuat kerangka kelembagaan, tetapi juga merintis transformasi layanan publik yang kolaboratif, berbasis teknologi, dan menjunjung tinggi kearifan lokal serta prinsip keadilan sosial.

Arah Kebijakan Tahap II: Memantapkan tata kelola dan infrastruktur layanan SDM yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Tahap ini bertujuan untuk memperluas cakupan dan memperkuat kualitas pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat secara merata. Fokus utama adalah pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial, baik fisik maupun digital. Tata kelola pelayanan diperkuat melalui sistem manajemen yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi. Program ini juga mendorong pemerataan sumber daya manusia (tenaga pendidik, tenaga medis, penyuluh sosial) ke wilayah-wilayah

terpencil agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan antarwilayah. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada pemantapan kualitas dan perluasan jangkauan layanan dasar yang merata dan inklusif melalui penguatan tata kelola serta pengembangan infrastruktur pendukung. Dalam sektor pendidikan, kebijakan difokuskan pada penguatan kapasitas guru, inovasi layanan pembelajaran, serta penataan sarana dan ekosistem pendidikan yang berbasis kearifan lokal dan ketangguhan sosial, guna memperkuat daya adaptasi sistem pendidikan terhadap perubahan sosial dan budaya. Di sektor kesehatan, penekanan diberikan pada penguatan layanan yang merata dan berkualitas melalui peningkatan kapasitas SDM kesehatan, pengembangan infrastruktur layanan dasar, serta edukasi komunitas sebagai ujung tombak peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah rentan dan sulit dijangkau. Sementara itu, dalam bidang perlindungan sosial, arah kebijakan menitikberatkan pada integrasi program perlindungan sosial, pemberdayaan kelompok rentan, dan pelibatan tenaga kerja lokal yang responsif wilayah. Nilai-nilai budaya lokal juga diperkuat sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup yang layak dan berkelanjutan. Adapun dari sisi kesetaraan gender, kebijakan diarahkan untuk memantapkan tata kelola dan pemberdayaan responsif gender, guna mendorong kesetaraan dalam akses, partisipasi, dan kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki di seluruh sektor pembangunan. Dengan pendekatan ini, Tahap II berfungsi sebagai penguatan kapasitas sistem dan kelembagaan dalam memberikan layanan SDM yang menjangkau lebih luas, lebih adil, dan lebih responsif terhadap kebutuhan lintas wilayah dan kelompok masyarakat.

Arah Kebijakan Tahap III: Meningkatkan daya saing dan kesejahteraan manusia melalui inovasi dan integrasi sosial berbasis komunitas

Pada tahap ini, pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan daya saing masyarakat melalui pemanfaatan inovasi, teknologi, dan penguatan peran komunitas. Program pelatihan vokasi, kewirausahaan sosial, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dikembangkan untuk mendorong produktivitas masyarakat. Selain itu, integrasi sosial diperkuat melalui kolaborasi antar komunitas, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.Pada tahap ini, kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan mutu SDM dan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif yang berbasis komunitas. Dalam sektor pendidikan, strategi diarahkan pada penguatan tata kelola dan inovasi berbasis komunitas, serta integrasi nilai-nilai kultural dalam ekosistem pembelajaran guna membangun sistem pendidikan yang tangguh, inklusif, dan mampu meningkatkan daya saing peserta didik secara merata. Di sektor kesehatan, difokuskan pada pemerataan layanan kesehatan yang inklusif dan responsif, melalui pemanfaatan teknologi, penguatan infrastruktur, serta pendekatan kesehatan masyarakat berbasis komunitas dan lintas sektor, untuk menjawab tantangan akses dan mutu layanan di seluruh wilayah. Pada bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi, strategi tahun ketiga menekankan penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama melalui model kewirausahaan komunitas dan penciptaan skema kerja layak bagi pemuda. Ketahanan sosial-budaya juga diperkuat melalui penguatan peran keluarga dan komunitas dalam menghadapi transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi secara cepat. Sementara itu, dalam hal kesetaraan gender, kebijakan difokuskan pada akselerasi keadilan dan kesetaraan gender melalui penguatan sistem perlindungan, perencanaan yang responsif gender, serta perluasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan layanan dasar yang inklusif. Dengan pendekatan ini, Tahap III menjadi momen akseleratif untuk menghubungkan inovasi, sosial-budaya, dan komunitas lokal sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing SDM secara menyeluruh.

Arah Kebijakan Tahap IV: Membangun SDM yang tangguh, adil gender, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan lingkungan

Tahap ini menekankan pada pembangunan karakter dan ketangguhan sosial masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan zaman. SDM diarahkan untuk memiliki ketahanan mental, kecerdasan emosional, serta kesadaran lingkungan dan budaya yang kuat. Arah kebijakan ini juga mengintegrasikan prinsip keadilan gender ke dalam semua sektor pembangunan SDM, serta memperkuat kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap tantangan sosial seperti disrupsi digital, krisis kesehatan, perubahan iklim, dan pergeseran nilai budaya.Pada tahap ini, pembangunan sumber daya manusia difokuskan pada penguatan daya tahan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui konsolidasi mutu pelayanan dasar, pelestarian nilai-nilai lokal, serta adaptasi terhadap berbagai bentuk krisis. Dalam sektor pendidikan, strategi diarahkan pada penguatan daya tahan dan keberlanjutan sistem pendidikan melalui tata kelola yang kolaboratif dan responsif terhadap krisis sosial maupun lingkungan, sekaligus menjaga pelestarian budaya dan integritas lokal. Di bidang kesehatan, kebijakan berfokus pada akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan layanan yang inovatif dan berbasis komunitas. Penekanan diberikan pada integrasi lintas sektor dalam penanggulangan masalah mortalitas, gizi buruk, penyakit menular dan tidak menular, serta kesehatan jiwa, dengan model pelayanan yang responsif dan inklusif. Sementara itu, arah kebijakan kesejahteraan masyarakat menekankan penguatan kapasitas SDM dan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas, serta perluasan akses perlindungan sosial dan kesempatan kerja yang inklusif, terutama bagi keluarga, pemuda, dan kelompok rentan. Hal ini menciptakan ketahanan sosial yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Dalam aspek kesetaraan gender, strategi diarahkan pada transformasi struktural untuk keadilan gender, melalui perlindungan hak-hak perempuan, afirmasi kepemimpinan perempuan, pemberdayaan ekonomi, serta reformasi sosial yang mendorong inklusivitas dan keadilan dalam berbagai lini pembangunan. Dengan pendekatan ini, Tahap IV memperkuat ketangguhan dan adaptabilitas masyarakat Kabupaten Sikka dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer, baik yang bersifat lokal maupun global.

Arah Kebijakan Tahap V: Menjamin keberlanjutan pembangunan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan responsif terhadap dinamika global

Sebagai tahapan penutup dalam periode RPJMD Tahun 2025-2029, fokus utama diarahkan pada konsolidasi hasil-hasil pembangunan SDM agar berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan global. Penekanan diberikan pada penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, peningkatan kemitraan dengan pihak luar (nasional dan internasional), serta pengembangan model-model pembelajaran dan layanan SDM yang adaptif, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan teknologi serta kebutuhan pasar kerja global. Tahap ini juga memastikan bahwa pembangunan SDM tidak hanya menjawab kebutuhan masa kini, tetapi juga menyiapkan generasi masa depan Kabupaten Sikka yang unggul secara kompetitif.Sebagai fase akhir dalam siklus RPJMD 2025–2029, arah kebijakan pada tahap ini menekankan penguatan keberlanjutan sistem pembangunan SDM yang telah dibangun pada tahap-tahap sebelumnya. Di sektor pendidikan, strategi diarahkan pada penciptaan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berbasis kearifan lokal, melalui peningkatan kualitas SDM pendidik, modernisasi infrastruktur pembelajaran, serta kolaborasi multipihak untuk memastikan keterhubungan dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan global. Dalam sektor kesehatan, kebijakan difokuskan pada ketahanan dan kemandirian kesehatan masyarakat, yang dicapai melalui inovasi layanan, penguatan edukasi komunitas, serta sistem pengawasan dan pencegahan terpadu terhadap mortalitas, penyakit, dan masalah gizi. Hal ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi risiko kesehatan jangka panjang. Pada dimensi sosial, strategi diarahkan untuk

menjamin keberlanjutan kehidupan yang layak dan bermartabat, melalui penguatan daya saing SDM lokal serta perlindungan menyeluruh bagi keluarga, anak, dan pemuda sebagai fondasi utama ketahanan sosial masyarakat. Adapun dalam aspek kesetaraan gender, kebijakan fokus pada pemantapan keadilan gender yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mendorong peran strategis perempuan dalam pembangunan, pelaksanaan reformasi sosial, serta integrasi perencanaan responsif gender di seluruh sektor. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Tahap V memastikan bahwa pembangunan SDM Kabupaten Sikka tidak hanya responsif terhadap isu lokal, tetapi juga siap menghadapi tuntutan regional dan global, serta menjamin kesinambungan pembangunan manusia yang adil dan tangguh di masa depan.

Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing

Untuk dapat mewujudkan Misi 2 maka pembangunan diarahkan pada pencapaian kinerja seluruh sasaran pada misi ini. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah spesifik Misi 2 pada setiap periodisasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi biru	Memperkuat kapasitas dan kapabilitas sektor primer untuk pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan	Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis kelautan dan perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Penguatan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah berbasis kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat	Memantapkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah berbasis kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan

Secara terperinci, arah kebijakan yang terkait dengan pada Misi 2 RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dalam setiap tahap RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I: Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi biru

Pada tahap awal ini, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan fondasi sektor-sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka. Upaya dilakukan melalui peningkatan produktivitas, perluasan akses terhadap sarana produksi, perbaikan irigasi dan infrastruktur dasar penunjang, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan. Pendekatan berbasis wilayah dan komoditas unggulan lokal menjadi dasar dalam menciptakan struktur ekonomi yang kokoh dan inklusif sejak tahap awal pembangunan.

Arah Kebijakan Tahap II: Memperkuat kapasitas dan kapabilitas sektor primer untuk pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan

Setelah fondasi terbentuk, tahap ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan efisiensi produksi sektor primer melalui penguatan teknologi tepat guna, penyuluhan terpadu, perluasan akses pasar, dan integrasi rantai nilai. Daya saing komoditas lokal ditingkatkan dengan mendorong inovasi dan akses pembiayaan produktif yang inklusif. Kebijakan ini juga memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.

Arah Kebijakan Tahap III: Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis kelautan dan perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Tahap ini menandai transisi dari produksi primer ke pengembangan nilai tambah melalui sektor industri pengolahan lokal. Pemerintah daerah akan mendorong investasi pada

industri rumah tangga dan skala menengah berbasis hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan lokal. Infrastruktur kawasan industri kecil, pelatihan SDM industri, serta penyederhanaan regulasi usaha akan diperkuat untuk menciptakan ekosistem industri daerah yang mampu bersaing dan menciptakan lapangan kerja.

Arah Kebijakan Tahap IV: Penguatan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah berbasis kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tahap ini memfokuskan pada peningkatan daya saing daerah melalui pemantapan ekosistem usaha lokal yang inovatif dan terintegrasi dengan pasar regional dan nasional. Penguatan kemandirian ekonomi dilakukan dengan memperkuat koperasi, UMKM, ekonomi kreatif, serta memfasilitasi kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi manfaat pembangunan ekonomi secara lebih merata.

Arah Kebijakan Tahap V: Memantapkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah berbasis kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan

Sebagai tahapan akhir RPJMD tahun 2025-2029, kebijakan pembangunan diarahkan pada konsolidasi dan keberlanjutan dari seluruh hasil pembangunan ekonomi sebelumnya. Fokusnya adalah pada penciptaan sistem ekonomi lokal yang resilien, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global. Transformasi digital ekonomi, peningkatan daya saing tenaga kerja lokal, serta kemitraan internasional akan diperluas. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur Antarwilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Untuk dapat mewujudkan Misi 3, maka pembangunan diarahkan pada pencapaian kinerja sasaran misi ini, yaitu: meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Untuk mencapai seluruh sasaran pada misi ini, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah spesifik Misi 3 pada setiap periodisasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

Tabel 3.16

Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Memperkuat fondasi infrastruktur dasar yang inklusif, tangguh, dan terintegrasi, melalui penataan tata ruang, penyediaan infrastruktur dasar, serta penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat	Mengkonsolidasikan sistem infrastruktur wilayah yang tangguh dan berdaya saing melalui integrasi layanan dasar, penguatan kelembagaan, dan tata kelola ruang yang adaptif terhadap investasi dan perubahan iklim	Mendorong akselerasi dan inovasi infrastruktur strategis yang tangguh, cerdas, dan inklusif untuk memperkuat daya saing wilayah dan kualitas hidup masyarakat	Memperkuat integrasi keberlanjutan dan inklusivitas infrastruktur wilayah dalam mendukung transformasi ekonomi hijau, resiliensi sosial, dan daya saing investasi daerah	Mewujudkan infrastruktur dan daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan mandiri melalui transformasi hijau, digitalisasi menyeluruh, serta tata Kelola kolaboratif berbasis masyarakat

Secara terperinci, arah kebijakan yang terkait dengan pada Misi 3 RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dalam setiap tahap RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I: Memperkuat fondasi infrastruktur dasar yang inklusif, tangguh, dan terintegrasi, melalui penataan tata ruang, penyediaan infrastruktur dasar, serta penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat

Pada tahapan awal ini, arah kebijakan difokuskan pada penataan tata ruang yang adaptif dan berkeadilan sebagai landasan pengembangan wilayah yang sinergis dengan penguatan konektivitas jalan, transportasi, serta integrasi antar kawasan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal. Penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan permukiman layak juga menjadi prioritas, dengan pendekatan yang

adaptif, efisien, dan berkesinambungan untuk mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana dan perubahan iklim mulai dibangun melalui perencanaan infrastruktur yang tangguh secara fisik dan sosial. Di sisi kelembagaan, dilakukan penguatan struktur tata kelola melalui kolaborasi lintas sektor, percepatan legalisasi kepastian hukum infrastruktur, serta sinkronisasi lintas level pemerintahan. Seluruh proses didukung oleh peningkatan sistem informasi infrastruktur dan pelibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan, yang menjadi fondasi penting dalam membentuk tata kelola infrastruktur yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Sikka.

Arah Kebijakan Tahap II: Mengkonsolidasikan sistem infrastruktur wilayah yang tangguh dan berdaya saing melalui integrasi layanan dasar, penguatan kelembagaan, dan tata kelola ruang yang adaptif terhadap investasi dan perubahan iklim

Pada tahap ini, arah kebijakan difokuskan pada upaya mengkonsolidasikan sistem infrastruktur wilayah yang tangguh dan berdaya saing melalui integrasi layanan dasar, penguatan kelembagaan, serta tata kelola ruang yang adaptif terhadap investasi dan perubahan iklim. Arah ini mendasari pencapaian sasaran Misi 3 dengan menekankan pentingnya penguatan infrastruktur jalan, transportasi, dan konektivitas wilayah yang terintegrasi sebagai pengungkit utama pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, konsolidasi sistem infrastruktur juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas permukiman melalui penataan ruang yang inklusif dan kolaboratif, serta pengurangan kawasan kumuh secara terencana. Di sisi lain, sistem penyediaan air dan sanitasi diperkuat agar lebih efisien, berkelanjutan, dan tanggap terhadap tantangan perubahan iklim. Tata kelola infrastruktur mulai dimodernisasi melalui pemanfaatan teknologi, digitalisasi data infrastruktur, dan penguatan sistem informasi partisipatif. Penataan ruang dan percepatan legalisasi infrastruktur ditata secara sistematis agar mendukung iklim investasi dan pembangunan jangka panjang yang memiliki kepastian hukum. Dalam konteks kelembagaan, strategi ini mendorong kolaborasi lintas sektor, meningkatkan mitigasi alih fungsi lahan, dan memperkuat kapasitas kelembagaan daerah untuk mengelola infrastruktur secara mandiri dan responsif terhadap tantangan pembangunan ke depan.

Arah Kebijakan Tahap III: Mendorong akselerasi dan inovasi infrastruktur strategis yang tangguh, cerdas, dan inklusif untuk memperkuat daya saing wilayah dan kualitas hidup masyarakat

Pada tahap ini, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada upaya mendorong akselerasi dan inovasi infrastruktur strategis yang tangguh, cerdas, dan inklusif sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat daya saing wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Arah kebijakan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan infrastruktur jalan, transportasi, dan konektivitas antar wilayah yang berorientasi pada efisiensi logistik dan pertumbuhan ekonomi lokal. Inovasi dalam pengembangan permukiman yang tertata rapi, inklusif, dan bebas dari kawasan kumuh terus didorong melalui pendekatan kolaboratif dan pemanfaatan tata ruang yang responsif. Sistem penyediaan air dan sanitasi diarahkan agar lebih adaptif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi modern dan efisiensi manajemen sumber daya. Selain itu, untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana, pembangunan infrastruktur ditingkatkan ketahanannya melalui integrasi prinsip-prinsip resilien dan berwawasan lingkungan. Dalam mendukung modernisasi layanan publik, digitalisasi infrastruktur dan pemanfaatan data secara real-time menjadi komponen utama dalam tata kelola infrastruktur berbasis teknologi cerdas. Penataan ruang dan legalisasi infrastruktur diperkuat agar sejalan dengan kepastian hukum dan sinkronisasi lintas level pemerintahan. Tahap ini juga menekankan penguatan kolaborasi antar aktor pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta pencegahan alih

fungsi lahan melalui pendekatan kelembagaan yang adaptif guna menciptakan iklim investasi infrastruktur yang progresif dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap IV: Memperkuat integrasi keberlanjutan dan inklusivitas infrastruktur wilayah dalam mendukung transformasi ekonomi hijau, resiliensi sosial, dan daya saing investasi daerah

Pada tahap ini, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada upaya memperkuat integrasi antara keberlanjutan dan inklusivitas dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung transformasi menuju ekonomi hijau, meningkatkan resiliensi sosial, serta memperkuat daya saing investasi daerah. Pendekatan ini diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi infrastruktur jalan, transportasi, dan konektivitas wilayah secara terintegrasi dan ramah lingkungan dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan dan mendorong aktivitas ekonomi lokal yang berkelanjutan. Penataan kawasan permukiman dilakukan secara kolaboratif dengan memperhatikan aspek inklusivitas dan pengurangan kawasan kumuh melalui pemanfaatan tata ruang yang adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekologis. Sistem infrastruktur dasar seperti air dan sanitasi diperkuat agar efisien dan tahan terhadap tekanan perubahan iklim serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Modernisasi tata kelola infrastruktur ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi, data, dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan akuntabilitas publik. Dalam konteks keberlanjutan jangka panjang, penguatan kolaborasi antar sektor, kemandirian daerah dalam pengelolaan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat menjadi strategi utama untuk membangun ekosistem infrastruktur yang tangguh. Selain itu, penguatan kelembagaan dan upaya mitigasi alih fungsi lahan menjadi landasan dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendukung perumahan yang berorientasi pada keadilan ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Arah Kebijakan Tahap V: Mewujudkan infrastruktur dan daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan mandiri melalui transformasi hijau, digitalisasi menyeluruh, serta tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat

Pada tahapan terakhir ini arah kebijakan difokuskan pada pencapaian misi akhir pembangunan infrastruktur dan wilayah yang berkelanjutan, tangguh, dan mandiri melalui penerapan transformasi hijau, digitalisasi menyeluruh, serta tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat integrasi antara pembangunan fisik dan ekosistem lingkungan dengan pendekatan rendah karbon, melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, serta transportasi ramah lingkungan yang memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pemerataan ekonomi lokal. Penataan permukiman dilanjutkan secara holistik dengan tata ruang yang adaptif dan inklusif guna menekan kawasan kumuh secara permanen. Sistem penyediaan air bersih dan sanitasi dijalankan secara cerdas dan berkelanjutan, sementara ketahanan infrastruktur terhadap bencana diperkuat melalui inovasi berbasis teknologi dan mitigasi risiko. Digitalisasi infrastruktur menjadi pilar utama tata kelola, di mana seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan publik dilakukan secara transparan dan terintegrasi dalam satu sistem berbasis data. Kemandirian daerah dalam membiayai dan mengelola infrastruktur ditingkatkan melalui kolaborasi multipihak dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam tahap ini, penguatan kelembagaan dan pencegahan alih fungsi lahan menjadi prioritas dalam menciptakan lingkungan investasi yang berkelanjutan dan sistem perumahan yang inklusif. Seluruh elemen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menopang ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologis jangka panjang Kabupaten Sikka.

Misi 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan

Untuk dapat mewujudkan Misi 4, maka pembangunan diarahkan pada pencapaian kinerja sasaran misi ini, yaitu: meningkatnya kesehatan lingkungan dan ketahanan ekosistem yang berkelanjutan. Untuk mencapai seluruh sasaran pada misi ini, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah spesifik Misi 4 pada setiap periodisasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

Tabel 3.17
Arah Kebijakan Pembangunan Misi 4

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Memperkuat dasar tata kelola lingkungan yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis komunitas untuk mendorong perubahan perilaku dan perlindungan ekosistem secara terencana	Mengintegrasikan sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dan responsif melalui inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi multipihak dalam pencegahan dan pengendalian degradasi lingkungan	Mendorong transformasi sistem pengelolaan lingkungan yang inovatif, berbasis teknologi, dan terintegrasi dalam tata kelola wilayah serta pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan ekosistem yang sehat, tangguh dan berkelanjutan	Mengokohkan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan responsif melalui konsolidasi kelembagaan, inovasi tata ruang, dan perluasan partisipasi untuk mewujudkan keadilan ekologis dan ketahanan wilayah	Mewujudkan lingkungan hidup daerah yang resilien, regeneratif, dan berkeadilan transformasi tata kelola, teknologi hijau, dan kemandirian komunitas dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup

Secara terperinci, arah kebijakan yang terkait dengan pada Misi 4 RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dalam setiap tahap RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I: Memperkuat dasar tata kelola lingkungan yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis komunitas untuk mendorong perubahan perilaku dan perlindungan ekosistem secara terencana

Pada tahap awal ini, fokus diarahkan pada pembentukan kerangka dasar tata kelola lingkungan hidup yang kuat, dengan menekankan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam perlindungan ekosistem. Perubahan perilaku menuju praktik ramah lingkungan didorong melalui edukasi publik, penguatan kapasitas lokal, serta peningkatan kesadaran ekologis di tingkat rumah tangga dan desa. Kegiatan prioritas meliputi penyusunan regulasi dasar, identifikasi potensi dan isu lingkungan strategis, serta penguatan jejaring komunitas lingkungan sebagai mitra pemerintah.

Arah Kebijakan Tahap II: Mengintegrasikan sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dan responsif melalui inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi multipihak dalam pencegahan dan pengendalian degradasi lingkungan

Tahap kedua menitikberatkan pada penguatan sistem kelembagaan dan instrumen pengelolaan lingkungan, baik di level kebijakan maupun operasional. Inovasi mulai diperkenalkan melalui penggunaan teknologi tepat guna, sistem informasi lingkungan, dan penguatan perangkat pemantauan kualitas lingkungan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi—diperluas untuk mendorong pencegahan serta mitigasi terhadap degradasi lingkungan, seperti kerusakan lahan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Arah Kebijakan Tahap III: Mendorong transformasi sistem pengelolaan lingkungan yang inovatif, berbasis teknologi, dan terintegrasi dalam tata kelola wilayah serta pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan ekosistem yang sehat, tangguh dan berkelanjutan

Tahap ini merupakan fase akselerasi transformasi tata kelola lingkungan menuju sistem yang lebih inovatif, berbasis teknologi digital, dan menyatu dalam tata ruang wilayah. Pendekatan ekoregion dan sistem zonasi ekologis mulai diterapkan dalam kebijakan pembangunan lintas sektor. Peran komunitas diperkuat melalui program konservasi berbasis masyarakat, pemberdayaan ekonomi hijau, serta insentif bagi pelaku usaha dan komunitas yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan tangguh terhadap perubahan iklim dan tekanan lingkungan.

Arah Kebijakan Tahap IV: Mengokohkan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan responsif melalui konsolidasi kelembagaan, inovasi tata ruang, dan perluasan partisipasi untuk mewujudkan keadilan ekologis dan ketahanan wilayah

Tahap ini menandai konsolidasi dari sistem perlindungan lingkungan yang sudah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Penataan ruang wilayah mulai sepenuhnya mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis, dengan menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai pertimbangan utama. Kelembagaan pengelolaan lingkungan diperkuat dari sisi regulasi, sumber daya manusia, dan sistem pendanaan. Partisipasi masyarakat semakin diperluas melalui program kemitraan multi-stakeholder dan inisiatif warga dalam perlindungan kawasan kritis dan pemulihan ekosistem.

Arah Kebijakan Tahap V: Mewujudkan lingkungan hidup daerah yang resilien, regeneratif, dan berkeadilan transformasi tata kelola, teknologi hijau, dan kemandirian komunitas dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup

Sebagai tahap penutup dalam periode RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, arah kebijakan ini berfokus pada pencapaian keseimbangan ekologis jangka panjang dan ketahanan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan global. Kabupaten Sikka diarahkan menjadi wilayah yang mampu mengelola sumber daya alam secara regeneratif, dengan memanfaatkan teknologi hijau dan energi bersih. Komunitas lokal diberdayakan secara mandiri sebagai penjaga utama ekosistem melalui praktik ekonomi sirkular, sistem pertanian lestari, dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Pada tahap ini, pembangunan lingkungan hidup tidak hanya difokuskan pada pencegahan kerusakan, tetapi juga pada pemulihan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN dan Kolaboratif

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, efisien, Bebas KKN dan Kolaboratif, arah kebijakan disusuns ecara bertahap dan berkelanjutan selama periode RPJMD 2025-2029. Arah kebijakan ini merupakan sebuah panduan strategis dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang adaptif, memenuhi tuntutan publik dengan mengusung efisiensi, memenuhi kebutuhan birokrasi yang berintegritas, transparan dan responsif, serta dilakukan dengan dukungan transformasi digital. Arah kebijakan pembangunan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada setiap periode dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Arah Kebijakan Pembangunan Misi 5

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Membangun fondasi tata Kelola pemerintah melalui optimalisasi potensi daerah, penyelarasan dan	Penguatan fondasi tata Kelola pemerintah melalui kolaborasi stakeholder, optimalisasi potensi	Pembangunan tata Kelola pemerintah melalui peningkatan kualitas SDM serta pengawasan dan	Penguatan tata Kelola pemerintah melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	. Pemantapan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
penegakkan regulasi pusat dan daerah, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas	daerah dan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas.	akuntabilitas	berbasis digital, peningkatan kualitas SDM, serta pengawasan dan akuntabilitas.	pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas

Secara terperinci, arah kebijakan yang terkait dengan pada Misi 5 RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dalam setiap tahap RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I: Membangun fondasi tata Kelola pemerintah melalui optimalisasi potensi daerah, penyelarasan dan penegakkan regulasi pusat dan daerah, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas

Pada tahun ini penekanan kebijakan dipusatkan untuk membangun fondasi tata kelola. Fondasi ini penting sebab akan digunakan sebagai titik awal dalam melakukan pembangunan. Pada periode ini potensi daerah akan dimaksimalkan untuk dapat turut meningkatkan PAD, sehingga memberikan ruang keleluasaan bagi daerah untuk berkembang. Selain itu, melihat sudah cukup banyak regulasi pusat yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir, dalam rangka melakukan penyelarasan serta penegakan hukum yang kuat dan tertib, diperlukan adopsi regulasi tersebut kedalam regulasi daerah. Selain itu, secara berkelanjutan juga menekankan pada peningkatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas.

Arah Kebijakan Tahap II: Penguatan fondasi tata kelola pemerintah melalui kolaborasi *stakeholder*, optimalisasi potensi daerah dan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas

Setelah dibangun fondasi pada tahun sebelumnya, maka tahapan selanjutnya adalah memperkuat fondasi yang sudah dibanding tersebut. Penguatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola yang kuat dan tidak rentan terhadap tantangan maupun ancaman yang dapat mengganggu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah terus dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD, untuk memperkuat anggaran ditengah pengetatan anggaran dari pusat. Penguatan ini dilakukan dengan memperkuat tata kelola organisasi baik dari segi manajemen dan pengelolaan keuangan, serta melalui kolaborasi antar stakeholder untuk memperkuat tata organisasi. Kolaborasi ini juga dilakukan dalam rangka melakukan mitigasi keamanan dan kebencanaan, sehingga sehingga Kabupaten Sikka menjadi daerah yang mempunyai ketahanan (*resilience*) yang tinggi terhadap ancaman kejahatan maupun bencana.

Arah Kebijakan Tahap III: Pembangunan tata kelola pemerintah melalui peningkatan kualitas SDM serta pengawasan dan akuntabilitas

Setelah memastikan bahwa fondasi tata kelola sudah kuat, maka pada tahun selanjutnya dibangun tata kelola pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Kualitas SDM menjadi hal yang sangat krusial. Penting untuk memastikan bahwa aparatur mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang semakin berkembang. Sehingga pada tahu nini pembangunan tata kelola ditekankan pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini ditekankan memastikan bahwa aparatur tidak hanya mempunyai kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya, tapi juga dapat berkembang lebih menciptakan inovasi daerah yang kemudian dapat membantu mendorong pembangunan Kabupaten Sikka.

Arah Kebijakan Tahap IV: Penguatan tata kelola pemerintah melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kualitas SDM, serta pengawasan dan akuntabilitas

Pada tahapan selanjutnya, dilakukan penguatan tata kelola pemerintahan. Pada tahapan ini kapasitas SDM masih akan terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Penekanan lainnya adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis digital. Kapasitas SDM yang sudah dibangun pada tahapan sebelumnya, diharapkan mampu memaksimalkan sistem digital pemerintahan sehingga dapat dilakukan transformasi digital yang menyeluruh. Seiring dengan penguatan ini, pengawasan dan akuntabilitas tetap dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga konsistensi pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Kabupaten Sikka.

Arah Kebijakan Tahap V: Pemantapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penerapan sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas

Transformasi digital diarahkan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses pelayanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang transparan dan berkualitas. Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi data antarinstansi menjadi instrumen utama dalam membangun pemerintahan yang responsif, adaptif, dan minim hambatan administratif. Di sisi lain, peningkatan pengawasan internal dan eksternal dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program berjalan sesuai peraturan dan prinsip good governance, dengan penguatan peran inspektorat serta mekanisme pelaporan dan evaluasi berbasis kinerja. Seluruh upaya ini dilandaskan pada prinsip akuntabilitas publik, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

3.6 Program Prioritas Daerah

Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sikka periode 2025–2029 hadir dengan semangat transformasi yang ditandai oleh slogan "**Maumere Baru**". Slogan ini mencerminkan tekad politik dan moral untuk melakukan pembaruan secara menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka RPJMD, visi dan misi kepala daerah tidak hanya menjadi simbol komitmen, tetapi ditransformasikan ke dalam program kerja yang terstruktur, strategis, dan terukur. Konsep ini tidak hanya berhenti pada tataran retorika, tetapi dijabarkan secara konkret dalam Enam Tekad Maumere Baru, yang secara langsung mewakili pilar utama program kerja kepala daerah selama periode 2025–2029. Konsep dasar “Maumere Baru” adalah pandangan transformatif yang menjadi benang merah seluruh program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Enam tekad Maumere Baru bukan sekadar semboyan, melainkan struktur tematik dari seluruh program prioritas kepala daerah, yang dirancang untuk menjawab isu strategis daerah secara konkret, terukur, dan lintas sektor. Melalui tekad tersebut, program-program kerja diarahkan untuk menjamin keadilan, keberlanjutan, pemberdayaan, dan efisiensi tata kelola secara menyeluruh di Kabupaten Sikka. Enam Tekad Maumere Baru memiliki relevansi yang kuat dan selaras dengan arah kebijakan nasional (RPJMN 2025–2029) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD Provinsi NTT 2025–2029), baik dalam visi, misi, maupun prioritas pembangunan. Enam Tekad Maumere Baru tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga merupakan bentuk konkret harmonisasi dan integrasi pembangunan lintas level pemerintahan.

Gambar 3.3
Program Kerja Kepala Daerah

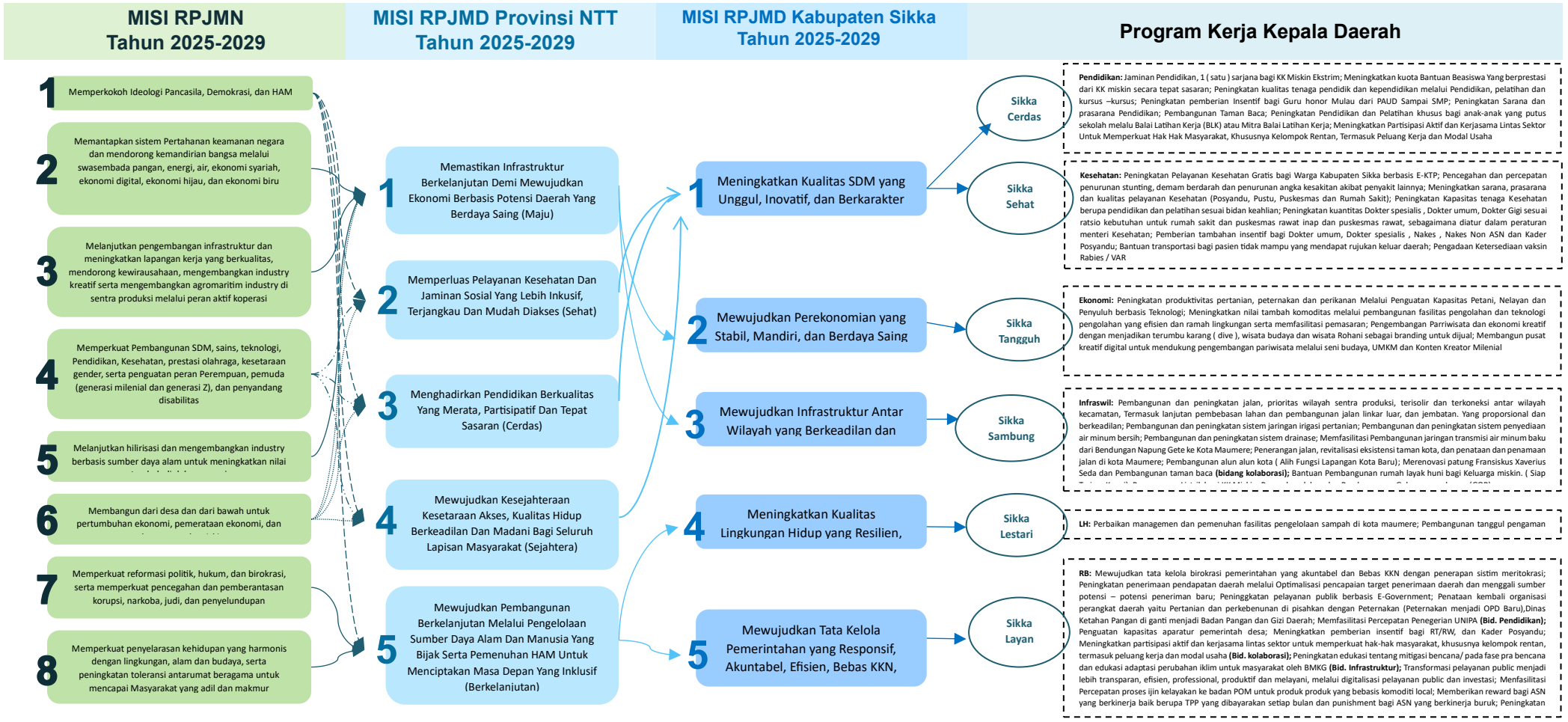

Enam Tekad Maumere Baru dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sikka Cerdas Merata**

   Sikka Cerdas Merata merupakan tekad pembangunan yang berfokus pada penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sikka. Pemerintah daerah menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan manusia, dengan memastikan bahwa tidak ada satupun warga—terutama dari kelompok miskin dan rentan—yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Tekad ini sejalan langsung dengan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang menetapkan program prioritas "Jaminan Satu Sarjana bagi Setiap Keluarga Miskin Ekstrem" sebagai strategi afirmatif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini memberikan jaminan akses pendidikan tinggi minimal satu orang per rumah tangga miskin ekstrem, sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam peningkatan kapasitas SDM keluarga miskin. Selain itu, komitmen untuk meningkatkan kuota bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin juga menjadi bagian integral dari upaya pemerataan akses pendidikan. Pemerintah tidak hanya mendorong pemerataan secara geografis, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu yang memiliki potensi akademik mendapat dukungan penuh untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Melalui integrasi antara tekad *Sikka Cerdas Merata* dan program kerja unggulan kepala daerah, pembangunan sektor pendidikan diarahkan untuk mencetak generasi muda Kabupaten Sikka yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional, dengan tetap menjaga asas keadilan sosial dan keberpihakan pada kelompok paling rentan.

2. **Sikka Sehat Bersama**

   Sikka Sehat Bersama merupakan tekad pembangunan di bidang kesehatan yang menekankan pelayanan yang gratis, inklusif, dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan kelompok rentan. Tekad ini diwujudkan melalui penguatan infrastruktur layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, penambahan tenaga medis termasuk dokter spesialis, penanganan stunting secara terintegrasi, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Dukungan sistem rujukan digital juga menjadi bagian penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi layanan. Tekad ini secara langsung berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Warga Kabupaten Sikka berbasis e-KTP, yang memastikan bahwa setiap warga yang memiliki e-KTP Sikka dapat memperoleh layanan Kesehatan. Program ini terintegrasi dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga setiap warga, Kabupaten Sikka dapat dilayani. Melalui skema ini, pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam melindungi dan memperluas cakupan kepesertaan JKN melalui Penerimaan Bantuan Biaya Iuran (PBI) bagi Kepala Keluarga Miskin dan tidak mampu maupun Non PBI (PPU, PBPU, dan Bukan Pekerja). Cakupan pelayanan kepesertaan PBI dilakukan dengani penguatan pendataan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga setiap KK miskin terdaftar dan tercover dalam program dimaksud. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan yang cepat, adil, dan tepat sasaran, serta mengurangi beban administratif bagi warga saat mengakses fasilitas kesehatan. Dengan demikian, Sikka Sehat Bersama menjadi bagian dari transformasi sistem kesehatan daerah yang mendukung *universal health coverage* dan menjamin hak kesehatan sebagai hak dasar seluruh warga Kabupaten Sikka. Penguatan Sikka Sehat Bersama ini diimplementasikan melalui Pelayanan Kesehatan Primer yang meliputi pemenuhan kebutuhan Kesehatan berdasarkan siklus hidup individu, keluarga dan masyarakat. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi fokus Integrasi Layanan Primer. Pertama adalah penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan. Kedua,

mendekatkan Pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan yaitu melalui deteksi dan screening penyakit. Dan ketiga, memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan perdesaan. Penguatan struktur ini melalui penguatan Puskesmas, Pustu, dan Posyandu, serta penguatan jejaring dengan kesehatan sekolah dan kesehatan kerja.

3. **Sikka Tangguh Lokal**

   Sikka Tangguh Lokal merupakan tekad pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan lokal, seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Tekad ini sejalan dengan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menetapkan, Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan berbasis teknologi berupa bantuan sarana produksi, sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, peningkatan produktivitas perikanan tangkap sebagai program kerja prioritas dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan kecil, Membangun pusat kreatif digital untuk mendukung pengembangan pariwisata melalui seni budaya, UMKM dan Konten Kreator Milenial yang dilaksanakan melalui program Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan menjadikan terumbu karang, wisata budaya dan wisata Rohani sebagai branding untuk dijual, yang dilaksanakan melalui program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor pertanian di Kabupaten Sikka memiliki peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Sebagai sektor yang menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar masyarakat, pertanian diharapkan dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Pertumbuhan sektor ini akan berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian menjadi sasaran utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka secara menyeluruh. Dengan potensi lahan yang luas dan keragaman komoditas unggulan, pengembangan pertanian menjadi langkah strategis dalam membangun ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah. Selain itu di sektor perikanan, Program ini dijalankan dalam kerangka ekonomi biru (*blue economy*), yakni pendekatan pembangunan ekonomi kelautan yang menyeimbangkan aspek produktivitas, keberlanjutan, dan pelestarian ekosistem laut. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Sikka berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas nelayan melalui penyediaan alat tangkap ramah lingkungan sehingga membangun penguatan akses nelayan terhadap teknologi perikanan. Selain itu, strategi pengembangan rantai nilai perikanan dari hulu ke hilir juga menjadi fokus agar hasil tangkapan laut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi lokal. Dengan demikian, Sikka Tangguh Lokal tidak hanya mencerminkan upaya memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal, tetapi juga menjadi pijakan dalam membangun sistem ekonomi kelautan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat pesisir. Ada juga sektor UMKM dan ekonomi kreatif (pengembangan *Creative Hub*) dan juga menjadikan Sikka sebagai destinasi ekowisata unggulan yang berfokus pada pengembangan destinasi wisata bawah laut terumbu karang.

4. **Sikka Layak Huni**

   Sikka Layak Huni merupakan tekad pembangunan yang menekankan terciptanya lingkungan yang layak, aman, tertata, dan nyaman untuk dihuni oleh seluruh masyarakat. Tekad ini mencakup pemenuhan standar infrastruktur dasar permukiman, seperti ketersediaan rumah layak huni, akses jalan yang memadai, air bersih, listrik, sanitasi sehat, serta konektivitas wilayah yang menunjang kehidupan modern. Sebagai wujud

nyata dari komitmen ini, Pemerintah Kabupaten Sikka menjadikan program kerja kepala daerah khusus untuk bantuan pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin ekstrem sebagai bagian utama dari agenda kerja prioritas. Program ini bertujuan untuk menghapus ketimpangan tempat tinggal, mengangkat martabat hidup masyarakat miskin, serta memastikan bahwa setiap warga memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan memenuhi syarat kelayakan dasar. Program ini dikembangkan menjadi sebuah "Gerakan Sikka Layak Huni", yaitu gerakan kolaboratif lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, desa, swasta, komunitas, dan masyarakat itu sendiri dalam membangun rumah-rumah layak bagi keluarga miskin ekstrem. Gerakan ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun kesadaran sosial, solidaritas, dan partisipasi kolektif untuk mewujudkan keadilan tempat tinggal bagi semua. Melalui gerakan ini, Sikka Layak Huni tidak hanya menjadi tekad simbolik, tetapi dijalankan sebagai gerakan nyata, terstruktur, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

5. **Sikka Lestari Hijau**

   Sikka Lestari Hijau sebagai salah satu tekad pembangunan daerah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui rehabilitasi kawasan kritis, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta integrasi mitigasi perubahan iklim dalam setiap kebijakan pembangunan. Tekad ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi dijabarkan secara konkret melalui program-program kerja strategis kepala daerah, salah satunya adalah perbaikan manajemen dan pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah di Kota Maumere. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola lingkungan perkotaan yang lebih baik, dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan ramah lingkungan. Pemerintah akan memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana persampahan, seperti tempat pengolahan sampah terpadu, armada angkut, serta fasilitas pemilahan dan daur ulang, yang kesemuanya didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Dengan keterlibatan aktif warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, program ini menjadi manifestasi dari pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan Sikka Lestari Hijau, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim dan urbanisasi secara terencana dan responsif.

6. **Sikka Layanan Bersih**

   Sikka Layanan Bersih merupakan salah satu tekad pembangunan yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, bebas dari praktik korupsi serta mendorong budaya kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan publik. Tekad ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang mendalam dan transformasi digital sebagai instrumen utama untuk menciptakan pelayanan yang lebih akuntabel dan efektif. Peneguhan komitmen ini sejalan dengan program kerja kepala daerah yang mengusung transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, produktif, dan melayani. Melalui digitalisasi layanan publik, Pemerintah Kabupaten Sikka akan membangun sistem pelayanan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus memangkas proses birokrasi yang lambat dan rawan penyimpangan. Di sisi lain, investasi dalam infrastruktur digital dan penguatan kapasitas aparatur menjadi prasyarat penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern dan berdaya saing. Digitalisasi juga akan memperkuat mekanisme pengawasan dan keterlibatan masyarakat, sehingga publik dapat turut mengawal kualitas dan integritas pelayanan secara langsung. Dengan demikian, Sikka Layanan Bersih bukan hanya slogan administratif, tetapi menjadi arah perubahan nyata menuju pemerintahan yang terpercaya dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Program Kerja Kepala Daerah yang termuat dalam Enam Tekad Maumere Baru merupakan substansi dasar dari janji-janji Kepala daerah Terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan ke dalam strategi atau kebijakan ataupun ke dalam Program atau Kegiatan sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Jika bunyi janji Kepala Daerah Terpilih bersifat sangat makro dan berada di level outcome, maka akan diterjemahkan ke dalam Program Daerah. Namun, apabila sedikit lebih mikro dan berada pada level *output*, maka didefinisikan ke dalam kegiatan di PD.

Sementara, dalam upaya mewujudkan Visi "Terwujudnya Masyarakat Sikka yang produktif, Kreatif, Unggul, dan Mandiri menuju Maumere Baru", Pemerintah Kabupaten Sikka akan mengimplementasikan serangkaian program prioritas daerah selama periode 2025-2029. Program prioritas daerah Kabupaten Sikka periode 2025-2029 berfokus pada pembangunan yang inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prioritas utama meliputi peningkatan kualitas pembangunan manusia, penguatan kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Program-program ini akan menjadi landasan utama bagi pembangunan Kabupaten Sikka lima tahun ke depan. Program-program ini dirancang untuk menjawab permasalahan krusial yang secara langsung akan mendorong pencapaian visi dan misi sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.19

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SIKKA YANG PRODUKTIF, KREATIF, UNGGUL DAN MANDIRI MENUJU MAUMERE BARU									
Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	71,10	72,24	73,37	74,51	75,65	76,79
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif berbasis Kearifan Lokal	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,78	10,38	10,98	11,58	12,18	12,67
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	16,47	17,04	17,61	18,17	18,74	19,20
		Meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan	Usia Harapan Hidup (UHH) (Angka)	74,48	74,72	74,96	75,20	75,44	75,68
		Meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat	Angka Kemiskinan (Angka)	11,51	11,13	10,76	10,38	10,00	9,62
			Pengeluaran Per Kapita (Rp Juta/Orang/Bulan)	9,463	9,694	9,924	10,155	10,385	10,615
		Terwujudnya pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
			Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	89,99	90,04	90,10	90,16	90,22	90,27

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka		Pendapatan Per Kapita (Rp)	19.322.000	20.172.000	21.022.000	21.872.000	22.722.000	23.572.000
			Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,95	4,11	4,28	4,44	4,60	4,76
			Rasio Gini (Indeks)	0,236	0,2355	0,2349	0,2344	0,2338	0,233
		Tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal kabupaten Sikka	Pertumbuhan sektor pertanian (%)	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50
			Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	77,72	78,25	78,75	79,22	79,72	80,12
		Berkembangnya industri pengolahan produk pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00
			Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	1,50	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60
		Terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum (%)	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80
			Pertumbuhan sektor perdagangan (%)	9,40	9,60	9,80	10	10,20	10,40
Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri		Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID) (Indeks)	57,18	57,57	57,96	58,35	58,74	59,13
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID) (Indeks)	57,18	57,57	57,96	58,35	58,74	59,13

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		yang merata dan berkelanjutan							
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95	73,96
		Meningkatnya kualitas air, udara, tutupan lahan dan pengelolaan persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	73..91	73,92	73,93	73,94	73,95	73,96
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	CC	B	B	B	BB	BB
		Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	B	B	B	BB	BB	BB
		Akuntabilitas Keuangan yang semakin baik diikuti dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif dan transparan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00
			Indeks Profesionalitas ASN ()	78,35	80,35	82,35	84,35	86,35	88,35
			Indeks Kebijakan Publik (Indeks)	2,75	3,25	3,70	4,00	4,25	4,50

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	36,73	38,73	40,73	42,73	44,73	46,73
			Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	40	50	60	70	80	90
		Meningkatnya keamanan dan kerukunan masyarakat	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas) (Indeks)	90	86	82	78	74	70
			Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Indeks)	68	72	76	80	84	86
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	140,81	140,31	139,81	139,31	138,81	138,31
		Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10

Tabel 3.20
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SIKKA YANG PRODUKTIF, KREATIF, UNGGUL DAN MANDIRI MENUJU MAUMERE BARU					
Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Indeks)	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		berbasis Kearifan Lokal			
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (%)	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	
				Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Angka)	
				Pertumbuhan Sektor Primer (%)	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	
				Produktivitas pangan (Ton/Ha)	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	
				Persentase peningkatan produksi hortikultura (%)	
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	
				Persentase peningkatan produksi perkebunan (%)	
				Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (%)	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan (Ton)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
				Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Angka)	
				Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergisi Seimbang (Angka)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				skor pola pangan harapan (Skor)	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa (%)	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
				Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	
				Jumlah Desa Mandiri (Desa)	
				Jumlah Desa Sangat Tertinggal (Desa)	
				Persentase Desa yang memiliki kegiatan atau program kerjasama (%)	
				Jumlah Desa Maju (Desa)	
				Jumlah Desa Berkembang (Desa)	
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
				Jumlah Desa Sangat Tertinggal (Desa)	
				Jumlah Desa Mandiri (Desa)	
				Jumlah Desa Maju (Desa)	
				Jumlah Desa Berkembang (Desa)	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berdaya (%)	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			perizinan usaha pertanian		
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum mulok bahasa dan sastra daerah (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				Jumlah Desa Sangat Tertinggal (Desa)	
				Jumlah Desa Mandiri (Desa)	
				Persentase Desa yang memenuhi tertib administrasi (%)	
				Jumlah Desa Maju (Desa)	
				Jumlah Desa Berkembang (Desa)	
				Persentasi Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Jumlah Desa Mandiri (Desa)	PROGRAM PENATAAN DESA
				Jumlah Desa Maju (Desa)	
				Jumlah Desa Berkembang (Desa)	
				Persentase Desa yang difasilitasi terkait penataan desa (%)	
				Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	
				Jumlah Desa Sangat Tertinggal (Desa)	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
				Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan (%)	
				Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan (Angka)	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
				Persentase pengawasan keamanan pangan (%)	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
				Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan (Unit)	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	
				Penurunan jumlah kasus penyakit hewan (%)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan		Usia Harapan Hidup (UHH) (Angka)	
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (%)	
				Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar (%)	
				Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna (%)	
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif (%)	
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis (%)	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	
				Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi (Angka)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (%)	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Balita (%)	
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (%)	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut (%)	
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	
				Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel (%)	
				Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan (Angka)	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	
				Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	
				Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (%)	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	
				Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi (Rasio)	
		Meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat		Angka Kemiskinan (Angka)	
				Pengeluaran Per Kapita (Rp Juta/Orang/Bulan)	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekeraran	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial (%)	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
				Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani (%)	
			Meningkatnya pekerja	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar neger (%)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	
				Persentase TKS/Relawan Sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana (%)	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
				Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri (%)	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
				Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha (%)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
				Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS (%)	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%)	
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%)	
			Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase perusahaan yang memiliki RTK (%)	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
		Terwujudnya pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	
				Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Seiahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptove Prevalance Rate/mCPR) (Angka)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	
			Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Skor Kabupaten Layak Anak (Skor)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Angka)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun (Angka)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka			Pertumbuhan Ekonomi(%)	
				Rasio Gini(Indeks)	
				Pendapatan Per Kapita(Rp)	
		Tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal kabupaten Sikka		Pertumbuhan sektor pertanian (%)	
				Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Hektar)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Berkembangnya industri pengolahan produk pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal		Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	
				Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Pertumbuhan UMKM yang berdaya saing (Angka)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (Unit)	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kualitas Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset (Unit)	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Peresentase Anak Usia 5-6 Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (%)	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)	
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (%)	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)	
				Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional (%)	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	
				Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional (%)	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi sehat (%)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	
				Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP) (Angka)	
				Total Produksi Perikanan (Angka)	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		Terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata		Pertumbuhan sektor perdagangan (%)	
				Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum (%)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan (%)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
				Jumlah entitas pengelolaan destinasi (Angka)	
				Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata (Angka)	
				Persentase Pertumbuhan Rata-rata Lama Tinggal (%)	
				Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota (Angka)	
				Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (Angka)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi (Angka)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
				Indeks Kepuasan Wisatawan (Indeks)	
				Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (Angka)	
				Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	
				Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri (Angka)	
				Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
				Kegiatan pameran penanaman modal (Kegiatan)	
				Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal (%)	
			Meningkatnya kapasistas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	
				Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat (Angka)	
				Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (Angka)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Presentase Peningkatan Investasi (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
				Nilai investasi PMA dan PMDN (Rupiah)	
				Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal (Angka)	
				PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (Angka)	
				Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal (Laporan)	
				Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
				Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya perda (%)	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan (%)	
				Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	
				Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang Diterbitkan (%)	
			Meningkatnya kualitas saran perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
				Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Penerbitan Ijin yang sesuai standar (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
				Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (Persentase)	
				Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri Secara Lengkap, Akuran dan Terkini (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			Meningkatnya penggunaan dan	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			pemasaran produk dalam negeri		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) (Angka)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
				Persentase karya budaya yang dilestarikan (%)	
				Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman) (Angka)	
				Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) (Angka)	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
				Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan (%)	
				Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) (Angka)	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Konsultasi perizinan penanaman modal (Angka)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
				Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota (Data)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	
				Penertiban perizinan dan non perizinan penanaman modal (Izin)	
				Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	
			Meningkatnya tata kelola museum	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum (Angka)	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
				Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaran dan pelaksanaan kegiatan (%)	
				Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	
				Penyelenggaran kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Angka)	
				Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota (%)	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman (Angka)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
				Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan (%)	
				Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman (Angka)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya (Angka)	
				Pembentukan tim ahli cagar budaya (Angka)	
				Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman (Angka)	
				Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya (Angka)	
				Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Angka)	
				persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Laporan realisasi penanaman modal (Laporan)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
				Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN (Kegiatan)	
				Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	
				Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab / Kota (Angka)	
				Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota (Angka)	
				Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (%)	
Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri			Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)(Indeks)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID) (Indeks)	
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Teknis/Terampil (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik (%)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 HA yang ditangani (%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				Jumlah Rumah Keseluruhan (Angka)	
				Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Konektivitas Darat (Persentase)	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut (Penyeberangan)	Konektivitas Laut (Pnyeberangan) (Angka)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
				Persentase Penurunan RTLH MBR diluar Kawasan Permukiman Kumuh (%)	
				Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) (Angka)	
			Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani (Angka)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
				Persentase warga negara korban bencana yang	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Relokasi Akibat Program Pemerintah	memperoleh rumah layak huni (%)	
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	
				Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(Indeks)	
		Meningkatnya kualitas air, udara, tutupan lahan dan pengelolaan persampahan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa atau Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Air (Indeks)	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel		Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan, Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah, Menimngkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pengawasan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan, Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
		Akuntabilitas Keuangan yang semakin baik diikuti		Opini BPK (Opini)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah			
			Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatnya tata kelola perbendaharaan, Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	
				Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan, Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
				Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	
		Terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif dan transparan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	
				Indeks Kualitas Kebijakan Publik (Indeks)	
				Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	
				Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa (%)	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	
				Jumlah Desa Mandiri (Desa)	
				Jumlah Desa Sangat Tertinggal (Desa)	
				Persentase Desa yang memiliki kegiatan atau program kerjasama (%)	
				Jumlah Desa Maju (Desa)	
				Jumlah Desa Berkembang (Desa)	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
				Jumlah Desa Sangat Tertinggal (Desa)	
				Jumlah Desa Mandiri (Desa)	
				Jumlah Desa Maju (Desa)	
				Jumlah Desa Berkembang (Desa)	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berdaya (%)	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN, Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN, Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
				Persentase Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Daerah (%)	
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang ditempatkan di Lokasi Transmigrasi (%)	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				Jumlah Desa Sangat Tertinggal (Desa)	
				Jumlah Desa Mandiri (Desa)	
				Persentase Desa yang memenuhi tertib administrasi (%)	
				Jumlah Desa Maju (Desa)	
				Jumlah Desa Berkembang (Desa)	
				Persentasi Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional, Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi, Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi, Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah, Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otononi daerah, Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat, Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Perekonomian dan Pembangunan, Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	
				Persentase Perekonomian dan Pembangunan (%)	
				Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (%)	
				Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	
		Meningkatnya keamanan dan kerukunan masyarakat		Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Indeks)	
				Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas) (Indeks)	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				Persentase penanganan pra bencana (%)	
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	
				Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil bagi masyarakat (%)	
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (%)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
				Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase data informasi kependudukan yang valid dan akurat (%)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama lima tahun. Keberhasilan pencapaian Visi "Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul, dan Mandiri menuju Maumere Baru" serta misi Kepala Daerah terpilih sangat bergantung pada sinergi, efektivitas program, dan kinerja optimal dari setiap Perangkat Daerah.

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah akan diorientasikan pada pencapaian target-target spesifik yang tercantum dalam arah kebijakan setiap tahunnya. Rencana program perangkat daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 berjumlah 176 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Sikka, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Sumber pendanaan program perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar daerah (lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					412.839.377.407,750		417.508.576.210,471		422.226.095.901,613		427.014.024.711,633		431.873.415.240,549	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					306.933.341.680,750		311.511.454.383,471		316.158.238.776,733		320.874.724.935,894		325.661.958.387,443	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pendidikan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	306.933.341.680,750	100	311.511.454.383,471	100	316.158.238.776,733	100	320.874.724.935,894	100	325.661.958.387,443	SMP NEGERI 1 MAUMERE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 2 MAUMERE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 4 MAUMERE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 1 NITA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 2 NITA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 1 TALIBURA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 2 TALIBURA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 1 KEWAPANTE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 1 PAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 2 PAGA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 1 MEGO
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 1 LELA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 1 BOLA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 2 BOLA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 2 MEGO
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 3 PAGA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 1 WAIGETE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 1 PALUE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI KEWAPANTE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI ALOK TIMUR
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 2 WAIGETE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI RERORoja
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI MAPITARA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI NUBA ARAT
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI PRUDA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI ALOK
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI PIGANG
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI HEBAR
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI HAMAR
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI WERANG
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 3 WAIGETE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI TANAH MERAH
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI HENGA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI PEMANA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI SATAP PAGA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI SATAP BLORO
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI SATAP WARA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI SATAP SUKUN
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI SATAP MORO
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 46 NANGAHALE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 3 MAUMERE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI KOLISIA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 47 OJANG
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SMP NEGERI 48 SA ATE GAIKIU
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					105.743.606.627,000		105.743.606.627,000		105.814.341.924,880		105.885.784.575,739		105.957.941.653,106	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)	96,12	96,15	96,17	105.743.606.627,000	96,20	105.743.606.627,000	96,22	105.814.341.924,880	96,25	105.885.784.575,739	96,18	105.957.941.653,106	Dinas PKO
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)	90,76	90,81	90,86		90,91		90,96		91,01		91,06		Dinas PKO
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	7,98	8,74	9,51		10,27		11,03		11,79		12,56		Dinas PKO
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,54	99,56	99,61		99,66		99,71		99,76		99,81		Dinas PKO
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	98,70	98,73	98,75		98,85		98,93		99,00		99,08		Dinas PKO
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts (%)	97,27	97,30	97,80		98,30		98,80		99,30		99,80		Dinas PKO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI) (%)	101,17	101,25	101,32		101,40		101,47		101,55		101,63		Dinas PKO
	Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs) (%)	91,03	91,08	91,13		91,18		91,23		91,28		91,33		Dinas PKO
	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI) (%)	88,01	88,15	88,29		88,43		88,57		88,71		88,85		Dinas PKO
	Angka Partisipasi Murni (APM SMP/Mts) (%)	69,56	72,06	74,56		77,06		79,56		82,06		84,56		Dinas PKO
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,15	1,10	1,05		1,00		0,95		0,90		0,85		Dinas PKO
	Angka Putus Sekolah Dasar (APS) SD (%)	0,63	0,55	0,50		0,45		0,40		0,35		0,30		Dinas PKO
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	51,88	58,08	60,58		63,08		65,58		68,08		70,58		Dinas PKO
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	55,50	56,00	56,50		57,00		57,50		58,00		58,50		Dinas PKO
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	68,10	71,23	72,13		73,03		73,93		74,83		75,73		Dinas PKO
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	66,89	67,39	67,89		68,39		68,89		69,39		69,89		Dinas PKO
	Iklim Kebhinekaan SD (Angka)	72,64	72,75	72,90		73,24		74,24		75,24		76,24		Dinas PKO
	Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	74,64	75,14	75,64		76,14		76,64		77,14		77,64		Dinas PKO
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	75,67	81,23	86,79		92,35		97,91		98,00		98,33		Dinas PKO
	Persentase Angka Melek Aksara penduduk umur >15 tahun (%)	98,88	98,93	98,98		99,03		99,08		99,13		99,18		Dinas PKO
	Persentase Kelulusan SD/MI (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas PKO
	Persentase Kelulusan SMP/MTs (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas PKO
	Persentase Satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD HI (%)	14,00	25,00	30,00		45,00		60,00		75,00		100		Dinas PKO
	Persentase SD Terakreditasi (%)	95,24	97,73	97,93		98,13		98,33		98,53		98,73		Dinas PKO
	Persentase SMP/MTs terakreditasi (%)	93,33	93,34	93,35		93,36		93,37		93,38		93,39		Dinas PKO
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	56,43	70,15	70,90		71,65		72,40		73,15		73,39		Dinas PKO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi minimal B (%)	67,60	68,01	68,42		68,83		69,24		69,66		70,07		Dinas PKO
	Proporsi PTK Bersertifikat (%)	25,22	33,45	36,95		40,45		43,95		47,45		50,95		Dinas PKO
	Proporsi PTK PAUD Bersertifikat (%)	29,16	30,25	31,34		32,43		33,52		34,61		35,70		Dinas PKO
	Proporsi PTK SMP Bersertifikat Pendidik (%)	30,45	31,40	32,35		33,30		34,25		35,20		36,15		Dinas PKO
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					68.325.200,000		68.325.200,000		68.325.200,000		68.325.200,000		68.325.200,000	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum mulok bahasa dan sastra daerah (%)	0	11,06	22,12	68.325.200,000	33,19	68.325.200,000	55,31	68.325.200,000	77,43	68.325.200,000	100	68.325.200,000	Dinas PKO
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					58.913.900,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar (SD) (Indeks)	0,88	0,89	0,90	58.913.900,000	0,91	150.000.000,000	0,92	150.000.000,000	0,93	150.000.000,000	0,94	150.000.000,000	Dinas PKO
	Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Indeks)	0,71	0,86	0,87		0,88		0,89		0,90		0,91		Dinas PKO
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					35.190.000,000		35.190.000,000		35.190.000,000		35.190.000,000		35.190.000,000	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi kelayakan operasional (%)	100	100	100	35.190.000,000	100	35.190.000,000	100	35.190.000,000	100	35.190.000,000	100	35.190.000,000	Dinas PKO
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					273.806.903.081,510		281.743.524.798,637		283.657.702.062,454		285.352.110.916,193		287.327.250.401,774	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					120.986.982.252,150		122.773.105.596,797		124.586.020.791,614		126.426.129.714,353		128.293.840.270,934	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang kesehatan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	120.986.982.252,150	100	122.773.105.596,797	100	124.586.020.791,614	100	126.426.129.714,353	100	128.293.840.270,934	PUSKESMAS BOGANATAR
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS WATUBAING
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS WAIGETE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS TANARAWA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS HEWOKLOANG
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS BERU
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS KOPETA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS WOLOMARANG
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS MAGEPANDA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS NELLE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS KOTING

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS NITA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS NANGA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS PAGA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS LEKEBAI
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS WOLOFEO
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS FEONDARI
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS BOLA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS HABIBOLA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS MAPITARA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS TELUK
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS PALUE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS TUANGGEO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS WAIPARE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		PUSKESMAS KEWAPANTE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					148.051.754.521,360		154.103.941.205,840		154.103.941.205,840		153.853.941.205,840		153.853.941.205,840	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat					148.051.754.521,360		154.103.941.205,840		154.103.941.205,840		153.853.941.205,840		153.853.941.205,840	PUSKESMAS BOGANATAR
	Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar (%)	0	85	87		89		91		92		93		DINAS KESEHATAN
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	11,5	11,5	11,5		10,97		10,46		9,96		9,0		DINAS KESEHATAN
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	50	55	60		65		70		75		80		DINAS KESEHATAN
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,01	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0,7	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		DINAS KESEHATAN
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	0	77	78		79		79,5		80		81		DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	0	50	55		60		65		70		75		DINAS KESEHATAN
	Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna (%)	20	20	30		30		62,5		75,5		75,5		DINAS KESEHATAN
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	43,5	90	90		90		90		90		90		DINAS KESEHATAN
	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan (Angka)	421	421	421		421		421		421		421		DINAS KESEHATAN
	Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi (Angka)	33	33	33		33		33		33		33		DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	71	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	79	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	82	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita (%)	78	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar (%)	98	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif (%)	48	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut (%)	105	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (%)	19	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (%)	34	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	52	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis (%)	107	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (%)	98	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko (%)	0	0,9	0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		DINAS KESEHATAN
	Positifity rate Malaria (%)	1,39	4,9	4,9		4,9		4,9		4,9		4,9		DINAS KESEHATAN
	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (%)	100	100	100		100		100		100		100		RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					3.277.090.608,000		3.375.402.296,000		3.476.664.365,000		3.580.964.296,000		3.688.393.225,000	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	24	17	22	3.277.090.608,000	30	3.375.402.296,000	40	3.476.664.365,000	50	3.580.964.296,000	60	3.688.393.225,000	DINAS KESEHATAN
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi (Rasio)	8	5,3	5,3		5,4		5,4		5,5		5,5		DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					427.329.900,000		427.329.900,000		427.329.900,000		427.329.900,000		427.329.900,000	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	0	70	73	427.329.900,000	75	427.329.900,000	78	427.329.900,000	80	427.329.900,000	85	427.329.900,000	DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.063.745.800,000		1.063.745.800,000		1.063.745.800,000		1.063.745.800,000		1.063.745.800,000	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					1.063.745.800,000		1.063.745.800,000		1.063.745.800,000		1.063.745.800,000		1.063.745.800,000	PUSKESMAS BOGANATAR
	Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (%)	0	15	19		21		23		25		27		DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					23.451.772.918,000		37.731.195.311,770		35.804.713.092,610		44.364.727.868,350		52.094.060.709,800	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.102.941.618,000		13.062.029.866,000		11.632.410.762,000		14.090.303.085,000		9.955.932.177,000	
Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	8.102.941.618,000	100	13.062.029.866,000	100	11.632.410.762,000	100	14.090.303.085,000	100	9.955.932.177,000	DINAS PUPR
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					224.998.500,000		231.748.455,000		238.700.908,650		245.861.935,910		253.237.793,990	
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (%)	49,09	49,15	49,20	224.998.500,000	49,25	231.748.455,000	49,30	238.700.908,650	49,35	245.861.935,910	49,40	253.237.793,990	DINAS PUPR
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.309.574.400,000		2.378.861.632,000		2.450.227.480,960		2.523.734.305,390		2.599.446.334,550	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (%)	56,41	56,91	57,40	2.309.574.400,000	57,89	2.378.861.632,000	58,39	2.450.227.480,960	58,88	2.523.734.305,390	59,13	2.599.446.334,550	DINAS PUPR
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					225.000.000,000		128.750.000,000		132.612.500,000		136.590.875,000		140.688.601,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	51,11	52,11	53,11	225.000.000,000	54,11	128.750.000,000	55,11	132.612.500,000	56,11	136.590.875,000	57,11	140.688.601,000	DINAS PUPR
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					483.802.900,000		498.316.987,000		513.266.496,000		528.664.491,000		544.524.426,000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	51,03	51,28	51,52	483.802.900,000	51,77	498.316.987,000	52,02	513.266.496,000	52,26	528.664.491,000	52,51	544.524.426,000	DINAS PUPR
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.216.984.700,000		1.253.494.241,000		1.291.099.068,230		1.329.832.040,280		1.369.727.001,490	
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	65,36	65,36	67,44	1.216.984.700,000	69,53	1.253.494.241,000	71,61	1.291.099.068,230	73,69	1.329.832.040,280	75,78	1.369.727.001,490	DINAS PUPR
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					93.478.500,000		96.282.855,000		99.171.340,000		102.146.480,000		105.210.875,000	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik (%)	99,26	99,29	99,33	93.478.500,000	99,37	96.282.855,000	99,41	99.171.340,000	99,44	102.146.480,000	99,48	105.210.875,000	DINAS PUPR
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					300.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000	
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	0	5	300.000.000,000	28,75	2.500.000.000,000	52,50	2.500.000.000,000	76,25	2.500.000.000,000	100	2.500.000.000,000	DINAS PUPR
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					10.250.577.900,000		17.329.964.443,770		16.687.925.300,770		22.640.516.442,770		34.350.202.940,770	
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	54,17	54,23	54,57	10.250.577.900,000	55,14	17.329.964.443,770	55,70	16.687.925.300,770	56,27	22.640.516.442,770	56,50	34.350.202.940,770	DINAS PUPR
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					109.414.200,000		112.696.626,000		116.077.524,000		119.559.850,000		123.146.646,000	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Teknis/Terampil (%)	8,22	14,89	21,56	109.414.200,000	28,22	112.696.626,000	34,89	116.077.524,000	41,56	119.559.850,000	48,22	123.146.646,000	DINAS PUPR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					135.000.200,000		139.050.206,000		143.221.712,000		147.518.363,000		151.943.914,000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW (%)	99,31	99,35	99,40	135.000.200,000	99,45	139.050.206,000	99,50	143.221.712,000	99,55	147.518.363,000	99,60	151.943.914,000	DINAS PUPR
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					20.893.813.854,000		27.781.841.269,000		28.398.714.256,000		29.024.698.184,000		29.660.066.379,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.509.265.754,000		2.584.543.726,000		2.662.080.038,000		2.741.942.439,000		2.824.200.712,000	
Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.509.265.754,000	100	2.584.543.726,000	100	2.662.080.038,000	100	2.741.942.439,000	100	2.824.200.712,000	DINAS PKPP
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					484.050.700,000		498.572.221,000		513.529.387,000		528.935.269,000		544.803.327,000	
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	8	14	18	484.050.700,000	21	498.572.221,000	24	513.529.387,000	27	528.935.269,000	30	544.803.327,000	DINAS PKPP
	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani (Angka)	14	14	18		21		24		27		30		DINAS PKPP
	Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana (%)	0,36	0,36	0,46		0,54		0,62		0,70		0,77		DINAS PKPP
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0,89	1,58	3,43		4,74		6,22		7,96		10,09		DINAS PKPP
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					100.000.000,000		103.000.000,000		106.090.000,000		109.272.700,000		112.550.881,000	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	0	0,0097	100.000.000,000	0,0099	103.000.000,000	0,0102	106.090.000,000	0,0105	109.272.700,000	0,0108	112.550.881,000	DINAS PKPP
	Jumlah Rumah Keseluruhan (Angka)	81.750	81.750	81.997		82.244		82.491		82.738		82.984		DINAS PKPP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	60.693	60.693	60.987		61.448		61.919		62.400		62.891		DINAS PKPP
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang Ditangani (Ha)	145,66	145,66	0,0097		0,0099		0,0102		0,0105		0,0108		DINAS PKPP
	Persentase Jumlah KK yang mendiami RLH (%)	74,24	74,24	74,38		74,71		75,06		75,42		75,79		DINAS PKPP
	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 HA yang ditangani (%)	0	0	18,3		36,7		55,0		73,3		90		DINAS PKPP
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					11.065.400.000,000		17.658.575.000,000		17.971.750.000,000		18.284.925.000,000		18.598.100.000,000	
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) (Angka)	19.681	19.681	19.387	11.065.400.000,000	18.926	17.658.575.000,000	18.455	17.971.750.000,000	17.974	18.284.925.000,000	17.483	18.598.100.000,000	DINAS PKPP
	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	24,08	24,07	23,64		23,01		22,37		21,72		21,50		DINAS PKPP
	Persentase Penurunan RTLH MBR diluar Kawasan Permukiman Kumuh (%)	100	100	80		60		40		20		0		DINAS PKPP
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					6.735.097.400,000		6.937.150.322,000		7.145.264.831,000		7.359.622.776,000		7.580.411.459,000	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Pelanggan Listrik (Angka)	71.126	71.126	71.626	6.735.097.400,000	72.126	6.937.150.322,000	72.626	7.145.264.831,000	73.126	7.359.622.776,000	73.626	7.580.411.459,000	DINAS PKPP
	Jumlah Sambungan Rumah Air Minum (Angka)	21.717	21.717	22.217		22.217		23.217		23.217		24.217		DINAS PKPP
	Persentase Pelanggan Listrik (%)	87,00	87,00	87,35		87,70		88,04		88,38		88,72		DINAS PKPP
	Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	0	0	18,3		36,7		55,0		73,3		90		DINAS PKPP
	Persentase SR Air Minum (%)	26,57	26,57	27,09		27,62		28,15		28,67		29,18		DINAS PKPP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					7.528.613.162,000		7.686.533.458,000		7.802.216.104,250		8.007.468.329,070		8.402.034.806,570	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.225.670.262,000		6.305.259.647,000		6.386.042.873,000		6.555.348.695,000		6.912.890.378,000	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	6.225.670.262,000	100	6.305.259.647,000	100	6.386.042.873,000	100	6.555.348.695,000	100	6.912.890.378,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		BPBD
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					755.095.000,000		774.428.836,000		794.342.687,000		814.853.953,600		835.980.558,000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan terhadap masyarakat, dan meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	75	76	755.095.000,000	78	774.428.836,000	80	794.342.687,000	82	814.853.953,600	85	835.980.558,000	SATUAN POL. PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		SATUAN POL. PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	44	55	65		75		85		90		95		SATUAN POL. PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	6,82	6,73	7,69		8,62		8,65		9,61		10,57		SATUAN POL. PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					387.226.900,000		441.405.345,000		451.427.725,350		461.750.777,000		472.383.520,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	100	387.226.900,000	100	441.405.345,000	100	451.427.725,350	100	461.750.777,000	100	472.383.520,000	BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	600	600	600		600		600		600		600		BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	1.425	800	700		600		500		400		300		BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	600	600	600		600		600		600		600		BPBD
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		BPBD
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		BPBD
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					160.621.000,000		165.439.630,000		170.402.818,900		175.514.903,470		180.780.350,570	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	7,8	14	13,5	160.621.000,000	13	165.439.630,000	12,5	170.402.818,900	12	175.514.903,470	11,5	180.780.350,570	SATUAN POL. PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		SATUAN POL. PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.300.135.319,800		4.862.732.903,000		4.957.763.769,400		5.055.645.559,480		5.156.463.803,520	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.064.669.519,800		3.121.464.256,000		3.215.108.179,000		3.311.561.418,000		3.410.908.254,000	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang sosial	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.064.669.519,800	100	3.121.464.256,000	100	3.215.108.179,000	100	3.311.561.418,000	100	3.410.908.254,000	DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					307.278.600,000		506.572.700,000		506.572.700,000		506.572.700,000		506.572.700,000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS (%)	52,38	57,14	71,42	307.278.600,000	85,71	506.572.700,000	85,71	506.572.700,000	85,71	506.572.700,000	85,71	506.572.700,000	DINAS SOSIAL
	Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	50	60	70		80		90		100		100		DINAS SOSIAL
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	50	60	70		80		90		100		100		DINAS SOSIAL
	Persentase TKS/Relawan Sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana (%)	2,9	3,9	4,9		5,9		6,9		7,9		8,9		DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					31.318.900,000		32.258.467,000		33.226.221,000		34.223.007,000		35.249.697,000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekeraran	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial (%)	4,53	3,58	3,58	31.318.900,000	3,58	32.258.467,000	3,58	33.226.221,000	3,58	34.223.007,000	3,58	35.249.697,000	DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					400.785.400,000		650.785.400,000		650.785.400,000		650.785.400,000		650.785.400,000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS (%)	52,38	57,14	71,42	400.785.400,000	85,71	650.785.400,000	85,71	650.785.400,000	85,71	650.785.400,000	85,71	650.785.400,000	DINAS SOSIAL
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%)	0,38	0,88	1,38		1,88		2,38		2,88		3,38		DINAS SOSIAL
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%)	0,08	0,16	0,24		0,32		0,40		0,48		0,56		DINAS SOSIAL
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%)	4,10	4,23	4,36		4,49		4,62		4,75		4,88		DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					409.354.400,000		459.761.380,000		460.180.569,400		460.612.334,480		461.057.052,520	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	62,81	67,41	72,02	409.354.400,000	76,62	459.761.380,000	81,23	460.180.569,400	85,83	460.612.334,480	90,43	461.057.052,520	DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					66.890.700,000		66.890.700,000		66.890.700,000		66.890.700,000		66.890.700,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	100	100	100	66.890.700,000	100	66.890.700,000	100	66.890.700,000	100	66.890.700,000	100	66.890.700,000	DINAS SOSIAL
	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	0,36	0,44	0,52		0,60		0,68		0,76		0,84		DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					19.837.800,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	100	100	100	19.837.800,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.493.762.670,150		5.802.949.806,740		5.926.336.107,020		6.052.751.087,420		6.182.276.864,690	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.894.139.932,150		2.932.426.230,600		2.971.286.823,600		3.010.730.325,500		3.050.765.479,900	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.894.139.932,150	100	2.932.426.230,600	100	2.971.286.823,600	100	3.010.730.325,500	100	3.050.765.479,900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000,000		103.000.000,000		106.000.000,000		109.000.000,000		112.000.000,000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase perusahaan yang memiliki RTK (%)	1,04	1,19	1,34	100.000.000,000	1,49	103.000.000,000	1,64	106.000.000,000	1,79	109.000.000,000	1,94	112.000.000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					3.288.434.800,000		2.550.000.000,000		2.625.000.000,000		2.702.250.000,000		2.781.817.500,000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha (%)	38,51	38,93	39,34	3.288.434.800,000	39,76	2.550.000.000,000	40,18	2.625.000.000,000	40,59	2.702.250.000,000	41,01	2.781.817.500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	27,80	28,00	28,20		28,40		28,60		28,80		29,00		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					161.241.838,000		166.079.093,140		171.061.465,930		176.193.309,910		181.479.109,210	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	0,73	0,75	0,77	161.241.838,000	0,79	166.079.093,140	0,81	171.061.465,930	0,83	176.193.309,910	0,85	181.479.109,210	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri (%)	0,3	0,35	0,41		0,46		0,52		0,57		0,62		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					49.946.100,000		51.444.483,000		52.987.817,490		54.577.452,010		56.214.775,580	
Meningkatnya pekerja	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar neger (%)	3,72	3,97	4,21	49.946.100,000	4,46	51.444.483,000	4,70	52.987.817,490	4,95	54.577.452,010	5,20	56.214.775,580	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.038.195.441,800		4.088.533.628,700		4.139.581.888,400		4.191.350.872,000		4.243.851.390,000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.550.145.141,800		3.597.483.328,700		3.645.531.588,400		3.694.300.572,000		3.743.801.090,000	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.550.145.141,800	100	3.597.483.328,700	100	3.645.531.588,400	100	3.694.300.572,000	100	3.743.801.090,000	DINAS P2KBP3A
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					50.405.300,000		50.405.300,000		50.405.300,000		50.405.300,000		50.405.300,000	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	1,00	2,00	3,00	50.405.300,000	4,00	50.405.300,000	5,00	50.405.300,000	6,00	50.405.300,000	7,00	50.405.300,000	DINAS P2KBP3A
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	66,47	67,06	67,65		68,24		68,83		69,42		70,01		DINAS P2KBP3A
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					235.915.000,000		235.915.000,000		235.915.000,000		235.915.000,000		235.915.000,000	
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	235.915.000,000	100	235.915.000,000	100	235.915.000,000	100	235.915.000,000	100	235.915.000,000	DINAS P2KBP3A
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					11.941.400,000		11.941.400,000		11.941.400,000		11.941.400,000		11.941.400,000	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	25,5	30,5	35,5	11.941.400,000	40,5	11.941.400,000	45,5	11.941.400,000	50,5	11.941.400,000	55,5	11.941.400,000	DINAS P2KBP3A

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					100.000.000,000		103.000.000,000		106.000.000,000		109.000.000,000		112.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	100	100	100	100.000.000,000	100	103.000.000,000	100	106.000.000,000	100	109.000.000,000	100	112.000.000,000	DINAS P2KBP3A
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					25.781.000,000		25.781.000,000		25.781.000,000		25.781.000,000		25.781.000,000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Skor Kabupaten Layak Anak (Skor)	131,15	209,05	286,95	25.781.000,000	364,85	25.781.000,000	442,75	25.781.000,000	520,65	25.781.000,000	598,55	25.781.000,000	DINAS P2KBP3A
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					64.007.600,000		64.007.600,000		64.007.600,000		64.007.600,000		64.007.600,000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	67,19	68,63	70,07	64.007.600,000	71,52	64.007.600,000	72,96	64.007.600,000	74,40	64.007.600,000	75,85	64.007.600,000	DINAS P2KBP3A
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS P2KBP3A
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.610.881.234,250		4.141.678.532,340		4.172.971.172,560		4.204.767.586,720		4.237.076.362,690	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.226.977.676,250		2.255.549.461,600		2.284.549.823,700		2.313.985.191,390		2.343.862.089,500	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pangan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.226.977.676,250	100	2.255.549.461,600	100	2.284.549.823,700	100	2.313.985.191,390	100	2.343.862.089,500	DINAS KETAHANAN PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					100.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan (Unit)	1	1	1	100.000.000,000	1	250.000.000,000	1	250.000.000,000	1	250.000.000,000	1	250.000.000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Persentase jumlah cadangan pangan (%)	0,0	0,0	40		44		44		44		44		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.141.719.800,000		1.441.719.800,000		1.441.719.800,000		1.441.719.800,000		1.441.719.800,000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergisi Seimbang (Angka)	1	1	1	1.141.719.800,000	1	1.441.719.800,000	1	1.441.719.800,000	1	1.441.719.800,000	1	1.441.719.800,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan (Ton)	0	0	20		22		22		22		22		DINAS KETAHANAN PANGAN
	Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		DINAS KETAHANAN PANGAN
	skor pola pangan harapan (Skor)	78,63	79,63	80,63		81,63		82,63		83,63		84,63		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					68.000.000,000		118.000.000,000		118.000.000,000		118.000.000,000		118.000.000,000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan (%)	2,58	2,58	2,58	68.000.000,000	2,58	118.000.000,000	2,58	118.000.000,000	2,58	118.000.000,000	2,58	118.000.000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		DINAS KETAHANAN PANGAN
	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	2,06	2,58	2,58		2,58		2,58		2,58		2,58		DINAS KETAHANAN PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					74.183.758,000		76.409.270,740		78.701.548,860		81.062.595,330		83.494.473,190	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan (%)	25,00	33,33	33,33	74.183.758,000	33,33	76.409.270,740	33,33	78.701.548,860	33,33	81.062.595,330	33,33	83.494.473,190	DINAS KETAHANAN PANGAN
	persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	91,07	100	100		100		100		100		100		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.324.661.200,000		5.531.561.200,000		5.531.561.200,000		5.531.561.200,000		5.531.561.200,000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					31.561.200,000		31.561.200,000		31.561.200,000		31.561.200,000		31.561.200,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	3	3	3	31.561.200,000	3	31.561.200,000	3	31.561.200,000	3	31.561.200,000	3	31.561.200,000	DINAS PKPP
	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PKPP
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					1.293.100.000,000		5.500.000.000,000		5.500.000.000,000		5.500.000.000,000		5.500.000.000,000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	100	100	100	1.293.100.000,000	100	5.500.000.000,000	100	5.500.000.000,000	100	5.500.000.000,000	100	5.500.000.000,000	DINAS PKPP
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					7.941.668.080,000		8.180.477.451,400		8.430.591.772,630		8.688.059.527,030		8.953.101.311,950	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.187.342.580,000		6.372.962.857,400		6.564.151.743,120		6.761.076.295,420		6.963.908.584,280	
Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	6.187.342.580,000	100	6.372.962.857,400	100	6.564.151.743,120	100	6.761.076.295,420	100	6.963.908.584,280	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					24.097.400,000		24.820.322,000		25.564.931,660		26.331.879,610		27.121.836,000	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)	84,50	85,00	85,50	24.097.400,000	86,00	24.820.322,000	86,50	25.564.931,660	87,00	26.331.879,610	87,50	27.121.836,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	65	12	13		14		15		16		17		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					98.645.800,000		101.605.174,000		104.653.329,220		107.792.929,100		111.026.716,970	
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,33	62,48	62,49	98.645.800,000	62,50	101.605.174,000	62,51	104.653.329,220	62,52	107.792.929,100	62,53	111.026.716,970	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	93,72	93,73	93,74		93,75		93,76		93,77		93,78		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					137.103.900,000		141.217.017,000		145.453.527,510		149.817.133,340		154.311.647,340	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) (Indeks)	67,60	67,62	67,63	137.103.900,000	67,64	141.217.017,000	67,65	145.453.527,510	67,66	149.817.133,340	67,67	154.311.647,340	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase RTH (Persentase)	9,30	9,40	9,50		9,60		9,70		9,80		9,90		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					9.165.700,000		10.000.000,000		15.000.000,000		20.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	73,64	100	100	9.165.700,000	100	10.000.000,000	100	15.000.000,000	100	20.000.000,000	100	25.000.000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					16.765.500,000		17.268.465,000		17.786.518,000		18.320.114,000		18.869.717,000	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diiterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota (Usaha/Kegiatan)	139	60	60	16.765.500,000	59	17.268.465,000	60	17.786.518,000	57	18.320.114,000	57	18.869.717,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	33,17	69	69		70		70		72		72		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Berada di Daerah (Orang)	0	0	0		2		4		4		0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					100.000.000,000		103.000.000,000		106.090.000,000		109.272.700,000		112.550.881,000	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota (Surat Keputusan)	3	4	5	100.000.000,000	7	103.000.000,000	9	106.090.000,000	10	109.272.700,000	10	112.550.881,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	30	40	50		70		90		100		100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					81.266.800,000		83.704.804,000		86.215.948,120		88.802.426,560		91.466.499,360	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	50	66,67	81.266.800,000	83,33	83.704.804,000	100	86.215.948,120	100	88.802.426,560	100	91.466.499,360	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.000.000,000		103.000.000,000		106.090.000,000		109.272.700,000		112.550.881,000	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	100.000.000,000	100	103.000.000,000	100	106.090.000,000	100	109.272.700,000	100	112.550.881,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					20.473.100,000		21.087.293,000		21.719.911,000		22.371.509,000		23.042.654,000	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa atau Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani (Pengaduan)	17	25	25	20.473.100,000	25	21.087.293,000	27	21.719.911,000	27	22.371.509,000	28	23.042.654,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	68	100	100		100		100		100		100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.166.807.300,000		1.201.811.519,000		1.237.865.864,000		1.275.001.840,000		1.313.251.895,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	15,50	70	70	1.166.807.300,000	70	1.201.811.519,000	70	1.237.865.864,000	70	1.275.001.840,000	70	1.313.251.895,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	1	1		1		1		1		1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani (%)	9.028,80	9.928,38	10.126,95		10.329,49		10.536,08		10.746,80		10.961,74		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.029.727.110,000		5.269.047.532,000		5.397.630.578,000		5.530.071.115,000		5.666.484.867,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.991.360.710,000		4.111.101.532,000		4.234.434.578,000		4.361.467.615,000		4.492.311.642,000	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.991.360.710,000	100	4.111.101.532,000	100	4.234.434.578,000	100	4.361.467.615,000	100	4.492.311.642,000	DINAS PENDCAPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					228.503.700,000		310.000.000,000		315.250.000,000		320.657.500,000		326.227.225,000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (Angka)	99,10	99,12	99,14	228.503.700,000	99,16	310.000.000,000	99,18	315.250.000,000	99,20	320.657.500,000	99,22	326.227.225,000	DINAS PENDCAPIL
	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan KIA dengan Mitra (Angka)	3	1	1		1		1		1		1		DINAS PENDCAPIL
	Perekaman KTP elektronik (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDCAPIL
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	3,0	3,5	4,0		4,5		5,0		5,5		6,0		DINAS PENDCAPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	40,76	40,80	40,84		40,88		40,92		40,96		41,00		DINAS PENDCAPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					243.635.800,000		253.981.400,000		253.981.400,000		253.981.400,000		253.981.400,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	243.635.800,000	100	253.981.400,000	100	253.981.400,000	100	253.981.400,000	100	253.981.400,000	DINAS PENDCAPIL
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDCAPIL
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDCAPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDCAPIL
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	87,74	87,40	87,46		87,52		87,58		87,64		87,70		DINAS PENDCAPIL
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)	55,69	55,75	55,81		55,87		55,93		55,99		56,05		DINAS PENDCAPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					551.682.500,000		558.964.600,000		558.964.600,000		558.964.600,000		558.964.600,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)	9	1	1	551.682.500,000	1	558.964.600,000	1	558.964.600,000	1	558.964.600,000	1	558.964.600,000	DINAS PENDCAPIL
	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDCAPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					14.544.400,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	3	3	3	14.544.400,000	3	35.000.000,000	3	35.000.000,000	3	35.000.000,000	3	35.000.000,000	DINAS PENDCAPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3.271.962.765,750		3.386.367.076,480		3.430.907.823,730		3.476.226.430,160		3.522.337.855,220	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.789.006.325,750		2.825.680.426,480		2.862.904.638,730		2.900.687.214,160		2.939.036.528,220	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	98,50	98,50	98,50	2.789.006.325,750	98,50	2.825.680.426,480	98,50	2.862.904.638,730	99,00	2.900.687.214,160	99,00	2.939.036.528,220	DINAS PMD
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					13.260.000,000		25.000.000,000		25.750.000,000		26.522.500,000		27.318.175,000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Desa yang difasilitasi terkait penataan desa (%)	10,88	11,05	16,57	13.260.000,000	22,10	25.000.000,000	27,62	25.750.000,000	33,15	26.522.500,000	33,15	27.318.175,000	DINAS PMD
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					35.000.000,000		36.050.000,000		37.131.500,000		38.245.445,000		39.392.808,000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Berjalan Dikurangi Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Sebelumnya (Angka)	1	1	1	35.000.000,000	1	36.050.000,000	1	37.131.500,000	1	38.245.445,000	1	39.392.808,000	DINAS PMD
	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa (Angka)	181	181	181		181		181		181		181		DINAS PMD
	Persentase Desa yang memiliki kegiatan atau program kerjasama (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PMD
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					286.159.300,000		316.802.150,000		316.802.150,000		316.802.150,000		316.802.150,000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa Mandiri (Desa)	10	12	15	286.159.300,000	20	316.802.150,000	25	316.802.150,000	30	316.802.150,000	35	316.802.150,000	DINAS PMD
	Jumlah Desa Maju (Desa)	38	61	71		75		81		86		91		DINAS PMD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Desa Berkembang (Desa)	82	76	65		61		55		50		45		DINAS PMD
	Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	46	32	30		25		20		15		10		DINAS PMD
	Jumlah Desa Sangat Tertinggal (Desa)	5	0	0		0		0		0		0		DINAS PMD
	Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun (Angka)	82	76	65		61		55		50		45		DINAS PMD
	Jumlah Desa Tertinggal Yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun (Angka)	46	32	30		25		20		15		10		DINAS PMD
	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PMD
	Persentase Desa yang memenuhi tertib administrasi (%)	50	50	60		70		80		90		100		DINAS PMD
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					148.537.140,000		182.834.500,000		188.319.535,000		193.969.121,000		199.788.194,000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Di Desa Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas Dan Diberdayakan (Angka)	0	18	36	148.537.140,000	54	182.834.500,000	72	188.319.535,000	90	193.969.121,000	108	199.788.194,000	DINAS PMD
	Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif Dan Pemberdayaan (Angka)	0	18	36		54		72		90		108		DINAS PMD
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berdaya (%)	0	10	20		30		40		50		60		DINAS PMD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					5.411.502.934,000		5.411.502.934,000		5.411.502.934,000		5.411.502.934,000		5.411.502.934,000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					96.000.000,000		96.000.000,000		96.000.000,000		96.000.000,000		96.000.000,000	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Angka)	2,2	2,1	2	96.000.000,000	1,9	96.000.000,000	1,8	96.000.000,000	1,7	96.000.000,000	1,6	96.000.000,000	DINAS P2KBP3A
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun (Angka)	2,18	2,1	2,02		1,94		1,86		1,78		1,7		DINAS P2KBP3A
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.882.383.334,000		2.882.383.334,000		2.882.383.334,000		2.882.383.334,000		2.882.383.334,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptove Prevalance Rate/mCPR) (Angka)	40	45,11	50,22	2.882.383.334,000	55,33	2.882.383.334,000	60,44	2.882.383.334,000	65,55	2.882.383.334,000	70,66	2.882.383.334,000	DINAS P2KBP3A
	Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	24,7	25,54	26,38		27,22		28,06		28,9		29,74		DINAS P2KBP3A
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.433.119.600,000		2.433.119.600,000		2.433.119.600,000		2.433.119.600,000		2.433.119.600,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Seiahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	25,5	30,5	35,5	2.433.119.600,000	40,5	2.433.119.600,000	45,5	2.433.119.600,000	50,5	2.433.119.600,000	55,5	2.433.119.600,000	DINAS P2KBP3A
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					7.441.144.381,000		7.399.378.710,000		16.213.860.072,000		7.584.675.875,000		7.812.319.151,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.948.384.497,000		4.066.836.031,000		4.188.841.112,000		4.314.406.346,000		4.443.941.536,000	
Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.948.384.497,000	100	4.066.836.031,000	100	4.188.841.112,000	100	4.314.406.346,000	100	4.443.941.536,000	DINAS PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase jumlah Penyelenggara lalu lintas angkutan jalan yang dilaksanakan (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					3.392.240.864,000		3.229.008.089,000		11.918.378.332,000		3.160.429.682,000		3.255.242.573,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0,92	0,94	0,96	3.392.240.864,000	0,96	3.229.008.089,000	0,98	11.918.378.332,000	1	3.160.429.682,000	1	3.255.242.573,000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penetapan Tarif Angkutan Antar Kota dalam Kabupaten Serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi (%)	0	100	100		100		100		100		100		DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	20,59	50,13	54,79		61,78		69,30		76,81		84,33		DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)	0	50,13	54,79		61,78		69,30		76,81		77,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C (%)	57,14	42,85	57,14		71,48		85,71		86,50		100		DINAS PERHUBUNGAN
	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (%)	75,70	62,58	65,20		66,95		71,33		75,70		75,70		DINAS PERHUBUNGAN
	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala (%)	58,22	43,38	44,00		45,00		46,00		47,00		48,00		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					100.519.020,000		103.534.590,000		106.640.628,000		109.839.847,000		113.135.042,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut (Penyeberangan)	Konektivitas Laut (Pnyeberangan) (Angka)	0,19	0,43	0,57	100.519.020,000	0,86	103.534.590,000	1,14	106.640.628,000	1,29	109.839.847,000	1,43	113.135.042,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					3.554.071.182,300		3.595.819.447,390		6.138.200.803,590		3.681.224.953,270		3.724.901.750,560	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.286.242.952,300		3.327.533.408,390		5.869.443.221,320		3.411.981.681,430		3.455.158.218,460	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.286.242.952,300	100	3.327.533.408,390	100	5.869.443.221,320	100	3.411.981.681,430	100	3.455.158.218,460	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					121.993.100,000		122.450.909,000		122.922.452,270		123.408.141,840		123.908.402,100	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	78,00	78,35	80,50	121.993.100,000	84,25	122.450.909,000	87,35	122.922.452,270	90,00	123.408.141,840	92,00	123.908.402,100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks)	3,33	3,33	3,34		3,35		3,36		3,37		3,38		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					145.835.130,000		145.835.130,000		145.835.130,000		145.835.130,000		145.835.130,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	39,22	60,00	75,00	145.835.130,000	82,00	145.835.130,000	85,00	145.835.130,000	90,00	145.835.130,000	95,00	145.835.130,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					551.496.300,000		563.806.851,000		576.486.718,530		589.546.982,090		602.999.053,550	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					23.333.100,000		24.033.093,000		24.754.085,790		25.496.708,360		26.261.609,610	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	-13,09	2	4	23.333.100,000	6	24.033.093,000	7	24.754.085,790	8	25.496.708,360	8	26.261.609,610	DINAS P2UMKM
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					25.000.000,000		25.750.000,000		26.522.500,000		27.318.175,000		28.137.720,250	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi sehat (%)	26,74	32,09	37,43	25.000.000,000	42,78	25.750.000,000	48,13	26.522.500,000	50,80	27.318.175,000	53,48	28.137.720,250	DINAS P2UMKM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					66.770.000,000		68.773.100,000		70.836.293,000		72.961.381,790		75.150.223,240	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	69,52	74,33	79,14	66.770.000,000	83,96	68.773.100,000	88,77	70.836.293,000	93,58	72.961.381,790	100	75.150.223,240	DINAS P2UMKM
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					35.000.000,000		36.050.000,000		37.131.500,000		38.245.445,000		39.392.808,350	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	21,39	26,74	32,09	35.000.000,000	37,43	36.050.000,000	42,78	37.131.500,000	48,13	38.245.445,000	53,48	39.392.808,350	DINAS P2UMKM
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					25.000.000,000		25.750.000,000		26.522.500,000		27.318.175,000		28.137.720,250	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kualitas Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset (Unit)	51	51	70	25.000.000,000	264	25.750.000,000	269	26.522.500,000	274	27.318.175,000	279	28.137.720,250	DINAS P2UMKM
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	5,88	6,95	8,02		9,63		10,70		12,30		13,37		DINAS P2UMKM
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					256.960.400,000		261.767.861,000		266.719.545,830		271.819.781,210		277.073.023,650	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri	Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (Unit)	0	15	25	256.960.400,000	35	261.767.861,000	45	266.719.545,830	55	271.819.781,210	65	277.073.023,650	DINAS P2UMKM
	Pertumbuhan Wirausaha (%)	5,8	6,18	10		12		13		14		15		DINAS P2UMKM
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					119.432.800,000		121.682.797,000		124.000.293,910		126.387.315,730		128.845.948,200	
Meningkatnya daya saing UMKM	Pertumbuhan UMKM yang berdaya saing (Angka)	2,24	3	3,25	119.432.800,000	3,50	121.682.797,000	3,75	124.000.293,910	4	126.387.315,730	4	128.845.948,200	DINAS P2UMKM
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.575.056.581,270		3.666.563.845,100		3.718.068.438,990		3.770.483.462,890		3.823.826.709,120	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.318.517.281,270		3.360.205.806,100		3.402.519.658,820		3.445.468.219,320		3.489.061.008,230	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	3.318.517.281,270	100	3.360.205.806,100	100	3.402.519.658,820	100	3.445.468.219,320	100	3.489.061.008,230	DINAS PM DAN PTSP
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PM DAN PTSP
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					35.550.400,000		36.616.912,000		37.715.419,360		38.846.881,940		40.012.288,400	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Presentase Peningkatan Investasi (%)	5	5	5	35.550.400,000	6	36.616.912,000	7	37.715.419,360	8	38.846.881,940	9	40.012.288,400	DINAS PM DAN PTSP
	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (Angka)	0	0	0		1		0		0		0		DINAS PM DAN PTSP
	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		DINAS PM DAN PTSP
	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal (Angka)	0	0	1		0		0		0		0		DINAS PM DAN PTSP
	Nilai investasi PMA dan PMDN (Rupiah)	48.040.892.683	100.000.000.000	150.000.000.000		200.000.000.000		250.000.000.000		300.000.000.000		350.000.000.000		DINAS PM DAN PTSP
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					7.648.000,000		50.000.000,000		51.500.000,000		53.045.000,000		54.636.350,000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Kegiatan pameran penanaman modal (Kegiatan)	0	0	0	7.648.000,000	1	50.000.000,000	1	51.500.000,000	1	53.045.000,000	1	54.636.350,000	DINAS PM DAN PTSP
	persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	20	29,97	30,01		30,05		30,10		30,15		30,20		DINAS PM DAN PTSP
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					59.448.300,000		61.231.749,000		63.068.701,470		64.960.762,510		66.909.585,390	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota (Data)	4	4	4	59.448.300,000	4	61.231.749,000	4	63.068.701,470	4	64.960.762,510	4	66.909.585,390	DINAS PM DAN PTSP
	Konsultasi perizinan penanaman modal (Angka)	50	50	60		75		90		115		150		DINAS PM DAN PTSP
	Penertiban perizinan dan non perizinan penanaman modal (Izin)	2.250	2.250	2.475		2.722		2.994		3.293		3.622		DINAS PM DAN PTSP
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PM DAN PTSP
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					62.567.100,000		64.444.113,000		66.377.436,390		68.368.759,480		70.419.822,270	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab / Kota (Angka)	80	80	85	62.567.100,000	90	64.444.113,000	95	66.377.436,390	100	68.368.759,480	105	70.419.822,270	DINAS PM DAN PTSP
	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN (Kegiatan)	80	80	85		90		95		100		105		DINAS PM DAN PTSP
	Laporan realisasi penanaman modal (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		DINAS PM DAN PTSP
	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	87,5	100	100		100		100		100		100		DINAS PM DAN PTSP
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					91.325.500,000		94.065.265,000		96.887.222,950		99.793.839,640		102.787.654,830	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	80	100	100	91.325.500,000	100	94.065.265,000	100	96.887.222,950	100	99.793.839,640	100	102.787.654,830	DINAS PM DAN PTSP
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					3.108.105.300,000		2.530.105.300,000		2.530.105.300,000		2.530.105.300,000		2.530.105.300,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					135.399.200,000		135.399.200,000		135.399.200,000		135.399.200,000		135.399.200,000	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	1,72	1,76	1,8	135.399.200,000	1,84	135.399.200,000	1,88	135.399.200,000	1,92	135.399.200,000	1,96	135.399.200,000	DINAS PKO
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.897.706.100,000		2.319.706.100,000		2.319.706.100,000		2.319.706.100,000		2.319.706.100,000	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olah Raga	Persentase Perolehan Prestasi di bidang Olahraga (%)	66,6	70,8	75	2.897.706.100,000	79,16	2.319.706.100,000	80,3	2.319.706.100,000	95,8	2.319.706.100,000	100	2.319.706.100,000	DINAS PKO
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (%)	100	100	100	75.000.000,000	100	75.000.000,000	100	75.000.000,000	100	75.000.000,000	100	75.000.000,000	DINAS PKO
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					149.355.500,000		153.836.165,000		158.451.249,950		163.204.787,450		168.100.931,070	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					149.355.500,000		153.836.165,000		158.451.249,950		163.204.787,450		168.100.931,070	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	149.355.500,000	100	153.836.165,000	100	158.451.249,950	100	163.204.787,450	100	168.100.931,070	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					36.214.800,000		36.214.800,000		36.214.800,000		36.214.800,000		36.214.800,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					36.214.800,000		36.214.800,000		36.214.800,000		36.214.800,000		36.214.800,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0,20	0,26	0,31	36.214.800,000	0,37	36.214.800,000	0,49	36.214.800,000	0,71	36.214.800,000	0,91	36.214.800,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					929.755.400,000		957.648.062,000		986.377.503,860		1.015.968.828,980		1.046.447.893,850	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					703.755.400,000		724.868.062,000		746.614.103,860		769.012.526,980		792.082.902,790	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) (Angka)	3	3	3	703.755.400,000	3	724.868.062,000	3	746.614.103,860	3	769.012.526,980	3	792.082.902,790	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman) (Angka)	2	2	2		2		2		2		2		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) (Angka)	3	3	3		3		3		3		3		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase karya budaya yang dilestarikan (%)	35	40	45		50		55		60		65		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					50.000.000,000		51.500.000,000		53.045.000,000		54.636.350,000		56.275.440,500	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) (Angka)	20	20	30	50.000.000,000	30	51.500.000,000	30	53.045.000,000	30	54.636.350,000	30	56.275.440,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan (%)	45	47	49		51		53		55		57		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					50.000.000,000		51.500.000,000		53.045.000,000		54.636.350,000		56.275.440,500	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	50	51,74	53,48	50.000.000,000	55,23	51.500.000,000	56,97	53.045.000,000	58,72	54.636.350,000	60,46	56.275.440,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					96.000.000,000		98.880.000,000		101.846.400,000		104.901.792,000		108.048.845,760	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Angka)	21	21	22	96.000.000,000	23	98.880.000,000	24	101.846.400,000	25	104.901.792,000	26	108.048.845,760	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya (Angka)	0	0	1		1		1		1		1		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pembentukan tim ahli cagar budaya (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman (Angka)	0	0	1		1		1		1		1		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	11,46	13,46	15,46		17,46		19,46		21,46		23,46		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan (%)	0	3,44	6,89		10,34		13,79		17,24		20,68		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					30.000.000,000		30.900.000,000		31.827.000,000		32.781.810,000		33.765.264,300	
Meningkatnya tata kelola museum	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum (Angka)	1	1	1	30.000.000,000	1	30.900.000,000	2	31.827.000,000	2	32.781.810,000	2	33.765.264,300	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota (%)	50	50	100		100		100		100		100		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Penyelenggaran kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Angka)	1	1	2		2		2		2		2		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					724.427.400,000		755.574.688,000		756.989.094,640		758.445.932,910		759.946.476,760	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					724.427.400,000		724.907.388,000		725.401.775,640		725.910.994,910		726.435.490,760	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Pernustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	64,25	66,18	68,16	724.427.400,000	70,21	724.907.388,000	72,31	725.401.775,640	74,48	725.910.994,910	76,72	726.435.490,760	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					0,000		30.667.300,000		31.587.319,000		32.534.938,000		33.510.986,000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	0	8	10	0,000	12	30.667.300,000	14	31.587.319,000	16	32.534.938,000	18	33.510.986,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					3.410.583.757,550		3.453.727.753,100		3.497.518.908,570		3.541.966.931,380		3.587.081.674,530	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.255.733.857,550		3.298.877.853,100		3.342.669.008,570		3.387.117.031,380		3.432.231.774,530	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.255.733.857,550	100	3.298.877.853,100	100	3.342.669.008,570	100	3.387.117.031,380	100	3.432.231.774,530	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					124.182.600,000		124.182.600,000		124.182.600,000		124.182.600,000		124.182.600,000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	63,73	100	100	124.182.600,000	100	124.182.600,000	100	124.182.600,000	100	124.182.600,000	100	124.182.600,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat (%)	0	100	100		100		100		100		100		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					30.667.300,000		30.667.300,000		30.667.300,000		30.667.300,000		30.667.300,000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	100	100	100	30.667.300,000	100	30.667.300,000	100	30.667.300,000	100	30.667.300,000	100	30.667.300,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					8.689.465.531,650		7.869.474.682,050		8.098.058.922,860		8.333.500.689,910		8.576.005.711,080	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.566.889.531,650		4.660.721.402,050		4.800.543.044,110		4.944.559.335,430		5.092.896.115,500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang perikanan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	4.566.889.531,650	100	4.660.721.402,050	100	4.800.543.044,110	100	4.944.559.335,430	100	5.092.896.115,500	DINAS PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.889.678.500,000		1.946.368.855,000		2.004.759.921,000		2.064.902.718,000		2.126.849.800,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Total Produksi Perikanan (Angka)	27.625,41	29.974,23	32.523,36	1.889.678.500,000	35.271,40	1.946.368.855,000	38.226,48	2.004.759.921,000	41.398,72	2.064.902.718,000	44.800,03	2.126.849.800,000	DINAS PERIKANAN
	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP) (Angka)	118	130	163		168		178		190		205		DINAS PERIKANAN
	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional (%)	0	0	0		0		0		0		0		DINAS PERIKANAN
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	27.625,41	29.973,60	32.522,79		35.270,71		38.225,76		41.397,96		44.799,23		DINAS PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					32.756.800,000		33.739.504,000		34.751.689,120		35.794.239,790		36.868.066,990	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Angka)	0	0	1	32.756.800,000	1	33.739.504,000	1	34.751.689,120	1	35.794.239,790	1	36.868.066,990	DINAS PERIKANAN
	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha dan Akses Iptek dan Informasi/ dan Penguatan Kelembagaan) (Angka)	59	60	64		69		74		79		84		DINAS PERIKANAN
	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang diproduksi (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		DINAS PERIKANAN
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	0,6	0,63	0,66		0,69		0,72		0,76		0,80		DINAS PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					2.200.140.700,000		1.228.644.921,000		1.258.004.268,630		1.288.244.396,690		1.319.391.728,590	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	79,57	84,75	90,26	2.200.140.700,000	96,12	1.228.644.921,000	102,34	1.258.004.268,630	108,94	1.288.244.396,690	115,94	1.319.391.728,590	DINAS PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.571.240.945,500		6.031.053.633,160		4.691.722.377,870		4.753.205.605,050		4.815.516.033,350	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.529.442.306,500		3.577.011.733,460		3.625.294.701,820		3.674.301.914,710		3.724.044.235,790	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pariwisata	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.529.442.306,500	100	3.577.011.733,460	100	3.625.294.701,820	100	3.674.301.914,710	100	3.724.044.235,790	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					611.261.689,000		616.569.180,000		621.811.112,000		626.928.968,000		631.918.171,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi (Angka)	8	10	14	611.261.689,000	18	616.569.180,000	23	621.811.112,000	26	626.928.968,000	29	631.918.171,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata (Angka)	45	45	50		55		60		65		70		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota (Angka)	139	139	150		160		170		180		190		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (Angka)	4.601	4.601	4.701		4.800		4.900		5.000		5.100		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan (%)	14,4	15,4	16,4		17,4		18,4		19,4		20,4		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Pertumbuhan Rata-rata Lama Tinggal (%)	-3,09	1,06	2,11		3,09		4,00		4,81		5,50		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					147.393.090,000		148.834.544,700		150.319.243,050		151.848.482,340		153.423.598,810	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (Angka)	2	2	1	147.393.090,000	1	148.834.544,700	1	150.319.243,050	1	151.848.482,340	1	153.423.598,810	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi (Angka)	2	2	1		1		1		1		1		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri (Angka)	6	6	7		8		9		10		11		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Indeks Kepuasan Wisatawan (Indeks)	77,09	78	79		80		81		82		83		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	20	33,3	25		10		9,09		33,3		7,14		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	-4,45	2,00	4,00		6,00		8,00		10,00		12,00		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					75.000.000,000		77.250.000,000		79.567.500,000		81.954.525,000		84.413.160,750	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	5,88	5,88	8,33	75.000.000,000	7,14	77.250.000,000	7,14	79.567.500,000	6,66	81.954.525,000	8,33	84.413.160,750	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	5,88	5,88	8,33		12,5		13,89		14,63		14,89		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					208.143.860,000		1.611.388.175,000		214.729.821,000		218.171.715,000		221.716.867,000	
Meningkatnya kapasistas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (Angka)	10	10	12	208.143.860,000	15	1.611.388.175,000	17	214.729.821,000	18	218.171.715,000	20	221.716.867,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan (%)	30	30	32		35		37		38		40		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat (Angka)	35	35	40		45		50		55		60		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					30.035.293.743,820		31.130.951.940,170		32.232.678.569,680		33.340.584.984,760		34.454.793.089,690	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.071.332.551,820		21.358.357.400,170		21.649.687.621,240		21.945.387.795,630		22.245.523.472,640	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pertanian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	21.071.332.551,820	100	21.358.357.400,170	100	21.649.687.621,240	100	21.945.387.795,630	100	22.245.523.472,640	DINAS PERTANIAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					6.684.695.292,000		7.434.695.292,000		8.184.695.292,000		8.934.695.292,000		9.684.695.292,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan produksi hortikultura (%)	0,5	0,5	0,5	6.684.695.292,000	0,5	7.434.695.292,000	0,5	8.184.695.292,000	0,5	8.934.695.292,000	0,5	9.684.695.292,000	DINAS PERTANIAN
	persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (%)	0,2	0,2	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase peningkatan produksi perkebunan (%)	0,2	0,2	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		DINAS PERTANIAN
	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		DINAS PERTANIAN
	produktivitas pangan (Ton/Ha)	3,70	3,75	3,80		3,85		3,90		3,95		4,00		DINAS PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.196.804.400,000		1.232.706.532,000		1.269.689.787,960		1.307.780.481,600		1.347.013.896,050	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Hektar)	1.906,5	1.906,5	1.906,5	1.196.804.400,000	1.906,5	1.232.706.532,000	1.906,5	1.269.689.787,960	1.906,5	1.307.780.481,600	1.906,5	1.347.013.896,050	DINAS PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					607.707.200,000		625.938.416,000		644.716.568,480		664.058.065,530		683.979.807,500	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan (%)	1	1	1	607.707.200,000	1	625.938.416,000	1	644.716.568,480	1	664.058.065,530	1	683.979.807,500	DINAS PERTANIAN
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	1	1	1		1		1		1		1		DINAS PERTANIAN
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		DINAS PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					100.000.000,000		103.000.000,000		106.090.000,000		109.272.700,000		112.550.881,000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	50	50	50	100.000.000,000	50	103.000.000,000	50	106.090.000,000	50	109.272.700,000	50	112.550.881,000	DINAS PERTANIAN
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	50	50	50		50		50		50		50		DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					50.000.000,000		51.500.000,000		53.045.000,000		54.636.350,000		56.275.440,500	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	0	0	1	50.000.000,000	1	51.500.000,000	1	53.045.000,000	1	54.636.350,000	1	56.275.440,500	DINAS PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					324.754.300,000		324.754.300,000		324.754.300,000		324.754.300,000		324.754.300,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperas Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	8,28	8,28	11,46	324.754.300,000	14,64	324.754.300,000	17,83	324.754.300,000	21,01	324.754.300,000	24,2	324.754.300,000	DINAS PERTANIAN
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	52,63	52,63	10,52		10,52		10,52		10,52		10,52		DINAS PERTANIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					7.765.699.468,500		8.037.360.835,890		6.917.520.590,810		6.987.811.960,300		7.059.254.745,120	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.325.377.868,500		5.387.327.167,890		5.450.205.706,770		5.514.027.423,730		5.578.806.466,450	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang perdagangan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.325.377.868,500	100	5.387.327.167,890	100	5.450.205.706,770	100	5.514.027.423,730	100	5.578.806.466,450	DINAS P2UMKM
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					30.000.000,000		30.900.000,000		31.827.000,000		32.781.810,000		33.765.264,300	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	30.000.000,000	100	30.900.000,000	100	31.827.000,000	100	32.781.810,000	100	33.765.264,300	DINAS P2UMKM
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.122.267.000,000		2.325.880.800,000		1.136.880.800,000		1.136.880.800,000		1.136.880.800,000	
Meningkatnya kualitas saran perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	100	100	100	2.122.267.000,000	100	2.325.880.800,000	100	1.136.880.800,000	100	1.136.880.800,000	100	1.136.880.800,000	DINAS P2UMKM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					94.481.800,000		95.047.957,000		95.631.098,710		96.231.734,680		96.850.389,720	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	94.481.800,000	100	95.047.957,000	100	95.631.098,710	100	96.231.734,680	100	96.850.389,720	DINAS P2UMKM
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					35.000.000,000		36.050.000,000		37.131.500,000		38.245.445,000		39.392.808,350	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang (%)	0	1	2	35.000.000,000	3	36.050.000,000	4	37.131.500,000	5	38.245.445,000	6	39.392.808,350	DINAS P2UMKM
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					108.572.800,000		110.654.911,000		112.799.485,330		115.008.396,890		117.283.575,800	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	0	100	100	108.572.800,000	100	110.654.911,000	100	112.799.485,330	100	115.008.396,890	100	117.283.575,800	DINAS P2UMKM
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					50.000.000,000		51.500.000,000		53.045.000,000		54.636.350,000		56.275.440,500	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	0	10	20	50.000.000,000	30	51.500.000,000	40	53.045.000,000	50	54.636.350,000	50	56.275.440,500	DINAS P2UMKM
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.330.094.000,000		2.399.996.820,000		2.471.996.724,600		2.546.156.626,340		2.622.541.325,130	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.230.094.000,000		2.296.996.820,000		2.365.906.724,600		2.436.883.926,340		2.509.990.444,130	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	40,57	41,32	42,07	2.230.094.000,000	43,57	2.296.996.820,000	44,32	2.365.906.724,600	45,07	2.436.883.926,340	45,07	2.509.990.444,130	DINAS P2UMKM
	Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya perda (%)	0	50	50		100		100		100		100		DINAS P2UMKM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					50.000.000,000		51.500.000,000		53.045.000,000		54.636.350,000		56.275.440,500	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	77,16	80	82,5	50.000.000,000	85	51.500.000,000	87	53.045.000,000	89	54.636.350,000	91	56.275.440,500	DINAS P2UMKM
	Persentase Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan (%)	0,10	0,10	0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		DINAS P2UMKM
	Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang Diterbitkan (%)	15	15	15		15		15		15		15		DINAS P2UMKM
	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	0	0	0		0		100		100		100		DINAS P2UMKM
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					50.000.000,000		51.500.000,000		53.045.000,000		54.636.350,000		56.275.440,500	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri Secara Lengkap, Akuran dan Terkini (%)	100	100	100	50.000.000,000	100	51.500.000,000	100	53.045.000,000	100	54.636.350,000	100	56.275.440,500	DINAS P2UMKM
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					96.142.500,000		99.026.775,000		101.997.577,770		105.057.504,990		108.209.230,250	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					48.117.200,000		49.560.716,000		51.047.537,000		52.578.963,000		54.156.332,000	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang ditempatkan di Lokasi Transmigrasi (%)	100	100	100	48.117.200,000	100	49.560.716,000	100	51.047.537,000	100	52.578.963,000	100	54.156.332,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					48.025.300,000		49.466.059,000		50.950.040,770		52.478.541,990		54.052.898,250	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)	2,47	3,47	4,47	48.025.300,000	5,47	49.466.059,000	6,47	50.950.040,770	7,47	52.478.541,990	8,47	54.052.898,250	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					35.959.588.499,800		46.165.108.201,750		45.933.229.820,470		69.699.154.270,860		36.995.209.534,950	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.207.868.369,800		21.387.866.382,750		21.570.639.040,470		46.775.397.602,860		21.944.684.454,950	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	20.842.868.369,800	100	21.022.866.382,750	100	21.205.639.040,470	100	46.391.230.202,860	100	21.579.684.454,950	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Tertata Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	365.000.000,000	100	365.000.000,000	100	365.000.000,000	100	384.167.400,000	100	365.000.000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					13.787.688.250,000		23.813.209.939,000		23.398.558.900,000		21.959.724.788,000		14.086.493.200,000	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah, kualitas kebijakan pemerintahan dan otononi daerah serta kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	100	100	13.141.371.850,000	100	23.166.893.539,000	100	22.752.242.500,000	100	21.313.408.388,000	100	13.440.176.800,000	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Fasilitasi Bantuan Sosial/Hibah/Bantuan Keagamaan Yang Tepat Sasaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Memberikan Manfaat Bagi Pembangunan (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Penyelesaian Urusan Administrasi Pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	100	646.316.400,000	100	646.316.400,000	100	646.316.400,000	100	646.316.400,000	100	646.316.400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					964.031.880,000		964.031.880,000		964.031.880,000		964.031.880,000		964.031.880,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan, pelayanan pengadaan barang dan jasa, administrasi pembangunan dan sumber daya alam	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	0	0	0	964.031.880,000	0	964.031.880,000	0	964.031.880,000	0	964.031.880,000	0	964.031.880,000	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	82,31	82,65	83,04		83,80		84,20		84,60		85,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	35,11	37,50	40,20		43,15		45,54		48,12		50,50		SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Administrasi Pembangunan Daerah Yang Efektif dan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Melalui Sistem Elektronik (SPSE) (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					30.050.588.298,450		30.385.615.249,320		30.758.550.102,220		32.726.402.396,040		33.686.013.968,190	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.740.362.806,450		25.968.263.492,560		26.230.858.292,760		28.085.060.332,300		28.927.612.142,520	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan Sekretariat DPRD	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	25.740.362.806,450	100	25.968.263.492,560	100	26.230.858.292,760	100	28.085.060.332,300	100	28.927.612.142,520	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					4.310.225.492,000		4.417.351.756,760		4.527.691.809,460		4.641.342.063,740		4.758.401.825,670	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan kualitas penganggaran serta pengawasan	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	100	100	100	4.310.225.492,000	100	4.417.351.756,760	100	4.527.691.809,460	100	4.641.342.063,740	100	4.758.401.825,670	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi Penyusunannya oleh Sekretariat DPRD (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.960.297.529,550		7.111.350.989,370		7.324.712.118,910		7.544.453.481,220		7.770.787.848,350	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.638.112.929,550		4.719.520.851,370		4.861.106.476,910		5.006.939.671,220		5.157.147.861,350	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	4.638.112.929,550	100	4.719.520.851,370	100	4.861.106.476,910	100	5.006.939.671,220	100	5.157.147.861,350	SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.444.226.800,000		1.487.533.604,000		1.532.180.212,000		1.578.145.618,000		1.625.489.987,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	0	100	100	1.444.226.800,000	100	1.487.533.604,000	100	1.532.180.212,000	100	1.578.145.618,000	100	1.625.489.987,000	BAPPERIDA
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	96,60	100	100		100		100		100		100		BAPPERIDA
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					877.957.800,000		904.296.534,000		931.425.430,000		959.368.192,000		988.150.000,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	96,60	100	100	877.957.800,000	100	904.296.534,000	100	931.425.430,000	100	959.368.192,000	100	988.150.000,000	BAPPERIDA
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	96,60	100	100		100		100		100		100		BAPPERIDA
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	96,60	100	100		100		100		100		100		BAPPERIDA
5.02 - KEUANGAN					367.970.796.671,900		370.278.394.985,180		372.011.500.335,980		373.875.913.711,300		375.922.151.574,870	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					125.785.357.106,900		127.636.597.566,180		129.515.606.632,360		131.422.800.834,520		133.358.602.949,730	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	125.785.357.106,900	100	127.636.597.566,180	100	129.515.606.632,360	100	131.422.800.834,520	100	133.358.602.949,730	BPKAD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pengelolaan keuangan dan pendapatan														
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		BAPENDA
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					239.056.193.765,000		239.157.258.119,000		239.261.354.403,620		239.368.573.576,780		239.479.009.325,140	
Meningkatnya tata kelola anggaran, tata kelola perbendaharaan, dan tata kelola akuntansi serta pelaporan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100	239.056.193.765,000	100	239.157.258.119,000	100	239.261.354.403,620	100	239.368.573.576,780	100	239.479.009.325,140	BPKAD
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		BPKAD
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		BPKAD
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		BPKAD
														BPKAD (PPKD)
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.080.441.100,000		1.080.441.100,000		1.280.441.100,000		1.130.441.100,000		1.130.441.100,000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	100	100	100	1.080.441.100,000	100	1.080.441.100,000	100	1.280.441.100,000	100	1.130.441.100,000	100	1.130.441.100,000	BPKAD
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.048.804.700,000		2.404.098.200,000		1.954.098.200,000		1.954.098.200,000		1.954.098.200,000	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, kualitas pengawasan dan pelaporan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	0,32	0,53	0,85	2.048.804.700,000	1,38	2.404.098.200,000	1,91	1.954.098.200,000	2,76	1.954.098.200,000	4,14	1.954.098.200,000	BAPENDA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		BAPENDA
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0,47	0,57	0,97		1,36		1,75		2,15		2,54		BAPENDA
5.03 - KEPEGAWAIAN					6.022.954.627,900		6.139.989.471,820		6.259.800.144,780		6.382.458.893,400		6.508.039.966,270	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.580.277.427,900		3.629.291.846,820		3.679.041.482,030		3.729.537.361,760		3.780.790.679,680	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.580.277.427,900	100	3.629.291.846,820	100	3.679.041.482,030	100	3.729.537.361,760	100	3.780.790.679,680	BK PSDM
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.442.677.200,000		2.510.697.625,000		2.580.758.662,750		2.652.921.531,640		2.727.249.286,590	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, tata kelola pengembangan karir ASN, dan kualitas penilaian kinerja ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	4,81	5,48	6,15	2.442.677.200,000	6,82	2.510.697.625,000	7,49	2.580.758.662,750	8,16	2.652.921.531,640	8,83	2.727.249.286,590	BK PSDM
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	76	77	78		79		80		81		82		BK PSDM
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	80	81	82		83		84		85		86		BK PSDM
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	61,74	66,74	71,74		76,74		81,74		86,74		87,00		BK PSDM
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					284.984.900,000		293.534.447,000		302.340.480,410		311.410.694,830		320.753.015,670	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					284.984.900,000		293.534.447,000		302.340.480,410		311.410.694,830		320.753.015,670	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional, kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi, layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi, dan layanan pengembangan kompetensi teknis	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	22,44	23,11	23,78	284.984.900,000	24,45	293.534.447,000	25,12	302.340.480,410	25,79	311.410.694,830	26,46	320.753.015,670	BK PSDM
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	27,66	28,33	29,00		29,67		30,34		31,01		31,68		BK PSDM
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	61,91	66,91	71,91		76,91		81,91		86,91		87,00		BK PSDM
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	31,73	32,73	32,73		33,73		33,73		34,73		34,73		BK PSDM
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.374.668.900,000		3.374.668.900,000		4.374.668.900,000		4.374.668.900,000		3.374.668.900,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.374.668.900,000		3.374.668.900,000		4.374.668.900,000		4.374.668.900,000		3.374.668.900,000	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan, kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah, fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian,	Jumlah Inovasi Daerah Yang Dilaporkan (Angka)	6	10	12	1.374.668.900,000	14	3.374.668.900,000	16	4.374.668.900,000	18	4.374.668.900,000	20	3.374.668.900,000	BAPPERIDA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah														
	Jumlah Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaporkan (Angka)	2	3	5		6		6		6		6		BAPPERIDA
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		BAPPERIDA
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		BAPPERIDA
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					5.796.555.568,000		5.878.924.914,810		5.962.875.166,920		6.048.440.398,850		6.135.655.507,110	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.029.077.568,000		5.088.422.574,810		5.148.657.756,720		5.209.796.466,350		5.271.852.256,630	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pengawasan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.029.077.568,000	100	5.088.422.574,810	100	5.148.657.756,720	100	5.209.796.466,350	100	5.271.852.256,630	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					553.093.800,000		569.686.614,000		586.777.212,420		604.380.528,790		622.511.944,660	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	95,61	100	100	553.093.800,000	100	569.686.614,000	100	586.777.212,420	100	604.380.528,790	100	622.511.944,660	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					214.384.200,000		220.815.726,000		227.440.197,780		234.263.403,710		241.291.305,820	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)	82,44	100	100	214.384.200,000	100	220.815.726,000	100	227.440.197,780	100	234.263.403,710	100	241.291.305,820	INSPEKTORAT DAERAH
7.01 - KECAMATAN					45.159.164.216,780		46.420.242.675,010		51.787.447.425,000		47.447.843.414,400		47.895.516.357,770	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.785.866.808,780		38.422.651.267,010		43.835.900.047,000		39.464.253.206,400		39.922.926.149,770	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	37.785.866.808,780	100	38.422.651.267,010	100	43.835.900.047,000	100	39.464.253.206,400	100	39.922.926.149,770	KELURAHAN MADAWAT
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KABOR
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN NANGALIMANG
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KOTA UNENG
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WURING
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN HEWULI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAILITI
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WOLOMARANG
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAIOTI
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN NANGAMETING
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAIROTANG
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN BERU
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KOTA BARU
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK BARAT
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK TIMUR
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN BOLA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN DORENG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN HEWOKLOANG
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KANGAE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KEWAPANTE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KOTING
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN LELA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MAGEPANDA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MAPITARA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN NELLE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN NITA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PAGA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PALUE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TALIBURA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TANA WAWO
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN WAIBLAMA
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN WAIGETE
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MEGO
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.116.825.000,000		2.127.594.000,000		2.118.594.000,000		2.119.594.000,000		2.120.594.000,000	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100	2.116.825.000,000	100	2.127.594.000,000	100	2.118.594.000,000	100	2.119.594.000,000	100	2.120.594.000,000	KELURAHAN MADAWAT
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KABOR
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN NANGALIMANG
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KOTA UNENG
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WURING
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN HEWULI
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAILITI
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WOLOMARANG
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAIOTI
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN NANGAMETING
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAIROTANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN BERU
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KOTA BARU
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK BARAT
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK TIMUR
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN BOLA
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN DORENG
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN HEWOKLOANG
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KANGAE
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KEWAPANTE
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KOTING
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN LELA
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MAGEPANDA
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MAPITARA
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN NELLE
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN NITA
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PAGA
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PALUE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TALIBURA
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TANA WAWO
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN WAIBLAMA
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN WAIGETE
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MEGO
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.450.103.540,000		4.450.528.540,000		4.451.528.540,000		4.452.528.540,000		4.453.528.540,000	
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	4.450.103.540,000	100	4.450.528.540,000	100	4.451.528.540,000	100	4.452.528.540,000	100	4.453.528.540,000	KELURAHAN MADAWAT
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KABOR
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN NANGALIMANG
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KOTA UNENG
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WURING
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN HEWULI
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAILITI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WOLOMARANG
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAIOTI
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN NANGAMETING
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAIROTANG
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN BERU
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KOTA BARU
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK BARAT
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK TIMUR
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN BOLA
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN DORENG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN HEWOKLOANG
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KANGAE
														KECAMATAN KEWAPANTE
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KOTING
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN LELA
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MAGEPANDA
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MAPITARA
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN NELLE
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN NITA
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PAGA
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PALUE
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TALIBURA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TANA WAWO
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN WAIBLAMA
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN WAIGETE
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MEGO
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					18.957.168,000		648.957.168,000		648.957.168,000		648.957.168,000		648.957.168,000	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100	18.957.168,000	100	648.957.168,000	100	648.957.168,000	100	648.957.168,000	100	648.957.168,000	KELURAHAN MADAWAT
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KABOR
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN NANGALIMANG
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KOTA UNENG
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WURING
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN HEWULI
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAILITI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WOLOMARANG
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAIOTI
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN NANGAMETING
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAIROTANG
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN BERU
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KOTA BARU
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK BARAT
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK TIMUR
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN BOLA
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN DORENG
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN HEWOKLOANG
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KANGAE
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KEWAPANTE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KOTING
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN LELA
														KECAMATAN MAGEPANDA
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MAPITARA
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN NELLE
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN NITA
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PAGA
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PALUE
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TALIBURA
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TANA WAWO
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN WAIBLAMA
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN WAIGETE
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MEGO
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					435.881.700,000		435.881.700,000		435.881.700,000		435.881.700,000		435.881.700,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100	435.881.700,000	100	435.881.700,000	100	435.881.700,000	100	435.881.700,000	100	435.881.700,000	KELURAHAN MADAWAT
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KABOR
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN NANGALIMANG
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KOTA UNENG
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAIOTI
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN NANGAMETING
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN WAIROTANG
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN BERU
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KELURAHAN KOTA BARU
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK BARAT
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK TIMUR
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN BOLA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN DORENG
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN HEWOKLOANG
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KANGAE
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KEWAPANTE
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KOTING
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN LELA
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MAGEPANDA
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MAPITARA
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN NELLE
														KECAMATAN NITA
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PAGA
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PALUE
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TALIBURA
														KECAMATAN TANA WAWO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN WAIBLAMA
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN WAIGETE
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MEGO
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					351.530.000,000		334.630.000,000		296.585.970,000		326.628.800,000		313.628.800,000	
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100	351.530.000,000	100	334.630.000,000	100	296.585.970,000	100	326.628.800,000	100	313.628.800,000	KECAMATAN ALOK
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN ALOK TIMUR
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN BOLA
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN DORENG
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN HEWOKLOANG
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KANGAE
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KEWAPANTE
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN KOTING

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN LELA
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MAGEPANDA
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN MAPITARA
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN NELLE
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN NITA
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PAGA
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PALUE
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN TALIBURA
														KECAMATAN TANA WAWO
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN WAIBLAMA
	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN WAIGETE
														KECAMATAN MEGO
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.608.518.032,200		4.641.320.761,800		4.674.615.532,350		4.708.409.724,460		4.742.710.829,440	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.435.594.628,200		2.468.397.357,800		2.501.692.128,350		2.535.486.320,460		2.569.787.425,440	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kesatuan bangsa dan politik	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.435.594.628,200	100	2.468.397.357,800	100	2.501.692.128,350	100	2.535.486.320,460	100	2.569.787.425,440	BADAN KESBANGPOL
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					439.976.550,000		439.976.550,000		439.976.550,000		439.976.550,000		439.976.550,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	84,00	84,00	85,00	439.976.550,000	85,25	439.976.550,000	85,50	439.976.550,000	85,75	439.976.550,000	86,00	439.976.550,000	BADAN KESBANGPOL
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					870.113.054,000		870.113.054,000		870.113.054,000		870.113.054,000		870.113.054,000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	83	83,00	85,00	870.113.054,000	87,00	870.113.054,000	90,00	870.113.054,000	95,00	870.113.054,000	95,00	870.113.054,000	BADAN KESBANGPOL
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					111.301.600,000		111.301.600,000		111.301.600,000		111.301.600,000		111.301.600,000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	97,51	97,55	97,60	111.301.600,000	97,65	111.301.600,000	97,70	111.301.600,000	97,75	111.301.600,000	97,80	111.301.600,000	BADAN KESBANGPOL
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					63.632.300,000		63.632.300,000		63.632.300,000		63.632.300,000		63.632.300,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	95,00	95,25	95,50	63.632.300,000	95,75	63.632.300,000	96,00	63.632.300,000	96,25	63.632.300,000	96,50	63.632.300,000	BADAN KESBANGPOL
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					687.899.900,000		687.899.900,000		687.899.900,000		687.899.900,000		687.899.900,000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik Sosial (%)	85	85,25	85,50	687.899.900,000	85,75	687.899.900,000	86	687.899.900,000	86,25	687.899.900,000	86,50	687.899.900,000	BADAN KESBANGPOL
TOTAL KESELURUHAN					1.361.099.241.215,180		1.418.496.213.016,458		1.443.804.276.343,427		1.474.762.277.431,736		1.463.341.255.504,443	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Kinerja ini menunjukkan sejauh mana program dan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) mampu mendukung pencapaian sasaran, tujuan, dan visi pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029, kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi alat utama untuk memantau perkembangan, menilai capaian, serta mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan di seluruh perangkat daerah.

Pengukuran kinerja PD dilakukan secara sistematis untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Evaluasi ini dilakukan melalui indikator kinerja yang dirancang secara terintegrasi, mulai dari tingkat makro hingga mikro, guna mencerminkan kemajuan terhadap sasaran strategis pembangunan. Setiap perangkat daerah juga dibekali dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu (prinsip SMART), sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 tidak sekadar merumuskan daftar program dan kegiatan pembangunan, tetapi merupakan bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan yang terukur, berdampak, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Agar arah pembangunan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, setiap tujuan dan sasaran pembangunan dilengkapi dengan target keberhasilan yang jelas serta indikator kinerja yang terukur, layaknya kompas dan peta yang memandu perjalanan transformasi daerah.

Target keberhasilan ini menjadi tolok ukur konkret untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah memberikan manfaat nyata. Lebih dari sekadar angka, indikator ini mencerminkan perubahan positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kualitas infrastruktur, keberlanjutan lingkungan hidup, dan terjaminnya layanan publik yang prima. Setiap tujuan pembangunan jangka menengah diurai menjadi sasaran-sasaran yang lebih spesifik. Untuk masing-masing sasaran, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk memantau kemajuan secara sistematis. Dengan indikator dan target yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant*, dan *Time-bound*), masyarakat dapat ikut serta dalam memantau, mengevaluasi, dan mengawasi jalannya pembangunan, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029, target keberhasilan akan dijabarkan secara terperinci, mulai dari *baseline* (kondisi awal), proyeksi target tahunan, hingga target akhir yang ingin dicapai pada

tahun 2029. Proses penetapan target ini disusun berdasarkan data yang valid, analisis mendalam, serta partisipasi multipihak, untuk memastikan bahwa target pembangunan yang ditetapkan bersifat realistis dan relevan dengan kondisi serta potensi Kabupaten Sikka. Dengan demikian, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sikka bukan hanya menjadi bagian dari kerangka formal perencanaan, tetapi merupakan inti dari strategi pembangunan yang terukur dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi wujud keseriusan pemerintah daerah dalam membawa Kabupaten Sikka menuju arah yang lebih maju, inklusif, sejahtera, dan mandiri, dengan kemampuan untuk mengukur setiap capaian secara transparan dan akuntabel. Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2026-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,24	73,37	74,51	75,65	76,79
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	B	BB	BB
3.	Pendapatan Per Kapita	Rp	20.172.000	21.022.000	21.872.000	22.722.000	23.572.000
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,11	4,28	4,44	4,60	4,76
5.	Rasio Gini	Indeks	0,2355	0,2349	0,2344	0,2338	0,233
6.	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas)	Indeks	86	82	78	74	70
7.	Pertumbuhan sektor pertanian	%	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50
8.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B	B	BB	BB	BB
9.	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	%	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80
10.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00
11.	Angka Kemiskinan	Angka	11,13	10,76	10,38	10,00	9,62
12.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,72	74,96	75,20	75,44	75,68
13.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10
14.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00
16.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,38	10,98	11,58	12,18	12,67
17.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	72	76	80	84	86
18.	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta/Orang/Bulan	9,694	9,924	10,155	10,385	10,615
19.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,04	17,61	18,17	18,74	19,20
20.	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	9,60	9,80	10	10,20	10,40
21.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,25	78,75	79,22	79,72	80,12

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
22.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
23.	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60
24.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,35	82,35	84,35	86,35	88,35
25.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,31	139,81	139,31	138,81	138,31
26.	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	Indeks	57,57	57,96	58,35	58,74	59,13
27.	Indeks Kebijakan Publik	Indeks	3,25	3,70	4,00	4,25	4,50
28.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,92	73,93	73,94	73,95	73,96
29.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,04	90,10	90,16	90,22	90,27
30.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	38,73	40,73	42,73	44,73	46,73
31.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	50	60	70	80	90

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sikka tahun 2025-2029, yang terdiri dari seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah dan perangkat daerah. Indikator kinerja daerah adalah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,72	77,72	78,25	78,75	79,22	79,72	80,12
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	141,81	140,81	140,31	139,81	139,31	138,81	138,31
3	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	Indeks	56,79	57,18	57,57	57,96	58,35	58,74	59,13
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,82	73..91	73,92	73,93	73,94	73,95	73,96
5	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
8	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	Persentase	55,69	55,75	55,81	55,87	55,93	55,99	56,05
10	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Angka	99,10	99,12	99,14	99,16	99,18	99,20	99,22
12	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,96	71,10	72,24	73,37	74,51	75,65	76,79
2	Pendapatan Per Kapita	Rp	18.472.000	19.322.000	20.172.000	21.022.000	21.872.000	22.722.000	23.572.000
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,66	3,95	4,11	4,28	4,44	4,60	4,76
4	Rasio Gini	Indeks	0,236	0,236	0,2355	0,2349	0,2344	0,2338	0,233
5	Angka Kemiskinan	Angka	11,89	11,51	11,13	10,76	10,38	10,00	9,62
6	Pertumbuhan sektor pertanian	%	3,25	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,24	74,48	74,72	74,96	75,20	75,44	75,68
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta/Orang/Bulan	9,233	9,463	9,694	9,924	10,155	10,385	10,615
10	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,93	89,99	90,04	90,10	90,16	90,22	90,27
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,87	89,93	89,99	90,04	90,10	90,16	90,22
12	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	3,84	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00
13	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,24	74,48	74,72	74,96	75,20	75,44	75,68
14	Angka Kemisikinan	%	11,89	11,51	11,13	10,76	10,38	10	9,62
15	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB	%	5,21	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80
16	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	0,74	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60
17	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	0,74	1,5	1,8	2,0	2,20	2,40	2,60
18	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
19	Pengeluaran per Kapita	Angka	9,233	9,463	9,694	9,924	10,155	10,385	10,615
20	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,24	74,48	74,72	74,96	75,20	75,44	75,68
21	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	9,2	9,40	9,60	9,80	10,00	10,20	10,40
22	Indeks Desa	Indeks	0,6488	0,6500	0,6555	0,6560	0,6600	0,6666	0,7000
23	Indeks Kesejahteraan Petani	Indeks	37,87	38,37	38,87	39,37	39,87	40,37	40,87
24	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100	100	100	100	100	100	100
26	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	100	100	100	100	100	100	100
27	Pertumbuhan UMKM yang berdaya saing	Angka	2,24	3	3,25	3,50	3,75	4	4
28	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang	%	0	1	2	3	4	5	6
29	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	21,39	26,74	32,09	37,43	42,78	48,13	53,48
30	Pertumbuhan Wirausaha	%	5,8	6,18	10	12	13	14	15
31	Persentase Koperasi Aktif	%	69,52	74,33	79,14	83,96	88,77	93,58	100
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	%	5,21	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	3,84	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00
4	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	9,20	9,40	9,60	9,80	10	10,20	10,40
5	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	0,74	1,50	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	34,73	36,73	38,73	40,73	42,73	44,73	46,73
7	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	3,84	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00
8	Pertumbuhan Sektor Primer	%	3,25	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50
9	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makan Minum	%	5,3	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Angka	43,41	37,48	37,65	38,07	38,33	38,41	38,66
11	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	8,6	8,7	9,82	10,43	11,08	11,75	12,42
12	Penetapan APBD Tepat Waktu	Opini	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
13	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,84	2,84	2,84	2,87	2,90	3,00	3,00
14	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	51,64	54,00	55,34	57,84	60,44	62,84	65,34
15	Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Pendidikan	%	20	20	20	20	20	20	20
16	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	41,42	47,97	50,87	53,77	56,67	59,57	62,47
17	Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Kesehatan	%	10	10	10	10	10	10	10
18	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56,56	66,03	67,13	68,23	69,33	70,43	71,53
19	Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Infrastruktur	%	25	25	25	25	25	25	25
20	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	49,35	58,83	60,33	61,83	63,33	64,83	66,33
21	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Opini	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
22	Persentase Penyerapan Anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase Tindak lanjut Temuan BPK yang Ditindaklanjut	%	100	100	100	100	100	100	100
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	B	B	B	BB	BB
2	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,28	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,02	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00
4	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B	B	B	B	BB	BB	BB
5	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas)	Indeks	90	90	86	82	78	74	70
6	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	66	68	72	76	80	84	86
7	Indeks Profesionalitas ASN		76,35	78,35	80,35	82,35	84,35	86,35	88,35
8	Indeks Kebijakan Publik	Indeks	2,28	2,75	3,25	3,70	4,00	4,25	4,50
9	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	0	40	50	60	70	80	90
10	Rata-Rata Kepuasan Pelanggan	%	88	90	92	93	95	95	95
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,01	16,47	17,04	17,61	18,17	18,74	19,20
12	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,22	9,78	10,38	10,98	11,58	12,18	12,67
13	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
14	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,46	96,46	96,50	96,50	97,50	97,50	98,00
15	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	80	88,24	89,14	89,35	89,50	89,70	89,80
16	Persentase Capaian Aksi HAM	%	11,7	43	50	52	58	60	62
17	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
19	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Infrastruktur (Infrastructure)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)
20	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	34,63	40	45	50	55	60	65
21	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	44	55	65	75	85	90	95
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)	%	96,12	96,15	96,17	96,20	96,22	96,25	96,18

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)	%	90,76	90,81	90,86	90,91	90,96	91,01	91,06
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	7,98	8,74	9,51	10,27	11,03	11,79	12,56
4	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	75,67	81,23	86,79	92,35	97,91	98,00	98,33
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
1	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	Angka	421	421	421	421	421	421	421
2	Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	Angka	33	33	33	33	33	33	33
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	71	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	79	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	82	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	%	78	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	%	98	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	%	48	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	%	105	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	%	19	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	%	34	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	52	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	%	107	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	%	98	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	%	0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	56,41	56,91	57,40	57,89	58,39	58,88	59,13
2	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	65,36	65,36	67,44	69,53	71,61	73,69	75,78
3	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	%	99,26	99,29	99,33	99,37	99,41	99,44	99,48
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	51,03	51,28	51,52	51,77	52,02	52,26	52,51
5	Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	%	49,09	49,15	49,20	49,25	49,30	49,35	49,40
6	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	54,17	54,23	54,57	55,14	55,70	56,27	56,50
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	8	14	18	21	24	27	30
2	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	0	0	0,0097	0,0099	0,0102	0,0105	0,0108
3	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh)	Angka	19.681	19.681	19.387	18.926	18.455	17.974	17.483
4	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	24,08	24,07	23,64	23,01	22,37	21,72	21,50
5	Jumlah Rumah Keseluruhan	Angka	81.750	81.750	81.997	82.244	82.491	82.738	82.984
6	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani	Angka	14	14	18	21	24	27	30
7	Persentase Pelanggan Listrik	%	87,00	87,00	87,35	87,70	88,04	88,38	88,72
8	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	60.693	60.693	60.987	61.448	61.919	62.400	62.891
9	Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0	0	18,3	36,7	55,0	73,3	90
10	Persentase Jumlah KK yang mendiami RLH	%	74,24	74,24	74,38	74,71	75,06	75,42	75,79
11	Jumlah Sambungan Rumah Air Minum	Angka	21.717	21.717	22.217	22.217	23.217	23.217	24.217
12	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0,89	1,58	3,43	4,74	6,22	7,96	10,09

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Persentase SR Air Minum	%	26,57	26,57	27,09	27,62	28,15	28,67	29,18
14	Persentase Penurunan RTLH MBR diluar Kawasan Permukiman Kumuh	%	100	100	80	60	40	20	0
15	Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	%	0,36	0,36	0,46	0,54	0,62	0,70	0,77
16	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang Ditangani	Ha	145,66	145,66	0,0097	0,0099	0,0102	0,0105	0,0108
17	Jumlah Pelanggan Listrik	Angka	71.126	71.126	71.626	72.126	72.626	73.126	73.626
18	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 HA yang ditangani	%	0	0	18,3	36,7	55,0	73,3	90
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	7,8	14	13,5	13	12,5	12	11,5
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	600	600	600	600	600	600	600
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	75	76	78	80	82	85
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.425	800	700	600	500	400	300
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	600	600	600	600	600	600	600
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								
1	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	%	0,38	0,88	1,38	1,88	2,38	2,88	3,38
2	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	%	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	%	4,10	4,23	4,36	4,49	4,62	4,75	4,88
4	Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								
1	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri	%	0,3	0,35	0,41	0,46	0,52	0,57	0,62
3	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar neger	%	3,72	3,97	4,21	4,46	4,70	4,95	5,20
4	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	27,80	28,00	28,20	28,40	28,60	28,80	29,00
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								
1	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	Ton	0	0	20	22	22	22	22
2	Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	Unit	1	1	1	1	1	1	1
3	Persentase pengawasan keamanan pangan	%	25,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
4	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergisi Seimbang	Angka	1	1	1	1	1	1	1
5	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan	Angka	1	1	1	1	1	1	1
6	Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Angka	1	1	1	1	1	1	1
7	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								
1	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	3	3	3	3	3	3	3
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								
1	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota	Surat Keputusan	3	4	5	7	9	10	10
2	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	1	1	1
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	67,60	67,62	67,63	67,64	67,65	67,66	67,67
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,72	93,73	93,74	93,75	93,76	93,77	93,78
5	Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Berada di Daerah	Orang	0	0	0	2	4	4	0
6	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,33	62,48	62,49	62,50	62,51	62,52	62,53
7	Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani	%	9.028,80	9.928,38	10.126,95	10.329,49	10.536,08	10.746,80	10.961,74
8	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	65	12	13	14	15	16	17
9	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan	17	25	25	25	27	27	28
10	Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diiterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	Usaha/Kegiatan	139	60	60	59	60	57	57
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	9	1	1	1	1	1	1
2	Perekaman KTP elektronik	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	87,74	87,40	87,46	87,52	87,58	87,64	87,70
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	40,76	40,80	40,84	40,88	40,92	40,96	41,00
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
1	Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif Dan Pemberdayaan	Angka	0	18	36	54	72	90	108
2	Jumlah Desa Tertinggal Yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun	Angka	46	32	30	25	20	15	10
3	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Angka	181	181	181	181	181	181	181
4	Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun	Angka	82	76	65	61	55	50	45
5	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Di Desa Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas Dan Diberdayakan	Angka	0	18	36	54	72	90	108
6	Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Berjalan Dikurangi Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Sebelumnya	Angka	1	1	1	1	1	1	1
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
1	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptove Prevalance Rate/mCPR)	Angka	40	45,11	50,22	55,33	60,44	65,55	70,66
2	Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	24,7	25,54	26,38	27,22	28,06	28,9	29,74

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	Angka	2,18	2,1	2,02	1,94	1,86	1,78	1,7
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								
1	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	%	57,14	42,85	57,14	71,48	85,71	86,50	100
2	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	75,70	62,58	65,20	66,95	71,33	75,70	75,70
3	Penetapan Tarif Angkutan Antar Kota dalam Kabupaten Serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi	%	0	100	100	100	100	100	100
4	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	%	58,22	43,38	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00
5	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	0	50,13	54,79	61,78	69,30	76,81	77,00
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	46,15	67,86	75,00	85,71	90,00	93,33	100
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	39,22	60,00	75,00	82,00	85,00	90,00	95,00
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	78,00	78,35	80,50	84,25	87,35	90,00	92,00
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
1	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kualitas Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset	Unit	51	51	70	264	269	274	279
2	Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Unit	0	15	25	35	45	55	65
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								
1	Presentase Peningkatan Investasi	%	5	5	5	6	7	8	9

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan	0	0	0	1	1	1	1
3	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Angka	0	0	0	1	0	0	0
4	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab / Kota	Angka	80	80	85	90	95	100	105
5	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Data	4	4	4	4	4	4	4
6	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Laporan	0	0	1	1	1	1	1
7	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Angka	0	0	1	0	0	0	0
8	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Kegiatan	80	80	85	90	95	100	105
9	Laporan realisasi penanaman modal	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
10	Konsultasi perizinan penanaman modal	Angka	50	50	60	75	90	115	150
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
1	Persentase Perolehan Prestasi di bidang Olahraga	%	66,6	70,8	75	79,16	80,3	95,8	100
2	Rasio Wirausaha Pemuda	%	1,72	1,76	1,8	1,84	1,88	1,92	1,96
AT	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
AU	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	0,20	0,26	0,31	0,37	0,49	0,71	0,91
AV	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Angka	3	3	3	3	3	3	3
2	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Angka	1	1	1	1	2	2	2
3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Angka	21	21	22	23	24	25	26
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Angka	20	20	30	30	30	30	30
5	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman)	Angka	2	2	2	2	2	2	2
6	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Angka	3	3	3	3	3	3	3
7	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	%	50	50	100	100	100	100	100
8	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Angka	0	0	1	1	1	1	1
9	Penyelenggaran kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Angka	1	1	2	2	2	2	2
10	Pembentukan tim ahli cagar budaya	Angka	0	0	0	0	0	0	0
11	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Angka	0	0	0	0	0	0	0
12	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Angka	0	0	1	1	1	1	1
13	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Angka	0	0	0	0	0	0	0
14	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Angka	0	0	0	0	0	0	0
AW	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	48,66	51,61	54,71	57,23	59,04	61,61	63,42

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	64,25	66,18	68,16	70,21	72,31	74,48	76,72
AX	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	63,73	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	%	0	100	100	100	100	100	100
AY	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
1	Total Produksi Perikanan	Angka	27.625,41	29.974,23	32.523,36	35.271,40	38.226,48	41.398,72	44.800,03
2	Jumlah izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Angka	0	0	1	1	1	1	1
3	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	Angka	118	130	163	168	178	190	205
4	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha dan Akses Iptek dan Informasi/ dan Penguatan Kelembagaan)	Angka	59	60	64	69	74	79	84
5	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	%	0	0	0	0	0	0	0
6	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang diproduksi	Angka	0	0	0	0	0	0	0
AZ	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								
1	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Angka	2	2	1	1	1	1	1
2	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Angka	10	10	12	15	17	18	20

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	30	30	32	35	37	38	40
4	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Angka	2	2	1	1	1	1	1
5	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Angka	6	6	7	8	9	10	11
6	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Angka	8	10	14	18	23	26	29
7	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Angka	35	35	40	45	50	55	60
8	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Angka	45	45	50	55	60	65	70
9	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Angka	139	139	150	160	170	180	190
10	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Angka	4.601	4.601	4.701	4.800	4.900	5.000	5.100
BA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								
1	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan	%	1	1	1	1	1	1	1
2	produktivitas pangan	Ton/Ha	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
BB	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								
1	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	100	100	100
2	Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang Diterbitkan	%	15	15	15	15	15	15	15
3	Persentase Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan	%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4	Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya perda	%	0	50	50	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
BC	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**								
1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	82,31	82,65	83,04	83,80	84,20	84,60	85,00
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	35,11	37,50	40,20	43,15	45,54	48,12	50,50
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
BD	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**								
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi Penyusunannya oleh Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100
BE	**5.01 - PERENCANAAN**								
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	96,60	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
BF	**5.02 - KEUANGAN**								
1	Manajemen Aset	Opini	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Deviasi Realisasi Belanja terhadap total belanja dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Kab/Kota)	Opini	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif
4	Rasio Anggaran Sisa terhadap total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	0,47	0,57	0,97	1,36	1,75	2,15	2,54

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	0,32	0,53	0,85	1,38	1,91	2,76	4,14
BG	**5.03 - KEPEGAWAIAN**								
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	4,81	5,48	6,15	6,82	7,49	8,16	8,83
BH	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22,44	23,11	23,78	24,45	25,12	25,79	26,46
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27,66	28,33	29,00	29,67	30,34	31,01	31,68
BI	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
1	Jumlah Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaporkan	Angka	2	3	5	6	6	6	6
2	Jumlah Inovasi Daerah Yang Dilaporkan	Angka	6	10	12	14	16	18	20
BJ	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**								
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
BK	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
1	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	95,00	95,25	95,50	95,75	96,00	96,25	96,50
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		84,00	84,00	85,00	85,25	85,50	85,75	86,00
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		97,51	97,55	97,60	97,65	97,70	97,75	97,80
4	Persentase Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik Sosial	%	85	85,25	85,50	85,75	86	86,25	86,50
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		83	83,00	85,00	87,00	90,00	95,00	95,00

BAB V
PENUTUP

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menjadi acuan pemimpin dalam membangun daerah Sikka yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Sikka telah menyusun dokumen RPJMD 2025–2029 dengan berlandaskan data serta informasi yang tersedia. Melalui kajian komprehensif terhadap permasalahan daerah dan berbagai isu strategis yang memengaruhi proses pembangunan di wilayah Sikka, dokumen ini memuat arahan mengenai tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam lima tahun mendatang. Selain itu, dokumen ini juga dilengkapi dengan rancangan program-program prioritas sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan daerah lainnya seperti Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Kabupaten Sikka. Dengan berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029, diharapkan dapat tercipta kesinambungan dan keselarasan pembangunan, baik secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar periode kepemimpinan daerah, demi mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

LAMPIRAN

CASCADING RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029

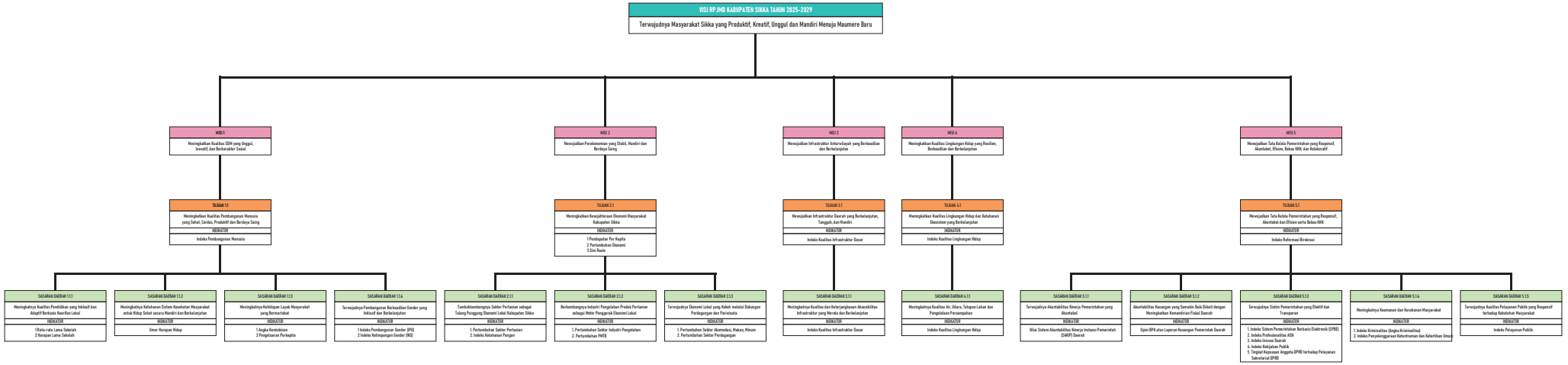

CASCADING MISI 1 RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029

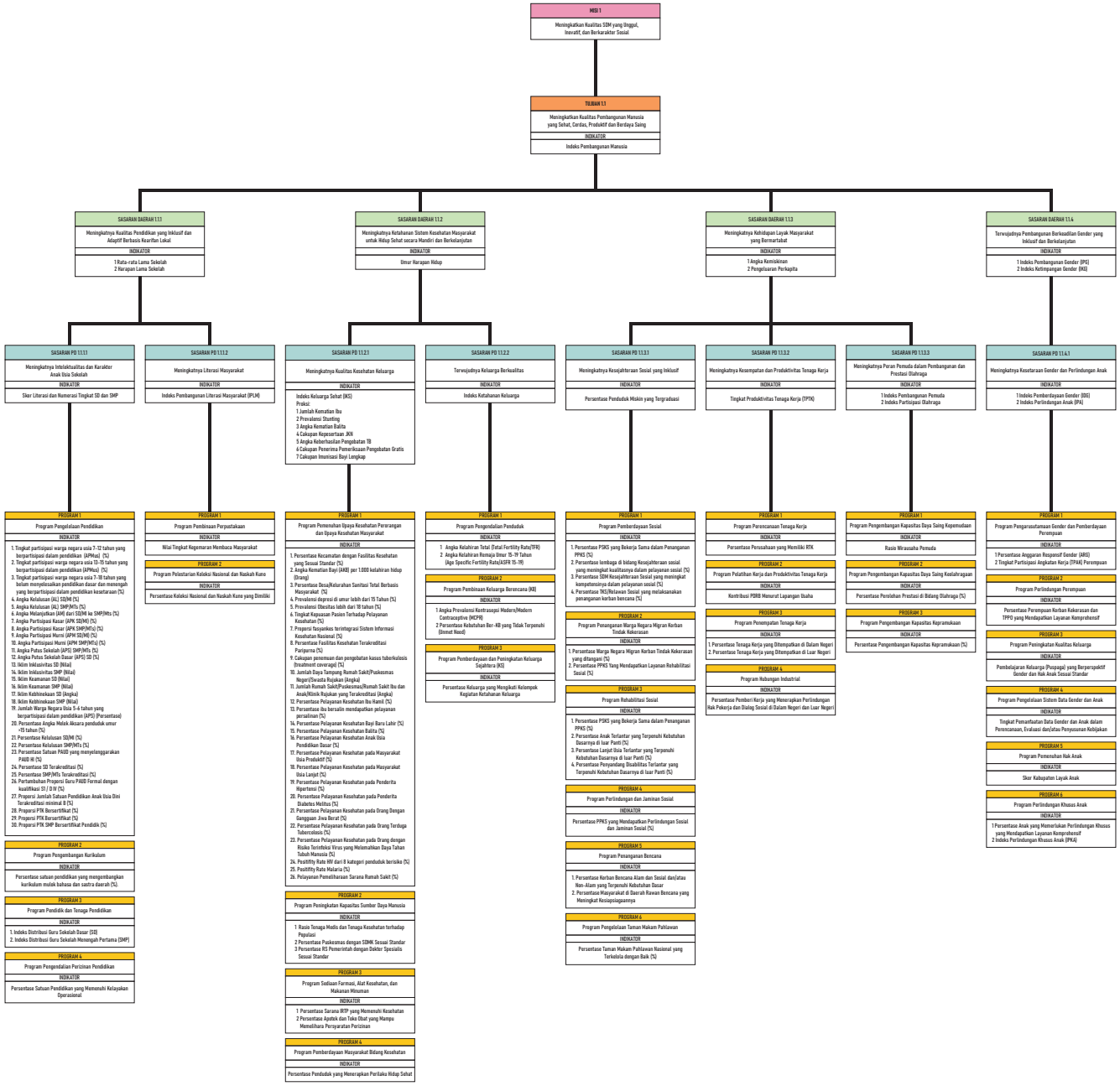

CASCADING MISI 2 RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029

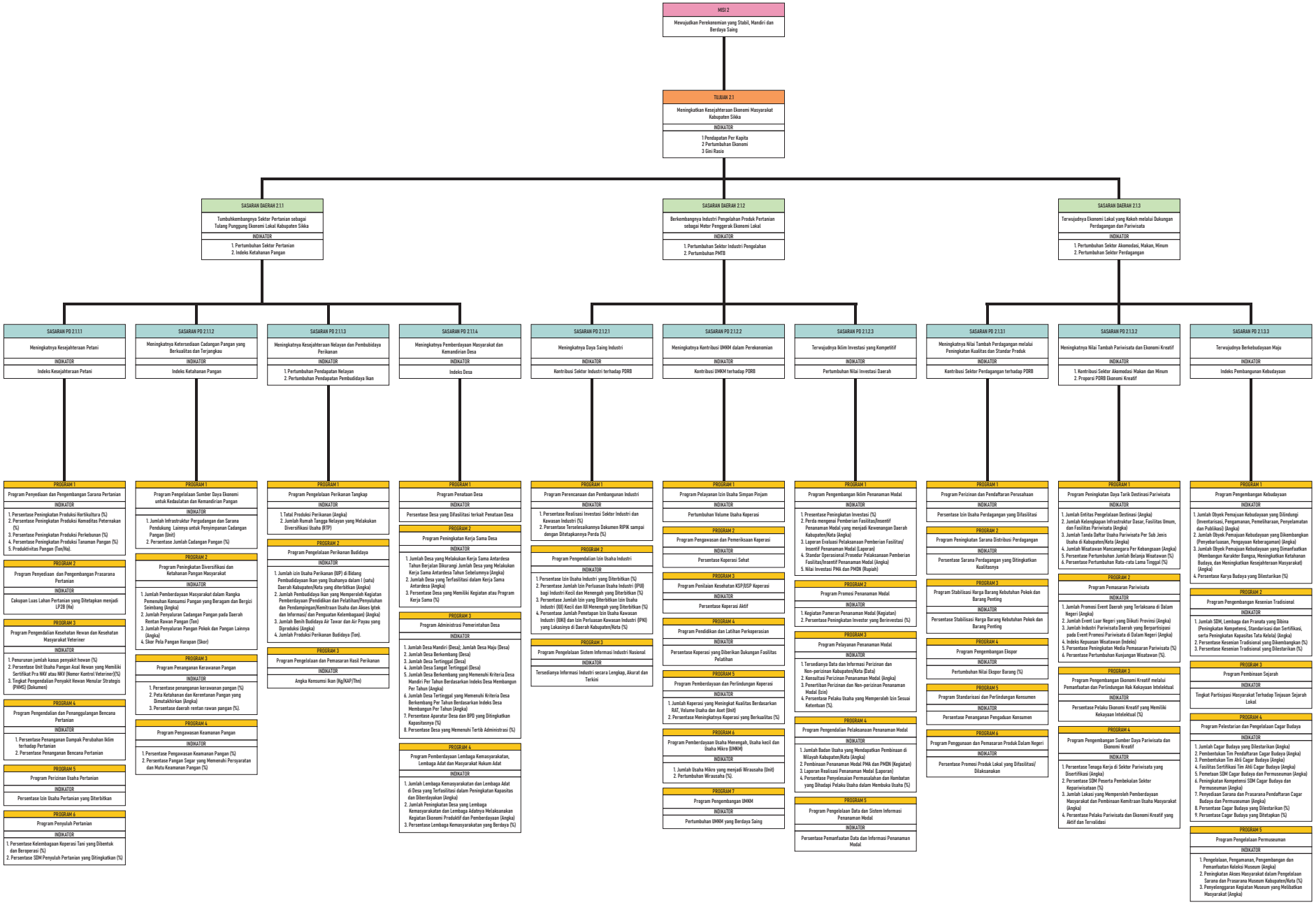

CASCADING MISI 3 RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029

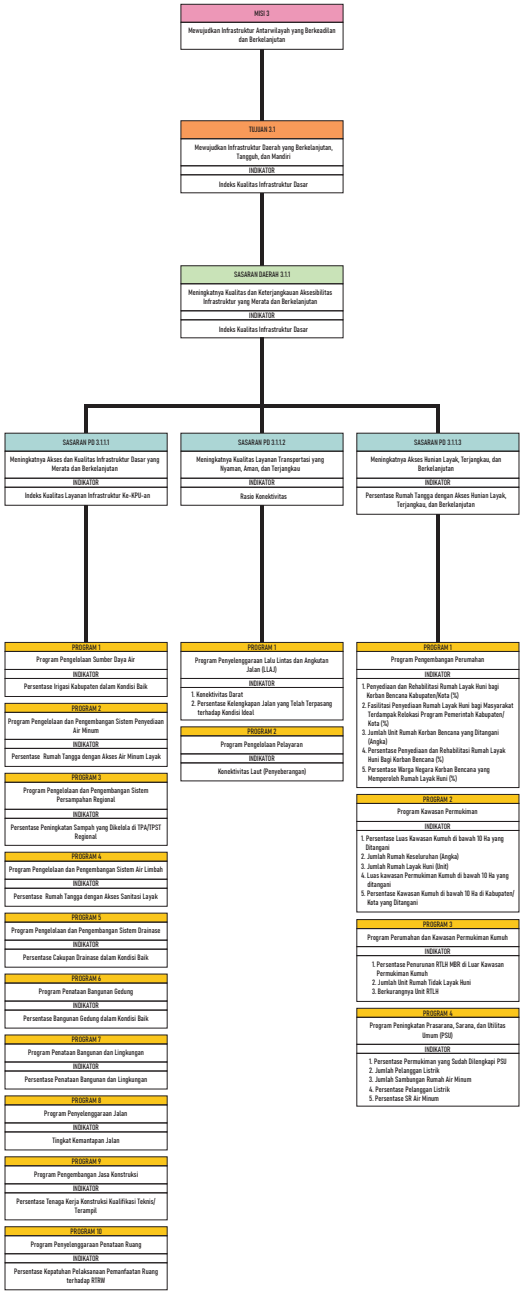

CASCADING MISI 4 RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029

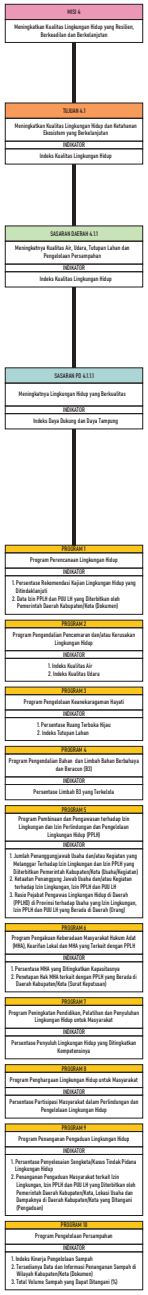

CASCADING MISI 5 RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029

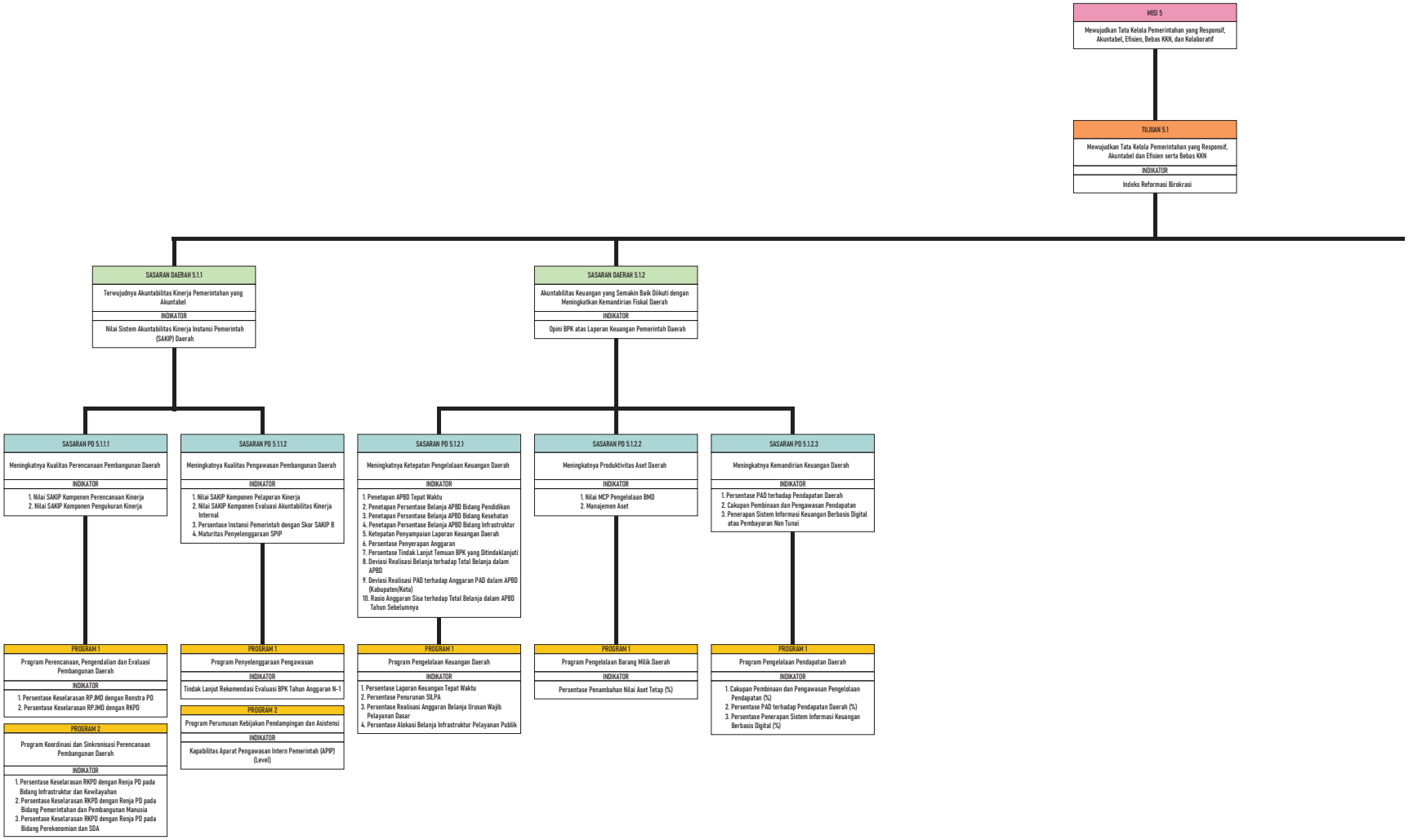

CASCADING MISI 5 RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029 (LANJUTAN)

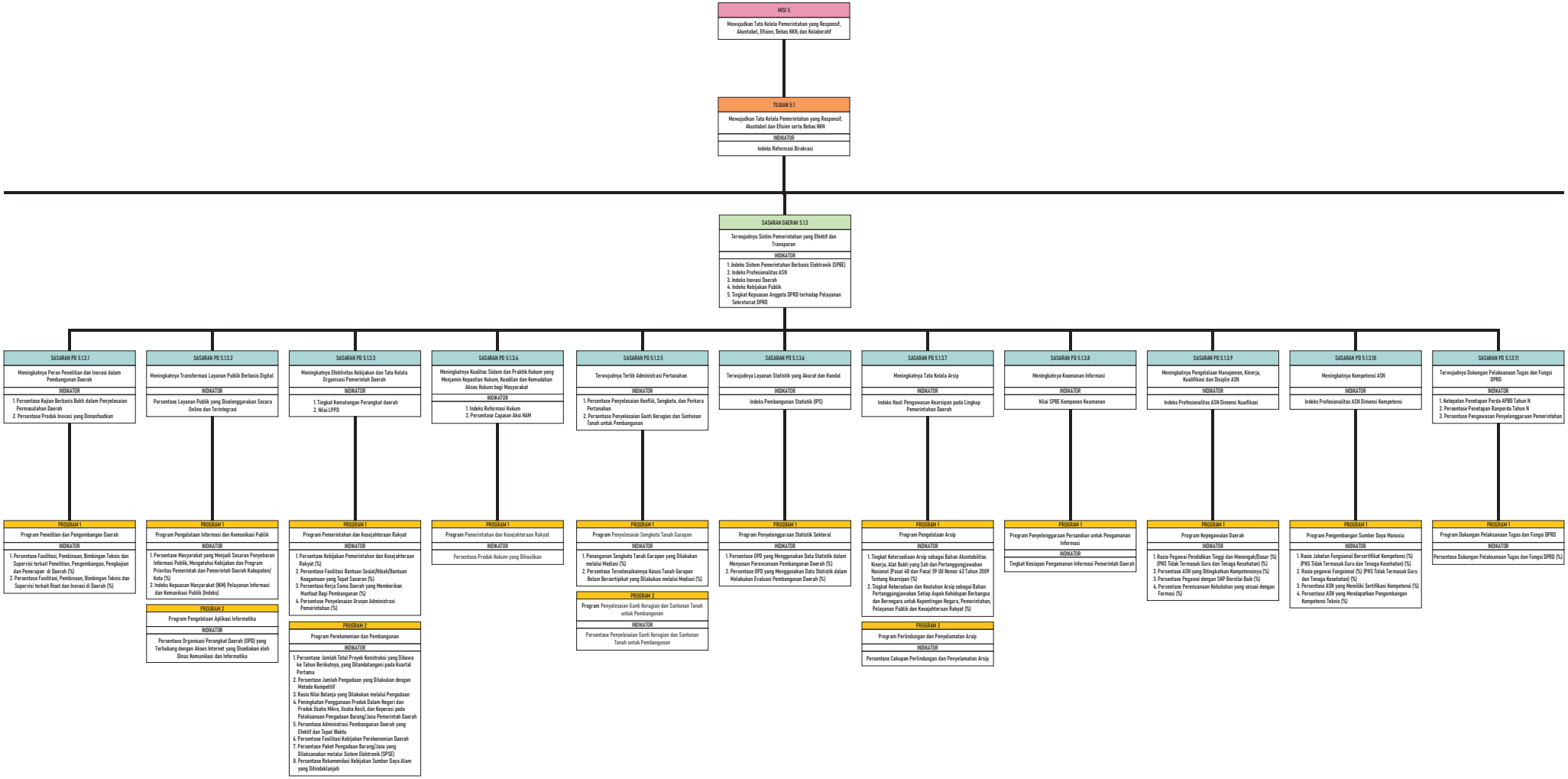
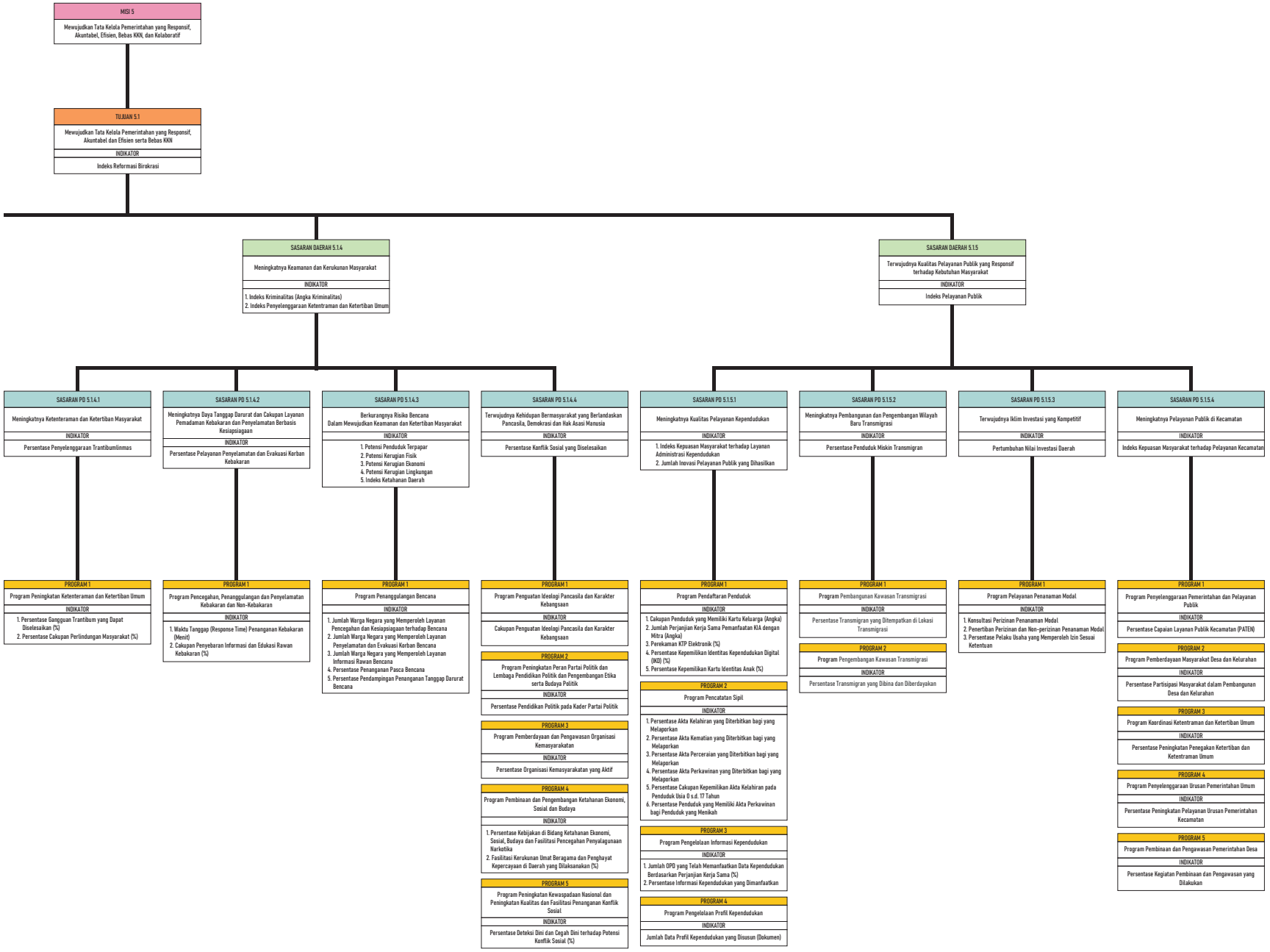
CASCADING MISI 5 RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029 (LANJUTAN)